



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku XXI
RPIW Provinsi Jawa Timur



Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Jawa Timur



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.
- KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. RPIW Provinsi Aceh;
 2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



M. Basuki Hadimuljono



M. BASUKI HADIMULJONO

Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN
Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Yudha Mediawan



Tim Pengarah:

Yudha Mediawan
Rachman Arief Dienaputra
Melva Eryani Marpaung
Kuswardono

Iwan Nurwanto
Benny Hermawan
Hari Suko Setiono
Manggas Rudy Siahaan

Tim Penyusun:

Allien Dyah Lestary
Shahnaz Acrydiena
Satria Taru Winursita
Laella Nuzullia
Firza Violita Putri
Afriadi Anzib
Dian Permatasari
Ahmad Nurhuda
Shinta Alya Nurhanifah
Mohammad Ghani Farkhan

Entatarina Simanjuntak
Dina Rachmayati
Veranita Hadyanti Utami
Charlie Lady B A
Safira Az-Zahra Pramaishma M
Indra Jaya Kusuma
Bunga Adelia S



DAFTAR ISI

SAMBUTAN..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR PETA..... xiii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan.....2

1.3 Urgensi Penyusunan.....3

1.4 Muatan RPIW.....4

1.5 Manfaat RPIW.....5

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.....5

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN..... 7

2.1 Kebijakan Penataan Ruang.....7

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)7

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa dan Bali.....9

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur.....10

2.1.4 Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Gerbangkertosusila (GKS)12

2.2 Kebijakan Sektor13

2.2.1 Visi Indonesia 2045.....13

2.2.2 RPJPN Tahun 2025 -2045.....14

2.2.3 RPJMN Tahun 2020-2024.....15

2.2.4 Proyek Strategis Nasional (PSN).....17

2.2.5 RIPIN Tahun 2015-203518

2.2.6 RIPPARNAS Tahun 2010-2025.....18

2.2.7 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 201919

2.2.8 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.....20

2.2.9 Visium PUPR 203021

2.2.10 Rencana Strategi Kementerian PUPR Tahun 2020-202422

2.2.11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.....23

2.3 Agenda Global.....23

2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....25

2.5 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas.....32

BAB 3 PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH 35

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan.....35

3.1.1 Profil Administrasi.....35

3.1.2 Profil Topografi.....36

3.1.3 Profil Geologi.....37

3.1.4 Profil Klimatologi.....37

3.1.5 Profil Hidrologi.....38

3.1.6 Jasa Ekosistem.....39

3.1.7 Tutupan Lahan.....40

3.1.8 Kerawanan Terhadap Bencana.....41

3.2 Profil Demografi.....53

3.2.1 Profil Kependudukan (Jumlah dan Kepadatan Penduduk).....53

3.2.2 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....56

3.2.3 Pengangguran.....56

3.2.4 Kemiskinan.....57

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....58

3.3 Profil Ekonomi.....58

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)58

3.3.2 Pendapatan Per Kapita.....59

3.3.3 Sektor Ekonomi Unggulan.....61

3.3.4 Perkembangan Investasi.....67

3.3.5 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).....70

3.4 Profil Sosial Budaya.....72

3.4.1 Cagar Budaya.....72

3.4.2 Sebaran Masyarakat Adat.....73

3.5 Profil Interaksi Antar Kawasan75

BAB 4 PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR 81

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air.....81

4.1.1 Infrastruktur Penyediaan Air Baku.....81

4.1.2	Infrastruktur Penyediaan Irigasi.....	82
4.1.3	Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air.....	84
4.1.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas.....	87
4.2	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	90
4.2.1	Infrastruktur Jaringan Jalan.....	90
4.2.2	Infrastruktur Jembatan.....	91
4.2.3	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas.....	93
4.3	Profil dan Kinerja Infrastruktur Pemukiman.....	95
4.3.1	Infrastruktur Air Minum.....	95
4.3.2	Infrastruktur Sanitasi.....	97
4.3.3	Kawasan Kumuh.....	102
4.3.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur Pemukiman Prioritas.....	102
4.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan.....	104
4.4.1	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	104
4.4.2	<i>Backlog</i> Perumahan.....	106
4.5	Profil Infrastruktur Non PUPR.....	107
4.5.1	Infrastruktur Perhubungan.....	107
4.5.2	Infrastruktur Jaringan Energi.....	107
4.5.3	Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi.....	107
BAB 5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		111
BAB 6 SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH		131
6.1	Proyeksi Pertumbuhan	131
6.1.1	Proyeksi Demografi.....	131
6.1.2	Proyeksi Ekonomi.....	132
6.1.3	Keberlanjutan Lingkungan.....	138
6.2	Visi dan Strategi.....	139
6.2.1	Perumusan Visi Wilayah.....	140
6.2.2	Penyusunan Strategi Fokus Industri Pengolahan.....	141
6.2.3	Penyusunan Strategi Fokus Pertanian Tanaman Pangan.....	145
6.2.4	Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata Alam dan Budaya.....	151
6.2.5	Perumusan Strategi Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan.....	156
6.3	Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan).....	161
6.3.1	Penentuan Kawasan Prioritas.....	161
6.3.2	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas.....	168
BAB 7 ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		171
7.1	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah.....	171
7.1.1	Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Timur	172
7.1.2	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri.....	188
7.1.3	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian.....	196
7.1.4	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata.....	212
7.1.5	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan.....	261
7.2	Analisis Keterpaduan Infrastruktur.....	284
BAB 8 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		299
8.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	301
8.1.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air.....	301
8.1.2	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	318
8.1.3	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman	326
8.1.4	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan	348
8.2	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur.....	351
8.2.1	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri.....	352
8.2.2	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian.....	354
8.2.3	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata.....	356
8.2.4	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan.....	360
BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW		365
9.1	Latar Belakang.....	365
9.2	Tujuan.....	365
9.3	Jenis Pemantauan dan Evaluasi.....	366

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Jawa Timur	19
Tabel 2.2	Target Rencana Strategi Kementerian PUPR	23
Tabel 2.3	Arahan Agenda Global	24
Tabel 2.4	Rumusan Arahan Kebijakan di Provinsi Jawa Timur	27
Tabel 2.5	Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR di Jawa Timur	33
Tabel 3.1	Profil Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur	38
Tabel 3.2	Potensi CAT di WS Brantas dan WS Bengawan Solo	39
Tabel 3.3	Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Timur	40
Tabel 3.4	Gunung Berapi di Provinsi Jawa Timur	43
Tabel 3.5	Daerah Terdampak Kekeringan di Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2012-2022	53
Tabel 3.7	Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	54
Tabel 3.8	Jumlah Pengangguran dan TPT di Provinsi Jawa Timur	56
Tabel 3.9	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur	57
Tabel 3.10	Pendapatan Per Kapita Berdasarkan PDRB ADHB 2018-2022	60
Tabel 3.11	Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Menurut Negara Asal di Jawa Timur Tahun 2022	62
Tabel 3.12	Negara Tujuan dan Komoditas Utama Ekspor Jawa Timur	62
Tabel 3.13	Komoditas Unggulan di Jawa Timur	64
Tabel 3.14	Komoditas Unggulan di Jawa Timur	65
Tabel 3.15	Kapasitas Fiskal Daerah Jawa Timur	71
Tabel 3.16	Cagar Budaya di Jawa Timur	73
Tabel 3.17	Desa Adat dan Peninggalan Bersejarah di Provinsi Jawa Timur	75
Tabel 3.18	Interaksi Antarkawasan di Jawa Timur	76
Tabel 4.1	Infrastruktur Bendungan di Jawa Timur	82
Tabel 4.2	Luasan LP2B Kabupaten/Kota Jawa Timur	83
Tabel 4.3	Luasan LSD Kabupaten/Kota di Jawa Timur	83
Tabel 4.4	Status Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas	87
Tabel 4.5	Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur	90
Tabel 4.6	Status Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas	93
Tabel 4.7	Capaian Akses Air Minum di Jawa Timur	96
Tabel 4.8	Capaian Akses Sanitasi di Jawa Timur	97
Tabel 4.9	TPA di Jawa Timur	98
Tabel 4.10	Pelayanan TPA di Jawa Timur	100
Tabel 4.11	Kawasan Kumuh di Jawa Timur	102
Tabel 4.12	Status Infrastruktur Permukiman Prioritas	103
Tabel 4.13	RTLH di Jawa Timur	104
Tabel 4.14	<i>Backlog</i> Perumahan di Jawa Timur	106
Tabel 5.1	Isu Strategis Fokus Industri Pengolahan	114
Tabel 5.2	Isu Strategis Fokus Pertanian Tanaman Pangan	118
Tabel 5.3	Isu Strategis Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan	122
Tabel 5.4	Isu Strategis Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	127
Tabel 6.1	Proyeksi PDRB Pertanian di Jawa Timur	134
Tabel 6.2	Proyeksi PDRB Pariwisata di Jawa Timur	136
Tabel 6.3	Proyeksi Pertumbuhan Kawasan (dalam triliun rupiah)	137
Tabel 6.4	Proyeksi Pertumbuhan Sektor Unggulan (dalam triliun rupiah)	138
Tabel 6.5	Jasa Ekosistem KSPN Jawa Timur	139
Tabel 6.6	Analisis Pestle (Makro) Fokus Industri Pengolahan	141
Tabel 6.7	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri Pengolahan	142
Tabel 6.8	Analisis SWOT Fokus Industri Pengolahan	144
Tabel 6.9	Analisis Pestle (Makro) Fokus Pertanian Tanaman Pangan	146
Tabel 6.10	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian Pangan	147
Tabel 6.11	Analisis SWOT Fokus Pertanian Pangan	149
Tabel 6.12	Analisis Pestle (Makro) Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan	152
Tabel 6.13	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan	153
Tabel 6.14	Skoring <i>Strengths</i> dan <i>Weaknesses</i> Fokus Pariwisata	154
Tabel 6.15	Skoring <i>Opportunities</i> dan <i>Threats</i> Fokus Pariwisata	155
Tabel 6.16	Analisis Pestle (Makro) Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	157
Tabel 6.17	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	158
Tabel 6.18	Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan	160
Tabel 6.19	Parameter Penilaian Fokus Industri	163
Tabel 6.20	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Industri	163

Tabel 6.21	Parameter Penilaian Fokus Pertanian.....	164
Tabel 6.22	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pertanian.....	165
Tabel 6.23	Parameter Penilaian Fokus Pariwisata.....	165
Tabel 6.24	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata	166
Tabel 6.25	Parameter Penilaian Fokus Perkotaan.....	167
Tabel 6.26	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Kawasan Perkotaan	167
Tabel 6.27	Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas	168
Tabel 7.1	Bendungan Konstruksi dan Rencana di Jawa Timur Hingga 2034.....	173
Tabel 7.2	Waktu Tempuh Lintas Utama Jawa Timur.....	173
Tabel 7.3	Waktu Tempuh Lintas Perkotaan Jawa Timur	174
Tabel 7.4	Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	175
Tabel 7.5	Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Menurut Kategori Kota.....	176
Tabel 7.6	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	176
Tabel 7.7	Proyeksi Penyediaan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	178
Tabel 7.8	Proyeksi Timbunan Air Limbah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	179
Tabel 7.9	Proyeksi Layanan Air Limbah Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	180
Tabel 7.10	Timbunan Sampah Rumah Tangga Menurut Kategori Kota.....	183
Tabel 7.11	Proyeksi Timbunan Sampah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	183
Tabel 7.12	Proyeksi Layanan Persampahan Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	184
Tabel 7.13	Proyeksi Kepemilikan Rumah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	185
Tabel 7.14	Proyeksi Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Timur 2022-2034.....	187
Tabel 7.15	Okupansi Kawasan Industri di Gerbangkertosusila Plus.....	189
Tabel 7.16	Proyeksi Kebutuhan Air Industri.....	190
Tabel 7.17	Bangunan Pantai untuk Daya Rusak Air yang Sudah Tertangani di GKS Plus..	191
Tabel 7.18	Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR.....	193
Tabel 7.19	Proyeksi LHRT Akibat Industri.....	194
Tabel 7.20	Sebaran Lahan Pertanian Gerbangkertosusila Plus.....	197
Tabel 7.21	Desa Rawan Kekeringan di GKS Plus	198
Tabel 7.22	Target Pelayanan Air Baku Irigasi Gerbangkertosusila Plus	199
Tabel 7.23	Kebutuhan Air Baku Irigasi Gerbangkertosusila Plus.....	200
Tabel 7.24	Sebaran Lahan Pertanian Bromo Tengger Semeru.....	201
Tabel 7.25	Luasan LP2B dan Daerah Irigasi DPP BTS.....	201
Tabel 7.26	Target Pelayanan Air Baku Irigasi DPP BTS	202
Tabel 7.27	Proyeksi Kebutuhan Air Baku DPP BTS.....	202
Tabel 7.28	Sebaran Lahan Pertanian Selingkar Ijen.....	203
Tabel 7.29	Luasan Kekeringan di masing-masing Kabupaten/Kota Selingkar Ijen.....	204
Tabel 7.30	Target Pelayanan Air Baku Irigasi Selingkar Ijen	205
Tabel 7.31	Kebutuhan Air Baku Irigasi Selingkar Ijen.....	205
Tabel 7.32	Sebaran Lahan Pertanian Madura dan Kepulauan.....	206
Tabel 7.33	Luasan Kekeringan di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan.....	207
Tabel 7.34	Luasan Banjir di Madura dan Kepulauan.....	208
Tabel 7.35	Target Pelayanan Air Baku Irigasi Madura dan Kepulauan	209
Tabel 7.36	Kebutuhan Air Baku Irigasi Madura dan Kepulauan.....	209
Tabel 7.37	Infrastruktur penyedia air baku Madura dan Kepulauan.....	209
Tabel 7.38	Sebaran Lahan Pertanian Selingkar Wilis.....	210
Tabel 7.39	Target Pelayanan Air Baku Irigasi Selingkar Wilis.....	211
Tabel 7.40	Kebutuhan Air Baku Irigasi Selingkar Wilis.....	212
Tabel 7.41	Wilayah Prioritas Perlindungan di Masing-Masing Kabupaten	213
Tabel 7.42	Sebaran Sabo Dam DPP BTS.....	218
Tabel 7.43	Kondisi Jalan Nasional di DPP BTS yang mempunyai VCR > 1.....	218
Tabel 7.44	Pergerakan antar Kabupaten di DPP BTS.....	221
Tabel 7.45	Proyeksi LHRT di Ruas Jalan Nasional.....	222
Tabel 7.46	Layanan Perpipaan DPP BTS.....	225
Tabel 7.47	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan BTS.....	227
Tabel 7.48	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaan BTS.....	227
Tabel 7.49	Capaian Akses Sanitasi.....	228
Tabel 7.50	Sebaran IPLT di DPP BTS.....	229
Tabel 7.51	Kepadatan Penduduk di masing-masing Kecamatan	229
Tabel 7.52	Proyeksi Timbunan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan.....	230
Tabel 7.53	Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota	231
Tabel 7.54	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	232
Tabel 7.55	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah BTS.....	232
Tabel 7.56	Proyeksi Timbunan Sampah Tertangani BTS.....	232
Tabel 7.57	Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 1 Selingkar Ijen	237
Tabel 7.58	Proyeksi LHRT di Ruas Jalan Nasional Selingkar Ijen.....	240
Tabel 7.59	Layanan Perpipaan di Kawasan Selingkar Ijen.....	243
Tabel 7.60	Capaian Akses Air Minum Selingkar Ijen.....	243

Tabel 7.61	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaan Ijen.....	243
Tabel 7.62	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Ijen.....	243
Tabel 7.63	Capaian Akses Sanitasi Selingkar Ijen	244
Tabel 7.64	Sebaran IPLT di Selingkar Ijen.....	245
Tabel 7.65	Kepadatan Penduduk di masing-masing Kecamatan	245
Tabel 7.66	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan di Selingkar Ijen.....	245
Tabel 7.67	Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota	246
Tabel 7.68	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	247
Tabel 7.69	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah Kawasan Selingkar Ijen.....	247
Tabel 7.70	Peningkatan Timbulan Sampah Tertangani Kawasan Selingkar Ijen	248
Tabel 7.71	Ruas Jalan dengan VCR>0,8.....	249
Tabel 7.72	Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 1 di Selingkar Wilis.....	252
Tabel 7.73	Proyeksi Penduduk Kawasan Selingkar Wilis.....	253
Tabel 7.74	Layanan SPAM Non PDAM.....	254
Tabel 7.75	Layanan PDAM.....	254
Tabel 7.76	Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan Selingkar Wilis	255
Tabel 7.77	Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani Kab/Kota Selingkar Wilis.....	255
Tabel 7.78	Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani di Kawasan Selingkar Wilis.....	255
Tabel 7.79	Kebutuhan Air Minum Kawasan Selingkar Wilis	256
Tabel 7.80	Capaian Akses Sanitasi Selingkar Wilis.....	257
Tabel 7.81	Sebaran Infrastruktur Sanitasi Selingkar Wilis	257
Tabel 7.82	Kepadatan Penduduk Selingkar Wilis.....	258
Tabel 7.83	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Selingkar Wilis.....	258
Tabel 7.84	Kapasitas TPA di Kabupaten/Kota Selingkar Wilis.....	259
Tabel 7.85	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkar Wilis	260
Tabel 7.86	Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani Lingkar Wilis.....	260
Tabel 7.87	Luas Resiko Banjir Gerbangkertosusila Plus.....	264
Tabel 7.88	Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja.....	265
Tabel 7.89	Capaian Akses Air Minum Perpipaan.....	265
Tabel 7.90	Kapasitas dan Volume Produksi PDAM.....	267
Tabel 7.91	Proyeksi Kebutuhan Air Minum GKS plus.....	267
Tabel 7.92	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaan GKS plus.....	267
Tabel 7.93	Capaian Akses Sanitasi	269
Tabel 7.94	Sebaran Sanitasi	269
Tabel 7.95	Kepadatan Penduduk di Masing-Masing Kecamatan	269
Tabel 7.96	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di Kabupaten/Kota.....	271
Tabel 7.97	Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota	271
Tabel 7.98	Skenario Peningkatan Pengelolaan Persampahan GKS plus.....	272
Tabel 7.99	Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani GKS plus.....	272
Tabel 7.100	Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten/Kota	273
Tabel 7.101	RTLH di GKS Plus	273
Tabel 7.102	Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 0,8.....	275
Tabel 7.103	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	276
Tabel 7.104	Layanan Perpipaan di Kawasan Madura dan Kepulauan	277
Tabel 7.105	Capaian Akses Air Minum.....	277
Tabel 7.106	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Madura & Kepulauan.....	277
Tabel 7.107	Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan Madura dan Kepulauan.....	278
Tabel 7.108	Capaian Akses Sanitasi Madura dan Kepulauan	278
Tabel 7.109	Sebaran IPLT di Madura dan Kepulauan.....	279
Tabel 7.110	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan Madura dan Kepulauan.....	279
Tabel 7.111	Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan.....	280
Tabel 7.112	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan.....	281
Tabel 7.113	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan.....	282
Tabel 7.114	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan	283
Tabel 7.115	Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan	283
Tabel 7.116	Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Gerbangkertosusila Plus.....	284
Tabel 7.117	Keterpaduan Infrastruktur PUPR di DPP BTS	285
Tabel 7.118	Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Selingkar Ijen.....	286
Tabel 7.119	Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Madura dan Kepulauan.....	287
Tabel 7.120	Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Selingkar Wilis	288
Tabel 7.121	Keterpaduan Infrastruktur Prioritas PUPR	289

Tabel 8.1	Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air..	301
Tabel 8.2	Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	318
Tabel 8.3	Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	327
Tabel 8.4	Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan.....	349
Tabel 8.5	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri	352
Tabel 8.6	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pertanian	354
Tabel 8.7	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata	356
Tabel 8.8	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan.....	360

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	3
Gambar 1.2	Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	6
Gambar 2.1	Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah	14
Gambar 2.2	Pembagian Kawasan Prioritas Perpres No. 80 Tahun 2019	20
Gambar 2.3	Visium PUPR 2030	22
Gambar 3.1	Sistem Kota dan Struktur Kota di Provinsi Jawa Timur	36
Gambar 3.2	Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota 2022	42
Gambar 3.3	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi Provinsi Jawa Timur	43
Gambar 3.4	Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur	44
Gambar 3.5	Jumlah Penduduk, TPT, dan TPAK per Kabupaten/Kota Tahun 2022	54
Gambar 3.6	Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	55
Gambar 3.7	Klasifikasi Jumlah Pengangguran Tahun 2020 di Jawa Timur	57
Gambar 3.8	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur	58
Gambar 3.9	PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	59
Gambar 3.10	Tingkat Pendapatan Per Kapita Provinsi Jawa Timur 2022	60
Gambar 3.11	Sektor Unggulan Industri: Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Timur ..	61
Gambar 3.12	Sektor Unggulan Pertanian: Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2022	63
Gambar 3.13	Produksi Tanaman Padi per Kabupaten/Kota (ribu ton)	64
Gambar 3.14	Persebaran Lahan Pertanian dan Perkebunan	65
Gambar 3.15	Grafik Jumlah Wisnus di Indonesia Tahun 2019	66
Gambar 3.16	Sektor Unggulan Pariwisata: Pariwisata Jawa Timur	66
Gambar 3.17	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	67
Gambar 3.18	Kedatangan Wisatawan Berdasarkan Bulan	67
Gambar 3.19	Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur TA 2017-2022	68
Gambar 3.20	Realisasi Investasi 2022 Jawa Timur	68
Gambar 3.21	Realisasi Investasi TW III 2022 Nasional	69
Gambar 3.22	PMDN Jawa Timur Berdasarkan Lapangan Usaha	69
Gambar 3.23	PMA Jawa Timur Berdasarkan Lapangan Usaha	69
Gambar 3.24	Jumlah Proyek dan Investasi PMN Jawa Timur (2017-2021)	70
Gambar 3.25	Indeks Kapasitas Fiskal Jawa Timur Terhadap Nasional 2020-2021	72
Gambar 3.26	Sebaran Cagar Budaya dan Desa Adat di Jawa Timur	73
Gambar 3.27	Sebaran Wilayah Masyarakat Adat di Jawa Timur	75
Gambar 3.28	Interaksi di Koridor Semarang-Surabaya	76
Gambar 3.29	Interaksi di Koridor Yogyakarta-Malang	77
Gambar 3.30	Interaksi di Koridor Bangkalan-Malang	77
Gambar 3.31	Interaksi di Koridor Surabaya-Banyuwangi	78
Gambar 4.1	Indeks Ketersediaan Air	81
Gambar 4.2	Risiko Kekeringan	84
Gambar 4.3	Peta Persebaran Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas	87
Gambar 4.4	Rencana Umum Jaringan Jalan Bebas Hambatan / Jalan Tol	91
Gambar 4.5	Peta Persebaran Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas	93
Gambar 4.6	Sebaran SPAM	96
Gambar 4.7	Sebaran IPAL dan IPLT	98
Gambar 4.8	Peta Persebaran Infrastruktur Permukiman Prioritas	103
Gambar 5.1	Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis	111
Gambar 6.1	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk	131
Gambar 6.2	Proyeksi Pertumbuhan Sektor Industri	132
Gambar 6.3	Sebaran Lahan Pertanian di Jawa Timur	133
Gambar 6.4	Proyeksi Perkembangan Luas Sawah	133
Gambar 6.5	Perkembangan Luas Sawah dan Produksi Padi	134
Gambar 6.6	Pertumbuhan Pariwisata Jawa Timur 2022	136
Gambar 6.7	Kuadran kartesius penentuan strategi fokus industri	145
Gambar 6.8	Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pertanian	151
Gambar 6.9	Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	156
Gambar 6.10	Kuadran kartesius penentuan strategi fokus perkotaan	161
Gambar 6.11	Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur	162
Gambar 6.12	Skenario Pengembangan Provinsi Jawa Timur	170

Gambar 7.1	Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD	182
Gambar 7.2	Isu Sosial dan Ekonomi.....	188
Gambar 7.3	VCR Jalan Nasional Gerbangkertosusila Plus	190
Gambar 7.4	Perubahan Garis Pantai Tuban-Bancar Tahun 2013-2023.....	192
Gambar 7.5	Kinerja Jalan Berdasarkan VCR.....	193
Gambar 7.6	Proyeksi Pergerakan Lalu Lintas	195
Gambar 7.7	Usulan Jalan Lingkar.....	196
Gambar 7.8	Pertanian Gerbangkertosusila Plus.....	197
Gambar 7.9	Wilayah Rawan Kekeringan Gerbangkertosusila Plus	199
Gambar 7.10	Pertanian Bromo Tengger Semeru.....	201
Gambar 7.11	Pertanian Selingkar Ijen.....	203
Gambar 7.12	Rawan Kekeringan di Kawasan Wisata Selingkar Ijen.....	204
Gambar 7.13	Pertanian Madura dan Kepulauan	206
Gambar 7.14	Rawan Kekeringan di Kawasan Madura dan Kepulauan	207
Gambar 7.15	Rawan Bencana Banjir di Madura dan Kepulauan	207
Gambar 7.16	Sebaran Potensi Garam dan Tambang Madura dan Kepulauan.....	208
Gambar 7.17	Pertanian Selingkar Wilis.....	210
Gambar 7.18	Rawan Banjir dan Kekeringan	211
Gambar 7.19	Sebaran Destinasi Wisata DPP BTS.....	214
Gambar 7.20	Rawan Bencana di Kawasan Wisata DPP BTS	215
Gambar 7.21	VCR di Kawasan DPP BTS	216
Gambar 7.22	Sebaran Infrastruktur Permukiman di DPP BTS	217
Gambar 7.23	Kawasan Rawan Bencana Lahar Dingin DPP BTS.....	217
Gambar 7.24	VCR di Kawasan DPP BTS	219
Gambar 7.25	<i>Relevan Road</i> DPP BTS.....	219
Gambar 7.26	Matriks Asal dan Tujuan di Kawasan DPP BTS	220
Gambar 7.27	Proyeksi Penduduk Alami di Kawasan DPP BTS	224
Gambar 7.28	Proyeksi Wisatawan di Kawasan DPP BTS.....	225
Gambar 7.29	Sebaran PDAM di Kawasan DPP BTS.....	226
Gambar 7.30	Layanan SPAM Umbulan.....	226
Gambar 7.31	Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT di DPP BTS	229
Gambar 7.32	Sebaran IPLT dan Kawasan Permukiman	230
Gambar 7.33	Sebaran TPA Eksisting	231
Gambar 7.34	Sebaran Destinasi Wisata Selingkar Ijen.....	234
Gambar 7.35	Rawan Bencana di Kawasan Wisata Selingkar Ijen.....	235
Gambar 7.36	VCR di Kawasan Selingkar Ijen.....	236
Gambar 7.37	Sebaran Infrastruktur Permukiman di Kawasan Selingkar Ijen.....	237
Gambar 7.38	VCR di Kawasan Selingkar Ijen.....	238
Gambar 7.39	<i>Relevan Road</i> Selingkar Ijen	239
Gambar 7.40	Matriks Asal dan Tujuan di Kawasan Selingkar Ijen	240
Gambar 7.41	Proyeksi Penduduk Alami di Kawasan Selingkar Ijen	241
Gambar 7.42	Proyeksi Wisatawan di Kawasan Selingkar Ijen.....	242
Gambar 7.43	Sebaran PDAM di Kawasan Selingkar Ijen.....	243
Gambar 7.44	Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT di Selingkar Ijen	244
Gambar 7.45	Sebaran IPLT dan Kawasan Permukiman	246
Gambar 7.46	Sebaran TPA Eksisting	247
Gambar 7.47	Pariwisata Selingkar Wilis.....	249
Gambar 7.48	Kinerja Jalan Selingkar Wilis.....	250
Gambar 7.49	Infrastruktur Permukiman Selingkar Wilis.....	251
Gambar 7.50	Kinerja Jalan Berdasarkan VCR.....	252
Gambar 7.51	Proyeksi Pergerakan Lalu Lintas	253
Gambar 7.52	Sebaran SPAM.....	254
Gambar 7.53	Sebaran IPLT Selingkar Wilis.....	257
Gambar 7.54	Sebaran TPA Eksisting dan Rencana Selingkar Wilis	260
Gambar 7.55	Sebaran Infrastruktur Permukiman Gerbangkertosusila Plus.....	262
Gambar 7.56	<i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah Gerbangkertosusila Plus.....	262
Gambar 7.57	Jumlah RTLH Gerbangkertosusila Plus.....	263
Gambar 7.58	Rawan Banjir Gerbangkertosusila Plus.....	263
Gambar 7.59	Skema Penanganan Banjir Bengawan Solo Jangka Panjang (2022-2030)....	264
Gambar 7.60	Proyeksi Jumlah Penduduk.....	265
Gambar 7.61	Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Industri.....	265
Gambar 7.62	Sebaran SPAM.....	266
Gambar 7.63	Sebaran IPAL	270
Gambar 7.64	Sebaran IPLT dan Rencana IPLT	270
Gambar 7.65	Sebaran TPA.....	272
Gambar 7.66	VCR di Madura Kepulauan.....	274
Gambar 7.67	Sebaran Infrastruktur Permukiman di Madura dan Kepulauan.....	275

Gambar 7.68 VCR di Kawasan Madura dan Kepulauan..... 275

Gambar 7.69 Proyeksi Penduduk Alami di Madura Kepulauan..... 276

Gambar 7.70 Sebaran SPAM di Madura dan Kepulauan 277

Gambar 7.71 Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT Madura dan Kepulauan..... 279

Gambar 7.72 Sebaran TPA Eksisting Madura dan Kepulauan.....280

Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur300

DAFTAR PETA

Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Provinsi Jawa Timur31

Peta 3.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur45

Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Timur.....46

Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Jawa Timur47

Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Pangan Provinsi Jawa Timur 202248

Peta 3.5 Profil Jasa Ekosistem Ekosistem Air Provinsi Jawa Timur 202249

Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010..... 50

Peta 3.7 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.....51

Peta 3.8 Kerawanan Bencana Provinsi Jawa Timur52

Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.....86

Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur92

Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Timur.....101

Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan105

Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan.....108

Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Jaringan Telekomunikasi.....109



Kawah Ijen, KSPN Ijen-Baluran



Jembatan Suramadu



Pelabuhan Prigi, Kabupaten Trenggalek

BAB 1

PENDAHULUAN

Tersepat dalam logo Provinsi Jawa Timur sebuah pepatah Jawa “*Jer Basuki Mawa Beya*” yang berarti keberhasilan membutuhkan pengorbanan, maknanya menjadi semangat dan tercermin dari kerja keras Pemerintah Daerah dan masyarakat Jawa Timur dalam mewujudkan tujuannya, termasuk juga dalam pengembangan infrastruktur di wilayahnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara langsung terlibat dalam pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah negeri mempunyai kewajiban dalam merealisasikan semua perencanaan yang sudah digariskan dalam kebijakan nasional, oleh karena itu untuk memberikan petunjuk secara teknis, disusunlah Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jawa Timur.

Dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang pokok-pokok yang melatarbelakangi penyusunan RPIW pada setiap wilayah perencanaan di Provinsi Jawa Timur. Dengan cakupan yang meliputi: latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW.

1.1 Latar Belakang

Secara administrasi, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Pulau Jawa yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur data tahun 2022, jumlah penduduknya sebanyak 41.149.974 jiwa dengan kepadatan 857 jiwa/km² (tertinggi keenam nasional).

Provinsi Jawa Timur juga memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan signifikan baik secara regional Pulau Jawa dan nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Timur sebesar Rp 2.730.907,09 Milyar (2022; 13,9% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan 25,2% PDRB Pulau Jawa), dan merupakan kontributor kedua terbesar setelah DKI Jakarta terhadap PDB Nasional dengan industri manufaktur sebagai sektor unggulan. Basis industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur berada di Gerbangkertosusila Plus.

Sektor utama lain yang potensial dan strategis adalah pariwisata nasional seperti pariwisata alam Bromo-Tengger-Semeru, Ijen-Baluran, dan Global *Geopark* Gunung Sewu. Posisi strategis Provinsi Jawa Timur didukung oleh letaknya yang berada pada jantung penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pergerakan barang dan jasa dari wilayah Sumatera dan Jawa menuju timur Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya ASEAN dan Eropa, menjadikannya sebagai pusat logistik nasional maupun internasional. Jawa Timur juga memiliki *hub* internasional yaitu Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, posisi strategis Provinsi Jawa Timur didukung oleh letaknya yang berada pada jantung penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pergerakan barang dan jasa dari wilayah Sumatera dan Jawa menuju timur Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya ASEAN dan Eropa, menjadikannya sebagai pusat logistik nasional maupun

internasional. Jawa Timur juga memiliki hub internasional yaitu Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun Jawa Timur memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat penting secara nasional dan internasional, provinsi ini juga memiliki kendala dan tantangan yang dapat memperlemah posisinya. Kendala dan tantangan tersebut diantaranya: 1) Tingginya resiko bencana. Hampir seluruh daerah di Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana, seperti tsunami dari Samudera Hindia, letusan dari tujuh gunung berapi aktif, serta banjir tahunan dari dua sungai besar, yakni Bengawan Solo dan Brantas. Banjir di provinsi ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan, serta kenaikan muka air laut. Pada musim kemarau, juga terdapat beberapa wilayah yang rawan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan masyarakat; 2) Pemenuhan infrastruktur untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat maupun mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

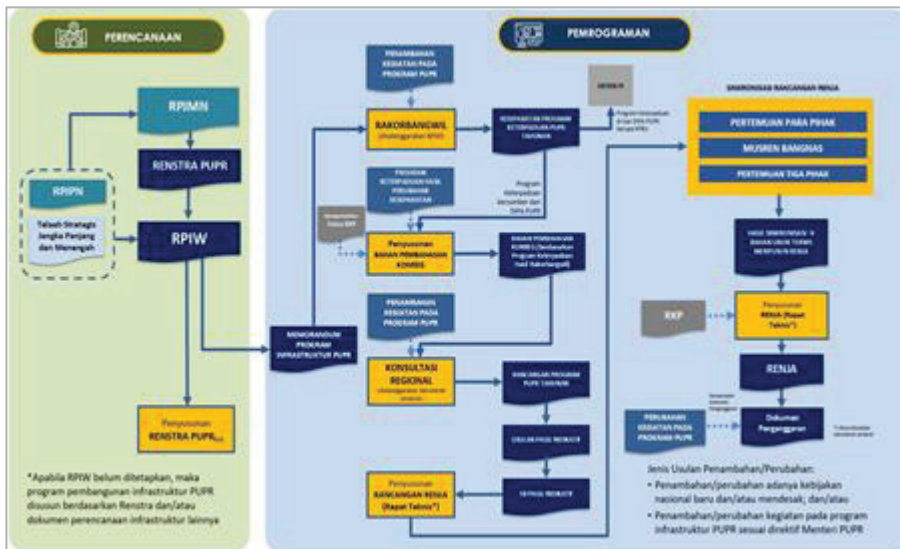
Dengan uraian potensi dan kendala di atas, maka diperlukan suatu perencanaan terintegrasi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran penting Jawa Timur dalam memitigasi dampak risiko bencana lingkungan, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II pada tahun anggaran 2022 melakukan kegiatan penyusunan “Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Jawa Timur” sebagai acuan dalam perencanaan dan pemrograman khususnya infrastruktur PUPR di Jawa Timur.

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam Peraturan Menteri PUPR No. 6 tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPIW diberikan tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

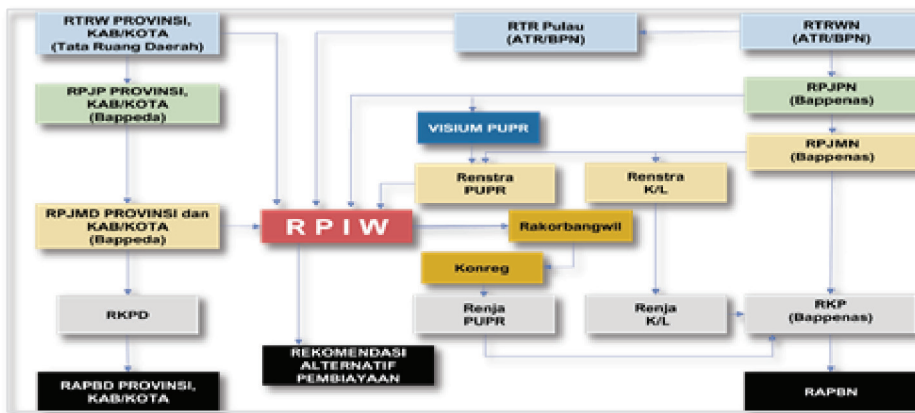
Muatan dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur terdiri atas Arah Kebijakan, Profil Wilayah dan Potensi Daerah, Profil dan Kinerja Infrastruktur, Permasalahan dan Isu Strategis, Skenario Pengembangan Wilayah, Analisis Kebutuhan Infrastruktur, dan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur. Dokumen RPIW telah disusun dengan melibatkan unsur dari kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, sehingga diharapkan dokumen RPIW akan menjadi masukan Rencana Strategis PUPR periode mendatang dan memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rakorbangwil. Dokumen ini akan dilakukan peninjauan dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis.

Dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur merupakan input bagi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan acuan dalam perumusan Memorandum Program Infrastruktur PUPR yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) setiap tahunnya. Memorandum Program Rakorbangwil kemudian dibahas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang menghasilkan rancangan program tahunan Kementerian PUPR.



Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Gambar 1.1 Posisi RPIW dalam Kerangka Peraturan Menteri PUPR tentang Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR



Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunan RPIW Provinsi Jawa Timur, kebijakan dan strategi pada dokumen perencanaan nasional dan daerah menjadi acuan dasar dalam menentukan arah pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut mencakup arahan terkait aspek spasial dan sektoral baik jangka panjang maupun jangka menengah.

1.3 Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan **dengan pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor**. Dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen

perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4 Muatan RPIW

Dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini menguraikan hal-hal pokok dalam 9 (sembilan) bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis yang berisi konteks perencanaan berupa fokus. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam visium PUPR 2030 serta agenda global;
3. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur PUPR dan non-PUPR;
5. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi/keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup); Permasalahan dan Isu Strategis berisi analisa *baseline* berdasarkan profiling, arah kebijakan, dan opsi masa depan yang berbasis fokus dan lokus.
6. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritasasi);
7. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Terdapat 3 manfaat RPIW Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien di Provinsi Jawa Timur;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR, terutama di Provinsi Jawa Timur; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

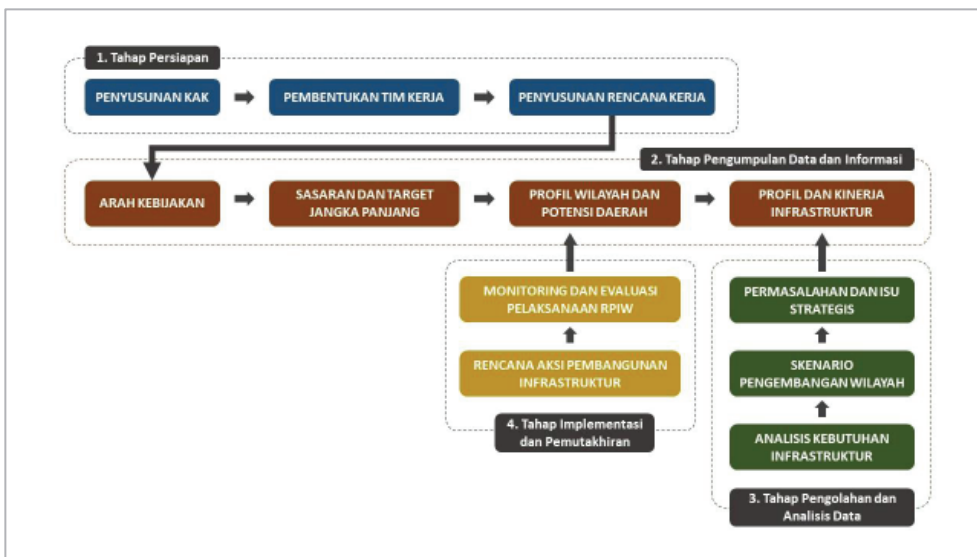
Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan grand strategy masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan grand strategy yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5 FORCES dan IFAS EFAS. Dalam penyusunan skenario juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode multi criteria analysis (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2029. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. Grand strategy yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada bagan berikut.



Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

BAB 2

ARAH KEBIJAKAN

Suatu arah kebijakan sangat diperlukan sebagai panduan dalam mencapai suatu tujuan, dalam bab ini dijelaskan arah kebijakan yang memuat sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global. Juga dalam bab 2 ini berisi tentang uraian kebijakan spasial dan sektoral baik tingkat nasional maupun tingkat daerah yang menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan inilah yang menjadi landasan dalam perumusan skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

2.1 Kebijakan Penataan Ruang

Poin penting dalam kebijakan penataan ruang termaktub dalam landasan hukum: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali (Perpres No. 28 Tahun 2012), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 (Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012). Untuk kebijakan di tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terkait di masing-masing Daerah Tingkat II. Bagian Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota memuat arah kebijakan yang menjadi acuan dan batasan dalam pengembangan wilayah.

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu sistem perkotaan, penguatan konektivitas dan logistik (pengembangan jaringan jalan dan simpul transportasi), wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, serta Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Terdapat 2 sistem perkotaan nasional di Jawa Timur, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) dan PKN Malang. Fungsi dari PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan simpul utama transportasi skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.

Terdapat 14 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, Tulungagung, dan Sumenep. Keempatbelas PKW tersebut berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Sebagai penguatan konektivitas dan logistik, RTRWN menetapkan rencana pengembangan jaringan Jalan Bebas Hambatan (JBH) dan simpul transportasi. Terdapat 17 JBH antar kota di Jawa Timur, yaitu ruas

Mantingan—Ngawi, Ngawi—Kertosono, Kertosono—Kediri, Kertosono—Mojokerto, Mojokerto—Surabaya, Surabaya—Madura, Gempol—Pandaan, Pandaan—Malang, Krian—Legundi—Bunder, Bunder—Manyar, Gempol—Pasuruan, Pasuruan—Probolinggo, Probolinggo—Banyuwangi, Kertosono—Kediri, Mojokerto—Gempol, Singosari—Batu, Malang—Kepanjen.

Simpul transportasi terdiri dari pelabuhan dan bandar udara. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila memiliki *hub* internasional berupa Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda, sedangkan PKN Malang memiliki Bandar Udara Abdulrachman Saleh. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kabupaten Bangkalan, serta Pelabuhan Tanjung Pakis (LIS) di Kabupaten Lamongan. Selain itu, terdapat 5 pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Tanjung Wangi (Kabupaten Banyuwangi), Pelabuhan Gresik (Kabupaten Gresik), Pelabuhan Bawean (Kabupaten Gresik), Pelabuhan Pacitan (Kabupaten Pacitan), dan Pelabuhan Probolinggo/Tanjung Tembaga (Kota Probolinggo).

Terkait pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terdapat 1 Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional yaitu WS Brantas dan 1 WS Lintas Provinsi yaitu WS Bengawan Solo. Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki banyak kawasan lindung, yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai-nilai sejarah yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 31 kawasan lindung di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari: 2 suaka margasatwa, 21 cagar alam, 4 taman nasional, 1 taman hutan raya, dan 3 taman wisata alam.

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (*prime mover*) yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang lebih cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan, dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (*hinterland*). Terdapat 10 kawasan andalan di Jawa Timur yaitu Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Malang dan sekitarnya, Probolinggo—Pasuruan—Lumajang, Tuban—Bojonegoro, Kediri—Tulung Agung—Blitar, Situbondo—Bondowoso—Jember, Madiun dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, Madura dan kepulauan, serta Laut Madura dan sekitarnya. Adapun Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Jawa Timur ada 2 yaitu KSN Gerbangkertosusila dan KSN Kerajaan Majapahit Trowulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTRWN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi **pengembangan pusat-pusat perkotaan** (2 PKN dan 14 PKW) khususnya Metropolitan Gerbangkertosusila serta **pengembangan kawasan-kawasan prioritas** dengan **sektor unggulan industri, pertanian, dan pariwisata** yang didukung oleh **konektivitas dan logistik** yang memadai dengan memperhatikan **keberlanjutan lingkungan**.

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa dan Bali

Cakupan beberapa aspek utama dalam RTR Pulau Jawa-Bali yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Jawa Timur, yaitu tujuan penataan ruang, penguatan konektivitas dan keterpaduan simpul transportasi antarmoda, jaringan energi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Penataan ruang Pulau Jawa-Bali bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Lumbung pangan utama nasional;
- 2) Kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- 3) Pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- 4) Pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan;
- 5) Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
- 6) Pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran;
- 7) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan;
- 8) Pulau Jawa Bagian Selatan yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana; dan
- 9) Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya saing.

Kawasan perkotaan Gerbangkertosusila dan Malang sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan pertanian, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Strategi operasionalisasi untuk mendukung fungsi tersebut adalah dengan menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan, serta meningkatkan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan.

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali terdapat arahan untuk memperkuat konektivitas khususnya pada jaringan jalan lintas utara, tengah, dan selatan Pulau Jawa. Jaringan jalan lintas utara menghubungkan Merak—Jakarta Karawang—Cirebon—Brebes—Batang—Semarang—Pati—Tuban—Lamongan—Gresik—Surabaya—Probolinggo—Banyuwangi. Lintas tengah terdiri dari 3 (tiga) ruas, yaitu: Bogor—Sukabumi—Cianjur—Bandung—Ciamis—Banjar—Wangon, Rawalo—Sampang—Buntu, dan Secang—Bawen—Surakarta—Sragen—Ngawi—Kertosono—Mojokerto—Krian—Waru. Lintas selatan menghubungkan Labuan—Bayah—Palabuhanratu—Pangandaran—Cilacap—Kebumen—Purworejo—Yogyakarta—Pacitan—Trenggalek—Tulungagung—Blitar—Lumajang—Jember—Banyuwangi. Selain itu, ditetapkan juga jalur *feeder* utara—selatan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Hal lain yang ditekankan dalam RTR Pulau Jawa-Bali terkait konektivitas adalah keterpaduan antarmoda baik darat, laut, dan udara. Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api antarkota, jalur kereta api perkotaan, dan pelabuhan penyeberangan, serta menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara.

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Jawa Timur, ditetapkan beberapa sistem jaringan transmisi minyak dan gas bumi, yaitu Semarang—Gresik, Pagerungan—Porong, Porong—Surabaya, Laut Jawa—Gresik, Tuban—

Gresik, Surabaya—Kertosono—Kediri, Kertosono—Madiun, Porong—Malang, Porong—Pasuruan—Probolinggo, Selat Madura—Pasuruan. Sistem jaringan tersebut utamanya untuk memenuhi kebutuhan di PKN Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Kediri, PKW Madiun, dan PKW Probolinggo.

Sistem jaringan sumber daya air, di Provinsi Jawa Timur diatur mengenai Cadangan Air Tanah (CAT) lintas provinsi, meliputi CAT Wonosari dan CAT Ngawi—Ponorogo yang juga melayani Kawasan andalan Madiun dan sekitarnya, serta CAT Lasem yang melayani Kawasan andalan Tuban—Bojonegoro. Terdapat 2 WS, 91 waduk, dan 32 Daerah Irigasi (DI). Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, di Provinsi Jawa Timur ditetapkan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana di 29 kabupaten dan 9 kota.

Maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan RTR Jawa-Bali terhadap provinsi Jawa Timur meliputi pengembangan sebagai **lumbung pangan, pusat industri berdaya saing dan ramah lingkungan, kawasan perkotaan kompak** dalam upaya mewujudkan perkotaan yang **layak huni (*livable city*), pusat pariwisata** berdaya saing internasional, dan Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan **kawasan lindung dan kawasan rawan bencana**.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur

Beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah yang tercakup dalam RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031 yaitu tujuan penataan ruang, struktur dan pola ruang, serta penetapan Kawasan strategis provinsi.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan.

Struktur ruang Jawa Timur dibagi menjadi 8 Wilayah Perencanaan (WP) berdasarkan potensi dan permasalahan, sistem kegiatan dan struktur pelayanan kewilayahan, serta kesesuaian fungsi dan perannya. Kedelapan WP tersebut, yaitu: WP Gerbangkertosusila Plus, WP Madiun dan sekitarnya, WP Kediri dan sekitarnya, WP Blitar, WP Malang Raya, WP Probolinggo—Lumajang, WP Banyuwangi, serta WP Jember dan sekitarnya.

Rencana pengembangan Jalan Bebas Hambatan (JBH) antarkota di Provinsi Jawa Timur terdiri atas: 1) Mantingan—Ngawi; 2) Ngawi—Kertosono; 3) Kertosono—Mojokerto; 4) Mojokerto—Surabaya; 5) Gempol—Pandaan; 6) Pandaan—Malang; 7) Gempol—Pasuruan; 8) Pasuruan—Probolinggo; 9) Probolinggo—Banyuwangi; 10) Gresik—Tuban; 11) Demak—Tuban; 12) Porong—Gempol; dan 13) Surabaya—Suramadu—Tanjung Bulupandan.

Adapun pengembangan pola ruang wilayah provinsi diupayakan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung melalui pemantapan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan risiko dan mengurangi kerentanan bencana.

Sementara itu pengembangan pada kawasan budi daya diarahkan pada upaya pengembangan kawasan yang sesuai dengan karakter daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pemantapan sistem metropolitan dan sistem agropolitan dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Timur dipandang dari beberapa sudut kepentingan, antara lain: ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Dipandang dari sudut kepentingan ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur meliputi:

- 1) Kawasan Gerbangkertosusila;
- 2) Kawasan industri berteknologi tinggi *Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)*;
- 3) Kawasan ekonomi unggulan yaitu *Lamongan Integrated Shorebase (LIS)*, Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya, dan Industri Perhiasan Gemopolis;
- 4) Kawasan agropolitan regional yang terdiri atas Sistem Agropolitan Wilis, Sistem Agropolitan Bromo—Tengger—Semeru, Sistem Agropolitan Ijen, dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura;
- 5) Kawasan Agroindustri Gresik dan Lamongan Utara;
- 6) Kawasan koridor metropolitan meliputi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, kawasan pusat bisnis Kota Surabaya, kawasan industri berteknologi tinggi di Kota Surabaya dan Kab. Sidoarjo, Kawasan Industri Gempol di Kab. Pasuruan, Kawasan Komersial Lawang di Kab. Malang dan perkotaan Malang, kawasan pusat bisnis Kota Malang, dan pusat pariwisata di Kota Batu;
- 7) Kawasan perbatasan antarprovinsi;
- 8) Kawasan perbatasan antarkabupaten/kota meliputi Gerbangkertosusila (GKS) dan segitiga emas pertumbuhan Tuban—Lamongan—Bojonegoro; dan
- 9) Kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo.

Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan perbatasan negara pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas. Hal ini dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto dan Bromo—Tengger—Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo; merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur dilihat dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Adapun Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu:

- 1) Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek di Kabupaten Pasuruan;

- 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Sidoarjo dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya, serta Tuban dan sekitarnya;
- 3) Kawasan pembangkit meliputi PLTG, PLTU, dan PLTD, antara lain: Lekok di Kabupaten Pasuruan, Ngadirojo di Kabupaten Pacitan, Paiton di Kabupaten Probolinggo, Singosari di Kabupaten Gresik, dan Tanjung Awar-awar di Kabupaten Tuban; dan
- 4) Kawasan potensial panas bumi.

Dilihat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur berupa Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Brantas.

Dapat disimpulkan bahwa bahwasanya arahan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur, meliputi pembangunan wilayah dengan **prinsip pemerataan** melalui **pembagian 8 Wilayah Perencanaan** dengan fokus pada **Kawasan Metropolitan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi** di Provinsi Jawa Timur dan pemantapan **sentra produksi pertanian** sebagai penunjang **agrobisnis dan agroindustri** serta **pariwisata alam skala nasional dan internasional**.

2.1.4 Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Gerbangkertosusila (GKS)

Penataan Ruang KSN Perkotaan Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan GKS sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Struktur Ruang Perkotaan GKS berbentuk radial konsentris dan kota kompak berwawasan lingkungan (*Compact City*). Kota inti adalah Kota Surabaya, sedangkan kota sekitarnya mencakup Gresik (Gresik, Sidayu, Menganti); Bangkalan (Bangkalan, Tanah Merah, Klampis, Tanjung Bumi, Labang); Mojokerto (Mojosari, Sooko); Kota Mojokerto (Magersari); Sidoarjo (Sidoarjo, Krian); dan Lamongan (Lamongan, Brondong—Paciran, Babat).

Pola Ruang Perkotaan GKS berupa permukiman perkotaan yang didukung oleh kawasan penyangga dengan aktivitas ekonomi industri, serta ruang hijau (produktif dan lindung). Zona terbangun diarahkan di sekitar pusat kota inti dan kota sekitarnya yang sejalan dengan jaringan jalan penghubung antar kota. Zona pertanian/perkebunan diarahkan di sekitar zona terbangun khususnya Lamongan, Mojokerto dan Bangkalan. Zona lindung pesisir diarahkan di pesisir pantai Gresik, Surabaya dan Sidoarjo. Zona hutan diarahkan dekat zona pertanian yang jauh dari zona terbangun di barat daya Lamongan (dekat perbatasan Bojonegoro) dan selatan Mojokerto (dekat perbatasan dengan Kota Batu).

Dengan demikian arah kebijakan RTR KSN GKS terhadap pengembangan wilayah Jawa Timur yaitu, arahan KSN GKS sebagai **pusat ekonomi nasional di pesisir** yang **kompak** dengan **zona inti dan zona penyangga** yang memiliki **fungsi masing-masing** dan dengan memperhatikan ketersediaan **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**.

2.2 Kebijakan Sektor

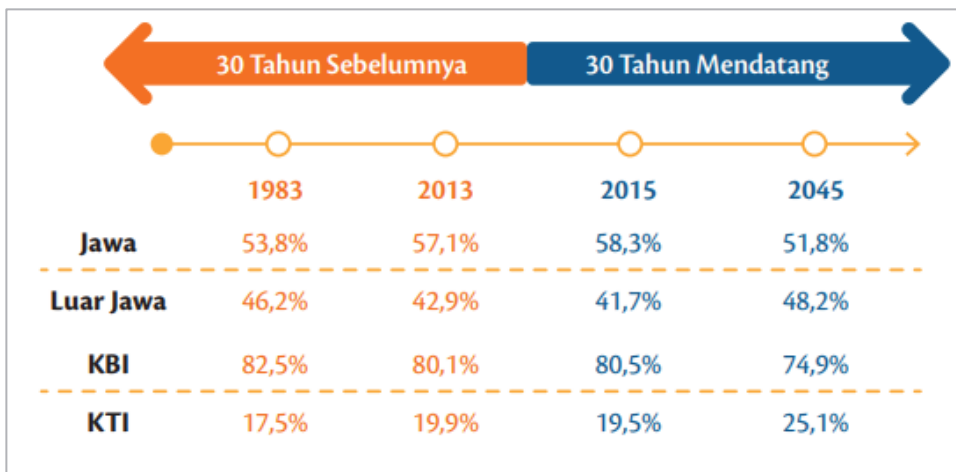
Subbab ini berisi poin penting kebijakan sektoral tingkat nasional dan daerah, yaitu: Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 [Perpres No. 18 Tahun 2020], Proyek Strategis Nasional (PSN) [Permenko No. 9 Tahun 2022], Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) [PP No. 14 Tahun 2015], Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) [PP No. 50 Tahun 2011], Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Prioritas di Jawa Timur (Perpres No. 80 Tahun 2019), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019–2024 (Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2021), Visium PUPR 2030, dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020–2024 (Permen PUPR No. 23 Tahun 2020).

2.2.1 Visi Indonesia 2045

Sebagai negara yang besar Indonesia mempunyai tujuan mulia dalam pembangunan yang dilaksanakannya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa yaitu untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Guna mewujudkan cita-cita tersebut maka disusunlah Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Infrastruktur menjadi salah satu *prime mover* (penggerak utama) untuk mewujudkan keempat pilar tersebut. Dukungan infrastruktur untuk pilar (1) berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai pilar (2) diperlukan penyediaan infrastruktur dengan *ease of doing business/investment* (kemudahan berbisnis/berinvestasi). Menuju pilar (3) dilaksanakan penyediaan infrastruktur dalam upaya mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), serta wilayah Jawa dan Wilayah Luar Jawa. Guna mewujudkan pilar (4) dilakukan reformasi birokrasi pada seluruh instansi (kementerian/lembaga pemerintah).

Dalam visi Indonesia 2045, pemerataan pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terus diupayakan. KTI didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan KBI dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah KBI. Pemerataan juga terus didorong antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Dalam 30 tahun ke depan, peranan luar Jawa dan KTI diperkirakan meningkat menjadi 48,20 % dan 25,10 % dari perekonomian nasional.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Gambar 2.1 Timeline Pemerataan Pembangunan Daerah

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa arah pengembangan wilayah Jawa berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan yang berbasis pada sektor pendidikan, **perdagangan dan jasa**, di mana dukungan infrastruktur diharapkan dapat: meningkatkan **konektivitas fisik dan virtual**; mendorong **pemerataan pembangunan** antar wilayah; memenuhi **prasarana dasar**; mendukung **pembangunan perkotaan dan perdesaan**; antisipasi terhadap **bencana alam dan perubahan iklim**; serta reformasi birokrasi di Jawa Timur.

2.2.2 RPJPN Tahun 2025 -2045

Rancangan Awal RPJPN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur, diantaranya yaitu pengembangan koridor industri, kawasan strategis pariwisata dan pertanian, pengelolaan perkotaan, percepatan pembangunan wilayah, serta agenda sarana prasarana prioritas.

Wilayah Pulau Jawa diarahkan sebagai koridor industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Adapun pengembangan koridor di Provinsi Jawa Timur diantaranya pengembangan industri hijau ramah lingkungan dan energi terbarukan (renewable energy) diarahkan pada lokasi pesisir dan pelabuhan salah satunya Metropolitan Surabaya. Pengembangan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik - Probolinggo sebagai kluster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan

Kemudian, Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik antara lain pada kawasan perkotaan yang memiliki potensi *urban health/medical tourism* seperti megapolitan Surabaya-Malang. Pengembangan Kawasan Strategis pertanian mendukung kemandirian pangan difokuskan pada daerah Tapal Kuda Jawa Timur yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih.

Pengembangan kawasan perkotaan termasuk wilayah metropolitan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan inklusif dan global (global city) yaitu pada megapolitan Surabaya-Malang, serta pada pusat aglomerasi yaitu Madiun, Kediri, dan Jember.

Dalam mewujudkan percepatan pembangunan wilayah serta agenda sarana prasarana prioritas, meliputi:

- a. Pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi diantaranya pelabuhan tanjung perak (jawa timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (global port)
- b. Peningkatan konektivitas sumatera-jawa-bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyebrangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara pulau jawa dan bali (Gilimanuk-Ketapang) serta antara pulau jawa dan sumatera (Merak-Bakauheuni) untuk menurunkan biaya logistik.'
- c. Optimalisasi dan pengembangan bandar udara Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara kargo.
- d. Pengembangan jalan tol wilayah jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian jalan lintas selatan wilayah jawa untuk mendorong pemerataan wilayah.
- e. Pembangunan kereta antrakota termasuk pengembangan kereta cepat (jakarta-surabaya) yang terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-bandung, serta pengembangan kereta angkutan barang terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda
- f. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan Surabaya serta kota besar dan kota sedang lain seperti Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.
- g. Percepatan pembangunan, optimalisasi/penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada kawasan kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Madura dan Pacitan-Trenggalek-Blitar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan rancangan awal RPJPN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur berfokus pada pengembangan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, dan perkotaan. Pembangunan sarana prasarana prioritas juga menjadi fokus utama untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah.

2.2.3 RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Jawa Timur, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan, target

pembangunan, arahan pengembangan wilayah, serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*).

Koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMN 2020—2024, adalah koridor pertumbuhan yang membentang di wilayah utara dari Tuban ke arah timur menuju Surabaya, ke Probolinggo hingga Banyuwangi, koridor ini juga membentang ke arah Bangkalan, dan PKN Malang. Sedangkan untuk koridor pemerataan, terdapat di beberapa kawasan, yaitu di Pulau Madura (dari Pamekasan hingga Sumenep), Lumajang menuju Jember dan Bondowoso, serta Jombang sampai Kediri.

Target RPJMN untuk pembangunan wilayah Jawa Timur di tahun 2024, yaitu:

- 1) Target laju pertumbuhan ekonomi 6,20%;
- 2) Target tingkat kemiskinan 8,51%;
- 3) Target tingkat pengangguran terbuka 2,50%.

Arahan RPJMN 2020—2024 terkait pengembangan Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- 1) Pengembangan sektor unggulan: tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap, dan budidaya;
- 2) Pengembangan kawasan agropolitan Selingkar Wilis (proyek jalan lingkaran yang akan melintasi enam kabupaten sekitar Gunung Wilis, yakni Madiun, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Ponorogo dan Kediri).
- 3) Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional;
- 4) Pengembangan pusat industri: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dan Kawasan Industri (KI) Madura;
- 5) Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata: Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo—Tengger—Semeru dan DPP Baru Banyuwangi;
- 6) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda: Tol Probolinggo—Banyuwangi dan jalan lintas Pansela (Pantai Selatan);
- 7) Pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Tanjung Perak;
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya, Kota Kediri, Malang, Probolinggo, dan Pasuruan melalui pengembangan transportasi massal;
- 9) Penanganan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal khususnya di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo; serta
- 10) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Pamekasan dan KPPN Banyuwangi.

Terdapat 5 (lima) *Major Projects* (proyek utama) di Jawa Timur, antara lain:

- 1) Pembangunan DPP Bromo—Tengger—Semeru;
- 2) Pembangunan Rumah Susun Kawasan Metropolitan Gerbang kertokusila;
- 3) Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Terpadu Wilayah Jawa Timur di Lamongan;
- 4) Pemenuhan Akses Sanitasi Layak dan Aman; dan
- 5) Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas tentang RPJMN terhadap pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur, meliputi pengembangan **koridor pertumbuhan dan pemerataan**. Koridor pertumbuhan dikembangkan melalui **peningkatan kualitas kawasan perkotaan**, pengembangan sektor unggulan **industri, agropolitan, dan pariwisata**, serta penguatan **konektivitas dan hub transportasi**. Koridor pemerataan dikembangkan melalui penanganan **infrastruktur dasar di perdesaan dan daerah tertinggal**.

2.2.4 Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Sejak tahun 2016 daftar PSN mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres (Peraturan Presiden).

Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan dibangun di Provinsi Jawa Timur dan pernah ditetapkan melalui Perpres namun tidak muncul kembali dalam peraturan terbaru, antara lain:

- 1) Jalan Tol Solo—Ngawi;
- 2) Jalan Tol Kertosono—Mojokerto;
- 3) Jalan Tol Mojokerto—Surabaya;
- 4) Jalan Tol Gempol—Pandaan;
- 5) Jalan Tol Gempol—Pasuruan;
- 6) Jalan Tol Waru (Aloha) —Wonokromo;
- 7) Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di Pulau Jawa (Lintas Wilayah);
- 8) Energi asal sampah kota-kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar);
- 9) Bendungan Bajulmati;
- 10) Bendungan Nipah;
- 11) Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya (termasuk Bromo-Tengger-Semeru); dan
- 12) Pembangunan Kawasan Industri *Java Integrated Industrial Port Estate (JIPE)*, Gresik.

Dari 12 PSN tersebut, 8 proyek telah terbangun (yaitu proyek 1,2,3,4,5,9,10, dan 12), sedangkan 4 proyek (yaitu proyek 6,7,8, dan 11) ditangguhkan.

Berdasarkan Daftar PSN terkini yang termuat dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 terdapat 18 (delapan belas) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1) Jalan Tol Pandaan—Malang; 2) Jalan Tol Ngawi—Kertosono—Kediri; 3) Jalan Tol Pasuruan—Probolinggo; 4) Jalan Tol Probolinggo—Banyuwangi hingga ruas Besuki; 5) Jalan Tol Krian—Legundi—Bunder—Manyar; 6) Pembangunan *Fly Over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong; 7) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan; 8) Bendungan Bendo; 9) Bendungan Gongseng; 10) Bendungan Tukul; 11) Bendungan Tugu; 12) Bendungan Semantok; 13) Bendungan Bagong; 14) Bandara Kediri; 15) *Double track Jawa Selatan*; 16) Kereta api Jakarta—Surabaya; 17) Kilang

minyak Tuban (ekspansi); 18) Pengembangan lapangan unitisasi gas Jambaran—Tiung Biru.

Dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan PSN di Jawa Timur utamanya adalah untuk **peningkatan konektivitas** pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan **produktivitas pertanian** melalui **pembangunan bendungan**, serta **pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (air minum dan energi)**.

2.2.5 RIPIN Tahun 2015-2035

Beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Jawa Timur yang termuat dalam RIPIN, yaitu penetapan Wilayah Prioritas Pengembangan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI), dan program pengembangan WPPI. RIPIN disusun dengan Tujuan disusun RIPIN adalah untuk mendorong industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan memberikan arahan terencana terhadap peran pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional.

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat 1 WPPI yaitu Tuban—Lamongan—Gresik—Surabaya—Sidoarjo—Mojokerto—Bangkalan. Selain itu, terdapat 6 Kawasan Industri, yaitu: KI Tuban, KI Gresik, KI Bangkalan, KI Lamongan, KI Jombang, dan KI Banyuwangi.

Berdasarkan RIPIN tersebut, Program pengembangan Wilayah Prioritas Pengembangan Industri (WPPI) periode 2020—2035, berdasarkan RIPIN tersebut adalah:

- 1) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara);
- 2) Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi;
- 5) Penguatan kerjasama antar WPPI;
- 4) Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI;
- 5) Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI, terutama di luar Pulau Jawa; dan
- 6) Penguatan konektivitas antar WPPI.

Arah kebijakan RIPIN terhadap pengembangan wilayah Jawa Timur, dapat disimpulkan yaitu pengembangan **industri difokuskan pada koridor utara** Jawa Timur hingga Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura. Hal ini harus didukung dengan pembangunan **soft infrastructure** dan **hard infrastructure** yang memadai.

2.2.6 RIPPARNAS Tahun 2010-2025

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) merupakan dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010—2025. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat satu atau lebih Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Beberapa KPPN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 DPN, 10 KPPN, dan 4 KSPN, yaitu KSPN Bromo—Tengger—Semeru, KSPN *Karst* Pacitan, KSPN Trowulan, dan KSPN Ijen—Baluran. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar DPN, KPPN, dan KSPN di Jawa Timur

DPN	KSPN/KPPN
DPN Bromo—Malang dan sekitarnya.	KPPN Batu—Malang dan sekitarnya.
	KSPN Bromo—Tengger—Semeru dan sekitarnya.
	KPPN Blitar—Kediri dan sekitarnya.
DPN Surabaya—Madura dan sekitarnya.	KSPN Trowulan dan sekitarnya.
	KPPN Surabaya Kota dan sekitarnya.
	KPPN Pamekasan dan sekitarnya.
	KPPN Sumenep dan sekitarnya.
DPN Ijen—Alas Purwo dan sekitarnya.	KSPN Ijen—Baluran dan sekitarnya.
	KPPN <i>G-Land</i> —Alas Purwo dan sekitarnya.
	KPPN Meru Betiri dan sekitarnya.

Sumber: Ripparnas, 2010—2025.

Maka dapat disimpulkan arah kebijakan RIPPARNAS terhadap pengembangan wilayah Jawa Timur, yaitu **pengembangan pariwisata alam** khususnya di **4 KSPN** yang **berskala nasional dan internasional**.

2.2.7 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 memuat beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Jawa Timur, yaitu penetapan kawasan prioritas pertumbuhan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional dan kawasan pendukung yang memberikan nilai tambah. Selain itu ditetapkan pula program-program prioritas pendukung pengembangan kawasan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) kawasan prioritas pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan percepatan, antara lain:

- 1) Gerbangkertosusila Plus (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban);
- 2) Bromo—Tengger—Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Probolinggo); dan
- 3) Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan).

Adapun kawasan yang dikembangkan untuk memberikan nilai tambah terhadap 3 kawasan di atas, yaitu: 1) Madura dan Kepulauan (Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep); dan 2) Selingkar Ijen (Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo).

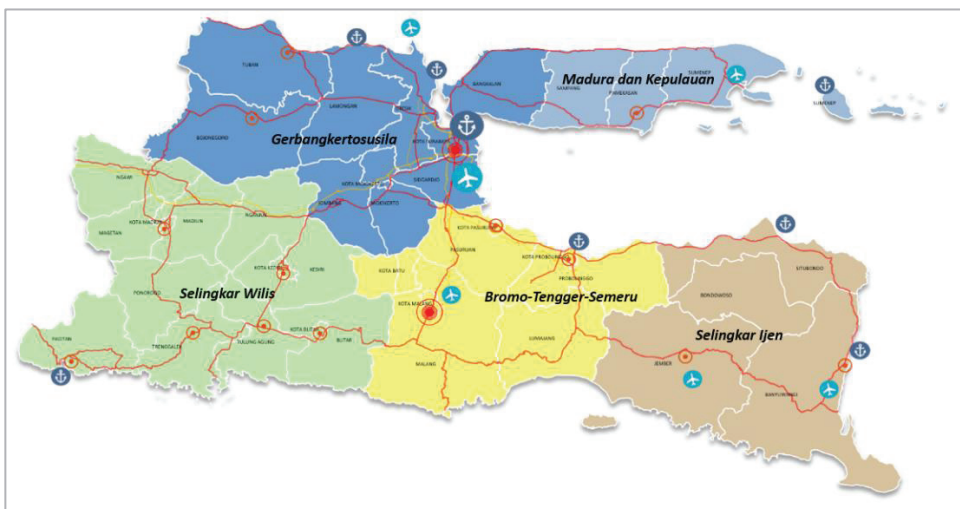
Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila Plus difokuskan pada bidang industri, khususnya yang bersifat *capital-intensive* serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan *hub* arus barang dan orang. Pusat pertumbuhan wilayah ini adalah kawasan-kawasan industri yang tersebar di wilayah Gerbangkertosusila dan Kilang Minyak Tuban.

Selain itu, Kawasan Prioritas Bromo—Tengger—Semeru difokuskan pada sektor pariwisata, dan agroproduksi serta agroindustri. Pusat pertumbuhan wilayah ini adalah wisata Bromo—Tengger—Semeru dan KEK Singhasari.

Sebagai Kawasan Prioritas, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata. Dengan pusat pertumbuhan wilayah ini adalah Wisata Gunung Wilis dan Lawu; sentra-sentra agroproduksi, sedangkan infrastruktur utama adalah Tol Solo—Ngawi—Kertosono dan Bandara Kediri.

Untuk Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Sentra pertumbuhan wilayah ini meliputi Kawasan Agroproduksi Sampang—Pamekasan—Sumenep dan *Indonesia Islamic Science Park* (IISP), sedangkan infrastruktur utama terdapat Pelabuhan Tanjung Bulupandan.

Fokus lainnya juga pada Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yaitu pada pengembangan kawasan ini adalah sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Taman Nasional Baluran dan Kawah Ijen merupakan pusat pertumbuhan wilayah ini, sedangkan infrastruktur utama terdapat Tol Probolinggo—Banyuwangi dan Bandara Banyuwangi.



Sumber: Hasil Analisis, 2022.

Gambar 2.2 Pembagian Kawasan Prioritas Perpres No. 80 Tahun 2019

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 terhadap pengembangan wilayah Jawa Timur, yaitu **percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di 3 kawasan prioritas dan 2 kawasan pendukung** di Jawa Timur melalui **pembangunan infrastruktur**.

2.2.8 RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Pada RPJMD Provinsi Jawa Timur memuat beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Jawa Timur, yaitu koridor pengembangan dan isu strategis pembangunan infrastruktur.

Dalam RPJMD terdapat tujuh koridor pengembangan di Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Koridor Maritim dan Logistik (Jalur Utara: Tuban—Gresik—Bangkalan—Sumenep);
- 2) Koridor Industri Agro (Jalur Utara—Selatan sisi Barat: Tuban—Madiun—Magetan—Pacitan);
- 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan (Jalur Selatan: Pacitan—Prigi—Sendangbiru—Jember—Banyuwangi);
- 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda: Madiun—Nganjuk—Kediri—Jombang—Pasuruan—Situbondo);
- 5) Koridor Megapolitan (Surabaya—Malang);
- 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata (Jalur Utara—Selatan sisi Timur: Banyuwangi—Situbondo—Sumenep); dan
- 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Jalur Tengah: Magetan — Trenggalek — Tulungagung — Malang (Dampit) — Lumajang — Jember — Banyuwangi (Kalibaru).

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur sesuai RPJMD Jawa Timur, antara lain:

- 1) Aksesibilitas antarwilayah dalam rangka mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, koridor maritim Jawa Madura, dan koridor maritim Selatan Jawa;
- 2) Pengembangan jembatan Suramadu belum ditunjang pengembangan jaringan jalan yang memadai dan Pelabuhan Samudra di koridor utara Madura;
- 3) Kawasan Kepulauan Sumenep dan Pulau Bawean masih memiliki kendala transportasi laut;
- 4) Antara pesisir Probolinggo—Situbondo—Banyuwangi dengan pesisir Tuban—Lamongan—Gresik masih terjadi kesenjangan akibat terbatasnya konektivitas antarmoda;
- 5) Kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya terkendala masalah kemacetan dan kualitas infrastruktur perkotaan;
- 6) Percepatan pembangunan waduk sebagai upaya penyediaan air untuk kegiatan pertanian, industri, maupun rumah tangga; dan
- 7) Pemenuhan cakupan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan.

Dengan demikian arah kebijakan RPJMD Provinsi terhadap pengembangan wilayah Jawa Timur, yaitu **pengembangan wilayah berbasis koridor utara, tengah, dan selatan** yang diidentifikasi berdasarkan berbagai **tema pengembangan**, yaitu: **maritim** (industri, perikanan, pariwisata), **industri agro, pariwisata agro**, dan **perkotaan** (kota menengah, kota megapolitan, dan kota kompak).

2.2.9 Visium PUPR 2030

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030, yaitu: bendungan multifungsi dengan kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun; kemandirian jalan mencapai 99%

dengan integrasi antar moda, memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*; serta 100% *smart living* (hunian cerdas) yang didukung infrastruktur dasar yang memadai. Secara detail sasaran visium tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

	SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENSTRA PUPR 2015 - 2019	Kapasitas Tampung 50 m³/c/th (baseline 2014) Anggaran Rp.316 T	Jalan Mantap 98% Jalan Tol 1000 Km Jalan Baru 2650 Km Jembatan Baru/ FO 29.859 M Anggaran Rp.278 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 4,47 juta unit Anggaran Rp.186 T
GAP 2017 - 2019	Kapasitas Tampung 57,75 m³/c/th Anggaran Rp.306 T	Jalan Mantap 94% Jalan Tol 824 Km Jalan Baru 1.320 Km Jembatan Baru/FO 39.000 M Anggaran Rp.183 T Investasi Rp.202 T	78% Air Minum 27.000 ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp.45 T	5,4 jt Backlog MBR Pembangunan 2,76 juta unit Anggaran Rp.414 T 10% APBN/APBD 90% Masyarakat
VISIUM 2020- 2024	Kapasitas Tampung 68,11 m³/c/th Anggaran Rp.577 T	Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T	88% Air Minum 17.000 ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T	5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat
VISIUM 2030	Kapasitas Tampung 120 m³/c/th Anggaran Rp.1.423 T	Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T	100% Air Minum 0 ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T	3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD 70%-80% Swasta/Masyarakat

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022.

Gambar 2.3 Visium PUPR 2030

2.2.10 Rencana Strategi Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Target pengembangan infrastruktur PUPR hingga tahun 2024 ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020—2024. Untuk infrastruktur SDA, targetnya mencakup penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Sedangkan infrastruktur jalan dan jembatan targetnya mencakup pembangunan jalan tol, jalan baru (termasuk *Flyover/Underpass*) dan jembatan. Target infrastruktur cipta karya mencakup penyediaan air minum, sanitasi, penanganan kumuh dan pengolahan sampah, serta sarana pendidikan dan olahraga. Adapun perumahan mencakup pembangunan rusus, rusun, rumah swadaya dan PSU (Prasarana Sarana Utilitas Umum).

Tabel 2.2 Target Rencana Strategi Kementerian PUPR

Infrastruktur Sumber Daya Air	Infrastruktur Bina Marga	Infrastruktur Cipta Karya	Infrastruktur Perumahan
- Kapasitas tampung infrastruktur SDA 58,5m³/kapita/ tahun. - 61 bendungan. - 500 embung. - 500.000 ha DI. - 2 juta rehabilitasi DI. - 50 m³/dt air baku. - 2.100 km pengendali banjir dan pengaman pantai.	- 2.500 km jalan tol. - 3.000 km jalan baru. - 38.328 m jembatan. - 31.053 FO/UD.	- 100% air minum layak. - 30% air minum perpipaan. - 90 % sanitasi layak. - 15 % sanitasi aman. - 10.000 ha penanganan kumuh. - 100% hunian dengan akses pengelolaan sampah. - 5.555 unit Sarana Pendidikan Olahraga.	- 51.340 rusun. - 10.000 rusus. - 813.660 rumah swadaya. - 262.345 PSU.

Sumber: Renstra Kementerian PUPR, 2022.

2.2.11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik

Kawasan Ekonomi Khusus Gresik ditetapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2021, berlokasi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Dibangun di atas lahan seluas 2.125 ha, dimana 1.719 ha, KEK ini merupakan area industri dan 406 ha sebagai area pelabuhan, KEK Gresik yang diinisiasi oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) yang merupakan *joint venture* antara AKR Corporindo dan Pelindo III. Total investasi kawasan ini diperkirakan mencapai USD 16,99 miliar dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 199.818 orang.

Penetapan KEK JIPE sebagai KEK Gresik menjadikannya sebagai salah satu kawasan industri yang paling kompetitif dan diminati para pelaku industri baik domestik maupun internasional. Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (JIPE) merupakan Proyek Strategis Nasional yang siap mewadahi para investor Industri 4.0. Saat ini, akses jaringan jalan terdekat menuju KEK JIPE adalah Jalan Nasional Daendels (Sadang—Batas Kota Gresik) berjarak 3,5 km dari *Exit* Tol Manyar (Ruas Tol Surabaya—Gresik). Jalan nasional ini menjadi akses jalur perdagangan nasional bagi KEK Gresik menuju Bandar Udara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Kondisi jaringan jalan tersebut 2 lajur 2 arah dengan lebar rata-rata 6,5—12,5 meter. Dominasi penggunaan lahan di sekitar ruas jalan nasional tersebut merupakan kawasan industri dan pergudangan sehingga volume lalu lintas kendaraan berat cukup termasuk tinggi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa arahan PP No. 71 tahun 2021 tentang KEK Gresik yaitu untuk mengembangkan **KEK Gresik sebagai kawasan industri bersaing tinggi** di Jawa Timur dalam rangka **menarik investasi** yang bernilai tinggi dan **menciptakan lapangan kerja**.

2.3 Agenda Global

Berbagai poin penting arahan kebijakan internasional yang mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, dibahas dalam subbab agenda global ini, meliputi: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *New Urban Agenda (NUA)*, *Paris Agreement*, *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, dan *UNESCO Programme*.

Tabel 2.3 Arahan Agenda Global

No	Kebijakan Global	Arahan
1.	<i>Sustainable Development Goals</i>	Komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/ <i>SDGs</i> menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keseriusan dengan diterbitkannya Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB/ <i>SDGs</i> sebagai landasan hukum pelaksanaannya di Indonesia. Target-target TPB/ <i>SDGs</i> telah sejalan dengan diintegrasikannya 169 indikator <i>SDGs</i> ke dalam RPJMN 2020–2024.
2.	<i>New Urban Agenda</i>	Secara spesifik NUA menjawab sebelas tujuan <i>SDGs</i> dengan menyusun poin-poin komprehensif tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam 20 tahun ke depan. <i>New Urban Agenda</i> mengakui adanya keragaman budaya dan dampak negatif perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Indonesia <i>New Urban Agenda</i> dirumuskan sebagai respon dari NUA untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agenda perkotaan yang dibahas adalah: Kependudukan, Pertanahan dan Perencanaan Kota, Lingkungan dan Urbanisasi, Tata Kelola Pemerintah dan Legislatif, Ekonomi Perkotaan, Perumahan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3.	<i>Paris Agreement</i>	Berisi kesepakatan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pasca tahun 2020. <i>Paris Agreement</i> merupakan pengganti kesepakatan <i>Protocol Kyoto</i> . Poin penting kebijakan adalah menetapkan batas aman kenaikan suhu bumi dibawah 2°C dan berupaya menekan hingga 1,5 °C di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Indonesia meratifikasi <i>Paris Agreement</i> melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen Indonesia: menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% terhadap skenario <i>baseline</i> bisnis seperti biasa pada tahun 2030, dan 41% dengan bantuan internasional.
4.	<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030</i>	Hasil yang diharapkan: Sampai dengan 15 tahun terdapat pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Tujuan: 1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko. 2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan. 3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan. Target: 1. Mengurangi kematian rata-rata per-100K. 2. Mengurangi orang terdampak rata-rata per-100K. 3. Mengurangi kerugian ekonomi/GDP. 4. Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci. 5. Meningkatkan jumlah negara dengan strategi dan rencana PRB. 6. Meningkatkan Kerjasama internasional. 7. Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS. Tindakan Prioritas: 1. Memahami risiko bencana. 2. Penguatan tata Kelola risiko. 3. Investasi PRB untuk resiliensi. 4. Meningkatkan manajemen risiko.

No	Kebijakan Global	Arahan
5.	UNESCO Programme	Di Provinsi Jawa Timur terdapat 3 jenis program <i>UNESCO</i> yang tersebar di 5 kawasan antara lain: 1. <i>Biosfer Reserve: Blambangan dan Bromo—Tengger—Semeru—Arjuna</i>. Konsep cagar biosfer ini adalah mengelola suatu kawasan yang ditujukan untuk mengharmonikan antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati-sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan dukungan logistik yang cukup. Kawasan konservasi merupakan <i>core area</i>-nya. 2. <i>Memory of the World: Negarakertagama dan Kisah Panji</i>. <i>Memory of the World</i> yang didokumentasikan sebagai suatu warisan bersejarah dapat memperlihatkan kembali sejumlah keunikan warisan budaya dunia. Pusaka dokumenter ini tersedia dalam perpustakaan, buku, arsip-arsip dalam museum-museum, dan tempat. 3. <i>UNESCO Global Geopark: Geopark Gunung Sewu di Kab. Pacitan</i>. <i>UNESCO Global Geoparks</i> adalah area geografis terpadu di mana situs dan lanskap geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan holistik, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan <i>bottom-up</i>.

Sumber: Hasil Analisis, 2022.

Berpagkal pada **arahan kebijakan secara global**, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Provinsi Jawa Timur yaitu pelaksanaan pembangunan wilayah dengan memperhatikan faktor **keberlanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan kerawanan bencana**.

2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Bagian Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah memuat sintesis dari berbagai kebijakan yang telah diuraikan pada bagian 2.1 sampai dengan bagian 2.4 berupa rumusan sasaran dan target jangka panjang. Berbasis dari semua penjelasan tersebut di atas, maka dirumuskan fokus dan lokus kebijakan penataan ruang, kebijakan sektor, dan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, serta agenda global di Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Timur berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan khususnya PKN dan PKW, pengembangan industri pengolahan, pertahanan fungsi sebagai lumbung pangan, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan konektivitas dan keterpaduan transportasi antarmoda untuk mendukung sektor-sektor unggulan tersebut, serta dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Kebijakan sektor berfokus pada pengembangan 2 koridor yaitu koridor pertumbuhan yang membentang di sepanjang pesisir utara dari Tuban—Surabaya—Probolinggo—Banyuwangi dan bercabang ke utara dan selatan Bangkalan—Sidoarjo—Malang. Adapun koridor pemerataan berada di Pulau Madura (Sampang—Sumenep) dan sisi tengah—selatan yaitu Bondowoso—Jember—Lumajang—Jombang—Kediri. Kebijakan sektor juga mengangkat pengembangan sektor industri melalui KI dan WPPI, perwujudan pariwisata yang berdaya saing nasional dan internasional melalui DPP dan KSPN, peningkatan kualitas kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa, dan ketahanan pangan.

Kebijakan pengembangan kawasan prioritas berfokus pada arahan pengembangan Metropolitan Gerbangkertosusila sebagai perkotaan maritim yang menyandang fungsi industri pengolahan dengan tetap memperhatikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daya dukung lingkungan. Di dalam Wilayah Metropolitan (WM) GKS juga terdapat KEK Gresik yang diarahkan sebagai kawasan industri yang akan menarik investasi tinggi di Jawa Timur. Kebijakan global berfokus pada terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan dan kerawanan bencana.

Setelah dilakukan literasi terhadap seluruh fokus kebijakan, dihasilkan **empat konteks perencanaan** di Provinsi Jawa Timur yang memiliki **lokus kawasan prioritasnya masing-masing**. Keempat konteks perencanaan tersebut meliputi: **1) Industri pengolahan; 2) Pertanian tanaman pangan; 3) Pariwisata alam dan budaya; dan 4) Pelayanan dasar kawasan perkotaan.**

Masing-masing fokus utama tersebut memiliki kawasan prioritas yang diperoleh melalui sintesa kebijakan. Wilayah dengan fokus industri cenderung berada pada jalur Pantura dan Metropolitan Gerbangkertosusila, di luar itu juga terdapat KI Banyuwangi, KI Jombang, Kawasan Peruntukkan Industri di Kediri dan Madiun. Kawasan Pertanian tersebar di 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada kabupaten lumbung pangan, yaitu: Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, dan Jember. Fokus pariwisata terdapat di 4 KSPN, 7 KPPN, dan 1 DPP. Wilayah fokus pelayanan dasar kawasan perkotaan meliputi 2 PKN dan 14 PKW. Pembagian Wilayah Perencanaan (WP) mengikuti arahan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang membagi habis Jawa Timur menjadi 5 WP. Secara spasial masing-masing arah kebijakan dituangkan dalam Peta Arah Kebijakan Jawa Timur sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing kawasan prioritas.

Sintesa kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 dan peta 2.1 berikut.

Tabel 2.4 Rumusan Arah Kebijakan di Provinsi Jawa Timur

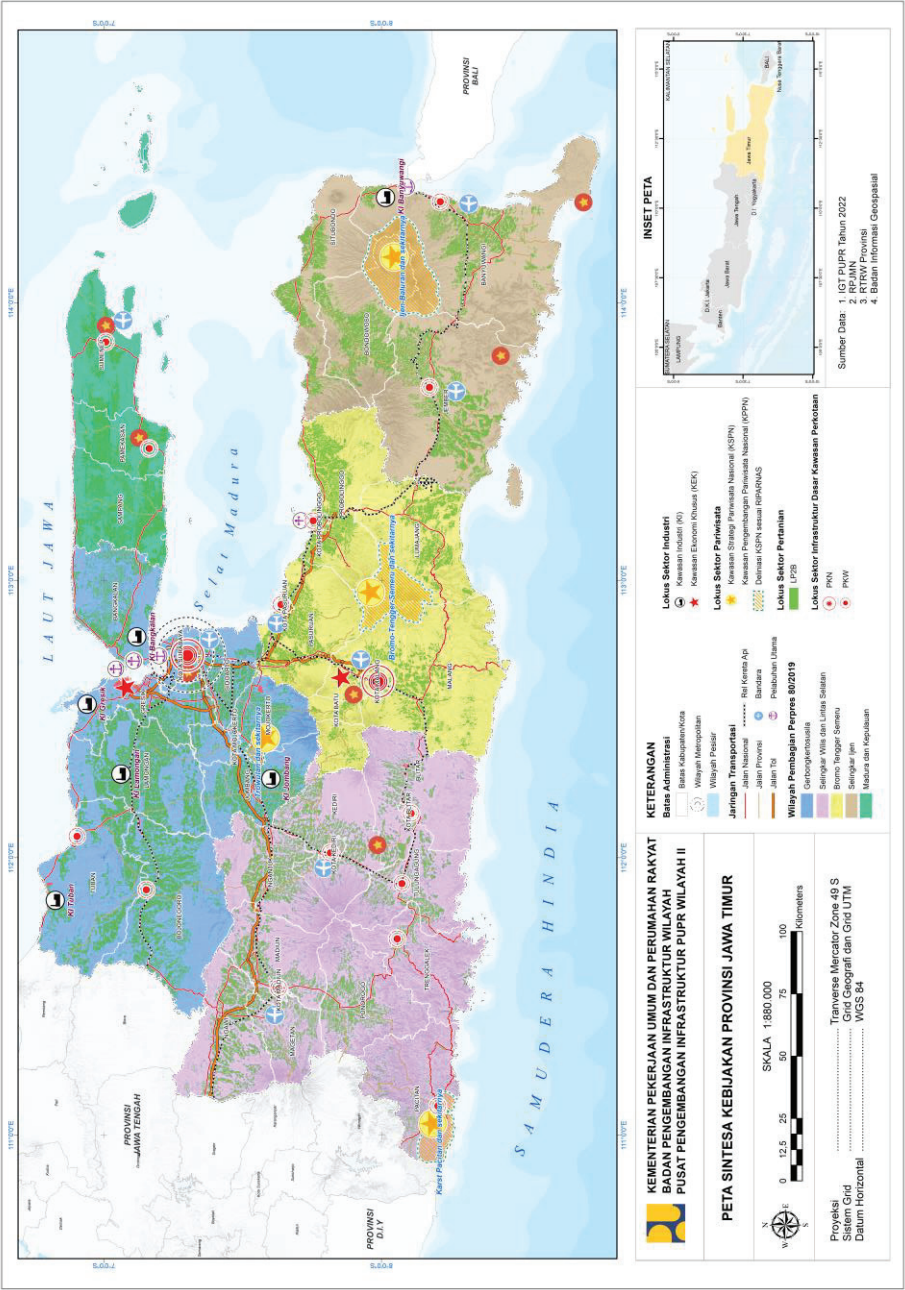
Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Long List Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target	
Kebijakan Penataan Ruang.	RTRW Nasional PP 13/2017.	Jawa Timur: Pengembangan pusat-pusat perkotaan (2 PKN dan 13 PKW) khususnya Metropolitan Gerbangkertosusila serta pengembangan kawasan-kawasan prioritas dengan sektor unggulan industri, pertanian, dan pariwisata yang didukung oleh konektivitas dan logistik yang memadai dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan .	• Pengembangan kawasan perkotaan khususnya PKN Gerbangkertosusila dan PKN Malang. • Industri pengolahan. • Lumbung pangan (pertanian). • Pariwisata skala nasional dan internasional. • Konektivitas dan logistik. • Keberlanjutan lingkungan.	Industri pengolahan: - KEK Gresik. - KI Tuban. - KI Gresik. - KI Bangkalan. - KI Lamongan. - KI Jombang. - KI Banyuwangi.	Industri: <u>Visi Indonesia 2045:</u> • Pertumbuhan PDB industri rata-rata sebesar 6,40% per tahun. • Peningkatan kontribusi PDB industri menjadi sebesar 26,00% pada tahun 2045. • Biaya logistik terhadap PDB turun menjadi 8 persen pada tahun 2045.	
	RTR Jawa-Bali Perpres 28/2012.	Jawa-Bali: Pengembangan sebagai lumbung pangan, pusat industri berdaya saing dan ramah lingkungan , kawasan perkotaan kompak dalam upaya mewujudkan perkotaan yang layak huni (<i>livable city</i>), pusat pariwisata berdaya saing internasional , dan Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.		Pertanian tanaman pangan: - Selingkar Wills. - Bromo—Tengger—Semeru. - Selingkar Ijen. - Madura Kepulauan. - Lumbung pangan (Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Jember).	<u>Perpres 80/2019:</u> • Target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7%. <u>Proveksi <i>Baseline</i> Jawa Timur:</u> • Kontribusi PDRB Industri Jawa Timur diproyeksikan rata-rata sebesar 35% di tahun 2029.	
	RTRW Provinsi Jawa Timur Perda 5/2012.	Jawa Timur: Pembangunan wilayah dengan prinsip pemerataan melalui pembagian 8 WP dengan fokus pada Kawasan Metropolitan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dan pemantapan sentra produksi pertanian sebagai penunjang agrobisnis dan agroindustri serta pariwisata alam skala nasional.			Pariwisata alam dan budaya: - DPP Baru Banyuwangi. - DPP/KSPN Bromo—Tengger—Semeru. - KSPN Ijen—Baluran. - KSPN Karst Pacitan. - KSPN Trowulan. - KPPN Batu—Malang. - KPPN Blitar—Kediri. - KPPN Surabaya Kota. - KPPN Pamekasan. - KPPN Sumenep. - KPPN <i>G-Land</i> Alas Purwo. - KPPN Meru Betiri.	Pertanian: <u>Visi Indonesia 2045:</u> • Mempertahankan lahan pertanian dan mengembangkan tambahan lahan sekitar 7 juta ha sampai tahun 2045. <u>Roadmap Pengembangan Komoditas Strategis Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045:</u> • Produksi pangan berlimpah dan stabil dengan target > 100% kebutuhan.
	Kebijakan sektor.	Visi Indonesia 2045.	Jawa: Arah pengembangan wilayah Jawa diarahkan berbasis pada sektor perdagangan dan jasa , mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah; mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan.	• Pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan. • Perdagangan dan jasa. • Industri (KI dan WPP). • Pariwisata (DPP dan KSPN). • Ketahanan pangan. • Layanan dasar.		
RPJMN 2020—2024 Perpres 18/2020.		Jawa Timur: Pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan , koridor pertumbuhan dikembangkan melalui peningkatan kualitas Kawasan perkotaan, pengembangan sektor unggulan industri, agropolitan, dan pariwisata , serta penguatan konektivitas dan hub transportasi . Koridor pemerataan dikembangkan melalui penanganan infrastruktur dasar di perdesaan dan daerah tertinggal .			<u>Proveksi <i>Baseline</i> Jawa Timur:</u> • Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan sebesar 1% per tahun hingga 2029.	
	Proyek Strategis Nasional	Jawa Timur: Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektivitas , peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan bendungan, serta				

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Long List Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kebijakan Sektor (lanjutan).	Permenko No. 9 Tahun 2022.	pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (air minum dan energi).			
	RIPIN 2015–2035 PP 14/2015.	Jawa Timur: Pengembangan industri difokuskan pada koridor utara Jawa Timur hingga Kab. Bangkalan di Pulau Madura. Hal ini harus didukung dengan pembangunan <i>soft infrastructure</i> dan <i>hard infrastructure</i> yang memadai.			
	RIPARNAS 2010–2025 PP 50/2011.	Jawa Timur: Pengembangan pariwisata alam khususnya di 4 KSPN yang berskala nasional dan internasional.			
	Perpres 80/2019.	Jawa Timur: Percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di 3 kawasan prioritas (GKS, BTS, Selengar Willis dan Pansela) dan 2 kawasan pendukung di Jawa Timur (Lingkar Ijen dan Madura Kepulauan) melalui pembangunan infrastruktur.			
	RPJMD Jawa Timur Perda No. 4 Tahun 2021.	Jawa Timur: Pengembangan wilayah berbasis koridor utara, tengah, dan selatan yang diidentifikasi berdasarkan berbagai tema pengembangan, yaitu: maritim (industri, perikanan, pariwisata), industri agro, pariwisata agro, dan perkotaan (kota menengah, kota metropolitan, dan kota kompak).			
Kebijakan Sektor (lanjutan).	Visium PUPR 2030.	Indonesia: SDA: Peningkatan kapasitas tampung. BM: Peningkatan konektivitas. CK: Pemenuhan air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh. Perumahan: Penanganan <i>Backlog</i> MBR.		Pelayanan dasar Kawasan Perkotaan: - PKN/KSN Gerbangkertosusila. - PKN Malang. - PKW Probolinggo. - PKW Tuban. - PKW Kediri. - PKW Madiun. - PKW Banyuwangi. - PKW Jember. - PKW Blitar. - PKW Pamekasan. - PKW Bojonegoro. - PKW Pactan. - PKW Pasuruan. - PKW Trenggalek. - PKW Sumenep.	Pariwisata: Visi Indonesia 2045: • Pertumbuhan jumlah wisatawan mencapai 2-4% per tahun. • Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 73,6 juta pada tahun 2045. • Pariwisata Indonesia menempati posisi 10 besar destinasi wisata berdaya saing dunia. Proyeksi <i>Baseline</i> Jawa Timur: • Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata Jawa Timur diharapkan sebesar 3% per tahun hingga 2029. Kawasan Perkotaan: RPJMN 2020–2024:
	Renstra PUPR 2020–2024.	Jawa Timur: Strategi SDA: pemenuhan pelayanan dasar perkotaan (Metropolitan Gerbangkertosusila) melalui penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengurangan risiko bencana. Strategi BM: Meningkatkan konektivitas wilayah utara dan selatan Jawa Timur. Strategi CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan sampah. Strategi Perumahan: Menyediakan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan PSU perumahan.			

Kebijakan	Dokumen	Sintesa Kebijakan	Fokus	Konteks Perencanaan dan Long List Kawasan Prioritas	Sasaran dan Target
Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas.	RTR KSN Gerbangkertosu sila Perpres 66/2022.	Gerbangkertosu sila: KSN GKS sebagai pusat ekonomi nasional di pesisir yang kompak dengan zona inti dan zona penyangga yang memiliki fungsi masing-masing dan dengan memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau.	• Kawasan industri. • Perkotaan maritim. • Ruang terbuka hijau.		• Akses air minum aman rumah tangga 15%. • Akses air minum jaringan perpipaan 30%. • Akses sanitasi aman rumah tangga 15%. • Akses 1 juta rumah susun perkotaan. • Penanganan sampah perkotaan sebanyak 80% dan pengurangan sebanyak 20%.
	KEK Gresik PP 71/2021.	KEK Gresik: KEK Gresik sebagai kawasan industri bersaing tinggi di Jawa Timur dalam rangka menarik investasi yang bernilai tinggi dan menciptakan lapangan kerja.			
Agenda Global.	SDGs.	Indonesia: Percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.	• Keberlanjutan pembangunan. • Perlindungan terhadap lingkungan. • Kerawanan bencana.		
	New Urban Agenda.	Indonesia: Optimalisasi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana.			
	Paris Agreement.	Jawa Timur: Jawa Timur yang memiliki sektor unggulan industri pengolahan harus memperhatikan tingkat emisi gas rumah kaca dalam pembangunan.			
	Sendai Framework.	Jawa Timur: Mengurangi risiko, menurunkan kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan terhadap bencana. Di Jawa Timur terdapat kerawanan terhadap bencana gunung api aktif, sesar aktif, banjir dari aliran sungai dan banjir rob.			

Sumber: Berbagai kebijakan diolah BPIW, 2023.

Setelah melalui proses sintesis kebijakan, Jawa Timur menghasilkan 4 konteks perencanaan/fokus utama pengembangan wilayah, yaitu: industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Masing-masing fokus utama tersebut kemudian mempunyai kawasan prioritas yang juga diperoleh melalui sintesis kebijakan. Wilayah dengan dominasi pada fokus industri sebagian besar berada di bagian utara Gerbangkertosusila Plus seperti Kawasan Industri (KI) Bangkalan, KI Gresik, KI Lamongan, KI Tuban, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Kawasan pertanian tersebar di 9 Kabupaten di Jawa Timur. Fokus pariwisata terdapat di 4 titik kawasan wisata, yaitu: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru, KSPN Ijen Baluran, KSPN Karst Pacitan, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Blitar-Kediri. Sementara itu, untuk fokus kawasan perkotaan berada di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Surabaya, PKN Malang, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jember, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan, dan PKW Sumenep. Menurut Perpres No. 80 Tahun 2019 dan RPJMD Jawa Timur Perda No. 4 Tahun 2021 pengembangan wilayah Jawa Timur didasarkan berbasis pada pembagian koridor utara, tengah, dan selatan. Secara spasial masing-masing arahan kebijakan dituangkan dalam Peta Arah Kebijakan Jawa Timur sesuai dengan konteks perencanaan masing-masing kawasan prioritas.



Peta 2.1 Sintesis Kebijakan Provinsi Jawa Timur

2.5 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (Food Estate), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendorong lapangan kerja baru dan akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum dimanfaatkan secara maksimal, hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan

konektivitas antar infrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2.5 Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR di Jawa Timur

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	SDA	Bendungan Nipah	Kab. Sampang	MP dan PSN
2	SDA	Bendungan Tukul	Kab. Pacitan	MP dan PSN

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Kab/Kota	Dasar Hukum
3	SDA	Bendungan Bajulmati	Kab. Banyuwangi	MP dan PSN
4	SDA	Bendungan Tugu	Kab. Trenggalek	MP dan PSN
5	SDA	Bendungan Bendo	Kab. Bojonegoro	MP dan PSN
6	SDA	Bendungan Gongseng	Kab. Bojonegoro	MP dan PSN
7	SDA	Bendungan Semantok	Kab. Nganjuk	MP dan PSN
8	SDA	Bendungan Bagong	Kab. Trenggalek	MP dan PSN
9	Jalan dan Jembatan	Pansela Provinsi Jawa Timur (Ruas Glonggong - Ketapang)	Kab. Tulungagung- Kab. Trenggalek	MP 2020-2024
10	Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah pada Kawasan Relokasi Bencana Semeru	Kab. Lumajang	Penanganan Bencana (PEN)
11	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Pandaan - Malang	Kab. Pasuruan-Kab. Malang	PSN
12	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Solo - Ngawi	Kota Solo-Kab. Ngawi (Jawa Tengah-Jawa Timur)	PSN
13	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto	Kab. Nganjuk-Kab. Mojokerto	PSN
14	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya	Kab. Mojokerto-Kota Surabaya	PSN
15	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Gempol - Pandaan	Kab. Pasuruan	PSN
16	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Gempol - Pasuruan	Kab. Pasuruan-Kota Pasuruan	PSN
17	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Kab. Pasuruan-Kab. Probolinggo	PSN
18	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Kab. Probolinggo- Kab. Banyuwangi	PSN
19	Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Kab. Sidoarjo-Kab. Gresik	PSN
20	Permukiman	SPAM Regional Umbulan	Kab. Sidoarjo	PSN
21	Permukiman	SPAM Regional Mojolagres (Tahap I dan II)	Kab. Mojokerto - Kab. Lamongan - Kab. Gresik	Kesepakatan Bersama Ditjen Cipta Karya, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Mojokerto, Gresik, Lamongan.

Sumber Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR berdasarkan: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PS

BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus berupa sketsa geografis atau lebih dikenal dengan istilah profil suatu wilayah, dan yang dimaksud dengan potensi daerah adalah segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Profil wilayah dan potensi daerah menjadi pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur, juga sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis. Dengan demikian dalam bab 3 ini sebagai *profiling* yang menjelaskan tentang profil wilayah meliputi: fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial budaya dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan.

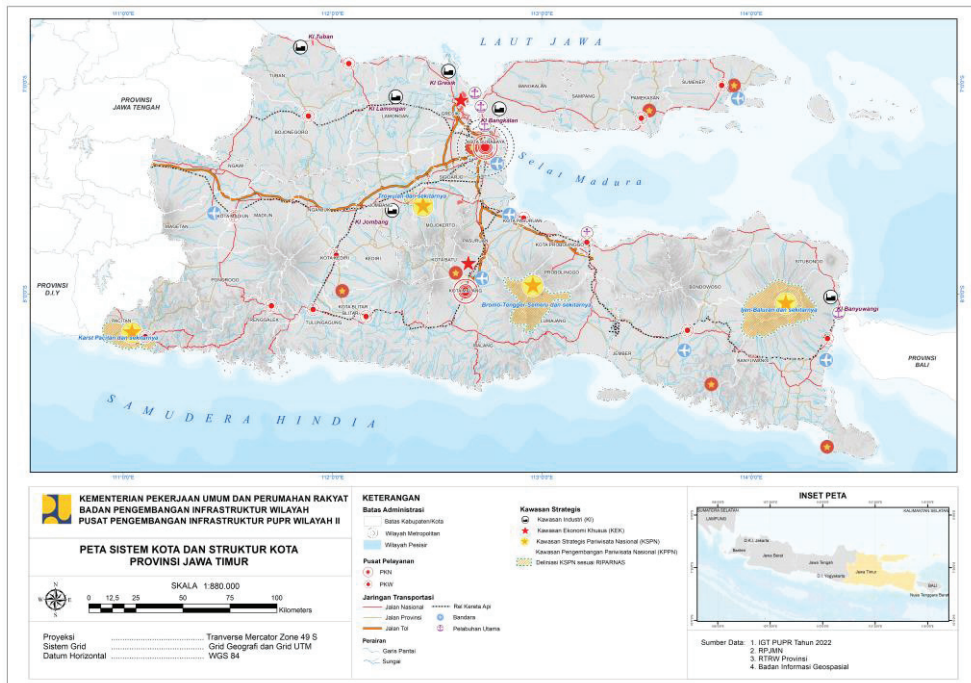
3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan

Bentang alam Jawa Timur sangat terkenal keindahannya, namun dibalik itu juga memiliki potensi bencana, maka perlu diketahui bagaimana profil fisik dan kebencanaan di daerah ini, sehingga bisa menjadi bahanantisipasi dan pertimbangan pengembangan infrastruktur. Profil fisik dan kebencanaan berisikan profil dan kondisi Provinsi Jawa Timur terkait wilayah administrasi, topografi, geologi, klimatologi, hidrologi, penyediaan jasa ekosistem air dan pangan, sebaran tutupan lahan, serta kerawanan bencana seperti: gempa bumi, longsor, tsunami, banjir, gunung berapi, dan kekeringan.

3.1.1 Profil Administrasi

Lokasi strategis Provinsi Jawa Timur yang terletak di daratan Pulau Jawa dan berdasarkan letak geografis yang berada di koordinat $111^{\circ}0' - 114^{\circ}4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}12' - 8^{\circ}48'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.799,75 km² atau 36,93% dari luas Pulau Jawa. Meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur dataran dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km², dan luas Kepulauan Madura adalah 5.422 km² atau 11,30%. Secara administratif, wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, Provinsi Jawa Tengah di sisi barat, sebelah timur dengan Pulau Bali, dan Laut Jawa di bagian utara.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota yang meliputi 666 kecamatan serta 8.501 desa/kelurahan. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Ibukota provinsi berada di Kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah terluas dengan yaitu 5.782,4 km², dan Kota Mojokerto sebagai wilayah terkecil hanya seluas 16,5 km². Secara lengkap profil geografis dan administratif Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada: Peta 3.1 Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur dan Gambar 3.1 Sistem Kota dan Struktur Kota di Provinsi Jawa Timur.



Sumber: RTRW diolah BPIW, 2022

Gambar 3.1 Sistem Kota dan Struktur Kota di Provinsi Jawa Timur

3.1.2 Profil Topografi

Topografi merupakan keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Jawa Timur memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan, perbukitan hingga kepulauan. Wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu:

- Ketinggian 0—100 meter dari permukaan laut mencakup 41,39% dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
- Ketinggian 100—500 meter dari permukaan laut mencakup 36,58% dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;
- Ketinggian 500—1000 meter dari permukaan laut mencakup 9,49% dari luas wilayah dengan kondisi perbukitan; dan
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut mencakup 12,55% dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Berdasarkan kondisi topografi, dataran rendah di Jawa Timur mencapai 60% (28.833 km²) dan 40% (17.597 km²) merupakan dataran tinggi. Perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan biasa disebut kemiringan lahan. Jawa Timur memiliki bentuk kemiringan lahan yang bervariasi, meliputi: lahan dengan kemiringan lereng 0 - 8 % sebesar 16,25 %, lahan dengan kemiringan lereng 8 - 15 % sebesar 30,83%, lahan dengan kemiringan lereng 15-25 % sebesar 21,35 %, lahan dengan kemiringan lereng dari 25 - 45 % sebesar 20,70%, lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 25 - 45 % sebesar 10,87 %. Secara lengkap

profil topografi Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada: Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Timur.

3.1.3 Profil Geologi

Kondisi geologi kawasan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek pada suatu wilayah. Komposisi, struktur alam Jawa Timur secara geologi (menurut Van Bemmelen) terbagi atas 4 bagian yaitu:

- Zona Pegunungan Selatan Jawa (*Southern Mountains*): batuan pembentuknya terdiri atas silisiklastik, volkaniklastik, volkanik, dan batuan karbonat.
- Zona Gunung Api Kuartar (*Quaternary Volcanoes*): merupakan gunung aktif.
- Zona Kendeng (*Kendeng Zone*): batuan pembentuknya terdiri atas sekuen dari volkanogenik dan sedimen pelagik.
- Zona Rembang (*Rembang Zone*): batuan pembentuknya terdiri atas endapan laut dangkal, sedimen klastik, dan batuan karbonat. Pada zona ini juga terdapat patahan yang dinamakan *Rembang High* dan banyak lipatan yang berarah timur-barat.

Jawa Timur juga memiliki puluhan jajaran gunung api, di mana 7 diantaranya masih aktif, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Ijen, Gunung Raung, Gunung Arjuno Welirang, Gunung Kelud, dan Gunung Lamongan. Jajaran gunung api ini membentuk bentang alam yang indah, sehingga tidak mengherankan jika Jawa Timur dikenal karena wisata alamnya.

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti halosen, pleistosen, pliosen, miosen, dan kwarter yang disebabkan oleh keberadaan gunung berapi. Sekitar 20,60% luas wilayah merupakan wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat *erosive*, sehingga tidak baik untuk budidaya pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0–15% (65,49% dari luas wilayah) yang merupakan wilayah dataran aluvial.

Berdasarkan fisiografi dan kondisi geologi, wilayah Jawa Timur dibagi 3 bagian, yaitu:

- 1) Bagian utara, potensi migas dan gamping;
- 2) Bagian tengah, potensi air tanah, bahan galian konstruksi, energi air serta panas bumi;
- 3) Bagian selatan, potensi energi air dan bahan galian mineral.

Kondisi topografi dan geologi Jawa Timur dapat dilihat pada: Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Timur.

3.1.4 Profil Klimatologi

Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah, merupakan keadaan atmosfer dalam periode yang panjang dan dalam wilayah yang luas. Jawa Timur memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 2.808,4 mm dengan hari hujan sebanyak 153 hari. Wilayah pantai utara Jawa Timur, dataran rendah di bagian tengah pulau, serta Kepulauan

Madura cenderung memiliki curah hujan yang rendah yaitu kurang dari 1.000 mm. Sedangkan bagian tengah kawasan cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi, terutama di dataran rendah dan pegunungan yang memiliki curah hujan lebih dari 3.000 mm.

Pada tahun 2021, dampak La Nina di Jawa Timur meningkatkan curah hujan dari 20%-40%. Meningkatnya curah hujan dapat memberikan beberapa dampak, yaitu:

- (a) Waspada cuaca ekstrem khususnya hujan lebat yang berpotensi banjir bandang, longsor, dan peningkatan sedimentasi waduk;
- (b) Pada sektor pertanian, menyebabkan produksi dan kualitas menurun, dan pergeseran musim tanam dengan risiko banjir dan kekeringan;
- (c) Potensi hujan dapat dimanfaatkan untuk menambah luas tanam, melakukan panen air hujan, dan mengisi waduk/danau/embung untuk periode musim kemarau.

3.1.5 Profil Hidrologi

A. Profil Wilayah Sungai Jawa Timur

Kehidupan di bumi sangat dipengaruhi oleh pergerakan, distribusi, dan kualitas air, demikian pula halnya dengan ketersediaan air di Jawa Timur. Adanya sungai besar berfungsi memberikan sumber air baku yang memadai untuk kegiatan pertanian, industri dan permukiman, di mana memerlukan pengelolaan secara lebih optimal untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.

Terdapat 7 Wilayah Sungai (WS) di Jawa Timur, 2 WS kewenangan nasional, yaitu WS Bengawan Solo dan WS Brantas serta 5 WS kewenangan provinsi, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Profil Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Nama WS	Luas (km ²)	Debit Ketersediaan (lt/dt)	Curah Hujan (mm/thn)	Lahan Kritis (km ²)	Kebutuhan Air (lt/dt)
1.	Bengawan Solo	11.709,00	252,22	1500—2500	4.766,83	246,43
2.	Brantas	14.257,00	375,68	1500—2000	4.941,33	344,49
3.	Welang—Rejoso	2.195,89	46,41	1000—2000	2.195,89	65,17
4.	Baru—Bajulmati	3.691,49	64,73	800—1000	-	60,95
5.	Bondoyudo—Bedadung	5.338,00	126,36	1500—2000	-	112,53
6.	Pekalen—Sampean	3.927,00	65,97	800—1000	-	60,26
7.	Kepulauan Madura	5.616,38	52,25	1000—2000	-	42,57

Sumber: RPSDA WS Brantas (2021) dan WS Bengawan Solo (2015) diolah BPIW, 2022.

B. Potensi Ketersediaan Air

Karakter beberapa sungai di Jawa Timur termasuk jenis sungai periodik, karena jumlah debit airnya bergantung pada musim tertentu, saat musim hujan debit airnya banyak dan saat kemarau debit airnya berkurang, ini yang terjadi dengan Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo.

Potensi air paling besar dari dua Wilayah Sungai (WS) yaitu Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo. Wilayah Sungai Brantas memiliki potensi air permukaan setiap tahun rata-rata 13.232 miliar m³, di mana telah digunakan sebesar 3,7—4 milyar m³/tahun atau sekitar 28,24% untuk keperluan irigasi, air rumah tangga, perkotaan dan industri. Wilayah Sungai Brantas memiliki potensi air tanah yang tinggi. Pengisian air tanah di WS Brantas sebesar 4.038,84 m³/detik.

Potensi air permukaan di daerah Jawa Timur terdiri dari:

- Potensi mata air, yang memiliki 1.597 mata air dengan debit rerata tahunan 28,59 m³/detik dan volume sebesar 881,03 juta m³.
 - Potensi *longstorage*, untuk air baku dari tiga kali dengan kapasitas dari 1,5—8 juta m³.
 - Potensi embung, sebanyak 118 embung.
 - Potensi bendungan, terdapat 29 bendungan.
- Rincian potensi ketersediaan air di WS Brantas dapat dilihat pada dokumen RPSDA WS Brantas tahun 2021.

Wilayah Sungai Bengawan Solo memiliki total potensi air sebesar 21.413,5 juta m³ dengan potensi air permukaan sebesar 18.401,5 juta m³ dan potensi air tanah sebesar 3.012 juta m³. Ketersediaan air yang ada di WS Bengawan Solo terdiri dari potensi mata air dan waduk. Potensi mata air sebanyak 1.423 mata air dengan kapasitas totalnya sebesar 37984,8 lt/det yang tersebar di 11 kabupaten yang dilewati Bengawan Solo. Potensi waduk di WS Bengawan Solo yang tersebar di beberapa kecamatan dengan total waduk sebanyak 30 waduk dengan total kapasitas sebesar 841.29 juta m³. Rincian potensi ketersediaan air di WS Bengawan Solo dapat dilihat pada dokumen RPSDA Bengawan Solo tahun 2015.

C. Potensi Cadangan Air Tanah (CAT)

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah lapisan-lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan geologi yang impermeable dengan nilai konduktivitas hidraulik yang sangat kecil sehingga tidak memungkinkan air melewatinya. Pada WS Brantas dan WS Bengawan Solo terdapat Cekungan Air Tanah bebas (Q1) dan CAT tertekan (Q2). Untuk pembagian CAT di kedua WS tersebut beserta Q1 dan Q2-nya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Potensi CAT di WS Brantas dan WS Bengawan Solo

No	CAT	Potensi Q1 (m ³ /det)	Potensi Q2 (m ³ /det)
WS Brantas			
1.	Brantas	3.674	175
2.	Pasuruan	628	43
3.	Bulukawang	162	0
4.	Sumberbening	238	0
WS Bengawan Solo			
1.	Karanganyar—Boyolali	1338	21
2.	Ngawi—Ponorogo	1547	66
3.	Brantas	3674	175
4.	Wonosari	463	0
5.	Surabaya—Lamongan	843	37
6.	Tuban	160	0
7.	Randublatung	23	9
8.	Lasem	107	9
9.	Watuputih	3	0
10.	Panceng	27	41

Sumber: RPSDA WS Brantas dan WS Bengawan Solo, 2022.

Secara keseluruhan profil hidrologi Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada: Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Jawa Timur.

3.1.6 Jasa Ekosistem

Seperti kita ketahui jasa ekosistem adalah proses ekologi atau komponen ekosistem yang berpotensi memberikan aliran manfaat bagi masyarakat. Jasa ekosistem sering menjadi dasar dalam penilaian (*valuation*) suatu

ekosistem. Pemanfaatan data dan informasi jasa ekosistem dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta perencanaan pembangunan. Kondisi daya dukung daya tampung lingkungan dapat dilihat berdasarkan peta dan indeks jasa ekosistem untuk fungsi-fungsinya yang dikelompokkan menjadi empat konsep yang diadopsi dari *UN Millennium Ecosystem Assessment* yaitu:

1. Jasa ekosistem penyedia (*provisioning*), terdiri atas: penyediaan pangan, air, energi, serat, dan genetik;
2. Jasa ekosistem pengaturan (*regulating*), terdiri atas: pengaturan iklim, tata air dan banjir, bencana alam, pemurnian air, penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan, dan pengendalian hama;
3. Jasa ekosistem budaya (*cultural*), terdiri atas: tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika; dan
4. Jasa ekosistem pendukung (*supporting*), terdiri atas: pembentuk lapisan tanah dan kesuburan, siklus hara, produksi primer, serta perlindungan plasma nutfah.

Kondisi Jawa Timur didominasi pada daerah dengan jasa ekosistem pangan pada kategori kelas rendah (32,76 %) dan sedang (24,86 %). Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang berada di wilayah ini mampu menyediakan bahan pangan dengan potensi rendah dan sedang. Jasa ekosistem pangan yang memiliki dominasi kelas rendah berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Selengkapnya dapat dilihat pada: Peta 3.4 Kawasan Jasa Ekosistem Pangan Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, pada daerah dengan jasa ekosistem air pada kategori kelas sedang (25,55 %) dan tinggi (27,16 %) mendominasi Jawa Timur. Hal ini menunjukan bahwa lahan yang berada di wilayah tersebut mampu menyediakan air bersih pada kategori sedang dan tinggi. Jasa ekosistem air yang memiliki dominasi kelas tinggi berada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Malang. Sebaran ekosistem air dapat dilihat pada: Peta 3.5 Jasa Ekosistem Air Provinsi Jawa Timur.

3.1.7 Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan permukaan fisik suatu lahan. Luas lahan di wilayah Jawa Timur adalah 4.779.975 hektar (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008) terdiri dari 12,10% tutupan lahan kawasan lindung dan 87,90% tutupan lahan kawasan budi daya. Peta tutupan lahan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Peta 3.6 dan 3.7.

Tabel 3.3 Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Timur

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
Kawasan Budi daya	4.201.404,70	87,90
Hutan Produksi	782.772,00	16,38
Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
Pertanian lahan basah	911.863,00	19,08
Pertanian lahan kering	1.108.627,71	23,19
Perkebunan	359.481,00	7,52
Industri	7.403,80	0,15
Permukiman	595.255,00	12,45
Lainnya	74.430,89	1,56
Kawasan Lindung	578.571,30	12,10
Hutan Lindung	344.742,00	7,21

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
Cagar Alam	10.958,00	0,23
Taman Nasional	176.696,00	3,70
Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
Taman Wisata Alam	298,00	0,01

Sumber: KLHK diolah BPIW, 2022.

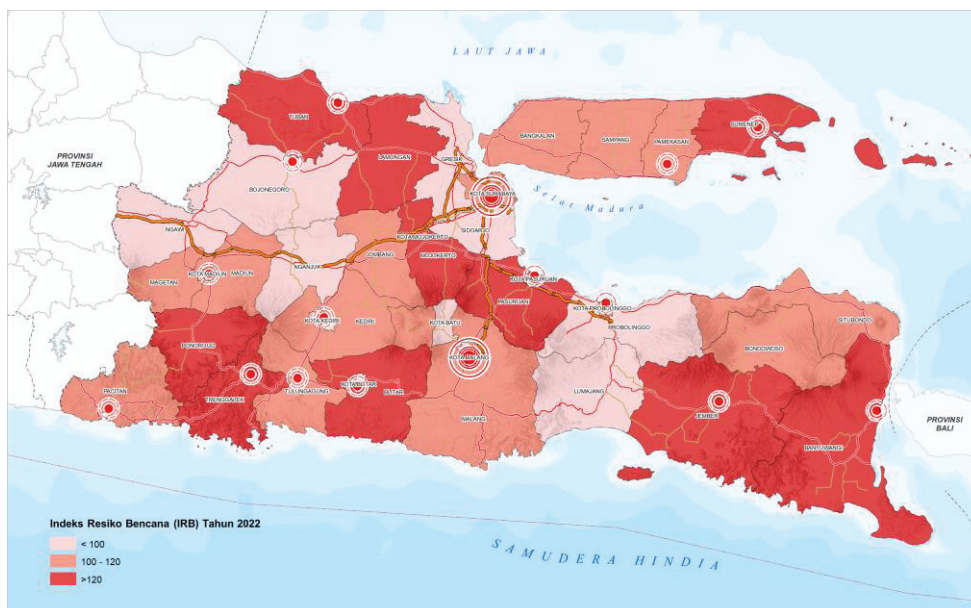
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tutupan lahan di Jawa Timur mengalami perubahan yang signifikan, yang banyak terjadi adalah perubahan lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman. Kawasan Gerbangkertasusila Plus, terjadi pengurangan lahan pertanian menjadi permukiman sebanyak 53.523 ha/tahun (8,07%), Selingkar Wilis mengalami pengurangan lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman sebanyak 25.071 ha/tahun (4,68%), dan Kabupaten Banyuwangi juga terjadi pengurangan lahan pertanian dan perkebunan menjadi permukiman sebanyak 3.338 ha/tahun (3.93%).

Berdasarkan perubahan penggunaan lahan tahun 2010–2019, pertumbuhan permukiman di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat pada kawasan Jawa Timur bagian barat yang menghubungkan Kawasan GKS Plus dan Selingkar Wilis.

Kawasan GKS Plus merupakan lumbung pangan nasional, dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 394.608 hektare (34% Jawa Timur), sehingga perlu diperhatikan dalam pengurangan lahan pertanian menjadi permukiman.

3.1.8 Kerawanan Terhadap Bencana

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Timur juga memiliki risiko bencana alam seperti: banjir, tsunami, abrasi, dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kelas risiko bencana sedang dengan skor 121,70 dan menempati urutan/rangking 29 di tingkat nasional dari 34 provinsi. Terdapat 3 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 35 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan, Sumenep, dan Jember.



Sumber: BNPB diolah BPIW, 2022.

Gambar 3.2 Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota 2022

A. Gempa Bumi, Longsor, dan Tsunami

Jawa Timur memiliki potensi gempa bumi, baik dari sesar-sesar aktif maupun dari zona subduksi di selatan Jawa Timur (Lempeng Eurasia dan Indo Australia). Sesar aktif di Jawa Timur adalah sesar Rembang, Madura, Kangean, Sakala (di bagian utara) dan sesar Kendeng. Pasuruan, dan Probolinggo (bagian tengah). Berdasarkan data dari BNPB, pada tahun 2022 beberapa kejadian bencana alam gempa bumi terjadi 2 kali yaitu di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo. Untuk kejadian bencana alam longsor kurang lebih terdapat 56 titik kejadian dengan dominasi di Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, untuk kejadian bencana tsunami di Jawa Timur yang cukup besar terakhir terjadi pada tahun 1994. Namun potensi bencana masih tetap besar karena kondisi geografis yang ada.

B. Rawan Gunung Berapi

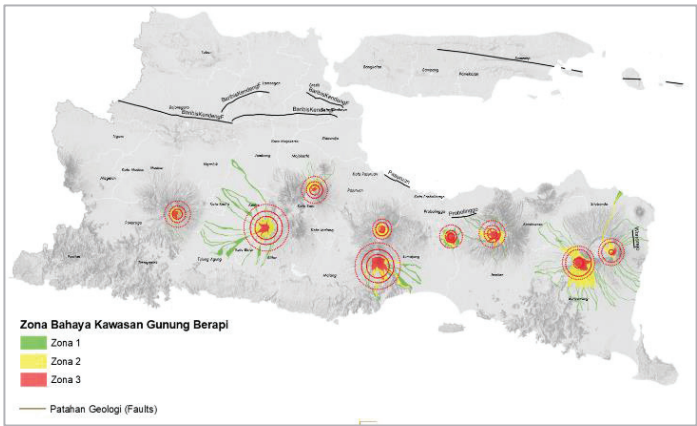
Beberapa gunung berapi yang masih aktif di Jawa Timur, kemungkinan sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Kawasan rawan letusan gunung berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longsor material vulkanik. Bahaya tersebut mengancam kawasan di sekitar Gunung Semeru, yaitu wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, bagian selatan Jawa Timur; dan kawasan sekitar gunung lainnya di Jawa Timur. Selengkapnya tingkat risiko bencana gunung berapi dapat dilihat pada: Peta Rawan Bencana Gunung Berapi. Terdapat tujuh (7) gunung aktif di Jawa Timur. Dominasi lokasi gunung berada di tengah dan selatan Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 3.4 Gunung Berapi di Provinsi Jawa Timur

Nama Gunung	Lokasi	Keterangan
Lawu	Ngawi, Magetan.	Tidak Aktif
Wilis	Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk.	Tidak Aktif
Kelud	Kediri, Blitar, Malang.	Aktif
Bromo	Malang, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan.	Aktif
Semeru	Malang, Lumajang.	Aktif
Lamongan	Lumajang, Probolinggo.	Aktif
Argopuro	Probolinggo, Jember.	Tidak Aktif
Raung	Banyuwangi, Bondowoso, Jember.	Aktif
Arjuna-Welirang	Pasuruan, Mojokerto.	Aktif
Ijen	Bondowoso, Banyuwangi.	Aktif

Sumber: BNPB diolah BPIW, 2022.

Di wilayah Jawa Timur terdapat daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap bencana tsunami yaitu meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan, Trenggalek, Malang bagian selatan, Blitar bagian selatan, Lumajang dan Tulungagung bagian selatan. Peristiwa Tsunami pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 yang dipicu oleh gempa bumi dengan kekuatan 7,2 skala *richter* mengakibatkan korban 377 jiwa.



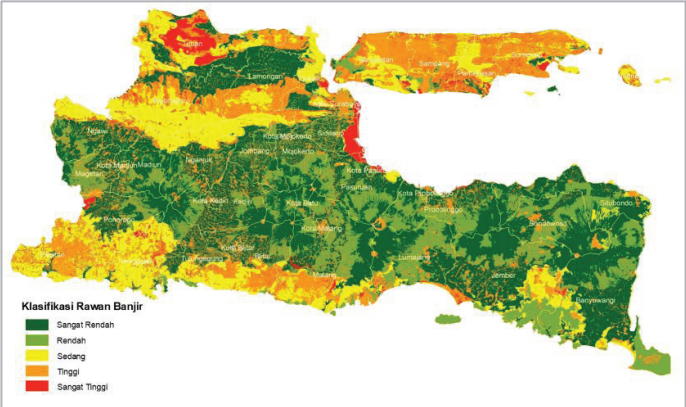
Sumber: BNPB diolah BPIW, 2022.

Gambar 3.3 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi
Provinsi Jawa Timur

C. Rawan Banjir

Banjir di Jawa Timur dibedakan menjadi banjir aliran sungai dan banjir rob aliran laut. Kawasan rawan banjir terutama berada pada pesisir utara Jawa Timur, di sekitar DAS Bengawan Solo (Madiun, Bojonegoro, Gresik, dan Lamongan), sekitar DAS Brantas (Surabaya, Mojokerto, Kediri, dan Trenggalek), dan sebagian pesisir selatan Jawa Timur (Jember dan Banyuwangi). Sedangkan kawasan banjir rob berada di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, serta Pamekasan.

Beberapa lokasi banjir berada di sistem di perkotaan disebabkan oleh aliran drainase yang kurang baik hingga cuaca ekstrem (hujan lebat), seperti di Kota Surabaya yang luas daerah banjir mencapai 16.158 hektare. Banjir juga terjadi di sekitar Kali Porong, Kabupaten Sidoarjo. Banjir ini terjadi karena sedimentasi dari lumpur Lapindo yang masuk ke Kali Porong, sehingga Kali Porong mengalami pendangkalan.



Sumber: BNPB diolah BPIW, 2022.
Gambar 3.4 Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Jawa Timur

D. Rawan Kekeringan

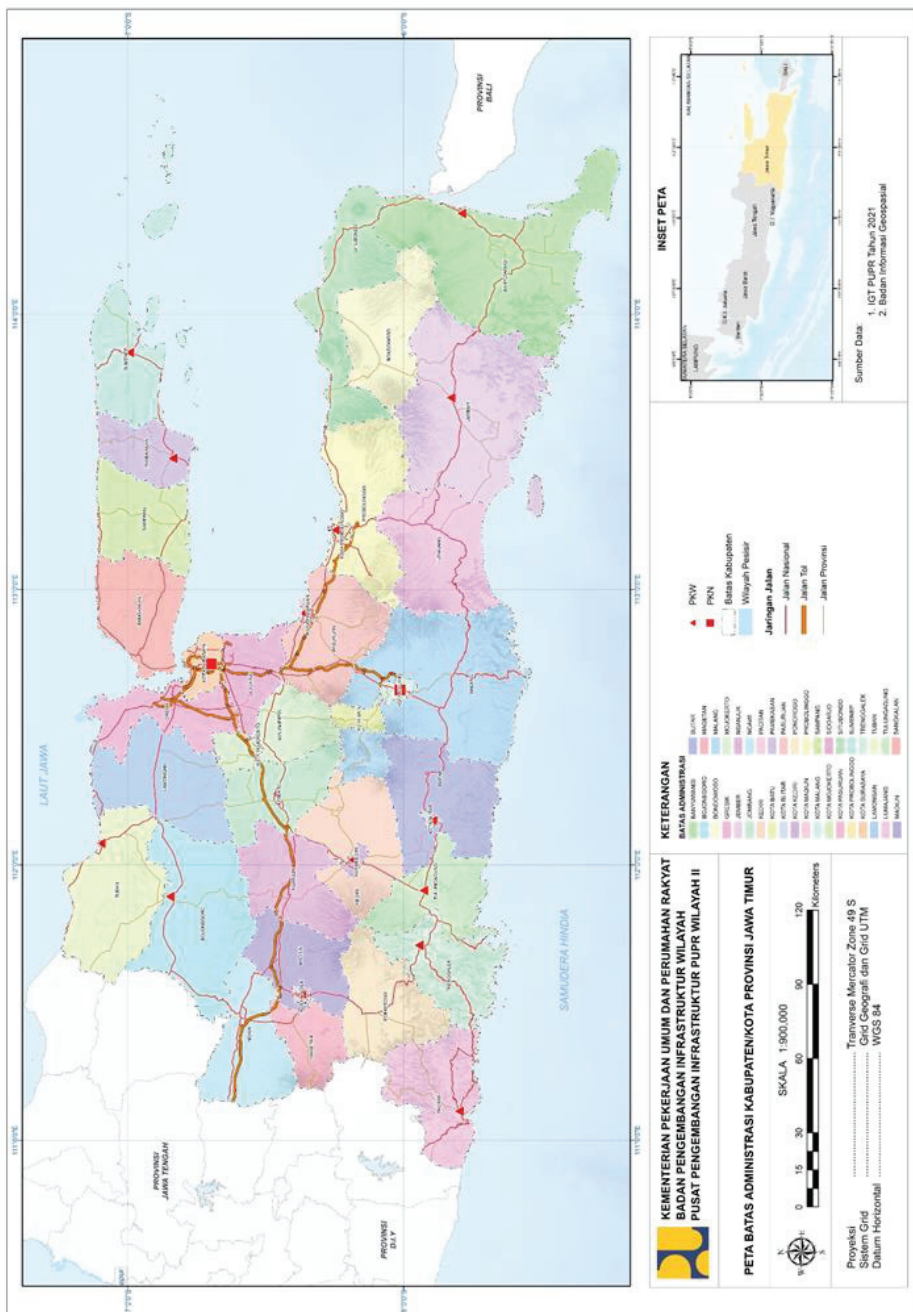
Pada tahun 2021 kekeringan di Jawa Timur melanda 23 kabupaten/kota, daerah kekeringan terbanyak berada di Kabupaten Pacitan (115 desa), Kabupaten Sampang (78 desa), dan Kabupaten Bangkalan (69 desa). Dari jumlah itu, 232 kecamatan dan 699 desa/kelurahan mengalami kekeringan kritis, yakni kondisi kekeringan yang jarak lokasi rumah warga dengan sumber air lebih dari 3 km. Rincian daerah kekeringan tersebut ada dalam tabel di bawah ini.

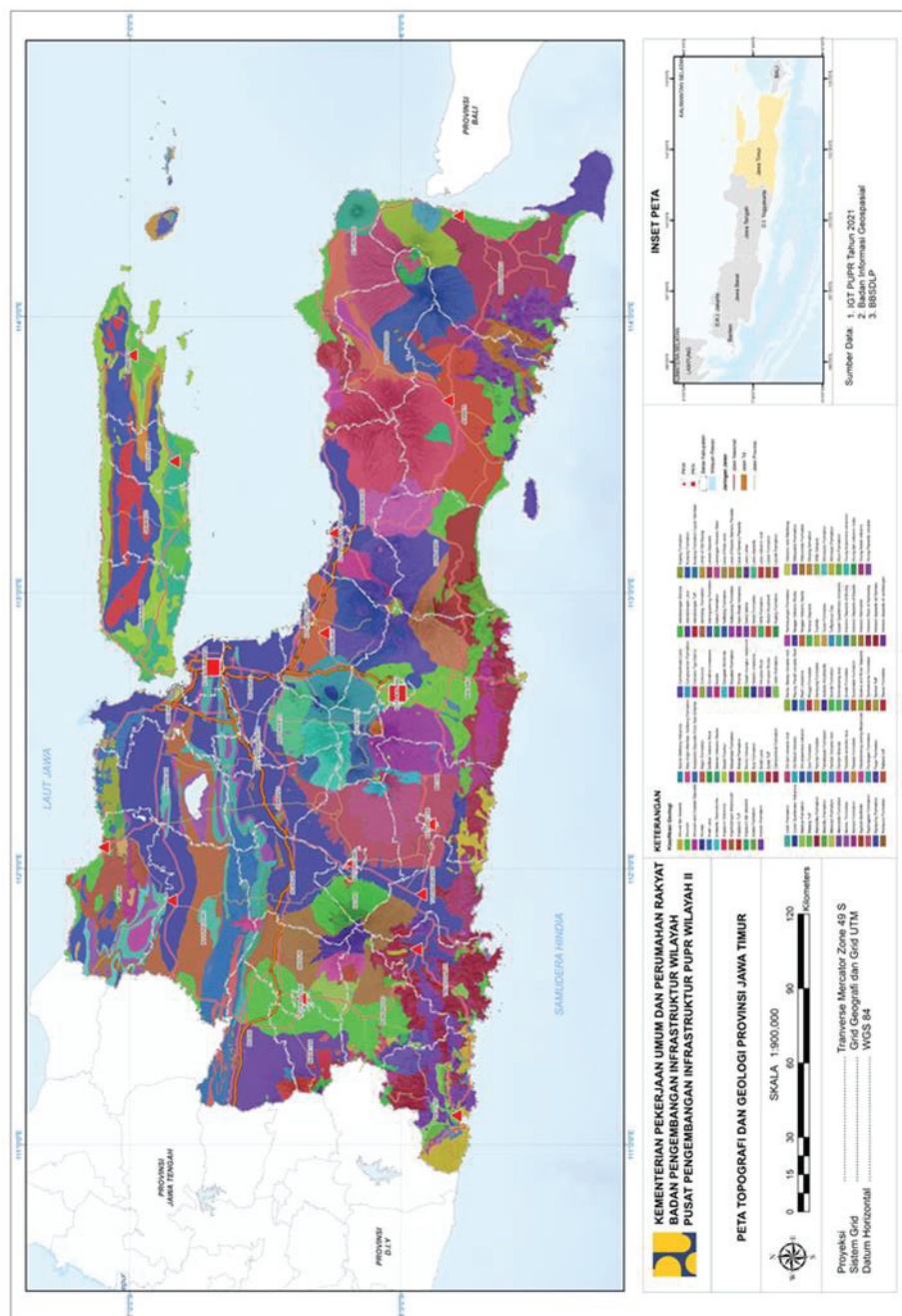
Tabel 3.5 Daerah Terdampak Kekeringan di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Daerah Terdampak
2018	Magetan, Pasuruan, Bondowoso, Nganjuk, Pacitan, Bojonegoro, Blitar, Sumenep, Tuban, Pamekasan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, dan Mojokerto.
2019	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.
2020	Nganjuk, Situbondo, dan Ponorogo.
2021	Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.

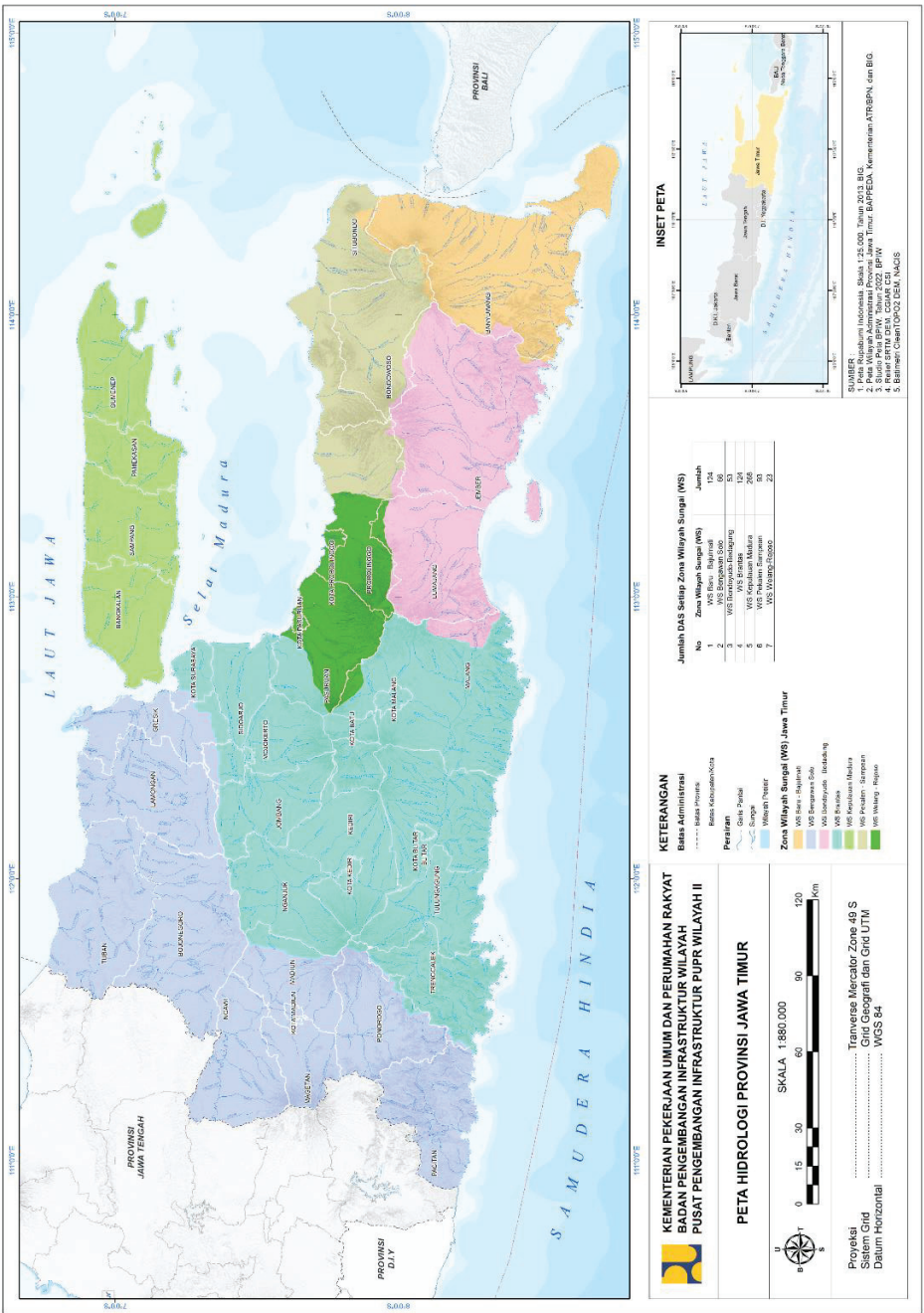
Sumber: BNPB diolah BPIW, 2022.

Selengkapnya sebaran wilayah risiko bencana alam di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Peta 3.8.

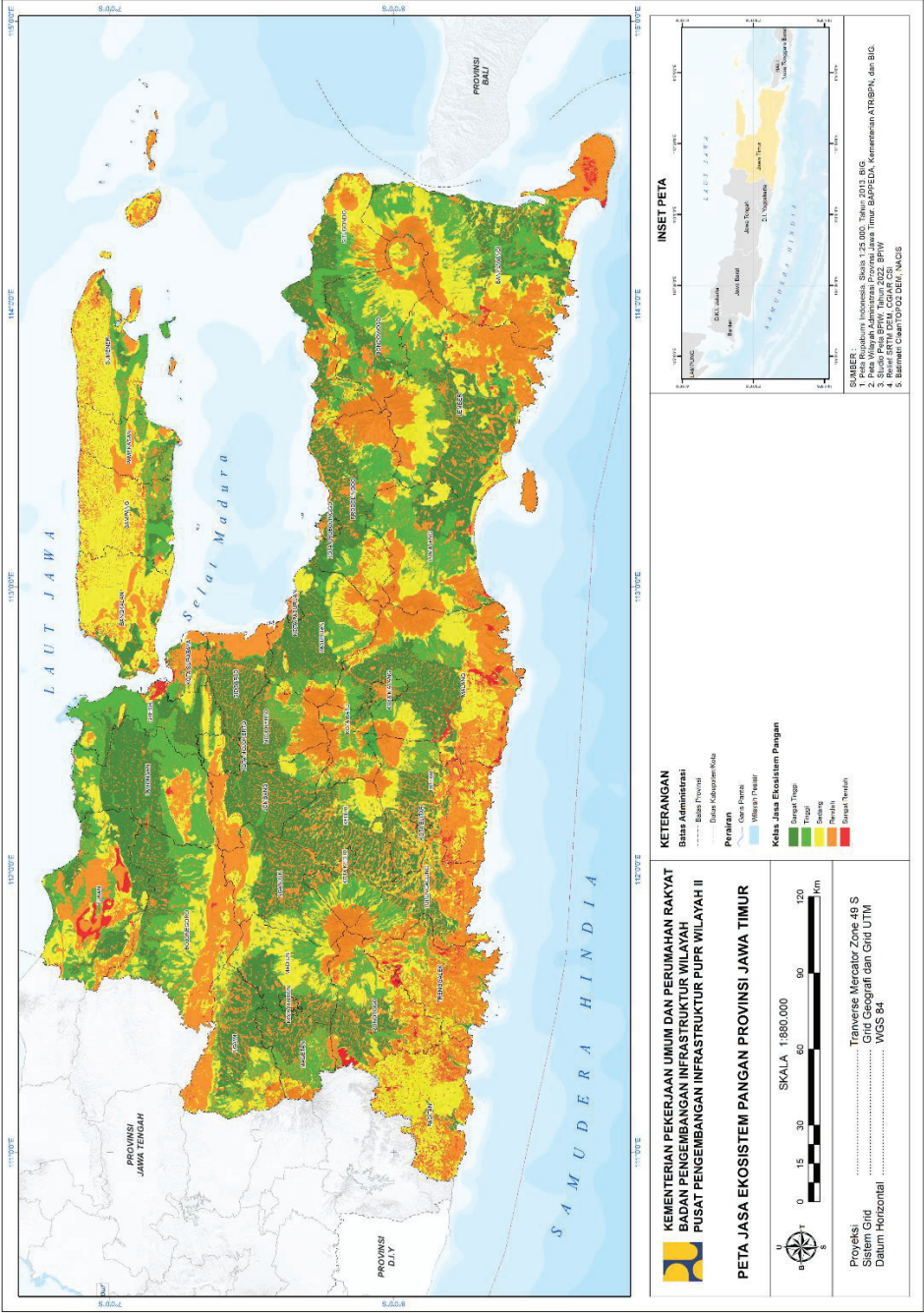




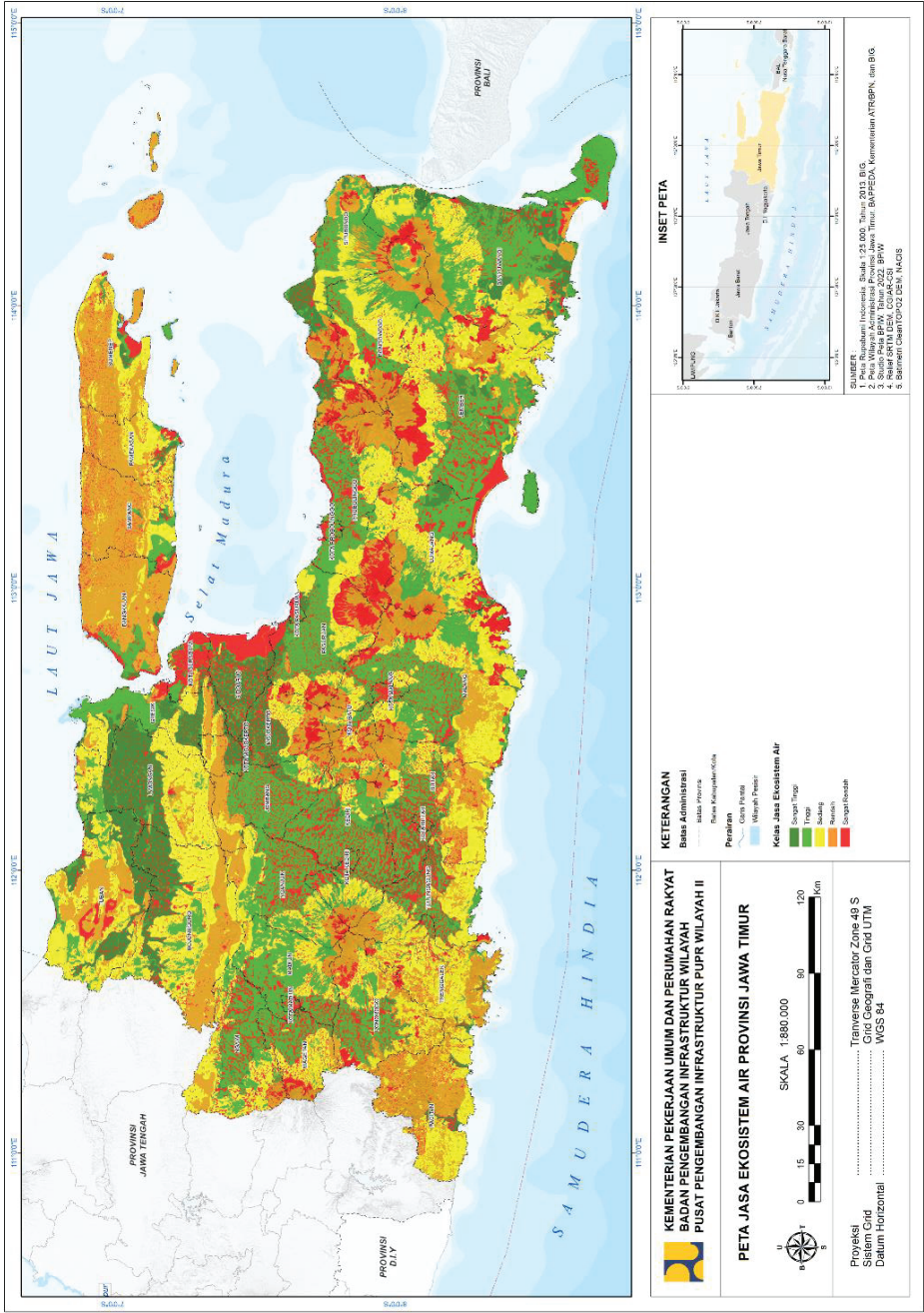
Peta 3.2 Profil Topografi dan Geologi Provinsi Jawa Timur



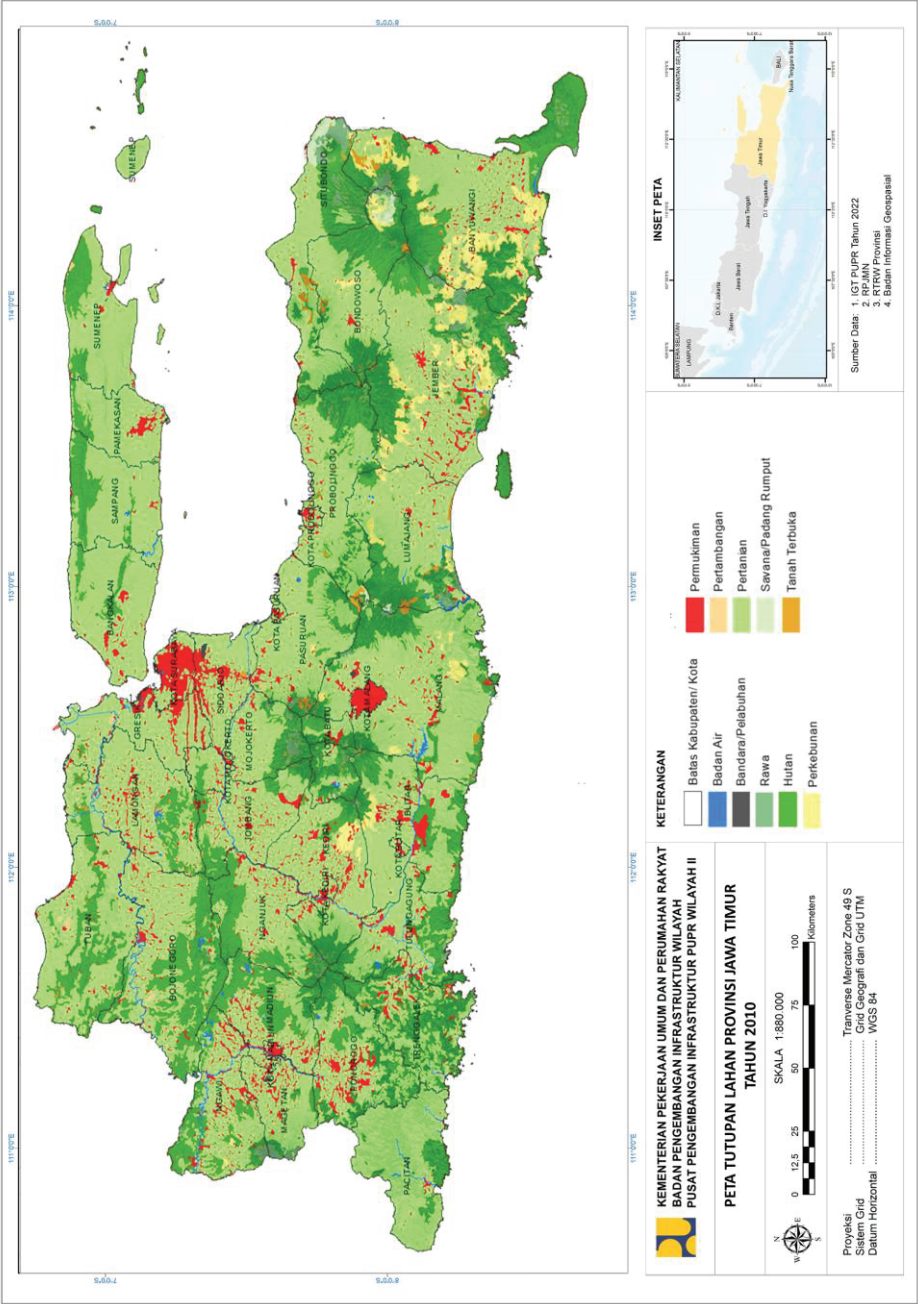
Peta 3.3 Profil Hidrologi Provinsi Jawa Timur



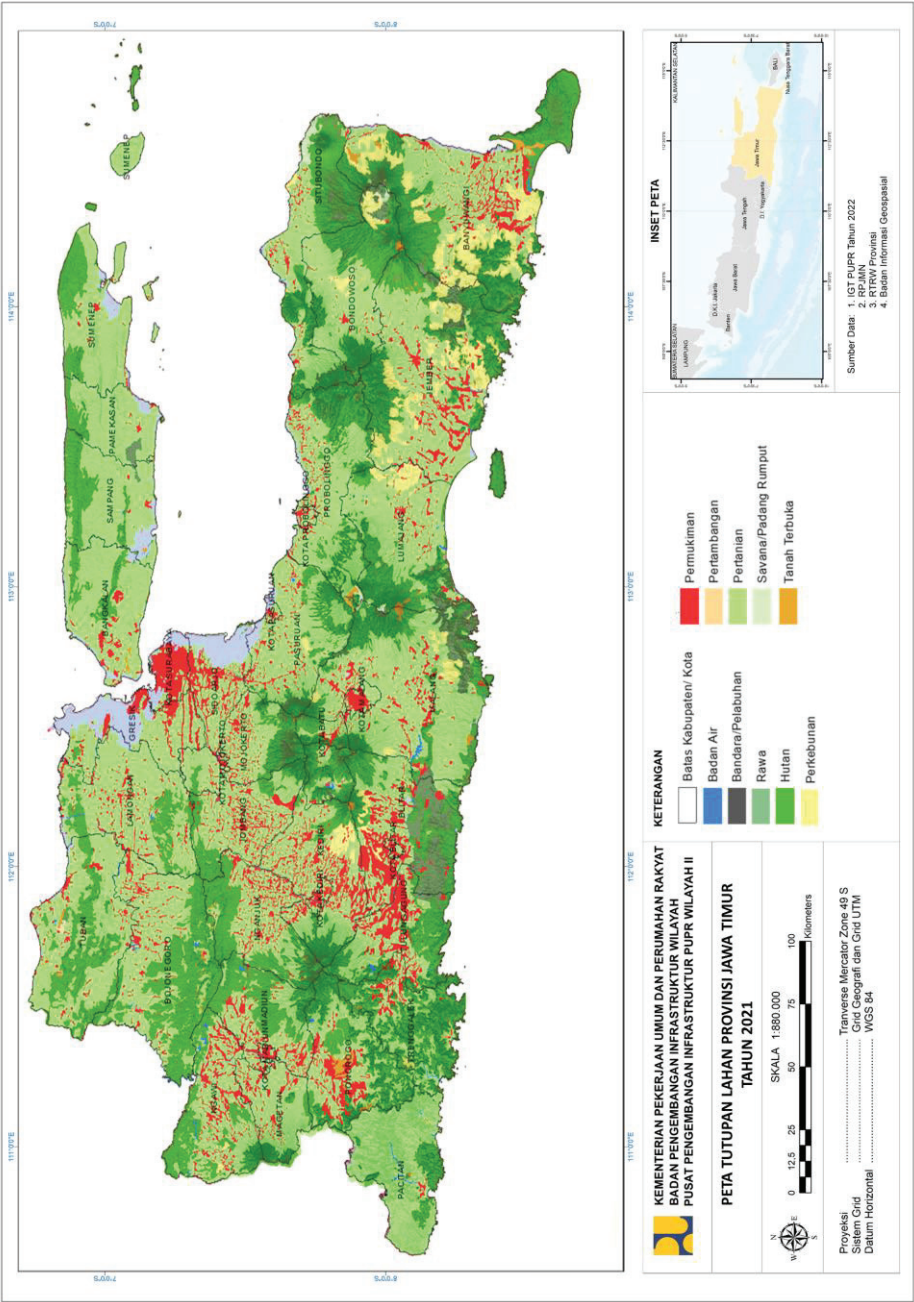
Peta 3.4 Profil Jasa Ekosistem Pangan Provinsi Jawa Timur 2022



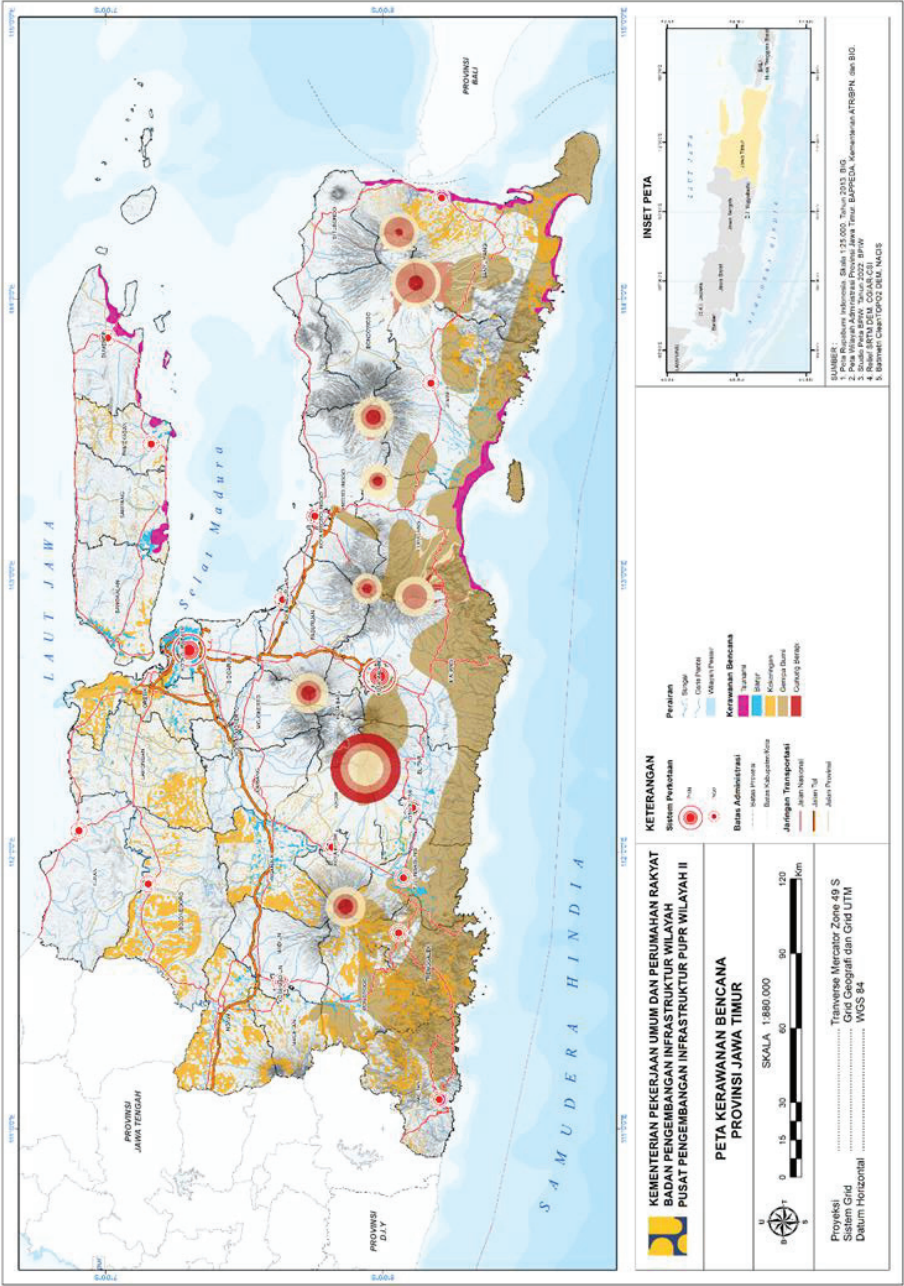
Peta 3.5 Profil Jasa Ekosistem Air Provinsi Jawa Timur 2022



Peta 3.6 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Peta 3.7 Tutupan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021



Peta 3.8 Kerawanan Bencana Provinsi Jawa Timur

3.2 Profil Demografi

Dinamika kependudukan, karakteristik dari populasi penduduk, dapat diketahui dari demografi suatu daerah, oleh karena itu profil demografi tidak lepas dari dokumen ini karena dapat mendeskripsikan kondisi demografi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisis perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR. Pembahasan profil demografi di Jawa Timur, antara lain tentang: kepadatan penduduk, jenis pekerjaan, angkatan kerja, angka kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sub indikatornya.

3.2.1 Profil Kependudukan (Jumlah dan Kepadatan Penduduk)

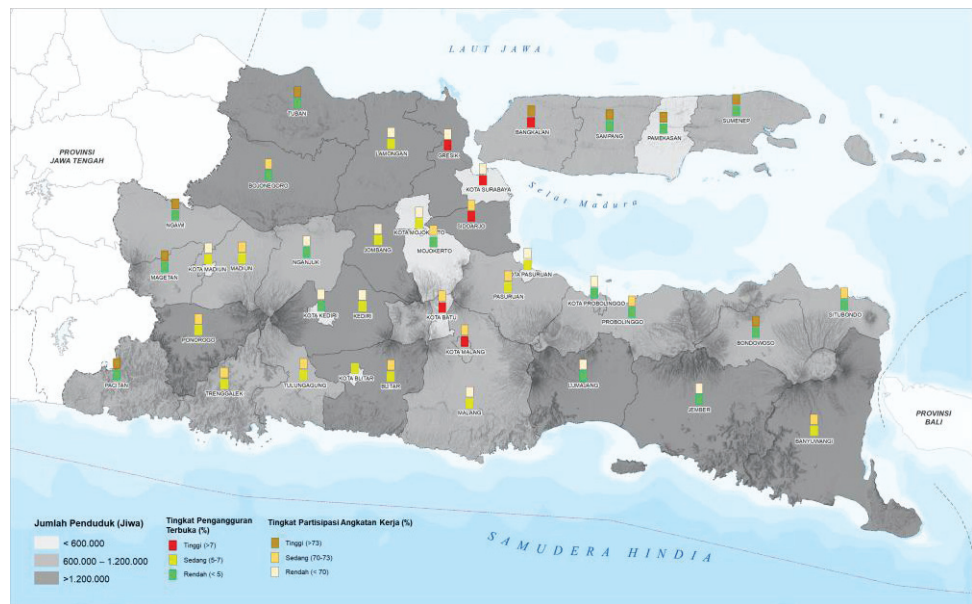
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 41.149.974 jiwa. Rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 20.525.756 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 20.624.218 jiwa. Data dan informasi jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Populasi penduduk terpadat berada di Kota Surabaya yaitu sebanyak 2.887.220 jiwa dan terendah di Kota Mojokerto yakni sebanyak 134.350 jiwa.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2012-2022

No	Kabupaten/ Kota	Tahun										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten/Regency												
1	Pacitan	545.905	547.917	549.481	550.986	552.307	553.388	554.000	555.000	586.110	589.110	592.920
2	Ponorogo	861.806	863.890	865.809	867.393	868.814	869.894	871.000	871.000	949.320	955.840	964.250
3	Trenggalek	681.706	683.791	686.781	689.200	691.295	693.104	695.000	696.000	731.130	734.890	739.670
4	Tulungagung	1.004.711	1.009.411	1.015.974	1.021.190	1.026.101	1.030.790	1.035.000	1.039.000	1.089.780	1.096.590	1.105.340
5	Blitar	1.130.423	1.136.701	1.140.793	1.145.396	1.149.710	1.153.803	1.158.000	1.161.000	1.223.750	1.231.010	1.240.320
6	Kediri	1.521.895	1.530.504	1.538.929	1.546.883	1.554.385	1.561.392	1.568.000	1.574.000	1.635.290	1.644.400	1.656.020
7	Malang	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315	2.560.675	2.576.596	2.592.000	2.606.000	2.654.450	2.668.300	2.68.590
8	Lumajang	1.017.900	1.023.818	1.026.378	1.030.193	1.033.698	1.036.823	1.040.000	1.042.000	1.119.250	1.127.090	1.137.230
9	Jember	2.367.482	2.381.400	2.394.608	2.407.115	2.419.000	2.430.185	2.441.000	2.451.000	2.536.730	2.550.360	2.567.720
10	Banyuwangi	1.574.528	1.582.586	1.588.082	1.594.083	1.599.811	1.604.897	1.610.000	1.614.000	1.708.110	1.718.460	1.731.730
11	Bondowoso	748.127	752.791	756.989	761.205	765.094	768.912	772.000	776.000	776.150	778.530	781.420
12	Situbondo	657.874	660.702	666.013	669.713	673.282	676.703	680.000	683.000	685.970	688.340	691.260
13	Probolinggo	1.116.390	1.123.204	1.132.690	1.140.480	1.148.012	1.155.214	1.162.000	1.169.000	1.152.540	1.155.890	1.159.970
14	Pasuruan	1.543.723	1.556.711	1.569.507	1.581.787	1.593.683	1.605.307	1.617.000	1.627.000	1.605.970	1.611.810	1.619.040
15	Sidoarjo	2.016.974	2.048.986	2.083.924	2.117.279	2.150.482	2.183.682	2.217.000	2.249.000	2.082.800	2.091.930	2.103.400
16	Mojokerto	1.049.886	1.057.808	1.070.486	1.080.389	1.090.075	1.099.504	1.109.000	1.118.000	1.119.210	1.125.520	1.133.580
17	Jombang	1.220.404	1.230.881	1.234.501	1.240.985	1.247.303	1.253.078	1.259.000	1.264.000	1.318.060	1.325.910	1.335.970
18	Nganjuk	1.028.914	1.033.597	1.037.723	1.041.716	1.045.375	1.048.799	1.052.000	1.055.000	1.103.900	1.109.680	1.117.030
19	Madiun	669.088	671.883	673.988	676.087	677.993	679.888	681.000	683.000	744.350	750.140	757.670
20	Magetan	624.373	625.703	626.614	627.413	627.984	628.609	629.000	629.000	670.810	674.130	678.340
21	Ngawi	822.605	824.587	827.829	828.783	829.480	829.899	830.000	830.000	870.060	873.350	877.430
22	Bojonegoro	1.223.079	1.227.704	1.232.386	1.236.607	1.240.383	1.243.906	1.247.000	1.250.000	1.301.640	1.307.600	1.315.130
23	Tuban	1.134.584	1.141.497	1.147.097	1.152.915	1.158.374	1.163.614	1.168.000	1.173.000	1.198.010	1.203.130	1.209.540
24	Lamongan	1.184.581	1.186.382	1.187.084	1.187.795	1.188.193	1.188.478	1.189.000	1.189.000	1.344.170	1.356.030	1.371.510
25	Gresik	1.211.686	1.227.101	1.241.613	1.256.313	1.270.702	1.285.018	1.299.000	1.313.000	1.311.220	1.320.570	1.332.660
26	Bangkalan	928.024	937.497	945.821	954.305	962.773	970.894	979.000	987.000	1.060.380	1.071.710	1.086.620
27	Sampang	903.613	913.499	925.911	936.801	947.614	958.082	969.000	979.000	969.690	976.020	984.160
28	Pamekasan	817.690	827.407	836.224	845.314	854.194	863.004	871.000	880.000	850.060	853.510	857.820
29	Sumenep	1.056.415	1.061.211	1.067.202	1.072.113	1.076.805	1.081.204	1.085.000	1.089.000	1.124.440	1.129.820	1.136.630
Kota/City												
30	Kediri	273.695	276.619	278.072	280.004	281.978	284.003	286.000	287.000	286.800	287.960	289.420
31	Blitar	134.723	135.702	136.903	137.908	139.117	139.995	141.000	142.000	149.150	150.370	151.960
32	Malang	834.527	840.803	845.973	851.298	856.410	861.414	866.000	871.000	843.810	844.930	846.130
33	Probolinggo	222.292	223.881	226.777	229.013	231.112	233.123	235.000	237.000	239.650	241.200	243.200
34	Pasuruan	190.191	192.285	193.329	194.815	196.202	197.698	199.000	200.000	208.010	209.530	211.500
35	Mojokerto	122.594	123.806	124.719	125.706	126.404	127.279	128.000	129.000	132.430	133.270	134.350
36	Madiun	172.886	174.114	174.373	174.995	175.607	176.099	177.000	177.000	195.180	196.920	199.190
37	Surabaya	2.805.718	2.821.929	2.833.924	2.848.583	2.862.406	2.874.699	2.886.000	2.896.000	2.874.310	2.880.280	2.887.220
38	Batu	194.700	196.189	198.608	200.485	202.319	203.997	206.000	207.000	213.050	214.650	216.740
Total		38.106.590	38.363.195	38.610.202	38.847.561	39.075.152	39.292.972	39.503.000	39.698.000	40.665.740	40.878.780	41.149.974

Sumber: BPS Jawa Timur, 2023.

Jumlah penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010–2020) sebesar 0,70% dan untuk laju pertumbuhan tahun (2020-2022) sebesar 0,68%. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 99,60% , Angka kelahiran di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi. Hampir setengah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah Kalangan Millenial dan Gen-Z yang perkiraan berkisar umur 8-39 tahun, artinya sebagian besar penduduk Jawa Timur ada pada usia produktif. Penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif artinya *dependency ratio* atau angka ketergantungan di Provinsi Jawa Timur cukup rendah.



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2023.
Gambar 3.5 Jumlah Penduduk, TPT, dan TPAK per Kabupaten/Kota Tahun 2022

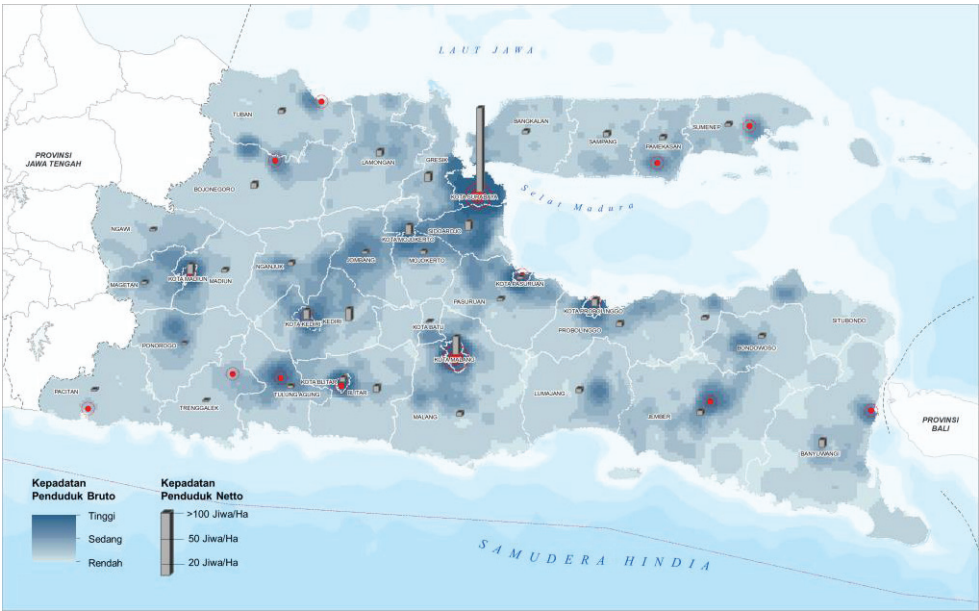
Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk ini dapat dibedakan menjadi kepadatan penduduk *gross* dan *netto*. Kepadatan penduduk *gross* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas administrasi wilayah. Sedangkan kepadatan penduduk *netto* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas kawasan budi daya saja. Kepadatan penduduk *netto* terbesar ada di Kota Surabaya dengan kepadatan 159.641 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah ada di Kabupaten Malang dengan 757 jiwa/km².

Tabel 3.7 Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayan (km ²)		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
		Bruto	Netto	Bruto	Netto
Kabupaten					
1	Pacitan	1.301,45	198,28	456	2.990
2	Ponorogo	3.600,54	271,09	268	3.557
3	Trenggalek	1.752,31	296,25	422	2.497
4	Tulungagung	2.312,23	197,15	478	5.607
5	Blitar	1.555,99	106,16	797	11.684
6	Kediri	1.252,10	71,96	1.323	23.014

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
		Bruto	Netto	Bruto	Netto
7	Malang	3.311,74	355,00	81	757
8	Lumajang	1.110,90	147,41	1.024	7.715
9	Jember	1.524,28	283,57	1.685	9.055
10	Banyuwangi	1.751,81	117,40	989	14.751
11	Bondowoso	1.798,14	135,13	435	5.783
12	Situbondo	1.112,87	141,65	621	4.880
13	Probolinggo	707,01	136,95	1.641	8.470
14	Pasuruan	3.463,53	312,35	467	5.183
15	Sidoarjo	984,25	123,75	2.137	16.997
16	MojoKerto	1.288,22	169,72	880	6.679
17	Jombang	1.393,65	251,96	959	5.302
18	Nganjuk	1.432,44	151,18	780	7.389
19	Madiun	796,03	137,24	952	5.521
20	Magetan	1.489,52	142,19	455	4.771
21	Ngawi	1.418,19	222,50	619	3.944
22	Bojonegoro	1.732,16	127,50	759	10.315
23	Tuban	1.229,16	179,79	984	6.727
24	Lamongan	731,49	122,17	1.875	11.226
25	Gresik	1.659,39	84,51	803	15.769
26	Bangkalan	2.089,79	170,24	520	6.383
27	Sampang	1.248,19	117,07	788	8.407
28	Pamekasan	1.971,83	132,09	435	6.494
29	Sumenep	1.143,79	193,45	994	5.876
Kota					
30	Kediri	194,16	16,04	1.491	18.047
31	Blitar	33,11	17,23	4.590	8.822
32	Malang	66,53	24,83	12.718	34.071
33	Probolinggo	36,11	17,98	6.736	13.525
34	Pasuruan	111,08	47,32	1.904	4.470
35	MojoKerto	20,21	7,38	6.647	18.194
36	Madiun	38,74	10,62	5.142	18.748
37	Surabaya	54,71	18,09	52.771	159.641
38	Batu	334,77	123,18	647	1.759

Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2023.



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2023.

Gambar 3.6 Kepadatan Penduduk Bruto dan Netto per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022

3.2.2 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Angkatan kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja, baik mereka yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur sebanyak 21,61 juta jiwa, yang terdiri dari 549,87 ribu jiwa penduduk bekerja dan 1,26 juta jiwa merupakan pengangguran. Jumlah angkatan kerja didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 85,76%.

Lapangan pekerjaan utama di Provinsi Jawa Timur berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan; dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya sebanyak 9.335.007 jiwa (45%). Kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 6.919.467 jiwa (33%). Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan

Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi merupakan sektor dengan jumlah penduduk terendah sebesar 4.708.493 jiwa (22%).

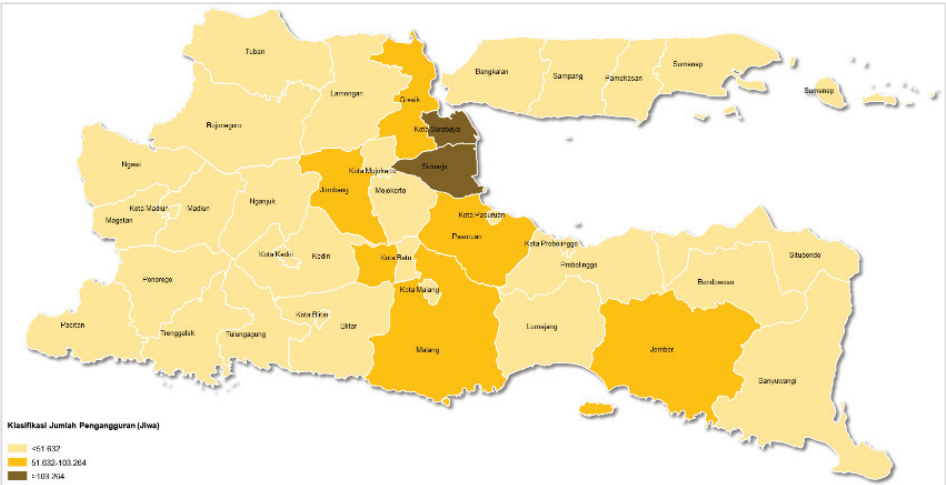
3.2.3 Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 1,26 juta jiwa, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,49% (di bawah TPT nasional 5,86%). Berdasarkan tren tahun 2016-2019, tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran dan persentase TPT tahun 2022 pada tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Jumlah Pengangguran dan TPT di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	TPT (%)	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	TPT (%)
Pacitan	2.951	3,65	Bojonegoro	11.194	4,69
Ponorogo	9.881	5,51	Tuban	11.805	4,54
Trenggalek	6.000	5,37	Lamongan	22.452	6,05
Tulungagung	16.556	6,65	Gresik	34.393	7,84
Blitar	11.518	5,45	Bangkalan	29.982	8,05
Kediri	11.645	6,83	Sampang	11.327	3,11
Malang	38.379	6,57	Pamekasan	NA	1,40
Lumajang	25.296	4,97	Sumenep	6.673	1,36
Jember	21.115	4,06	Kota Kediri	3.666	4,38
Banyuwangi	21.546	5,26	Kota Blitar	1.138	5,39
Bondowoso	12.317	4,32	Kota Malang	16.909	7,66
Situbondo	2.810	3,38	Kota Probolinggo	3.714	4,57
Probolinggo	17.159	3,25	Kota Pasuruan	2.941	6,18
Pasuruan	43.470	5,91	Kota Mojokerto	1.743	5,05
Sidoarjo	83.022	8,80	Kota Madiun	4.191	6,39
Mojokerto	17.061	4,83	Kota Surabaya	80.718	7,62
Jombang	12.451	5,47	Kota Batu	2.726	8,43
Nganjuk	9.977	4,74	Bojonegoro	11.194	4,69
Madiun	8.338	5,84	Tuban	11.805	4,54
Magetan	7.004	4,33	Lamongan	22.452	6,05
Ngawi	5.475	2,48	Gresik	34.393	7,84
Jawa Timur	633.176	5,49			

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2021.
Gambar 3.7 Klasifikasi Jumlah Pengukuran Tahun 2020 di Jawa Timur

3.2.4 Kemiskinan

Presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 10,38% (di atas nasional 9,54%) dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,18 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin turun dari tahun ke tahun, akan tetapi naik kembali pada tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid 19. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu Kabupaten Malang, Jember, Sampang, dan Sumenep. Sementara itu, kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu Kota Mojokerto, Batu, Madiun, dan Blitar.

Persentase penduduk miskin masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur

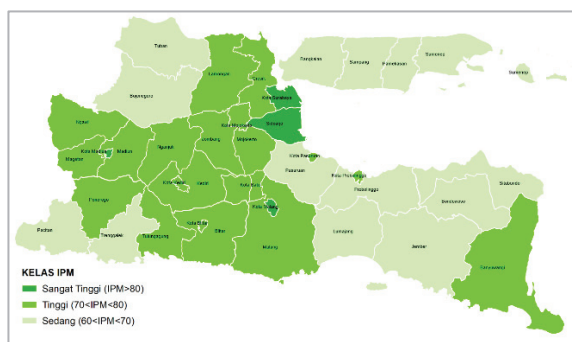
Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin	Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin
Pacitan	13.80	Magetan	9.84
Ponorogo	9.32	Ngawi	14.15
Trenggalek	10.96	Bojonegoro	12.21
Tulungagung	6.71	Tuban	15.02
Blitar	8.71	Lamongan	12.53
Kediri	10.65	Gresik	11.06
Malang	9.55	Bangkalan	19.44
Lumajang	9.06	Sampang	21.61
Jember	9.39	Pamekasan	13.93
Banyuwangi	7.51	Sumenep	18.76
Bondowoso	13.47	Kota Kediri	7.23
Situbondo	11.78	Kota Blitar	7.37
Probolinggo	17.12	Kota Malang	4.37
Pasuruan	8.96	Kota Probolinggo	6.65
Sidoarjo	5.36	Kota Pasuruan	6.37
Mojokerto	9.71	Kota Mojokerto	5.98
Jombang	9.04	Kota Madiun	4.76
Nganjuk	10.70	Kota Surabaya	4.72
Madiun	10.79	Kota Batu	3.79
Jawa Timur: 11,09			

Sumber: BPS, 2022

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 72,75 (lebih rendah dibandingkan IPM nasional 72,29). IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau menentukan level pembangunan suatu wilayah. Terdapat 4 sub-indikator IPM di Jawa Timur, yaitu: Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 71,30 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,19 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Timur adalah 7,78 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan sebesar Rp11.601.000,00.

Terdapat 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki IPM di bawah IPM provinsi. IPM tertinggi ada di Kota Surabaya (82,23) sedangkan IPM terendah Kabupaten Sampang (62,70).



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2021

Gambar 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

3.3 Profil Ekonomi

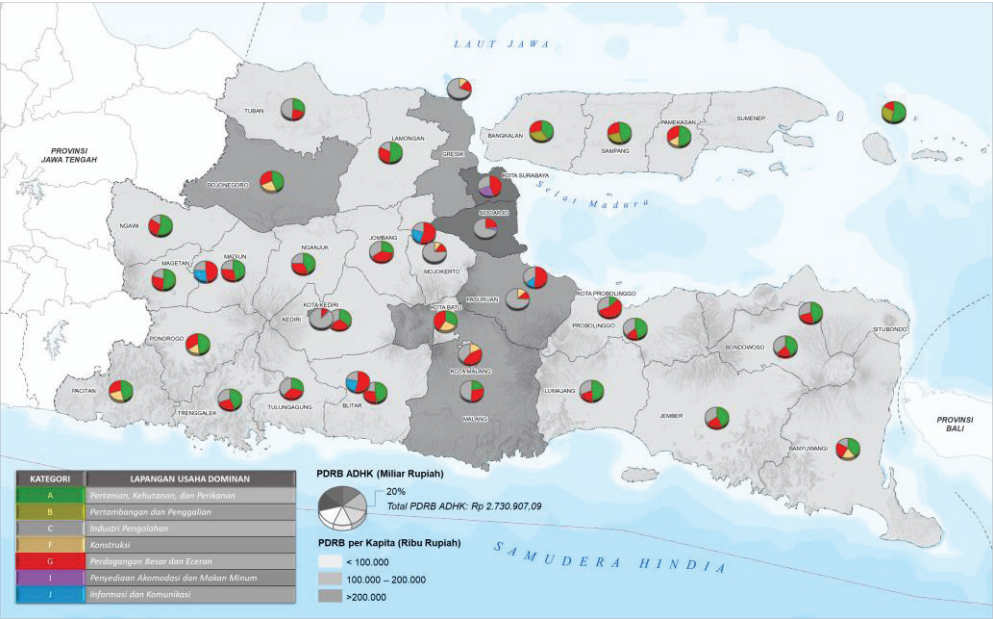
Ketidakpastian global yang melanda beberapa tahun lalu, tentunya menjadikan Jawa Timur harus berstrategi dalam mengatasi pertumbuhan perekonomiannya. Profil ekonomi mendeskripsikan kondisi ekonomi wilayah perencanaan 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk menyusun analisa perhitungan perencanaan kebutuhan infrastruktur PUPR, diantaranya adalah: PDRB, pendapatan per kapita, sektor unggulan wilayah, serta perkembangan investasi dan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD).

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar Rp2.730,91 Triliun (29,47% PDRB Pulau Jawa dan 14,26% PDB Nasional). Besaran kontribusi 3 sektor unggulan di Jawa Timur terhadap PDB Indonesia adalah sebagai berikut: sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 30,53%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 18,98%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 9,86%.

Sektor yang memiliki kontribusi dominan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur yaitu sektor industri pengolahan (30,93%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (19,14%) dan pertanian,

kehutanan dan perikanan (9,37%). Kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi adalah Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2023
Gambar 3.9 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

3.3.2 Pendapatan Per Kapita

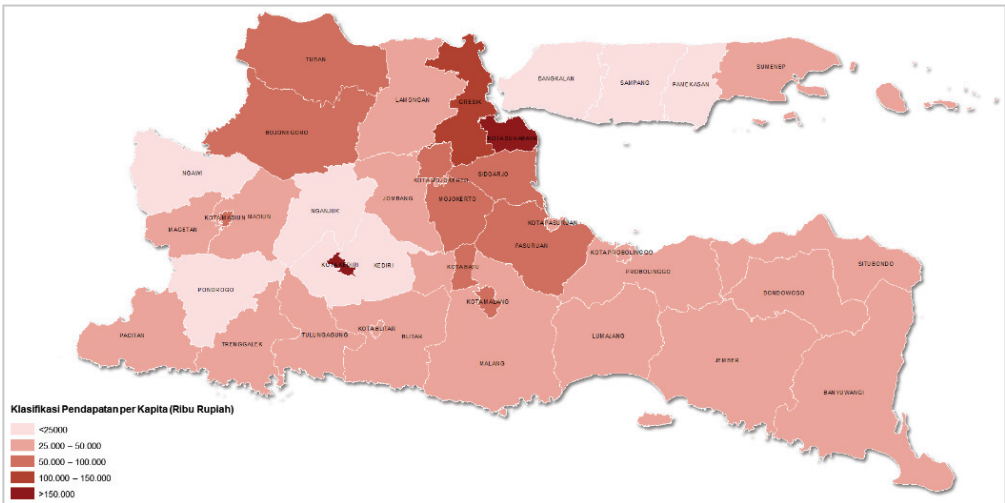
Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. PDRB Per Kapita Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 PDB Per Kapita mengalami peningkatan sebesar 10,52% mencapai Rp66,4 Juta. Namun apabila dibandingkan PDRB per kapita Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp 66,4 Juta dan PDRB per kapita Indonesia dengan nilai sebesar Rp 71,03 Juta.

Pendapatan per kapita berdasarkan PDRB dari tahun 2018-2022 dari kabupaten atau kota di Jawa Timur tertinggi dari setiap tahun adalah Kota Surabaya dengan nilai Rp655.616,2, sedangkan untuk pendapatan per kapita terendah di Jawa Timur dari setiap tahun adalah Kota Mojokerto ditahun 2016 yaitu dengan nilai Rp7637,0. Nilai dari pendapatan per kapita berdasarkan PDRB ADHB tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Pendapatan Per Kapita Berdasarkan PDRB ADHB 2018-2022

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Packer	27 000,0	28 734,0	26 972,0	16381,2	17986,5
Kab. Ponorogo	22 021,0	23 423,0	21 654,0	21350,0	23028,3
Kab. Trenggalek	24 974,0	26 634,0	25 087,0	19198,3	20882,3
Kab. Tulungagung	35 252,0	37 725,0	35 143,0	40166,7	44133,5
Kab. Blitar	29 475,0	31 388,0	29 490,0	37819,7	41379,3
Kab. Kediri	24 608,0	26 152,0	24 885,0	42692,7	46665,0
Kab. Malang	37 359,0	39 780,0	38 495,0	107036,4	117457,0
Kab. Lumajang	29 516,0	31 293,0	28 707,0	33678,6	36663,7
Kab. Jember	29 505,0	31 498,0	30 023,0	81068,8	88075,5
Kab. Banyuwangi	48 359,0	51 788,0	47 567,0	85918,6	93299,0
Kab. Bondowoso	23 948,0	25 584,0	25 706,0	21052,2	22901,9
Kab. Situbondo	27 733,0	29 578,0	29 244,0	21200,9	23128,6
Kab. Probolinggo	27 547,0	29 094,0	29 280,0	35605,5	38932,8
Kab. Pasuruan	84 045,0	89 581,0	90 747,0	157150,7	172654,2
Kab. Sidoarjo	85 373,0	90 618,0	94 818,0	210650,2	245222,5
Kab. Mojokerto	69 159,0	73 651,0	73 335,0	87145,0	95738,1
Kab. Jombang	30 097,0	32 005,0	30 303,0	41747,2	45930,4
Kab. Nganjuk	23 560,0	25 269,0	24 134,0	28053,3	30819,8
Kab. Madiun	25 882,0	27 724,0	25 475,0	20024,4	21879,4
Kab. Magetan	28 022,0	29 746,0	28 024,0	19587,9	21194,7
Kab. Ngawi	23 058,0	24 408,0	23 323,0	20814,5	22455,0
Kab. Bojonegoro	58 727,0	62 446,0	54 048,0	84200,9	100492,9
Kab. Tuban	51 990,0	55 401,0	52 085,0	65911,7	75187,7
Kab. Lamongan	31 309,0	33 109,0	29 221,0	41042,9	45441,1
Kab. Gresik	100 252,0	105 676,0	102 623,0	144656,1	163907,9
Kab. Bangkalan	24 361,0	24 978,0	22 038,0	24756,7	27164,2
Kab. Sampang	19 726,0	20 191,0	20 503,0	20638,9	23009,3
Kab. Pamekasan	18 259,0	19 331,0	19 779,0	17659,2	19263,4
Kab. Sumenep	30 135,0	30 569,0	29 166,0	35300,2	40255,3
Kota Kediri	447 216,0	483 982,0	462 199,0	141467,1	152791,1
Kota Blitar	44 702,0	47 841,0	45 090,0	7113,6	7833,9
Kota Malang	78 161,0	83 528,0	85 540,0	76617,3	84807,4
Kota Probolinggo	44 732,0	47 804,0	46 302,0	11699,9	12931,4
Kota Pasuruan	38 714,0	41 325,0	38 774,0	8491,1	9452,8
Kota Mojokerto	49 370,0	52 536,0	49 840,0	6935,6	7637,0
Kota Madiun	74 302,0	79 654,0	70 745,0	14435,4	15825,6
Kota Surabaya	186 739,0	200 359,0	193 010,0	590227,1	655616,2
Kota Batu	76 005,0	81 461,0	74 884,0	16841,1	18587,6
Jawa Timur	50 804,12	50 535,71	49 653,63	2454716,5	2730907,1

Sumber: BPS Jawa Timur 2022.



Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2023.

Gambar 3.10 Tingkat Pendapatan Per Kapita Provinsi Jawa Timur 2022

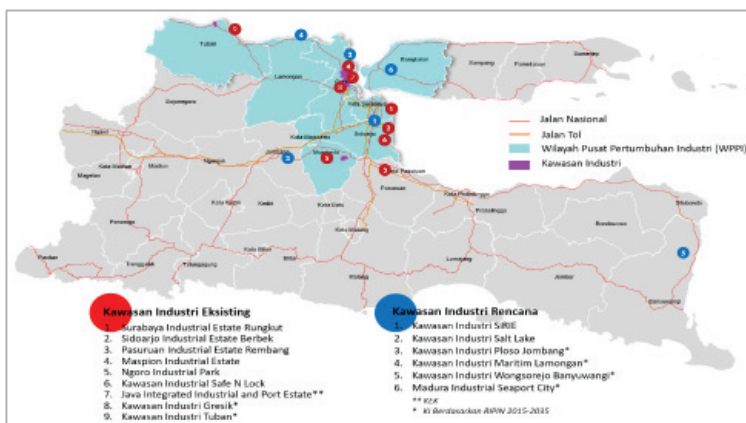
3.3.3 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001). Sektor ekonomi unggulan Jawa Timur terdiri dari sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

A. Sektor Industri

Berdasarkan RIPIN 2015—2035, di Provinsi Jawa Timur ada 1 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), yaitu WPPI Tuban—Lamongan—Gresik—Surabaya—Sidoarjo—Mojokerto—Bangkalan. Terdapat 6 Kawasan Industri (KI), yaitu: KI Tuban, KI Lamongan, KI Gresik, KI Bangkalan, KI Jombang, dan KI Banyuwangi. Juga satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri, yaitu KEK Gresik. Luas kawasan industri di Jawa Timur yakni sebesar 6.255,25 ha yang meliputi 9 kawasan industri *existing*. Selain itu juga terdapat 6 industri rencana. Sebaran Kawasan Industri dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Jumlah industri besar di Jawa Timur adalah 5.495 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 929.557 TK. Kabupaten/kota dengan jumlah industri besar terbanyak adalah: Kabupaten Sidoarjo (967 unit), Kabupaten Gresik (675 unit), dan Kota Surabaya (659 unit). Industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah industri makanan (198.289 TK), pengolahan tembakau (139.763 TK), dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (70.285 TK).



Sumber: RIPIN diolah BPIW, 2022.

Gambar 3.11 Sektor Unggulan Industri: Sebaran Kawasan Industri di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS tahun 2018-2022, 76% pangsa industri pengolahan dikuasai oleh 5 sub sektor yaitu makanan dan minuman (38,87%), pengolahan tembakau (23,65%), kimia, farmasi dan obat tradisional (9,65%), kertas dan barang dari kertas (5,14%) dan industri barang galian bukan logam (3,70%).

Total volume ekspor di Jawa Timur mencapai 381.447 ton, dengan 77% diantaranya melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Komoditas ekspor didominasi oleh: (1) sektor Industri dengan nilai mencapai USD 1,92 miliar (87,23% dari total ekspor); (2) sektor pertanian (7,42%) dengan nilai ekspor mencapai USD 163,04 juta; (3) sektor migas mencapai USD 10 juta (14,43%). Sedangkan impor mayoritas berupa bahan baku penolong dengan nilai USD 2,16 miliar (77,81%).

Tabel 3.11 Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Menurut Negara Asal di Jawa Timur Tahun 2022

	NILAI (MILIAR USD)	VOLUME (JUTA TON)
EKSPORT	2,20	15.700
IMPORT	2,77	33.100
SURPLUS/DEFISIT	-0,57	-17.400

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022.

Ekspor Provinsi Jawa Timur banyak ditujukan ke negara Asia dengan berbagai komoditas. Tujuan ekspor Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

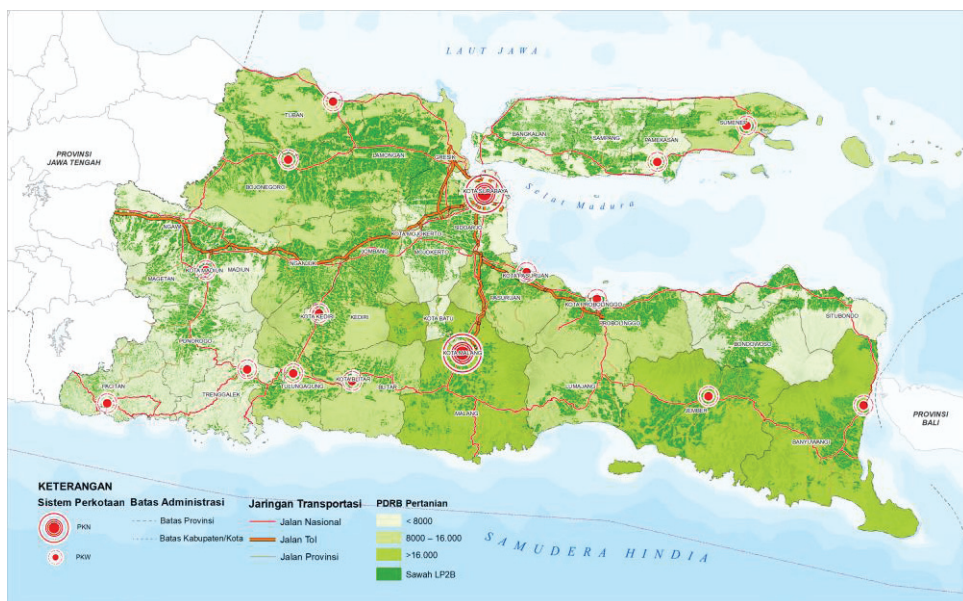
Tabel 3.12 Negara Tujuan dan Komoditas Utama Ekspor Jawa Timur

Komoditas Utama	NILAI (US\$ Juta)		
	Negara		
	2020	2021	2022
Industri Tembaga	49,48	62,43	82,25
	Tiongkok	Malaysia	Malaysia
Industri Minyak	5,01	84,55	102,74
	Angola	Thailand	Thailand
Industri Logam Mulia	63,56	83,61	101,04
	Jepang	Jepang	Jepang

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

B. Sektor Pertanian

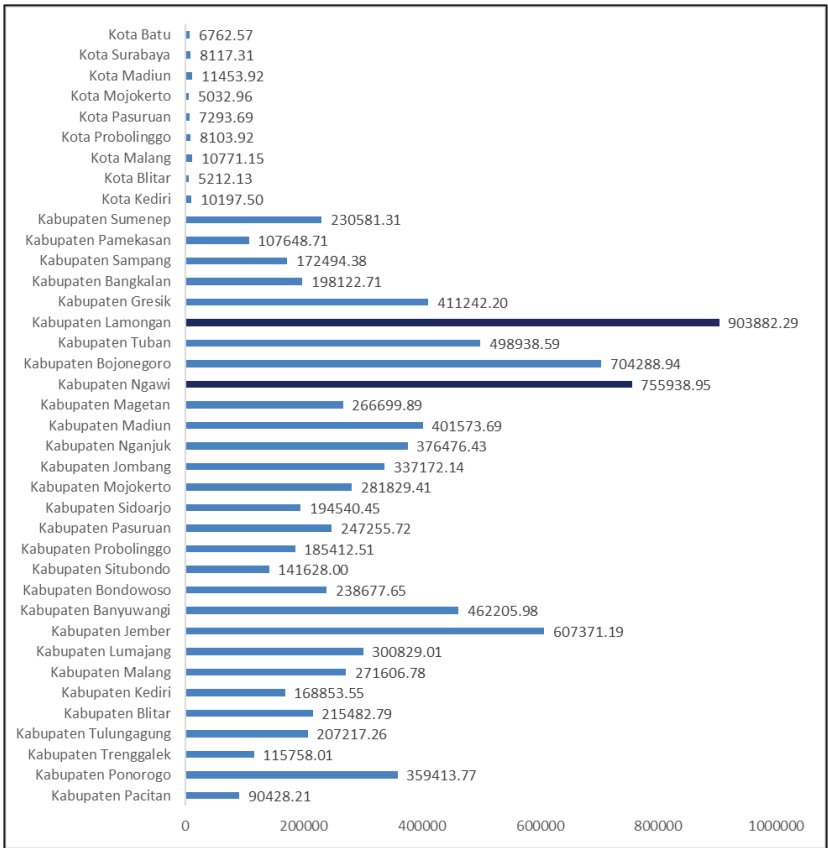
PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 303.292,05 M (2022, 24,76% nasional dan tertinggi se-Indonesia). PDRB subsektor tanaman pangan Jawa Timur terhadap nasional adalah Rp 81.338,18 miliar atau 26,82%. Luas lahan pertanian Jawa Timur sebesar 1.214.909 ha (16,27% luas lahan baku sawah nasional) berdasarkan Kepmen ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019. Produktivitas padi sebesar 5,69 ton/ha (2020, nasional sebesar 5,11 ton/ha), dengan produksi padi sebesar 10.022.386,98 ton (2020, 18,3% terhadap nasional).



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.12 Sektor Unggulan Pertanian: Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2022

Kabupaten/kota dengan kontribusi PDRB pertanian kehutanan dan perikanan tertinggi 2020 adalah Kabupaten Banyuwangi (Rp 24.081,0 miliar), Kabupaten Jember (Rp20.462,6 miliar), dan Kabupaten Malang (Rp15.679,5 miliar). Kabupaten dengan kontribusi produksi padi tertinggi: Kabupaten Lamongan (873 ribu ton), Kabupaten Ngawi (829 ribu ton), dan Kabupaten Bojonegoro (737 ribu ton).



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 3.13 Produksi Tanaman Padi per Kabupaten/Kota (ribu ton)

Distribusi masing-masing sub sektor pada PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2022 yaitu: Sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (74,74%); Sub sektor Kehutanan dan penebangan kayu (4,04%); Sub sektor Perikanan (21,22%). Untuk sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, distribusinya meliputi: tanaman pangan (26,82%), peternakan (22,20%), tanaman perkebunan (14,54%), tanaman hortikultura (10,09%), dan jasa pertanian dan perburuan (1,09%). Adapun komoditas unggulan pada masing masing sub sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Komoditas Unggulan di Jawa Timur

Sub Sektor	Komoditas Unggulan		
Tanaman Pangan	Padi: 5,68 ton/ha	Jagung: 5,61 ton/ha	Kedelai: 1,67 ton/ha
Peternakan	Ayam pedaging: 625,11 juta ekor	Sapi Potong: 5,07 juta ekor	Kambing: 3,89 juta ekor
Perkebunan	Tebu: 11,9 ton/ha	Kelapa: 2,30 ton/ha	Tembakau: 0,97 ton/ha
Sayuran	Cabe Rawit: 10,20 ton/ha	Bawang Merah: 4,78 ton/ha	Kentang: 38,51 ton/ha
Buah-buahan	Pisang: 99,20 kg/pohon	Mangga: 121,48 kg/pohon	Jeruk Siam/Keprok: 89,32 kg/pohon
Perikanan Tangkap	Laut: 411.511 ton	Perairan umum: 8.399 ton	-

Sub Sektor	Komoditas Unggulan		
Perikanan Budidaya	Laut: 698.661 ton	Kolam: 245.142 ton	Tambak: 242.574 ton

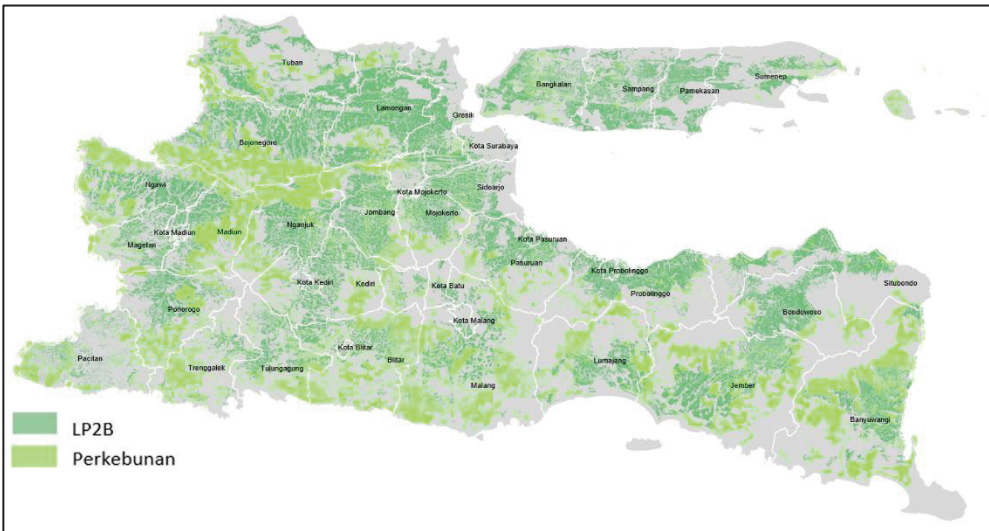
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Subsektor pertanian terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Luas lahan pertanian basah seluas 1.174.586 ha, luas pertanian lahan kering 935.652 ha, luas lahan hortikultura seluas 105.728 ha, dan luas lahan perkebunan seluas 251.430 ha. Persebaran subsektor tersebut hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Gambaran komoditas unggulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Komoditas Unggulan di Jawa Timur

Komoditas	Tanaman	Produksi Tertinggi	Demand Tertinggi
Tanaman Pangan	Padi	Lamongan, Bojonegoro, Jember	Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang
	Jagung	Sumenep, Tuban, Probolinggo	Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Pasuruan
	Kedelai	Banyuwangi, Jember, Nganjuk	Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Blitar
Perkebunan	Tebu	Malang, Kediri, Lumajang	Kota Surabaya, Kota Blitar, Sumenep
	Kopi	Banyuwangi, Jember, Malang	Kota Surabaya, Kota Malang, Lamongan
Hortikultura	Bawang merah	Nganjuk, Probolinggo	-
	Cabai	Blitar, Tuban, Kediri	-
	Kentang	Malang, Probolinggo, Pasuruan	-
	Mangga	Pasuruan, Kediri, Ponorogo	-
	Jeruk	Banyuwangi, Jember, Malang	-

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

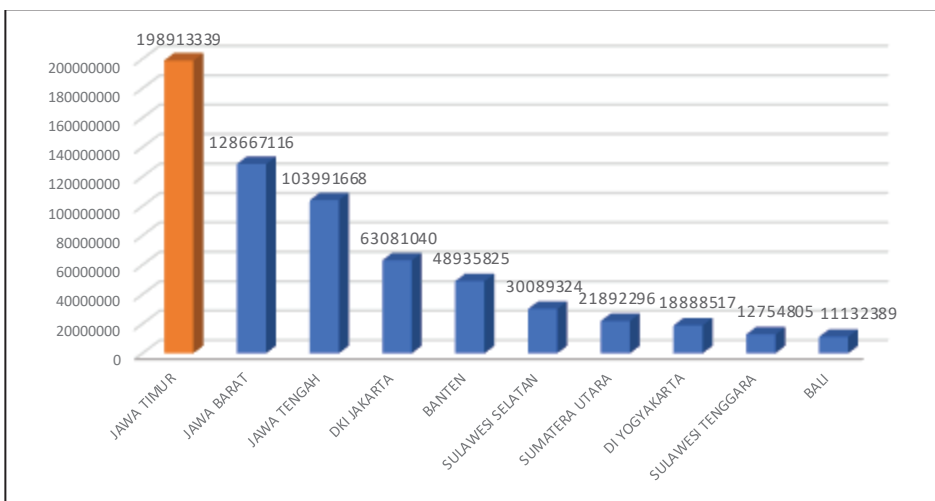


Sumber: BPS Jawa Timur diolah BPIW, 2021

Gambar 3.14 Persebaran Lahan Pertanian dan Perkebunan

C. Sektor Pariwisata

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 198.913.339 orang (tertinggi nomor 1 nasional) dan jumlah akomodasi berbintang sebanyak 333 hunian (tertinggi ke-5 nasional).



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3.15 Grafik Jumlah Wisnus di Indonesia Tahun 2019

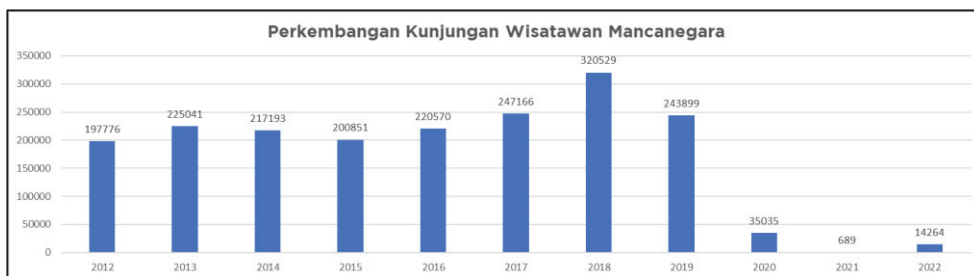
Terdapat 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Bromo—Tengger—Semeru, KSPN *Karst* Pacitan, KSPN Ijen—Baluran, dan KSPN Trowulan. Selain KSPN, juga terdapat 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu KPPN Batu—Malang, KPPN Blitar—Kediri, KPPN Trowulan, KPPN Surabaya Kota, KPPN Pamekasan, KPPN Sumenep, KPPN Ijen—Baluran, KPPN *G-Land* Alas Purwo, KPPN Meru Betiri, dan KPPN Bromo—Tengger—Semeru.



Sumber: Hasil Analisis, 2021

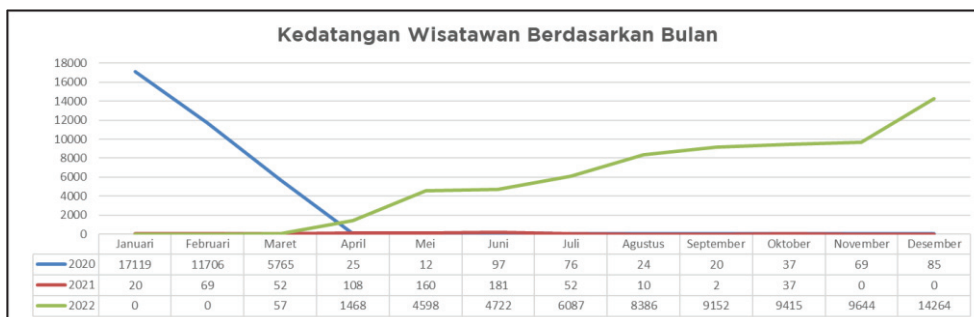
Gambar 3.16 Sektor Unggulan Pariwisata: Pariwisata Jawa Timur

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2022 sebesar 14.264 kunjungan. Kunjungan tersebut naik sebesar 9,73% dibandingkan tahun 2021. Distribusi wisman yang terbesar berasal dari: (1) ASEAN sebanyak 51.703 kunjungan (76,27%); (2) negara Asia lainnya sebanyak 6.888 kunjungan (10,16%); dan (3) Eropa sebanyak 5.106 kunjungan (7,53%). Puncak kedatangan (*peak season*) tahun 2022 terjadi bulan Desember mencapai 14.264 kunjungan, sedangkan *low season* terjadi pada bulan Januari dan Februari tidak ada satupun kunjungan wisatawan mancanegara. Tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dipengaruhi oleh masih berlakunya instruksi kementerian dalam negeri bahwa pintu perjalanan penumpang penerbangan internasional hanya dapat dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Jakarta dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 3.17 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 3.18 Kedatangan Wisatawan Berdasarkan Bulan

Daya tarik wisata wisatawan mancanegara paling banyak adalah menuju Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso (33%); Bromo di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Malang (11,89%); House of Sampoerna di Kota Surabaya (11,80%); Kampung Buring di Kota Malang (5,70%); Wisata agro stroberi di Probolinggo (5,64%); dan sisanya tersebar.

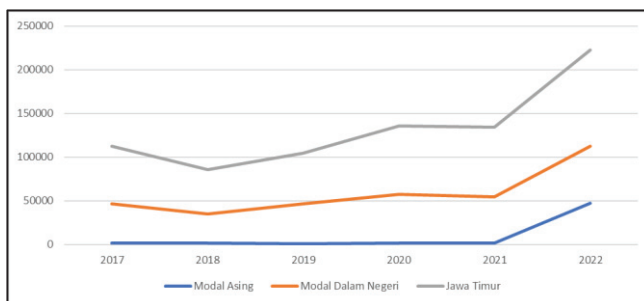
3.3.4 Perkembangan Investasi

Pada Provinsi Jawa Timur terdapat dua jenis investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki nilai tertinggi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 65.400 Milyar dan nilai investasi terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 33.333,1 Milyar. Sedangkan pada Penanaman Modal Asing (PMA) investasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp

47.203,7 Milyar dan investasi terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 866,3 Milyar.

Berkembangnya suatu wilayah tidak mungkin terlepas andilnya investasi atau penanaman modal, yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Termasuk di Jawa Timur realisasi penanaman modal pada tahun 2022 mencapai 110,3 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat tajam dari tahun 2021 sebesar 79,5 triliun rupiah. Peningkatan berasal dari penanaman modal asing yang meningkat hingga 66,7% dari tahun 2021.

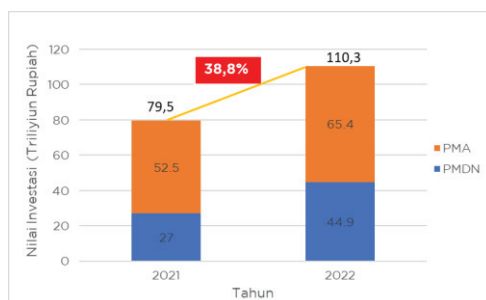
Pada tahun 2022 penanaman modal asing dan dalam negeri terbesar berada di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Sementara jika dilihat dari sektor yang dijangkau, penanaman modal terbesar pada sektor pertambangan, perumahan Kawasan industri dan perkantoran, dan transportasi, Gudang, dan telekomunikasi yang mencapai 38% dari total nilai investasi



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah Tim Puswil II.B

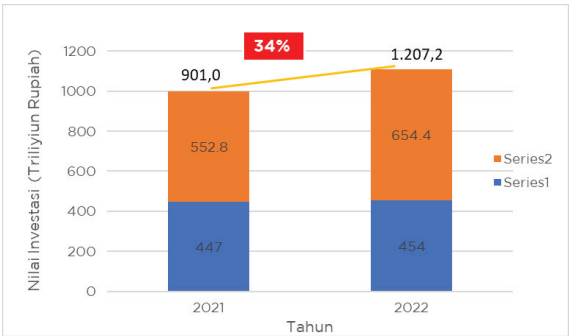
Gambar 3.19 Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur TA 2017-2022

Peringkat realisasi investasi tahun 2022 menduduki peringkat 4 dari provinsi lain di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp. 30,9 T pada tahun 2022, sedangkan PMA berada di peringkat 5 dengan US\$ 1 M. Dari realisasi investasi tahun 2022 dengan pertumbuhan PMA Jawa Timur 66,7% dan nasional 38,8% untuk PMDN Jawa Timur 24,5% dan nasional 34%.



Sumber: Laporan Kinerja Penanaman Modal Jawa Timur, 2022

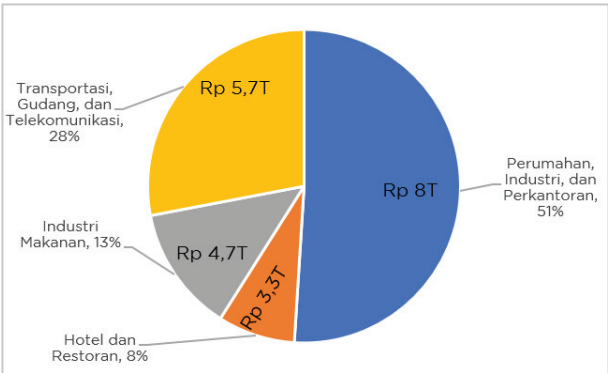
Gambar 3.20 Realisasi Investasi 2022 Jawa Timur



Sumber: Laporan Kinerja Penanaman Modal Jawa Timur, 2022

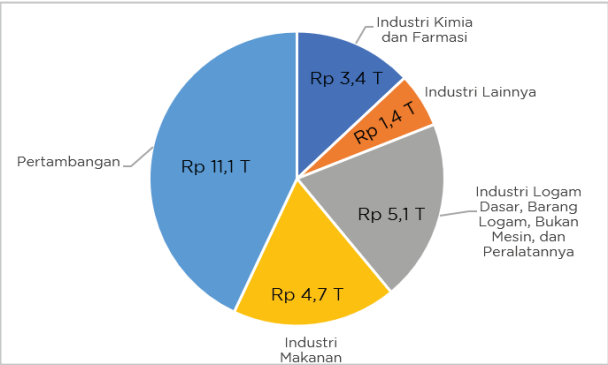
Gambar 3.21 Realisasi Investasi TW III 2022 Nasional

Struktur ekonomi Jawa Timur menurut lapangan usaha ditopang oleh 3 sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Investasi PMDN didominasi oleh perumahan, industri, dan perkantoran dengan persentase 37,1% sebesar Rp. 8T. Pada investasi PMA didominasi oleh pertambangan dengan persentase 35,6% sebesar Rp. 11,1 T.



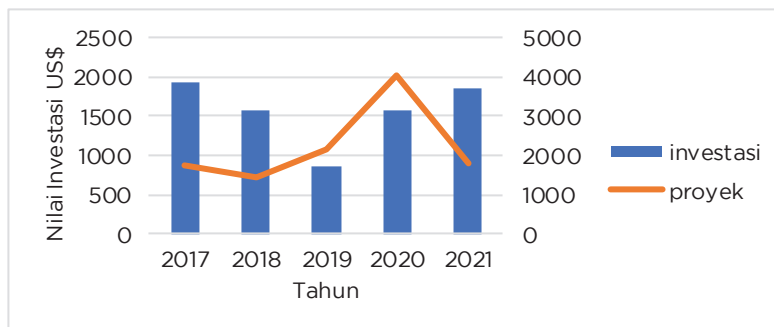
Sumber: Laporan Kinerja Penanaman Modal Jawa Timur, 2022

Gambar 3.22 PMDN Jawa Timur Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Laporan Kinerja Penanaman Modal Jawa Timur, 2022

Gambar 3.23 PMA Jawa Timur Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Laporan Kinerja Penanaman Modal Jawa Timur, 2022

Gambar 3.24 Jumlah Proyek dan Investasi PMN Jawa Timur (2017-2021)

Nilai investasi pada tahun 2019 mengalami penurunan karena adanya pandemi. Namun setelah itu untuk tahun 2020 nilai investasi meningkat seiring dengan nilai proyeknya, pada tahun 2021 terus meningkat untuk nilai investasi namun nilai proyeknya menurun.

3.3.5 Kapasitas Fiskal Daerah (KFD)

Indeks kapasitas fiskal kab/kota yang terendah di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 berada di Kabupaten Bondowoso dengan nilai indeks 0,998 dan nilai indeks tertinggi sebesar 3,986 berada di Kabupaten Bojonegoro. Kategori nilai tinggi, sedang, dan rendahnya indeks kapasitas fiskal daerah kota/kab didapat dari rentang KFD yang dikeluarkan dari Kemenkeu.

Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu disebut dengan Kapasitas Fiskal Daerah (FKD). Pemetaan dilakukan terhadap kapasitas tersebut untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio KFD.

Hasil pemetaan KFD tersebut dapat digunakan untuk:

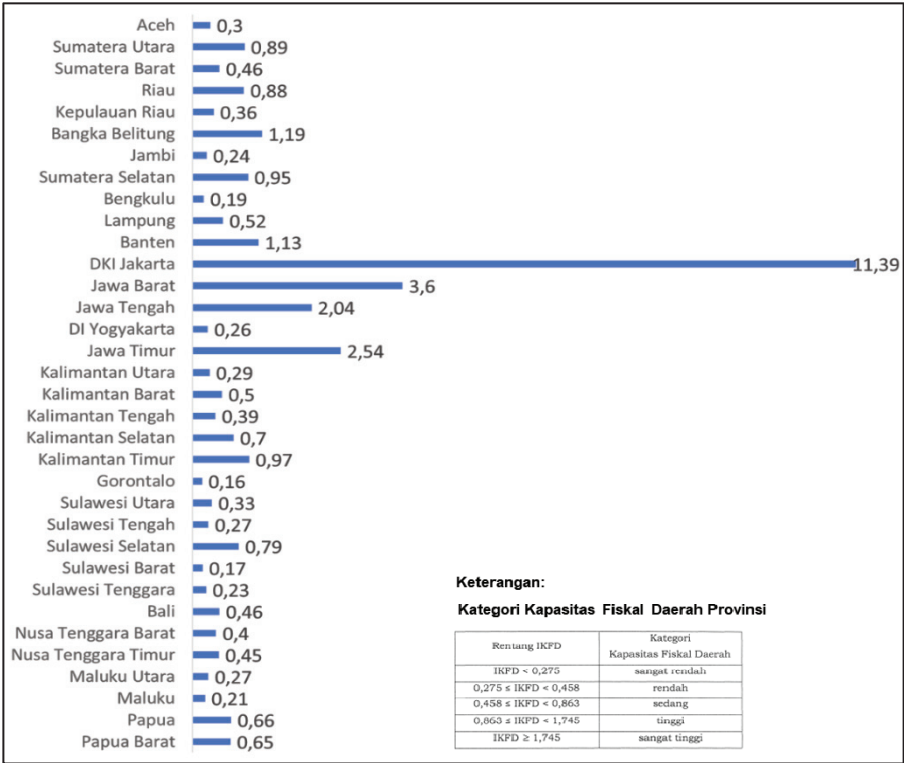
- a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;
- b) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;
- c) pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;
- d) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau
- e) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15 Kapasitas Fiskal Daerah Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten/Kota	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	
	Rasio	Keterangan		Rasio	Keterangan
Kab. Pacitan	1,070	Sangat Rendah	Kab. Magetan	1,073	Sangat Rendah
Kab. Ponorogo	1,274	Rendah	Kab. Ngawi	1,185	Rendah
Kab. Trenggalek	1,049	Sangat Rendah	Kab. Bojonegoro	3,986	Sangat Tinggi
Kab. Tulungagung	1,085	Sangat Rendah	Kab. Tuban	1,354	Rendah
Kab. Blitar	1,313	Rendah	Kab. Lamongan	1,915	Tinggi
Kab. Kediri	1,685	Sedang	Kab. Gresik	2,180	Sangat Tinggi
Kab. Malang	1,533	Sedang	Kab. Bangkalan	1,405	Rendah
Kab. Lumajang	1,587	Sedang	Kab. Sampang	1,333	Rendah
Kab. Jember	1,631	Sedang	Kab. Pamekasan	1,609	Sedang
Kab. Banyuwangi	2,136	Tinggi	Kab. Sumenep	0,965	Sedang
Kab. Bondowoso	0,998	Sangat Rendah	Kota Kediri	1,685	Sedang
Kab. Situbondo	1,439	Rendah	Kota Blitar	1,313	Rendah
Kab. Probolinggo	1,588	Sedang	Kota Malang	1,533	Sedang
Kab. Pasuruan	1,698	Sedang	Kota Probolinggo	1,473	Rendah
Kab. Sidoarjo	2,239	Sangat Tinggi	Kota Pasuruan	1,692	Sedang
Kab. Mojokerto	1,984	Tinggi	Kota Mojokerto	1,407	Rendah
Kab. Jombang	1,381	Rendah	Kota Madiun	1,361	Rendah
Kab. Nganjuk	1,272	Rendah	Kota Surabaya	2,751	Sangat Tinggi
Kab. Madiun	1,523	Sedang	Kota Batu	1,566	Sedang

Sumber: Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Kemenkeu), 2021

Indeks kapasitas fiskal Provinsi Jawa Timur dibandingkan provinsi lain se-Indonesia adalah 2,54 (Sangat Tinggi) berada di urutan tertinggi ketiga. Kapasitas fiskal daerah menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Indeks kapasitas fiskal Jawa Timur dan seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Diolah Berbagai Sumber Oleh TIM Puswil II.B; Permenkeu No.116/PMK/07/2021; BPS Provinsi Bali 2022

Gambar 3.25 Indeks Kapasitas Fiskal Jawa Timur Terhadap Nasional 2020-2021

3.4 Profil Sosial Budaya

Mengulas tentang sosial budaya dalam arti luas mencakup segala aspek kehidupan. Dalam subbab ini profil sosial-budaya mendeskripsikan kondisi sosial-budaya terkini di lokasi dengan sektor unggulan pariwisata untuk menyusun skenario pengembangan wilayah.

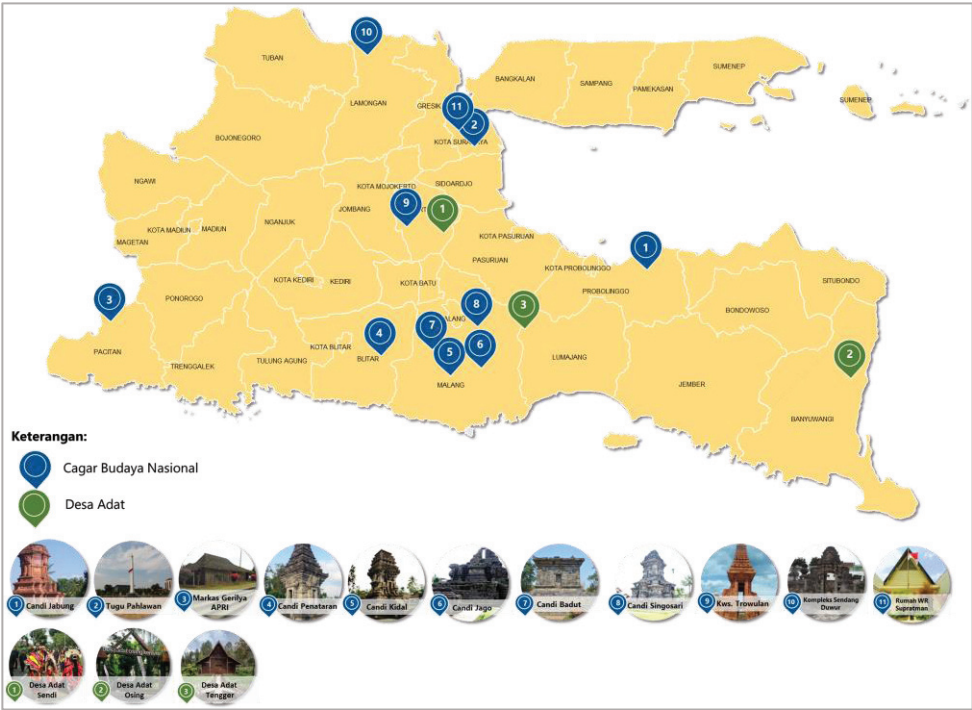
3.4.1 Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 11 cagar budaya nasional yang menjadi prioritas. Sebaran cagar budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Cagar Budaya di Jawa Timur

CAGAR BUDAYA	
1. Candi Jabung	7. Candi Badut
2. Tugu Pahlawan	8. Candi Singosari
3. Markas Gerilya APRI	9. Kawasan Trowulan
4. Candi Penataran	10. Kompleks Dendang Duwur
5. Candi Kidal	11. Rumah WR Supratman
6. Candi Jago	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, 2021.



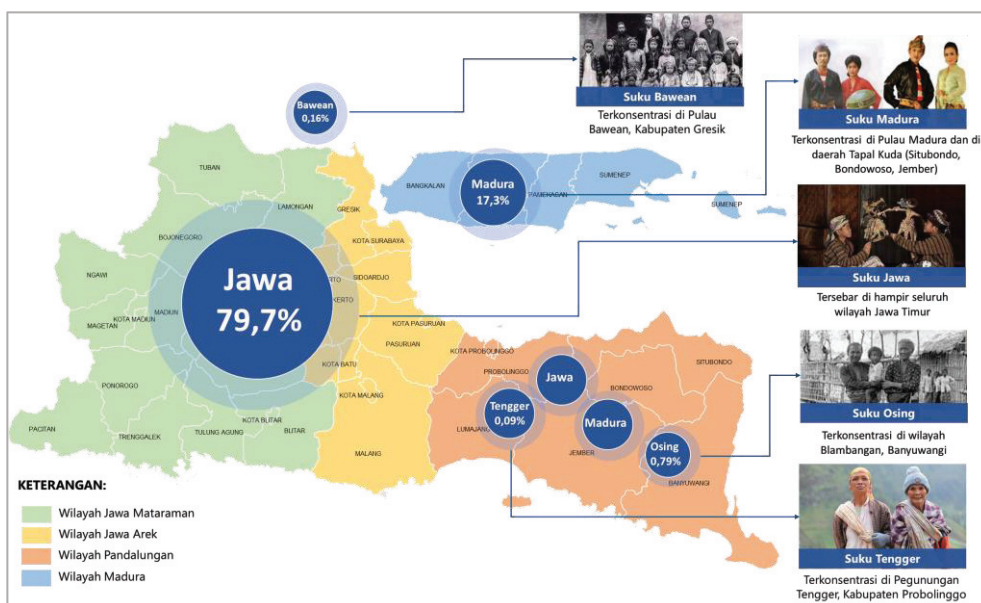
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, 2021; Fadzilatus, Alif. “Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1: 75-86 (2020); Maylinda, Eka. “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Osing Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.” *Diploma thesis, IPDN Jatinangor* (2021); *Konsultan ITMPBTS*, 2022.

Gambar 3.26 Sebaran Cagar Budaya dan Desa Adat di Jawa Timur

3.4.2 Sebaran Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Mayoritas masyarakat Jawa Timur adalah suku Jawa sebanyak 79,70% kemudian Suku Madura sebanyak 17,30%, dan sisanya merupakan suku lain seperti Suku Osing, Suku Bawean, dan Suku Tengger. Suku Jawa tersebar di seluruh Jawa Timur; Suku Madura terkonsentrasi di Pulau Madura dan di daerah Tapal Kuda (Situbondo, Bondowoso, Jember); Suku Bawean

terkonsentrasi di Pulau Bawean dan Kabupaten Gresik; Suku Osing terkonsentrasi di wilayah Blambangan, Kabupaten Banyuwangi; dan Suku Tengger terkonsentrasi di Pegunungan Tengger; Kabupaten Probolinggo.



Gambar 3.27 Sebaran Wilayah Masyarakat Adat di Jawa Timur

Karakteristik budaya dan masyarakat adat di Provinsi Jawa Timur berada dan berkelompok di desa khusus dengan adat istiadat dan peraturan yang telah disepakati di dalamnya. Beberapa hal yang menjadi alasan utama bertahan dan berkelompok di suatu desa antara lain adalah sebagai upaya mempertahankan budaya warisan leluhur, hubungan historis dengan tempat tinggal, hingga kepercayaan yang masih melekat dengan kawasan tersebut. Seiring perkembangan zaman, desa adat di Provinsi Jawa Timur mulai dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi penduduk desa adat dan sekitarnya. Kegiatan ekonomi yang tumbuh dari objek wisata desa adat di Provinsi Jawa Timur adalah perdagangan dan jasa, industri pengolahan makanan dan kerajinan, serta pertunjukan kebudayaan bernilai tinggi yang dapat dikomersilkan.

Dalam tren perubahan sosial budaya di Provinsi Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan akan semakin kuatnya hubungan antara masyarakat desa adat dengan wisatawan dan arus modernisasi yang diperlukan guna menunjang fasilitas pendukung kegiatan pariwisata. Dari potensi yang ada tersebut, terdapat kendala yang dikhawatirkan dapat melunturkan kesakralan suatu adat budaya dan situs-situs budaya peninggalan serta melemahnya aspek sosial-budaya yang telah dijaga turun-temurun. Perlu dilakukan penyuluhan dan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui program pembelajaran budaya untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat yang menjadi value utama dari desa adat. Berikut ini Desa adat dan peninggalan bersejarah di Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.17 Desa Adat dan Peninggalan Bersejarah di Provinsi Jawa Timur

No.	Nama Desa Adat	Lokasi	Peninggalan
1	Desa Adat Sendi	Desa Sendi, Mojokerto	• Goa Puthuk Kursi • Tradisi Ngangsu Banyu Aras
2	Desa Adat Osing	Desa Kemiren, Desa Sukumalang, dan Desa Aliyan, Kabupaten Banyuwangi	• Benda peninggalan – Batik bermotif gajah oling – Kain tenun Blambangan, Keris – Naskah lontar Yusup Banyuwangi – Buding • Kesenian: Patrol, Seblang, Gandrung Banyuwangi, Kuntulan, Kendang Kempul, Janger, Jaranan, Jaran Kincah, Angklung Caruk, Jedong, Tari Barong, Angklung • Rumah Adat Osing terbuat dari kayu dan bambu
3	Desa Adat Tengger	• Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo • Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo • Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan • Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan • Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang • Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang	• Filosofi: Setya Budaya (ketaatan, rajin, mandiri), Setya Wacana (komitmen pada apa yang dikatakan), Setya Semaya (komitmen pada janji), Setya Laksana (ketaatan, kepatuhan), dan Setya Mitra (komitmen pada persahabatan) • Kesenian: Tari Sodor, Tari Ujung, Tayub ala Tengger, Bedoyo Lok Suruh, Reog, dan Kuda Kepang • Alat musik: Ketepong dan Srompet Tengger • Upacara Adat Kasada • Rumah adat suku Tengger sebagian besar konstruksinya terbuat dari kayu

Sumber: Fadzilatus, Alif. "Kesadaran Kolektif dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus Masyarakat Adat Sendi di Mojokerto, Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1: 75-86 (2020); Maylinda, Eka. "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Adat Osing Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur." *Diploma thesis, IPDN Jatinangor* (2021); Konsultan ITMP BTS, 2022.

Kenyamanan wisatawan dapat ditunjang oleh infrastruktur berdasarkan kondisi sosial-budaya masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aturan adat dan lokasi yang telah disepakati oleh masyarakat adat agar tidak mengganggu kegiatan adat dan kepercayaan yang diyakini masyarakat adat. Keamanan wisatawan dapat ditunjang oleh adanya peraturan yang jelas, penjagaan yang tersistem guna menurunkan tingkat kriminalitas dan kecelakaan. Pengembangan desa adat di Provinsi Jawa Timur menjadi destinasi wisata tentunya juga harus diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan SDM yang baik.

3.5 Profil Interaksi Antar Kawasan

Interaksi antarkawasan mendeskripsikan kondisi interaksi antarkawasan terkini pada wilayah perencanaan sebagai dasar analisis skenario pengembangan infrastruktur wilayah. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat berinteraksi dengan kawasan strategis lainnya. Dari hasil analisis *Origin Destination (OD)*, terdapat lalu lintas yang tinggi dari Semarang ke Surabaya. Lalu lintas melewati 2 jalur utama, yaitu via tol yang ada di bagian tengah Jawa Timur, serta jalan nasional yang ada di bagian utara. Lalu lintas tinggi di jalan nasional juga

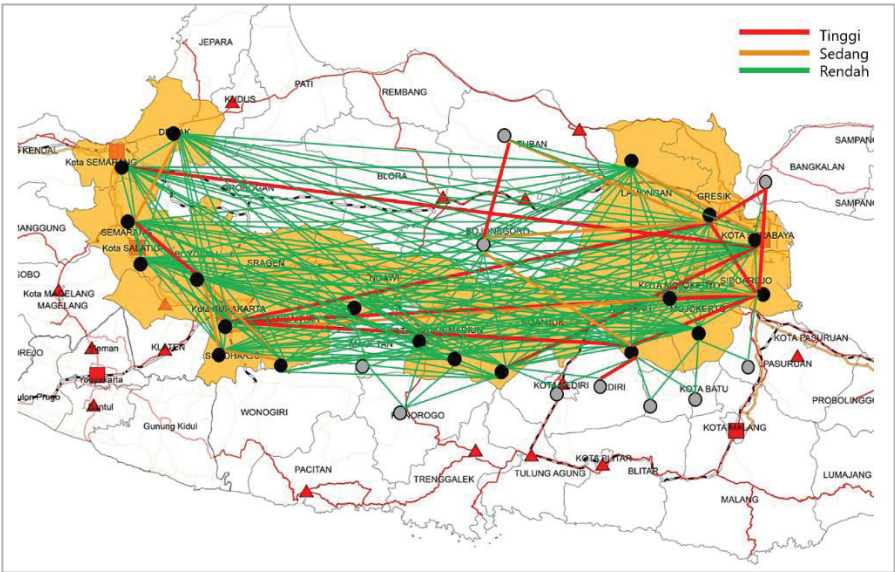
disebabkan adanya kawasan-kawasan industri dan juga perdagangan jasa, terutama di sekitar Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Pergerakan dari dan menuju Surabaya-Bangkalan juga tinggi. Adapun interaksi antar kawasan di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Interaksi Antarkawasan di Jawa Timur

No	Kawasan Strategis		Jarak (km)	Waktu Tempuh (menit)	Kecepatan (km/jam)*	Komoditas
	Tujuan	Dari				
1	KSPN BTS	GKS Plus	137	168	48,93	Pariwisata, hortikultura
2	Kawasan Ijen	GKS Plus	278	370	45,13	Pariwisata, hortikultura
3	KSPN Karst Pacitan	GKS Plus	272	298	54,72	Pariwisata, pertanian
4	Selingkar Wilis	GKS Plus	148	158	56,06	Pariwisata, pertanian
5	KEK Singhasari	GKS Plus	92,2	107	51,79	Pariwisata, jasa
6	KEK Gresik	GKS Plus	33,1	61	32,45	Industri, logistik
7	KSPN Trowulan	GKS Plus	64,1	91	42,17	Pariwisata, cagar budaya

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021.

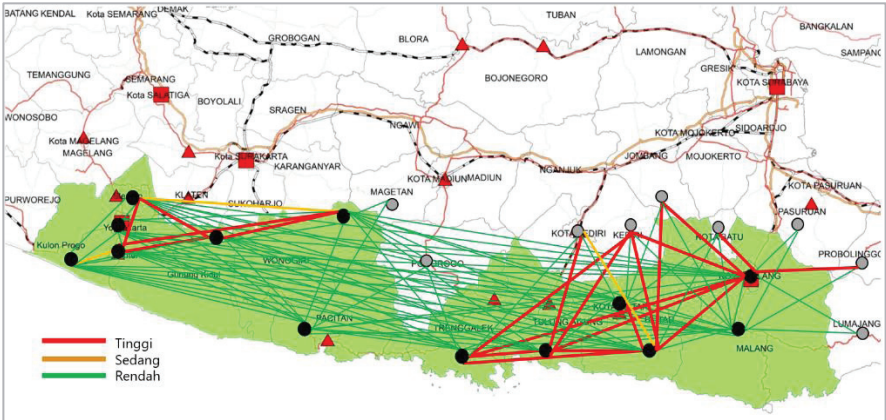
Selain itu, dalam lingkup Provinsi Jawa Timur terjadi interaksi antara *hub* dan *stoke*. *Hub* merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai PKN atau PKW serta sebagai penghubung utama dengan keberadaan infrastruktur jalan, bandara, stasiun kereta api, serta pelabuhan. Sedangkan *stoke* merupakan pusat-pusat kegiatan unggulan seperti industri, pertanian, dan pariwisata yang memiliki interaksi yang erat dengan *hub*.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021.

Gambar 3.28 Interaksi di Koridor Semarang—Surabaya

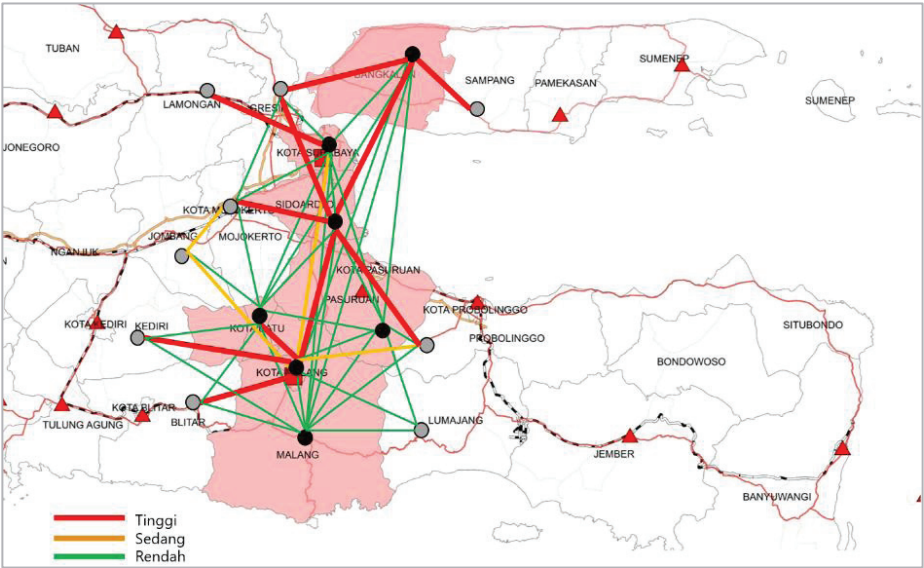
Sesuai hasil analisis OD, terlihat bahwa terdapat lalu lintas yang tinggi dari Yogyakarta ke Malang. Lalu lintas tinggi disebabkan adanya kawasan-kawasan pariwisata dan perikanan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Gambar 3.29 Interaksi di Koridor Yogyakarta—Malang

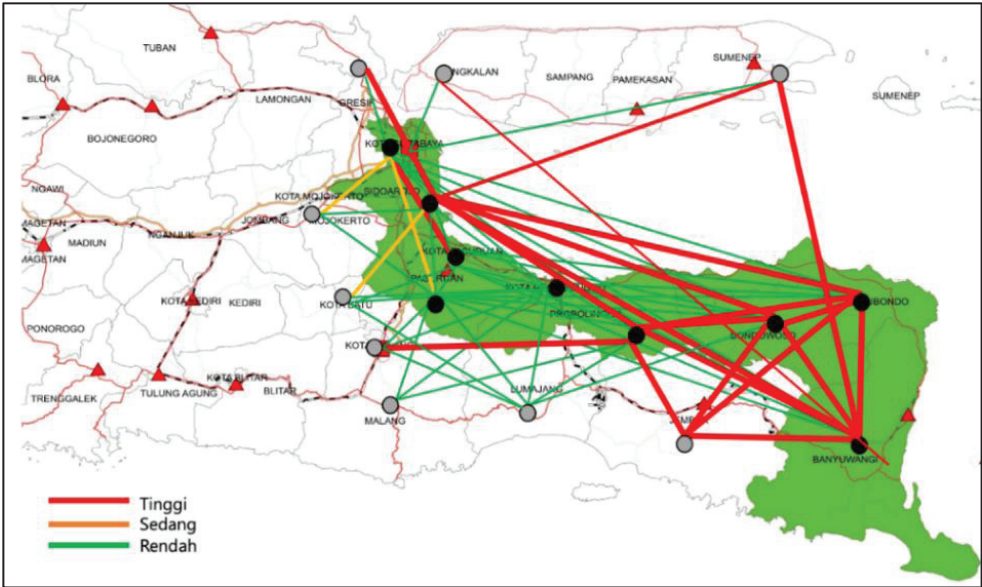
Berdasarkan analisis OD, tampak bahwa lalu lintas yang cukup tinggi dari Malang ke Surabaya. Lalu lintas melewati 2 jalur utama, yaitu via tol serta jalan nasional. Lalu lintas cukup tinggi disebabkan adanya kawasan-kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata, terutama di sekitar Pasuruan dan Sidoarjo.



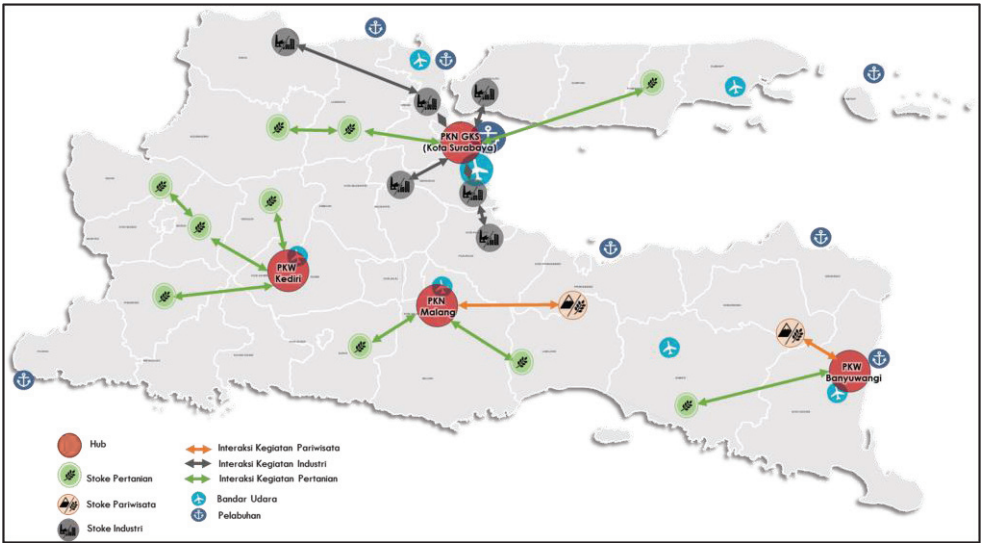
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Gambar 3.30 Interaksi di Koridor Bangkalan—Malang

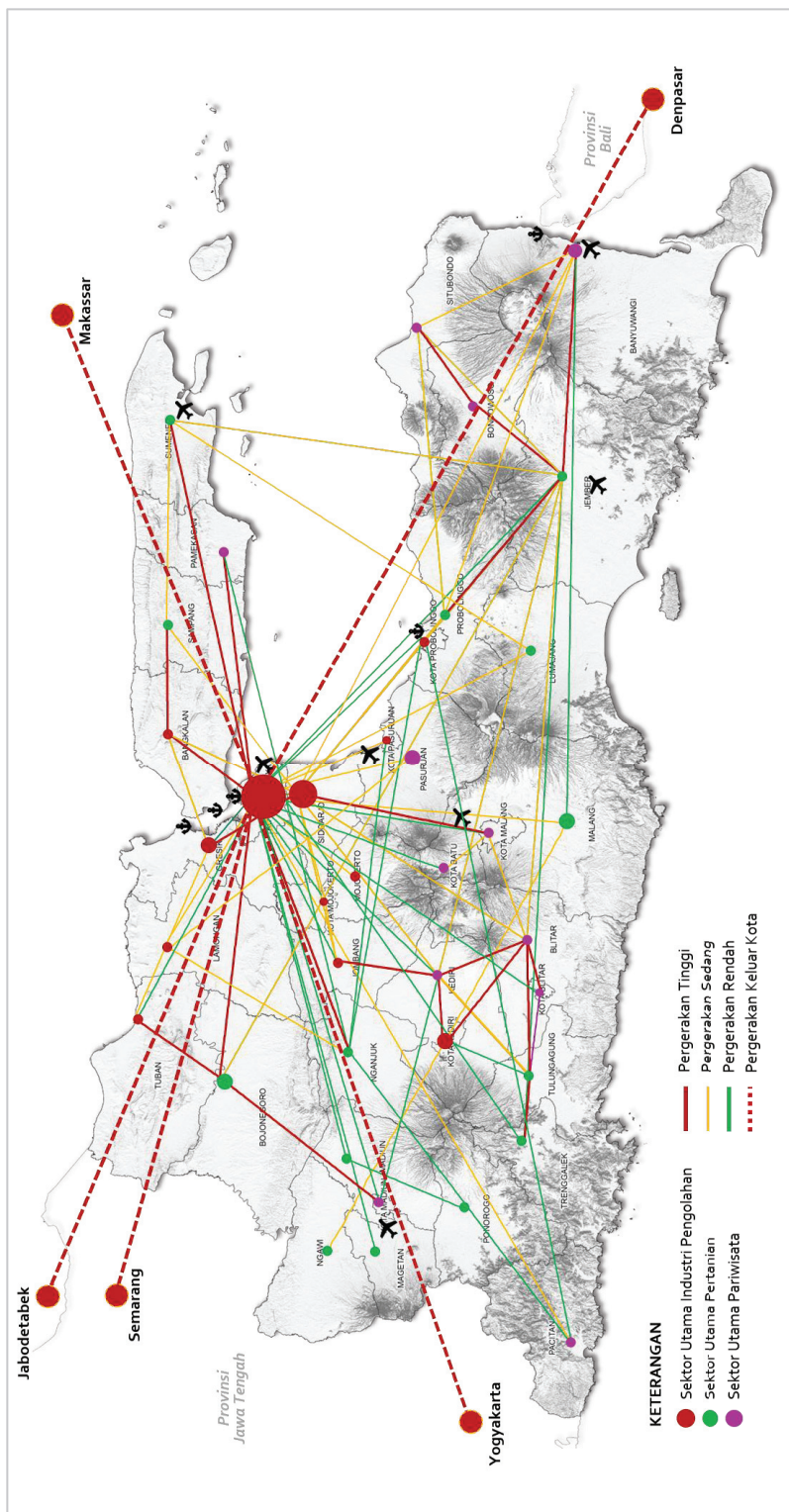
Selain itu, lalu lintas yang cukup tinggi juga berasal dari Surabaya ke Banyuwangi yang melewati tol Surabaya—Probolinggo serta jalan nasional yang ada di bagian utara. Tingginya lalu lintas disebabkan adanya kawasan industri dan perdagangan jasa, terutama di sekitar Pasuruan, serta kawasan wisata di sekitar Probolinggo dan Banyuwangi. Lalu lintas dari Sumenep ke Banyuwangi juga tinggi akibat kegiatan perikanan dan kedekatan budaya.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021
Gambar 3.31 Interaksi di Koridor Surabaya—Banyuwangi



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2023.
Gambar 3.32 Pergerakan Komoditas Unggulan (Supply Chain) di Provinsi Jawa Timur





Pasir Berbisik - KSPN Bromo-Tengger-Semeru



The Sea of Sand - KSPN Bromo-Tengger-Semeru



Gerbang Tol Lebani – Kabupaten Gresik

BAB 4

PROFIL DAN KINERJA

INFRASTRUKTUR

Bab ini berisi uraian mengenai kondisi infrastruktur PUPR dan non PUPR di Provinsi Jawa Timur. Untuk infrastruktur PUPR, terdiri dari sub bab Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan, dan Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan. Sedangkan infrastruktur non PUPR, terdiri dari infrastruktur perhubungan dan energi.

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air

Sub bab ini mencakup kondisi penyediaan air baku, irigasi, dan penanganan daya rusak air (bencana). Tampungannya air WS Bengawan Solo memiliki total volume tampungan waduk sebesar 588.977,63 ribu m³ dan untuk embung dengan total volume tampungan sebesar 10.874,51 ribu m³ (RPSDA WS Bengawan Solo 2015). Untuk WS Brantas total volume tampungan waduk sebesar 463.744 ribu m³ dan untuk embung total volume tampungan sebesar 2.822,72 ribu m³ (RPSDA WS Brantas 2021). WS Bengawan Solo mempunyai potensi air sebesar 21.413,5 juta m³ dengan rincian jumlah potensi air permukaan sebesar 18.401,5 juta m³ dan potensi air tanah sebesar 3.012 juta m³. WS Brantas mempunyai potensi air permukaan sebesar 13.232 miliar m³. Jawa Timur memiliki 4 danau/situ yaitu Selorejo di Malang, Lamongan di Lamongan, Ranu Grati di Pasuruan, dan Sarangan di Magetan.

4.1.1 Infrastruktur Penyediaan Air Baku

Berdasarkan kondisi neraca air, tingkat kekritisan Provinsi Jawa Timur terdiri dari kategori kritis air berat (24%), kritis sedang (72%), dan kritis ringan (3%). Indeks penggunaan air rata-rata adalah 50-100%. Kondisi neraca air Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Peta 4.1.

Di Jawa Timur terdapat 33 bendungan dan 216 embung sebagai penyedia air baku, irigasi, pengendali banjir, dan lainnya yang digambarkan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen SDA diolah BPIW, 2021

Gambar 4.1 Indeks Ketersediaan Air

Bendungan tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Infrastruktur Bendungan di Jawa Timur

No	Nama Bendungan	Kab/Kota	Kapasitas (Juta m ³)
1	Tlogo Ngebel	Ponorogo	23,50
2	Gonggang	Magetan	0,30
3	Sarangan	Magetan	3,05
4	Dawuhan	Madiun	3,00
5	Saradan	Madiun	2,34
6	Notopuro	Madiun	1,60
7	Kedung Brubus	Madiun	2,03
8	Sangiran	Ngawi	10,60
9	Pondok	Ngawi	25,30
10	Kedung Bendo	Madiun	1,70
11	Pacal	Bojonegoro	41,18
12	Nglambangan	Bojonegoro	2,50
13	Prijetan	Bojonegoro	12,10
14	Gondang	Lamongan	25,90
15	Canggih	Lamongan	5,35
16	Manyar	Lamongan	2,70
17	Cungkup	Lamongan	3,61
18	Klampis	Sampang	10,25
19	Nipah	Sampang	6,16
20	Sengguruh	Malang	21,50
21	Karang Kates/Sutami	Malang	343,00
22	Lahor	Malang	36,10
23	Wlingi	Blitar	24,00
24	Ngepeh	Trenggalek	58,99
25	Wonorejo	Tulung Agung	108,23
26	Selorejo	Malang	34,81
27	Oro - Oro Ombo	Nganjuk	95,00
28	Bening / Widas	Nganjuk	32,90
29	Kedung Sengon	Nganjuk	567
30	Sumber Kepuh	Nganjuk	1,50
31	Wr. Jenggot/Grojokan	Jombang	2,50
32	Bajulmati	Situbondo	10,00
33	Sampean Baru	Bondowoso	230,00

Sumber: SISDA, 2022

4.1.2 Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Sebesar 36,86% (1.761.882 Ha) luas wilayah Jawa Timur merupakan lahan sawah, dimana 1.132.862,27 Ha diantaranya merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan menjadi LP2B terbesar di Pulau Jawa dan Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebesar 6,9%/tahun (126.274 Ha/tahun) pada 2018-2019. Luas Daerah Irigasi Provinsi Jawa timur sebesar 776.356,55 Ha.

Lahan yang beririgasi teknis hanya sebesar 48% (733.599,14 Ha), yang terbagi menjadi Daerah irigasi pusat seluas 252.374,90 Ha (34%), Daerah irigasi provinsi sebesar 147.190,23 Ha (20%), dan Daerah irigasi kabupaten/kota sebesar 334.034,00 Ha (46%), sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Tidak semua LP2B di Jawa Timur dilayani oleh daerah irigasi (DI) teknis. Masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 Ha (51%

dari luas LP2B). Sebaran luasan LP2B dan daerah irigasi di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Luasan LP2B Kabupaten/Kota Jawa Timur

Kab/Kota	Luas LP2B (Ha)	Luas DI (Ha)	Kab/Kota	Luas LP2B (Ha)	Luas DI (Ha)
Bangkalan	42.431,88	7.398,48	Lumajang	31.303,24	28.034,51
Banyuwangi	49.404,46	58.371,42	Madiun	29.823,15	25.343,28
Blitar	24.766,84	9.493,11	Magetan	21.230,38	23.934,94
Bojonegoro	76.136,44	26.833,88	Malang	44.177,05	37.747,74
Bondowoso	41.770,87	23.889,47	Mojokerto	29.200,45	28.839,09
Gresik	36.063,13	12.540,06	Nganjuk	40.476,35	42.587,30
Jember	68.014,59	76.886,28	Ngawi	45.224,34	29.336,59
Jombang	42.149,39	44.541,30	Pacitan	19.109,74	3.799,45
Kediri	38.200,83	39.109,67	Pamekasan	25.640,85	3.504,91
Kota Batu	2.844,57	1.692,73	Pasuruan	37.498,56	33.375,67
Kota Blitar	781,35	811,20	Ponorogo	33.156,07	26.833,61
Kota Kediri	1.700,25	1.870,83	Probolinggo	46.793,31	25.784,85
Kota Madiun	801,28	629,38	Sampang	45.093,12	3.768,73
Kota Malang	1.607,49	1.118,85	Sidoarjo	25.009,43	21.315,72
Kota Pasuruan	1.312,74	1.231,74	Situbondo	36.558,79	28.941,00
Kota Mojokerto	369,24	533,10	Sumenep	20.378,07	7.307,50
Kota Probolinggo	2.748,44	1.513,84	Trenggalek	9.425,66	10.129,57
Kota Surabaya	2.178,46	199,69	Tuban	52.010,98	19.975,20
Lamongan	83.356,82	44.218,51	Tulungagung	24.113,67	22.913,39

Sumber: Pusdatin PUPR diolah BPIW, 2021

Lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021 tentang Penetapan LSD Provinsi Jawa Timur terdapat total luasan 1.317.876,14 Ha. Untuk sebaran luasan LSD masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Luasan LSD Kabupaten/Kota di Jawa Timur

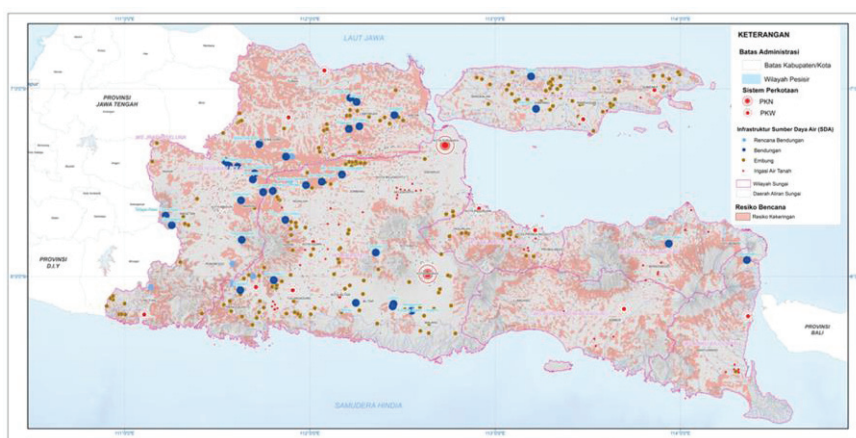
No	Kab/Kota	Luas LSD (Ha)	No	Kab/Kota	Luas LSD (Ha)
1	Lamongan	104.841,05	20	Bangkalan	34.361,40
2	Bojonegoro	98.412,99	21	Madiun	33.720,54
3	Jember	86.501,68	22	Blitar	33.107,08
4	Tuban	75.514,59	23	Tulungagung	28.920,05
5	Banyuwangi	69.788,21	24	Magetan	27.015,48
6	Malang	58.298,75	25	Sumenep	24.232,31
7	Kediri	56.693,57	26	Pamekasan	23.953,80
8	Jombang	52.191,02	27	Sidoarjo	23.447,18
9	Ngawi	51.172,31	28	Pacitan	12.954,69
10	Nganjuk	48.173,68	29	Trenggalek	12.013,52
11	Gresik	44.013,64	30	Kota Batu	4.060,02
12	Mojokerto	41.684,32	31	Kota Surabaya	2.680,04
13	Bondowoso	39.237,89	32	Kota Kediri	2.630,83
14	Pasuruan	38.808,69	33	Kota Probolinggo	2.087,05
15	Probolinggo	38.001,98	34	Kota Pasuruan	1.263,26
16	Lumajang	37.742,37	35	Kota Malang	1.213,80
17	Situbondo	35.672,10	36	Kota Blitar	907,05
18	Ponorogo	35.650,97	37	Kota Madiun	889,02
19	Sampang	35.446,12	38	Kota Mojokerto	573,09

Sumber: Kepmen ATR/BPN no: 1589/SK HK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta LSD yang Dilindungi pada Kab/Kota

4.1.3 Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 7 wilayah sungai (WS), dimana 2 diantaranya merupakan kewenangan nasional yaitu: WS Bengawan Solo dan WS Brantas. Lima (5) WS lainnya merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur yaitu: WS Baru-Bajulmati, WS Bondoyudo-Bedadung, WS Madura-Bawean, WS Pekalen- Sampean, dan WS Welang-Rejoso.

Meskipun banyak terdapat sungai, Provinsi Jawa Timur juga memiliki beberapa wilayah yang memiliki resiko kekeringan. Wilayah Kekeringan Resiko Tinggi diantaranya terdapat di Wilayah Utara Jawa Timur yang meliputi Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik; Wilayah Selingkar Ijen yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember; Wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Selingkar Wilis.



Sumber: Ditjen SDA diolah BPIW, 2021

Gambar 4.2 Risiko Kekeringan

Selain rawan kekeringan, Provinsi Jawa Timur juga memiliki beberapa kawasan rawan banjir. Kawasan rawan banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota. Penyebab banjir sebagian besar disebabkan oleh luapan sungai, drainase yang kurang baik, serta banjir rob. Banjir akibat luapan sungai terdapat di kawasan yang berada di sempadan sungai, seperti sempadan Bengawan Solo, sempadan Kali Brantas, sempadan Kali Lamong, sempadan Kali Kemuning, sempadan Kali Blega, dan sebagainya. Sedangkan banjir rob banyak terdapat di pesisir timur Surabaya-Sidoarjo, serta di pantai utara Jawa Timur.

Selain karena luapan sungai, peristiwa banjir juga terjadi karena tingginya curah hujan, semburan lumpur (Lapindo) di Kabupaten Sidoarjo, dan kondisi wilayah cekungan seperti di Kecamatan Blega (Kab. Bangkalan) dan Kecamatan Sampang (Kab. Sampang).

Risiko bencana yang cukup tinggi lainnya di Provinsi Jawa Timur adalah letusan gunung berapi. Posisinya yang berada dalam jalur *ring of fire* menyebabkan banyak gunung berapi di Jawa Timur (7 masih aktif) yaitu Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Arjuno Welirang, dan Gunung Lamongan.

Sebagai *summary*, berikut disampaikan infrastruktur penanganan bencana di Jawa Timur, yang secara lengkap dapat dilihat pada Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi Provinsi Jawa Timur pada bab sebelumnya:

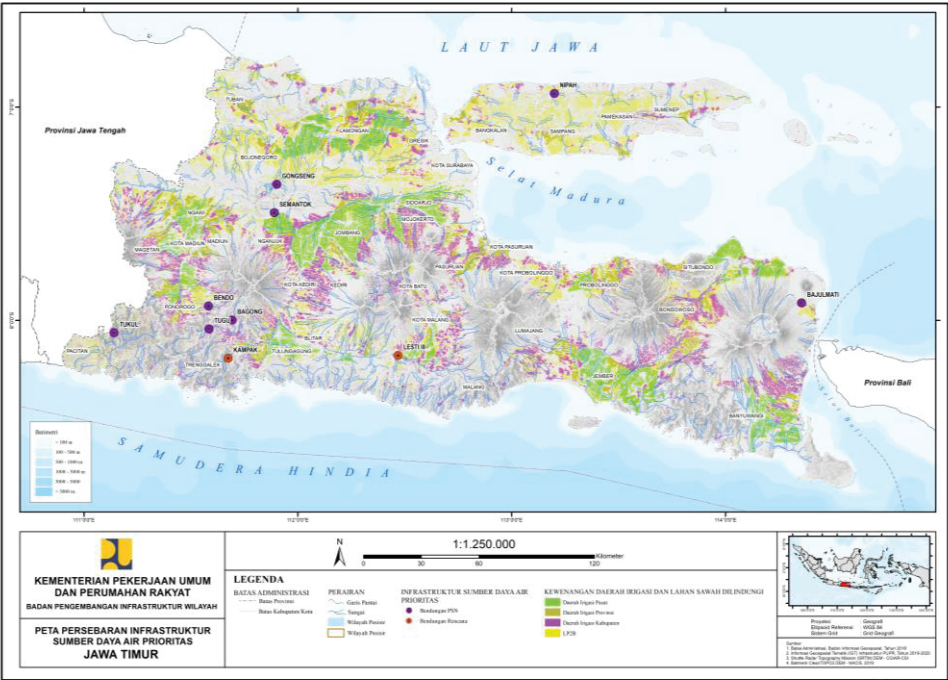
- 111 Sabodam berfungsi sebagai infrastruktur penanganan bencana gunung berapi yang tersebar di sekitar Gunung Kelud dan Semeru.
- 8 pengaman pantai berfungsi mengatasi abrasi yang tersebar di pantai utara Madura tepatnya di Pamekasan dan Sumenep.
- 33 bendungan yang mayoritas tersebar di bagian barat Jawa Timur karena terdapat DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo untuk menangani banjir.



Peta 4.1 Profil Infrastruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

4.1.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas Jawa Timur terdiri dari 8 bendungan berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan termasuk kedalam Proyek Prioritas Nasional yang Sejak tahun 2016 hingga 2022 mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres (Peraturan Presiden). Bendungan-bendungan berikut ini memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai penyediaan irigasi, air baku, reduksi banjir, sumber energi, dan kawasan pariwisata. Peta persebaran infrastruktur sumber daya air prioritas dan matriks status infrastruktur prioritas tersebut dapat dilihat berikut ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 4.3 Peta Persebaran Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Tabel 4.4 Status Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

No	Nama Infrastruktur	Volume	Manfaat	Tindak Lanjut
1	Bendungan Nipah (Beroperasi)	10 juta m ³	• Penyediaan irigasi belum berfungsi karena terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi • Pembangunan Bendungan Nipah sudah berkontribusi mereduksi banjir sebesar 24% di Desa Montoran dan Desa Tabenah	• Perlu diprogramkan untuk pembebasan lahan serta Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Nipah di Kab. Sampang • Manfaat pengurangan banjir telah tercapai
2	Bendungan Tukul (Beroperasi)	8,68 juta m ³	• Bendungan Tukul direncanakan dapat mengairi 600 ha pada 18 DI Eksisting. Namun, saat ini masih dalam tahap penyusunan dokling dan LARAP sehingga dalam realisasinya belum terlaksana.	• Manfaat irigasi belum dihasilkan, perlu pembangunan jaringan irigasi. • Pelayanan air baku belum berfungsi dengan optimal

No	Nama Infrastruktur	Volume	Manfaat	Tindak Lanjut
			- Diperlukan program Pembangunan IPA dan Jaringan Perpipaan SPAM. Rencana manfaat air baku dengan volume 0,30 m³ /dt, saat ini sedang dalam proses konstruksi. Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan diprogramkan pada 2022-2023 sepanjang 20 km (Emonitoring PUPR). - Pembangunan Bendungan Tukul sudah berkontribusi mereduksi banjir terutama di Kecamatan Arjosari hingga 42,21 m²/dt - Belum terdapat manfaat PLTMH, masih dalam proses gambar rencana rumah outlet. - Bendungan Tukul belum dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.	karena belum adanya IPA yang dibangun yang bersumber dari intake Bendungan Tukul. - Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses pemanfaatan sebagai PLTMH. - Memiliki potensi pariwisata karena wilayahnya yang cukup berkelok dan memiliki pemandangan menarik / greenbelt.
3	Bendungan Bajulmati (Beroperasi)	10 Juta m ³	- Pemanfaatan air baku baru mencakup 2 desa yaitu Desa Sidowangi dan Desa Watukebo, Kabupaten Banyuwangi. Terdapat program Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Bajulmati pada 2019-2021 (Emonitoring PUPR). - Fungsi irigasi sebesar 1.800 Ha, namun saat ini baru termanfaatkan 1.200 Ha. Terdapat program Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bajulmati pada 2022 dan pada 2024 direncanakan Penyusunan Desain Jaringan Irigasi tersier DI Bajulmati (Emonitoring PUPR). - PLTMH dengan produksi daya 0,1 MW - Bendungan Bajulmati dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.	- Diperlukan program Pembangunan IPA dan Jaringan Perpipaan SPAM - Diperlukan program Peningkatan Jaringan Irigasi pada 600 Ha yang belum terlayani
4	Bendungan Tugu (Beroperasi)	9,71 Juta m ³	- Bendungan tugu belum melayani daerah irigasi. Dokling dan DED Jaringan Irigasi DI Tugu baru selesai disusun pada 2022 - Pada tahun 2022 sudah terdapat program Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Tugu Kab. Trenggalek; Jawa Timur; Kab. Trenggalek; 4 km; 0,01 m³/detik. Masih diperlukan program Pembangunan IPA dan Jaringan Perpipaan SPAM - Mereduksi banjir terutama di Kecamatan Tugu hingga 42,47 m²/dt.	- Manfaat irigasi belum dihasilkan, perlu pembangunan jaringan irigasi. - Diperlukan program Pembangunan IPA dan Jaringan Perpipaan SPAM. - Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses pemanfaatan sebagai PLTMH.
5	Bendungan Bendo (Beroperasi)	43,11 Juta m ³	- Penyediaan irigasi baru melayani 526.66 hektar pada DI Bendo. - Pelayanan air baku belum melayani dengan optimal karena belum adanya IPA yang dibangun yang bersumber dari intake Bendungan Bendo.. Rencana manfaat air baku dengan volume 0,37 m³ /dt. Saat ini sedang dilakukan Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo yang diprogramkan pada 2022-2023 sepanjang 8 km (Emonitoring PUPR). - Bendungan Bendo dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Sudah terdapat warga yang memanfaatkan	- Diperlukan peningkatan jaringan irigasi DI Bendo sebesar 7.273,34 ha. - Diperlukan program Pembangunan IPA dan Jaringan Perpipaan SPAM.

No	Nama Infrastruktur	Volume	Manfaat	Tindak Lanjut
			area untuk melakukan wisata berkemah di akhir pekan Pembangunan Bendungan Bendo berkontribusi mereduksi banjir terutama di Kecamatan Sawo hingga 297,40 m³/dtk.	
6	Bendungan Gongseng (Beroperasi)	22,34 juta m ³	- Bendungan Gongseng mampu mengairi daerah irigasi seluas 6.191 ha pada DI Pacal. Sedang tahap konstruksi saluran irigasi dan saluran air baku sedang menunggu izin operasi sehingga dalam realisasinya belum terlaksana. - Pelayanan air baku belum melayani dengan optimal karena belum adanya IPA yang dibangun yang bersumber dari intake Bendungan Gongseng. Rencana manfaat air baku dengan volume 300 liter/detik. - mereduksi banjir sebesar 133,27 m³/detik dari genangan 15-40 cm - Bendungan Gongseng dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. - Bendungan Gongseng dimanfaatkan sebagai PLTMH dengan potensi sebesar 0,7 MW. Sudah terbangun rumah outlet yang menjadi bagian dari pelaksanaan PLTMH.	- Manfaat irigasi belum dihasilkan, perlu pembangunan jaringan irigasi. - Rencana pariwisata belum disiapkan namun akan disiapkan dengan terintegrasi dengan pariwisata Bendungan Pacal yang menjadi wisata sejarah konstruksi di Indonesia. - Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses pemanfaatan sebagai PLTMH.
7	Bendungan Semantok (Beroperasi)	32,67 Juta m ³	- Bendungan Semantok direncanakan dapat mengairi 1900 ha pada DI Ngomben dan DI Margomulyo. Namun, jaringan irigasi belum terbangun. - Pelayanan air baku belum melayani dengan optimal karena belum adanya IPA yang dibangun yang bersumber dari intake Bendungan Semantok. Terdapat program Penyusunan DED Air Baku Bendungan Semantok pada 2024 (Emonitoring PUPR). - Pembangunan Bendungan Semantok sudah berkontribusi mereduksi banjir sebesar 137 m³/dt pada wilayah hilir di Kecamatan Rejoso yang dialiri Sungai Semantok. - Bendungan Semantok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.	- Manfaat irigasi belum dihasilkan, perlu pembangunan jaringan irigasi. - Air baku belum termanfaatkan, perlu pembangunan intake, pipa transmisi, IPA dan jaringan distribusi.
8	Bendungan Bagong (Konstruksi)	43,11 Juta m ³	Rencana Pemanfaatan untuk: - Suplai irigasi seluas 1.021 Ha - Penyediaan air baku 0,15 m³ /dt - Reduksi debit banjir 29,85 m³/dtk	Tidak diperlukan tindak lanjut karena menunggu konstruksi bendungan selesai.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sub bab ini mencakup penjelasan profil dan kinerja infrastruktur jaringan jalan dan jembatan.

4.2.1 Infrastruktur Jaringan Jalan

Berdasarkan kewenangan, jalan dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Di Jawa Timur terdapat jalan nasional sepanjang 2.261,68 km dengan kemantapan 99%. Lebar jalan rata-rata sebesar 10,71 m dengan IRI rata-rata sebesar 4,7 dan VCR rata-rata 0,55.

VCR rata-rata jalan nasional di Jawa Timur adalah sebesar 0,59. Jalan Nasional dengan VCR lebih dari 0,8 adalah sepanjang 421,12 km (18,62%), yang tersebar di beberapa ruas di Jawa Timur, seperti di ruas jalan Sadang (BTS. Kab. Lamongan)-BTS. Kota Gresik, BTS. Kota Kediri-BTS. Kab. Tulungagung, Waru-BTS. Kota Sidoarjo, dan Tanggul-Gembirono. Secara lengkap mengenai kinerja jalan nasional dapat dilihat pada Peta 4.2.

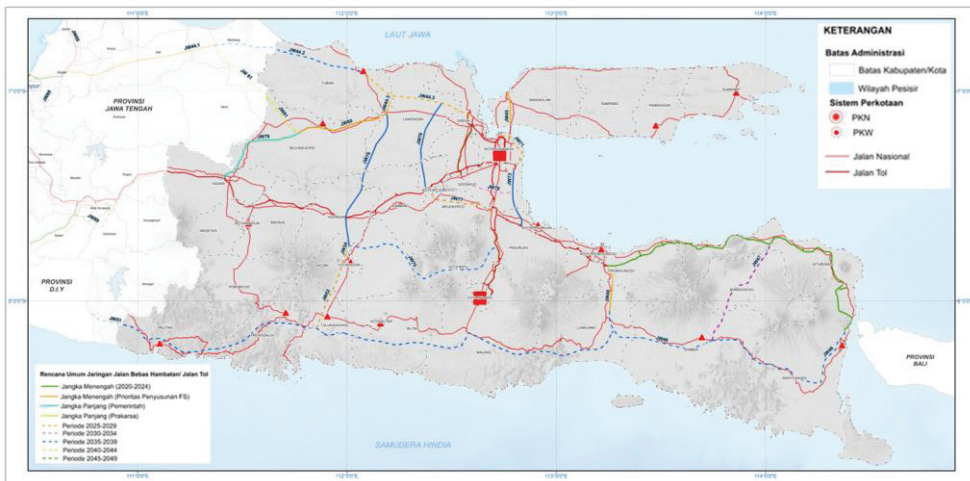
Jalan tol adalah jalan umum atau tertutup dengan dikenakan biaya untuk melintasinya sesuai tarif yang berlaku. Di Jawa Timur, terdapat 12 ruas jalan tol yang sudah beroperasi, dan 10 ruas dalam perencanaan konstruksi tahun 2020-2029, sebagaimana dalam tabel berikut dibawah ini.

Untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan wilayah selatan Jawa Timur, Kementerian PUPR sedang menuntaskan pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur sepanjang 680,13 km, dimana 347 km (55,85%) sudah terbangun dan 333,13 km (44,15%) masih dalam masa konstruksi. Jalan yang masih dalam tahap konstruksi adalah: Lot 6: Prigi-BTS Kab. Tulungagung-Klatak-Brumbun, Lot 7: BTS. Kab. Tulungagung-Serang-BTS. Kab. Malang, Lot 8: Jarit-Puger, dan Lot 9: Sp. Balekambang-Kedungsalam. Secara lengkap rencana pembangunan jalan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur

Jalan Tol Operasi	Jalan Tol Konstruksi	Jalan Tol Perencanaan
1. Solo-Ngawi	1. Pasuruan- Probolinggo Seksi 4 (2022)	1. KLBM Seksi 4 Bunder- Manyar (2025-2029)
2. Ngawi-Kertosono	2. Probolinggo- Banyuwangi (2023-2024)	2. Tuban-Babat-Lamongan- Gresik (2025-2029)
3. Mojokerto-Jombang- Kertosono	3. Kertosono-Kediri (2021-2024)	3. Suramadu-Tj. Bulupandan (2025-2029)
4. Mojokerto-Surabaya		4. Probolinggo-Lumajang (2025-2029)
5. Surabaya-Gempol		5. Malang-Kepanjeng (2025-2029)
6. Gempol-Pasuruan		6. Kediri-Tulungagung (2025-2029)
7. Pasuruan-Probolinggo Seksi 1,2,3		7. Waru-Wonokromo-Tj. Perak (2025-2029)
8. Surabaya-Gresik		
9. SS Waru-Bandara Juanda		
10. Gempol-Pandaan		
11. Pandaan-Malang Seksi 1-4		
12. KLBM Seksi 1-3		

Sumber: BPJT Kementerian PUPR, 2022



Sumber: BPJT Kementerian PUPR, 2022

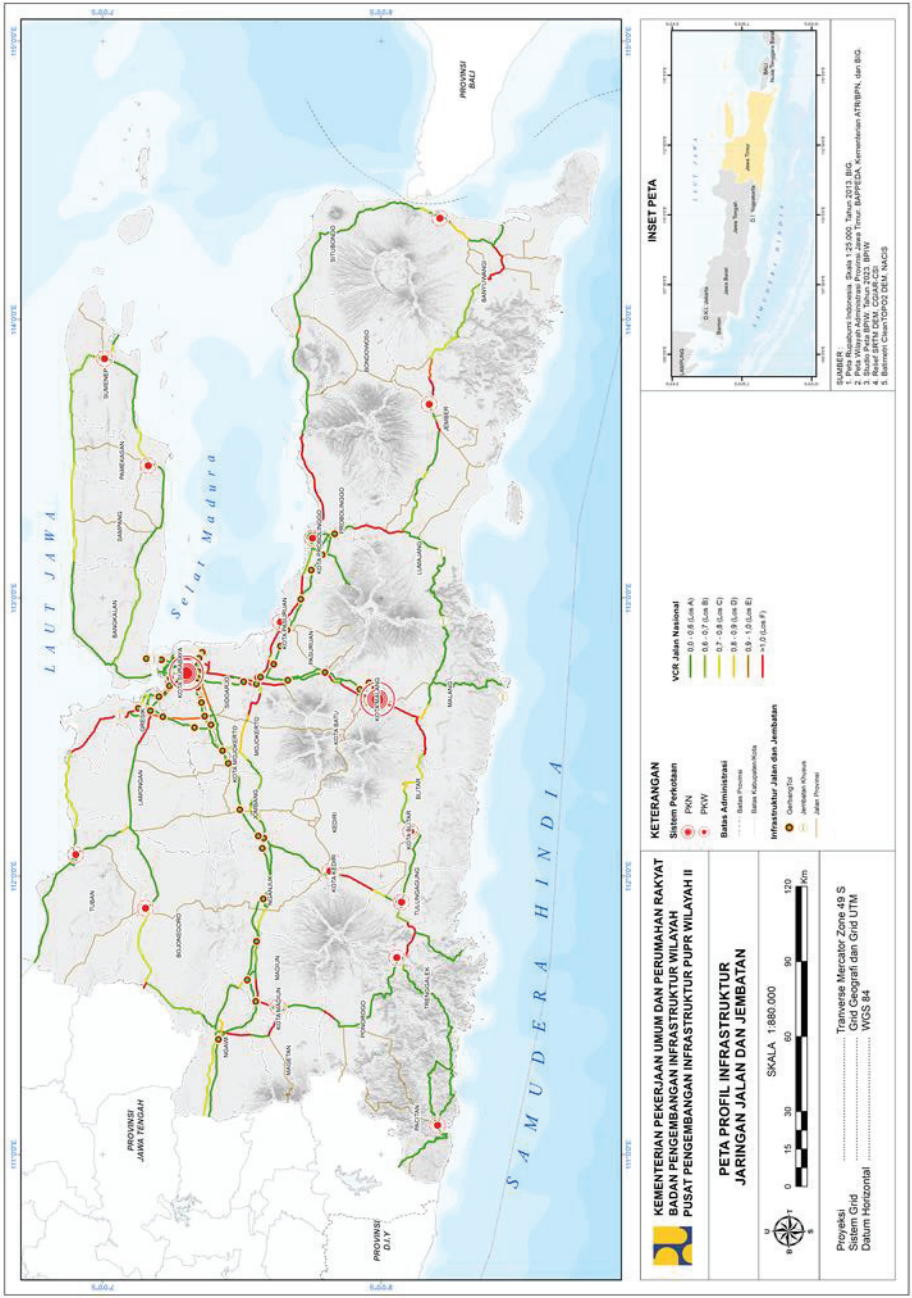
Gambar 4.4 Rencana Umum Jaringan Jalan Bebas Hambatan / Jalan Tol

4.2.2 Infrastruktur Jembatan

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 5 jembatan khusus, 52 jembatan tol, serta puluhan jembatan yang membentang di sepanjang jalan nasional. Selain itu juga terdapat jembatan gantung yang berfungsi sebagai pembuka konektivitas di kawasan pedesaan dan pedalaman.

Jembatan Khusus yaitu:

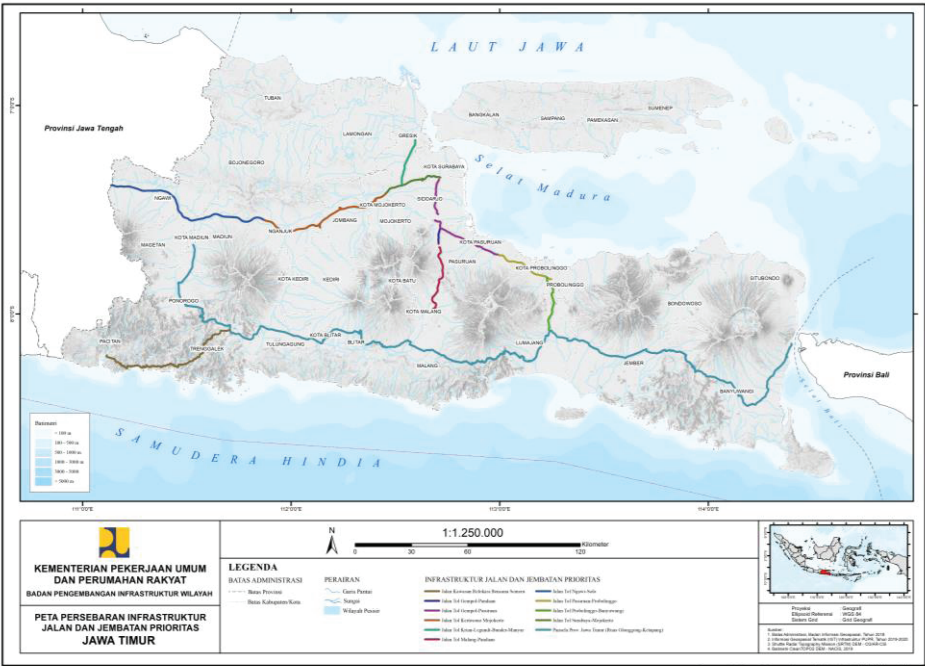
1. Jembatan Suramadu: Menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Memiliki panjang 5.438 m dan lebar 32,11 m.
2. Jembatan Sembayat baru II: Berlokasi di Kab. Gresik, membentang di atas sungai Bengawan Solo. Memiliki panjang 354,7 m dan lebar 11 m.
3. Jembatan Kali Mujur: Berlokasi di Kab. Lumajang, membentang di atas Sungai Mujur. Memiliki panjang 181,6 m dan lebar 9 m.
4. Jembatan Kali Glidik II. Berlokasi di Kab. Malang, membentang di atas sungai Glidik. Memiliki panjang 38 m dan lebar 8 m.
5. Jembatan Bajulmati. Berlokasi di Kab. Malang, membentang di atas sungai Bajulmati. Memiliki panjang 90 m dan lebar 10,5 m.



Peta 4.2 Profil Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Timur

4.2.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Jawa Timur terdiri dari 11 infrastruktur yang termasuk kedalam Proyek Prioritas Nasional yang sejak tahun 2016 hingga 2022 mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres (Peraturan Presiden). Selain itu, terdapat infrastruktur prioritas yang termasuk ke dalam jalan strategis karena menghubungkan pelabuhan utama di Jawa Timur dan infrastruktur penanganan pasca bencana lahar Gunung Semeru. Peta persebaran infrastruktur jalan dan jembatan prioritas dan matriks status infrastruktur prioritas tersebut dapat dilihat berikut ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 4.5 Peta Persebaran Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Tabel 4.6 Status Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Nama Infrastruktur	Volume Output Rencana	Volume Output Eksisting	Manfaat
Pansela Provinsi Jawa Timur (Ruas Glonggong - Ketapang) (Sebagian Beroperasi, sebagian konstruksi)	628,24 km	389,49 km (Desember 2024)	- Memperlancar arus perekonomian barang jasa dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata khususnya di sepanjang Pantai Selatan - Mengurangi kesenjangan perekonomian antara wilayah Pantura dan Pansela - Akses alternatif saat lebaran
Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase,	Jalan primer beton (1.970,06 m), Jalan sekunder	Jalan primer beton (1.970,06 m), Jalan sekunder	Pembangunan jalan dengan total panjang 20.441,17 m dan jembatan sebanyak 4 unit sudah dimanfaatkan warga untuk mendukung aktivitas harian produktif seperti mencari pakan untuk

Nama Infrastruktur	Volume Output Rencana	Volume Output Eksisting	Manfaat
Jembatan dan Dinding Penahan Tanah pada Kawasan Relokasi Bencana Semeru (Beroperasi)	(2.655,45 m), Jalan tersier beton (15.805,66 m), Drainase u-ditch (60x60 cm dan 40x60 cm), Jembatan beton komposit (12x8m) 4 unit, serta Dinding Penahan Tanah (DPT) bervolume 7.371 m ² melayani area manfaat kawasan relokasi Semeru seluas 81,55 Ha	(2.655,45 m), Jalan tersier beton (15.805,66 m), Drainase u-ditch (60x60 cm dan 40x60 cm), Jembatan beton komposit (12x8m) 4 unit, serta Dinding Penahan Tanah (DPT) bervolume 7.371 m ² melayani area manfaat kawasan relokasi Semeru seluas 81,55 Ha	ternak, menuju area pertanian, menuju pasar terdekat. Selain itu pembangunan jalan dan jembatan juga meningkatkan arus logistik barang dari dan menuju hantap, serta mendukung proses evakuasi dan mitigasi bencana jika terjadi bencana susulan. - Pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) menyesuaikan kontur topografi di wilayah pembangunan yang bermanfaat untuk menahan beban infrastruktur jalan dan perumahan di atasnya yang lokasinya tersebar di seluruh kawasan dengan total volume mencapai 7.371 m² - Saluran drainase u-ditch dengan penutup dibangun berdampingan dengan jalan lingkungan, drainase dengan penutup dimanfaatkan sebagai akses jalan yang aman dilalui oleh warga penghuni hantap.
Jalan Tol Pandaan - Malang (Beroperasi)	38,49 km	38,49 km	- Terdiri dari 5 Seksi, yaitu (1) Seksi 1 Pandaan-Purwodadi (15,4 Km); (2) Seksi 2 Purwodadi-Lawang (8 Km); (3) Seksi 3 Lawang-Singosari (7 Km); (4) Seksi 4 Singosari-Pakis (4,7 Km); (5) Seksi 5 Pakis-Malang (3 Km). - Peningkatan mobilitas orang dan logistik antara Kota Surabaya dan Malang. - Mobilitas kendaraan dengan waktu tempuh 2-3 jam. - Memberikan dukungan peningkatan perekonomian Jatim pada sektor pariwisata yaitu Kawasan Wisata dan Taman Safari Prigen, Kebun teh Wonosari, Candi Singosari, Kawasan wisata Batu, dll.
Jalan Tol Solo - Ngawi (Beroperasi)	90,1 km	90,1 km	- Terdiri dari 3 seksi: (1) Seksi 1 Ngawi-Klitik sepanjang (4 km); (2) Seksi 2 Solo-Sragen (35 km); (3) Seksi 3 Sragen-Ngawi (51 km). - Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). - Akses simpang susun yang mempermudah menuju kawasan-kawasan industri. - Mengurangi beban lalu lintas di Jl. Raya Solo-Ngawi
Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (Beroperasi)	40,5 km	40,5 km	- Terdiri dari 4 seksi: (1) Seksi I ruas Bandar-Jombang (14,7 km); (2) Seksi II ruas Jombang-Mojokerto Kota (19,9 km); (3) Seksi III ruas Mojokerto Barat-Mojokerto Utara (5 km); (4) Seksi IV Bandar-Batas Barat (0,9 km). - Mengurangi beban lalu lintas dan mempersingkat waktu dibandingkan melalui jalur arteri Surabaya-Madiun
Jalan Tol Mojokerto - Surabaya (Beroperasi)	36,27 km	36,27 km	- Terdiri dari 4 seksi: (1) Seksi IA Waru-Sepanjang (2,3 km); (2) Seksi IB Sepanjang-WRR (4,3 KM); (3) Seksi II WRR-Driyorejo (5,1 Km); (4) Seksi III Driyorejo-Krian (6,1 Km); (5) Seksi IV Krian-Mojokerto (18,47 km) - Mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri Surabaya hingga Mojokerto
Jalan Tol Gempol - Pandaan (Beroperasi)	13,61 km	13,61 km	- Akses utama yang menghubungkan antara dua kota terbesar di Jawa Timur yakni Surabaya dan Malang via jalan tol - Penunjang wisatawan menuju ke kawasan wisata di Malang Raya - Tersambung dengan Jalan Tol Pandaan-Malang sehingga mendukung percepatan distribusi logistik, barang dan jasa dari Surabaya menuju Malang dsb

Nama Infrastruktur	Volume Output Rencana	Volume Output Eksisting	Manfaat
Jalan Tol Gempol - Pasuruan (Beroperasi)	34,15 km	34,15 km	• Terdiri dari 3 seksi: (1) Seksi I Gempol – Rembang sepanjang 13,9 Km; (2) Seksi II Rembang – Pasuruan dengan panjang 6,6 Km; (3) Seksi III Pasuruan – Grati dengan panjang 13,65 Km. • Mempercepat perpindahan dari Pasuruan bagian timur ke arah Surabaya, serta konektivitas ke kawasan industri di Pasuruan
Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (Sebagian Beroperasi, sebagian konstruksi)	43,85 km	39,85 km	• Terdiri dari 4 seksi: (1) Seksi 1 Grati - Tongas sepanjang 13,50 Km; (2) Seksi 2 Tongas - Probolinggo Barat sepanjang 6,90 Km; (3) Seksi 3 Probolinggo Barat - Probolinggo Timur sepanjang 10,90 Km; (4) seksi 4A ruas Probolinggo Timur - Gending sepanjang 8,55 Km; (5) Seksi 4B. • Masih tahap progres konstruksi Seksi 4B. • Penghubung dengan Kawasan Industri, pariwisata, bandara dan pelabuhan di wilayah Jawa Timur. • Meningkatkan konektivitas ke Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, serta Malang dsr. • Mengurangi kepadatan di Jalan Nasional Pasuruan- Probolinggo. • Akses alternatif jalur wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru.
Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Sebagian Beroperasi, sebagian konstruksi)	176,42 km	49,7 km (2024)	• Akan terdiri dari 3 seksi: (1) Seksi I (Gending-Bts. Kab Probolinggo/ Situbondo); (2) Seksi II (Bts. Kab Probolinggo/ Situbondo-Bts.Kab Situbondo/Banyuwangi); (3) Seksi III (Bts.Kab Situbondo/ Banyuwangi-Ketapang). • Target penyelesaian Gending - Besuki 49,7 km (2024). • Membantu pengembangan aktivitas pariwisata. • Melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.
Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (Sebagian Beroperasi, sebagian konstruksi)	38,29 km	29 km	• Akan terdiri dari 4 seksi: (1) Seksi I (Krian Belahanrejo); (2) Seksi II (Seksi II (Belahanrejo Cerme); (3) Seksi III (Cerme Bunder); (4) Seksi IV (Bunder Manyar). • Sudah beroperasi penuh Seksi I-III. • Seksi IV proses pembebasan lahan. • Akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian di selatan • Mengurai kepadatan lalu lintas di daerah Legundi – Gresik • Mendukung kawasan perindustrian utama di wilayah penyangga utama Kota Surabaya

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

Sub bab ini berisi kondisi penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan kawasan kumuh, dan pengelolaan persampahan.

4.3.1 Infrastruktur Air Minum

Akses air minum layak di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 95,56%. Kab/Kota dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo (100%), sementara akses terendah adalah di Kab. Trenggalek (80,64%).

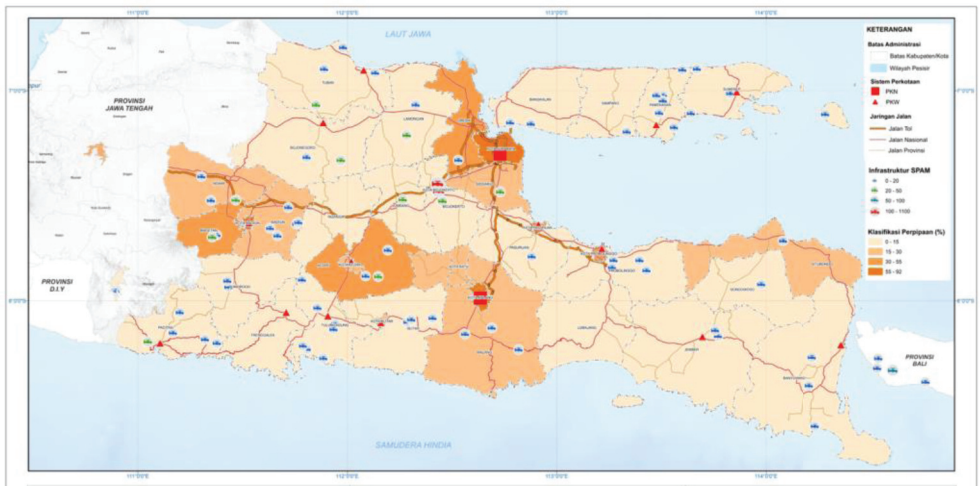
Meskipun akses layak sudah >95%, namun akses perpipaan baru mencapai 21,13%, dimana kabupaten/kota dengan akses air minum perpipaan tertinggi adalah Kota Madiun (82,22%), Kota Surabaya (79,90%), dan Kota

Malang (79,90%). Kabupaten dengan akses terendah adalah Kabupaten Sampang (4,51%), Kabupaten Sumenep (4,71%), dan Kabupaten Jombang (6,10%). Berikut tabel akses air perpipaan dan akses air minum layak pada tiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 4.7 Capaian Akses Air Minum di Jawa Timur

Kab/Kota	Perpipaan (%)	Layak (%)	Kab/Kota	Perpipaan (%)	Layak (%)
Kab. Pacitan	14,52	84,43	Kab. Magetan	30,85	99,46
Kab. Ponorogo	9,44	91,15	Kab. Ngawi	12,34	99,49
Kab. Trenggalek	5,64	80,64	Kab. Bojonegoro	10,75	96,94
Kab. Tulungagung	11,49	96,75	Kab. Tuban	23,63	97,58
Kab. Blitar	3,32	95,35	Kab. Lamongan	6,64	92,18
Kab. Kediri	3,04	98,89	Kab. Gresik	26,42	94,63
Kab. Malang	23,35	95,48	Kab. Bangkalan	14,16	93,92
Kab. Lumajang	15,08	95,89	Kab. Sampang	6,46	89,89
Kab. Jember	6,72	83,43	Kab. Pamekasan	5,76	90,49
Kab. Banyuwangi	16,80	90,07	Kab. Sumenep	3,59	97,82
Kab. Bondowoso	7,02	67,2	Kota Kediri	21,73	99,67
Kab. Situbondo	12,88	96,18	Kota Blitar	25,50	98,37
Kab. Probolinggo	6,63	92,16	Kota Malang	64,62	99,89
Kab. Pasuruan	10,62	97,21	Kota Probolinggo	47,07	100
Kab. Sidoarjo	23,38	99,06	Kota Pasuruan	44,94	99,72
Kab. Mojokerto	8,78	99,2	Kota Mojokerto	14,80	100
Kab. Jombang	6,55	99,37	Kota Madiun	72,53	99,83
Kab. Nganjuk	9,72	99,45	Kota Surabaya	96,81	98,74
Kab. Madiun	20,93	97,83	Kota Batu	21,47	99,02
Akses Perpipaan Rata-Rata Provinsi Jawa Timur: 20,45					
Akses Air Minum Layak Rata-Rata Provinsi Jawa Timur: 94,93					

Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021



Sumber: Cipta Karya Kementerian PUPR, 2021

Gambar 4.6 Sebaran SPAM

Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi Jawa Timur pada umumnya memproduksi <20 lt/dt (70 SPAM), sisanya 10 SPAM dengan produksi 20-50 lt/dr, dan 2 SPAM dengan produksi 50-100 lt/dt. SPAM tersebut tersebar di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur, yang secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.6.

4.3.2 Infrastruktur Sanitasi

A. Infrastruktur Air Limbah

Akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 76,17%. Kab/kota dengan akses sanitasi layak tertinggi adalah Kota Madiun (94,51%), Kabupaten Gresik (94,41%), dan Kota Blitar (94,40%), sementara kab/kota dengan persentase akses sanitasi layak terendah yaitu Kabupaten Bondowoso (35,67%), Kabupaten Probolinggo (46,14%), dan Kabupaten Situbondo (48,15%).

Meskipun akses layak sudah >75%, namun akses sanitasi aman baru mencapai 6,79%, dimana kabupaten/kota dengan akses sanitasi aman tertinggi adalah Kota Surabaya (24,63%), Kota Mojokerto (19,28%), dan Kota Madiun 15,03%. Sementara kab/kota dengan persentase akses sanitasi aman terendah yaitu Kabupaten Bondowoso (1,02%), Kabupaten Sumenep (1,43%), dan Kabupaten Probolinggo (1,47%). Berikut tabel akses sanitasi aman dan layak pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.8 Capaian Akses Sanitasi di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Akses Aman		Akses Layak	
		Jumlah Rumah Tangga (KK)	%	Jumlah Rumah Tangga (KK)	%
1	Pacitan	6.001	3,62	111.175	67,11
2	Ponorogo	15.738	6,20	211.371	83,27
3	Trenggalek	10.313	4,94	149.006	71,43
4	Tulungagung	16.943	5,89	226.372	78,72
5	Blitar	19.471	5,67	241.722	70,35
6	Kediri	19.422	4,33	352.769	78,59
7	Malang	29.246	4,07	529.033	73,69
8	Lumajang	19.128	6,62	211.810	73,25
9	Jember	18.520	2,60	400.363	56,15
10	Banyuwangi	3.450	0,72	402.591	78,08
11	Bondowoso	2.558	1,02	89.035	35,67
12	Situbondo	4.607	2,03	109.043	48,15
13	Probolinggo	4.761	1,47	149.881	46,14
14	Pasuruan	13.631	3,04	305.184	68,11
15	Sidoarjo	79.657	13,24	545.284	90,64
16	Mojokerto	16.131	5,47	250.704	84,96
17	Jombang	30.880	8,85	295.725	84,72
18	Nganjuk	12.563	4,16	248.201	82,16
19	Madiun	20.949	10,25	171.824	84,11
20	Magetan	7.417	4,01	152.898	82,71
21	Ngawi	24.071	9,36	174.547	67,85
22	Bojonegoro	27.758	7,76	288.134	80,58
23	Tuban	19.293	5,91	246.473	75,49
24	Lamongan	16.661	5,16	302.133	93,66
25	Gresik	37.892	11,13	321.433	94,41
26	Bangkalan	5.975	2,57	119.995	51,66
27	Sampang	4.807	2,13	157.376	69,83
28	Pamekasan	5.178	2,41	132.993	61,84
29	Sumenep	4.506	1,43	174.958	55,38
30	Kota Kediri	4.237	5,30	75.080	93,96
31	Kota Blitar	5.173	12,68	38.524	94,40
32	Kota Malang	27.522	10,40	224.689	84,86
33	Kota Probolinggo	4.390	6,94	52.842	83,56
34	Kota Pasuruan	3.113	5,73	45.145	83,04
35	Kota Mojokerto	6.872	19,28	33.284	93,36
36	Kota Madiun	8.198	15,03	51.560	94,51
37	Kota Surabaya	197.149	24,63	697.938	87,18

No.	Kabupaten/Kota	Akses Aman		Akses Layak	
		Jumlah Rumah Tangga (KK)	%	Jumlah Rumah Tangga (KK)	%
38	Kota Batu	6.729	12,12	50.442	90,85
Jawa Timur			6,79		76,17

Sumber: Ditjen Cipta Karya PUPR, 2021

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 11 IPLT dan 6 IPAL yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebaran IPLT dan IPAL di Jawa Timur dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Ditjen Cipta Karya PUPR, 2021

Gambar 4.7 Sebaran IPAL dan IPLT

B. Infrastruktur Persampahan

Capaian pengolahan sampah di Jawa Timur sebesar 54,83% yang terdiri dari 14,23% pengurangan sampah dan 40,60% penanganan sampah. Kabupaten/kota dengan capaian pengolahan sampah tertinggi adalah Kota Pasuruan (98,70%), Kota Malang (98,05%), Kota Madiun (97,96%), sementara yang terendah adalah Kab. Sampang (11,80%), Kab. Sumenep (14,70%), dan Kab. Magetan (16,11%).

Masing masing kabupaten dan kota sudah terlayani oleh TPA. Beberapa TPA di 9 kab/kota di Provinsi Jawa Timur telah *over capacity* yaitu Kota Kediri, Kab.Sumenep, Kab. Bangkalan, Kab. Gresik, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, dll. Layanan TPA tidak saja dipengaruhi oleh besarnya sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga teknologi yang digunakan dalam pengolahan sampah. TPA di Jawa Timur memiliki beberapa jenis sistem pengolahan sampah diantaranya sistem *open dumping*, *controlled landfill*, dan *sanitary landfill*, yang secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9 TPA di Jawa Timur

No.	Lokasi TPA	Sistem Pengelolaan Sampah	Kab/Kota
1	TPA Dadapan	Sanitary Landfill	Pacitan
2	TPA Mrican	Open Dumping	Ponorogo
3	TPA Srahah	Controlled Landfill	Trenggalek

No.	Lokasi TPA	Sistem Pengelolaan Sampah	Kab/Kota
4	TPA Segawe	<i>Sanitary Landfill</i>	Tulungagung
5	TPA Tegal Asri	<i>Controlled Landfill</i>	Blitar
6	TPA Pagerwojo	<i>Open Dumping</i>	Blitar
7	TPA Jingglong	<i>Controlled Landfill</i>	Blitar
8	TPA Sumberjo	<i>Controlled Landfill</i>	Blitar
9	TPA Kendalrejo	<i>Open Dumping</i>	Blitar
10	TPA Sekoto	<i>Open Dumping</i>	Kediri
11	TPA Paras Poncokusumo	<i>Controlled Landfill</i>	Malang
12	TPA Talangagung	<i>Controlled Landfill</i>	Malang
13	TPA Randuagung	<i>Open Dumping</i>	Malang
14	TPA Rejosari	<i>Open Dumping</i>	Malang
15	TPA Lempeni	<i>Sanitary Landfill</i>	Lumajang
16	TPA Pakusari	<i>Controlled Landfill</i>	Jember
17	TPA Bulusan	<i>Controlled Landfill</i>	Banyuwangi
18	TPA Paguan	<i>Open Dumping</i>	Bondowoso
19	TPA Sliwung	<i>Controlled Landfill</i>	Situbondo
20	TPA Seboro	<i>Sanitary Landfill</i>	Probolinggo
21	TPA Kenep Beji	<i>Controlled Landfill</i>	Pasuruan
22	TPA Griyo Mulyo	<i>Controlled Landfill</i>	Sidoarjo
23	TPA Belahan Tengah	<i>Controlled Landfill</i>	Mojokerto
24	TPA Banjardowo	<i>Sanitary Landfill</i>	Jombang
25	TPA Kedungdowo	<i>Controlled Landfill</i>	Nganjuk
26	TPA Padantoyo	<i>Controlled Landfill</i>	Nganjuk
27	Tpa Brendil Brebek	<i>Controlled Landfill</i>	Nganjuk
28	TPA Kaliabu	<i>Controlled Landfill</i>	Madiun
29	TPA Milangasri	<i>Controlled Landfill</i>	Magetan
30	TPA Selopuro	<i>Controlled Landfill</i>	Ngawi
31	TPA Banjarsari	<i>Controlled Landfill</i>	Bojonegoro
32	TPA Gunung Panggung	<i>Sanitary Landfill</i>	Tuban
33	TPA Tambak Rigadung	<i>Sanitary Landfill</i>	Lamongan
34	TPA Ngipik	<i>Controlled Landfill</i>	Gresik
35	TPA Buluh	<i>Controlled Landfill</i>	Bangkalan
36	TPA Gunung Maddah	<i>Sanitary Landfill</i>	Sampang
37	Tpa Angsanah	<i>Sanitary Landfill</i>	Pamekasan
38	TPA Batuan	<i>Sanitary Landfill</i>	Sumenep
39	TPA Klotok	<i>Controlled Landfill</i>	Kota Kediri
40	TPA Ngegong	<i>Sanitary Landfill</i>	Kota Blitar
41	TPA Supit Urang	<i>Sanitary Landfill</i>	Kota Malang
42	TPA Bestari	<i>Sanitary Landfill</i>	Kota Probolinggo
43	TPA Blandongan	<i>Sanitary Landfill</i>	Kota Pasuruan
44	TPA Randegan	<i>Controlled Landfill</i>	Kota Mojokerto
45	TPA Winongo	<i>Controlled Landfill</i>	Kota Madiun
46	TPA Benowo	<i>Controlled Landfill</i>	Kota Surabaya
47	TPA Tlekung	<i>Controlled Landfill</i>	Kota Batu

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

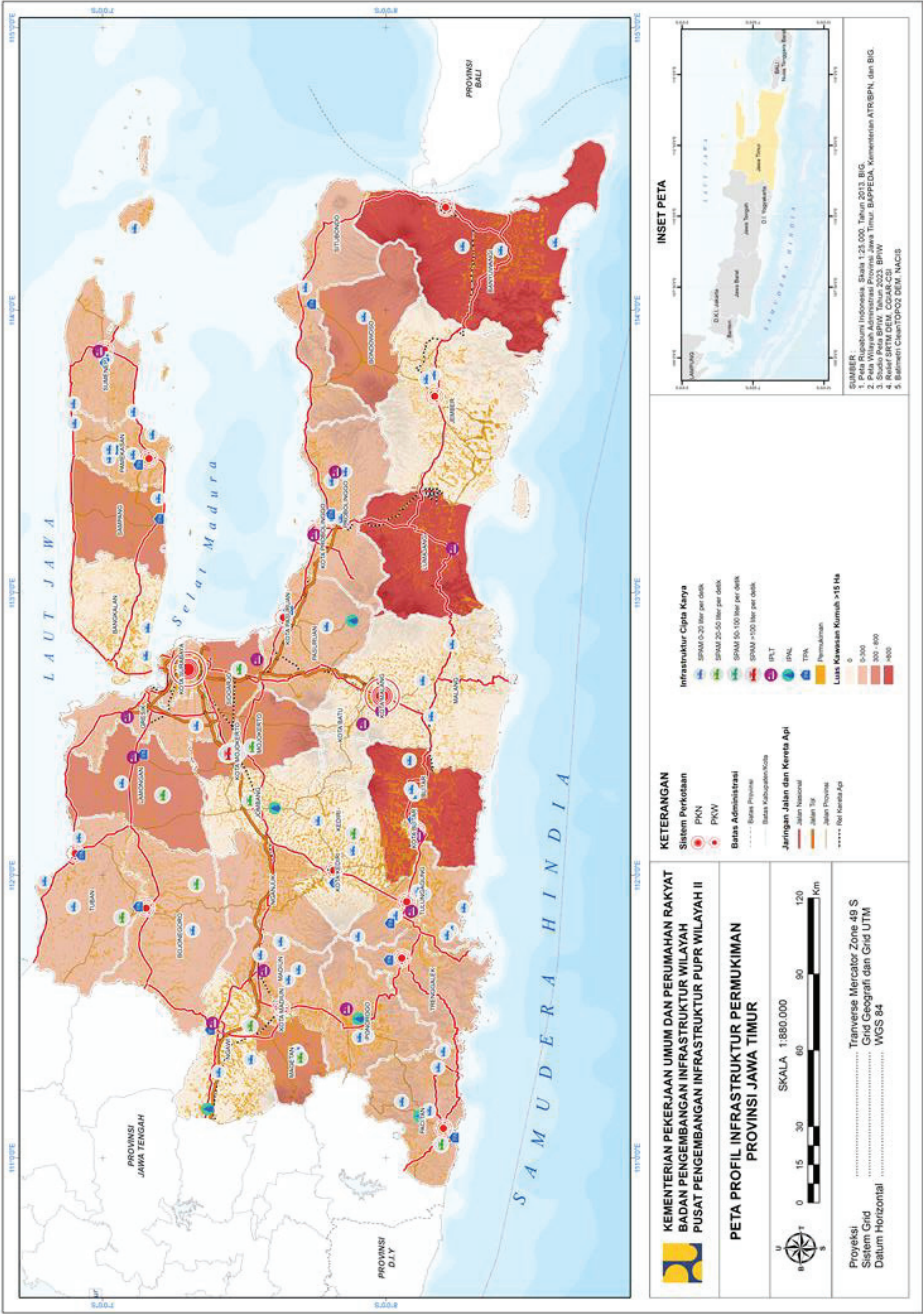
Beberapa TPA di Jawa Timur yang sudah *overload* diantaranya TPA Klotok di Kota Kediri, TPA Kab Sumenep, TPA Ngipik di Kab. Gresik, TPA Pandengan di Kota Mojokerto, TPA Griyo Mulyo di Kab. Sidoarjo, TPA Belahan Tengah di Kab. Mojokerto, TPA Banjardowo di Kab. Jombang, TPA Gunung Panggung di Kab. Tuban, TPA Ngipik di Kab. Gresik, TPA Buluh di Kab. Bangkalan, TPA Pandengan di Kota Mojokerto, TPA Lempeni di Kab. Lumajang, TPA Bestari di Kota Probolinggo, TPA Bulusan di Kab. Banyuwangi, TPA Paguan di Kab. Bondowoso, TPA Pakusari di Kab. Jember, TPA Mrican di Kab. Ponorogo, TPA Bengkorok di Kab. Trenggalek, TPA Segawe di Kab. Tulungagung, TPA Kedungdowo di Kab. Nganjuk, TPA Klotok di Kota Kediri, TPA Winango di Kab. Madiun, TPA Kab Sumenep, dan TPA Kab. Pamekasan. Sementara itu, kabupaten/kota dengan

penggunaan TPA yang masih minim adalah Kab. Malang dan Kab. Magetan. Berikut ini pelayanan TPA di kab/kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.10 Pelayanan TPA di Jawa Timur

No.	Kab/Kota	Timbulan Sampah (m ³ /tahun)	Kapasitas TPA (m ³ /tahun)	Sampah Masuk dalam TPA (m ³ /Tahun)	Sampah Terangkut (%)	Sampah Terolah di TPA (%)
1	Pacitan	626,748	32,681	3,826	0.61	11,71
2	Ponorogo	1,015,140	157,500	157,500	4.39	100
3	Trenggalek	781,818	127,750	127,750	0.01	100
4	Tulungagung	1,165,336	73,365	73,365	0.36	100
5	Blitar	1,308,595	14,100	292	0.02	2,07
6	Kediri	1,748,679	262,500	262,500	2.97	100
7	Malang	2,838,497	1,805,352	164,320	5.79	0,91
8	Lumajang	1,196,855	1,460,000	1460000	18.32	100
9	Jember	2,712,615	577,500	577,500	21,29	100
10	Banyuwangi	1,826,548	315,000	315,000	17,24	100
11	Bondowoso	829,966	157,500	202,589	24.41	128,63
12	Situbondo	733,529	210,000	7,428	1.01	3,54
13	Probolinggo	1,232,449	294,000	294,000	6.26	100
14	Pasuruan	1,717,320	273,000	212,591	12.38	77,87
15	Sidoarjo	2,227,214	671,600	921,728	41.38	137,24
16	Mojokerto	1,196,810	147,000	291,464	24.35	198,27
17	Jombang	1,409,451	871,500	871,500	21.88	100
18	Nganjuk	1,180,442	16,493	175,787	14.89	1.065,85
19	Madiun	795,960	630,000	630,000	11.57	100
20	Magetan	717,323	252,000	10,114	1.41	4,01
21	Ngawi	930,383	429,412	237,414	25.52	55,29
22	Bojonegoro	1,391,885	120,000	119,034	8.55	99,20
23	Tuban	1,281,077	399,000	399,000	10.54	100
24	Lamongan	1,437,364	9,344	4,672	0.33	50
25	Gresik	1,402,129	420,000	481,999	34.38	114,76
26	Bangkalan	1,133,899	210,000	210,000	2.85	100
27	Sampang	1,036,929	52,500	14,600	1.41	27,81
28	Pamekasan	908,996	115,500	385,827	42.45	334,05
29	Sumenep	1,202,400	105,000	101,519	8.44	96,68
30	Kota Kediri	306,681	234,894	241,082	78.61	102,63
31	Kota Blitar	159,490	84,000	83,600	52.42	99,52
32	Kota Malang	902,316	210,000	424,220	47.01	202,01
33	Kota Probolinggo	256,265	158,207	111,257	43.41	70,32
34	Kota Pasuruan	222,428	336,000	50,106	22.53	14,91
35	Kota Mojokerto	141,616	157,500	157,500	0.69	100
36	Kota Madiun	208,708	672,000	4,377	2.10	0,65
37	Kota Surabaya	3,073,607	1,373,400	1,854,200	60.33	135,01
38	Kota Batu	227,818	157,500	98,244	43.12	62,38
Jawa Timur		43,485,290	13,593,098	7,544,402	17.35	

Sumber: Ditjen Cipta Karya PUPR, 2021



Peta 4.3 Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Timur

4.3.3 Kawasan Kumuh

Berdasarkan SK Kumuh terbaru masing masing kab/kota, luas kawasan permukiman kumuh > 15 Ha di Provinsi Jawa Timur mencapai 10.025,89 Ha. Kawasan kumuh terluas tersebar di Jawa Timur bagian selatan diantaranya Kab Blitar 1.358 Ha, Kab Lumajang 1.338 Ha, Kab. Jember 1.289 Ha. Kawasan kumuh terendah diantaranya terdapat di Kab Madiun 16,60 Ha, Kab Trenggalek 16,95 Ha, Kota Pasuruan 17,19 Ha.

Salah satu *barrier* untuk Pemerintah dalam membantu Kawasan kumuh adalah *legs* kepemilikan lahan. Dilema yang ada adalah jika rumah ilegal yang ada dibantu, akan mengundang orang untuk mendiami kawasan yang tidak boleh dibangun seperti bantaran sungai atau bantaran rel. Secara lengkap luasan kawasan kumuh >15 Ha di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Kawasan Kumuh di Jawa Timur

No	Kab Kota	Luas Kawasan > 15 Ha	No	Kab Kota	Luas Kawasan > 15 Ha
1	Bangkalan	n/a	20	Pasuruan	82,42
2	Banyuwangi	890,68	21	Ponorogo	149,82
3	Blitar	1.358,13	22	Probolinggo	130,92
4	Bojonegoro	40,74	23	Sampang	270,41
5	Bondowoso	506,02	24	Sidoarjo	-
6	Gresik	770,18	25	Situbondo	180,18
7	Jember	1.289,13	26	Sumenep	234,85
8	Jombang	230,52	27	Trenggalek	148,95
9	Kediri	205,81	28	Tuban	244,09
10	Lamongan	266,48	29	Tulungagung	272,23
11	Lumajang	1.338,48	30	Kota Batu	81,06
12	Madiun	21,29	31	Kota Blitar	38,77
13	Magetan	189,98	32	Kota Kediri	394,83
14	Malang	-	33	Kota Madiun	-
15	Mojokerto	221,00	34	Kota Malang	115,95
16	Nganjuk	22,00	35	Kota Mojokerto	-
17	Ngawi	131,00	36	Kota Pasuruan	17,19
18	Pacitan	42,50	37	Kota Probolinggo	43,78
19	Pamekasan	96,50	38	Kota Surabaya	Sudah tuntas
Jawa Timur: 10.025,89					

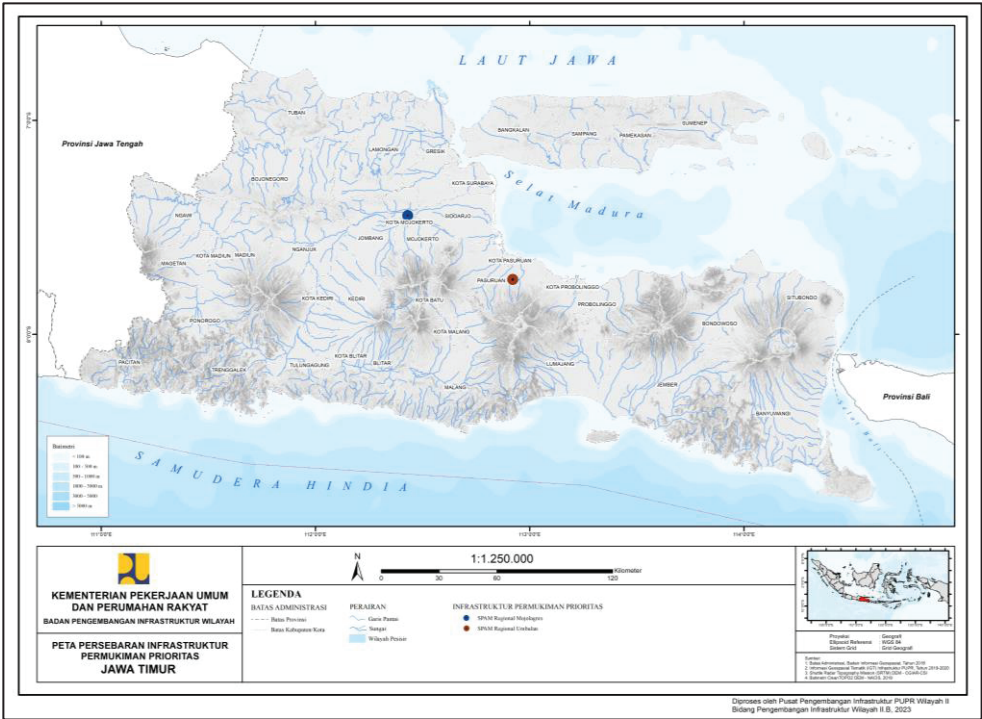
Sumber: BPPW Jawa Timur, 2022

Secara spasial, persentase kawasan kumuh dapat dilihat pada peta berikut.

4.3.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman Prioritas

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas Jawa Timur terdiri dari 1 infrastruktur permukiman yang termasuk kedalam Proyek Prioritas Nasional yang sejak tahun 2016 hingga 2022 mengalami beberapa perubahan berdasarkan penetapan berbagai Perpres (Peraturan Presiden) yaitu SPAM Regional Umbulan. Selain itu, 1 infrastruktur permukiman prioritas lainnya yang termasuk ke dalam infrastruktur strategis yaitu SPAM Regional Mojolagres dengan cakupan layanan melayani Mojokerto-

Lamongan-Gresik. Peta persebaran infrastruktur permukiman prioritas dan matriks status infrastruktur prioritas tersebut dapat dilihat berikut ini.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 4.8 Peta Persebaran Infrastruktur Permukiman Prioritas

Tabel 4.12 Status Infrastruktur Permukiman Prioritas

Nama Infrastruktur	Volume Output Rencana	Volume Output Eksisting	Manfaat	Tindak Lanjut
SPAM Regional Umbulan (Beroperasi)	4.000 l/dtk	2.700 L/dtk	SPAM Umbulan memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap penyediaan suplai air minum di wilayah 5 kabupaten/kota yang dilayani. Saat ini debit air rata-rata yang berhasil terserap sebesar 2.200 L/dtk, namun masih terdapat idle sebesar 500 L/dtk dalam pemanfaatan air SPAM.	- Pemanfaatan air produksi masih perlu dioptimalkan, tingginya gap di antara kapasitas produksi dengan pemanfaatan dapat menyebabkan kerugian fiskal kepada pemerintah daerah yang terikat kerja sama bisnis dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan SPAM tersebut. - penambahan jaringan distribusi sambungan rumah SR di setiap wilayah penerima manfaat terutama di wilayah yang memiliki cakupan pelayanan air minum perpipaan tergolong rendah seperti di Kab. Sidoarjo, Gresik, dan Kabupaten Pasuruan.
SPAM Regional Mojolagres	300 l/dtk	200 l/dtk	SPAM Mojolagres mampu memproduksi air bersih sebesar 200 l/detik yang melayani 14.929 SR di yang tersebar di ketiga	Pemda Kabupaten penerima manfaat khususnya untuk PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan pada distribusi air

Nama Infrastruktur	Volume Output Rencana	Volume Output Eksisting	Manfaat	Tindak Lanjut
(Tahap I dan II) (Beroperasi)			wilayah pelayanan SPAM (Kabupaten Mojokerto 7.819 SR, Kabupaten Lamongan 1.177 SR dan Kabupaten Gresik 5.933 SR.	bersih dengan penambahan SR melalui distribusi perkotaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SPAM.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Sub bab ini mencakup informasi mengenai kondisi *backlog* perumahan dan rumah tidak layak huni.

4.4.1 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pada tahun 2020, jumlah RTLH di Jawa Timur sebanyak 155.370 unit. RTLH tertinggi ada di Kab. Lumajang sebanyak 26.143 unit, Kab. Kediri sebanyak 25.744 unit, dan Kab. Tuban sebanyak 21.869 unit. Sedangkan RTLH terendah ada di Kab. Sidoarjo sebanyak 4 unit, Kab. Bojonegoro sebanyak 51 unit, dan Kab. Bangkalan sebanyak 113 unit.

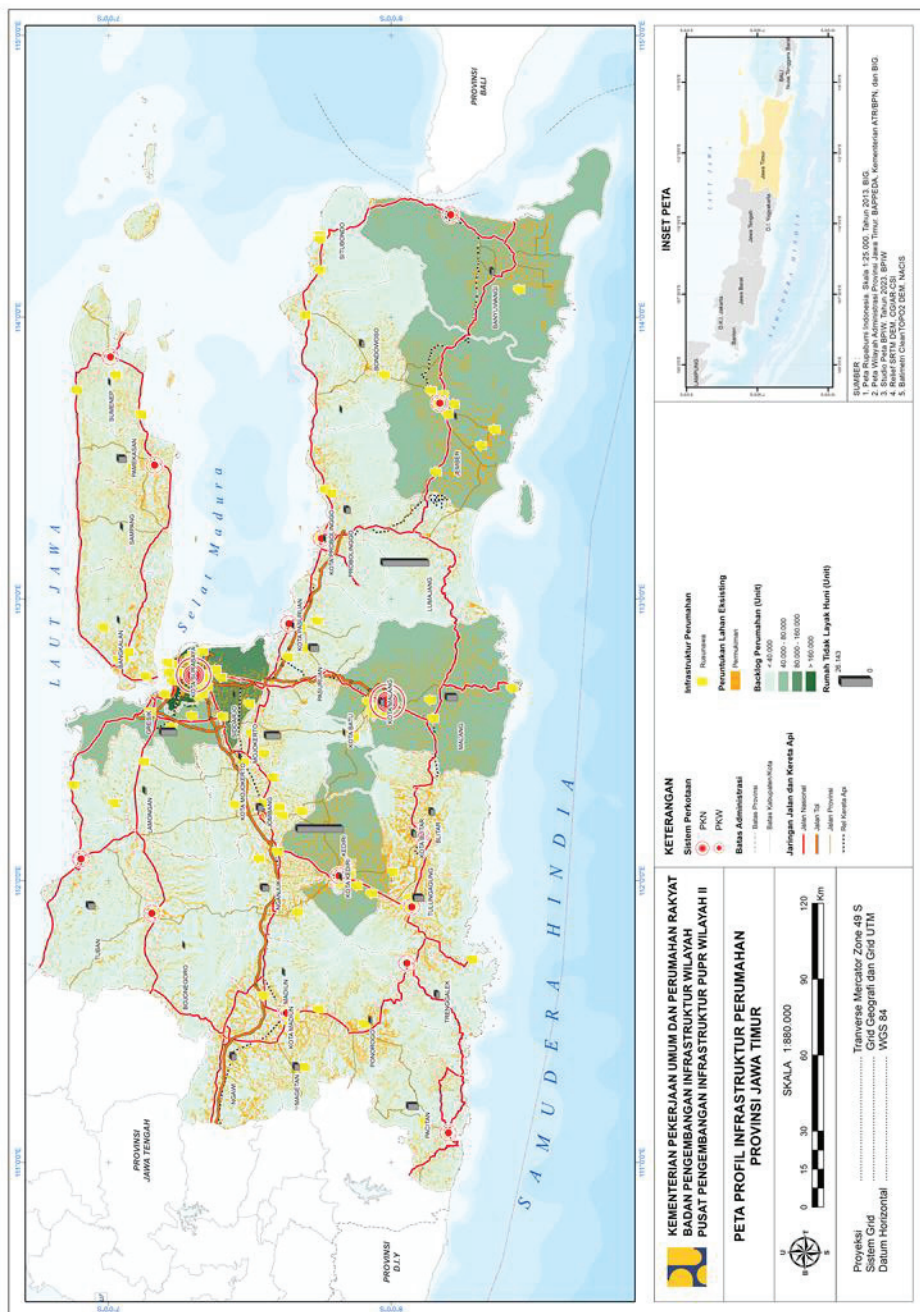
Jumlah RTLH pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 RTLH di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Unit	No	Kab/Kota	Unit
1	Bangkalan	113	19	Pamekasan	4.346
2	Banyuwangi	1.807	20	Pasuruan	4.824
3	Blitar	4.557	21	Ponorogo	781
4	Bojonegoro	51	22	Probolinggo	2.737
5	Bondowoso	1.529	23	Sampang	307
6	Gresik	8.805	24	Sidoarjo	4
7	Jember	211	25	Situbondo	100
8	Jombang	2.975	26	Sumenep	100
9	Kediri	25.744	27	Trenggalek	1.922
10	Lamongan	758	28	Tuban	21.869
11	Lumajang	26.143	29	Tulungagung	5.779
12	Madiun	5.110	30	Kota Batu	315
13	Magetan	2.761	31	Kota Blitar	1.673
14	Malang	5.932	32	Kota Kediri	305
15	Mojokerto	8.183	33	Kota Malang	2.051
16	Nganjuk	4.908	34	Kota Mojokerto	123
17	Ngawi	2.482	35	Kota Pasuruan	177
18	Pacitan	5.715	36	Kota Probolinggo	173
Jumlah RTLH Jawa Timur: 155.370					

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/> diakses 2020

Secara spasial, sebaran RTLH di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada peta berikut:



Peta 4.4 Profil Infrastruktur Perumahan

4.4.2 Backlog Perumahan

Pada tahun 2020, total *backlog* perumahan di Jawa Timur sebanyak 1.348.158 unit. *Backlog* tertinggi ada di Kota Surabaya sebanyak 381.598 unit, Kab. Sidoarjo sebanyak 113.188 unit, dan Kota Malang sebanyak 84.840 unit. Jumlah *backlog* terendah ada di Kab. Pacitan dengan 4.734 unit, Kab. Bangkalan sebanyak 4.768 unit, dan Kab. Trenggalek sebanyak 5.616 unit. Untuk mengatasi *backlog*, selain rumah tapak, juga dibangun rusunawa, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2020, jumlah rusunawa di Jawa Timur ada sebanyak 86 unit.

Jumlah *backlog* perumahan pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Backlog Perumahan di Jawa Timur

Kabupaten/ Kota	Kepemilikan rumah (unit)	Backlog (unit)	Kabupaten/ Kota	Kepemilikan rumah (unit)	Backlog (unit)
Pacitan	151.001	4.734	Magetan	165.430	10.260
Ponorogo	226.575	19.355	Ngawi	231.233	20.025
Trenggalek	193.516	5.616	Bojonegoro	331.563	12.275
Tulungagung	275.285	16.207	Tuban	301.820	15.118
Blitar	313.278	19.254	Lamongan	285.503	19.196
Kediri	373.740	49.091	Gresik	286.556	43.122
Malang	631.814	73.414	Bangkalan	226.680	4.768
Lumajang	276.132	13.436	Sampang	225.071	14.137
Jember	626.840	71.045	Pamekasan	210.388	15.229
Banyuwangi	431.323	50.872	Sumenep	312.706	14.461
Bondowoso	243.367	10.776	Kota Kediri	53.407	21.205
Situbondo	202.883	14.896	Kota Blitar	28.775	8.884
Probolinggo	299.661	28.447	Kota Malang	147.917	84.840
Pasuruan	408.380	32.445	Kota Probolinggo	54.366	5.807
Sidoarjo	476.949	113.188	Kota Pasuruan	38.865	11.052
Mojokerto	271.105	24.732	Kota Mojokerto	24.699	9.085
Jombang	300.039	34.639	Kota Madiun	31.515	18.130
Nganjuk	261.076	31.152	Kota Surabaya	408.132	381.598
Madiun	182.971	18.672	Kota Batu	46.977	6.995
Kepemilikan Rumah Jawa Timur: 9.557.538 unit					
Backlog Jawa Timur: 1.348.158 unit					

Sumber: Ditjen Perumahan PUPR, 2020

Secara spasial, jumlah *backlog* perumahan dan sebaran rusunawa di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada peta berikut.

4.5 Profil Infrastruktur Non PUPR

4.5.1 Infrastruktur Perhubungan

Terminal tipe A dan B di Provinsi Jawa Timur tersebar di Kabupaten dan Kota PKN, PKW dan PKL.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan Pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priok dan menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pengumpul dan distributor barang dari dan ke Kawasan Timur Indonesia. Terdapat rencana peningkatan hirarki Pel. Tanjung Pakis Lamongan menjadi pelabuhan utama dari pelabuhan pengumpul.

Terdapat 6 Bandar udara di Provinsi Jawa Timur, 1 bandar udara primer yaitu Juanda yang merupakan bandara tersibuk kedua setelah Soekarno-Hatta berdasarkan pergerakan pesawat dan penumpang. Di Jawa Timur terdapat rencana bandar udara pengumpan yaitu di Kediri dan di Pulau Kangean Sumenep.

Terdapat 131 Stasiun KA di Jawa Timur. Saat ini sedang dibangun Jalur KA Jakarta-Surabaya yang dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi 5,5 jam dengan kecepatan maksimum 160 km/jam.

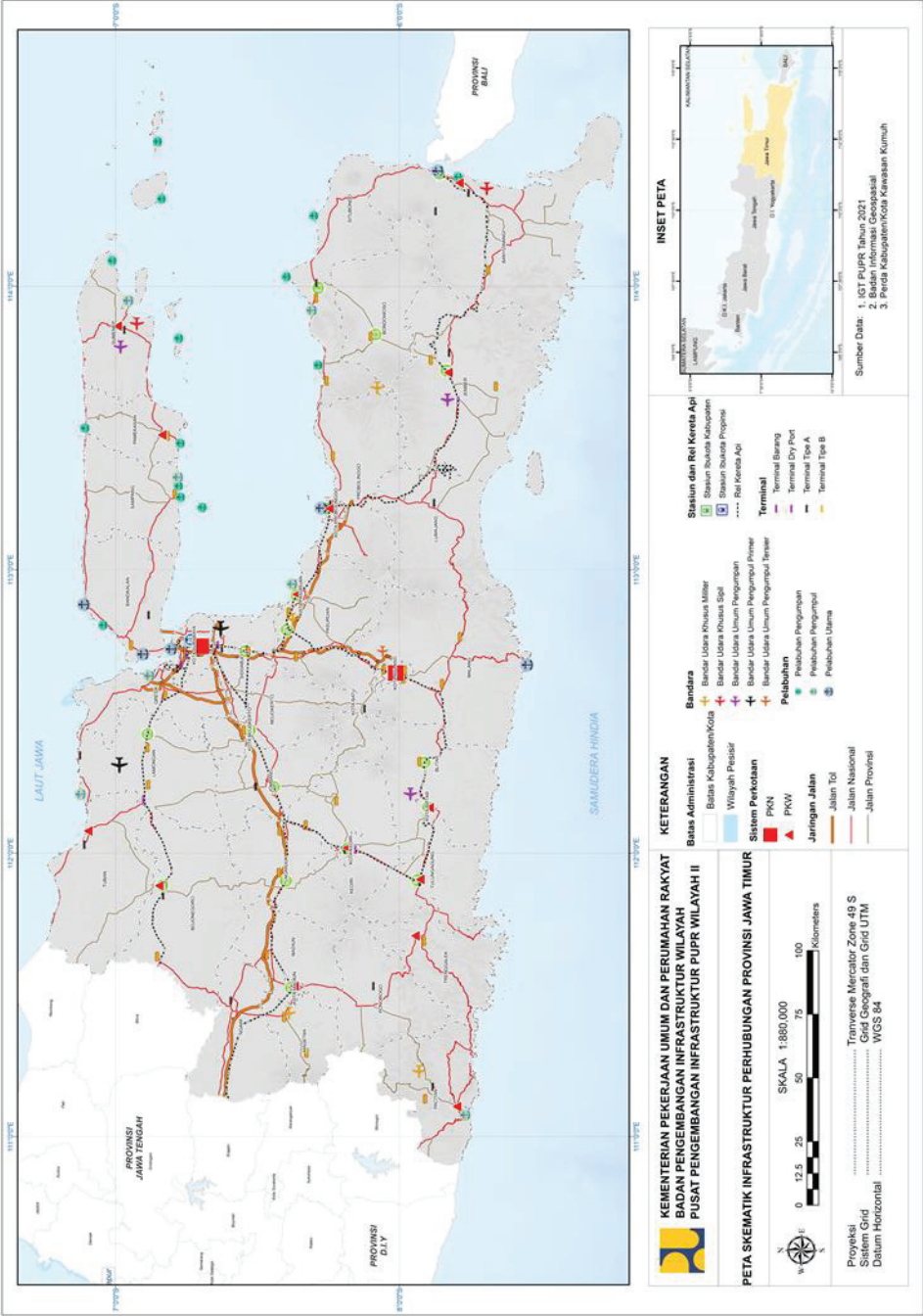
4.5.2 Infrastruktur Jaringan Energi

Pembangkit listrik di Jawa Timur yang berada di grid 500 kV adalah PLTU Paiton, PLTGU Gresik dan PLTGU Grati, sedang yang terhubung ke grid 150 kV adalah PLTGU/PLTU Gresik, PLTU Perak, PLTG Grati, PLTU Pacitan, PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTA tersebar (Sutami, Tulung Agung, dll). Pasokan dari grid 500 kV adalah melalui 6 GITET, yaitu Krian, Gresik, Grati, Kediri, Paiton dan Ngimbang, dengan kapasitas 8.000 MVA. Volume pasokan akan semakin menurun dan diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan gas untuk pembangkit di Jawa Timur pada tahun 2019.

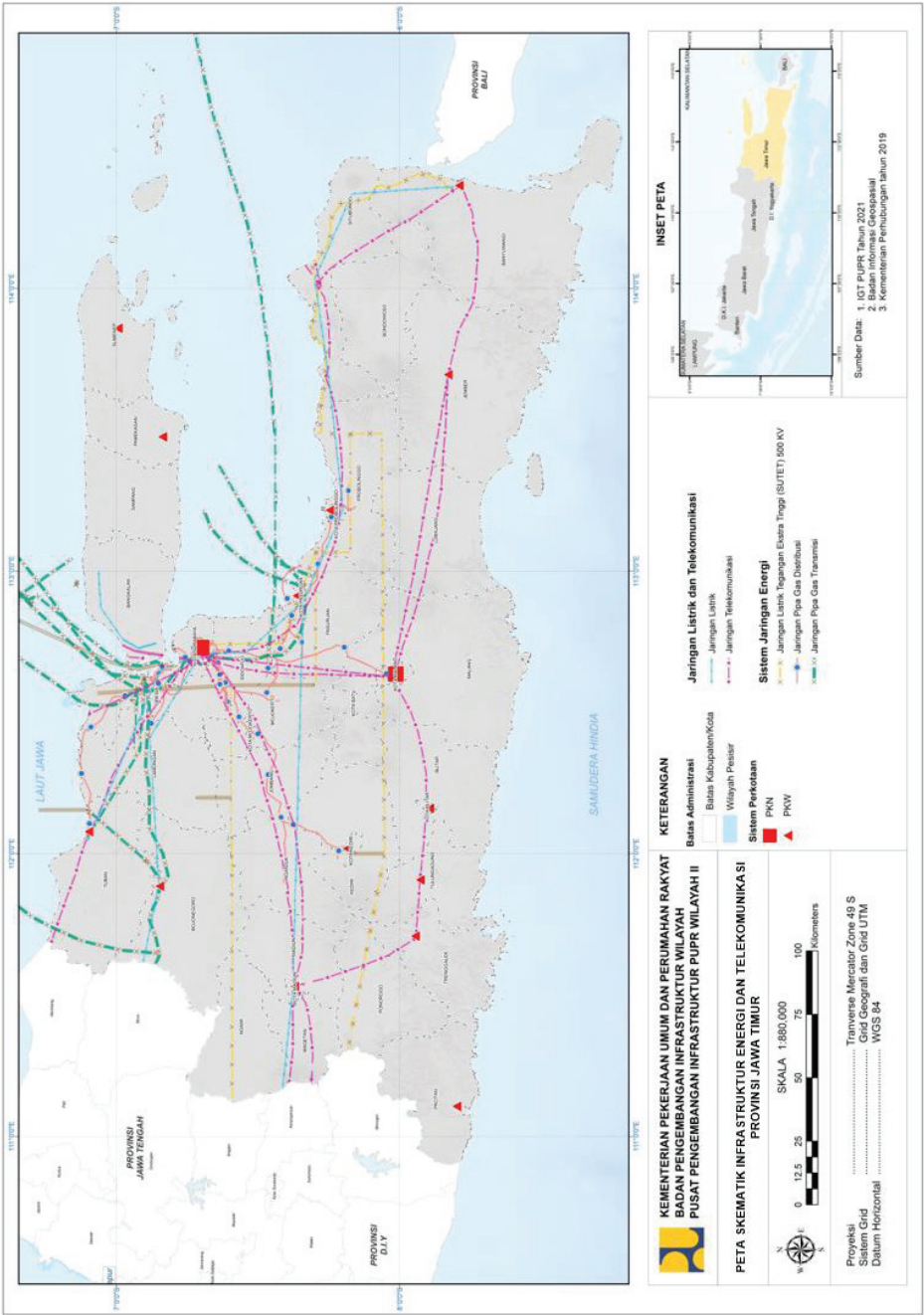
Namun potensi gas di Jawa Timur melimpah serta adanya potensi gas dari Lapangan Cepu. Pertamina berencana untuk membangun pipa gas Trans-Jawa, yaitu gas akan dialirkan melalui pipa yang rencananya akan dibangun dengan menghubungkan Grati, Gresik, Tambak Lorok hingga Cirebon. Untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan tahun 2025, diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 6.114 MW.

4.5.3 Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi

Untuk menunjang sarana komunikasi, tercatat terdapat 596 kantor pos dan kantor pos pembantu di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah kantor pos terbanyak, yaitu sebanyak 50 kantor pos. Untuk komunikasi digital, pada tahun 2021 masih terdapat 17 desa yang tidak ada sinyal telepon dan 111 desa masih dengan sinyal internet Edge atau GPRS.



Peta 4.5 Profil Infrastruktur Perhubungan



Peta 4.6 Profil Infrastruktur Energi dan Jaringan Telekomunikasi



TPA-IPAL Klotok Kota Kediri

BAB 5

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyusun suatu perencanaan apalagi rencana pengembangan, pastinya tidak terlepas dari *root cause* (akar masalah) yang harus diketahui sebelumnya, kemudian dilakukan *mapping* atau pemetaan hingga analisis yang tepat, sehingga menghasilkan rencana aksi (*action plan*) yang sesuai untuk mencapai *goal*/ atau tujuan yang diharapkan.

Permasalahan dan isu strategis selalu muncul dalam dinamika suatu negara, apalagi dengan Indonesia sebagai negara berkembang, yang tentunya juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan adalah hal yang menjadi masalah atau persoalan; dan isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Bab ini menjelaskan tentang pemetaan perumusan permasalahan dan isu strategis, yang dirumuskan berdasarkan konteks perencanaan dari lokus makro (tinjauan nasional), meso (tinjauan regional wilayah Jawa-Bali), dan mikro (tinjauan wilayah Provinsi Jawa Timur) dengan pertimbangannya. Juga ditinjau dari baseline berupa kondisi *existing* dan fokus kebijakan, dari kawasan prioritas yang ada, serta skenario berupa opsi masa depan dan masalah utama, yang menjadi rumusan isu strategis.

Proses pemetaan yang dilakukan berasal dari data-data antara lain hasil kunjungan lapangan, wawancara langsung, dan koordinasi dengan *stakeholder* di wilayah yang menjadi kajian untuk mendapatkan gambaran permasalahan di lapangan. *Stakeholder* yang terlibat mencakup pemerintah daerah di Jawa Timur, yaitu Bappeda, Dinas PUPR, dan dinas terkait lainnya; pengelola kawasan (pemerintah/swasta); akademisi; dan pemangku tokoh masyarakat.



Gambar 5.1 Alur Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

A. Perlunya Peningkatan Infrastruktur Mendukung Sektor Industri Pengolahan untuk Penguatan Daya Saing di Taraf Internasional

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan Ekspor ke Pasar Global. Berdasarkan data BPS 2022, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga penyumbang ekspor nasional setelah Jawa Barat dan Kalimantan Timur di tahun 2022. Industri pengolahan di Jawa Timur juga merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sektor industri terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 23,08% dibawah Jawa Barat (27,66%).

Pada tahun 2022 jumlah perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di Jawa Timur mencapai sekitar 6.168 usaha/perusahaan (BPS Jatim, 2022). Perusahaan manufaktur berskala menengah dan besar di Jawa Timur terbanyak berada di Kabupaten Sidoarjo mencapai di atas seribu perusahaan, diikuti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan. Jawa Timur memiliki 1 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri (WPPI) di Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan dan 6 Kawasan Industri (KI) yang ditetapkan melalui RIPIN, yaitu KI Tuban, KI Gresik, KI Bangkalan, KI Lamongan, KI Jombang, dan KI Banyuwangi. Selain itu juga terdapat 1 KEK Gresik yaitu Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) serta beberapa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang utamanya terkonsentrasi di koridor utara. Total luas kawasan industri yaitu 6.255,25 ha dengan jumlah perusahaan industri besar sejumlah 5.495 unit serta menyerap tenaga kerja sebesar 929.557 jiwa. Dari struktur PDRB Provinsi, industri pengolahan berkontribusi sebesar 30% terhadap PDRB Jawa Timur. Kabupaten/kota dengan PDRB industri tertinggi di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya (15,76%), Kabupaten Sidoarjo (14,97%), dan Kota Kediri (13,88%).

Dukungan infrastruktur diperlukan guna meningkatkan kualitas industri di Jawa Timur. Wilayah Metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) selain berfungsi sebagai pusat pelayanan perkotaan juga menyandang fungsi ganda sebagai lokasi pengembangan sebagian besar KI dan KPI di Jawa Timur. Pada WM Gerbangkertosusila terdapat Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak yang juga menjadi pusat perdagangan menuju Indonesia bagian timur. Saat ini terdapat permasalahan tingginya beban jalan di WM Gerbangkertosusila akibat aktivitas perkotaan yang bercampur dengan aktivitas industri. Untuk memfasilitasi KI dan KPI yang tersebar di koridor-koridor pertumbuhan di Jawa Timur, dibutuhkan pembangunan sistem jaringan transportasi baik berbasis jalan maupun rel menuju pelabuhan, bandara, dan pusat-pusat kegiatan lain. Hal ini dijawab dengan pembangunan berbagai ruas jalan tol di Jawa Timur yang diamanatkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Selanjutnya, koridor tengah—selatan (Kediri, Madiun, Banyuwangi, dan sekitarnya) diharapkan mampu berkembang sebagai alternatif kawasan industri baru agar pembangunan tidak terkonsentrasi di utara.

Di sisi lain, RTR Jawa-Bali mengamankan Pulau Jawa sebagai pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Salah satu pengaruh negatif yang ditimbulkan dari tingginya aktivitas industri yaitu tingginya pencemaran lingkungan. Laporan dari *Ecoton* menyebutkan udara di 5

kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang mengandung mikroplastik penyebab kanker. Adapun indeks rata-rata kualitas udara di Kota Surabaya tahun 2022 adalah 93, masih masuk dalam rentang sedang. Maka sangat penting untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan di Jawa Timur untuk keberlanjutan lingkungan. Ribuan perusahaan di Jawa Timur terutama di kawasan industri, tentunya menimbulkan kendala di sisi lain. Kebutuhan suplai air yang besar mengakibatkan pengambilan air tanah yang tidak terkontrol, pembuangan limbah secara sembarangan, serta terbentuknya kawasan permukiman kumuh sebagai tempat tinggal para pekerja industri, tentunya harus menjadi perhatian penuh baik dari para pelaku usaha dan pemerintah.

Isu strategis diperoleh dari kesenjangan antara opsi masa depan (target) yang ingin diperoleh dengan kondisi *existing* (kondisi yang ada/berkembang/mendapat perhatian saat ini) sebagai *baseline* (titik acuan tetap yang digunakan untuk tujuan perbandingan). Isu strategis pada sektor ini adalah **perlunya peningkatan infrastruktur mendukung sektor industri pengolahan untuk penguatan daya saing di taraf internasional**. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan penganekaragaman subsektor industri. Saat ini 5 subsektor industri pengolahan teratas di Jawa Timur yaitu makanan dan minuman, tembakau, kimia dan farmasi, kertas dan barang dari kertas, kayu dan barang dari kayu. Diharapkan di masa mendatang produk olahan dari sektor pertanian dan perkebunan dapat menjadi bahan baku unggulan sektor industri. Selain itu, pemerintah juga harus mampu mengoptimalkan keberadaan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik minat investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi infrastruktur dasar mendukung kawasan industri, seperti air, energi, dan konektivitas.

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Industri Pengolahan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Skala Nasional.	Kinerja sektor industri pengolahan terdapat ekspor nasional didukung dengan jaringan transportasi untuk distribusi hulu dan hilir.	Jawa Timur menduduki peringkat kedua penyumbang ekspor nasional. Sektor industri pengolahan di Jawa Timur berkontribusi 22% terhadap industri skala nasional.	Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) menetapkan 1 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri (WPPI) dan 6 Kawasan Industri yang terkonsentrasi di koridor pertumbuhan Jawa Timur.	Kawasan Prioritas GKS. Justifikasi: Berdasarkan konsentrasi kawasan industri <i>existing</i> dan rencana kawasan industri berada di kawasan utara GKS.	Industri pengolahan menjadi salah satu sektor unggulan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan berkontribusi maksimal terhadap ekspor produk pengolahan di skala nasional.	Rendahnya ketersediaan (<i>supply</i>) bahan baku industri <i>petrochemical</i> sebagai subsektor industri pengolahan terbesar tingkat nasional.	perlu nya peningkatan infrastruktur mendukung sektor industri pengolahan untuk penguatan daya saing di taraf internasional
		PKN Gerbangkertosusila berfungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau <i>hub</i> internasional pergerakan barang dan penumpang melalui Bandara Internasional Juanda yang merupakan bandara tersibuk kedua setelah Soekarno-Hatta. Realisasi investasi di Jatim mencapai Rp10,3 triliun pada tahun 2022, meningkat 38,80% dari tahun 2021 (y-o-y), serta lebih tinggi dari pertumbuhan investasi nasional yang tumbuh sebesar 3,4% dalam struktur realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri menyumbang 59,70%.	Terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan jaringan jalan tol ruas Jalan Tol Pandaan—Malang, Gempol—Pasuruan, Solo—Ngawi—Kertosono—Mojokerto mendukung distribusi logistik industri pengolahan.		Produk olahan pertanian dan perkebunan menjadi bahan baku unggulan industri pengolahan.	Pengembangan subsektor industri pengolahan di luar 5 subsektor unggulan (makanan & minuman, tembakau, kimia & farmasi, kertas & barang dari kertas, kayu & barang dari kayu) saat ini belum optimal.	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meso: Jawa— Bali— Nusa Tenggara.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Jawa-Bali.	Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priok dan menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur.	Rencana Tata Ruang Jawa-Bali yang mengamankan Pulau Jawa sebagai pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.	(5)	Koridor Utara Jawa Timur menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa skala internasional dengan koridor tengah—selatan sebagai pendukung pengembangan potensi alternatif.	Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengembangan industri di Koridor Pantai Utara Jawa Timur. Daya dukung lahan bernilai 1.055 (surplus) masih terdapat lahan yang bisa dioptimalkan pengembangannya.	(8)
	Jaringan transportasi & distribusi barang/komoditas (Jawa Timur <i>hub</i> menuju Indonesia bagian timur).						
Mikro: Provinsi Jawa Timur.	Jaringan transportasi, aktivitas ekonomi, komoditas unggulan & fisik kewilayahan (Jawa Timur memiliki komoditas unggulan yang bervariasi dari utara, selatan dan timur, wilayah yang sangat berkorelasi dengan dukungan infrastruktur jaringan jalan/konektivitas).	Industri pengolahan berkontribusi sebesar 30% terhadap PDRB Jawa Timur.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan industri berteknologi tinggi <i>Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)</i> , <i>Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB)</i> ; kawasan ekonomi unggulan yaitu <i>Lamongan Integrated Shorebase (LIS)</i> ; Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya, Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya, Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya, dan Industri Perhiasan Gemopolis, serta Kawasan Industri Gempol di Kabupaten Pasuruan.	(5)	Berbagai KEK, KI, dan WPPI di Jawa Timur berfungsi optimal dan berkontribusi sebesar 35% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur dan diharapkan mampu menarik minat investasi.	Permasalahan infrastruktur dasar masih membutuhkan penguatan dan pemerataan pada kawasan industri dan kawasan pendukungnya.	
		Luas KI di Jawa Timur sebesar 6.255,25 ha yang meliputi 9 KI <i>existing</i> dan 6 KI rencana. Terdapat 5.945 industri besar dengan serapan tenaga kerja sebanyak 929.557 TK.			Pengembangan industri pengolahan di koridor utara—tengah—selatan diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.	Tingginya beban jalan akibat aktivitas pergerakan logistik industri yang bercampur dengan aktivitas perkotaan.	
		Laporan dari <i>Ecoton</i> menyebutkan udara di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang mengandung mikroplastik penyebab kanker. Adapun indeks rata-rata kualitas udara di Kota Surabaya tahun 2022 adalah 93, masih masuk dalam rentang sedang.			Koridor tengah—selatan Jawa Timur (Kediri, Madiun, dan sekitarnya) diharapkan berkembang sebagai alternatif kawasan industri baru.	Masih terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri.	
					Terwujudnya kawasan industri dan kawasan peruntukkan industri yang ramah lingkungan.	Pencemaran udara dan limbah buangan dari aktivitas kawasan industri menyebabkan kerusakan lingkungan.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Perlunya Dukungan Industri Pengolahan Hasil Pertanian untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk

Provinsi Jawa diarahkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional, PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 303.292,05 M (2022, 24,76% nasional dan tertinggi se-Indonesia). PDRB subsektor tanaman pangan Jawa Timur terhadap nasional adalah Rp 81.338,18 miliar atau 26,82%.

Produksi padi Jawa Timur sebesar 9,52 juta ton (2022; 17,4% terhadap nasional; terbesar di Indonesia) dan produktivitas padi 5,62 ton/ha (2022; terbesar ke-3 nasional; nasional 5,23 ton/ha), dengan jumlah produksi tertinggi di Kabupaten Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Jember, dan Tuban.

Sektor pertanian berkontribusi sebesar 11,10% terhadap PDRB Jawa Timur (peringkat ketiga) dengan produktivitas padi tertinggi berada di Kab. Blitar 7,16 ton/ha (2022). Kabupaten dengan kontribusi produksi padi tertinggi adalah Kabupaten Lamongan (903 ribu ton), Ngawi (755 ribu ton), dan Bojonegoro (704 ribu ton).

Potensi tersebut didukung dengan luas lahan pertanian (lahan baku sawah) sebesar 1,2 juta ha (16,27% luas lahan baku sawah nasional). Luas Lahan sawah yang dilindungi (LSD) Jawa Timur sebesar 1.317.876,14 ha, sedangkan lahan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 1.132.862 ha (tertinggi se-Indonesia) namun masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 ha (51% dari luas LP2B). Dari sisi daya dukung, wilayah dengan kemampuan penyedia pangan sangat tinggi seluas 22% dari total luas Jatim terutama di bagian utara dan tengah. Sehingga, wilayah ini harus dipertahankan karena merupakan wilayah yang subur untuk tanaman pangan dan berpeluang *surplus* beras yang dapat diekspor ke wilayah lain. Terutama di Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Lamongan. Komoditas unggulan pertanian Jawa Timur lainnya selain padi adalah jagung (5,52 ton/ha, terbesar nasional) dan kedelai (1,64 ton/ha, terbesar nasional).

Di sisi lain, Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menginstruksikan pembangunan 18 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur, 7 PSN berkaitan dengan penyediaan air baku dan irigasi sedangkan 5 PSN terkait konektivitas (2022). Hal ini perlu didukung pula dengan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, konektivitas *outlet* produksi-pengolahan-pemasaran, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian dengan perlindungan terhadap kebencanaan dan SDA (Sumber Daya Air).

Perlu diperhatikan adanya potensi bencana banjir yang sebagian besar karena luapan sungai Bengawan Solo di Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro. Kawasan rawan kekeringan berada di Kabupaten Bojonegoro (62.178,39 ha), Lamongan (40.254,20 ha), Madura dan Kepulauan (23.116,74 ha). Serta adanya konversi lahan pertanian sebesar 126.273,70 ha (6,9% selama 2018—2019). Padahal di beberapa wilayah, sebagian petani mengusahakan panen padi lima kali dalam 2 tahun (IP 250) dan di lokasi tertentu bahkan tiga kali panen per tahun (IP 300). Harapan ke depan indeks tanam padi menjadi IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun dan produktivitas tanaman padi dapat meningkat (rata-rata nasional >5,11 ton/ha).

Alih fungsi lahan menjadi salah satu ancaman terhadap keberlanjutan pertanian di Jawa Timur. Alih fungsi lahan pertanian mencapai 126.274 ha per tahun (6,9%), jika tidak segera ditangani maka luas pertanian akan terus berkurang, mengingat pembangunan perkotaan di Jawa Timur banyak terjadi secara *sprawling* (luas). Di beberapa wilayah sempadan sungai, pertanian Jawa Timur terdampak banjir. Sebagaimana di Tuban, Lamongan, Gresik, banjir menggenangi kawasan pertanian yang mengakibatkan wilayah tersebut hanya dapat melakukan satu kali panen per tahun. Sementara di wilayah utara bagian timur seperti Bojonegoro dan Madura Kepulauan, daerah pertanian terdampak kekeringan yang disebabkan oleh kondisi tanah *karst* yang tidak mampu menyimpan air. Selain itu wilayah rawan bencana juga berdampak terhadap hasil pertanian, seperti yang terjadi di Lumajang saat Gunung Semeru meletus pada akhir 2022 sampai awal 2023.

Isu strategis diperoleh dari kesenjangan kondisi *existing* dan opsi masa depan sektor pertanian. Isu strategis pada sektor ini adalah **perlunya dukungan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk**. Salah satu prioritas utama Jawa Timur adalah mendorong sektor pertanian menuju agroindustri dan agribisnis sebagai sektor unggulan dengan harapan mampu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian. Di sisi *soft infrastructure*, sektor pertanian perlu dilengkapi dengan varietas unggul dan teknologi pertanian, insentif bagi pelaku usaha tani, dan dukungan kelembagaan.

KONTEKS PERENCANAAN			BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/PERTIM BANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN	MASALAH UTAMA/GAP		OPSI MASA DEPAN		
Makro: Nasional.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Produktivitas pertanian terhadap nasional dan jalur logistik komoditas pertanian (<i>Trans Jawa dan Pansela</i>).	Luas lahan baku sawah 16,46% (tertinggi nasional; 2022) yang ditetapkan pemerintah pusat. Kontribusi PDRB subsektor pertanian tanaman pangan menyumbang 24,76% (2022) terhadap sektor pertanian tanaman pangan nasional (tertinggi se-Indonesia).	Dalam RTRWN, Jawa Timur diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri skala nasional.	1. Madura dan Kepulauan. 2. Selangkar Ijen. 3. Bromo—Tengger—Semeru. 4. Selangkar Wilis. 5. Gerbangkertos uslo. Justifikasi: Berdasarkan persebaran lahan pertanian dan kawasan yang memiliki produktivitas pertanian tertinggi. <i>Scoring</i> dilakukan untuk menentukan kawasan inti prioritas penanganan.	Sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha), serta dapat memitigasi dampak bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pertanian yang memitigasi bencana agar tidak mempengaruhi produktivitas pertanian.	perlu dukungan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk	
Meso: Jawa—Bali—Nusa Tenggara.	Produktivitas pertanian terhadap P. Jawa, Simpul transportasi (pelabuhan Tanjung Perak).	Lahan LP2B di Jatim yang sudah beririgasi teknis sebesar 49%, sedangkan lahan sawah yang beririgasi teknis di Jateng (WM Kedungsepur 66,61%; KSPN Dieng 80%) dan Bali (<i>Subak Landscape</i> telah beririgasi teknis dengan pola rotasi pemberian air). Sistem pengairan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi di tahun 2020, Jateng 5,5 ton/ha; Jatim 5,6 ton/ha; Bali 6,1 ton/ha.	Sesuai arah pengembangan wilayah (RTR Pulau Jawa-Bali), Pulau Jawa diarahkan untuk pengembangan Jawa Timur lumbung pangan.	Masih perlunya peningkatan produktivitas lahan sawah yang beririgasi teknis. Masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 ha (51% dari luas LP2B).	Masih adanya konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan industri, permukiman, dll.	Perlunya peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan investasi yang sebanding guna menambah industri pengolahannya.		
Mikro: Provinsi Jawa Timur.	Karakteristik fisik kewilayahan (cocok sebagai kawasan pertanian dengan dukungan infrastruktur dan regulasi).	Instruksi pembangunan 18 PSN di Jawa Timur, 7 PSN berkaitan dengan penyediaan air baku dan irigasi sedangkan 5 PSN terkait konektivitas (2022). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi 11,10% (2022) terhadap PDRB provinsi.	Kawasan pertanian yang tersebar di Jawa Timur (tercantum dalam Kepmen ATR tentang lahan baku sawah & lahan sawah yang dilindungi, diharapkan terdapat peningkatan produktivitas panen.		Sektor pertanian dapat menjadi salah satu tumpuan perekonomian setelah industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan mengarah pada agroindustri dan agribisnis dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.			

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/PERTIM BANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Produksi padi terbesar di Jawa Timur berada di Kabupaten Lamongan, Ngawi, dan Jember (2020).			Infrastruktur strategis terbangun dan berjalan optimal, utamanya untuk mendorong pengembangan koridor pantai selatan Jawa Timur dengan potensi sektor pertanian, dalam hal ini transportasi (pelabuhan dan jalan untuk keluar/masuk komoditas pertanian) dan SDA (100% lahan sawah yang dilindungi teririgasi teknis).	Produktivitas pertanian menurun karena terdampak bencana (kekeringan, banjir, dll).	
		Produktivitas tanaman padi Jatim sebesar 5,6 ton/ha (di atas rata-rata nasional sebesar 5,2 ton/ha; 2022). Sebagian petani mengusahakan panen padi lima kali dalam 2 tahun (IP 250) dan di lokasi tertentu bahkan tiga kali panen per tahun (IP 300).				Berdasarkan kondisi neraca air, tingkat kekritisan Provinsi Jawa Timur terdiri dari kategori kritis air berat (24%), kritis sedang (72%), dan kritis ringan (3%). Indeks penggunaan air rata-rata adalah 50—100%.	
		Adanya bencana banjir yang menggenangi sejumlah daerah yang turut menggenangi lahan pertanian, beberapa kawasan pertanian tanaman padi mengalami gagal panen. Terdapat pula potensi kekeringan melanda kawasan pertanian.				Wilayah kekeringan resiko tinggi diantaranya terdapat di wilayah utara Jawa Timur yang meliputi Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik; wilayah Selingkar Ijen yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember; wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Selingkar Wilis. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kawasan pertanian yang luas.	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Dibutuhkannya Peningkatan Tata Kelola Pariwisata Alam untuk Keberlanjutan Lingkungan

Pariwisata Alam memiliki potensi untuk diangkat sebagai sektor unggulan di Jawa Timur. Peran strategis pariwisata dalam perekonomian diprediksi akan semakin meningkat pada masa mendatang. Pariwisata diarahkan menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi di mana pariwisata diharapkan mendorong pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan GDP *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu konsep pendapatan nasional, meningkatkan intensitas perdagangan internasional, dan menaikkan investasi global.

Pariwisata Jawa Timur memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melihat *share* PDRB dengan pendekatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (data BPS, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan konstan 2010) harga berlaku di tahun 2021 sebesar 136.438,58 miliar rupiah (5,56%) yang meningkat pada 2022 menjadi 154.142,37 miliar rupiah (5,64%). Walaupun secara PDRB Jatim sektor ini belum masuk dalam *top three* sektor yang berkontribusi terbesar namun ke depan diharapkan pariwisata menjadi sektor strategis yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, pertumbuhan PDRB, dan daya saing negara dalam pasar global.

Hal ini didukung oleh kebijakan nasional dan internasional, Jawa Timur memiliki 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 3 Daerah Pariwisata Nasional (DPN), 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), dan 2 KEK (KEK Gresik dan Singhasari). Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang diakui internasional yaitu *global geopark* di Gunung Sewu Pacitan, *biosphere reserves* di Blambangan dan Bromo Tengger Semeru yang memiliki ekosistem unik berupa kaldera di dalam kaldera, serta *blue fire* di Gunung Ijen (diusulkan menjadi *global geopark* karena hanya dapat ditemui di 2 lokasi di dunia). Terdapat pula festival pariwisata internasional yang memberikan nilai tambah, seperti Festival Jazz Gunung Bromo, Festival Yadya Kasada Bromo, *International Tour De Ijen*, *Jember Fashion Carnaval*, dan Gandrung Sewu Banyuwangi.

Destinasi wisata strategis tersebut mampu menarik para wisatawan, setelah pandemi Covid dua tahun ini meningkat lagi. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2022, dengan wisnus (Wisatawan Nusantara) sebesar 198.913.339 orang dan wisman (Wisatawan Mancanegara) sebanyak 67.793 orang, dengan total 198.981.132 orang wisatawan.

Dari sisi infrastruktur, Jawa Timur didukung dengan 5 Proyek Strategi Nasional (Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022) guna mendukung konektivitas kawasan unggulan pariwisata Jatim. Alur masuk wisatawan didukung melalui gerbang pariwisata yang terintegrasi di Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Banyuwangi, Bandara Abdurahman Saleh, dan Pelabuhan Ketapang. Dengan melihat kedekatannya dengan Provinsi Bali, tentunya memiliki peluang menangkap pasar wisatawan domestik dan internasional dari Bali.

Tidak hanya dukungan infrastruktur, sesuai data Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, investasi PMA dan PMDN di Taman Nasional Bromo—Tengger—Semeru (TNBTS) senilai Rp3 triliun (2018) lebih besar

dibandingkan total investasi di Danau Toba Rp1,7 triliun (2018). Kawasan TNBTS merupakan kawasan yang paling siap dibanding ‘Sembilan Kawasan Bali Baru’ lainnya. Dengan *effort* pembangunan infrastruktur dan pendanaan tersebut, diharapkan pariwisata Jawa Timur dapat memberikan *trickle down effect* yang pada akhirnya tercipta distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata.

Untuk menarik wisatawan, selain mengembangkan destinasi wisata juga perlu memperhatikan pengelolaan situs dengan pengembangan nilai tambah dan *branding* kawasan khususnya untuk pariwisata berbasis alam (cagar biosfer). Beberapa kawasan wisata gunung berapi aktif merupakan kawasan strategis yang rawan bencana sehingga perlu diwaspadai dan memperhatikan mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana), antara lain KSPN Bromo—Tengger—Semeru dan KSPN Ijen—Baluran. Selain itu Jawa Timur juga dilewati beberapa patahan yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Pasuruan, Sesar Probolinggo, dan Sesar Wonorejo.

Kesenjangan antara opsi masa depan (target) yang ingin diperoleh dengan kondisi *existing* (*baseline*) menghasilkan isu strategis pada sektor pariwisata yaitu **dibutuhkannya peningkatan tata kelola pariwisata alam untuk berkelanjutan lingkungan**. Kontribusi ekonomi di sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur sejauh ini dinilai belum optimal. Tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di Jawa Timur ialah dalam penyediaan layanan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di kawasan pariwisata, konektivitas dengan *hub* transportasi, dan pengembangan ekosistem pariwisata dengan perlindungan fisik lingkungan dan penanganan kebencanaan. Oleh karena itu, mengoptimalkan potensi pariwisata perlu memperhatikan batas kunjungan wisatawan, daya dukung dan daya tampung yang tersedia.

Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBAN GAN	KONDISI EX/ISTING	FOKUS KEBIYAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
Makro: Nasional	Arah kebijakan.	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terdapat 2 DPP, 4 KSPN, 10 KPPN, 1 KEK (Ekraf dan Pariwisata) sesuai dengan arahan pemerintah pusat.	Parwisata Jatim tertuang secara nasional dalam RPJMN, RIPPARNAS, dan peraturan KEK, serta kebijakan UNESCO mengenai potensi keanekaragaman hayati dan budaya dunia.	1. Madura dan Kepulauan. 2. Selingkar Ijen. 3. Bromo—Tengger—Semeru. 4. Selingkar Wilis Gerbangkerto su-silo. Justifikasi: Berdasarkan persebaran kawasan prioritas unggulan. <i>Scoring</i> dilakukan untuk menentukan kawasan inti prioritas penangananan.	DTW Unggulan Jatim berorientasi masa depan dengan dukungan stakeholder, pendanaan berkelanjutan, dan teknologi.	Upaya yang dilakukan terhadap kawasan pariwisata bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur perlu dimanfaatkan dengan baik mengingat terdapat kebijakan nasional, PMA dan PMDN yang dialokasikan untuk kawasan ini, jangan sampai tidak memberikan manfaat yang signifikan.	Dibutuhkannya Peningkatan Tata kelola Pariwisata Alam untuk Berkelanjutan Lingkungan
Meso: Jawa—Bali—Nusa Tenggara.	Potensi pariwisata, konektivitas (Trans Jawa, Pantura, Bandara dan Pelabuhan Utama).	Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan paling siap dibanding 'Sembilan Kawasan Bali Baru' lainnya. Investasi PMA dan PMDN di TNBTS Rp3 triliun (2018) lebih besar dibandingkan total investasi di Danau Toba Rp1,7 triliun (2018).	DPP Bromo—Tengger—Semeru (KSPN) ditetapkan sebagai 1 dari 10 destinasi prioritas yang termasuk dalam UNESCO yang dikembangkan secara masif. Memiliki sisi strategis secara internasional dan perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kerawanan bencana.			Pada tingkat nasional, pariwisata Jawa Timur perlu memperhatikan pengelolaan situs dengan pengembangan nilai tambah dan branding kawasan khususnya untuk pariwisata berbasis alam (Cagar biosfer).	
		Share PDPR sektor pariwisata Jatim dengan pendekatan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan nasional sebesar 5,6% (2022), dimana Jateng (3,39%) dan Bali (17,92%).	Pulau Jawa diarahkan sebagai pusat pariwisata berdaya saing internasional dan Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana berdasarkan RTR Pulau Jawa-Bali.		Infrastruktur dasar dan strategis terbangun dan berjalan optimal seperti penambahan dermaga khusus pesiar, peningkatan bandara, pelebaran jalan nasional pembangunan jalan tol, pembangunan kereta gantung	Terdapat jalan daerah akses utama KSPN Bromo—Tengger—Semeru (BTS) yang memiliki kondisi jalan kurang mantap, seperti ruas Kec. Lumajang—Ranupani, Exit Tol Pasuruan—Tosari, dan Ruas Tosari—Kec. Tumpang, Beberapa ruas jalan prioritas kawasan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBAN GAN	KONDISI EX/ISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Adanya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan 5 PSN (2022) guna mendukung konektivitas kawasan unggulan pariwisata Jatim dengan wilayah sekitarnya.			untuk mendukung kawasan pariwisata.	Selingkar Jlen VCR >1 dan Selingkar Willis VCR >0.8. Pada umumnya jalan nasional di kawasan prioritas memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam). Jalan ini menghubungkan Jatim dengan konstelasi di sekitarnya.	
		Jumlah kunjungan wisnus sebesar 198.913.339 jiwa (terbesar dibandingkan Bali dan Jateng) dan wisman mencapai 14.264 jiwa (2022).					
Mikro: Provinsi Jawa Timur.	Fisik kewilayahan (karakter wilayah cocok sebagai kawasan pariwisata dengan dukungan infrastruktur dan regulasi).	Share PDRB sektor pariwisata pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 5,56% (2022) terhadap perekonomian Jawa Timur setelah satu sektor industri pengolahan dan sektor pertanian).	Pengembangan destinasi pariwisata prioritas Jawa Timur yang memanfaatkan potensi kekayaan alam, kearifan lokal, dan teknologi.		Pengembangan kawasan pariwisata Jatim, khususnya DPP Bromo—Tengger—Semeru dan DPP Baru Banyuwangi diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian Jawa Timur, salah satunya tergambar dalam struktur PDRB provinsi.	Jalan Lintas Selatan (Pansela) merupakan <i>backbone</i> pergerakan di sepanjang selatan Jawa Timur yang perlu dijamin kemandapan dan tingkat pelayanannya karena menghubungkan Daerah Tujuan Wisata di sepanjang pantai selatan.	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBAN GAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIUKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA/GAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memiliki beberapa destinasi wisata yang diakui internasional: <i>global geopark</i> di Gunung Sewu Pacitan, <i>biosphere reserves</i> di Blambangan, dan Bromo—Tengger—Semeru yang memiliki ekosistem unik berupa kaldera di dalam kaldera, serta <i>blue fire</i> lien diusulkan menjadi Global <i>Geopark</i> karena hanya dapat ditemui di 2 lokasi di dunia.				Kemantapan jalan dan akses sanitasi perlu ditingkatkan di kawasan pariwisata nasional. Terdapat permukiman kumuh di kawasan yang terdapat pariwisata nasional, contohnya kawasan kumuh di Lumajang (1.338,48 ha), Jember (1.289,13 ha), dan Banyuwangi (890,68 ha).	
		Daya Tarik Wisata terhadap wisatawan mancanegara paling banyak adalah menuju Kawah Ijen (33%); Bromo (11,89%); House of Sampoerna (11,80%); Kampung Buring (5,70%); Wisata agro stroberi (5,64%)			Peningkatan wisatawan mancanegara ke lokasi-lokasi pariwisata yang mana saat ini masih didominasi wisman dengan memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.	Perlunya pengembangan pariwisata tematik yang terintegrasi berbasis alam dan budaya dan peningkatan kualitas fasilitas wisata di Wilayah Tengah (Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, dan Kab. Pasuruan).	
		Memiliki peluang menangkap pasar wisatawan domestik dan internasional dari Bali serta berpeluang untuk menjadi destinasi tujuan utama wisatawan.				Lokasi-lokasi pariwisata perlu diperhatikan pembangunan terbatas/bersyarat.	
		Potensi ekonomi kreatif Jawa Timur yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.					

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Pesatnya Perkembangan Perkotaan Menimbulkan Tekanan terhadap Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Keberlanjutan Lingkungan

Tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur menimbulkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan Keberlanjutan Lingkungan di Kawasan Perkotaan. Terdapat 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Timur yaitu PKN Gerbangkertosusila dan PKN Malang. Kedua PKN tersebut terhubung dengan sistem jaringan transportasi berbasis jalan (tol dan non tol) dan rel di mana ruas tol Pandaan—Malang masuk ke dalam salah satu PSN. Baik PKN Gerbangkertosusila maupun PKN Malang memiliki fungsi sebagai pintu gerbang internasional serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional. Selain itu, terdapat pula 14 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi 4 PKW di koridor utara (Tuban, Bojonegoro, Pamekasan, dan Sumenep), 4 PKW di koridor tengah (Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo), dan 6 PKW di selatan (Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Jember, Banyuwangi). Koridor utara—tengah—selatan terhubung dengan jaringan jalan tol dan non tol serta terhubung pula dengan Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Megapolitan Gerbangkertosusila merupakan kawasan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Adapun Kawasan Gerbangkertosusila Plus (GKS Plus) merupakan amanat dari Perpres 80 Tahun 2019 yang menambahkan Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Jombang sebagai wilayah pendukung Gerbangkertosusila. Tahun 2022 wilayah GKS Plus memiliki jumlah penduduk sebesar 33,79% dari penduduk Jawa Timur dan luas sebesar 22,68% dari luas wilayah provinsi. Kontribusi PDRB sektor industri GKS Plus sebesar 52,6% terhadap industri pengolahan Jawa Timur dan 11,5% terhadap industri pengolahan nasional. Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan merupakan 3 teratas Kabupaten/Kota dengan kontribusi PDRB terbesar di Jawa Timur.

Seiring perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur di tahun 2022 berdasarkan BPS mencapai 41.149.974 jiwa, dengan 20.525.756 laki-laki dan 20.624.218 perempuan. Tingginya jumlah penduduk dan keterhubungan antar kawasan mendorong terbentuknya *mega urban* (*dua kota yang terhubung oleh jalur transportasi yang efektif sehingga menyebabkan wilayah di koridornya berkembang pesat dan cenderung menyatukan secara fisik dua kota utamanya*) dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jika tidak diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, hal tersebut akan membebani daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dampak lain dari *mega urban* adalah fenomena *urban sprawl* (perembetan kenampakan fisik kota yang terjadi secara menyebar, tidak terencana, tidak teratur, acak [*leapfrog*] yang terjadi di wilayah pinggiran atau di wilayah sekitar kota [*urban periphery*] yang ditandai dengan beralihnya fungsi ruang hijau menjadi pemukiman pada bagian *hinterland* (wilayah pedesaan atau perkotaan, atau keduanya, yang terkait erat secara ekonomi dengan kota terdekat). *Urban sprawl* juga menyebabkan tidak efisiennya pembangunan infrastruktur dalam mendukung kawasan perkotaan.

Tingginya aktivitas ekonomi serta pertumbuhan penduduk di Kawasan perkotaan mendorong munculnya kebutuhan akan infrastruktur yang lebih memadai. Kajian Origin Destination (OD) tahun 2022 menyebutkan

jaringan jalan regional yang intensitas lalu lintasnya tertinggi setelah Jabodetabek di Indonesia yaitu Semarang—Surabaya, Yogyakarta—Malang, Malang—Surabaya, dan Surabaya—Banyuwangi. Saat ini perekonomian Jawa Timur cenderung lebih berkembang di sisi utara dengan aktivitas ekonomi utama industri dibandingkan tengah dan selatan yang memiliki sektor ekonomi unggulan pertanian dan pariwisata. Hal ini menimbulkan implikasi positif berupa pembangunan infrastruktur yang lebih masif di utara untuk menunjang pembangunan, namun di sisi lain terdapat ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan permukiman. Untuk itu dibutuhkan peningkatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan di utara dengan tengah dan selatan untuk mendorong pemerataan.

Terkait infrastruktur dasar, saat ini persentase pelayanan akses perpipaan di Jawa Timur masih rendah yakni dengan rata-rata sebesar 21,13%. Tingkat akses sanitasi layak sebesar 76,17% yang difasilitasi 11 infrastruktur IPLT, dan tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Jawa Timur telah mencapai 54,83%. Adapun tingkat pelayanan TPA masih rendah yaitu sebesar 17,35% serta 63% TPA yang ada sudah *over capacity* (24 TPA dari 38). Sementara itu pelayanan infrastruktur dasar permukiman di kawasan perkotaan juga belum merata dan memadai, akibat adanya keterbatasan kemampuan pembangunan infrastruktur berbanding dengan jumlah penduduk dan kepadatannya yang kian meningkat.

Dari sisi kebencanaan, perkotaan di Jawa Timur memiliki kerentanan terhadap bencana banjir, kekeringan, gunung berapi, gempa bumi, dan penurunan muka tanah. Kawasan rentan banjir utamanya diakibatkan luapan Sungai Bengawan Solo dan Kali Kemuning, yaitu di Tuban, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Sampang, dan Sidoarjo. Bagian utara Jawa Timur merupakan kawasan rawan *land subsidence* dengan laju penurunan 2 cm/tahun, antara lain di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo. Adapun kawasan rawan kekeringan berada di Bojonegoro, Lamongan, dan Madura kepulauan.

Isu strategis diperoleh dari kesenjangan antara opsi masa depan (target) dengan kondisi eksisting (*baseline*) yaitu **pesatnya perkembangan perkotaan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan keberlanjutan lingkungan**. Oleh karena itu kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur diarahkan untuk prioritas pada dukungan pelayanan dasar (termasuk air minum, sanitasi, dan perumahan), pembangunan ekonomi, dan perkotaan.

Tabel 5.4 Isu Strategis Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Skala Nasional.	Distribusi ekonomi dan sektor unggulan (GKS sebagai <i>hub</i> ekonomi Jawa Timur dan kawasan Pulau Jawa Bagian Timur).	Wilayah Megapolitan Gerbangkertosusila merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Pertumbuhan penduduk Jawa Timur dalam 10 Tahun terakhir sebesar 0,79% per tahun, angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,25% per tahun.	Wilayah Megapolitan Gerbangkertosusila dan Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam RTRWN sehingga menyanggah fungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional serta pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional.	1. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. 2. Kawasan Prioritas Selingkar Ijen. 3. Kawasan Prioritas Bromo—Tengger—Semeru. 4. Kawasan Prioritas Selingkar Willis. 5. Kawasan Prioritas Madura dan kepulauan. Justifikasi: Berdasarkan kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan prioritas. <i>Scoring</i> dilakukan untuk menentukan kawasan inti prioritas penanganan.	Pertumbuhannya pemerataan pembangunan antara perkotaan di koridor pantai utara dengan kawasan pantai selatan Jawa Timur melalui peningkatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan.	Pertumbuhan ekonomi saat ini masih terkonsentrasi di utara yang menyebabkan penyediaan layanan infrastruktur dasar di koridor tengah dan selatan masih tertinggal.	Pesatnya perkembangan perkotaan menimbulkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan keberlanjutan lingkungan.
	Penguatan fungsi ekonomi perkotaan, dan jasa perdagangan (Potensi kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan wilayah sekitar).	Kajian <i>Origin Destination</i> (OD) tahun 2022 menyebutkan jaringan jalan regional yang intensitas lalu lintasnya tertinggi kedua di Indonesia yaitu Semarang—Surabaya, Yogyakarta—Malang, Malang—Surabaya, dan Surabaya—Banyuwangi. Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan merupakan 3 teratas kabupaten/kota dengan kontribusi PDRTB terbesar di Jawa Timur.	Amanat RTR Pulau Jawa-Bali adalah pemerataan pembangunan antara koridor pantai utara dan pantai selatan Pulau Jawa. Amanat dari Perpres 80 Tahun 2019 yang menambahkan Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Jombang sebagai wilayah pendukung Gerbangkertosusila.		Konektivitas dan infrastruktur pelayanan dasar di Jawa Timur, termasuk akses air minum perpipaan, masih di bawah Provinsi Bali (Jawa Timur: 20%; Bali: 72%).	Konektivitas dan infrastruktur pelayanan dasar di Jawa Timur, termasuk akses air minum perpipaan, masih di bawah Provinsi Bali (Jawa Timur: 20%; Bali: 72%).	
Mikro: Provinsi Jawa Timur.	Standar Pelayanan Minimum	Kabupaten/kota pada koridor Pantai Selatan Jawa Timur memiliki potensi pengembangan	Sesuai RTRW Provinsi Jawa Timur membagi wilayah provinsi ke dalam 8 Wilayah		Pertumbuhannya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Terbatasnya pendanaan Pemerintah Provinsi dan	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EXISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perkotaan dan Fisik Kewilayahan (Jawa Timur memiliki keterbatasan pengembangan berdasarkan daya dukung lahan serta memiliki limitasi kebencanaan yang tinggi).	sektor pertanian dan pariwisata, namun saat ini masih terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan pembangunan di koridor utara.	Perencanaan (WP) berdasarkan potensi dan permasalahan, sistem kegiatan dan struktur pelayanan kewilayahan, serta kesesuaian fungsi dan perannya. Kedelapan WP tersebut, yaitu WP Gerbangkertosusila Plus, WP Madiun dan sekitarnya, WP Kediri dan sekitarnya, WP Blitar, WP Malang Raya, WP Probolinggo—Lumajang, WP Banyuwangi, WP Jember dan sekitarnya.		perkotaan di Jawa Timur guna meningkatkan perekonomian wilayah.	Pemerintah Kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar kawasan perkotaan.	
						Wilayah Megapolitan Gerbangkertosusila sebagai pusat pelayanan wilayah Jawa Timur juga menyanggah fungsi ganda sebagai <i>core</i> penggerak sektor industri pengolahan.	
		Akses air minum layak sudah mencapai 94,93%.	Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur terdapat 14 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, Pacitan, Kota Pasuruan, Trenggalek, Tulungagung, dan Sumenep.		Terpenuhinya kebutuhan penyediaan infrastruktur air minum layak mencapai 100% dan perpipaan 30% di seluruh perkotaan di Jawa Timur.	Persentase pelayanan akses perpipaan masih rendah yakni dengan rata-rata sebesar 20,45%.	
		Gerbangkertosusila Plus memiliki luas wilayah 22,68 % dari total luas provinsi dan jumlah penduduk sebesar 33,79% dari total jumlah penduduk Jawa Timur.	Arah dari RTR KSN Gerbangkertosusila sebagai perkotaan yang kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dan mempertimbangkan		Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan sektor ekonomi lain dapat dikendalikan untuk mempertahankan	Terdapat ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan permukiman. Di Gerbangkertosusila Plus terjadi	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI <i>EXISTING</i>	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.		lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).	pengurangan lahan sebanyak 8,01% per tahun (53.532 ha).	
		Tingkat akses sanitasi aman sebesar 6,79% melalui pelayanan 6 IPAL <i>existing</i> , sedangkan tingkat akses sanitasi layak sebesar 76% yang difasilitasi 11 infrastruktur IPLT.			Terpenuhinya akses sanitasi layak dengan target sebesar 90% di kawasan perkotaan dan penanganan sampah sebesar 70%.	Terdapat sebesar 24% masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak.	
		Tingkat pelayanan pengelolaan sampah telah mencapai 54%, jumlah tersebut terdiri atas 40% penanganan dan 14% pengurangan.				Tingkat pelayanan TPA masih rendah yaitu 17%, terdapat 9 TPA yang sudah <i>over capacity</i> .	
		Memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana, antara lain gempa bumi, gunung berapi, banjir, penurunan muka air tanah dan kekeringan.			Terpenuhi kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa dalam mendukung pengembangan SDM kawasan perkotaan.	Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah.	
					Perkotaan diharapkan memiliki ketahanan terhadap bencana.	Infrastruktur kebencanaan belum responsif terhadap ancaman bencana.	

Sumber: Hasil Analisis 2023



Pantai Gili Iyang, Madura Kepulauan

BAB 6

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Bab skenario pengembangan wilayah merumuskan proyeksi pertumbuhan, skenario pengembangan, serta justifikasi kawasan prioritas. Tujuan dari skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

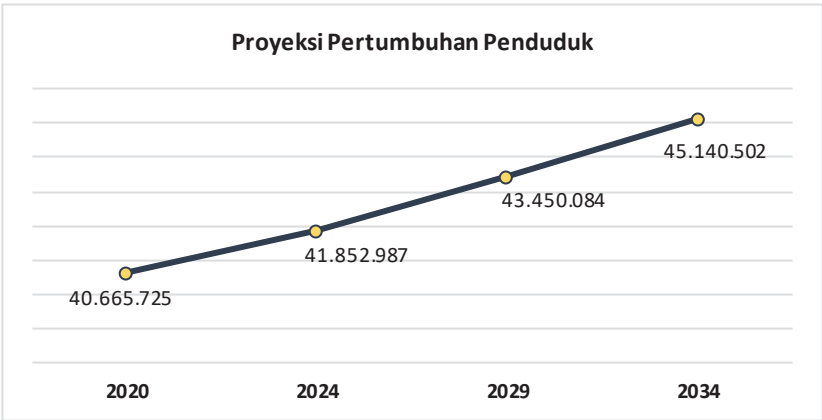
6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya.

6.1.1 Proyeksi Demografi

Dalam 10 tahun terakhir (2010-2020) penduduk Provinsi Jawa Timur meningkat 3 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk sebesar 40.665.725 jiwa, dan diperkirakan naik menjadi 45.140.502 jiwa pada 2034 dengan tingkat pertumbuhan per tahun 0,77%. Pada tahun 2034, diprediksi jumlah penduduk tertinggi ada di Kota Surabaya (3.048.016 jiwa), Kab. Malang (2.886.330 jiwa), dan Kab. Jember (2.701.303 jiwa). Sedangkan yang paling rendah berada di Kota Mojokerto (145.008 jiwa), Kota Blitar (173.459 jiwa) dan Kota Pasuruan (229.664 jiwa).

Untuk perkembangan jumlah penduduk dan proyeksi penduduk hingga tahun 2034, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

Gambar 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

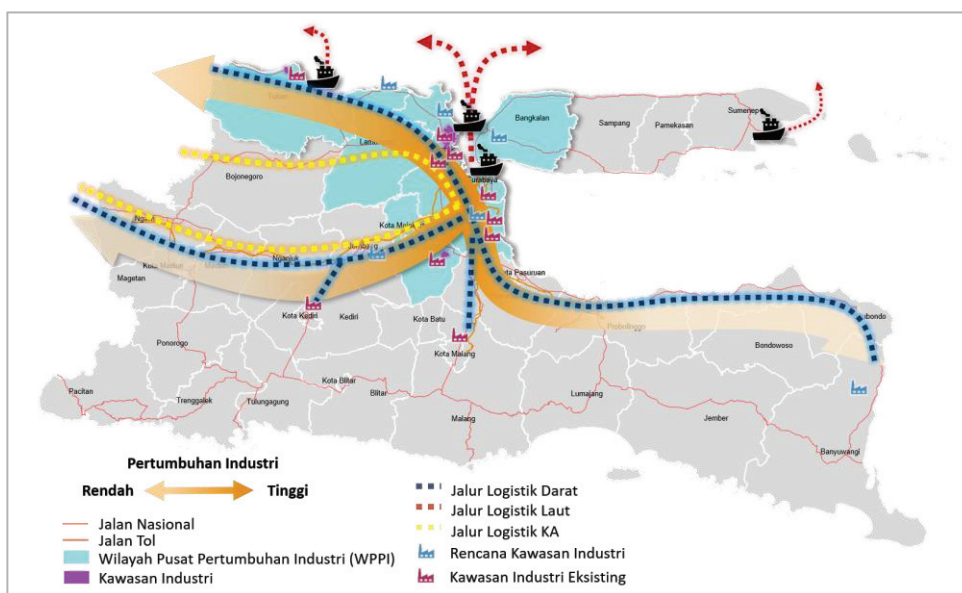
Pada tahun 2020, kepadatan penduduk gross sebesar 9 jiwa/ha dan kepadatan penduduk netto 10 jiwa/ha. Kepadatan penduduk netto tertinggi berada di Kota Malang (114 jiwa/ha) dan Kota Surabaya (88 jiwa/ha). Pada tahun 2029, kepadatan penduduk netto terbesar tetap Kota Malang sebesar 120 jiwa/ha, sedangkan kabupaten/kota lain masih dibawah 100 jiwa/ha.

6.1.2 Proyeksi Ekonomi

A. Sektor Industri

Jawa Timur memiliki WPPI yang meliputi wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Bangkalan. Terdapat 5.495-unit perusahaan industri besar dan menengah yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar 929.557 jiwa. Berdasarkan lokasi kawasan industri eksisting dan arah kebijakan yang sudah disintesakan, pertumbuhan industri diprediksi akan berkembang pada koridor pertumbuhan Pantai Utara.

Pada tahun 2030, PDRB sektor industri Provinsi Jawa Timur diproyeksikan akan mencapai Rp 486,34 T. Guna memantapkan sistem pergerakan barang antar kawasan metropolitan dan perkotaan lain khususnya sisi utara-selatan, maka perlu adanya rencana pengembangan *dry port* mengingat persebaran pelabuhan dan industri pengolahan terkonsentrasi pada sisi utara.



Sumber: Kemenperin diolah BPIW, 2022

Gambar 6.2 Proyeksi Pertumbuhan Sektor Industri

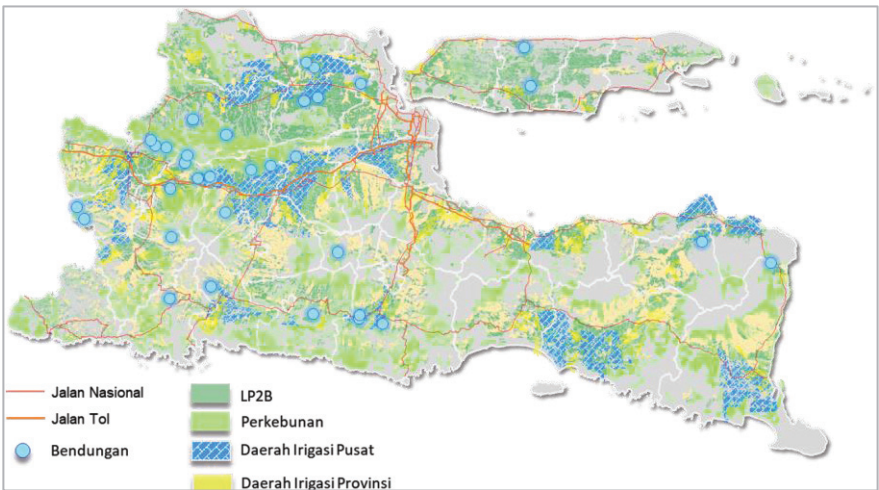
Kedepannya diharapkan industri pengolahan Jawa Timur makin berkontribusi maksimal terhadap ekspor produk pengolahan skala nasional dan mempertahankan posisi sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan di Jawa Timur dengan peningkatan kontribusi menjadi sebesar 35% terhadap PDRB Jawa Timur. Selain KI dan KPI eksisting yang saat ini terkonsentrasi di koridor utara, di masa mendatang koridor tengah dan selatan akan diarahkan dengan fungsi koridor pendukung melalui pengembangan potensi industri alternatif baru. Berbagai KEK, KI, dan KPI di Jawa Timur diharapkan dapat berfungsi optimal, menarik minat investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Beberapa permasalahan yang ditemui terkait pengembangan sektor industri di Jawa Timur, yaitu: 1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan

yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengembangan industri di Koridor Pantai Utara Jawa Timur; 2) Masih dibutuhkannya penguatan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya saing KI dan KPI; 3) Tingginya beban jalan akibat aktivitas pergerakan logistik industri yang bercampur dengan aktivitas perkotaan; dan 4) Sub sektor industri yang menggunakan produk olahan pertanian dan perkebunan sebagai bahan baku belum berkembang maksimal.

B. Sektor Pertanian

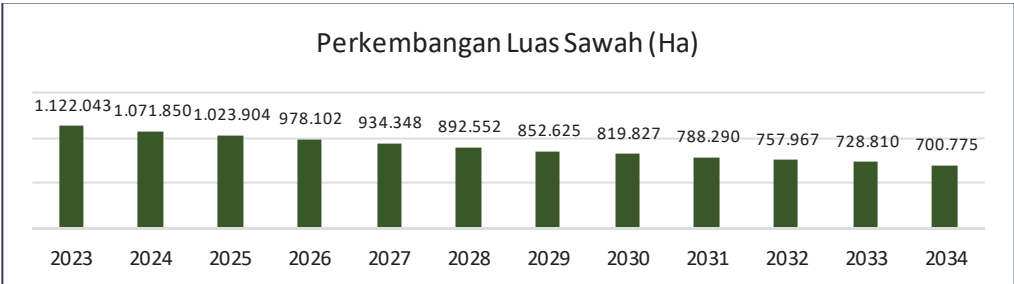
Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur. Di Jawa Timur, lahan sawah banyak terdapat di bagian utara yang memiliki kontur cenderung datar, sedangkan perkebunan berada di bagian tengah dan selatan yang memiliki kontur pegunungan dan perbukitan. Sebagian lahan pertanian tersebut sudah dialiri oleh jaringan irigasi teknis.



Sumber: Ditjen SDA diolah BPIW, 2022

Gambar 6.3 Sebaran Lahan Pertanian di Jawa Timur

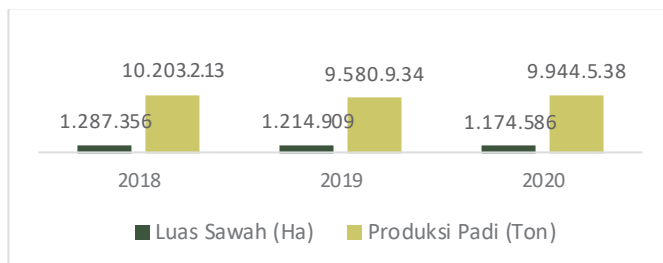
Pada tahun 2018, luas lahan pertanian di Jawa Timur sebesar 1.287.356 Ha, dan menurun menjadi 1.174.586 Ha pada 2020. Dalam kurun waktu tersebut terjadi konversi lahan sawah sebesar 112.770 Ha (4% per tahun). Diproyeksi tahun 2029, luas lahan sawah di Jawa Timur menjadi 851.625 Ha.



Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Gambar 6.4 Proyeksi Perkembangan Luas Sawah

Penurunan luas lahan sawah akan berdampak pada produksi padi. Bagi ketahanan pangan, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius karena dampak yang ditimbulkan terhadap produksi padi cenderung bersifat permanen. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian konversi lahan sawah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.



Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Gambar 6.5 Perkembangan Luas Sawah dan Produksi Padi

Dengan menggunakan rumus perhitungan geometri dengan pendekatan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir dan PDRB per kabupaten pada tahun dasar yaitu tahun 2020, maka pada tahun 2030 proyeksi PDRB sektor pertanian Provinsi Jawa Timur diproyeksikan akan mencapai Rp 171,31 Triliun.

Tabel 6.1 Proyeksi PDRB Pertanian di Jawa Timur

Kab/Kota	PDRB 2020 (Milyar Rp)	CAGR (%)	Proyeksi PDRB (Milyar Rp)					
			2021	2024	2025	2029	2030	2034
Pacitan	2.739	1,83	2.741	2.747	2.748	2.756	2.758	2.965
Ponorogo	3.493	1,09	3.494	3.497	3.498	3.503	3.504	3.659
Trenggalek	3.042	-0,46	3.042	3.040	3.040	3.038	3.038	2.982
Tulungagung	4.551	0,11	4.551	4.552	4.552	4.552	4.552	4.572
Blitar	7.375	0,94	7.376	7.379	7.380	7.384	7.385	7.666
Kediri	6.079	0,29	6.080	6.081	6.081	6.082	6.082	6.153
Malang	9.810	-0,61	9.809	9.807	9.807	9.804	9.804	9.567
Lumajang	7.251	-0,05	7.251	7.251	7.250	7.250	7.250	7.236
Jember	13.896	0,14	13.896	13.896	13.897	13.897	13.897	13.975
Banyuwangi	14.950	-1,76	14.949	14.943	14.942	14.935	14.933	13.909
Bondowoso	3.730	0,96	3.731	3.733	3.734	3.738	3.739	3.885
Situbondo	3.747	-0,05	3.747	3.747	3.747	3.746	3.746	3.739
Probolinggo	7.280	-0,31	7.280	7.279	7.279	7.277	7.277	7.187
Pasuruan	5.929	0,13	5.930	5.930	5.930	5.931	5.931	5.962
Sidoarjo	2.629	-0,29	2.628	2.627	2.627	2.626	2.626	2.595
Mojokerto	3.885	0,06	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.895
Jombang	4.509	0,59	4.510	4.511	4.512	4.514	4.515	4.622
Nganjuk	5.032	0,99	5.033	5.036	5.037	5.041	5.042	5.245
Madiun	3.529	0,36	3.530	3.531	3.531	3.533	3.533	3.584
Magetan	3.602	0,87	3.603	3.606	3.607	3.610	3.611	3.738
Ngawi	4.156	1,75	4.158	4.163	4.165	4.172	4.174	4.474
Bojonegoro	6.005	0,05	6.005	6.006	6.006	6.006	6.006	6.018
Tuban	7.295	-0,09	7.295	7.295	7.295	7.295	7.295	7.268
Lamongan	8.505	-0,79	8.505	8.502	8.502	8.498	8.498	8.232
Gresik	6.004	-0,93	6.003	6.000	6.000	5.996	5.995	5.775
Bangkalan	3.747	0,48	3.747	3.749	3.749	3.751	3.752	3.824
Sampang	4.058	1,05	4.059	4.062	4.063	4.067	4.068	4.242
Pamekasan	3.215	0,8	3.215	3.218	3.219	3.222	3.223	3.327
Sumenep	7.819	0,6	7.819	7.821	7.822	7.824	7.825	8.014
Kota Kediri	198	1,33	199	203	204	210	211	222
Kota Blitar	121	0,62	122	124	124	127	127	130

Kab/Kota	PDRB 2020 (Milyar Rp)	CAGR (%)	Proyeksi PDRB (Milyar Rp)					
			2021	2024	2025	2029	2030	2034
Kota Malang	117	2,89	120	128	131	143	146	163
Kota Probolinggo	451	-0,13	451	450	450	450	450	447
Kota Pasuruan	129	3,35	132	142	145	159	162	185
Kota Mojokerto	27	2,46	30	37	40	49	52	57
Kota Madiun	84	4,14	89	101	105	122	126	148
Kota Surabaya	548	-2,41	546	538	536	526	524	475
Kota Batu	1.558	1,96	1.560	1.565	1.567	1.575	1.577	1.705

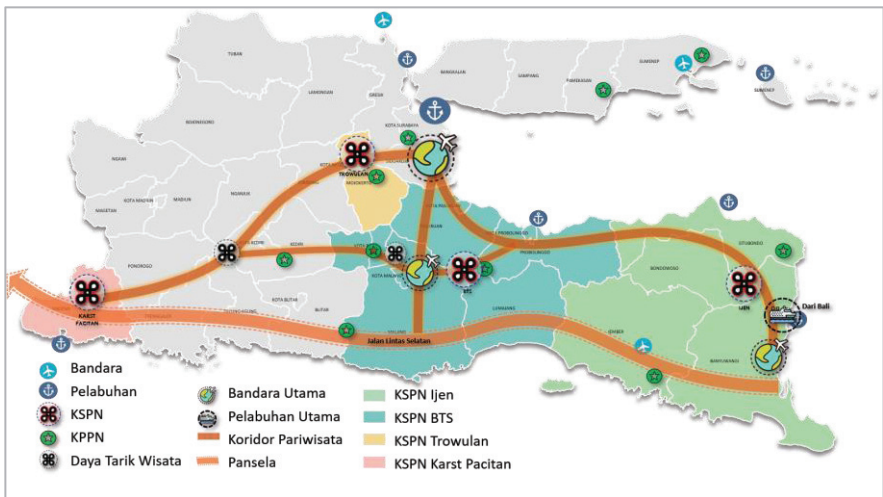
Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

Kedepannya diharapkan sektor pertanian di Jawa Timur mampu berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks tanam (IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha). Berbagai infrastruktur strategis pendukung sektor pertanian terbangun dan berjalan optimal utamanya untuk mendorong pengembangan koridor pantai selatan Jawa Timur dengan potensi sektor pertanian, khususnya infrastruktur transportasi (pelabuhan dan jalan untuk keluar/masuk komoditas pertanian) dan sumber daya air (100% lahan sawah yang dilindungi teririgasi teknis).

Beberapa permasalahan utama yang ditemui dalam pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur, yaitu 1) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pertanian yang memitigasi bencana agar tidak mempengaruhi produktivitas pertanian; 2) Masih perlunya peningkatan produktivitas lahan sawah yang beririgasi teknis. Masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 Ha (51% dari luas LP2B); 3) Tingginya konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan industri, permukiman, dll; 4) Perlunya peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan investasi yang sebanding guna meningkatkan industri pengolahannya; 5) Produktivitas pertanian menurun karena terdampak bencana (kekeringan, banjir, dll); 6) Berdasarkan kondisi neraca air, tingkat kekritisan Provinsi Jawa Timur terdiri dari kategori kritis air berat (24%), kritis sedang (72%), dan kritis ringan (3%).

C. Sektor Pariwisata

Jawa Timur memiliki 4 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan 10 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional). KSPN dan KPPN tersebut sudah dihubungkan dengan jalan nasional dan provinsi antar daya tarik wisata dan gerbang utama Jawa Timur (Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Banyuwangi, Bandara Abdurahman Saleh, dan Pelabuhan Ketapang). Selain itu, terdapat banyak daya tarik wisata pantai di selatan Jawa Timur yang akan dihubungkan oleh jalur lintas selatan Jawa Timur, sehingga pengembangan pariwisata Jawa Timur akan berkembang di wilayah selatan dan tengah Jawa Timur karena adanya daya tarik wisata berupa pegunungan seperti KSPN berkelas internasional di BTS dan Ijen, serta wisata pantai berkelas internasional di KSPN Karst Pacitan. Jalur tengah dan selatan Jawa Timur tersebut juga akan dihubungkan jalur radial di Malang, Banyuwangi, dan Tulungagung.



Sumber: Kementerian Pariwisata diolah BPIW, 2022

Gambar 6.6 Pertumbuhan Pariwisata Jawa Timur 2022

Dengan menggunakan rumus perhitungan geometri, pada tahun 2030 PDRB sektor pariwisata Jatim diproyeksikan akan mencapai Rp 84,75 T.

Tabel 6.2 Proyeksi PDRB Pariwisata di Jawa Timur

Kab/Kota	PDRB 2020 (Milyar Rp)	CAGR (%)	Proyeksi PDRB (Milyar Rp)						
			2021	2024	2025	2029	2030	2035	2040
Pacitan	222,8	2,37	225,2	232,3	234,7	244,1	246,5	258,4	270,2
Ponorogo	421,5	2,42	423,9	431,2	433,6	443,3	445,7	457,8	469,9
Trenggalek	236,1	7,90	244,0	267,7	275,6	307,2	315,1	354,5	394,0
Tulungagung	512,6	1,79	514,4	519,8	521,6	528,7	530,5	539,5	548,4
Blitar	252,0	4,20	256,2	268,8	273,0	289,8	294,0	315,0	335,9
Kediri	375,6	1,76	377,4	382,7	384,4	391,5	393,2	402,1	410,9
Malang	2.236,1	2,93	2.239,0	2.247,8	2.250,8	2.262,5	2.265,4	2.280,1	2.294,7
Lumajang	281,3	2,67	284,0	292,0	294,7	305,3	308,0	321,4	334,7
Jember	1.135,4	1,89	1.137,3	1.142,9	1.144,8	1.152,4	1.154,3	1.163,7	1.173,1
Banyuwangi	1.343,9	2,70	1.346,6	1.354,7	1.357,4	1.368,2	1.370,9	1.384,5	1.398,0
Bondowoso	82,2	-0,98	81,2	78,3	77,3	73,4	72,4	67,6	62,7
Situbondo	223,5	0,91	224,4	227,1	228,1	231,7	232,6	237,2	241,7
Probolinggo	330,5	0,92	331,4	334,2	335,1	338,8	339,7	344,4	349,0
Pasuruan	3.313,9	0,67	3.314,6	3.316,6	3.317,3	3.319,9	3.320,6	3.324,0	3.327,3
Sidoarjo	4.653,7	2,55	4.656,3	4.663,9	4.666,5	4.676,7	4.679,2	4.692,0	4.704,8
Mojokerto	1.011,5	0,10	1.011,6	1.011,9	1.012,0	1.012,4	1.012,5	1.013,0	1.013,4
Jombang	614,1	2,07	616,2	622,4	624,4	632,7	634,8	645,1	655,4
Nganjuk	343,7	2,61	346,3	354,1	356,8	367,2	369,8	382,9	395,9
Madiun	309,1	2,55	311,7	319,3	321,9	332,1	334,6	347,4	360,2
Magetan	546,7	1,84	548,5	554,0	555,9	563,2	565,1	574,3	583,4
Ngawi	353,5	2,26	355,8	362,6	364,8	373,9	376,1	387,5	398,8
Bojonegoro	497,3	4,13	501,4	513,8	518,0	534,5	538,6	559,3	580,0
Tuban	404,2	2,37	406,6	413,7	416,0	425,5	427,9	439,7	451,5
Lamongan	422,5	3,03	425,5	434,6	437,6	449,7	452,8	467,9	483,0
Gresik	1.159,0	2,62	1.161,6	1.169,5	1.172,1	1.182,6	1.185,2	1.198,4	1.211,5
Bangkalan	203,3	2,90	206,2	214,9	217,8	229,4	232,3	246,8	261,2
Sampang	58,6	2,73	61,3	69,5	72,3	83,2	85,9	99,6	113,3
Pamekasan	73,7	2,30	76,0	82,9	85,2	94,4	96,7	108,2	119,7
Sumenep	178,5	2,00	180,5	186,5	188,5	196,5	198,5	208,5	218,4
Kota Kediri	1.296,5	0,58	1.297,1	1.298,8	1.299,4	1.301,8	1.302,3	1.305,3	1.308,2
Kota Blitar	230,2	1,85	232,1	237,6	239,5	246,9	248,7	258,0	267,3
Kota Malang	2.212,9	1,14	2.214,0	2.217,5	2.218,6	2.223,2	2.224,3	2.230,0	2.235,7
Kota Probolinggo	270,6	2,30	272,9	279,8	282,1	291,3	293,6	305,2	316,7

Kab/Kota	PDRB 2020 (Milyar Rp)	CAGR (%)	Proyeksi PDRB (Milyar Rp)						
			2021	2024	2025	2029	2030	2035	2040
Kota Pasuruan	278,7	1,44	280,1	284,4	285,9	291,6	293,1	300,3	307,4
Kota Mojokerto	300,3	2,50	302,8	310,3	312,8	322,8	325,3	337,9	350,4
Kota Madiun	514,6	3,37	518,0	528,1	531,5	544,9	548,3	565,2	582,0
Kota Surabaya	56.053,2	1,52	56.054,7	56.059,3	56.060,8	56.066,9	56.068,4	56.076,1	56.083,7
Kota Batu	994,3	-2,59	991,7	983,9	981,4	971,0	968,4	955,5	942,5

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Kedepannya diharapkan Pengembangan kawasan pariwisata Jatim, khususnya DPP Bromo-Tengger-Semeru dan DPP Baru Banyuwangi mampu menjadi penggerak perekonomian Jawa Timur yang salah satunya tergambar dalam kontribusinya terhadap PDRB provinsi. Terjadinya peningkatan wisatawan mancanegara ke lokasi-lokasi pariwisata Jawa Timur, yang mana saat ini 90% masih didominasi wisman. Selain itu, dapat terwujud pula pariwisata yang modern dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam perwujudan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Jawa Timur, yaitu 1) Kebijakan nasional PMA dan PMDN yang diterapkan di lokasi KSPN BTS dan KSPN Ijen-Baluran belum tampak memberikan hasil yang maksimal; 2) Pariwisata Jawa Timur belum memiliki *branding* dan promosi yang kuat di tingkat internasional; 3) Masih dibutuhkankannya peningkatan akses menuju DTW unggulan khususnya jalan daerah. Adapun jalan nasional di DTW prioritas memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar renstra PUPR (53 km/jam); 4) Pansela memiliki potensi pengembangan wisata yang besar, namun saat ini kondisinya jalur *backbone* pansela masih membutuhkan peningkatan; dan 5) kawasan permukiman di sekitar DTW unggulan masih membutuhkan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar (air minum, sanitasi, Kawasan kumuh).

D. Proyeksi Pertumbuhan Kawasan dan Sektor Unggulan

Proyeksi pertumbuhan kawasan dan sektor unggulan berfungsi untuk memprediksi pertumbuhan suatu kawasan dan sektor melalui tren pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

1. Proyeksi Pertumbuhan Kawasan

Proyeksi pertumbuhan pada kawasan GKS Plus, Malang Raya, DPP BTS, Selingkar Willis, Selingkar Ijen, dan Madura Kepulauan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Kawasan (dalam triliun rupiah)

Kawasan	CAGR (%)	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Gerbangkertosusila Plus	5,94	893,50	946,61	1002,87	1062,47	1338,49	1.418,00	1.786,14
Malang Raya dan DPP BTS	5,55	306,57	323,59	341,54	360,50	447,44	472,27	586,17
Selingkar Willis	5,25	317,68	334,35	351,89	370,35	454,39	478,25	586,87
Selingkar Ijen	5,38	139,75	147,26	155,18	163,52	201,63	212,48	262,03
Madura dan Kepulauan	3,15	68,22	70,37	72,59	74,88	84,78	87,45	99,00

Sumber: BPS diolah BPIW, 2024

2. Proyeksi Pertumbuhan Sektor Unggulan

Proyeksi pertumbuhan sektor unggulan yang terdiri dari sektor pertanian, industri manufaktur, perdagangan, & penyediaan akomodasi & makan minum dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6.4 Proyeksi Pertumbuhan Sektor Unggulan (dalam triliun rupiah)

Sektor	CAGR (%)	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Pertanian	3,67	179,80	186,40	193,23	200,31	231,36	239,85	277,05
Industri Manufaktur	9,45	585,30	640,61	701,15	767,40	1.101,26	1.205,33	1.729,69
Perdagangan	9,88	349,91	384,49	422,49	464,24	676,80	743,67	1.084,06
Penyediaan akomodasi & makan minum	11,07	103,07	114,49	127,17	141,26	215,04	238,84	363,50

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

6.1.3 Keberlanjutan Lingkungan

Jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dalam ekosistem. Ketersediaan jasa ekosistem akan bervariasi secara kontinyu seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga ketersediaan secara aktual dan potensial di waktu yang akan datang menjadi bagian dalam penilaian jasa ekosistem. Klasifikasi dan fungsi jasa ekosistem yang telah diadopsi dari *Millennium Ecosystem Assessment* terbagi menjadi empat kategori manfaat yaitu manfaat penyediaan, pengaturan, budaya, dan pendukung.

1. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Provinsi Jawa Timur didominasi pada daerah dengan jasa ekosistem pangan pada kategori kelas rendah (32,76%) dan sedang (24,86%). Artinya sebagian lahan di daerah tersebut adalah lahan yang mampu menyediakan bahan pangan dengan potensi rendah dan sedang, sementara sebagian yang lain mampu menyediakan pangan dengan potensi tinggi. Jasa ekosistem pangan yang memiliki dominasi kelas rendah berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.

2. Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Provinsi Jawa Timur didominasi pada daerah dengan jasa ekosistem air pada kategori kelas sedang (25,55%) dan tinggi (27,16%). Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang berada di wilayah ini mampu menyediakan air bersih dengan potensi sedang dan tinggi, sementara sebagian wilayah lainnya hanya mampu menyediakan air bersih dengan potensi rendah. Jasa ekosistem air yang memiliki dominasi kelas tinggi berada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Malang.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki regulasi pengaturan tata air dan banjir yang baik dengan 35,56% dari total luasan wilayah memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mencegah terjadinya banjir. Namun masih ada 23,64% yang hanya memiliki kemampuan pengaturan tata air dan banjir dalam kelas rendah, khususnya pada wilayah perkotaan Jawa Timur.

4. Jasa Ekosistem Perlindungan dan Pencegahan Bencana

Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan regulasi perlindungan dan pencegahan bencana yang tinggi sebesar 30,05%. Namun masih ada 25,50% yang memiliki kemampuan perlindungan dan pencegahan bencana dengan kategori rendah, khususnya pada wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan risiko bencana di kawasan perkotaan lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

5. Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan jasa penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi sebesar 28,12%. Namun masih ada sekitar 12,92% yang memiliki jasa penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup pada kategori rendah, khususnya pada bagian selatan Jawa Timur yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kawasan Prioritas

Provinsi Jawa Timur jika dilihat pada seluruh kawasan prioritas yang sebagian besar mengarah pada perkembangan luas pemukiman dan lahan terbangun yang berjalan secara masif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap kawasan prioritas memiliki fungsional yang berbeda-beda sehingga hasil analisis jasa ekosistem yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam pengembangan kawasan prioritas hingga tahun 2029. Jika dilihat pada tabel dibawah ini menunjukan bahwa jasa ekosistem di Kawasan BTS, Selingkar Ijen, dan Selingkar Wilis memiliki keberlanjutan yang cukup tinggi namun hal ini perlu didorong dengan peningkatan kualitas hidup yang ada di sekitar kawasan tersebut. Sehingga keberlanjutan lingkungan di kawasan ini masih tetap terjaga seiring dengan perkembangan pariwisata dan pembangunan disana.

Tabel 6.5 Jasa Ekosistem KSPN Jawa Timur

KSPN	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air dan Banjir	Perlindungan dan Pencegahan Bencana	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup
BTS	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
GKS Plus	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi
Madura dan Kepulauan	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
Selingkar Ijen	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Selingkar Wilis dan Selatan	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

6.2 Visi dan Strategi

Sub bab ini berisikan perumusan visi wilayah, misi (*grand strategy*), dan strategi pengembangan setiap fokus perencanaan di Jawa Timur. Perumusan strategi diturunkan dari isu strategis yang telah ditetapkan pada bab 5 yang kemudian melalui beberapa tahapan analisis, yaitu 1) PESTLE; 2) 5 Forces; dan 3) SWOT.

Analisis PESTLE menjelaskan peluang dan tantangan di level makro (skala nasional) yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *Political* (politik), *Economic* (ekonomi), *Sociological* (sosial), *Technological* (teknologi), *Legal* (kebijakan), dan *Environment* (lingkungan).

Analisis 5 Forces menjelaskan peluang dan tantangan di level meso (skala regional wilayah Pulau Jawa) yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Kedua analisis diatas menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap selanjutnya yaitu analisis SWOT.

Analisis SWOT menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pengembangan masing-masing fokus perencanaan di tingkat mikro (Provinsi Jawa Timur). Keempat faktor tersebut yang kemudian dibobotkan untuk mengetahui apakah fokus perencanaan tersebut masuk ke dalam kuadran Agresif, Diversifikasi, Defensif, ataukah *Turn Around*.

6.2.1 Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur meliputi pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan layanan perkotaan.

Visi/tujuan dalam pengembangan infrastruktur wilayah Jawa Timur yaitu

“Jawa Timur sebagai Pusat Ekonomi Berdaya Saing Global melalui Pengembangan Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pariwisata Alam”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 misi (*grand strategy*) yang akan dilakukan. Keempat misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Jawa Timur yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri pengolahan yang terpadu dan berdaya saing internasional di koridor utara Jawa Timur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
2. Meningkatkan diversifikasi pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
3. Mewujudkan pariwisata alam sebagai sektor unggulan di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan perlindungan fisik lingkungan.
4. Mengembangkan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan kawasan perkotaan di Jawa Timur yang layak huni.

6.2.2 Penyusunan Strategi Fokus Industri Pengolahan

A. Analisis PESTLE (Makro)

Analisis PESTLE fokus industri pengolahan menunjukkan bahwa parameter politik menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan industri di Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa sektor industri merupakan salah satu penggerak ekonomi utama di Jawa Timur dan mendapatkan dukungan dari segi kebijakan politik. Analisis PESTLE pada fokus perencanaan Industri Pengolahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6 Analisis Pestle (Makro) Fokus Industri Pengolahan

Sektor Industri di Jawa Timur Merupakan Salah Satu Kontributor Terbesar terhadap PDB Nasional dan Ekspor ke Pasar Global			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT
<i>POLITICAL</i>	Sejalan dengan RIPIN dan telah diresmikan 2 KEK dan salah satunya merupakan KEK Gresik dengan sektor industri pengolahan	KEK dapat dicabut dalam jangka 10 tahun apabila tidak terjadinya investasi (penanaman modal) dan masih terdapatnya kawasan industri memiliki akses langsung ke pelabuhan	33%
<i>ECONOMIC</i>	Sektor Industri Pengolahan Jawa Timur merupakan sektor yang berkontribusi paling besar kedua nasional setelah Jawa Barat	Lalu lintas yang bercampur antara logistik dan aktivitas perkotaan yang menyebabkan VCR tinggi	20%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Sosial budaya masyarakat Jawa yang Heterogen sehingga dapat menerima peluang masuknya investasi pada kawasan industri / kawasan ekonomi khusus	Terjadinya akulturasi budaya terhadap terhadap pelaku dan tenaga kerja industri	13%
<i>TECHNOLOGY</i>	KEK JIPE yang sedang melakukan pembangunan pabrik pengolahan konsentrat (smelter) untuk komoditas emas, tembaga, besi	Kapasitas SDM dalam penerapan dan implementasi teknologi tinggi pada kawasan ekonomi khusus (KEK)	20%
<i>LEGAL</i>	Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) menetapkan 1 Wilayah Prioritas Pengembangan Industri (WPPI) dan 6 Kawasan Industri yang terkonsentrasi di koridor pertumbuhan Jawa Timur	Terbatasnya turunan rinci dari RIPIN sebagai panduan daerah dalam mengembangkan kawasan industri	7%
<i>ENVIRONMENT</i>	-	-	7%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis 5 Forces (Meso)

Politik sebagai parameter yang paling berpengaruh di dalam analisis makro menjadi input dalam penyusunan analisis meso (*5 Forces*). Dalam analisis tersebut didapati beberapa parameter lain yang juga berpengaruh yaitu terkait ketergantungan saat ini yang didalamnya menjelaskan ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengemabngan industri di koridor pantai utara Jawa Timur. Analisis tingkat meso yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri Pengolahan

Sektor Industri di Jawa Timur Merupakan Salah Satu Kontributor Terbesar terhadap PDB Nasional dan Ekspor ke Pasar Global		
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR		
Inovasi	Variasi produk olahan hasil industri yang tersedia di KI dan KEK dapat menjadikan potensi turunan produk olahan selanjutnya yang siap mengisi pasar ekonomi regional dan nasional	Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap harga bahan baku impor dan terhadap optimalisasi industri pengolahan eksisting Jawa Timur
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS		
Trend Eksisting	Jawa Timur menduduki peringkat kedua penyumbang ekspor nasional. Sektor industri Pengolahan di Jawa Timur berkontribusi 22% terhadap industri skala nasional.	Rendahnya ketersediaan (supply) bahan baku industri petrochemical sebagai subsektor industri pengolahan terbesar tingkat nasional
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS		
Ketergantungan Saat ini	Pelabuhan Tanjung Perak merupakan Pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priok dan menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur.	Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengembangan industri di Koridor Pantai Utara Jawa Timur. Daya dukung lahan bernilai 1,055 atau surplus dimana masih terdapat lahan yang bisa dioptimalkan pengembangannya.
THREAT OF NEW ENTRANTS		
Tantangan Yang Dihadapi	Rencana pembangunan pabrik pemurnian biji konsentrat terbesar di Indonesia pada KEK Gresik	Terdapat ancaman banjir dari limpasan anak Sungai Bengawan Solo yang mengancam aktivitas industri
THREAT OF SUBSTITUTES		
Trend Analisis PESTLE	Sejalan dengan RIPIN dan telah diresmikan 2 KEK dan salah satunya merupakan KEK Gresik dengan sektor industri pengolahan	KEK dapat dicabut dalam jangka 10 tahun apabila tidak terjadinya investasi (penanaman modal) dan masih terdapatnya kawasan industri memiliki akses langsung ke pelabuhan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT fokus industri pengolahan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pengembangan industri pengolahan di Jawa Timur. Masing-masing komponen kemudian dibobotkan untuk menghasilkan skor dan rating. Pada faktor internal terlihat kekuatan industri pengolahan, yaitu: 1) Pengembangan industri pengolahan di koridor utara - tengah - selatan diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja; 2) Terwujudnya kawasan industri dan kawasan peruntukkan industri yang ramah lingkungan; 3) Berbagai KEK, KI, dan WPPI di Jawa Timur berfungsi optimal dan berkontribusi sebesar 35% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur dan diharapkan mampu menarik minat investasi; 4) Koridor Utara Jawa Timur menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa skala internasional dengan koridor tengah - selatan sebagai pendukung pengembangan potensi alternatif; dan 5) Koridor tengah - selatan Jawa Timur (Kediri, Madiun dsb) diharapkan berkembang sebagai alternatif kawasan industri baru.

Kelemahan pengembangan sektor industri di Jawa Timur, yaitu: 1) Tingginya beban jalan akibat aktivitas pergerakan logistik industri yang bercampur dengan aktivitas perkotaan; 2) Pencemaran udara dan limbah buangan dari aktivitas kawasan industri menyebabkan kerusakan

lingkungan; 3) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri di Jawa Timur; 4) Konektivitas dan layanan dasar infrastruktur dasar masih membutuhkan penguatan dan pemerataan pada kawasan industri dan kawasan pendukungnya.; dan 5) Laporan dari Ecoton menyebutkan udara di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang mengandung mikroplastik penyebab kanker. Adapun indeks rata-rata kualitas udara di Kota Surabaya tahun 2022 adalah 93, masih masuk dalam rentang sedang.

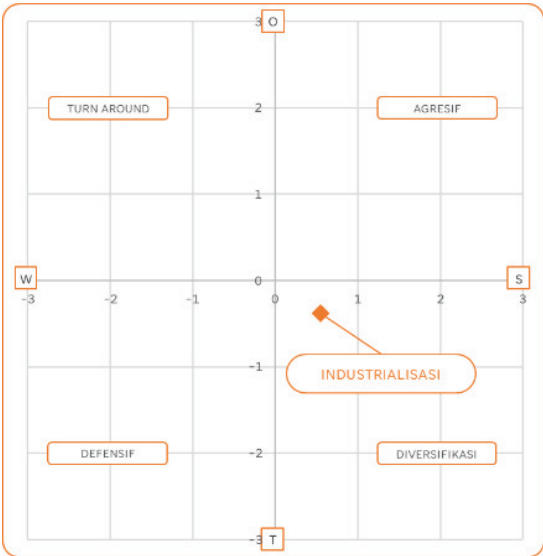
Pada faktor eksternal didapati peluang pengembangan sektor industri di Jawa Timur, yaitu: 1) Sejalan dengan RIPIN dan telah diresmikan 2 KEK dan salah satunya merupakan KEK Gresik dengan sektor industri pengolahan; 2) Jawa Timur menduduki peringkat kedua penyumbang ekspor nasional. Sektor industri Pengolahan di Jawa Timur berkontribusi 22% terhadap industri skala nasional; 3) Rencana pembangunan pabrik pemurnian biji konsentrat terbesar di Indonesia pada KEK Gresik; 4) Variasi produk olahan hasil industri yang tersedia di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadikan potensi turunan produk olahan selanjutnya yang siap mengisi pasar ekonomi regional dan nasional; dan 5) Pelabuhan Tanjung Perak merupakan Pelabuhan tersibuk kedua setelah Tanjung Priok dan menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur.

Adapun ancaman pengembangan sektor industri di Jawa Timur, yaitu: 1) Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengembangan industri di Koridor Pantai Utara Jawa Timur. Daya dukung lahan bernilai 1,055 atau surplus dimana masih terdapat lahan yang bisa dioptimalkan pengembangannya; 2) KEK dapat dicabut dalam jangka 10 tahun apabila tidak terjadinya investasi (penanaman modal) dan masih terdapatnya kawasan industri memiliki akses langsung ke pelabuhan; 3) Rendahnya ketersediaan (supply) bahan baku industri petrochemical sebagai subsektor industri pengolahan terbesar tingkat nasional; 4) Terdapat ancaman banjir dari limpasan anak Sungai Bengawan Solo yang mengancam aktivitas industri; 5) Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap harga bahan baku impor dan terhadap optimalisasi industri pengolahan eksisting Jawa Timur.

Tabel 6.8 Analisis SWOT Fokus Industri Pengolahan

FAKTOR INTERNAL					FAKTOR EKSTERNAL				
	Strengths	Bobot	Rating	Skor	Opportunities	Bobot	Rating	Skor	
1	Pengembangan industri pengolahan di koridor utara - tengah - selatan diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja	0,26	3	0,78	1 Variasi produk olahan hasil industri yang tersedia di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadikan potensi turunan produk olahan selanjutnya yang siap mengisi pasar ekonomi regional dan nasional	0,15	2	0,31	
2	Koridor Utara Jawa Timur menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan jasa skala internasional dengan koridor tengah - selatan sebagai pendukung pengembangan potensi alternatif	0,17	2	0,35	2 Pelabuhan Tanjung Perak merupakan Pelabuhan terisbuk kedua setelah Tanjung Priok dan menjadi pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur.	0,15	2	0,31	
3	Berbagai KEK, KI, dan Wippi di Jawa Timur berfungsi optimal dan berkontribusi sebesar 35% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur dan diharapkan mampu menarik minat investasi.	0,13	3	0,39	3 Rencana pembangunan pabrik pemurnian biji konsentrat terbesar di Indonesia pada KEK Gresik	0,23	2	0,46	
4	Koridor tengah - selatan Jawa Timur (Kediri, Madiun dsk) diharapkan berkembang sebagai alternatif kawasan industri baru	0,17	2	0,35	4 Sejalan dengan RIPIIN dan telah diresmikan 2 KEK dan salah satunya merupakan KEK Gresik dengan sektor industri pengolahan	0,23	3	0,69	
5	Terdwujudnya kawasan industri dan kawasan peruntukkan industri yang ramah lingkungan	0,26	3	0,78	5 Jawa Timur menduduki peringkat kedua penyumbang ekspor nasional. Sektor industri Pengolahan di Jawa Timur berkontribusi 22% terhadap industri skala nasional.	0,23	3	0,69	
	Sub Total	1		2,65	Sub Total	1		2,46	
Weaknesses					Threats				
1	Konektivitas dan layanan dasar infrastruktur dasar masih membutuhkan penguatan dan pemerataan pada kawasan industri dan kawasan pendukungnya.	0,14	-2	-0,29	1 Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap harga bahan baku impor dan terhadap optimalisasi industri pengolahan eksisting Jawa Timur	0,15	-2	-0,31	
2	Tingginya beban jalan akibat aktivitas pergerakan logistik industri yang bercampur dengan aktivitas perkotaan	0,29	-3	-0,86	2 Daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas terhadap ekspansi pengembangan industri di Koridor Pantai Utara Jawa Timur. Daya dukung lahan bernilai 1,055 atau surplus dimana masih terdapat lahan yang bisa dioptimalkan pengembangannya.	0,23	-3	-0,69	
3	Pencemaran udara dan limbah buangan dari aktivitas kawasan industri menyebabkan kerusakan lingkungan	0,19	-2	-0,38	3 Terdapat ancaman banjir dari limpasan anak Sungai Bengawan Solo yang mengancam aktivitas industri	0,15	-3	-0,46	
4	Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) industri di Jawa Timur	0,19	-2	-0,38	4 KEK dapat dicabut dalam jangka 10 tahun apabila tidak teradinya investasi (penanaman modal) dan masih terdapatnya kawasan industri memiliki akses langsung ke pelabuhan	0,23	-3	-0,69	
5	Laporan dari Ecoton menyebutkan udara di 5 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang mengandung mikroplastik penyebab kanker. Adapun indeks rata-rata kualitas udara di Kota Surabaya tahun 2022 adalah 93, masih masuk dalam rentang sedang	0,19	-1	-0,19	5 Rendahnya ketersediaan (supply) bahan baku industri petrochemical sebagai subsektor industri pengolahan terbesar tingkat nasional	0,23	-3	-0,69	
	Sub Total	1		-2,10	Sub Total	1		-2,85	
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL					TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL				
			0,56				-0,38		

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus industri berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (strengths) dan menjawab tantangan (threats).



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6.7 Kuadran kartesius penentuan strategi fokus industri

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus industri di Jawa Timur dikembangkan dengan strategi diversifikasi, yakni strategi:

1. Pengintegrasian konektivitas kawasan peruntukkan industri dengan simpul-simpul transportasi (pelabuhan, bandara, jalan tol, rel kereta) untuk meningkatkan daya saing (S2 - S3 - T4)
2. Penganekaragaman produk unggulan industri pengolahan melalui hilirisasi dan peningkatan kualitas pertanian (S5 - S2 - T4 - T5)
3. Pengembangan kawasan industri terpadu yang berskala internasional (S1 - S3 - T4)
4. Pengembangan kawasan industri ramah lingkungan dan berketahanan terhadap bencana (S5 - T2 - T3)
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi di KEK/KI (S3-T1-T4)

6.2.3 Penyusunan Strategi Fokus Pertanian Tanaman Pangan

A. Analisis PESTLE (Makro)

Analisis PESTLE fokus pertanian menunjukkan bahwa parameter ekonomi dan teknologi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini berarti bahwa fokus pertanian merupakan salah satu kontributor ekonomi terbesar di Jawa Timur yang harus ditunjang dengan penggunaan teknologi yang tepat sasaran untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Analisis PESTLE fokus pertanian secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.9 Analisis Pestle (Makro) Fokus Pertanian Tanaman Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan Salah Satu Lumbung Pangan Nasional			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT
<i>POLITICAL</i>	Pemerintah Daerah mendorong Jawa Timur berkontribusi terhadap ketahanan dan swasembada pangan nasional dan bahkan mampu untuk ekspor hasil pertanian	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pertanian yang memitigasi bencana agar tidak mempengaruhi produktivitas pertanian	17%
<i>ECONOMIC</i>	Kontribusi PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan menyumbang 16,59% (2020) terhadap sektor pertanian tanaman pangan nasional (tertinggi se Indonesia).	Infrastruktur pertanian yang kurang memadai, termasuk akses ke pasar, sistem transportasi, dan jaringan distribusi yang efisien. Selain itu, tantangan dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam, seperti keberlanjutan penggunaan air dan lahan pertanian.	22%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Dalam tingkat nasional, terdapat stimulan berupa pendampingan program inkubasi bisnis pertanian	Perlunya dorongan agar ada peningkatan pelaku pertanian atau petani milenial dan kurangnya nilai tambah produk pertanian dalam mendukung agroindustri dan agrobisnis	11%
<i>TECHNOLOGICAL</i>	Sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks tanam (IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha), serta dapat memitigasi dampak bencana	Tidak meratanya infrastruktur pendukung pertanian dan teknologi pertanian yang digunakan penduduk dalam kegiatan pertanian khususnya untuk industri pengolahan pertanian	22%
<i>LEGAL</i>	Dalam RTRWN, Jawa Timur diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri skala nasional. Luas lahan baku sawah 16,27% (tertinggi nasional; 2019) yang ditetapkan pemerintah pusat.	Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang memadai dalam mendorong pengembangan sektor tersebut	17%
<i>ENVIRONMENT</i>	Karakteristik fisik lingkungan yang mendukung sektor pertanian sehingga berkontribusi terhadap pertanian nasional	Perubahan iklim dan cuaca yang tidak stabil dapat mengganggu produksi pertanian dan mempengaruhi hasil panen. Tantangan ini membutuhkan strategi adaptasi dan mitigasi untuk menjaga ketahanan pertanian di tengah perubahan iklim.	11%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis 5 Forces (Meso)

Ekonomi dan teknologi sebagai parameter yang paling berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan pertanian di dalam analisis makro menjadi input dalam penyusunan analisis meso (*5 Forces*). Dalam analisis tersebut didapati beberapa parameter lain yang juga berpengaruh yaitu terkait dukungan sistem jaringan jalan. Jalur logistik Trans Jawa dan Pansela sangat penting untuk mendistribusikan komoditas pertanian ke Jawa-Bali. Namun demikian, untuk jalan nasional di Kawasan Prioritas BTS, Selingkar Ijen, Madura Kepulauan, dan Selingkar Wilis terdapat beberapa ruas dengan VCR >1 dan kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR.

Tabel 6.10 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pertanian Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan Salah Satu Lumbung Pangan Nasional		
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR		
Kualitas Yang Diinginkan	Pengembangan infrastruktur sumber daya air sehingga dapat meningkatkan produksi padi Jatim di dalam konstelasi Jawa-Bali.	Masih perlunya peningkatan produktivitas lahan sawah yang beririgasi teknis. Masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 Ha (51% dari luas LP2B). Lahan LP2B di Jatim yang sudah beririgasi teknis sebesar 49%, sedangkan lahan sawah yang beririgasi teknis di Jateng (WM Kedungsepur 66,61%; KSPN Dieng 80%) dan Bali (Subak Landscape telah beririgasi teknis dengan pola rotasi pemberian air).
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS		
Trend Eksisting	Sistem pengairan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi di tahun 2020, Jateng 5,69 ton/ha; Jatim 5,7 ton/ha; Bali 6,07 ton/ha.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pertanian yang memitigasi bencana agar tidak mempengaruhi produktivitas pertanian.
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS		
Ketergantungan Saat ini	Didukung jalur logistik Trans Jawa dan Pansela untuk mendistribusikan komoditas pertanian ke Jawa-Bali	Untuk jalan nasional di kawasan pertanian seperti di Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Ijen, Madura Kepulauan, dan Selingkar Wilis terdapat beberapa ruas jalan nasional yang memiliki VCR > 1 dan kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam).
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	Dalam tingkat nasional, terdapat stimulan berupa pendampingan program inkubasi bisnis pertanian	Perlunya dorongan agar ada peningkatan pelaku pertanian atau petani milenial dan kurangnya nilai tambah produk pertanian dalam mendukung agroindustri dan agrobisnis.
THREAT OF NEW ENTRANTS		
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	Dalam RTRWN, Jawa Timur diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri skala nasional. Luas lahan baku sawah 16,27% (tertinggi nasional; 2019) yang ditetapkan pemerintah pusat.	Menurunnya produktivitas pertanian akibat alih fungsi lahan.
THREAT OF SUBSTITUTES		
Trend Analisis PESTLE	Sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks tanam (IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha), serta dapat memitigasi dampak bencana	Tidak meratanya infrastruktur pendukung pertanian dan teknologi pertanian yang digunakan penduduk dalam kegiatan pertanian khususnya untuk industri pengolahan pertanian.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT fokus pertanian tanaman pangan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pengembangan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Jawa Timur. Masing-masing komponen kemudian dibobotkan untuk menghasilkan skor dan rating. Pada faktor internal didapati kekuatan sektor pertanian tanaman pangan di Jawa Timur, yaitu: 1) PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Jatim berkontribusi 11,89% (2021) terhadap PDRB provinsi (terbesar ketiga).

Produksi padi terbesar di Jawa Timur berada di Kab. Lamongan, Ngawi, dan Jember (2020) dan 2) Produktivitas tanaman padi Jatim sebesar 5,69 ton/ha (diatas rata-rata nasional sebesar 5,11 ton/ha; 2020). Sebagian petani mengusahakan panen padi lima kali dalam 2 tahun (IP 250) dan di lokasi tertentu bahkan tiga kali panen per tahun (IP 300).

Adapun kelemahan sektor pertanian di Jawa Timur dengan bobot tertinggi, yaitu: 1) Masih kurangnya peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan investasi yang sebanding guna menambah industri pengolahannya; dan 2) Wilayah kekeringan resiko tinggi diantaranya terdapat di Wilayah Utara Jawa Timur yang meliputi Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik; Wilayah Selingkar Ijen yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember; wilayah Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Selingkar Wilis. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kawasan pertanian yang luas.

Pada faktor eksternal, beberapa peluang pengembangan sektor pertanian yaitu: 1) Dukungan jalur logistik Trans Jawa dan Pansela untuk mendistribusikan komoditas pertanian ke Jawa-Bali; 2) Luas lahan baku sawah sebesar 16,27% terhadap lahan baku sawah nasional (tertinggi nasional; 2019); 3) Sistem pengairan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi di tahun 2020, Jateng 5,69 ton/ha; Jatim 5,7 ton/ha; Bali 6,07 ton/ha; 4) Sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks tanam (IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha).

Ancaman dari luar terhadap pengembangan pertanian, yaitu: 1) Masih terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 Ha (51% dari luas LP2B); 2) kurangnya nilai tambah produk pertanian dalam mendukung agroindustri dan agrobisnis; 3) Menurunnya produktivitas pertanian akibat alih fungsi lahan; dan 4) Tidak meratanya infrastruktur pendukung pertanian dan teknologi pertanian. Analisis SWOT yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

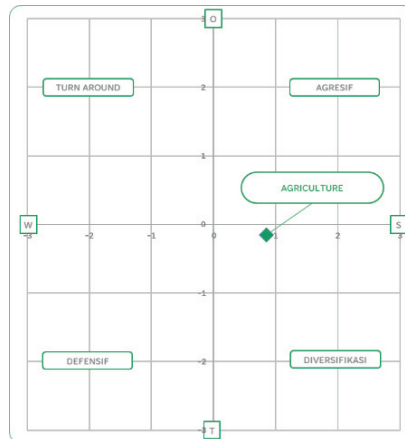
Tabel 6.11 Analisis SWOT Fokus Pertanian Pangan

FAKTOR INTERNAL					FAKTOR EKSTERNAL				
	Strengths	Bobot	Rating	Skor	Opportunities	Bobot	Rating	Skor	
1	Instruksi pembangunan 18 PSN di Jawa Timur, 7 PSN diantaranya berkaitan dengan penyediaan air baku dan irigasi sedangkan 5 PSN terkait konektivitas (2022)	0,15	2	0,31	1 Pengembangan infrastruktur sumber daya air sehingga dapat meningkatkan produksi padi Jatim di dalam konstelasi Jawa-Bali.	0,19	3	0,56	
2	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Jatim berkontribusi 11,89% (2021) terhadap PDRB provinsi (terbesar ketiga). Produksi padi terbesar di Jawa Timur berada di Kab. Lamongan, Ngawi, dan Jember (2020).	0,23	3	0,69	2 Sistem pengaliran mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi di tahun 2020, Jateng 5,69 ton/ha; Jatim 5,7 ton/ha; Bali 6,07 ton/ha.	0,19	3	0,56	
3	Produktivitas tanaman padi Jatim sebesar 5,69 ton/ha (diatas rata-rata nasional sebesar 5,11 ton/ha; 2020). Sebagian petani mengusahakan panen padi lima kali dalam 2 tahun (IP 250) dan di lokasi tertentu bahkan tiga kali panen per tahun (IP 300)	0,23	3	0,69	3 Didukung jalur logistik Trans Jawa dan Pansela untuk mendistribusikan komoditas pertanian ke Jawa-Bali	0,19	3	0,56	
4	Kawasan pertanian yang tersebar di Jawa Timur (tercantum dalam Kepmen ATR tentang Lahan Baku Sawah & Lahan Sawah yang Dilindungi) diharapkan terdapat peningkatan produktivitas panen	0,15	3	0,46	4 Dalam tingkat nasional, terdapat stimulan berupa pendampingan program inkubasi bisnis pertanian	0,13	2	0,25	
5	Sektor pertanian dapat menjadi salah satu tumpuan perekonomian setelah industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan mengarah pada agroindustri dan agrobisnis	0,23	3	0,69	5 Luas lahan baku sawah 16,27% terhadap lahan baku nasional (tertinggi nasional; 2019).	0,13	2	0,25	
					6 Sektor pertanian di Jawa Timur diharapkan berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional dengan indeks tanam (IP 400 atau 4 kali panen dalam 1 tahun) dan produktivitas tanaman padi di atas rata-rata nasional (>5,11 ton/ha)	0,19	3	0,56	
	Sub Total	1		2,85	Sub Total	1		2,75	
	Weaknesses	Bobot	Rating	Skor	Threats	Bobot	Rating	Skor	
1	Masih adanya konversi lahan dari lahan sawah menjadi lahan industri, permukiman, dll	0,17	-1	-0,17	1 Masih perlunya peningkatan produktivitas lahan sawah yang beririgasi teknis. Terdapat LP2B yang belum beririgasi teknis seluas 588.722 Ha (51% dari luas LP2B). Untuk perbandingan: Jateng (WM Kedungsepur 66,61%; KSPN Dieng 80%) dan Bali (Subak Landscape 100%).	0,18	-3	-0,53	
2	Perlunya peningkatan nilai tambah produk pertanian dengan investasi yang sebanding guna menambah industri pengolahannya	0,25	-2	-0,50	2 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pertanian yang memitigasi bencana agar tidak mempengaruhi produktivitas pertanian	0,12	-2	-0,24	
3	Produktivitas pertanian menurun karena terdampak bencana (kekeringan, banjir, dll)	0,17	-2	-0,33	3 Untuk jalan nasional di kawasan pertanian seperti di Kawasan Prioritas Bromo-Tenger-Semeru, Selingkar Ijen, Madura Kepulauan, dan Selingkar Wilis terdapat beberapa ruas jalan nasional yang memiliki VCR > 1 dan	0,18	-3	-0,53	

RFW Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2034

FAKTOR INTERNAL					FAKTOR EKSTERNAL				
						kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam)			
4	Berdasarkan kondisi neraca air, tingkat kekritisasi Provinsi Jawa Timur berada pada kategori kritis air berat (24%), kritis sedang (72%), dan kritis ringan (3%). Indeks penggunaan air rata-rata adalah 50-100%.	0,17	-1	-0,17	4	Perlunya dorongan agar ada peningkatan pelaku pertanian atau petani milenial dan kurangnya nilai tambah produk pertanian dalam mendukung agroindustri dan agrobisnis	0,18	-3	-0,53
5	Wilayah kekeringan resiko tinggi diantaranya terdapat di Utara Jawa Timur meliputi Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik; Wilayah Selingkar Ijen meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember; wilayah Madura meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Selingkar Wilis. Wilayah-wilayah tersebut memiliki lahan pertanian yang luas.	0,25	-3	-0,75	5	Menurunnya produktivitas pertanian akibat alih fungsi lahan	0,18	-3	-0,53
					6	Tidak meratanya infrastruktur pendukung pertanian dan teknologi pertanian yang digunakan penduduk dalam kegiatan pertanian khususnya untuk industri pengolahan pertanian	0,18	-3	-0,53
Sub Total		1	0,93	-1,92	Sub Total		1		-2,88
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL		0,93			TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL		-0,13		

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan sektor pertanian berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan menjawab ancaman yang ada.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6.8 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pertanian

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus pertanian di Jawa Timur dikembangkan dengan strategi diversifikasi. Strategi meningkatkan produktivitas lahan dan nilai tambah pertanian tersebut dijabarkan menjadi:

1. Peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung (S1-S3-S4-T1-T6)
2. Penguatan konektivitas yang terintegrasi antar outlet produksi-pengolahan-pemasaran (IoT) (S1-S2-S5-T3)
3. Perlindungan lahan pertanian melalui pengembangan infrastruktur berketahanan bencana dan pengelolaan sumber daya air (S4-T2-T5)
4. Intensifikasi sektor pertanian melalui penggunaan varietas unggul dan teknologi, insentif bagi pelaku usaha tani, dan dukungan kelembagaan (S5-T4)

6.2.4 Penyusunan Strategi Fokus Pariwisata Alam dan Budaya

A. Analisis PESTLE (Makro)

Analisis PESTLE fokus pariwisata menunjukkan bahwa parameter ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini berarti bahwa fokus pariwisata memiliki potensi untuk memberikan kontribusi ekonomi yang maksimal terhadap PDRB Jawa Timur. Saat ini tingkat Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) sebagai satu dari 10 Destinasi Wisata Prioritas merupakan yang tertinggi dibandingkan 9 kawasan lain, dengan demikian KSPN BTS dianggap sebagai destinasi yang paling siap. Namun demikian tingkat investasi yang cukup tinggi ini harus diimbangi dengan strategi promosi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat yang memadai agar pengembangan Kawasan dapat maksimal.

Analisis PESTLE fokus pariwisata secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.12 Analisis Pestle (Makro) Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan

Pariwisata Alam Memiliki Potensi untuk Diangkat sebagai Sektor Unggulan di Jawa Timur			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH
<i>POLITICAL</i>	DPP Bromo-Tengger-Semeru termasuk ke dalam KSPN prioritas atau 10 Bali Baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pariwisata yang tidak mendegradasi lingkungan.	20%
<i>ECONOMIC</i>	DTW Unggulan Jatim berorientasi masa depan dengan dukungan stakeholder, pendanaan berkelanjutan, dan teknologi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan paling siap dibanding '9 Kawasan Bali Baru' lainnya, investasi PMA dan PMDN di TNBTS Rp 3 Triliun (2018) lebih besar dibandingkan total investasi di Danau Toba Rp 1,7 Triliun (2018).	Upaya yang dilakukan terhadap kawasan pariwisata bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur perlu dimanfaatkan dengan baik mengingat terdapat kebijakan nasional dan PMA dan PMDN yang dialokasikan untuk kawasan ini, jangan sampai tidak memberikan manfaat yang signifikan	27%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Keunikan Suku Tengger merupakan salah satu <i>culture site</i> yang dimiliki Jawa Timur, bahkan secara nasional	-	7%
<i>TECHNOLOGY</i>	Pada tingkat nasional, pariwisata Jawa Timur perlu memperhatikan pengelolaan situs dengan pengembangan nilai tambah dan branding kawasan khususnya untuk pariwisata berbasis alam (cagar biosfer).	-	13%
<i>LEGAL</i>	Terdapat 2 DPP, 4 KSPN, 10 KPPN, 1 KEK (Ekraf dan Pariwisata) sesuai dengan arahan pemerintah pusat.	Waspada untuk tidak menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata karena pariwisata mudah terguncang dan dipengaruhi faktor keamanan, penyakit, bencana alam, dll. Selain itu, selama pandemi terjadi penurunan kontribusi pariwisata di PDRB	20%
<i>ENVIRONMENT</i>	Jawa Timur memiliki karakter fisik kewilayahan yang cocok sebagai kawasan pariwisata termasuk di dalamnya kawasan <i>biosite</i> dan <i>culture site</i>	-	13%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis 5 Forces (Meso)

Ekonomi sebagai parameter yang paling berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan pertanian di dalam analisis makro menjadi input dalam penyusunan analisis meso (*5 Forces*). Dalam analisis tersebut didapati beberapa parameter lain yang juga berpengaruh yaitu terkait parameter ketergantungan saat ini pada dukungan jalan nasional Trans Jawa dan Pansela, pelabuhan penumpang utama, dan bandara utama sebagai gerbang menuju kawasan pariwisata unggulan. Analisis tingkat meso yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.13 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan

Pariwisata Alam Memiliki Potensi untuk Diangkat sebagai Sektor Unggulan di Jawa Timur		
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR		
Kualitas Yang Diinginkan	Share PDRB sektor pariwisata Jatim dengan pendekatan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum nasional sebesar 25,8% (2020), dimana Jateng (8,10%) dan Bali (8,3%).	Waspada untuk tidak menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata karena pariwisata mudah terguncang dan dipengaruhi faktor keamanan, penyakit, bencana alam, dll. Selain itu, selama pandemi terjadi penurunan kontribusi pariwisata di PDRB
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS		
Trend Eksisting	Terdapat 2 DPP, 4 KSPN, 10 KPPN, 1 KEK (Ekraf dan Pariwisata) sesuai dengan arahan pemerintah pusat.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pariwisata yang tidak mendegradasi lingkungan.
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS		
Ketergantungan Saat ini	Didukung oleh jalan nasional Trans Jawa dan Pansela, pelabuhan penumpang utama, dan bandara utama sebagai gerbang menuju kawasan pariwisata unggulan.	Terdapat jalan daerah akses utama KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang memiliki kondisi jalan kurang mantap, seperti ruas Kec Lumajang-Ranupani, Exit Tol Pasuruan-Tosari, dan Ruas Tosari-Kec. Tumpang. Beberapa ruas jalan nasional di Kawasan Prioritas Selingkar Ijen VCR >1 dan Selingkar Wilis VCR >0,8. Pada umumnya jalan nasional di kawasan prioritas memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam). Jalan ini menghubungkan Jatim dengan konstelasi di sekitarnya.
Kualifikasi Yang Dibutuhkan	Pada tingkat nasional, pariwisata Jawa Timur perlu memperhatikan pengelolaan situs dengan pengembangan nilai tambah dan branding kawasan khususnya untuk pariwisata berbasis alam (cagar biosfer).	Diperlukannya kolaborasi lintas sektor untuk pariwisata Jatim yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip "layak secara ekonomi, layak lingkungan, dapat diterima secara sosial, dan sesuai secara teknologi"
THREAT OF NEW ENTRANTS		
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	Adanya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan 5 PSN (2022) guna mendukung konektivitas kawasan unggulan pariwisata Jatim dengan wilayah sekitarnya.	Pulau Jawa diarahkan sebagai pusat pariwisata berdaya saing internasional dan Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana berdasarkan RTR Pulau Jawa-Bali.
THREAT OF SUBSTITUTES		
Trend Analisis PESTLE	DTW Unggulan Jatim berorientasi masa depan dengan dukungan stakeholder, pendanaan berkelanjutan, dan teknologi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan paling siap dibanding '9 Kawasan Bali Baru' lainnya, investasi PMA dan PMDN di TNBTS Rp 3 Triliun (2018) lebih besar dibandingkan total investasi di Danau Toba Rp 1,7 Triliun (2018).	Upaya yang dilakukan terhadap kawasan pariwisata bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur perlu dimanfaatkan dengan baik mengingat terdapat kebijakan nasional dan PMA dan PMDN yang dialokasikan untuk kawasan ini, jangan sampai tidak memberikan manfaat yang signifikan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT fokus pariwisata menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Jawa Timur. Masing-masing komponen kemudian dibobotkan untuk menghasilkan skor dan rating. Analisis SWOT tersebut dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 6.14 Skoring *Strengths* dan *Weaknesses* Fokus Pariwisata

		Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strengths	1	Share PDRB sektor pariwisata pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 5,56% (2022) terhadap perekonomian Jawa Timur (salah satu sektor unggulan setelah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian)	0,19	3	0,56
	2	Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang diakui internasional: global geopark di Gunung Sewu Pacitan, biosphere reserves di Blambangan dan Bromo Tengger Semeru yang memiliki ekosistem unik berupa kaldera di dalam kaldera, serta blue fire Ijen-diusulkan menjadi Global Geopark-hanya dapat ditemui di 2 lokasi di dunia.	0,19	2	0,38
	3	Daya tarik wisata wisatawan mancanegara (2020) paling banyak adalah menuju Kawah Ijen (33%); Bromo (11,89%); House of Sampoerna (11,80%); Kampung Buring (5,70%); Wisata agro stroberi (5,64%);	0,13	2	0,25
	4	Provinsi Jawa Timur memiliki peluang menangkap pasar wisatawan domestik dan internasional dari Bali serta berpeluang untuk menjadi destinasi tujuan utama wisatawan	0,19	3	0,56
	5	Peningkatan wisatawan mancanegara ke lokasi-lokasi pariwisata Jawa Timur, yang mana saat ini 90% masih didominasi wisnu dengan memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	0,13	2	0,25
	6	Pengembangan kawasan pariwisata Jatim, khususnya DPP Bromo-Tengger-Semeru dan DPP Baru Banyuwangi diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian Jawa Timur, salah satunya tergambar dalam struktur PDRB provinsi	0,19	3	0,56
Sub Total			1		2,56
Weaknesses	1	Jalan Lintas Selatan (Pansela) merupakan <i>backbone</i> pergerakan di sepanjang selatan Jawa Timur yang perlu dijamin kemantapan dan tingkat pelayanannya karena menghubungkan DTW di sepanjang pantai selatan	0,25	-1	-0,25
	2	Kemantapan jalan dan akses sanitasi masih perlu ditingkatkan di kawasan pariwisata nasional. Terdapat permukiman kumuh di kawasan yang terdapat pariwisata nasional, contohnya kawasan kumuh di Lumajang (1.338,48 ha), Jember (1.289,13 ha), Banyuwangi (890,68 ha)	0,25	-2	-0,50
	3	Perlunya pengembangan pariwisata tematik yang terintegrasi berbasis alam dan budaya dan peningkatan kualitas fasilitas wisata di Wilayah Tengah (Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Pasuruan).	0,17	-2	-0,33
	4	Lokasi-lokasi pariwisata perlu memperhatikan pembangunan terbatas/bersyarat	0,17	-1	-0,17
	5	Masih perlunya pembinaan terhadap pelaku pariwisata di Jawa Timur untuk meningkatkan kepuasan kunjungan wisatawan	0,17	-2	-0,33
Sub Total			1		-1,58
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL			0,98		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

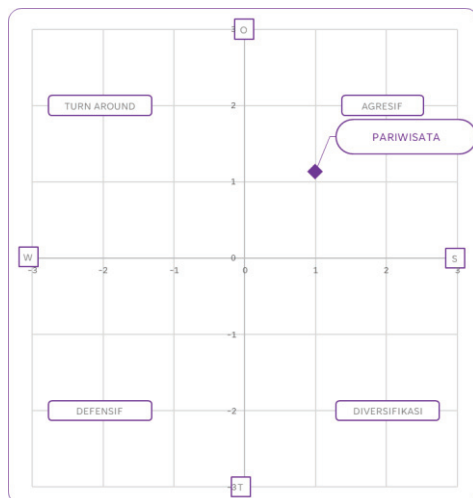
Tabel 6.15 Skoring *Opportunities* dan *Threats* Fokus Pariwisata

FAKTOR EKSTERNAL			Bobot	Rating	Skor
Opportunities	1	Share PDRB sektor pariwisata Jatim dengan pendekatan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum nasional sebesar 25,8% (2020), dimana Jateng (8,10%) dan Bali (8,3%).	0,14	3	0,43
	2	Terdapat 2 DPP, 4 KSPN, 10 KPPN, 1 KEK (Ekraf dan Pariwisata) sesuai dengan arahan pemerintah pusat.	0,21	3	0,64
	3	Didukung oleh jalan nasional Trans Jawa dan Pansela, pelabuhan penumpang utama, dan bandara utama sebagai gerbang menuju kawasan pariwisata unggulan	0,14	3	0,43
	4	Adanya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan 5 PSN (2022) guna mendukung konektivitas kawasan unggulan pariwisata Jatim dengan wilayah sekitarnya	0,14	3	0,43
	5	DTW Unggulan Jatim berorientasi masa depan dengan dukungan stakeholder, pendanaan berkelanjutan, dan teknologi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan paling siap dibanding '9 Kawasan Bali Baru' lainnya, investasi PMA dan PMDN di TNBTS Rp 3 Triliun (2018) lebih besar dibandingkan total investasi di Danau Toba Rp 1,7 Triliun (2018).	0,21	4	0,86
	6	Pada tingkat nasional, pariwisata Jawa Timur perlu memperhatikan pengelolaan situs dengan pengembangan nilai tambah dan branding kawasan khususnya untuk pariwisata berbasis alam (cagar biosfer).	0,14	3	0,43
Sub Total			1		2,79
Threats	1	Waspada untuk tidak menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata karena pariwisata mudah terguncang dan dipengaruhi faktor keamanan, penyakit, bencana alam, dll. Selain itu, selama pandemi terjadi penurunan kontribusi pariwisata di PDRB	0,13	-1	-0,13
	2	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 di Jatim memiliki tingkat risiko sedang secara nasional sehingga perlu dipertimbangkan kegiatan pariwisata yang tidak mendegradasi lingkungan.	0,20	-2	-0,40
	3	Terdapat jalan daerah akses utama KSPN Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang memiliki kondisi jalan kurang mantap, seperti ruas Kec Lumajang-Ranupani, Exit Tol Pasuruan-Tosari, dan Ruas Tosari-Kec. Tumpang. Beberapa ruas jalan nasional di Kawasan Prioritas Selingkar Ijen VCR >1 dan Selingkar Wilis VCR >0,8. Pada umumnya jalan nasional di kawasan prioritas memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam). Jalan ini menghubungkan Jatim dengan konstelasi di sekitarnya.	0,13	-2	-0,27
	4	Pulau Jawa diarahkan sebagai pusat pariwisata berdaya saing internasional dan Pulau Jawa bagian selatan yang berkembang memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana berdasarkan RTR Pulau Jawa-Bali.	0,13	-2	-0,27
	5	Upaya yang dilakukan terhadap kawasan pariwisata bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur perlu dimanfaatkan dengan baik mengingat terdapat kebijakan nasional dan PMA dan PMDN yang dialokasikan untuk kawasan ini, jangan sampai tidak memberikan manfaat yang signifikan	0,20	-3	-0,60
	6	Diperlukannya kolaborasi lintas sektor untuk pariwisata Jatim yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip "layak secara ekonomi, layak lingkungan, dapat diterima secara sosial dan sesuai secara teknologi"	0,20	-2	-0,40
Sub Total			0,80		-1,67
TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL			1,12		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran agresif, yang berarti

bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6.9 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*, fokus pariwisata di Jawa Tengah dikembangkan dengan strategi agresif, yakni strategi pengembangan dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada. Strategi meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan tersebut dijabarkan menjadi:

1. Penyediaan layanan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di kawasan pariwisata (S1-S6-O1-O2-O5)
2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar Daya Tarik Wisata (DTW) dengan hub transportasi dan antar Jawa-Bali untuk meningkatkan daya saing internasional (IoT) (S2-S4-O3-O4)
3. Mendorong ekosistem pariwisata melalui inovasi kuliner, pendanaan, teknologi, dan *branding* pariwisata (S5-O6)
4. Perlindungan fisik lingkungan dan penanganan kebencanaan untuk pariwisata alam yang berkelanjutan (S2-O5)
5. Peningkatan kualitas pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan dan penguatan kelembagaan pariwisata (S3-S5-O6)

6.2.5 Perumusan Strategi Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan

A. Analisis PESTLE (Makro)

Analisis PESTLE fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan menunjukan bahwa parameter ekonomi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini berarti bahwa PKN Gerbangkertosusila dan PKN Malang sebagai pusat pelayanan perkotaan utama di Jawa Timur memiliki posisi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Metropolitan Gerbangkertosusila sendiri merupakan Kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Hal ini tentunya memberikan

tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Analisis PESTLE fokus infrastruktur dasar Kawasan perkotaan secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6.16 Analisis Pestle (Makro) Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan

Tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur menimbulkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan keberlanjutan lingkungan di Kawasan Perkotaan			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT
<i>POLITICAL</i>	Dukungan kebijakan terhadap Jawa timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri, kawasan perkotaan, pertanian	penetapan status peraturan daerah terkait RTRW Kab./Kabupaten yang tidak seragam	18%
<i>ECONOMIC</i>	WM Gerbangkertosusila merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek	Daya dukung dan daya tampung lahan terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan dalam pengembangan UMKM	29%
<i>SOCIOLOGICAL</i>	Kabupaten/kota pada koridor Pantai Selatan Jawa Timur memiliki potensi pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, namun saat ini masih terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan pembangunan di koridor utara	Koridor utara menjadi ancaman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	6%
<i>TECHNOLOGY</i>	-	-	6%
<i>LEGAL</i>	WM Gerbangkertosusila dan Malang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam RTRWN sehingga menyandang fungsi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional serta pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional	adanya potensi tidak terjadinya komunikasi lintas level pemerintahan dalam percepatan pengembangan PKN/PKW	24%
<i>ENVIRONMENT</i>	Tingkat akses sanitasi aman sebesar 6,79% melalui pelayanan 6 IPAL eksisting, sedangkan tingkat akses sanitasi layak sebesar 76% yang difasilitasi 11 infrastruktur IPLT.	Layanan air minum perpipaan rata-rata di Jawa Timur hanya 20,45%, dibawah rata-rata nasional 20,69 pada tahun 2022	18%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

B. Analisis 5 Forces (Meso)

Ekonomi sebagai parameter yang paling berpengaruh terhadap pengembangan Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan di dalam analisis makro menjadi input dalam penyusunan analisis meso (*5 Forces*). Dalam analisis tersebut didapati beberapa parameter lain yang juga berpengaruh yaitu terkait parameter tren eksisting, dimana konsentrasi kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur saat ini dominan berada di koridor Pantai Utara Jawa Timur dan Metropolitan Gerbangkertosusila. Hal ini menimbulkan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi Kawasan permukiman pada episentrum pertumbuhan penduduk. Analisis tingkat meso yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.17 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan

Tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Jawa Timur menimbulkan tekanan terhadap penyediaan infrastruktur dasar dan keberlanjutan lingkungan di Kawasan Perkotaan		
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR		
Konversi Threat Menjadi Opportunity	Metropolitan Gerbangkertosusila sebagai kawasan andalan (prioritas) pembangunan Jawa Timur dan merupakan motor ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah dan Bali	Diapit oleh 2 metropolitan yang sedang tumbuh cepat secara regional yaitu WM Kedungsepur dan WM Sarbagita. Jika WM Gerbangkertosusila stagnan secara ekonomi atau infrastruktur, bukan tidak mungkin WM disekitarnya yang mengangkat potensi ekonomi wilayah secara regional kawasan
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS		
Trend Eksisting	Konsentrasi kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di dominasi di Koridor Pantai Utara pada Perkotaan Gerbangkertosusila	Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman pada episentrum pertumbuhan penduduk
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS		
Daya Dukung Eksisting	Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan perkotaan prioritas provinsi dan nasional	Jawa Timur memiliki limitasi kebencanaan seperti gunung berapi, longsor, banjir rob, dan abrasi pantai
THREAT OF NEW ENTRANTS		
Strategi Untuk Memenangkan Kompetisi	Optimalisasi pusat kegiatan nasional Malang sebagai simpul pengembangan kawasan perkotaan berbasis ekonomi pertanian dan pariwisata sebagai upaya dekonsentrasi pertumbuhan di PKN Gerbangkertosusila	Limitasi pengembangan perkotaan Malang sebagai simpul ekonomi baru di Jawa Timur
THREAT OF SUBSTITUTES		
Trend Analisis PESTLE	WM Gerbangkertosusila merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek	Daya dukung dan daya tampung lahan terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan dalam pengembangan UMKM

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT fokus infrastruktur dasar kawasan perkotaan menjabarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pengembangan kawasan perkotaan di Jawa Timur. Masing-masing komponen kemudian dibobotkan untuk menghasilkan skor dan rating. Pada faktor internal didapati kekuatan pengembangan kawasan perkotaan, yaitu: 1) peningkatan perekonomian wilayah Jawa Timur dapat terwujud melalui pemerataan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan; dan 2) Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan sektor ekonomi lain dapat dikendalikan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 3) Terpenuhi kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa dalam mendukung pengembangan SDM kawasan perkotaan di Jawa Timur

Adapun kelemahan pengembangan kawasan perkotaan dengan bobot tertinggi, yaitu: 1) WM Gerbangkertosusila sebagai pusat pelayanan wilayah Jawa Timur juga menyandang fungsi ganda sebagai core penggerak sektor industri pengolahan; 2) Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah; 3) Terbatasnya pendanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar kawasan perkotaan; 4) Persentase pelayanan akses air

minum perpipaan di Provinsi Jawa Timur masih rendah yakni dengan rata-rata sebesar 20,45%; dan 5) Terdapat ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan permukiman. Di Gerbangkertosusila Plus terjadi pengurangan lahan sebanyak 8,01% per tahun (53.532 Ha).

Pada faktor eksternal didapati beberapa peluang pengembangan kawasan perkotaan di Jawa Timur, yaitu: 1) WM Gerbangkertosusila merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek; 2) Optimalisasi PKN Malang sebagai simpul pengembangan kawasan perkotaan berbasis ekonomi pertanian dan pariwisata sebagai upaya dekonsentrasi pertumbuhan di PKN Gerbangkertosusila; 3) Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas provinsi dan nasional; 4) Konsentrasi kepadatan penduduk dan ekonomi Jawa Timur di dominasi di Koridor Pantai Utara pada Perkotaan Gerbangkertosusila; 5) Metropolitan Gerbangkertosusila sebagai kawasan andalan (prioritas) pembangunan Jawa Timur dan merupakan motor ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah dan Bali.

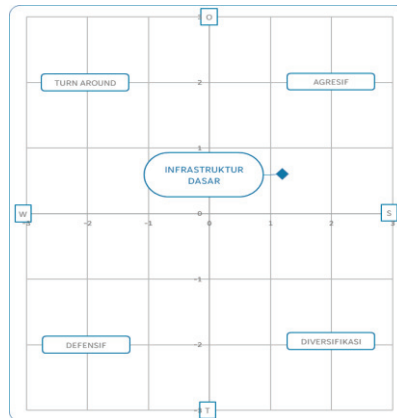
Adapun ancaman eksternal terhadap kawasan perkotaan di Jawa Timur, yaitu: 1) Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman pada episentrum pertumbuhan penduduk; 2) Jawa Timur memiliki limitasi kebencanaan seperti gunung berapi, longsor, banjir rob dan abrasi pantai; 3) Limitasi pengembangan perkotaan Malang sebagai simpul ekonomi baru di Jawa Timur; 4) Daya dukung dan daya tampung lahan terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan dalam pengembangan UMKM; dan 5) Diapit oleh 2 metropolitan yang sedang tumbuh cepat secara regional yaitu WM Kedungsepur dan WM Sarbagita. Jika WM Gerbangkertosusila stagnan secara ekonomi atau infrastruktur, bukan tidak mungkin WM disekitarnya yang mengangkat potensi ekonomi wilayah secara regional kawasan.

Analisis SWOT tersebut dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 6.18 Analisis SWOT Fokus Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan

FAKTOR INTERNAL					FAKTOR EKSTERNAL				
	Strengths	Bobot	Rating	Skor	Opportunities	Bobot	Rating	Skor	
1	Terwujudnya pemerataan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan di Jawa Timur guna meningkatkan perekonomian wilayah	0,25	3	0,75	1Metropolitan Gerbangkertosusila sebagai kawasan andalan (prioritas) pembangunan Jawa Timur dan merupakan motor ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah dan Bali	0,17	1	0,17	
2	Terpenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur air minum layak mencapai 100% dan perpipaan 30% di seluruh perkotaan di Jawa Timur	0,17	2	0,33	2Konsentrasi kepadatan penduduk dan ekonomi Jawa Timur di dominasi di Koridor Pantai Utara pada Perkotaan Gerbangkertosusila	0,17	2	0,33	
3	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan sektor ekonomi lain dapat dikendalikan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	0,25	3	0,75	3Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas provinsi dan nasional	0,17	3	0,50	
4	Terpenuhinya akses sanitasi layak dengan target sebesar 90% di kawasan perkotaan dan penanganan sampah sebesar 70% di Provinsi Jawa Timur	0,17	2	0,33	4Optimalisasi Pusat Kegiatan Nasional Malang sebagai simpul pengembangan kawasan perkotaan berbasis ekonomi pertanian dan pariwisata sebagai upaya dekonsentrasi pertumbuhan di PKN Gerbangkertosusila	0,25	3	0,75	
5	Terpenuhi kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa dalam mendukung pengembangan SDM kawasan perkotaan di Jawa Timur	0,17	4	0,67	5WM Gerbangkertosusila merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek	0,25	4	1	
	Sub Total	1		2,83	Sub Total	1		2,75	
	Weaknesses	Bobot	Rating	Skor	Threats	Bobot	Rating	Skor	
1	Terbatasnya pendanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan infrastruktur dasar kawasan perkotaan	0,21	-1	-0,21	1Diapit oleh 2 metropolitan yang sedang tumbuh cepat secara regional yaitu WM Kedungsepur dan WM Sarbagita. Jika WM Gerbangkertosusila stagnan secara ekonomi atau infrastruktur, bukan tidak mungkin WM disekitarnya yang mengangkat potensi ekonomi wilayah secara regional kawasan	0,21	-1	-0,21	
2	WM Gerbangkertosusila sebagai pusat pelayanan wilayah Jawa Timur juga menyandang fungsi ganda sebagai core penggerak sektor industri pengolahan	0,21	-3	-0,64	2Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman pada epentrum pertumbuhan penduduk	0,21	-3	-0,64	
3	Persentase pelayanan akses air minum perpipaan di Provinsi Jawa Timur masih rendah yakni dengan rata - rata sebesar 20,45%	0,21	-1	-0,21	3Jawa Timur memiliki limitasi kebencanaan seperti gunung berapi, longsor, banjir rob dan abrasi pantai	0,14	-3	-0,43	
4	Terdapat ancaman alih fungsi lahan pertanian untuk industri dan permukiman. Di Gerbangkertosusila Plus terjadi pengurangan lahan sebanyak 8,01% per tahun (53.532 Ha)	0,14	-1	-0,14	4Limitasi pengembangan perkotaan Malang sebagai simpul ekonomi baru di Jawa Timur	0,21	-2	-0,43	
5	Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah.	0,21	-2	-0,43	5Daya dukung dan daya tampung lahan terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat perkotaan dalam pengembangan UMKM	0,21	-2	-0,43	
	Sub Total	1		-1,64	Sub Total	0,80		-2,14	
	TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL		1,19		TOTAL SKOR FAKTOR EKSTERNAL		0,61		

Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perkotaan berada pada kuadran agresif, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6.10 Kuadran kartesius penentuan strategi fokus perkotaan

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus infrastruktur dasar kawasan perkotaan di Jawa Timur dikembangkan dengan strategi diversifikasi, yakni strategi pengembangan dengan memanfaatkan kekuatan dan menjawab ancaman yang ada. Strategi pemenuhan standar pelayanan minimal perkotaan tersebut dijabarkan menjadi:

1. Akselerasi penyediaan infrastruktur dasar untuk mencapai target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal perkotaan (S2 - O3)
2. Penguatan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan di koridor utara, tengah, dan selatan guna mendorong pemerataan pembangunan (S1 - O1 - O2)
3. Percepatan penyediaan sarana prasarana perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang berdaya saing (S3 - S4 - O4 - O5)
4. Pengembangan Compact City pada kawasan perkotaan prioritas (S5 - O1 - O3 - O5)

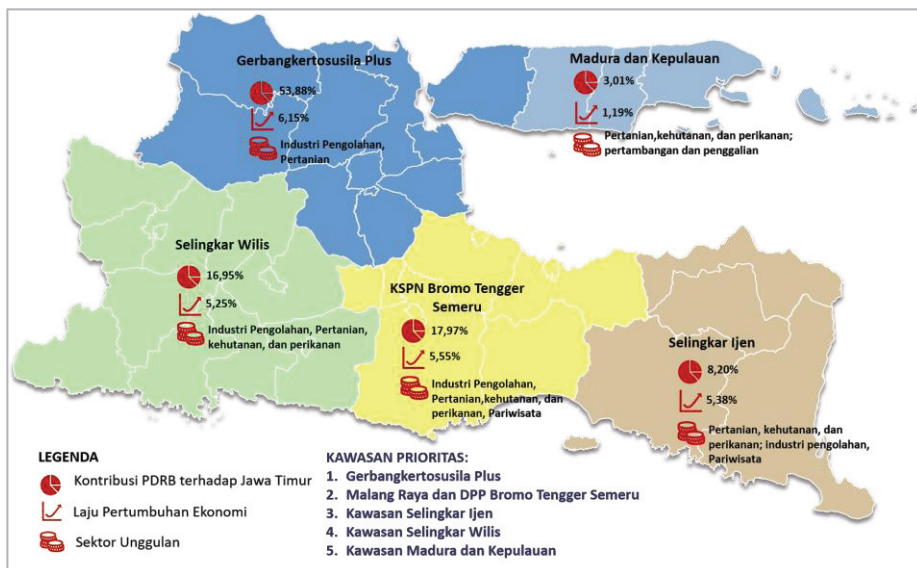
6.3 Skenario Pengembangan (Prioritas dan Tahapan)

Sub bab ini menjelaskan bagaimana proses dari penentuan kawasan prioritas serta tahapan penanganannya yang didasari pada potensi permasalahan kawasan, isu strategis, dan strategi pengembangan wilayah. Adapun prioritas dan pentahapan pengembangan dilakukan untuk mengoptimalkan isu strategis dan grand strategi pada masing-masing sektor.

6.3.1 Penentuan Kawasan Prioritas

Penentuan Kawasan Prioritas di Jawa Timur didasarkan pada sintesis kebijakan yang terdiri dari kebijakan penataan ruang, kebijakan sektoral, agenda global, serta hasil analisis lainnya. Maka terpilih 5 kawasan prioritas

2023-2029 meliputi Kawasan Prioritas Gerbangkertosusilo Plus, Selingkar Wilis, Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Ijen, dan Madura Kepulauan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 6.11 Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur

Dalam penanganannya, di dalam kawasan prioritas terdapat kawasan utama yang penanganannya akan diprioritaskan (terdefinisi dalam rencana aksi). Kawasan utama tsb memberikan dampak lanjutan (*spillover*) ke wilayah sekitarnya yang berada dalam satu (1) kawasan prioritas. *Scoring* dibawah ini bertujuan untuk mengetahui kawasan utama tersebut memiliki tingkat kepentingan berdasarkan kriteria yang telah disusun. Prioritisasi kawasan merupakan mekanisme menentukan tahapan pengembangan kawasan kedepannya.

A. Industri Pengolahan

Penilaian dan penentuan prioritisasi kawasan didasari oleh 6 kriteria yaitu (1) Kawasan prioritas perencanaan nasional (RTRWN, dan RPJMN), (2) Kawasan yang memiliki dampak ekonomi skala nasional & internasional, (3) kawasan dengan kontribusi besar terhadap PDRB, (4) Kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi baru, (5) Kawasan dengan dukungan infrastruktur memadai, (6) Kesesuaian kawasan dengan permasalahan dan isu strategis wilayah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.19 Parameter Penilaian Fokus Industri

Kode	Parameter	Penilaian
1	Kawasan Prioritas pada perencanaan nasional (RTRWN & RPJMN)	1 = Termuat dalam RPJMN namun tidak dijelaskan detail penanganannya 2 = Termuat dalam RPJMN namun hanya dijelaskan singkat terkait arahan penanganannya 3 = Termuat dalam RPJMN dan dijelaskan terperinci arahan pengembangan kawasan
2	Kawasan yang memiliki dampak ekonomi skala nasional & internasional	1 = Dampak dihasilkan hanya berskala lokal (Kecamatan & Kota) 2 = Dampak dihasilkan berskala mikro (skala provinsi) 3 = Dampak dihasilkan berskala makro (regional hingga nasional)
3	Kawasan dengan kontribusi besar terhadap PDRB	1 = Kontribusi Kawasan terhadap sektor industri kurang dari 10 persen total dari kontribusi sektor 2 = Kontribusi kawasan terhadap sektor industri antara 10 - 30 persen total dari kontribusi sektor 3 = Kontribusi kawasan terhadap sektor industri besar dari 30 persen dari total kontribusi sektor
4	Kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi baru	1 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru tidak tersedia (hanya 1 komoditas dalam kawasan) 2 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru tersedia secara terbatas 3 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru tersedia lebih dari 2 alternatif (perikanan, perkebunan, tanaman pangan dll)
5	Kawasan dengan dukungan infrastruktur memadai	1 = Tidak tersedia infrastruktur pendukung (transportasi, air baku, limbah dll) 2 = Tersedia beberapa infrastruktur pendukung (hanya transportasi dan limbah) 3 = Tersedianya infrastruktur pendukung kawasan
6	Kesesuaian kawasan dengan permasalahan dan isu strategis wilayah	1 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor industri secara mikro dan meso rendah 2 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor industri secara mikro dan meso sedang 3 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor industri secara mikro dan meso tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.20 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Industri

No	Indikasi	Cluster	Kriteria						Total
			1	2	3	4	5	6	
1	KEK Gresik	Kawasan Prioritas Gerbang-kertosusilo Plus & WPPI	3	2	2	2	3	2	14
2	KI Gresik		3	3	3	1	3	2	15
3	KI Bangkalan		1	1	1	1	2	2	8
4	KI Lamongan		1	2	2	2	2	2	11
5	KI Jombang		1	1	1	2	1	2	8
6	KI Tuban		2	1	1	2	2	1	9
7	KEK Singasari	PKN Malang	2	2	2	3	2	1	12
8	Kawasan Industri Banyuwangi dsk	Selingkar Ijen	1	1	1	3	2	1	9

Peringkat 1
Peringkat 2
Peringkat 3
Peringkat 4
Peringkat 5

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil skoring yang telah dilakukan terhadap kriteria yang ada, bahwa prioritas kawasan industri yaitu Kawasan Industri Gresik kemudian disusul oleh KEK JIPE Gresik yang

berada pada aglomerasi kawasan WM Gerbangkertosusila Plus dan KEK Singhasari yang merupakan bagian dari PKN Malang Raya. Prioritisasi yang dilakukan tidak menganulir kawasan industri lainnya dalam penanganan dan pengembangan kawasan tersebut, namun lebih kepada urgensi penanganan pada tahap awal.

B. Pertanian Tanaman Pangan

Penilaian dan penentuan prioritasasi kawasan pertanian didasari oleh 5 kriteria yaitu (1) Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD), (2) Kebutuhan irigasi teknis lahan pertanian, (3) Kesesuaian dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN) dan/atau PSN, (4) Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB, (5) Disebutkan Permen PUPR No. 14/2015 tentang Penetapan Daerah Irigasi dan/atau terdapat rencana/sedang dikerjakan oleh PUPR, (6) Urgensi Kebutuhan Infrastruktur untuk Penunjang Pertanian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.21 Parameter Penilaian Fokus Pertanian

Kode	Parameter	Penilaian
1	Luas Lahan Sawah Dilindungi	1 = <30.000 Ha 2 = 30.000-60.000 Ha 3 = >60.000 Ha Berdasarkan Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
2	Kebutuhan Irigasi Teknis Lahan Pertanian	1 = Luas LP2B Non DI 0-40% 2 = Luas LP2B Non DI 41-70% 3 = Luas LP2B Non DI >70% dan/atau adanya urgency pembangunan/peningkatan bendungan/jaringan irigasi
3	Kesesuaian dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJMN) dan/atau PSN	1 = Termuat dalam RPJMN namun tidak dijelaskan detail penanganannya 2 = Termuat dalam RPJMN namun hanya dijelaskan singkat terkait arahan penanganannya 3 = Termuat dalam RPJMN dan dijelaskan terperinci arahan pengembangan kawasan
4	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	1 = Kontribusi terhadap Pertanian Provinsi Jawa Timur sebesar <1% 2 = Kontribusi terhadap Pertanian Provinsi Jawa Timur sebesar 1-3% 3 = Kontribusi terhadap Pertanian Provinsi Jawa Timur sebesar >3% Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021
5	Disebutkan Permen PUPR No. 14/2015 tentang Penetapan Daerah Irigasi dan/atau terdapat rencana/sedang dikerjakan oleh PUPR	1 = Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2 = Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi 3 = Terdapat Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau rencana/sedang pembangunan yang dikerjakan PUPR mendukung sektor pertanian
6	Urgensi Kebutuhan Infrastruktur untuk Penunjang Pertanian	1 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pertanian secara mikro dan meso rendah 2 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pertanian secara mikro dan meso sedang 3 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pertanian secara mikro dan meso tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.22 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pertanian

No	Lokus Kawasan	Cluster	Kriteria						Total
			1	2	3	4	5	6	
1	Jember	Kawasan Prioritas Selingkar Ijen	3	1	1	3	3	1	12
2	Banyuwangi		3	3	3	3	3	3	18
3	Bondowoso		2	2	1	1	3	2	11
4	Lamongan	Kawasan Prioritas Gerbang-kertosusila	3	2	3	3	3	3	17
5	Bojonegoro		3	3	1	3	3	1	14
6	Tuban		3	2	1	3	3	2	14
7	Ngawi	Kawasan Prioritas Selingkar Wilis	2	2	3	2	3	2	14
8	Nganjuk		2	1	3	2	3	3	14
9	Ponorogo		2	2	3	2	3	3	15
10	Trenggalek		1	2	3	2	3	3	14
11	Lumajang	Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	1	2	3	3	3	3	15
12	Malang		2	2	3	3	3	3	16
13	Probolinggo		2	2	3	3	3	3	16
14	Pasuruan		2	1	3	3	0	1	10
15	Sampang	Kawasan Prioritas Madura dan Kepulauan	2	3	3	2	3	3	16
16	Bangkalan		2	3	1	2	0	3	11

Prioritas 1

Prioritas 2

Prioritas 3

Prioritas 4

Prioritas 5

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil skoring berdasarkan kriteria menunjukkan bahwa kawasan prioritas pada sektor pertanian yaitu Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Malang, Probolinggo, Sampang, Ponorogo, Lumajang, Nganjuk, dan Trenggalek. Daftar lokus kawasan yang menjadi prioritas secara langsung akan memberikan percepatan pengembangan kawasan aglomasinya.

C. Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan

Penilaian dan penentuan prioritasasi kawasan pariwisata didasari oleh 5 kriteria yaitu (1) Kawasan Prioritas Pada Perencanaan Nasional/Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024/RTRWN), (2) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (RIPPARNAS), (3) Kebijakan Internasional (UNESCO) dan Lainnya, (4) Kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi baru di sektor pariwisata, (5) Urgensi Kebutuhan Infrastruktur untuk penunjang pariwisata. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.23 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

Kode	Parameter	Penilaian
1	Kawasan Prioritas Pada Perencanaan Nasional/Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024/RTRWN)	0 = Tidak Ada/NA 1 = Termuat dalam RPJMN namun tidak dijelaskan detail penanganannya 2 = Termuat dalam RPJMN namun hanya dijelaskan singkat terkait arahan penanganannya 3 = Termuat dalam RPJMN dan dijelaskan terperinci arahan pengembangan kawasan

Kode	Parameter	Penilaian
2	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (RIPPARNAS)	1 = Termuat dalam RIPPARNAS namun tidak dijelaskan detail penanganannya di dokumen formal lainnya 2 = Termuat dalam RIPPARNAS atau dijelaskan detail dengan dukungan dokumen formal lainnya 3 = Termuat dalam RIPPARNAS dan dijelaskan detail dengan dukungan dokumen formal lainnya
3	Kebijakan Internasional (UNESCO) dan Lainnya	1 = Tidak Termuat dalam UNESCO namun memiliki potensi terbatas sebagai pariwisata internasional 2 = Tidak Termuat dalam UNESCO namun memiliki potensi besar sebagai pariwisata internasional 3 = Termuat dalam UNESCO dan dalam kebijakan internasional lainnya
4	Kawasan dengan potensi pengembangan ekonomi baru di sektor pariwisata	1 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru yang tergambar dalam struktur ekonomi tersedia terbatas 2 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru yang tergambar dalam struktur ekonomi tersedia menengah 3 = Alternatif pengembangan potensi ekonomi baru yang tergambar dalam struktur ekonomi tersedia tinggi
5	Urgensi Kebutuhan Infrastruktur untuk penunjang pariwisata	1 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso rendah 2 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso sedang 3 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.24 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata

No	Indikasi	Cluster	Kriteria					Total
			1	2	3	4	5	
1	DPP Bromo-Tengger-Semeru (BTS)	Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	3	3	3	3	3	60
	KSPN Bromo-Tengger-Semeru		3	3	3	3	3	
	KPPN Bromo-Tengger-Semeru		3	3	3	3	3	
	KEK Singhasari		0	2	1	2	2	
	KPPN Batu-Malang		0	2	2	2	2	
2	DPP Baru Banyuwangi	Kawasan Prioritas Selingkar Ijen	3	3	3	3	3	61
	KSPN Ijen-Baluran		3	3	3	3	3	
	KPPN Ijen Baluran		3	3	3	3	3	
	KPPN G-Land Alas Purwo		0	2	1	2	3	
	KPPN Meru Betiri		0	2	1	2	3	
3	KSPN Karst Pacitan	Kawasan Prioritas Selingkar Wilis	0	2	3	3	3	19
	KPPN Blitar-Kediri		0	2	1	2	3	
4	KSPN Trowulan	Kawasan Prioritas Gerbangkertokusilo	0	2	1	2	1	18
	KPPN Trowulan		0	2	1	2	1	
	KPPN Surabaya Kota		0	2	1	2	1	
5	KPPN Pamekasan	Kawasan Prioritas Madura dan Kepulauan	0	2	1	2	3	18
	KPPN Sumenep		0	2	2	3	3	

Prioritas 1
Prioritas 2
Prioritas 3
Prioritas 4
Prioritas 5

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil skoring berdasarkan kriteria menunjukkan bahwa kawasan prioritas pada sektor pariwisata yaitu prioritas pertama yaitu Kawasan Selingkar Ijen yang didalamnya mencakup DPP Baru Banyuwangi, KSPN Ijen Baluran, KPPN G-Land Alas Purwo dan KSPN Meru Betiri. Prioritas kedua yaitu Kawasan Bromo Tengger Semeru yang didalamnya mencakup KEK Singhasari, KPPN Batu Malang, dan KSPN Bromo Tengger Semeru. Prioritas ketiga adalah Kawasan Selingkar Wilis yang didalamnya mencakup KSPN Karst Pacitan dan KSPN Blitar - Kediri.

D. Pelayanan Dasar Perkotaan

Penilaian dan penentuan prioritasasi kawasan perkotaan didasari oleh 6 kriteria yaitu (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), (2) Kepadatan Penduduk, (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (4) Akses Air Minum Layak, (5) Akses Sanitasi Layak, dan (6) Luasan Kawasan Kumuh. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.25 Parameter Penilaian Fokus Perkotaan

Kode	Parameter	Penilaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1 = LPE > 5 ; 2 = LPE 4,6 - 5.0 ; 3 = LPE < 4.6 (Laju PDRB ADHK 2022)
2	Kepadatan Penduduk	1 = < 2 Jiwa/Ha ; 2 = 2 - 4,5 Jiwa/Ha ; 3 = > 4,5 Jiwa/Ha
3	Akses Air Minum Layak	1 = > 95 % ; 2 = 91 - 95 % ; 3 = < 91 %
4	Akses Sanitasi Layak	1 = > 90 % ; 2 = 80 - 90 % ; 3 = < 80 %
5	Luasan Kawasan Kumuh	1 = 0 - 300 Ha ; 2 = 300 - 500 Ha ; 3 = > 500 Ha
6	Urgensi Kebutuhan Infrastruktur dasar untuk penunjang kegiatan di kawasan perkotaan	1 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso rendah 2 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso sedang 3 = Tingkat keterdesakan (urgency) penyelesaian permasalahan sektor pariwisata secara mikro dan meso tinggi

Tabel 6.26 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Kawasan Perkotaan

No	Indikasi	Cluster	Skor / Kriteria						Total
			1	2	3	4	5	6	
1	PKN Gerbangkertosusila	WM Gerbangkertosusila Plus	1	3	1	1	1	1	8
2	PKW Tuban		1	3	1	3	1	1	10
3	PKW Bojonegoro		3	3	1	2	1	1	11
4	PKW Kediri	Selingkar Wilis	3	2	1	1	2	2	11
5	PKW Madiun		2	3	1	1	1	1	9
6	PKW Blitar		1	3	1	1	1	1	8
7	PKW Pacitan		1	2	2	3	1	1	10
8	PKW Trenggalek		3	3	2	3	1	1	13
9	PKW Tulungagung		1	3	1	3	1	1	10
10	PKN Malang	DPP Bromo Tengger Semeru	1	3	1	2	1	1	9
11	PKW Probolinggo		1	2	1	2	1	2	9
12	PKW Pasuruan		1	3	1	2	1	1	9
13	PKW Banyuwangi	Selingkar Ijen	3	3	3	3	3	3	18
14	PKW Jember		3	3	3	3	3	3	18
15	PKW Pamekasan	Madura dan Kepulauan	2	3	3	3	1	3	15
16	PKW Sumenep		3	3	1	3	1	3	14
	Prioritas 1								
	Prioritas 2								
	Prioritas 3								
	Prioritas 4								
	Prioritas 5								

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil skoring berdasarkan kriteria menunjukkan bahwa kawasan prioritas pada sektor kawasan perkotaan yaitu prioritas pertama Kawasan aglomerasi WM Gerbangkertosusila yang didalamnya mencakup Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto. Prioritas kedua yaitu kawasan aglomerasi perkotaan di sekitar Selingkar Wilis yang didalamnya mencakup Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kabupaten Tulungagung. Prioritas ketiga adalah kawasan aglomerasi perkotaan sekitar DPP Bromo-Tengger-Semeru yang didalamnya mencakup Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.

6.3.2 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pentahapan pengembangan kawasan prioritas dilakukan guna memberikan fokus utama dalam penyelesaian dan efektifitas pelaksanaan pengembangan wilayah akan isu strategis di Provinsi Jawa Timur. Adapun dasar penentuan tahapan waktu penanganan berdasarkan penentuan kawasan prioritas yang dibahas sebelumnya. Lebih jelasnya dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 6.27 Tahapan Pengembangan Kawasan Prioritas

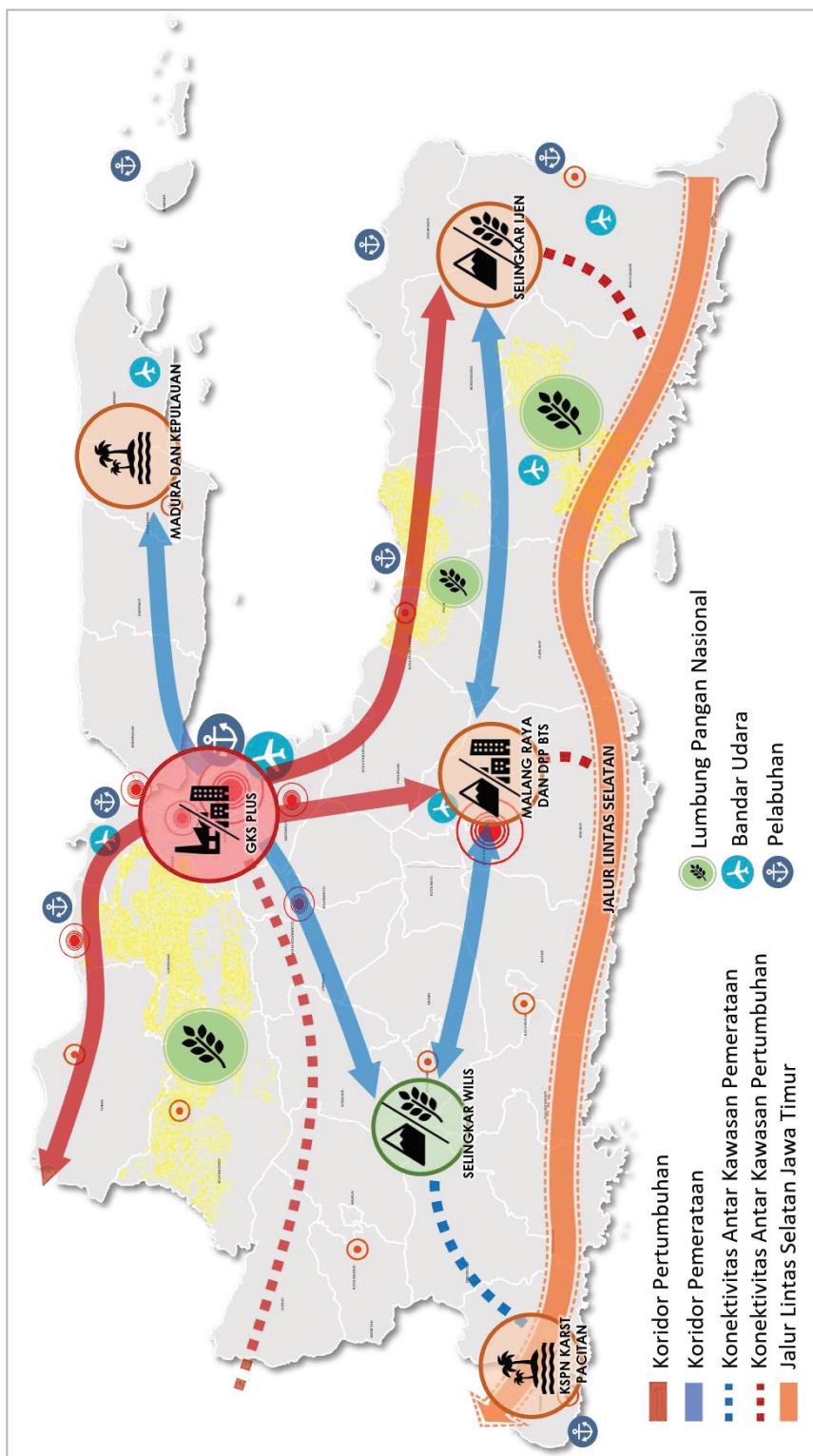
No	Fokus	Lokus Kawasan	Kawasan Prioritas	Tahap I 2023- 2029	Tahap II 2030 - dst
1	Industri Pengolahan	KEK Gresik	Kawasan Prioritas Gerbang- kertosusilo Plus & WPPI		
		KI Gresik			
		KI Bangkalan			
		KI Lamongan			
		KI Jombang			
		KI Tuban			
		KEK Singasari	PKN Malang		
2	Pertanian	Kawasan Industri Banyuwangi dsk	Selingkar Ijen		
		Jember	Kawasan Prioritas Selingkar Ijen		
		Banyuwangi			
		Bondowoso			
		Lamongan	Kawasan Prioritas Gerbangkertosusilo		
		Bojonegoro			
		Tuban			
		Ngawi	Kawasan Prioritas Selingkar Wilis		
		Nganjuk			
		Ponorogo			
		Trenggalek			
		Lumajang	Kawasan Prioritas Bromo-Tengger- Semeru		
		Malang			
		Probolinggo			
		Pasuruan			
		Sampang	Kawasan Prioritas Madura dan Kepulauan		
		Bangkalan			
3	Pariwisata	DPP Bromo- Tengger-Semeru (BTS)	Kawasan Prioritas Bromo-Tengger- Semeru		
		KSPN Bromo- Tengger-Semeru			
		KPPN Bromo- Tengger-Semeru			
		KEK Singhasari			
		KPPN Batu- Malang	Kawasan Prioritas Selingkar Ijen		
		DPP Banyuwangi Baru			
		KSPN Ijen-Baluran			
		KPPN Ijen Baluran			
		KPPN G-Land Alas Purwo			
		KPPN Meru Betiri			
		KSPN Karst Pacitan	Kawasan Prioritas Selingkar Wilis		

No	Fokus	Lokus Kawasan	Kawasan Prioritas	Tahap I 2023- 2029	Tahap II 2030 - dst
		KPPN Blitar-Kediri	Kawasan Prioritas Gerbangkertosusilo		
		KSPN Trowulan			
		KPPN Trowulan			
		KPPN Surabaya Kota	Kawasan Prioritas Madura dan Kepulauan		
		KPPN Pamekasan			
		KPPN Sumenep			
4	Perkotaan	Gresik	WM Gerbangkertosusila		
		Bangkalan			
		Mojokerto			
		Surabaya			
		Sidoarjo			
		Lamongan			
		Tulungagung	Selingkar Willis		
		Trenggalek			
		Ponorogo			
		Madiun			
		Kediri			
		Pasuruan			
		Malang	DPP Tengger Semeru		
		Lumajang			
		Probolinggo			
		Situbondo			
		Banyuwangi	Selingkar Ijen		
		Bondowongso			
		Sumenep	Madura dan Kepulauan		
		Sampang			
		Pamekasan			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tahapan pengembangan kawasan prioritas didasari oleh sektor strategis pengembangan wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 1 dengan periode penanganan 2023-2029 dan tahap 2 dengan periode penanganan 2030 – dan seterusnya. Hal ini dikarenakan penanganan yang terfokus pada tahap 1 akan memberikan efek stimulan terhadap kawasan sekitarnya. Selain itu, skala penanganan pada kawasan prioritas juga dilihat pada kontribusi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga terkait (BUMN). Hal ini terperinci pada turunan strategi pengembangan wilayah yang dijabarkan pada rencana aksi pengembangan wilayah Jawa Timur pada 4 empat sektor strategis.

Justifikasi kawasan prioritas dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti arahan kebijakan, potensi wilayah, dan permasalahan kewilayahan dan infrastruktur. Justifikasi kawasan prioritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 6.12 Skenario Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil analisis BPIW, 2022

BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

Analisis kebutuhan infrastruktur berisi perbandingan antara kinerja infrastruktur aktual terhadap kebutuhan infrastruktur, meliputi analisis ketersediaan, analisis kebutuhan, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan, serta identifikasi penyebab kesenjangan. Analisis ini akan dilakukan pada setiap kawasan prioritas di Jawa Tengah.

Analisis kebutuhan infrastruktur dilakukan di **5 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, Selingkar Wilis, Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Ijen, dan Madura Kepulauan**. Dalam penanganannya, di dalam kawasan prioritas terdapat kawasan *core* yang penanganannya akan diprioritaskan (terdefinisi dalam rencana aksi). Kawasan *core* tsb memberikan dampak lanjutan (*spillover*) ke wilayah sekitarnya yang berada dalam satu (1) kawasan prioritas.

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah

Sub bab ini berisi perbandingan antara kinerja infrastruktur aktual terhadap kebutuhan infrastruktur, meliputi analisis ketersediaan, analisis kebutuhan, perbandingan ketersediaan dan kebutuhan, dan identifikasi penyebab kesenjangan. Analisis ini akan dilakukan pada skala Provinsi Jawa Timur dan setiap kawasan prioritas di Jawa Timur. Kawasan-kawasan yang menjadi prioritas dalam RPIW Jawa Timur beserta fokusnya masing-masing, yaitu:

1. Gerbangkertosusila Plus

Pengembangan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila Plus mengangkat fokus perencanaan sektor pelayanan dasar kawasan perkotaan, industri pengolahan, dan pertanian tanaman pangan.

Analisis kebutuhan infrastruktur di kawasan GKS menggunakan delineasi kecamatan-kecamatan terpilih yang di dalamnya terdapat KI/KEK dan kawasan perkotaan. Kecamatan-kecamatan tersebut, yaitu: Sidoarjo dan Waru (Kab. Sidoarjo), Mojokerto dan Ngoro (Kab. Mojokerto), Jombang, Ploso, Kudu, dan Kabuh (Kab. Jombang), Bojonegoro (Kab. Bojonegoro), Tuban dan Jenu (Kab. Tuban), Lamongan dan Paciran (Kab. Lamongan), Gresik, Manyar, dan Ujung Pangkah (Kab. Gresik), Bangkalan dan Socah (Kab. Bangkalan), dan seluruh kecamatan di Kota Mojokerto dan Kota Surabaya.

2. DPP Bromo-Tengger-Semeru

Pengembangan Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru mengangkat fokus perencanaan sektor pertanian tanaman pangan dan pariwisata alam dan budaya unggulan.

Analisis kebutuhan infrastruktur di kawasan BTS menggunakan delineasi kecamatan-kecamatan terpilih yang di dalamnya terdapat kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu: Poncokusumo (Kab. Malang), Sukapura (Kab. Probolinggo), Tosari

(Kab. Pasuruan), Senduro dan Lumajang (Kab. Lumajang), serta seluruh kecamatan di Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.

3. Selingkar Ijen

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Ijen mengangkat fokus perencanaan sektor pertanian tanaman pangan, pariwisata alam dan budaya unggulan, dan infrastruktur dasar kawasan perkotaan.

Analisis kebutuhan infrastruktur di kawasan Ijen menggunakan delineasi kecamatan-kecamatan terpilih yang di dalamnya terdapat kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan. Kecamatan-kecamatan tersebut, yaitu: Licin, Banyuwangi, Kalipuro, Glagah, dan Giri (Kab. Banyuwangi), Ijen dan Bondowoso (Kab. Bondowoso), Patrang, Kaliwates, dan sumbersari (Kab. Jember), Situbondo (Kab. Situbondo).

4. Madura Kepulauan

Pengembangan wilayah Madura Kepulauan mengangkat fokus perencanaan: Kawasan Perkotaan dan Pertanian. Analisis kebutuhan infrastruktur di kawasan Madura Kepulauan menggunakan delineasi seluruh 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

5. Selingkar Wilis

Pengembangan kawasan Selingkar Wilis mengangkat fokus perencanaan sektor pertanian tanaman pangan. Analisis kebutuhan infrastruktur di Selingkar Wilis menggunakan delineasi kecamatan-kecamatan yang berada pada ring 1 lingkaran wilis, dan/atau merupakan kecamatan sektor unggulan pertanian, dan/atau merupakan kawasan pariwisata.

Kecamatan-kecamatan tersebut, yaitu: Ponorogo, Pulung, Sukorejo, Ngebel, Sooko, Pudak, Sawoo, dan Babadan (Kab. Ponorogo), Trenggalek, Karangan, Durenan, dan Bandungan (Kab. Trenggalek), Tulungagung, Kalidawir, Pakel, Sendang, Pagerwoko (Kab. Tulungagung), Pare, Kandat, Pagu, Mojo, Semen (Kab. Kediri), Nganjuk, Tanjunganom, Rejos, Gondang, Sawahan, Ngetos (Kab. Nganjuk), Mejayan, Saradan, Pilangkenceng, Balerejo, Kare, Gemarang (Kab. Madiun), dan semua kecamatan di Kota Kediri dan Kota Madiun.

7.1.1 Analisis Standar Pelayanan Minimum Provinsi Jawa Timur

Standar pelayanan minimum dihitung untuk infrastruktur PUPR di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur meliputi layanan air baku, jalan nasional, layanan infrastruktur permukiman, serta layanan perumahan.

A. Infrastruktur Sumber Daya Air

Total kapasitas tampung di Jawa Timur berupa bendungan/waduk adalah sebesar 1.052.721.630 m³ sedangkan kapasitas tampung embung sebesar 13.697.230 m³, sehingga total kapasitas tampung di Provinsi Jawa Timur adalah 1.066.418.860 m³ yang berasal dari WS Bengawan Solo dan WS Brantas (RPSDA WS Bengawan Solo 2015 dan RPSDA WS Brantas 2021). Sedangkan, berdasarkan SISDA 2021 bahwa kapasitas tampungan bendungan di Jawa Timur sebesar 1.748.700.000 m³.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 adalah 41.149.974 jiwa (BPS, 2023). Dengan begitu kapasitas tampung kapita Provinsi Jawa Timur adalah 42,82 m³/capita/tahun

Dengan adanya bendungan kontruksi dan rencana, maka kapasitas tampung kapita Provinsi Jawa Timur adalah 45,36 m³/capita/tahun (2029) dan 43,66 m³/capita/tahun (2034). Angka tersebut masih berada di bawah target capaian pembangunan infrastruktur untuk kapasitas tampungan capita sebesar 87 m³/capita/tahun (2029) dan 115 m³/capita/tahun (2034).

Saat ini telah ada beberapa waduk/bendungan di Jawa Tengah yang telah selesai dan direncanakan dibangun hingga 2034 yaitu sebagai berikut.

Tabel 7.1 Bendungan Konstruksi dan Rencana di Jawa Timur Hingga 2034

No	Bendungan	Kab/Kota	Tahun Selesai	Kapasitas Tampungan (Juta m3)
1	Tukul	Pacitan	2021	8,7
2	Tugu	Trenggalek	2021	12,1
3	Bagong	Trenggalek	2024	17,4
4	Gongseng	Bojonegoro	2021	22,43
5	Bendo	Ponorogo	2024	43
6	Semantok	Nganjuk	2024	32,67
7	Karangnongko	Bojonegoro	2027	59,1
8	Lesti III	Malang	2029	7,55
9	Kampak	Trenggalek	2029	5,67

Sumber: Kementerian PUPR, 2023

Untuk mencapai target kapasitas tampungan capita 87 m³/capita/tahun (2019) dan 115 m³/capita/tahun (2034), diperlukan pembangunan tampungan air baku lagi dengan tambahan kapasitas tampungan sebesar 1,8 Miliar m³ (2029) dan 3,2 Miliar m³ (2034). Jika bendungan dibangun rata-rata memiliki kapasitas tampung sebesar 50.000.000 m³ maka masih diperlukan setidaknya 64 bendungan lagi untuk dibangun hingga 2034 atau dilakukannya peningkatan kapasitas tampung dan rehabilitasi tampungan yang belum optimal.

B. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pengukuran konektivitas jalan diukur melalui waktu tempuh. Waktu tempuh adalah waktu yang diperlukan (dalam jam) untuk menempuh perjalanan sepanjang 100 km. Waktu tempuh terbagi dalam dua kategori yaitu waktu tempuh lintas utama termasuk jalan nasional dan tol dan waktu tempuh perkotaan. Waktu tempuh lintas utama diukur pada koridor jalan yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra Ditjen Bina Marga, dimana terdapat 3 koridor jalan utama di Provinsi Jawa Timur. Koridor dan waktu tempuh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Waktu Tempuh Lintas Utama Jawa Timur

Koridor	Waktu Tempuh 2023 (Jam/100 km)
Lintas Pantura Jawa Timur	3,00
Lintas Tengah Jawa Timur	3,03
Lintas Selatan Jawa Timur	2,83

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Target waktu tempuh lintas utama pada 2024 adalah sebesar 2,2 jam/100 km dan meningkat menjadi 1,7 jam/100 km (2029) dan 1,6 jam/100 km (2034). Dari data diatas semua lintas utama di Jawa Timur belum mencapai target waktu tempuh. Kepadatan arus lalu lintas tidak dapat terhindarkan walaupun sudah dilakukan perbaikan dan penambahan lajur. Hal ini dikarenakan karena masih adanya pasar tumpah, penyempitan jalan dan pekerjaan perbaikan jalan, dan persimpangan jalan. Selain itu, untuk Lintas Pantura yang melewati Kab. Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan belum tersedia jalan tol. Sedangkan, arus lalu lintas di Lintas Pantura baru terurai saat memasuki Tol Gresik-Surabaya. Waktu tempuh di Pantura akan membaik dengan dibangunnya Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Konstruksi dilakukan dalam 2 Tahap. Tahap 1 Gending - Besuki sepanjang 49,7 Km yang selesai pada 2024. Tahap II Besuki - Banyuwangi sepanjang 126,72 Km).

Kepadatan di jalur lintas tengah Jawa Timur disebabkan karena adanya pintu perlintasan kereta api dan jalan yang menanjak dan berkelok-kelok. Saat musim mudik, jalur lintas tengah merupakan jalur yang paling padat dari jalur lintas lainnya. Untuk kepadatan di lintas selatan akan terurai dengan adanya Jalur Pansela Jawa Timur (Pacitan-Banyuwangi). Selain itu, konektivitas akan membaik dengan adanya Jalan Tol Malang-Kepanjen, Tol Probolinggo-Lumajang, Tol Kertosono-Kediri, Tol Pasuruan-Probolinggo, dan Tol KLBM (Krian, Legundi, Bunder, Manyar).

Waktu tempuh jalan nasional perkotaan dihitung pada ruas-ruas jalan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Waktu tempuh perkotaan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3 Waktu Tempuh Lintas Perkotaan Jawa Timur

No	Ruas Lalu Lintas	Waktu Tempuh Perkotaan (Jam/100 km)	No	Ruas Lalu Lintas	Waktu Tempuh Perkotaan (Jam/100 km)
1	Pacitan	2,24	20	Magetan	3,11
2	Ponorogo	2,59	21	Ngawi	2,48
3	Trenggalek	3,03	22	Bojonegoro	2,84
4	Tulungagung	3,28	23	Tuban	2,94
5	Blitar	3,15	24	Lamongan	2,55
6	Kediri	3,18	25	Gresik	3,50
7	Malang	3,81	26	Bangkalan	2,96
8	Lumajang	3,48	27	Sampang	2,52
9	Jember	3,41	28	Pamekasan	2,80
10	Banyuwangi	3,69	29	Sumenep	2,69
11	Bondowoso	-	30	Kota Kediri	4,54
12	Situbondo	2,42	31	Kota Blitar	4,92
13	Probolinggo	3,02	32	Kota Malang	1,19
14	Pasuruan	3,22	33	Kota Probolinggo	5,13
15	Sidoarjo	4,90	34	Kota Pasuruan	4,82
16	Mojokerto	3,15	35	Kota Mojokerto	4,19
17	Jombang	3,39	36	Kota Madiun	4,07
18	Nganjuk	3,03	37	Kota Surabaya	3,90
19	Madiun	3,22	38	Kota Batu	-

Sumber: Google Maps, diolah 2023

Target waktu tempuh perkotaan di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2024 yaitu sebesar 3,3 jam/100 km dan meningkat menjadi 2,8 jam/100 km (2029) dan 2,5 jam/100 km (2034). Dari total 38 kabupaten/kota, 14 diantaranya memiliki waktu tempuh yang telah melebihi 3,3 jam/100 km. Tertinggi berada di Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Pasuruan.

Dari sisi pertumbuhan kendaraan di Jawa Timur, terjadi peningkatan jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4. Secara umum, rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur 5-10%, dengan pertumbuhan tertinggi di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kabupaten Malang, serta Kabupaten Sidoarjo (Priyambodo, 2018). Melihat tren yang terus meningkat dan tidak adanya penurunan kepemilikan kendaraan, perlunya pengembangan transportasi umum yang komprehensif dan terintegrasi. Transportasi umum tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat namun akan mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi wilayah.

C. Infrastruktur Permukiman

Analisis dan perhitungan terkait infrastruktur permukiman di Provinsi Jawa Timur dilakukan meliputi infrastruktur air bersih, air limbah, dan persampahan. Perhitungan infrastruktur didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk. Perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.4 Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2022	2025	2029	2030	2034
Sidoarjo	2.147.022	2.247.086	2.387.796	2.424.329	2.576.138
Mojokerto	1.138.316	1.167.591	1.207.798	1.218.064	1.260.010
Jombang	1.330.216	1.348.658	1.373.645	1.379.963	1.405.530
Bojonegoro	1.308.412	1.318.644	1.332.412	1.335.876	1.349.824
Tuban	1.208.337	1.223.992	1.245.181	1.250.535	1.272.183
Lamongan	1.344.972	1.346.182	1.347.799	1.348.203	1.349.822
Gresik	1.392.149	1.523.011	1.716.827	1.769.019	1.994.141
Bangkalan	1.078.266	1.105.667	1.143.288	1.152.892	1.192.120
Kota Mojokerto	134.161	136.794	140.386	141.298	145.008
Kota Surabaya	2.898.509	2.935.184	2.984.806	2.997.343	3.048.016
Malang	2.686.397	2.735.043	2.801.277	2.818.085	2.886.330
Lumajang	1.125.752	1.135.575	1.148.805	1.152.136	1.165.559
Probolinggo	1.166.641	1.188.121	1.217.377	1.224.803	1.254.963
Pasuruan	1.628.855	1.663.796	1.711.554	1.723.706	1.773.183
Kota Malang	853.287	867.703	887.303	892.272	912.428
Kota Probolinggo	243.885	250.381	259.311	261.593	270.923
Kota Pasuruan	210.970	215.496	221.681	223.255	229.664
Kota Batu	217.902	225.387	235.769	238.438	249.421
Jember	2.559.611	2.594.321	2.641.335	2.653.221	2.701.303
Banyuwangi	1.718.721	1.734.754	1.756.366	1.761.810	1.783.759
Bondowoso	783.464	794.563	809.606	813.411	828.812
Situbondo	692.706	702.939	716.818	720.330	734.553
Pacitan	593.614	607.335	626.123	630.911	650.428
Ponorogo	965.790	996.266	1.038.403	1.049.212	1.093.588
Trenggalek	740.431	757.308	780.409	786.294	810.280
Tulungagung	1.106.228	1.135.653	1.176.107	1.186.444	1.228.707

Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2022	2025	2029	2030	2034
Blitar	1.241.548	1.273.708	1.317.887	1.329.169	1.375.271
Kediri	1.657.180	1.696.120	1.749.467	1.763.064	1.818.516
Nganjuk	1.118.097	1.143.735	1.178.834	1.187.776	1.224.227
Madiun	758.767	785.246	821.996	831.449	870.360
Magetan	679.319	695.126	716.776	722.293	744.789
Ngawi	878.594	894.514	916.191	921.692	944.027
Kota Kediri	289.427	293.872	299.905	301.433	307.622
Kota Blitar	152.031	157.126	164.186	166.000	173.459
Kota Madiun	199.500	207.444	218.531	221.395	233.227
Sampang	985.551	1.014.145	1.052.270	1.061.801	1.103.173
Pamekasan	859.284	876.615	899.724	905.501	930.866
Sumenep	1.143.726	1.170.472	1.206.135	1.215.050	1.248.273
Jawa Timur	41.237.639	42.165.573	43.450.084	43.780.067	45.140.502

Sumber: Hasil Analisis, 2023

1) Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mencapai lebih dari 41 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga pada tahun 2029 mencapai 43 juta jiwa dan 45 juta jiwa pada tahun 2034. Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan SNI 6728.1:2015 dimana kebutuhan air per orang dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Semakin besar jumlah penduduknya maka akan semakin besar pula kebutuhan air untuk setiap orangnya. Standar kebutuhan air bersih dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.5 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Menurut Kategori Kota

No	Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air bersih (liter/orang/hari)
1	Semi urban (ibu kota kecamatan/desa)	3.000-20.000	60-90
2	Kota kecil	20.000-100.000	90-110
3	Kota sedang	100.000-500.000	100-125
4	Kota besar	500.000-1.000.000	120-150
5	Metropolitan	>1.000.000	150-200

Sumber: SNI 6728.1:2015

Selain untuk kebutuhan rumah tangga, terdapat kebutuhan untuk kegiatan komersial dan sosial seperti toko, gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel dan sebagainya yang diasumsikan kebutuhannya sebesar 15-30% dari total pemakaian air bersih rumah tangga. Besaran jumlah dan kepadatan penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya kawasan komersial dan sosial, sehingga kebutuhan airnya akan cenderung lebih tinggi. Total kebutuhan air bersih di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/detik)				
	2022	2025	2029	2030	2034
Sidoarjo	4.249,31	4.447,36	4.725,85	4.798,15	9.596,08
Mojokerto	2.252,92	2.310,86	2.390,43	2.410,75	4.873,79
Jombang	2.632,72	2.669,22	2.718,67	2.731,18	5.558,91

Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter/detik)				
	2022	2025	2029	2030	2034
Bojonegoro	2.589,57	2.609,82	2.637,07	2.643,92	5.400,77
Tuban	2.391,50	2.422,48	2.464,42	2.475,02	5.040,23
Lamongan	2.661,92	2.664,32	2.667,52	2.668,32	5.473,96
Gresik	2.755,29	3.014,29	3.397,89	3.501,18	6.864,80
Bangkalan	2.134,07	2.188,30	2.262,76	2.281,77	4.613,80
Kota Mojokerto	265,53	270,74	277,85	279,65	567,3
Kota Surabaya	5.736,63	5.809,22	5.907,43	5.932,24	12.082,83
Malang	4.253,46	4.330,48	4.435,36	4.461,97	9.059,34
Lumajang	1.782,44	1.797,99	1.818,94	1.824,22	3.724,30
Probolinggo	1.847,18	1.881,19	1.927,51	1.939,27	3.936,71
Pasuruan	2.579,02	2.634,34	2.709,96	2.729,20	5.530,70
Kota Malang	1.688,80	1.717,33	1.756,12	1.765,96	3.588,01
Kota Probolinggo	386,15	396,44	410,58	414,19	836,94
Kota Pasuruan	334,04	341,2	351	353,49	716,34
Kota Batu	316,26	327,12	342,19	346,07	696,41
Jember	5.065,90	5.134,59	5.227,64	5.251,17	10.689,89
Banyuwangi	3.401,63	3.433,37	3.476,14	3.486,92	7.116,27
Bondowoso	1.240,48	1.258,06	1.281,88	1.287,90	2.620,87
Situbondo	1.096,78	1.112,99	1.134,96	1.140,52	2.320,13
Pacitan	979,05	1.001,68	1.032,67	1.040,56	2.106,73
Ponorogo	1.720,31	1.774,60	1.849,65	1.868,91	3.766,45
Trenggalek	1.318,89	1.348,95	1.390,10	1.400,59	2.836,14
Tulungagung	2.189,41	2.247,65	2.327,71	2.348,17	4.744,97
Blitar	2.457,23	2.520,88	2.608,32	2.630,65	5.317,81
Kediri	3.279,84	3.356,90	3.462,49	3.489,40	7.063,14
Nganjuk	2.212,90	2.263,64	2.333,11	2.350,81	4.759,95
Madiun	1.351,55	1.398,72	1.464,18	1.481,02	2.979,48
Magetan	1.165,22	1.192,33	1.229,47	1.238,93	2.508,13
Ngawi	1.622,96	1.652,37	1.692,41	1.702,57	3.456,78
Kota Kediri	400,98	407,14	415,49	417,61	849,24
Kota Blitar	210,63	217,69	227,47	229,98	463
Kota Madiun	276,39	287,4	302,76	306,72	615,5
Sampang	1.560,46	1.605,73	1.666,09	1.681,18	3.396,41
Pamekasan	1.360,53	1.387,97	1.424,56	1.433,71	2.910,26
Sumenep	1.810,90	1.853,25	1.909,71	1.923,83	3.890,68
Jawa Timur	75.578,86	77.288,61	79.658,35	80.267,68	162.573,06

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penyediaan air bersih dihitung berdasarkan sambungan rumah air perpipaan PDAM. Pada tahun 2022 layanan air bersih perpipaan PDAM di Provinsi Jawa Timur baru mencapai 23%. Layanan terbesar air bersih perpipaan PDAM terutama berada di kawasan kota administratif. Target layanan air perpipaan pada tahun 2029 adalah sebesar 45% dan target pada tahun 2034 sebesar 75%. Untuk dapat mencapai target tersebut, Provinsi Jawa Timur membutuhkan penambahan peningkatan pelayanan dan supply air bersih sebesar 18.796 liter/detik untuk mencapai angka pelayanan 35.846 liter/detik pada tahun 2029 dan menambahkan lagi Tingkat pelayanan sebesar 75.761 liter/detik untuk mencapai target pelayanan 121.929 liter/detik pada tahun 2034. Nilai tersebut cukup besar namun masih sangat jauh mengingat saat ini layanan air bersih di Provinsi Jawa Timur baru mencapai 17.050 liter/detik. Masih banyak

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berada di bawah target kecuali beberapa kota seperti Kota Surabaya (96%), Kota Malang (64%), Kabupaten Madiun (75%), dan Kota Madiun (98%).

Tabel 7.7 Proyeksi Penyediaan Air Bersih di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/ Kota	Kebutuhan 2022 (l/detik)	Prosentase Terlayani						GAP 2022- 2029 (l/det)	GAP 2030- 2034 (l/det)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		l/det	%	l/det	%	l/det	%		
Sidoarjo	4.249	964	23%	2.127	45%	7.197	75%	-1.163	-4.435
Mojokerto	2.253	194	9%	1.076	45%	3.655	75%	-881	-2.381
Jombang	2.633	171	6%	1.223	45%	4.169	75%	-1.053	-2.745
Bojonegoro	2.590	277	11%	1.187	45%	4.051	75%	-910	-2.634
Tuban	2.392	560	23%	1.109	45%	3.780	75%	-549	-2.349
Lamongan	2.662	177	7%	1.200	45%	4.105	75%	-1.024	-2.712
Gresik	2.755	686	25%	1.529	45%	5.149	75%	-843	-3.108
Bangkalan	2.134	297	14%	1.018	45%	3.460	75%	-721	-2.214
Kota Mojokerto	266	39	15%	125	45%	425	75%	-86	-272
Kota Surabaya	5.737	5.508	96%	2.658	45%	9.062	75%	2.849	-4.198
Malang	4.253	982	23%	1.996	45%	6.795	75%	-1.014	-4.220
Lumajang	1.782	267	15%	819	45%	2.793	75%	-551	-1.790
Probolinggo	1.847	121	7%	867	45%	2.953	75%	-746	-1.941
Pasuruan	2.579	270	10%	1.219	45%	4.148	75%	-950	-2.688
Kota Malang	1.689	1.079	64%	790	45%	2.691	75%	289	-1.432
Kota Probolinggo	386	179	46%	185	45%	628	75%	-6	-357
Kota Pasuruan	334	148	44%	158	45%	537	75%	-10	-308
Kota Batu	316	66	21%	154	45%	522	75%	-88	-325
Jember	5.066	337	7%	2.352	45%	8.017	75%	-2.015	-5.275
Banyuwangi	3.402	568	17%	1.564	45%	5.337	75%	-996	-3.400
Bondowoso	1.240	86	7%	577	45%	1.966	75%	-491	-1.292
Situbondo	1.097	140	13%	511	45%	1.740	75%	-371	-1.121
Pacitan	979	168	17%	465	45%	1.580	75%	-297	-1.000
Ponorogo	1.720	311	18%	832	45%	2.825	75%	-522	-1.778
Trenggalek	1.319	171	13%	626	45%	2.127	75%	-455	-1.366
Tulungagung	2.189	397	18%	1.047	45%	3.559	75%	-650	-2.243
Blitar	2.457	134	5%	1.174	45%	3.988	75%	-1.039	-2.625
Kediri	3.280	117	4%	1.558	45%	5.297	75%	-1.442	-3.511
Nganjuk	2.213	199	9%	1.050	45%	3.570	75%	-851	-2.324
Madiun	1.352	1.015	75%	659	45%	2.235	75%	357	-1.123
Magetan	1.165	383	33%	553	45%	1.881	75%	-171	-1.126
Ngawi	1.623	220	14%	762	45%	2.593	75%	-542	-1.664
Kota Kediri	401	130	32%	187	45%	637	75%	-57	-383
Kota Blitar	211	50	24%	102	45%	347	75%	-53	-214
Kota Madiun	276	270	98%	136	45%	462	75%	134	-208
Sampang	1.560	8	1%	750	45%	2.547	75%	-742	-1.704
Pamekasan	1.361	213	16%	641	45%	2.183	75%	-428	-1.391
Sumenep	1.811	150	8%	859	45%	2.918	75%	-709	-1.903
Jawa Timur	75.579	17.050	23%	35.846	45%	121.929	75%	-18.796	-75.761

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2) Air Limbah

Timbulan air limbah dihitung sebesar 70-80% dari debit kebutuhan air bersih. Proyeksi timbulan air limbah pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.8 Proyeksi Timbulan Air Limbah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/Kota	Proyeksi Timbulan Air Limbah (liter/detik)				
	2022	2025	2029	2030	2034
Sidoarjo	3.399	3.558	3.781	3.839	7.677
Mojokerto	1.802	1.849	1.912	1.929	3.899
Jombang	2.106	2.135	2.175	2.185	4.447
Bojonegoro	2.072	2.088	2.110	2.115	4.321
Tuban	1.913	1.938	1.972	1.980	4.032
Lamongan	2.130	2.131	2.134	2.135	4.379
Gresik	2.204	2.411	2.718	2.801	5.492
Bangkalan	1.707	1.751	1.810	1.825	3.691
Kota Mojokerto	212	217	222	224	454
Kota Surabaya	4.589	4.647	4.726	4.746	9.666
Malang	3.403	3.464	3.548	3.570	7.247
Lumajang	1.426	1.438	1.455	1.459	2.979
Probolinggo	1.478	1.505	1.542	1.551	3.149
Pasuruan	2.063	2.107	2.168	2.183	4.425
Kota Malang	1.351	1.374	1.405	1.413	2.870
Kota Probolinggo	309	317	328	331	670
Kota Pasuruan	267	273	281	283	573
Kota Batu	253	262	274	277	557
Jember	4.053	4.108	4.182	4.201	8.552
Banyuwangi	2.721	2.747	2.781	2.790	5.693
Bondowoso	992	1.006	1.026	1.030	2.097
Situbondo	877	890	908	912	1.856
Pacitan	783	801	826	832	1.685
Ponorogo	1.376	1.420	1.480	1.495	3.013
Trenggalek	1.055	1.079	1.112	1.120	2.269
Tulungagung	1.752	1.798	1.862	1.879	3.796
Blitar	1.966	2.017	2.087	2.105	4.254
Kediri	2.624	2.686	2.770	2.792	5.651
Nganjuk	1.770	1.811	1.866	1.881	3.808
Madiun	1.081	1.119	1.171	1.185	2.384
Magetan	932	954	984	991	2.007
Ngawi	1.298	1.322	1.354	1.362	2.765
Kota Kediri	321	326	332	334	679
Kota Blitar	169	174	182	184	370
Kota Madiun	221	230	242	245	492
Sampang	1.248	1.285	1.333	1.345	2.717
Pamekasan		1.110	1.140	1.147	2.328
Sumenep	1.449	1.483	1.528	1.539	3.113
Jawa Timur	60.463	61.831	63.727	64.214	130.058

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Akses sanitasi layak adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi oleh kloset dengan leher angsa dan bangunan bawah menggunakan tangki septik apabila berada di perkotaan, dan apabila berada di pedesaan bangunan bawah menggunakan lubang tanah. Sementara itu, akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi pribadi yang dilengkapi dengan bangunan dan

memiliki dengan leher angsa serta menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya dalam 5 tahun kemudian diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Target layanan sanitasi aman pada tahun 2029 adalah sebesar 35% dan pada tahun 2034 sebesar 55%.

Untuk dapat mencapai target tersebut, Provinsi Jawa Timur membutuhkan penambahan atau peningkatan fasilitas pelayanan air limbah sebesar 15.949 liter/detik untuk mencapai target pelayanan 22.304 liter/detik pada tahun 2029 dan menambahkan lagi tingkat pelayanan air limbah sebesar 45.687 liter/detik untuk mencapai target pelayanan 71.532 liter/detik pada tahun 2034. Nilai tersebut cukup besar namun masih sangat jauh mengingat saat ini layanan air limbah di Provinsi Jawa Timur baru mencapai 6.355 liter/detik. Semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih berada di bawah target. Baseline, target layanan, dan gap layanan sanitasi aman secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.9 Proyeksi Layanan Air Limbah Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/ Kota	Kebutuhan 2022 (l/detik)	Prosentase Terlayani						GAP 2022- 2029 (l/det)	GAP 2030- 2034 (l/det)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		l/det	%	l/det	%	l/det	%		
Sidoarjo	3.399	543	15,96%	1.323	35%	4.222	55%	-781	-2.604
Mojokerto	1.802	165	9,16%	669	35%	2.144	55%	-504	-1.378
Jombang	2.106	255	12,12%	761	35%	2.446	55%	-506	-1.554
Bojonegoro	2.072	231	11,17%	738	35%	2.376	55%	-507	-1.520
Tuban	1.913	183	9,55%	690	35%	2.218	55%	-507	-1.428
Lamongan	2.130	189	8,89%	747	35%	2.409	55%	-558	-1.562
Gresik	2.204	311	14,11%	951	35%	3.021	55%	-640	-1.858
Bangkalan	1.707	113	6,62%	634	35%	2.030	55%	-520	-1.321
Kota Mojokerto	212	45	21,25%	78	35%	250	55%	-33	-151
Kota Surabaya	4.589	1.190	25,93%	1.654	35%	5.316	55%	-464	-3.150
Malang	3.403	270	7,94%	1.242	35%	3.986	55%	-972	-2.582
Lumajang	1.426	145	10,17%	509	35%	1.639	55%	-364	-1.053
Probolinggo	1.478	84	5,66%	540	35%	1.732	55%	-456	-1.134
Pasuruan	2.063	145	7,04%	759	35%	2.434	55%	-614	-1.582
Kota Malang	1.351	182	13,48%	492	35%	1.579	55%	-310	-996
Kota Probolinggo	309	32	10,45%	115	35%	368	55%	-83	-235
Kota Pasuruan	267	25	9,39%	98	35%	315	55%	-73	-203
Kota Batu	253	38	14,98%	96	35%	306	55%	-58	-191
Jember	4.053	270	6,65%	1.464	35%	4.704	55%	-1.194	-3.070
Banyuwangi	2.721	136	5,01%	973	35%	3.131	55%	-837	-2.063
Bondowoso	992	52	5,27%	359	35%	1.153	55%	-307	-758
Situbondo	877	54	6,15%	318	35%	1.021	55%	-264	-668
Pacitan	783	59	7,54%	289	35%	927	55%	-230	-601
Ponorogo	1.376	135	9,80%	518	35%	1.657	55%	-383	-1.059
Trenggalek	1.055	92	8,70%	389	35%	1.248	55%	-297	-804
Tulungagung	1.752	167	9,53%	652	35%	2.088	55%	-485	-1.338
Blitar	1.966	184	9,34%	730	35%	2.340	55%	-547	-1.502
Kediri	2.624	214	8,16%	970	35%	3.108	55%	-755	-2.008
Nganjuk	1.770	142	8,02%	653	35%	2.094	55%	-511	-1.354
Madiun	1.081	144	13,34%	410	35%	1.311	55%	-266	-822
Magetan	932	73	7,88%	344	35%	1.104	55%	-271	-714
Ngawi	1.298	163	12,57%	474	35%	1.521	55%	-311	-963
Kota Kediri	321	29	9,01%	116	35%	374	55%	-87	-241

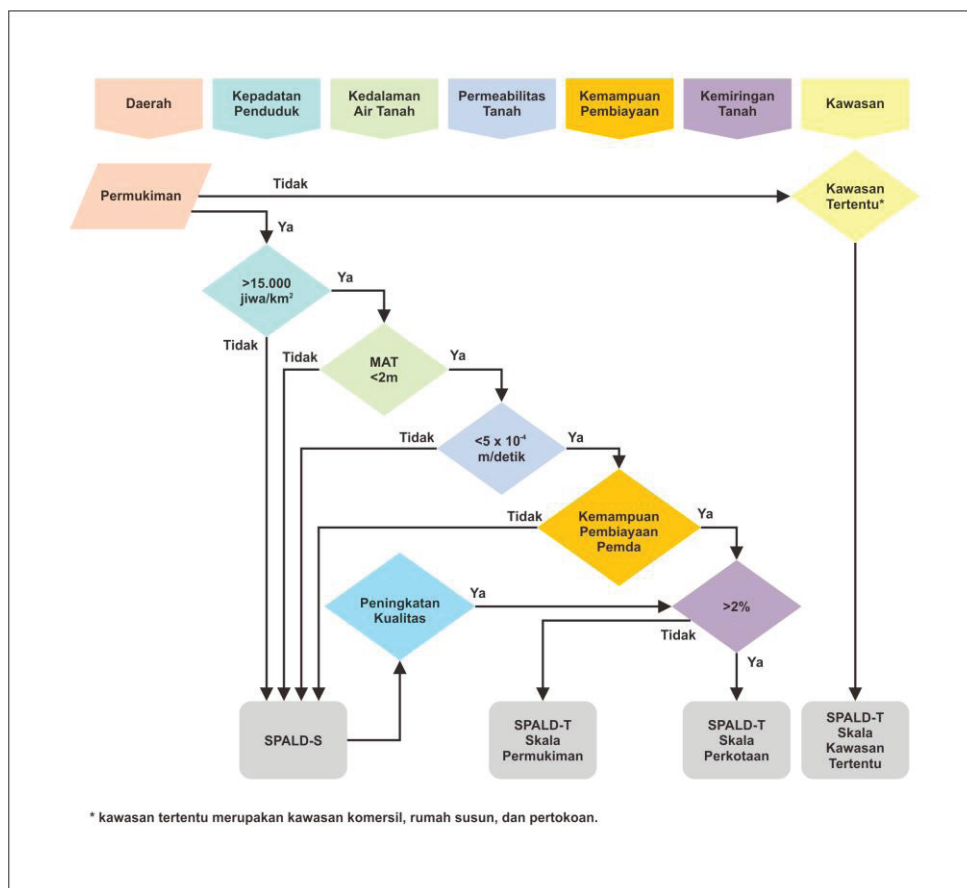
Kabupaten/ Kota	Kebutuhan 2022 (l/detik)	Prosentase Terlayani						GAP 2022- 2029 (l/det)	GAP 2030- 2034 (l/det)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		l/det	%	l/det	%	l/det	%		
Kota Blitar	169	26	15,47%	64	35%	204	55%	-38	-126
Kota Madiun	221	39	17,53%	85	35%	271	55%	-46	-166
Sampang	1.248	78	6,24%	467	35%	1.494	55%	-389	-973
Pamekasan	1.088	71	6,48%	399	35%	1.281	55%	-328	-835
Sumenep	1.449	82	5,63%	535	35%	1.712	55%	-453	-1.119
Jawa Timur	60.463	6.355	10,32%	22.304	35%	71.532	55%	-15.949	-45.687

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 10,32% yang terdiri dari 13,35% di kawasan perkotaan dan 6,80% di kawasan pedesaan. Sistem pengolahan air limbah di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur masih menggunakan sistem pengolahan setempat.

Dari data sanitasi aman di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sudah memiliki toilet sendiri dan dilengkapi juga dengan tangki septic. Akan tetapi kondisi tangki septic masih belum memenuhi standar, hal ini terlihat dari rendahnya akses aman. Rendahnya akses aman yang berarti bahwa tangki septic tidak pernah disedot menunjukkan bahwa kondisi tangki septic masih rembes/tidak kedap sehingga tanpa perlu disedot pun tangki septic tidak penuh.

Untuk menentukan sistem pengolahan air limbah yang tepat, dipertimbangkan beberapa aspek seperti kepadatan penduduk, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan. Alur pemilihan sistem pengolahan air limbah terangkum pada diagram berikut.



Sumber: Kemen PUPR, diolah 2023

Gambar 7.1 Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD

Di Provinsi Jawa Timur baru hanya Kota Surabaya telah mencapai kepadatan 150 orang/hektar, yaitu 525 orang/hektar. Sehingga inisiasi pembangunan SPALD Terpusat perlu dilakukan di Kota Surabaya. Sementara itu, kabupaten/kota lain juga perlu dilakukan pembangunan SPALD Setempat. Pembangunan SPALD-S yang dimaksud untuk memfasilitasi warga yang belum memiliki sarana sanitasi sendiri maupun warga yang telah memiliki sarana sanitasi akan tetapi masih belum memenuhi standar. Dalam SPALD-S tidak hanya dibangun toilet ataupun tangki septic, tetapi perlu juga dipastikan keberadaan dan keberfungsian IPLT dan truk pengangkut lumpur tinja. Oleh karena itu pada setiap kabupaten/kota perlu memiliki IPLT yang berfungsi dan kendaraan pengangkut lumpur tinja yang memadai.

3) Persampahan

Perhitungan timbulan sampah perkotaan dihitung berdasarkan SNI 19-3983-1995, dimana koefisien timbulan sampah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Timbulan Sampah Rumah Tangga Menurut Kategori Kota

No	Kategori Kota	Koefisien timbulan sampah	
		liter/orang/hari	kilogram/orang/hari
1	Kota Besar	2,75 – 3,25	0,7 – 0,8
2	Kota Sedang	2,75 – 3,25	0,7 – 0,8
3	Kota Kecil	2,75 – 3,25	0,625 – 0,7

Sumber: SNI, 1995

Hasil perhitungan timbulan sampah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 7.11 Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Sidoarjo	1.718	1.744	1.771	1.798	1.910	1.842	2.061
Mojokerto	911	918	926	934	966	926	1.008
Jombang	1.064	1.069	1.074	1.079	1.099	1.049	1.124
Bojonegoro	1.047	1.049	1.052	1.055	1.066	1.015	1.080
Tuban	967	971	975	979	996	950	1.018
Lamongan	1.076	1.076	1.077	1.077	1.078	1.025	1.080
Gresik	1.114	1.148	1.182	1.218	1.373	1.344	1.595
Bangkalan	863	870	877	885	915	876	954
Kota Mojokerto	107	108	109	109	112	107	116
Kota Surabaya	2.319	2.329	2.338	2.348	2.388	2.278	2.438
Malang	2.149	2.162	2.175	2.188	2.241	2.142	2.309
Lumajang	901	903	906	908	919	876	932
Probolinggo	933	939	945	951	974	931	1.004
Pasuruan	1.303	1.312	1.322	1.331	1.369	1.310	1.419
Kota Malang	683	686	690	694	710	678	730
Kota Probolinggo	195	197	199	200	207	199	217
Kota Pasuruan	169	170	171	172	177	170	184
Kota Batu	153	154	156	158	165	159	175
Jember	2.048	2.057	2.066	2.075	2.113	2.016	2.161
Banyuwangi	1.375	1.379	1.384	1.388	1.405	1.339	1.427
Bondowoso	627	630	633	636	648	618	663
Situbondo	554	557	560	562	573	547	588
Pacitan	475	479	482	486	501	479	520
Ponorogo	724	732	740	747	779	748	820
Trenggalek	555	560	564	568	585	560	608
Tulungagung	885	893	901	909	941	902	983
Blitar	993	1.002	1.010	1.019	1.054	1.010	1.100
Kediri	1.326	1.336	1.346	1.357	1.400	1.340	1.455
Nganjuk	894	901	908	915	943	903	979
Madiun	569	576	582	589	617	592	653
Magetan	543	548	552	556	573	549	596
Ngawi	703	707	711	716	733	700	755

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Kota Kediri	188	189	190	191	195	186	200
Kota Blitar	106	108	109	110	115	110	121
Kota Madiun	130	131	133	135	142	137	152
Sampang	739	746	753	761	789	757	827
Pamekasan	644	649	653	657	675	645	698
Sumenep	572	576	581	585	603	577	624
Jawa Timur	32.321	32.560	32.802	33.046	34.051	34.571	35.374

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sampah terangkut di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah mencapai 55%. Capaian tersebut sudah mencapai target sampah terkelola pada tahun 2029 sebesar, yaitu 40%. Secara umum, perlu dilakukan peningkatan capaian pelayanan untuk mencapai target pada tahun 2034, yaitu sebesar 60%. Namun di sisi lain masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai target 60% bahkan belum menyentuh 40% dengan diiringi upaya pengurangan sampah sebesar 5%.

Tabel 7.12 Proyeksi Layanan Persampahan Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/ Kota	Timbulan 2022 (ton/hari)	Prosentase Terlayani						GAP 2022- 2029 (l/det)	GAP 2030- 2034 (l/det)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		l/det	%	l/det	%	l/det	%		
Sidoarjo	1.718	1.024	60%	726	40%	1.175	60%	247	-115,37
Mojokerto	911	280	31%	367	40%	575	60%	-101	-31,88
Jombang	1.064	387	36%	418	40%	641	60%	-50	-19,43
Bojonegoro	1.047	319	30%	405	40%	616	60%	-102	-10,6
Tuban	967	510	53%	379	40%	580	60%	106	-16,45
Lamongan	1.076	662	62%	410	40%	616	60%	219	-1,23
Gresik	1.114	831	75%	522	40%	909	60%	267	-171,09
Bangkalan	863	210	24%	348	40%	544	60%	-148	-29,81
Kota Mojokerto	107	99	92%	43	40%	66	60%	51	-2,82
Kota Surabaya	2.319	2.228	96%	907	40%	1.390	60%	1.209	-38,51
Malang	2.149	967	45%	852	40%	1.316	60%	67	-51,87
Lumajang	901	487	54%	349	40%	531	60%	114	-10,2
Probolinggo	933	154	17%	370	40%	572	60%	-223	-22,92
Pasuruan	1.303	389	30%	520	40%	809	60%	-150	-37,6
Kota Malang	683	666	98%	270	40%	416	60%	363	-15,32
Kota Probolinggo	195	164	84%	79	40%	124	60%	77	-7,09
Kota Pasuruan	169	165	98%	67	40%	105	60%	90	-4,87
Kota Batu	153	147	96%	63	40%	100	60%	77	-7,3
Jember	2.048	703	34%	803	40%	1.232	60%	-135	-36,54
Banyuwangi	1.375	736	54%	534	40%	813	60%	165	-16,68
Bondowoso	627	134	21%	246	40%	378	60%	-119	-11,7
Situbondo	554	498	90%	218	40%	335	60%	255	-10,81
Pacitan	475	109	23%	190	40%	297	60%	-87	-14,83
Ponorogo	724	574	79%	296	40%	468	60%	249	-31,62
Trenggalek	555	400	72%	222	40%	346	60%	157	-17,09
Tulungagung	885	329	37%	358	40%	560	60%	-45	-32,12
Blitar	993	738	74%	401	40%	627	60%	300	-35,04
Kediri	1.326	335	25%	532	40%	829	60%	-214	-42,14
Nganjuk	894	447	50%	358	40%	558	60%	66	-27,7

Kabupaten/ Kota	Timbunan 2022 (ton/hari)	Prosentase Terlayani						GAP 2022- 2029 (l/det)	GAP 2030- 2034 (l/det)
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		l/det	%	l/det	%	l/det	%		
Madiun	569	172	30%	234	40%	372	60%	-70	-27,72
Magetan	543	171	32%	218	40%	340	60%	-55	-17,1
Ngawi	703	303	43%	279	40%	430	60%	10	-16,97
Kota Kediri	188	177	94%	74	40%	114	60%	94	-3,82
Kota Blitar	106	103	97%	44	40%	69	60%	54	-4,96
Kota Madiun	130	125	97%	54	40%	86	60%	65	-7,31
Sampang	739	86	12%	300	40%	472	60%	-218	-29,48
Pamekasan	644	321	50%	256	40%	398	60%	49	-18,07
Sumenep	572	83	15%	229	40%	356	60%	-150	-15,78
Jawa Timur	32.321	16.233	55%	12939	40%	20.163	60%	2.482	-1.011,88

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Infrastruktur Perumahan

Kebutuhan infrastruktur perumahan dibutuhkan diantaranya adalah ketersediaan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Target yang ditentukan hingga tahun 2009 sebesar 79%.

1) Backlog

Kepemilikan rumah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah mencapai 88,14% (BPS, 2023). Kepemilikan rumah pribadi untuk setiap rumah tangga di kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.13 Proyeksi Kepemilikan Rumah di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

Kabupaten/ Kota	Jumlah KK 2022	Memiliki Rumah						GAP 2022- 2029 KK	GAP 2030- 2034 KK
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		KK	%	KK	%	KK	%		
Pacitan	163.789	161.021	98,31	136.640	79,00	154.522	86,00	24.381	6.499
Ponorogo	266.368	256.326	96,23	226.613	79,00	259.803	86,00	29.713	-3.476
Trenggalek	204.328	198.750	97,27	170.310	79,00	192.497	86,00	28.440	6.253
Tulungagung	305.342	280.548	91,88	256.664	79,00	291.903	86,00	23.884	-11.355
Blitar	342.630	320.017	93,4	287.605	79,00	326.722	86,00	32.412	-6.705
Kediri	457.464	398.543	87,12	381.790	79,00	432.023	86,00	16.753	-33.480
Malang	741.961	656.116	88,43	611.328	79,00	685.703	86,00	44.788	-29.586
Lumajang	314.151	287.260	91,44	250.706	79,00	276.901	86,00	36.554	10.359
Jember	709.314	606.109	85,45	576.424	79,00	641.746	86,00	29.685	-35.637
Banyuwangi	478.379	420.638	87,93	383.295	79,00	423.766	86,00	37.343	-3.127
Bondowoso	215.861	196.714	91,13	176.682	79,00	196.900	86,00	20.032	-186
Situbondo	190.956	180.912	94,74	156.433	79,00	174.507	86,00	24.479	6.404
Probolinggo	320.432	296.496	92,53	265.671	79,00	298.140	86,00	30.825	-1.644
Pasuruan	447.247	419.742	93,85	373.516	79,00	421.253	86,00	46.226	-1.512
Sidoarjo	581.050	492.905	84,83	521.094	79,00	612.011	86,00	-28.189	-119.106
Mojokerto	313.145	296.016	94,53	263.580	79,00	299.339	86,00	32.436	-3.324
Jombang	369.053	329.675	89,33	299.773	79,00	333.911	86,00	29.902	-4.235
Nganjuk	308.573	266.638	86,41	257.259	79,00	290.839	86,00	9.378	-24.201
Madiun	209.300	192.639	92,04	179.386	79,00	206.771	86,00	13.254	-14.131
Magetan	187.388	180.717	96,44	156.423	79,00	176.939	86,00	24.293	3.778

Kabupaten/ Kota	Jumlah KK 2022	Memiliki Rumah						GAP 2022- 2029 KK	GAP 2030- 2034 KK
		Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
		KK	%	KK	%	KK	%		
Ngawi	242.385	221.685	91,46	199.942	79,00	224.272	86,00	21.743	-2.587
Bojonegoro	363.294	347.564	95,67	290.775	79,00	320.676	86,00	56.789	26.887
Tuban	334.128	316.720	94,79	271.738	79,00	302.231	86,00	44.982	14.488
Lamongan	378.870	354.698	93,62	294.133	79,00	320.676	86,00	60.565	34.022
Gresik	368.139	340.050	92,37	374.667	79,00	473.746	86,00	-34.616	133.696
Bangkalan	300.171	275.197	91,68	249.502	79,00	283.211	86,00	25.695	-8.014
Sampang	271.868	258.057	94,92	229.639	79,00	262.080	86,00	28.418	-4.023
Pamekasan	236.966	230.094	97,1	196.349	79,00	221.145	86,00	33.746	8.949
Sumenep	313.987	290.344	92,47	263.217	79,00	296.551	86,00	27.126	-6.207
Kota Kediri	79.950	60.898	76,17	65.449	79,00	73.081	86,00	-4.551	-12.184
Kota Blitar	41.978	32.294	76,93	35.831	79,00	41.208	86,00	-3.537	-8.915
Kota Malang	233.736	182.244	77,97	193.638	79,00	216.765	86,00	-11.394	-34.520
Kota Probolinggo	67.182	58.153	86,56	56.590	79,00	64.363	86,00	1.563	-6.210
Kota Pasuruan	58.425	45.670	78,17	48.378	79,00	54.561	86,00	-2.707	-8.890
Kota Mojokerto	37.113	28.436	76,62	30.637	79,00	34.449	86,00	-2.201	-6.013
Kota Madiun	55.025	37.990	69,04	47.691	79,00	55.408	86,00	-9.701	-17.418
Kota Surabaya	797.575	458.287	57,46	651.380	79,00	724.114	86,00	193.094	265.827
Kota Batu	59.872	54.812	91,55	51.452	79,00	59.255	86,00	3.360	-4.442
Jawa Timur	11.367.396	10.019.223	88,14	9.482.201	79,00	10.723.987	86,00	548.773	693.013

Sumber: Ditjen Perumahan PUPR (2020) dan BPS (2023), diolah 2023.

Secara umum pada 2029 untuk Provinsi Jawa Timur nilai backlog menunjukkan angka positif. Pada 2029 backlog tertinggi perumahan terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Secara umum pada 2034 jika tidak ada peningkatan kepemilikan rumah dan intervensi pemerintah untuk mendorong masyarakat memiliki rumah, maka terdapat backlog sebesar 693.013 KK di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah, diperlukan penyediaan rumah di wilayah-wilayah tersebut. Pembangunan rumah dilakukan oleh berbagai pihak seperti swadaya masyarakat, swasta, bantuan pemerintah, dan CSR.

2) RTLH

Perumahan layak di Provinsi Jawa Timur mencapai persentase 94,16% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Nilai tersebut telah jauh melampaui target Rumah Layak Huni sebesar 79% (2029) dan 86% (2034) dalam skala Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan proyeksi pada tahun 2029, Kabupaten Gresik mengalami gap kebutuhan rumah layak huni sebesar 30.668 KK. Jika tidak terdapat peningkatan penanganan terhadap rumah tidak layak huni, maka diproyeksikan terdapat beberapa kab/kota yang memiliki RTLH, yaitu tertinggi di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 7.14 Proyeksi Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Timur 2022-2034

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK 2022	Rumah Layak Huni						Gap 2022- 2029 KK	Gap 2030- 2034 KK
			Baseline 2022		Target 2029		Target 2034			
			KK	%	KK	%	KK	%		
1	Pacitan	163.789	151.649	92,59%	136.640	79,00	154.522	86,00	15.009	-2.873
2	Ponorogo	266.368	253.321	95,10%	226.613	79,00	259.803	86,00	26.708	-6.482
3	Trenggalek	204.328	193.281	94,59%	170.310	79,00	192.497	86,00	22.970	783
4	Tulungagung	305.342	286.533	93,84%	256.664	79,00	291.903	86,00	29.869	-5.369
5	Blitar	342.630	323.049	94,28%	287.605	79,00	326.722	86,00	35.444	-3.673
6	Kediri	457.464	415.839	90,90%	381.790	79,00	432.023	86,00	34.049	-16.184
7	Malang	741.961	702.668	94,70%	611.328	79,00	685.703	86,00	91.340	16.965
8	Lumajang	314.151	278.831	88,76%	250.706	79,00	276.901	86,00	28.125	1.930
9	Jember	709.314	676.047	95,31%	576.424	79,00	641.746	86,00	99.623	34.301
10	Banyuwangi	478.379	454.630	95,04%	383.295	79,00	423.766	86,00	71.334	30.864
11	Bondowoso	215.861	204.590	94,78%	176.682	79,00	196.900	86,00	27.908	7.690
12	Situbondo	190.956	181.966	95,29%	156.433	79,00	174.507	86,00	25.534	7.459
13	Probolinggo	320.432	303.336	94,66%	265.671	79,00	298.140	86,00	37.666	5.196
14	Pasuruan	447.247	422.593	94,49%	373.516	79,00	421.253	86,00	49.077	1.340
15	Sidoarjo	581.050	553.931	95,33%	521.094	79,00	612.011	86,00	32.838	-58.080
16	Mojokerto	313.145	292.085	93,27%	263.580	79,00	299.339	86,00	28.505	-7.254
17	Jombang	369.053	349.485	94,70%	299.773	79,00	333.911	86,00	49.712	15.575
18	Nganjuk	308.573	290.310	94,08%	257.259	79,00	290.839	86,00	33.050	-529
19	Madiun	209.300	195.487	93,40%	179.386	79,00	206.771	86,00	16.101	-11.284
20	Magetan	187.388	176.471	94,17%	156.423	79,00	176.939	86,00	20.048	-467
21	Ngawi	242.385	229.126	94,53%	199.942	79,00	224.272	86,00	29.184	4.855
22	Bojonegoro	363.294	346.300	95,32%	290.775	79,00	320.676	86,00	55.525	25.624
23	Tuban	334.128	301.362	90,19%	271.738	79,00	302.231	86,00	29.624	-869
24	Lamongan	378.870	360.588	95,17%	294.133	79,00	320.676	86,00	66.455	39.912
25	Gresik	368.139	343.999	93,44%	374.667	79,00	473.746	86,00	-30.668	-129.747
26	Bangkalan	300.171	286.073	95,30%	249.502	79,00	283.211	86,00	36.571	2.862
27	Sampang	271.868	258.938	95,24%	229.639	79,00	262.080	86,00	29.299	-3.141
28	Pamekasan	236.966	222.497	93,89%	196.349	79,00	221.145	86,00	26.148	1.352
29	Sumenep	313.987	299.255	95,31%	263.217	79,00	296.551	86,00	36.038	2.704
30	Kota Kediri	79.950	75.979	95,03%	65.449	79,00	73.081	86,00	10.530	2.898
31	Kota Blitar	41.978	38.693	92,18%	35.831	79,00	41.208	86,00	2.862	-2.515
32	Kota Malang	233.736	221.229	94,65%	193.638	79,00	216.765	86,00	27.591	4.465
33	Kota Probolinggo	67.182	63.911	95,13%	56.590	79,00	64.363	86,00	7.321	-452
34	Kota Pasuruan	58.425	55.558	95,09%	48.378	79,00	54.561	86,00	7.180	997
35	Kota Mojokerto	37.113	35.284	95,07%	30.637	79,00	34.449	86,00	4.648	835
36	Kota Madiun	55.025	N/A	N/A	N/A	79,00	55.408	86,00	N/A	N/A
37	Kota Surabaya	797.575	N/A	N/A	N/A	79,00	724.114	86,00	N/A	N/A
38	Kota Batu	59.872	56.828	94,92%	51.452	79,00	59.255	86,00	5.376	-2.427
JAWA TIMUR		11.367.396	9.901.725	94,16%	8.783.130	79,00	10.723.987	86,00	1.118.595	-42.740

Sumber: Ditjen Perumahan PUPR (2020) dan BPS (2023), diolah 2023.

7.1.2 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Industri

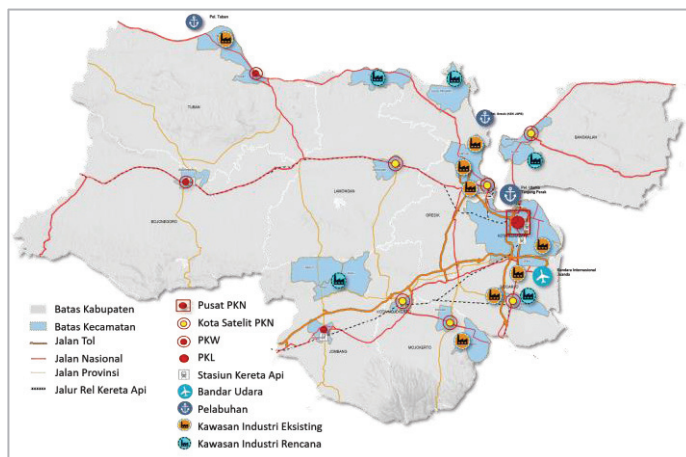
A. Gerbangkertosusila Plus

1) Kondisi Eksisting

Berdasarkan analisis penentuan kawasan prioritas yang telah dilakukan pada bab 6, kawasan industri prioritas penanganan hingga tahun 2029 di Provinsi Jawa Timur adalah KEK Gresik, KI Gresik, KI Bangkalan, KI Lamongan, KI Jombang, dan KI Tuban yang seluruhnya terdapat dalam kawasan Gerbangkertosusila Plus. Gerbangkertosusila Plus adalah sebuah aglomerasi megapolitan di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila Plus yang berpusat di Surabaya ini merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta.

Gerbangkertosusila Plus secara total memiliki luas wilayah seluas 10.845,73 km² (22,68% Jawa Timur) dengan perkotaan inti yaitu Kota Surabaya dan kota satelit yaitu Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Jombang. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas terbesar yaitu 2.307 km², dan Kota Mojokerto merupakan daerah administratif dengan luas terkecil yaitu 20,21 km². Batas administratif Gerbangkertosusila Plus dapat dilihat di Peta 7.1.

Kawasan GKS Plus memiliki jumlah penduduk sebesar 13.742.224 jiwa (2020) dan meningkat menjadi 13.909.991 jiwa (2022) ($\pm 33,79\%$ penduduk Jawa Timur) dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kota Surabaya (88 jiwa/ha), dan terendah di Kab. Bojonegoro (4 jiwa/ha). Persentase penduduk miskin sebanyak 11,30% (9,8% terhadap nasional) dan memiliki IPM sebesar 73,76. Dari segi ekonomi, kontribusi PDRB GKS Plus cukup signifikan, yaitu 53% terhadap Jawa Timur, 14% terhadap Pulau Jawa, dan 8% terhadap nasional. Penggambaran isu sosial dan ekonomi dapat dilihat pada Gambar 7.1 yang didominasi oleh kegiatan industri.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.2 Isu Sosial dan Ekonomi

PDRB sektor industri GKS Plus berkontribusi sebesar 52,6% terhadap industri pengolahan Jawa Timur dan 11,5% terhadap industri pengolahan

nasional. Terdapat 13 Kawasan Industri (KI) yang terdiri dari 8 KI Eksisting dan 5 KI Rencana. KI eksisting antara lain: KI SIER, KI SIEB, Maspion Industrial Estate, Ngoro Industrial Park, KI Safe N Lock, KEK Gresik, KI Gresik, dan KI Tuban. Sedangkan KI rencana: KI SIRIE, KI Salt Lake, KI Ploso Jombang, KI Maritim Lamongan, dan KI Madura Industrial Seaport City. Tingkat okupansi KI eksisting masih rendah, yaitu sebesar 8,33% (2020).

Tabel 7.15 Okupansi Kawasan Industri di Gerbangkertosusila Plus

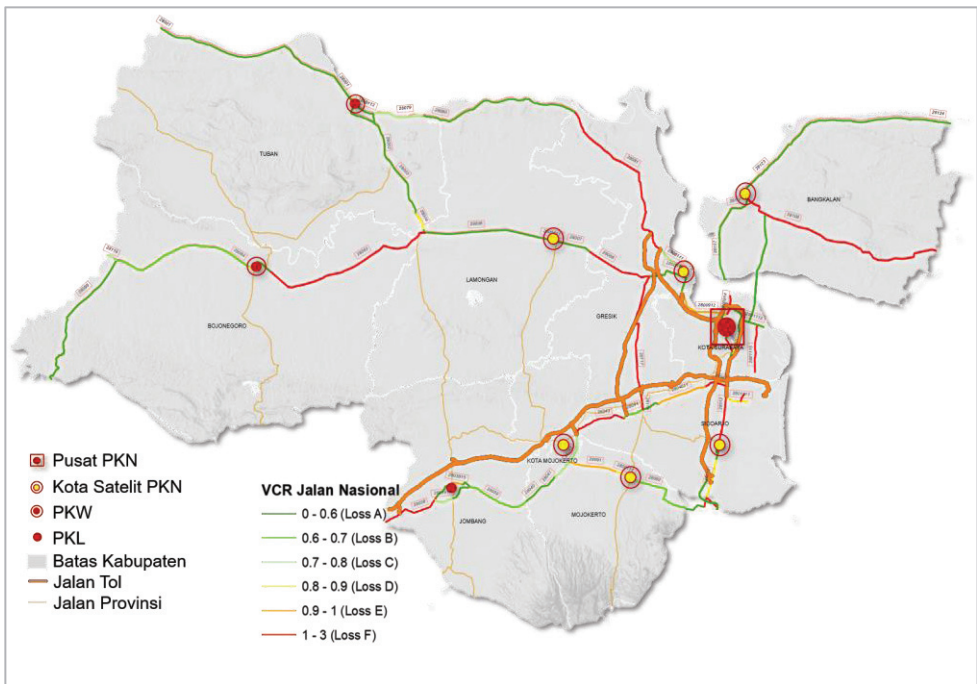
	Kawasan Industri	Lokasi	Rencana Luas (Ha)	Lahan Eksisting (Ha)	Okupansi	Tenaga Kerja Eksisting (jiwa)
KI EKSISTING						
1	Surabaya Industrial Estate Rungkut	Kota Surabaya	245	51	20,8%	5.100
2	Sidoarjo Industrial Estate Berbek	Kab. Sidoarjo	87	76	87,4%	7.600
3	Maspion Industrial Estate	Kab. Gresik	457	407	89,1%	40.700
4	Ngoro Industrial Park	Kab. Mojokerto	500	475	95,0%	47.500
5	Kawasan Industri Safe N Lock	Kab. Sidoarjo	322	90	27,9%	9.000
6	Java Integrated Industrial Port Estate**	Kab. Gresik	1.761	40	2,3%	4.000
7	Kawasan Industri Gresik*	Kab. Gresik	140	120	85,7%	12.000
8	Kawasan Industri Tuban*	Kab. Tuban	233	22	9,4%	2.200
KI RENCANA						
9	Kawasan Industri SIRIE	Kab. Sidoarjo	150	-	-	-
10	Kawasan Industri Salt Lake	Kab. Gresik	285	-	-	-
11	Kawasan Industri Ploso Jombang*	Kab. Jombang	800	-	-	-
12	Kawasan Industri Maritim Lamongan*	Kab. Lamongan	400	-	-	-
13	Madura Industrial Seaport City*	Kab. Bangkalan	10.000	-	-	-
	Total		15.380	1.281	8,33%	128.100

*Kawasan Industri dalam RIPIN 2015-2035

**KEK Industri

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, GKS Plus memiliki bangkitan dan tarikan pergerakan tinggi baik pergerakan manusia maupun pergerakan logistik, terutama di sekitar Kawasan industri dan perdagangan jasa. Terdapat kecenderungan pemusatan lalu lintas melalui Sidoarjo dan Gresik karena keberadaan aktivitas industri yang sudah intensif.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.3 VCR Jalan Nasional Gerbangkertosusila Plus

Berdasarkan RIPIN, akan ada 5 pembangunan kawasan industri seluas 11.573 ha di GKS plus, dan hal ini berpotensi meningkatkan bangkitan pergerakan sebesar 18.866 smp/hr. Adanya bencana banjir dan *land subsidence*, khususnya di bagian utara GKS Plus dapat mengancam keberlangsungan infrastruktur jalan.

2) Analisis Kebutuhan

a) Infrastruktur Air Baku Industri

Untuk mengetahui kebutuhan air industri di tahun 2029 hingga 2034, diperlukan proyeksi pengembangan luas lahan yang didapatkan melalui persentase okupansi lahan industri eksisting tahun 2020 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tiap tahun hingga 2034 (asumsi 2-3%/tahun). Berdasarkan Permenperin No. 40 Tahun 2016, perhitungan air baku untuk industri dihitung menggunakan standar 1 liter/detik/ha. Berdasarkan Tabel 7.9, perhitungan kebutuhan air baku industri di Gerbangkertosusila Plus tahun 2029 adalah 1.908,39 L/detik dan tahun 2034 adalah 2.805,24 L/detik.

Tabel 7.16 Proyeksi Kebutuhan Air Industri

Kab/Kota	Kebutuhan Air Industri (L/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sidoarjo	111,53	115,17	127,89	140,60	154,93	167,21	179,48	191,75	285,32
Mojokerto	312,00	315,25	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Jombang	5,20	10,40	28,60	46,80	67,60	88,40	109,20	130,00	288,60
Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kab/Kota	Kebutuhan Air Industri (L/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Tuban	15,81	17,33	22,63	27,93	33,99	40,04	46,10	52,16	98,35
Lamongan	2,60	5,20	14,30	23,40	33,80	44,20	54,60	65,00	144,30
Gresik	385,71	402,89	463,02	523,15	585,75	640,12	693,31	746,51	1.152,13
Bangkalan	15,81	17,33	22,63	27,93	33,99	40,04	46,10	52,16	390,00
Kota Mojokerto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Surabaya	34,75	36,34	41,91	47,49	53,86	60,23	66,60	72,97	121,54
GKS Plus	867,61	902,58	1.023,35	1.199,37	1.384,92	1.560,19	1.734,29	1.908,39	2.805,24

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

b) Infrastruktur Pengaman Pantai

Pantai Utara pada kawasan ini memiliki tipologi pantai berpasir dan sebagian berlumpur. Wilayah yang rentan terhadap abrasi adalah Kabupaten Tuban. Di sepanjang pesisir Kabupaten Tuban terdapat banyak infrastruktur dan pusat-pusat kegiatan, antara lain jalan arteri primer Pantura yang menghubungkan Jawa Timur- Jawa Barat, pelabuhan, pergudangan, industri, pemukiman, dan pariwisata. Terdapat Kawasan Industri eksisting di wilayah ini yaitu KI Tuban (berdasarkan RIPIN 2015-2035).

kawasan ini memiliki garis pantai sepanjang 57,23 km dari Kecamatan Tuban-Bancar, berdasarkan RPSDA panjang garis pantai yang sudah tertangani dari Kecamatan Tuban-Bancar sepanjang 13,35 km dengan dibangun *seawall* pada kawasan pantai yang berpasir.

Sedangkan pada beberapa daerah dengan kawasan pantai yang berlumpur dilakukan penanganan abrasi dengan hutan mangrove. Bangunan pantai untuk daya rusak air yang sudah tertangani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.17 Bangunan Pantai untuk Daya Rusak Air yang Sudah Tertangani di GKS Plus

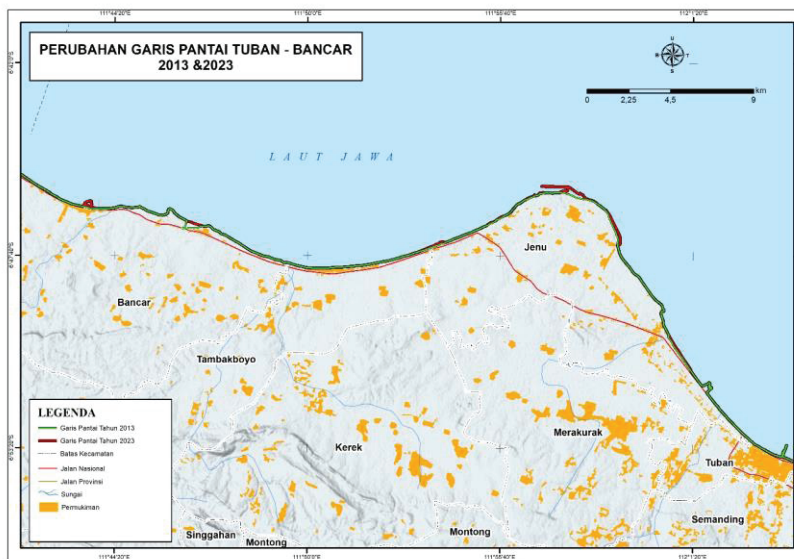
No	Bangunan Pantai	Panjang (m)	Biaya (Rp M)
1	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	900	5
2	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	700	3,8
3	Pembangunan Tembok Pelindung Abrasi Tuban	1000	4,9
4	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	900	6
5	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	1100	6
6	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	750	4
7	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	750	4
8	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	750	4
9	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Jenu	750	4
10	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Bancar	750	4
11	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Bancar	1100	0,6
12	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Bancar	700	4
13	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Bancar	700	3,8
14	Pembangunan SEAWALL pantai Tuban, Bancar	900	5
15	Pemb. SEAWALL pantai Bancar	900	5
16	Pemb. SEAWALL pantai Bancar	700	3,8
Total Panjang Pantai Tertangani		13350	67,9

Sumber: RPSDA, 2022

Analisis daya rusak air abrasi untuk menghitung laju abrasi menggunakan bantuan *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS) v5.1 dengan membuat *transect* pengukuran laju perubahan. *Transect* yang dibuat mengikuti kontur dari garis pantai berdasarkan *historical view* perubahan pantai yang ditinjau dari tahun 2013 hingga 2023 dimana garis pantai pada tahun 2013 sebagai *baseline* untuk melihat perubahannya hingga tahun 2023.

Pada analisis kali ini digunakan metode *End Point Rate* (EPR) yaitu menghitung laju perubahan garis pantai dengan membagi jarak antar garis pantai terlama dan garis pantai terkini dengan waktunya, sehingga didapatkan laju abrasi 2,92 m/tahun dalam jangka tahun 2013-2023 dan panjang pantai terabrasi sebesar 20,16 km sehingga panjang pantai yang terabrasi dan belum tertangani sepanjang 6,82 km. Sehingga, diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi daya rusak air di Kawasan GKS Plus, khususnya Kab. Tuban.

Untuk lebih jelas terkait perubahan garis pantai dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Diolah BPIW, 2023

Gambar 7.4 Perubahan Garis Pantai Tuban-Bancar Tahun 2013-2023

c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dalam menganalisis kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan terdapat 3 proses yaitu Analisis Kondisi VCR, Waktu Tempuh, dan Pergerakan Arus Lalu Lintas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kinerja Jaringan Jalan (VCR)

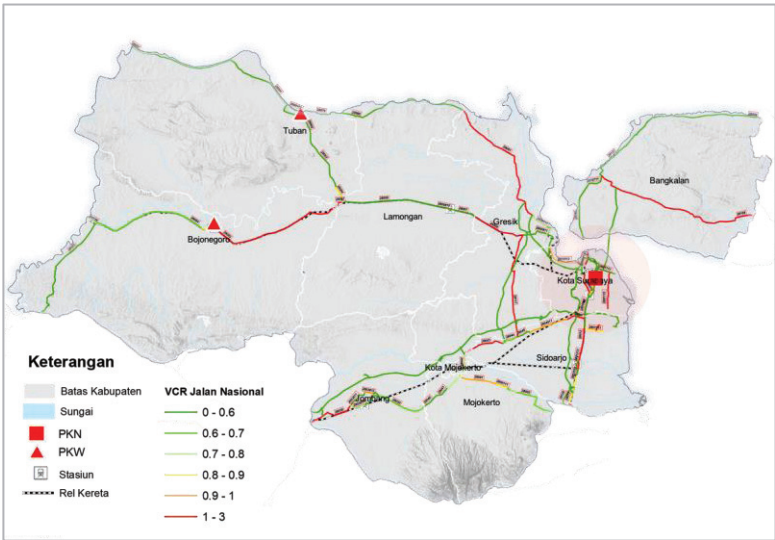
Total panjang jalan nasional di GKS Plus sebesar 606,61 km, dengan lebar rata-rata 12,59 m. Dari segi kinerja, IRI rata-rata 4,92, kemantapan jalan 98% (594,48 km), masih terdapat jalan tidak mantap 2% (12,13 km), dan VCR rata-rata 0,68. Jalan yang memiliki VCR > 0,8 sepanjang 162,80 km (26,84%

jalan nasional). Ruas jalan yang memiliki VCR >1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.18 Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR

Kode Ruas	Nama Ruas	VCR	Panjang (km)
2801411	Jln. Layang Sidoarjo	1,22	0,63
2801312	Jln. Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo)	1,22	1,68
2801215	Jln. Mojopahit (Sidoarjo)	1,22	1,20
2801214	Jln. Gajah Mada (Sidoarjo)	2,31	0,98
2801213	Jln. A. Yani (Sidoarjo)	1,22	0,91
2801212	Jln. Jenggolo (Sidoarjo)	2,44	0,70
2801211	Jln. Rm. Mangun Diprojo (Sidoarjo)	1,75	1,32
2801115	Jln. Dr. Ir. H. Soekarno (Surabaya)	1,30	9,26
2801015	Jln. Diponegoro (Surabaya)	1,37	2,73
2801013	Jln. Arjuno (Surabaya)	1,30	1,48
2800914	Jln. Tanjung Perak (Surabaya)	1,04	1,85
28119	Bts. Kab. Sidoarjo - Krian Bypass	1,10	1,30
28117	Pertigaan Bunder (Simpang Empat) - Legundi	1,33	5,13
28108	Bts. Kota Bangkalan - Bts. Kab. Sampang	1,30	43,16
28083	Babat - Bts. Kota Bojonegoro	1,11	34,12
28082	Widang/Bedahan - Babat	1,06	0,85
28081	Sadang (Bts. Kab. Lamongan) - Bts. Kota Gresik	1,76	17,80
28047	Taman - Waru	2,24	1,52
28043	Mlirip - Krian (Mlirip - Bypass Krian)	1,29	10,93
28038	Bts. Kab. Kediri - Bts. Kota Jombang	1,06	6,07
28016	Gempol - Bts. Kota Bangil	1,39	0,81
28012	Waru - Bts. Kota Sidoarjo	1,15	2,94
28008	Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik	1,21	13,37

Sumber: BBPJN Jawa Timur-Bali diolah BPIW, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.5 Kinerja Jalan Berdasarkan VCR

2) Pergerakan Lalu Lintas (Matriks Asal dan Tujuan)

Proyeksi ruas prioritas untuk ditangani dapat dilihat dari Pergerakan Lalu Lintas (Matriks Asal dan Tujuan). Berdasarkan matriks asal tujuan disimpulkan Pergerakan Tertinggi terjadi di Sidoarjo-Gresik. Dua wilayah tersebut memiliki jumlah kawasan industri terbanyak; Sidoarjo 2 Kawasan Industri, sedangkan Gresik 3 kawasan industri. Selain itu di Sidoarjo juga terdapat bandara sebagai sarana distribusi barang melalui udara ke wilayah lain. Diperkirakan pada tahun 2029 akan ada penambahan bangkitan pergerakan sebesar 18.866 smp/hr menuju/dari Kota Surabaya. Perhitungan bangkitan pergerakan penumpang menggunakan asumsi 3% tenaga kerja *commuter* Kota Surabaya.

3) Proyeksi Arus Lalu Lintas

Berdasarkan Asumsi Permenperin 40/2016, dengan asumsi 1 Ha Kawasan Industri akan menimbulkan 100 Tenaga Kerja. Dari 100 Tenaga kerja tersebut 30% mengendarai mobil, 20% menggunakan motor, dan 50% menggunakan bus. Selain itu diasumsikan untuk bangkitan kendaraan berat (pabrik) karena ekspor dan impor, maka setiap 1 Ha Kawasan Industri akan menghasilkan bangkitan 1 smp/hari/Ha. Sehingga setiap pembangunan 1 Ha Kawasan Industri akan menghasilkan 5,5 smp/hari/Ha. Proyeksi lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

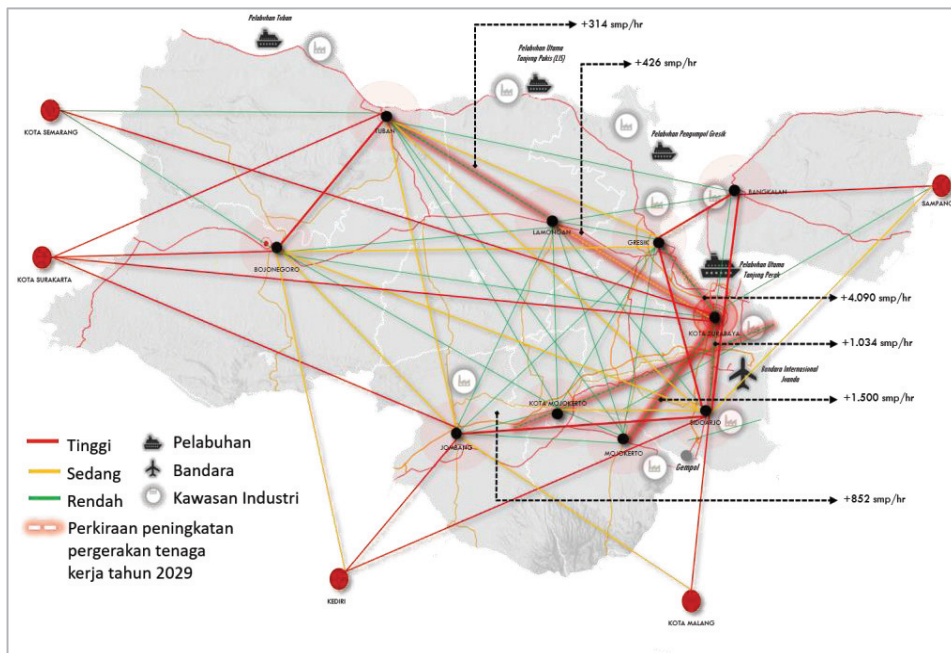
Tabel 7.19 Proyeksi LHRT Akibat Industri

Kawasan Industri (KI)	Luas (Ha)	Sisa Lahan	2020		2023		2024		2029		2030		2034	
			Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)
Surabaya Industrial Estate Rungkut	245	194	51	153	56	168	64	193	112	337	138	414	187	561
Sidoarjo Industrial Estate Berbek	87	11	76	228	78	233	81	242	87	261	87	261	87	261
Maspion Industrial Estate	457	50	407	1.221	416	1.248	432	1.296	457	1.371	457	1.371	457	1.371
Ngoro Industrial Park	500	25	475	1.425	485	1.455	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500
KI Safe N Lock	322	232	90	270	96	289	108	323	170	511	204	613	269	806
Java Integrated Industrial Port Estate	1.761	1.721	40	120	75	226	137	410	480	1.441	665	1.995	1.017	3.052
KI Gresik	140	20	120	360	123	368	128	383	140	420	140	420	140	420
KI Tuban	233	211	22	66	27	80	35	104	80	241	105	314	151	454
KI SIRIE*	150	150	0	0	3	9	8	25	38	113	53	160	83	250
KI Salt Lake*	285	285	0	0	6	17	16	47	71	214	101	304	158	475
KI Ploso Jombang*	800	800	0	0	16	48	44	132	200	600	284	852	444	1.332

Kawasan Industri (KI)	Luas (Ha)	Sisa Lahan	2020		2023		2024		2029		2030		2034	
			Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)	Luas Lahan (Ha)	Bangkitan (smp/hari)
KI Maritim Lamongan*	400	400	0	0	8	24	22	66	100	300	142	426	222	666
Madura Industrial Seaport City*	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	500	1.500	600	1.800	600	1.800
Total	15.380	14.099	1.281	3.843	1.389	4.166	1.574	4.723	2.936	8.808	3.477	10.430	4.316	12.947

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Adapun proyeksi pergerakan lalu lintas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

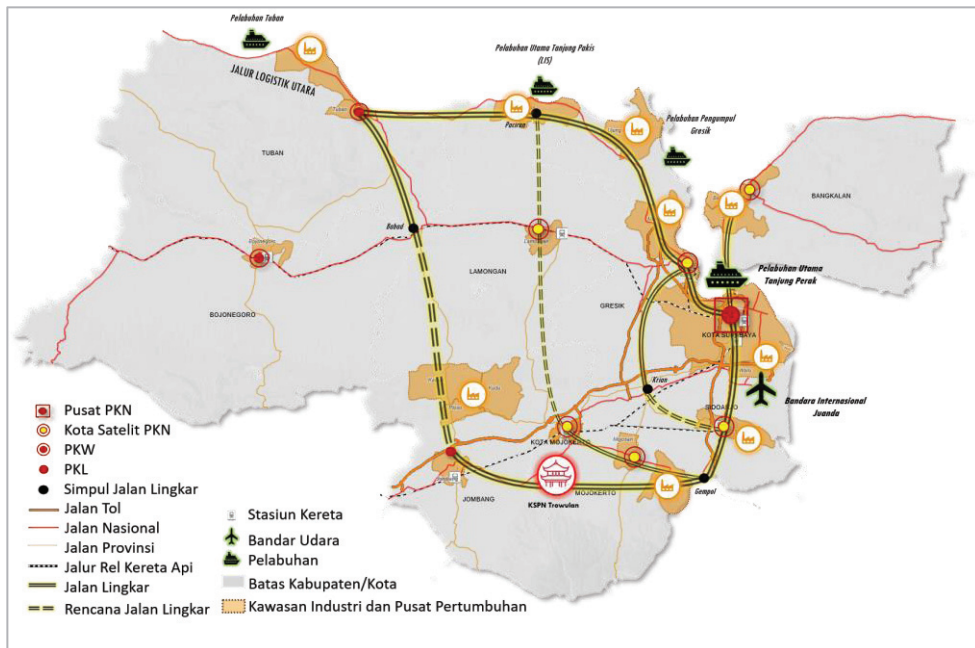


Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.6 Proyeksi Pergerakan Lalu Lintas

4) Usulan Pembangunan Jalan Lingkar

Sesuai dengan hasil analisis pergerakan (matriks *Origin-Destination*) dan proyeksi arus pekerja maka pada tahun 2029 akan terjadi penambahan bangkitan pergerakan maka dibutuhkan jalan lingkar untuk memecah kemacetan. Pembangunan jalan lingkar dibutuhkan untuk menghubungkan kawasan-kawasan dalam GKS Plus dan mengakomodasi bangkitan yang akan timbul serta mendukung berkembangnya jaringan radial yang sudah ada (radial jalur pantai utara, radial tengah Surabaya-Lamongan-Bondowoso, radial bawah Surabaya-Krian-Mojokerto-Jombang). Berikut rencana konsep jalan lingkar yang terdiri dari Outer Ring Road 1, Outer Ring Road 2, dan Outer Ring Road 3.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.7 Usulan Jalan Lingkar

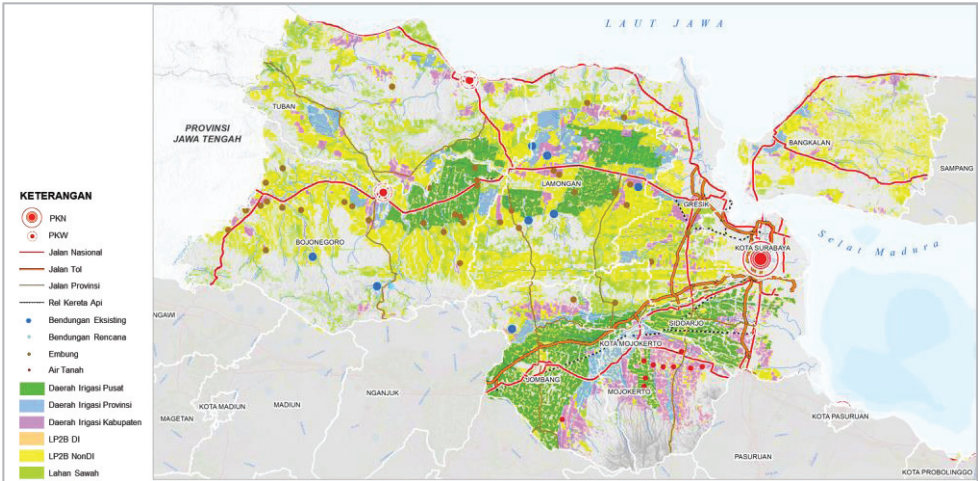
7.1.3 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pertanian

A. Gerbangkertosusila Plus

1) Kondisi Eksisting

PDRB sektor pertanian GKS Plus berkontribusi sebesar 4,95% terhadap total PDRB GKS Plus dan 25,22% terhadap PDRB pertanian Jawa Timur. Produksi padi GKS Plus sebanyak 3 jt ton/tahun (36% produksi Jawa Timur) dengan produktivitas 5,78 Ton/Ha (> nasional 5,11 Ton/Ha).

Terdapat 477.719 Ha lahan sawah dengan 68% luasnya ditetapkan sebagai LP2B. GKS Plus memiliki 206.059 Ha daerah irigasi. Daerah irigasi ini melayani 43% lahan sawah dan 39% LP2B. Terdapat 61% LP2B yang belum teririgasi di kawasan GKS Plus. Kab. Bojonegoro dan Lamongan merupakan wilayah dengan lahan LP2B non irigasi terbesar di GKS Plus.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.8 Pertanian Gerbangkertosusila Plus

Tabel 7.20 Sebaran Lahan Pertanian Gerbangkertosusila Plus

Kabupaten	Luas sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B non Irigasi (Ha)
Bangkalan	34.361	42.432	7.400,18	36.211
Bojonegoro	98.413	76.136	26.910,71	54.689
Gresik	44.014	36.063	11.917,18	28.628
Jombang	52.191	42.149	44.900,34	11.514
Kota Mojokerto	573	369	467,43	143
Kota Surabaya	2.680	2.178	449,35	2.022
Lamongan	104.841	83.357	44.214,82	52.074
Mojokerto	41.684	29.200	28.984,46	10.513
Sidoarjo	23.447	25.009	20.809,86	6.308
Tuban	75.515	52.011	20.004,67	36.370
Total	477.719	388.906	206.059,67	238.472

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

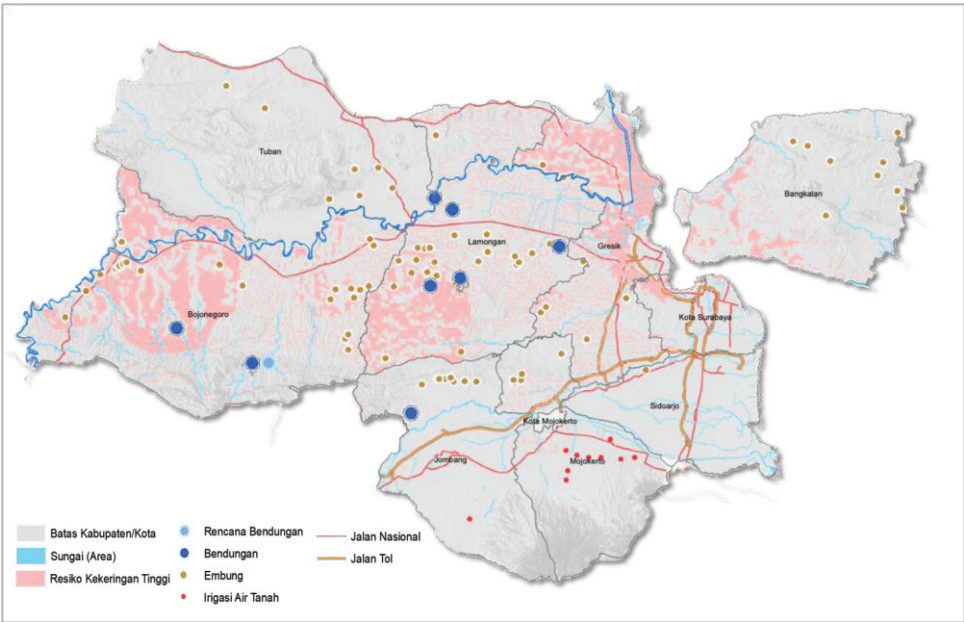
Berkaitan dengan isu fokus pertanian, GKS Plus memiliki isu rawan kekeringan dan banjir. Luasan kawasan rawan kekeringan tinggi sebesar 151.108 Ha tersebar di beberapa desa. Dalam prioritas penanganan, desa yang diprioritaskan penanganannya memiliki beberapa kriteria yaitu, luas kekeringan > 500 Ha, jumlah penduduk >2.400 jiwa dan kepadatan penduduk >1 jiwa/Ha. Dari kriteria tersebut, 5 desa prioritas tertinggi yaitu Desa Pangkahwetan (Gresik), Desa Malingmati, Desa Turi, Desa Sekaran, dan Desa Bandungrejo (Bojonegoro).

Tabel 7.21 Desa Rawan Kekeringan di GKS Plus

Desa	Kec.	Kab.	Luas Kekeringan (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
Tanjung Widoro	Bungah	Gresik	632,09	4.105	6
Bedanten	Bungah	Gresik	1.084,87	3.239	3
Sungonlegowo	Bungah	Gresik	1.189,99	5.291	4
Banjarsari	Cerme	Gresik	504,98	7.732	11
Ambeng - ambeng Watangrejo	Duduk sampeyan	Gresik	649,47	4.246	5
Lowayu	Dukun	Gresik	619,81	7.577	9
Leran	Manyar	Gresik	733,17	5.991	5
Manyarejo	Manyar	Gresik	844,79	4.063	4
Manyar Sidorukun	Manyar	Gresik	883,45	3.350	4
Wotan	Panceng	Gresik	743,89	2.886	3
Randuboto	Sidayu	Gresik	636,79	3.556	4
Pangkahwetan	Ujung pangkah	Gresik	2.005,34	9.882	3
Bronjong	Bluluk	Lamongan	501,62	2.828	6
Bluluk	Bluluk	Lamongan	928,43	3.130	4
Dradah blumbang	Kedung pring	Lamongan	809,88	6.042	5
Tenggerejo	Kedung pring	Lamongan	1.023,70	3.074	3
Jegreg	Modo	Lamongan	511,04	4.740	5
Mojorejo	Modo	Lamongan	525,54	6.566	6
Girik	Ngimbang	Lamongan	670,52	2.417	3
Slaharwotan	Ngimbang	Lamongan	707,37	3.657	17
Sendangrejo	Ngimbang	Lamongan	796,16	6.278	14
Pataan	Sambeng	Lamongan	611,61	3.540	3
Ngumpak dalem	Dander	Bojonegoro	548,52	11.084	13
Sumberagung	Dander	Bojonegoro	711,74	6.925	5
Ngunut	Dander	Bojonegoro	903,33	4.355	5
Leran	Kalitidu	Bojonegoro	919,22	6.298	4
Sekaran	Kasiman	Bojonegoro	1.287,25	3.543	2
Beji	Kedewan	Bojonegoro	877,18	2.491	2
Hargomulyo	Kedewan	Bojonegoro	1.024,09	4.373	3
Kedewan	Kedewan	Bojonegoro	1.276,14	3.516	3
Nglamping	Ngambon	Bojonegoro	1.173,19	2.445	6
Trenggulun	Ngasem	Bojonegoro	676,76	2.851	5
Setren	Ngasem	Bojonegoro	864,26	3.894	2
Butoh	Ngasem	Bojonegoro	948,91	3.320	2
Bandungrejo	Ngasem	Bojonegoro	1.279,22	3.252	2
Gamongan	Tambak Rejo	Bojonegoro	641,89	3.487	3
Kalisumber	Tambak Rejo	Bojonegoro	646,61	3.011	3
Ngrancang	Tambak Rejo	Bojonegoro	732,47	3.003	1
Tambakrejo	Tambak Rejo	Bojonegoro	754,09	3.138	3
Turi	Tambak Rejo	Bojonegoro	1.330,26	2.990	1
Malingmati	Tambak Rejo	Bojonegoro	1.674,61	4.434	2

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Persebaran wilayah kekeringan di GKS Plus dapat dilihat di Gambar 7.9.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.9 Wilayah Rawan Kekeringan Gerbangkertosusila Plus

2) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

LP2B GKS Plus sebesar 388.906,24 Ha. LP2B yang belum teririgasi sebesar 39% atau 238.472 Ha di tahun 2020. Ditargetkan pada tahun 2029 - 2034 lahan LP2B di GKS Plus sudah akan terlayani oleh irigasi teknis 100%.

Tabel 7.22 Target Pelayanan Air Baku Irigasi Gerbangkertosusila Plus

Kab/kota	Luas Lahan LP2B	Luas LP2B yang belum terlayani irigasi (Ha)	Target Pelayanan Air Irigasi untuk LP2B (%)							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Sidoarjo	25.009	6.308	75	75	78	80	83	86	100	100
Mojokerto	29.200	10.513	64	64	68	72	76	80	100	100
Jombang	42.149	11.514	73	73	76	79	82	85	100	100
Bojonegoro	76.136	54.689	28	28	36	44	52	60	100	100
Tuban	52.011	36.370	30	30	38	46	53	61	100	100
Lamongan	83.357	52.074	38	38	44	51	58	65	100	100
Gresik	36.063	28.628	21	21	29	38	47	56	100	100
Bangkalan	42.432	36.211	15	15	24	34	43	53	100	100
Kota Mojokerto	369	143	61	61	66	70	74	79	100	100
Kota Surabaya	2.178	2.022	7	7	17	28	38	48	100	100
GKS Plus	388.906	238.472								

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Target pelayanan tahunan diperoleh dari selisih perhitungan target akhir (100%) dan persentase pelayanan irigasi tahun 2020 dibagi 8 tahun,

sehingga disimpulkan bahwa kebutuhan air baku irigasi diperoleh dari target pelayanan air irigasi x luas LP2B total x standar kebutuhan air irigasi (1 l/detik/ha) yaitu 238.471,69 L/detik yang merupakan gap air baku irigasi yang perlu dipenuhi. Kebutuhan air baku irigasi hingga 2029 dan dilanjutkan sampai 2034 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.23 Kebutuhan Air Baku Irigasi Gerbangkertosusila Plus

Kab/ Kota	Kebutuhan Air Irigasi (L/detik)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Sidoarjo	19.402,03	20.102,96	20.803,88	21.504,81	25.009	25.009
Mojokerto	19.855,51	21.023,62	22.191,74	23.359,86	29.200	29.200
Jombang	31.915,04	33.194,33	34.473,63	35.752,92	42.149	42.149
Bojonegoro	27.523,70	33.600,30	39.676,89	45.753,48	76.136	76.136
Tuban	19.681,91	23.723,05	27.764,18	31.805,31	52.011	52.011
Lamongan	37.069,18	42.855,14	48.641,09	54.427,05	83.357	83.357
Gresik	10.616,25	13.797,11	16.977,97	20.158,83	36.063	36.063
Bangkalan	10.244,47	14.267,89	18.291,32	22.314,75	42.432	42.432
Kota Mojokerto	242,32	258,18	274,05	289,91	369	369
Kota Surabaya	381,00	605,68	830,37	1.055,05	2.178	2.178
GKS Plus	176.931,41	203.428,27	229.925,12	256.421,97	388.906	388.906

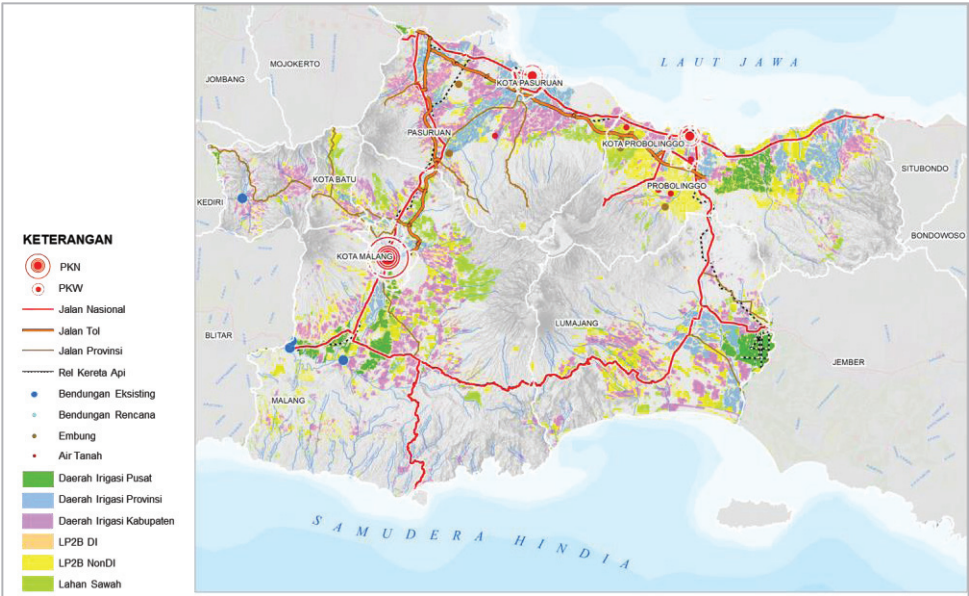
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

B. Bromo-Tengger-Semeru

3) Kondisi Eksisting

PDRB sektor pertanian BTS berkontribusi sebesar 11,65% (2021) terhadap total PDRB BTS dan 17,79% (2021) terhadap PDRB pertanian Jawa Timur. Produksi padi BTS sebanyak 1 jt ton/tahun (10,8 % produksi Jawa Timur) dengan produktivitas 5,58 Ton/Ha (> nasional 5,22 Ton/Ha, 2021).

Terdapat 181.475,92 Ha lahan sawah dengan 66% luasnya ditetapkan sebagai LP2B. BTS memiliki 131.427,03 Ha daerah irigasi (kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten). Daerah irigasi ini melayani 71% lahan sawah dan 56% LP2B. Terdapat 44% LP2B yang belum teririgasi di kawasan BTS. Kab. Probolinggo dengan luas 24.790,74 Ha dan Kab. Malang dengan luas 22.055,87 Ha merupakan wilayah dengan lahan LP2B non irigasi terbesar di BTS.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.10 Pertanian Bromo Tengger Semeru

Profil pertanian BTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.24 Sebaran Lahan Pertanian Bromo Tengger Semeru

Kabupaten	Luas sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B non Irigasi (Ha)
Lumajang	37.742,37	31.926,12	28.091,40	14.964,36
Malang	58.298,75	45.067,00	38.896,85	22.055,87
Pasuruan	38.808,69	38.171,07	1.502,32	10.291,39
Probolinggo	38.001,98	47.627,36	1.513,48	24.790,75
Kota Batu	4.060,02	2.898,53	1.609,33	1.989,83
Kota Malang	1.213,80	1.638,95	583,43	352,08
Kota Pasuruan	1.263,26	1.335,91	33.260,14	356,00
Kota Probolinggo	2.087,05	2.797,57	25.970,08	1.184,28
Total	181.475,92	171.462,50	131.427,03	75.984,57

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

4) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

Kontribusi PDRB pertanian BTS sebesar 19% terhadap PDRB pertanian Jatim. Produksi padi BTS 1 jt ton/tahun (11% Jatim) dengan produktivitas 5,37 Ton/Ha (di atas nasional 5,11 Ton/Ha). Luasan lahan sawah sebesar 177.416 Ha dengan 165.441 Ha ditetapkan sebagai LP2B (93%). Daerah Irigasi sebesar 128.807 Ha, yang melayani 72% lahan sawah (128.046 Ha) dan 56% LP2B (92.918 Ha). Terdapat 72.522 Ha (44%) LP2B belum teririgasi teknis. Luasan LP2B terbesar ada di Kab. Probolinggo sebesar 23.378 Ha.

Tabel 7.25 Luasan LP2B dan Daerah Irigasi DPP BTS

Kab/Kota	Luas Sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)
Malang	58.299	44.177	37.748	20.907
Probolinggo	38.002	46.793	25.785	23.378
Pasuruan	38.809	37.499	33.376	11.215

Kab/Kota	Luas Sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)
Lumajang	37.742	31.303	28.035	14.624
Kota Malang	1.214	1.607	1.119	749
Kota Probolinggo	2.087	2.748	1.514	1.326
Kota Pasuruan	1.263	1.313	1.232	324
BTS	177.416	165.441	128.807	72.522

Sumber: SIGI PUPR, 2022

Ditargetkan pada tahun 2029 dan dilanjutkan hingga 2034, LP2B di BTS sudah akan terlayani irigasi teknis 100%. Berdasarkan hasil analisis perhitungan pada Tabel 7.47 dan Tabel 7.48, kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan tahun 2029 sebesar 72.522 L/detik.

Tabel 7.26 Target Pelayanan Air Baku Irigasi DPP BTS

Kab/ Kota	Luas Lahan LP2B (Ha)	Luas Lahan LP2B yang Belum Teririgasi (Ha)	% LP2B yang Teririgasi	Target Pemenuhan Irigasi LP2B (%)									
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	44.177	20.907	53%	53	59	65	70	76	82	88	94	100	100
Probolinggo	46.793	23.378	50%	50	56	63	69	75	81	88	94	100	100
Pasuruan	37.499	11.215	70%	70	74	78	81	85	89	93	96	100	100
Lumajang	31.303	14.624	53%	53	59	65	71	77	82	88	94	100	100
Kota Malang	1.607	749	53%	53	59	65	71	77	83	88	94	100	100
Kota Probolinggo	2.748	1.326	52%	52	58	64	70	76	82	88	94	100	100
Kota Pasuruan	1.313	324	75%	75	78	82	85	88	91	94	97	100	100
BTS	165.441	72.522											

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.27 Proyeksi Kebutuhan Air Baku DPP BTS

Kab/Kota	Kebutuhan Air Irigasi (L/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	25.884	28.497	31.110	33.724	36.337	38.950	41.564	44.177	44.177
Probolinggo	26.338	29.260	32.182	35.105	38.027	40.949	43.871	46.793	46.793
Pasuruan	27.685	29.087	30.489	31.891	33.293	34.695	36.097	37.499	37.499
Lumajang	18.507	20.335	22.163	23.991	25.819	27.647	29.475	31.303	31.303
Kota Malang	952	1.046	1.139	1.233	1.327	1.420	1.514	1.607	1.607
Kota Probolinggo	1.588	1.754	1.920	2.085	2.251	2.417	2.583	2.748	2.748
Kota Pasuruan	1.029	1.070	1.110	1.151	1.191	1.232	1.272	1.313	1.313
BTS	101.984	111.049	120.114	129.180	138.245	147.310	156.376	165.441	165.441

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

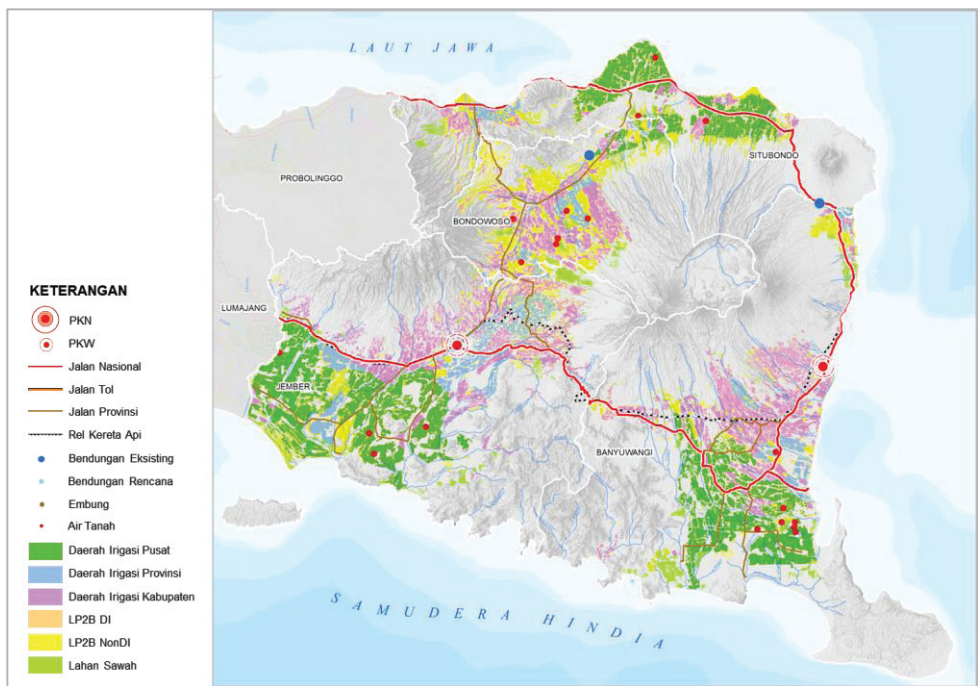
C. Selingkar Ijen

1) Kondisi Eksisting

PDRB sektor pertanian Selingkar Ijen berkontribusi sebesar 28,20% (2021) terhadap total PDRB Kawasan Selingkar Ijen dan 20,94% (2021) terhadap PDRB pertanian Jawa Timur. Produksi padi Selingkar Ijen sebanyak 1,5 jt ton/tahun (15,7 % produksi Jawa Timur) dengan produktivitas 5,17 Ton/Ha (< nasional 5,22 Ton/Ha, 2021).

Terdapat 231.199,88 Ha lahan sawah dengan 69 % luasnya ditetapkan sebagai LP2B. Selingkar Ijen memiliki 187.342,57 Ha daerah irigasi (kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten). Daerah irigasi ini melayani

81% lahan sawah dan 69% LP2B. Terdapat 31% LP2B yang belum teririgasi di kawasan Selingkar Ijen. Kab. Bondowoso dan Kab. Jember merupakan wilayah dengan lahan LP2B non irigasi terbesar di Selingkar Ijen.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.11 Pertanian Selingkar Ijen

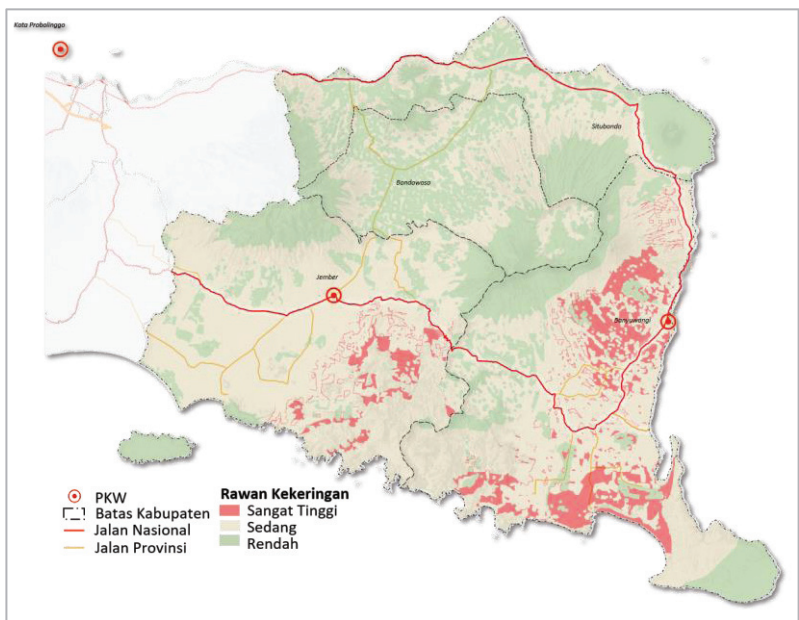
Profil pertanian Selingkar Ijen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.28 Sebaran Lahan Pertanian Selingkar Ijen

Kabupaten	Luas sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B non Irigasi (Ha)
Banyuwangi	69.788,21	50.334,62	58.240,29	12.883,53
Bondowoso	39.237,89	42.500,88	23.978,30	22.196,16
Jember	86.501,68	69.337,13	76.501,55	16.907,40
Situbondo	35.672,10	37.156,03	28.622,44	10.506,08
Total	231.199,88	199.328,67	187.342,57	62.493,17

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Kawasan rawan kekeringan tinggi di Selingkar Ijen sebesar 69.891,75 Ha dengan kawasan rawan kekeringan >500 ha sebesar 28.002,16 Ha yang tersebar di 18 desa terkonsentrasi di Kab Banyuwangi (Kawasan perkotaan dan wilayah selatan Banyuwangi) dan Jember (sekitar Taman Nasional Meru Betiri). Terdapat 5 desa rawan kekeringan tertinggi: Temurejo, Seneporejo, Kalipait, Kendarejo, Grajagan (Kab Banyuwangi).



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.12 Rawan Kekeringan di Kawasan Wisata Selingkar Ijen

Tabel 7.29 Luasan Kekeringan di masing-masing Kabupaten/Kota Selingkar Ijen

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kekeringan	Luas (ha)
Tamansari	Licin	Banyuwangi	Tinggi	774,88
Sanenrejo	Tempurejo	Jember	Tinggi	648,78
Curahnongko	Tempurejo	Jember	Tinggi	559,73
Andongrejo	Tempurejo	Jember	Tinggi	949,50
Kalipuro	Kalipuro	Banyuwangi	Tinggi	1.103,22
Gombongsari	Kalipuro	Banyuwangi	Tinggi	1.658,88
Pakel	Licin	Banyuwangi	Tinggi	1.036,01
Bayu	Songgon	Banyuwangi	Tinggi	1.172,73
Mulyorejo	Silo	Jember	Tinggi	1.533,07
Pace	Silo	Jember	Tinggi	1.217,28
Harjomulyo	Silo	Jember	Tinggi	1.046,87
Sumberagung	Pesanggaran	Banyuwangi	Tinggi	2.433,08
Sumbersari	Purwoharjo	Banyuwangi	Tinggi	1.106,73
Grajan	Purwoharjo	Banyuwangi	Tinggi	1.728,22
Kendalrejo	Tegaldlimo	Banyuwangi	Tinggi	2.588,52
Kalipait	Tegaldlimo	Banyuwangi	Tinggi	2.801,61
Seneporejo	Siliragung	Banyuwangi	Tinggi	2.112,38
Temurejo	Bangorejo	Banyuwangi	Tinggi	3.530,66
Total				28.002,16

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

2) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

LP2B Ijen yang sudah ditetapkan oleh daerah sebesar 159.037 Ha. Berdasarkan analisis spasial lahan LP2B yang belum teririgasi sebesar 38% atau 59.777 Ha di tahun 2020. Syarat LP2B salah satunya yaitu penggunaan saluran irigasi teknis. Sehingga ditargetkan pada tahun 2029 lahan LP2B di Ijen sudah akan terlayani oleh irigasi teknis 100%.

Target pelayanan tahunan diperoleh dari selisih perhitungan target akhir (100%) dan persentase pelayanan irigasi tahun 2020 dibagi 8 tahun.

Kebutuhan air baku irigasi diperoleh dari target pelayanan air irigasi x luas LP2B total x standar kebutuhan air irigasi (1 l/detik/ha). Berikut tabel perhitungan kebutuhan air baku irigasi:

Tabel 7.30 Target Pelayanan Air Baku Irigasi Selingkar Ijen

Kab/ Kota	LP2B (Ha)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)	% LP2B Teririgasi	Target Pemenuhan Irigasi LP2B (%)														
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Banyuwangi	49.404	12.906	74	74	77	80	84	87	90	93	97	100	100	100	100	100	100	
Bondowoso	41.771	21.690	48	48	55	61	68	74	81	87	94	100	100	100	100	100	100	
Jember	31.303	14.624	53	53	59	65	71	77	82	88	94	100	100	100	100	100	100	
Situbondo	36.559	10.556	71	71	75	78	82	86	89	93	96	100	100	100	100	100	100	
Ijen	159.037	59.776	62	62	67	71	76	81	86	90	95	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.31 Kebutuhan Air Baku Irigasi Selingkar Ijen

Kab/Kota	Kebutuhan Air Irigasi (L/detik)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Banyuwangi	38.111	39.725	41.338	42.951	44.564	46.178	47.791	49.404	49.404	49.404	49.404	49.404	49.404
Bondowoso	22.792	25.504	28.215	30.926	33.637	36.349	39.060	41.771	41.771	41.771	41.771	41.771	41.771
Jember	18.507	20.335	22.163	23.991	25.819	27.647	29.475	31.303	31.303	31.303	31.303	31.303	31.303
Situbondo	27.323	28.642	29.962	31.281	32.601	33.920	35.240	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559
Ijen	106.733	114.205	121.677	129.149	136.621	144.093	151.565	159.037	159.037	159.037	159.037	159.037	159.037

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebutuhan air irigasi yang tahun 2029-2034 adalah sebesar **159.037 L/detik**. Pada kawasan Selingkar Ijen terdapat Bendungan Bajulmati di Banyuwangi yang masih dapat dimanfaatkan untuk irigasi.

Bendungan Bajulmati yang dibangun tahun 2015 kapasitas 10 juta m3 memiliki manfaat sebagai berikut:

- Air Irigasi: 1.800 Ha (1.322 Ha Banyuwangi dan 478 Ha Situbondo)
- Air Baku: 180 l/detik (60 l/detik untuk industri dan 120 l/detik domestik)
- Potensi Pembangkit Micro Hydropower 340 Kw
- Pengendali banjir dan konservasi air
- Pengembangan pariwisata dan perikanan tebar.

Dari hasil analisis di atas, di Banyuwangi masih terdapat 12.906 Ha (26%) LP2B yang belum teririgasi, dan 12.500 Ha-nya berada di sekitar Bendungan Bajulmati. Untuk mendorong pengembangan pertanian di Banyuwangi dapat melakukan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di sekitar bendungan.

D. Madura Kepulauan

1) Kondisi Eksisting

Wilayah Madura Kepulauan memiliki luas sebesar 5.025,30 km² (10,51% Jawa Timur) yang meliputi 4 kabupaten, yaitu: Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep serta 127 pulau. Jumlah penduduk sebesar 4.004.564 jiwa (9,85% Jawa Timur), dengan kepadatan penduduk 875 jiwa/km² (netto), dan jumlah penduduk miskin 15,62% (di atas Jatim).

Kontribusi PDRB Madura Kepulauan sebesar Rp. 66.132,8 Milyar (4,09% Jawa Timur) dengan sektor unggulan berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan sub sektor sektor ekonomi unggulan adalah pertanian tanaman pangan. Pertanian tanaman pangan menyumbang 31,04% dari total PDRB Madura (8,82% Jawa Timur; 1,1% nasional). Sektor pertambangan & penggalian juga merupakan salah satu sektor unggulan setelah sektor pertanian, sektor ini menyumbang 16,9% PDRB Madura (9,96% Jawa Timur; 1,04% nasional). Namun saat ini belum ada infrastruktur gas bumi yang melewatinya.

PDRB sektor pertanian Madura dan Kepulauan berkontribusi sebesar 32,47% (2021) terhadap total PDRB Kawasan Madura dan Kepulauan dan 11,3% (2021) terhadap PDRB pertanian Jawa Timur. Produksi padi Madura dan Kepulauan sebanyak 710 ton/tahun (7,25% produksi Jawa Timur) dengan produktivitas 5,09 Ton/Ha (< nasional 5,22 Ton/Ha, 2021).

Terdapat 117.993,64 Ha lahan sawah dengan 69 % luasnya ditetapkan sebagai LP2B. Madura dan Kepulauan memiliki 21.959,92 Ha daerah irigasi (kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten). Daerah irigasi ini melayani 17% lahan sawah dan 12% LP2B. Terdapat 88% LP2B yang belum teririgasi di kawasan Madura dan Kepulauan. Kab. Sampang dan Kab. Bangkalan merupakan wilayah dengan lahan LP2B non irigasi terbesar di Madura dan Kepulauan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.13 Pertanian Madura dan Kepulauan

Profil pertanian Madura dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

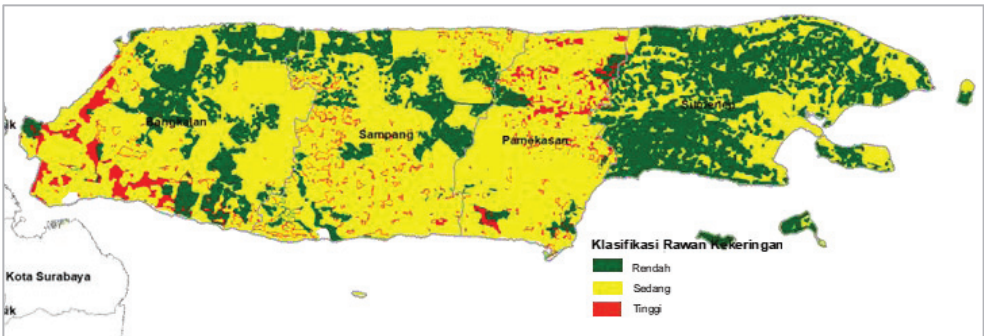
Tabel 7.32 Sebaran Lahan Pertanian Madura dan Kepulauan

Kabupaten	Luas sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B non Irigasi (Ha)
Bangkalan	34.361,40	43.061,22	7.400,18	36.599,04
Pamekasan	23.953,80	26.003,38	3.483,98	23.841,50
Sampang	35.446,12	45.749,54	3.750,86	42.580,19
Sumenep	24.232,31	20.649,55	7.324,90	16.042,16
Total	117.993,64	135.463,69	21.959,92	119.062,89

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Walaupun Madura mempunyai sektor ekonomi unggulan berupa pertanian tanaman pangan namun sebagian besar sawah dan ladang pertanian menggunakan tadah hujan sehingga produktivitasnya rendah.

Berkaitan dengan rawan kekeringan khususnya di kawasan pertanian, sebagian besar Madura dan Kepulauan merupakan kawasan rawan kekeringan sedang. Kawasan rawan kekeringan tinggi berada di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

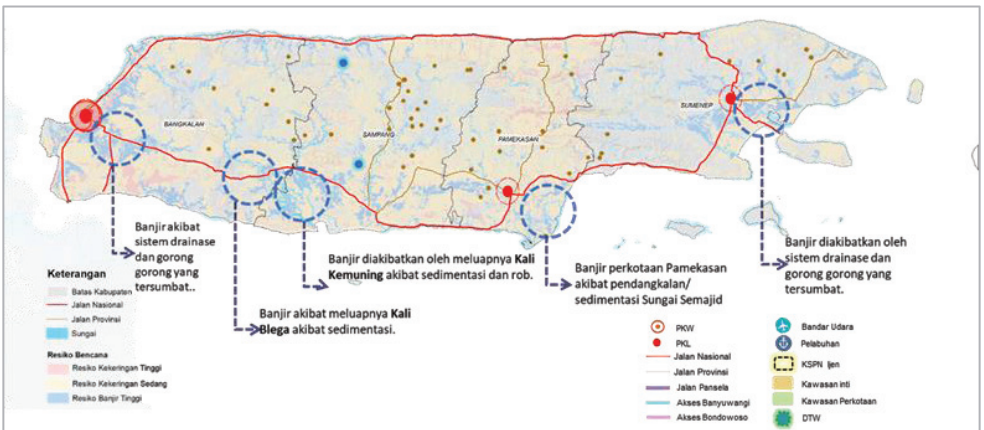
Gambar 7.14 Rawan Kekeringan di Kawasan Madura dan Kepulauan

Tabel 7.33 Luasan Kekeringan di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Luas Kekeringan (Ha)			Total Ha
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bangkalan	34.720,75	85.807,79	10.085,83	130.614,37
Pamekasan	5.272,35	67.601,63	7.603,88	80.477,87
Sampang	27.555,99	90.952,11	5.436,12	123.944,22
Sumenep	136.445,06	59.622,72	308,87	196.376,64
Total	203.994,15	303.984,26	23.434,69	531.413,09

Sumber: BNPB, 2021

Berkaitan dengan kerawanan banjir, sebagian besar Madura dan Kepulauan merupakan kawasan rawan banjir sedang. Kawasan rawan banjir tinggi berada di Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.15 Rawan Bencana Banjir di Madura dan Kepulauan

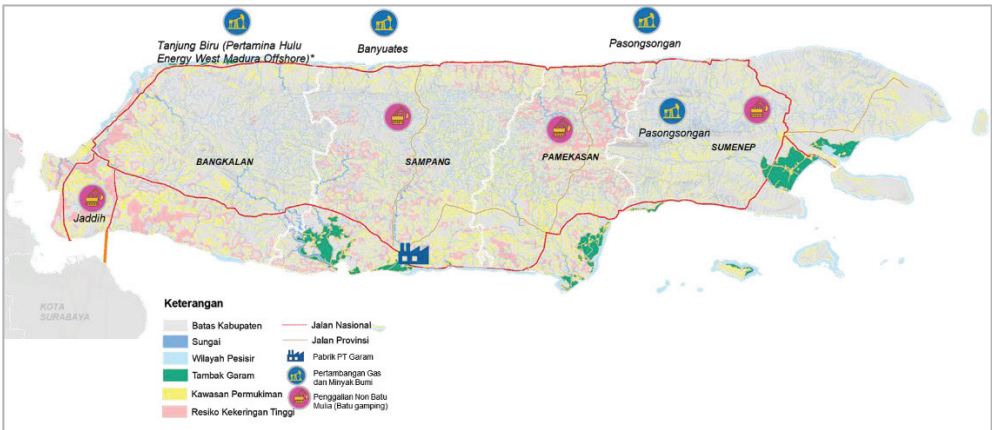
Untuk luasan kerawanan banjir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.34 Luasan Banjir di Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Luas Banjir (Ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total ha
Bangkalan	3.148,66	19.587,25	10.651,04	33.386,95
Pamekasan	1.126,60	5.358,40	10.725,33	17.210,33
Sampang	4.620,11	13.894,43	11.529,00	30.043,53
Sumenep	12.064,33	22.183,00	9.004,43	43.251,76
Total	20.959,70	61.023,07	41.909,80	123.892,57

Sumber: BPS, 2021

Selain itu, produksi garam Madura merupakan salah satu produk unggulan setelah pertanian. Namun, untuk fokus isu yang akan diutamakan ialah fokus isu pertanian tanaman pangan. Produksi garam menyumbang 76% produksi garam Jawa Timur dan merupakan salah satu penghasil garam terbesar nasional (38%). Luas tambak garam di Madura sebesar 10.057,46 Ha, dengan luas terbesar berada di Kabupaten Sampang. 84% produksi garam dihasilkan oleh petani tambak tanpa menggunakan teknologi modern, dan 16% produksi garam oleh PT Garam (kapasitas produksi pabrik garam Sampang 63.000 ton/tahun).



Sumber: RIPIN dan ESDM diolah BPIW, 2022

Gambar 7.16 Sebaran Potensi Garam dan Tambang Madura dan Kepulauan

2) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

LP2B Madura dan Kepulauan yang sudah ditetapkan sebesar 133.544 Ha. Berdasarkan analisis spasial, LP2B yang belum teririgasi sebesar 88% atau 117.366 Ha di tahun 2020. Ditargetkan pada tahun 2029 LP2B di Madura dan Kepulauan sudah akan terlayani oleh irigasi teknis 100%.

Target pelayanan tahunan diperoleh dari selisih perhitungan target akhir (100%) dan persentase pelayanan irigasi tahun 2020 dibagi 8 tahun. Kebutuhan air baku irigasi diperoleh dari target pelayanan air irigasi x luas LP2B total x standar kebutuhan air irigasi (1 l/detik/ha). Berikut tabel perhitungan kebutuhan air baku irigasi:

Tabel 7.35 Target Pelayanan Air Baku Irigasi Madura dan Kepulauan

Kab/ Kota	LP2B (Ha)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)	% LP2B Teririgasi	Target Pemenuhan Irigasi LP2B (%)															
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Bangkalan	42.432	36.211	15	15	25	36	47	57	68	79	89	100	100	100	100	100	100		
Sampang	45.093	42.021	7	7	18	30	42	53	65	77	88	100	100	100	100	100	100		
Pamekasan	25.641	23.555	8	8	20	31	43	54	66	77	89	100	100	100	100	100	100		
Sumenep	20.378	15.579	24	24	33	43	52	62	71	81	90	100	100	100	100	100	100		
MADURA	133.544	117.366	14	14	24	35	46	57	68	79	89	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.36 Kebutuhan Air Baku Irigasi Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Kebutuhan Air Irigasi (L/detik)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bangkalan	10.747	15.273	19.800	24.326	28.853	33.379	37.905	42.432	42.432	42.432	42.432	42.432	42.432
Sampang	8.324	13.576	18.829	24.082	29.335	34.588	39.840	45.093	45.093	45.093	45.093	45.093	45.093
Pamekasan	5.031	7.976	10.920	13.864	16.808	19.752	22.697	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641	25.641
Sumenep	6.746	8.694	10.641	12.589	14.536	16.483	18.431	20.378	20.378	20.378	20.378	20.378	20.378
Madura	30.848	45.519	60.190	74.861	89.532	104.202	118.873	133.544	133.544	133.544	133.544	133.544	133.544

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tersebut, kebutuhan air irigasi yang dibutuhkan pada tahun 2029-2034 adalah sebesar 133.544 L/detik.

Di Madura dan Kepulauan terdapat 2 Bendungan dan 49 embung tadah hujan sebagai berikut:

Tabel 7.37 Infrastruktur penyedia air baku Madura dan Kepulauan

Nama Infrastruktur	Pengelola	Volume (m3)	Nama DAS	Luas layanan (Ha)	Kec. telayani	Thn Dibangun	Keterangan
Bendungan Nipah	BBWS Brantas	1.560.000	Nipah	1.150	Banyuates	2009-2018	Belum Operasi
Bendungan Klampis	Dinas PU SDA Prov. Jawa Timur	10.250.000	Blega	2603	Sampang, Jrengik, Torjun	1965	Beroperasi

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

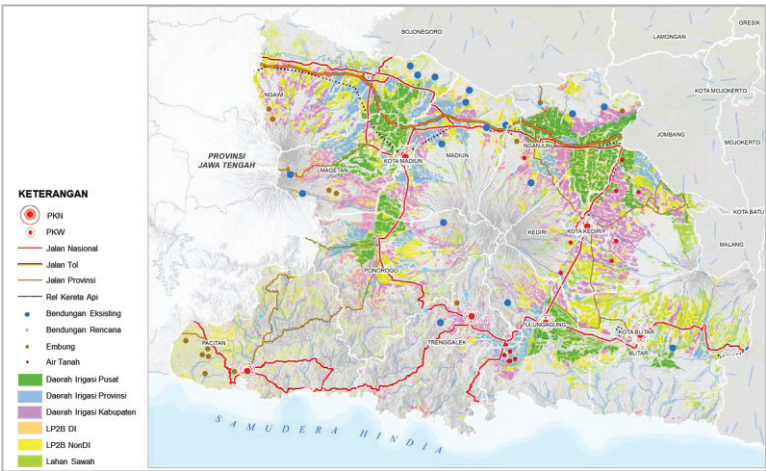
Kedua bendungan tersebut tidak berfungsi secara optimal. Bendungan Nipah belum beroperasi dikarenakan ada kendala pembebasan lahan jaringan irigasinya, sedangkan Bendungan Klampis mengalami sedimentasi dan kebocoran pada jaringan irigasi, sehingga daya tampung genangan hanya 45%. Sedimentasi tersebut diakibatkan erosi pada hulu sungai Blega.

E. Selingkar Wilis

1) Kondisi Eksisting

PDRB sektor pertanian Selingkar Wilis berkontribusi sebesar 16,83% (2021) terhadap total PDRB Kawasan Selingkar Wilis dan 25,6% (2021) terhadap PDRB pertanian Jawa Timur. Produksi padi Selingkar Wilis sebanyak 3,3 juta ton/tahun (33,78% produksi Jawa Timur) dengan produktivitas 5,87 Ton/Ha (> nasional 5,22 Ton/Ha, 2021). Terdapat 343.848,79 Ha lahan sawah dengan 63% luasnya ditetapkan sebagai LP2B. Selingkar Wilis memiliki 236.710,24 Ha daerah irigasi (kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten). Beberapa DI yang melayani pertanian di Selingkar Wilis: DI Colo, DI Sim, dan DI Waduk

Pondok di Kab. Ngawi; DI Asin Bawah, DI Sim, dan DI Jejeruk di Kab. Madiun. Daerah irigasi ini melayani 69% lahan sawah dan 54% LP2B. Terdapat 46% LP2B yang belum teririgasi di kawasan Selingkar Wilis. Kab. Ngawi dan Kab. Blitar merupakan wilayah dengan lahan LP2B non irigasi terbesar di Selingkar Wilis.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.17 Pertanian Selingkar Wilis

Profil pertanian Selingkar Wilis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.38 Sebaran Lahan Pertanian Selingkar Wilis

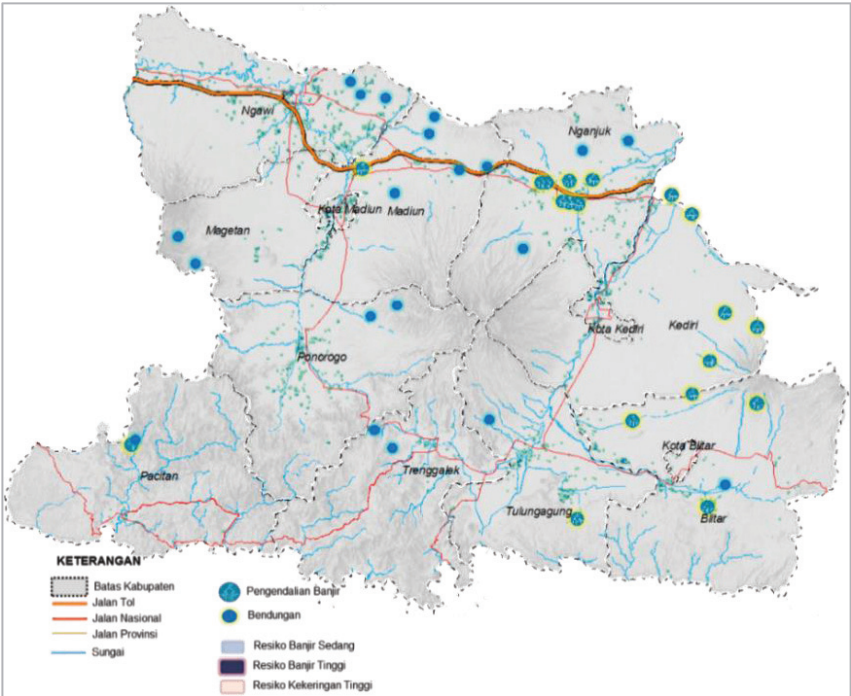
Kabupaten	Luas sawah (ha)	Luas LP2B (ha)	Daerah Irigasi (pusat/prov/kab)	LP2B non Irigasi (Ha)
Blitar	33.107,08	25.271,17	9.363,69	20.615,58
Kediri	56.693,57	38.929,12	39.203,47	14.588,00
Madiun	33.720,54	30.369,91	25.383,02	12.284,39
Magetan	27.015,48	21.626,90	24.089,63	6.722,53
Nganjuk	48.173,68	41.214,03	42.452,24	10.750,68
Ngawi	51.172,31	46.028,22	29.423,30	21.088,21
Pacitan	12.954,69	19.511,72	3.772,26	16.429,02
Ponorogo	35.650,97	33.814,57	26.922,35	17.206,14
Trenggalek	12.013,52	9.623,39	11.204,01	3.813,89
Tulung Agung	28.920,05	24.612,55	21.788,38	9.787,27
Kota Blitar	907,05	797,35	788,86	571,76
Kota Kediri	2.630,83	1.733,06	1.777,07	650,52
Kota Madiun	889,02	816,09	541,96	292,01
Total	343.848,79	294.348,09	236.710,24	134.800,01

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Di Selingkar Wilis terdapat 20 Bendungan dan 84 embung dan 3 bendungan baru dengan fungsi irigasi, yaitu Bendungan Tugu, Bendungan Bendo, dan Bendungan Semantok.

Kawasan resiko tinggi banjir di Selingkar Wilis seluas 40,27 km2 dan resiko banjir sedang seluas 1.256,67 km2. Kabupaten yang memiliki resiko tinggi banjir antara lain Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, dan Ponorogo. Banjir disebabkan luapan sungai Bengawan Solo, Kali Madiun, & Kali Konto, serta saluran drainase yang tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi.

Kawasan resiko tinggi kekeringan di Selingkar Wilis seluas 2.171,78 km2 dan resiko kekeringan sedang seluas 8.373,85 km2. Kabupaten yang memiliki resiko tinggi kekeringan antara lain Ngawi, Ponorogo, Nganjuk, dan Kediri.



Sumber: Ditjen SDA diolah BPIW, 2022

Gambar 7.18 Rawan Banjir dan Kekeringan

2) Analisis Kebutuhan Air Irigasi

LP2B Selingkar Wilis sebesar 288.810 Ha. Berdasarkan analisis spasial, LP2B yang belum teririgasi sebesar 46% atau 132.618 Ha di tahun 2020.

Ditargetkan pada 2029, LP2B Selingkar Wilis akan terlayani oleh irigasi teknis 100%. Target pelayanan tahunan diperoleh dari selisih perhitungan target akhir (100%) dan persentase pelayanan irigasi tahun 2020 dibagi 8 tahun. Kebutuhan air baku irigasi diperoleh dari target pelayanan air irigasi x luas LP2B total x standar kebutuhan air irigasi (1 l/detik/ha).

Tabel 7.39 Target Pelayanan Air Baku Irigasi Selingkar Wilis

Kab/Kota	LP2B (Ha)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)	% LP2B yang Teririgasi	Target Pemenuhan Irigasi LP2B (%)										
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034	
Ponorogo	33.156	16.814	49	49	56	62	68	75	81	87	94	100	100	
Tulungagung	24.114	9.911	59	59	64	69	74	79	85	90	95	100	100	
Kediri	38.201	14.321	63	63	67	72	77	81	86	91	95	100	100	
Nganjuk	40.476	10.512	74	74	77	81	84	87	90	94	97	100	100	
Madiun	29.823	12.099	59	59	65	70	75	80	85	90	95	100	100	
Ngawi	45.224	20.896	54	54	60	65	71	77	83	88	94	100	100	

Kab/Kota	LP2B (Ha)	LP2B Belum Teririgasi (Ha)	% LP2B yang Teririgasi	Target Pemenuhan Irigasi LP2B (%)									
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Magetan	21.230	6.547	69	69	73	77	81	85	88	92	96	100	100
Blitar	24.767	20.245	18	18	28	39	49	59	69	80	90	100	100
Trenggalek	9.426	3.461	63	63	68	72	77	82	86	91	95	100	100
Pacitan	19.110	16.347	14	14	25	36	47	57	68	79	89	100	100
Kota Blitar	781	514	34	34	42	51	59	67	75	84	92	100	100
Kota Kediri	1.700	582	66	66	70	74	79	83	87	91	96	100	100
Kota Madiun	801	370	54	54	60	65	71	77	83	88	94	100	100
WILIS	288.810	132.618											

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Target pelayanan tahunan diperoleh dari selisih perhitungan target akhir (100%) dan persentase pelayanan irigasi tahun 2020 dibagi 8 tahun, sehingga disimpulkan bahwa kebutuhan air baku irigasi diperoleh dari target pelayanan air irigasi x luas LP2B total x standar kebutuhan air irigasi (1 l/detik/ha) yaitu 132.618 L/detik.

Tabel 7.40 Kebutuhan Air Baku Irigasi Selingkar Wilis

Kab/Kota	Kebutuhan Air Irigasi (L/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Ponorogo	18.445	20.547	22.649	24.748	26.850	28.952	31.054	33.156	33.156
Tulungagung	15.442	16.679	17.919	19.158	20.398	21.635	22.874	24.114	24.114
Kediri	25.671	27.459	29.250	31.042	32.830	34.621	36.409	38.201	38.201
Nganjuk	31.280	32.592	33.907	35.218	36.534	37.849	39.161	40.476	40.476
Madiun	19.236	20.748	22.260	23.775	25.287	26.799	28.311	29.823	29.823
Ngawi	26.940	29.554	32.164	34.778	37.387	40.001	42.610	45.224	45.224
Magetan	15.502	16.320	17.139	17.957	18.776	19.594	20.413	21.230	21.230
Blitar	7.051	9.582	12.113	14.645	17.176	19.704	22.236	24.767	24.767
Trenggalek	6.397	6.830	7.262	7.695	8.128	8.560	8.993	9.426	9.426
Pacitan	4.806	6.849	8.894	10.937	12.979	15.022	17.067	19.110	19.110
Kota Blitar	332	396	460	524	589	653	717	781	781
Kota Kediri	1.191	1.264	1.337	1.410	1.482	1.555	1.627	1.700	1.700
Kota Madiun	478	524	570	616	663	709	755	801	801
Wilis	172.772	189.343	205.925	222.502	239.078	255.655	272.228	288.810	288.810

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

7.1.4 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pariwisata

A. Bromo-Tengger-Semeru

1) Kondisi Eksisting

a) Profil Wilayah

Wilayah BTS terdapat 4 wilayah inti yaitu Kab Probolinggo, Kab Pasuruan, Kab Malang dan Kab Lumajang yang ditunjang dengan 3 kawasan perkotaan di Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Malang. Luas wilayah DPP Bromo-Tengger-Semeru (DPP BTS) sebesar 10.845,73 km2 dimana luas KSPN BTS sebesar 521,63 km2 (4,8% luas wilayah DPP BTS). Peta administrasi dapat dilihat pada peta 7.2.

Jumlah Penduduk total 8.036.716 jiwa dengan kepadatan penduduk Netto sebesar 1138 jiwa/km². Jumlah Penduduk Miskin 11,30%, IPM 73,76. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 adalah 721.082 wisatawan berlibur ke Gunung Bromo, 699.021 wisatawan lokal dan 22.061 wisatawan mancanegara berdasarkan data dari Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS). Wisatawan ke Bromo dapat melalui 4 pintu gerbang di 4 Kabupaten. Mayoritas wisatawan melewati pintu Cemoro Lawang (Kec. Sukapura, Kab Probolinggo) 43%, kemudian Kec. Wonokitri (Kec. Tosari, Kab. Pasuruan) sebanyak 28%, Kec. Ngadas (Kec. Poncokusumo, Kab. Malang): 25%, dan pintu Ranupani (Kec. Senduro, Kab. Lumajang): 4%.

Sektor perekonomian BTS berdasarkan PDRB ADHK sebesar Rp. 290.451 M, yang berkontribusi sebesar 18% terhadap Jawa Timur dan 2,8% terhadap Nasional. Sektor Unggulan KSPN BTS antara lain Pertanian, perikanan dan kehutanan (19% Jawa Timur) dan Penyediaan akomodasi dan makan minum (11,81% Jawa Timur).

Pada KSPN BTS terdapat Wilayah Prioritas Pengembangan (WPP) 1 dan 2. WPP 1 merupakan ketentuan pola ruang yang diperuntukkan untuk kawasan lindung dan tidak boleh dibangun seluas 198.116 Ha (23% luas wilayah). WPP 2 merupakan ketentuan pola ruang yang dapat dibangun tetapi bersyarat seluas 77.181 Ha (9% luas wilayah).

Tabel 7.41 Wilayah Prioritas Perlindungan di Masing-Masing Kabupaten

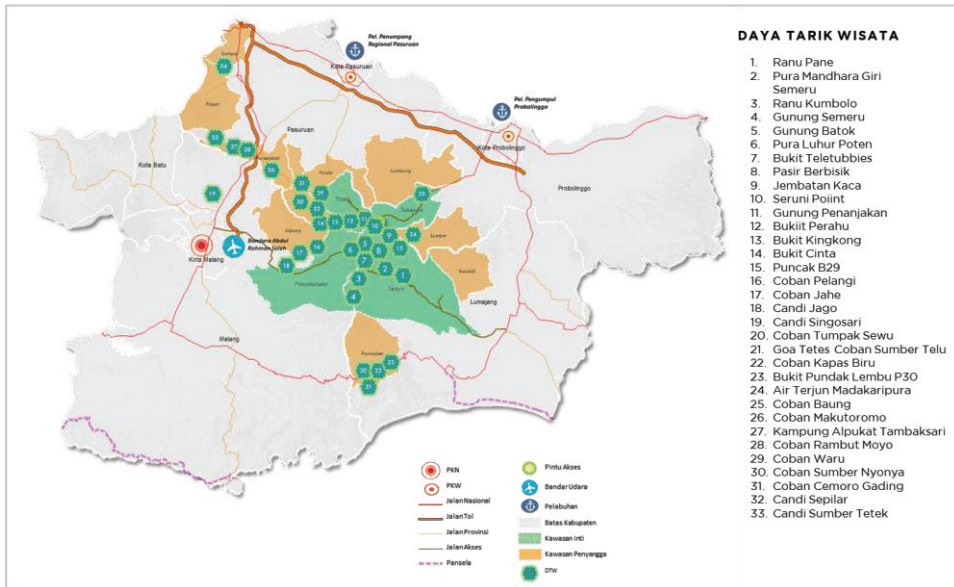
Kabupaten	Wilayah Prioritas Perlindungan (Ha)	
	WPP 1	WPP 2
Lumajang	49.508,83	19.788,95
Malang	72.628,03	38.814,83
Pasuruan	23.611,11	8.085,19
Probolinggo	52.368,04	10.492,33
Total	198.116,01	77.181,30

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Terdapat daya tarik wisata berkelas internasional (Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Pananjakan, Cemorolawang, Savana Hill, Gunung Semeru). Jumlah wisatawan tahun 2020 sebesar 671.488 wisatawan yang terdiri dari 631.130 wisatawan domestik dan 40.358 wisatawan mancanegara. Berdasarkan proyeksi wisatawan ITMP BTS dengan skenario optimis, jumlah wisatawan yang mengunjungi BTS pada 2034 sebanyak 2.496.301 wisatawan yang terdiri 2.431.748 wisatawan domestik dan 64.553 wisatawan mancanegara. Dengan rata-rata *Length of Stay* wisatawan domestik 1,2 hari dan wisatawan mancanegara 2 hari.

Sementara itu, hasil analisis terhadap daya dukung dan daya tampung di KSPN BTS adalah BTS mempunyai daya dukung pangan kategori sangat tinggi dan tinggi serta daya dukung pasokan air bersih kategori tinggi. Ketentuan Pemanfaatan Taman Nasional diantaranya dibolehkan wisata alam dengan syarat: tidak mengubah bentang alam, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, dan dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya. Terdapat zona kerawanan Letusan Gunung Berapi Semeru. Erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali, erupsi terakhir

pada Desember 2022, bahaya luncuran awan panas 3-5 km, dan hujan abu saat erupsi 3,15 km.

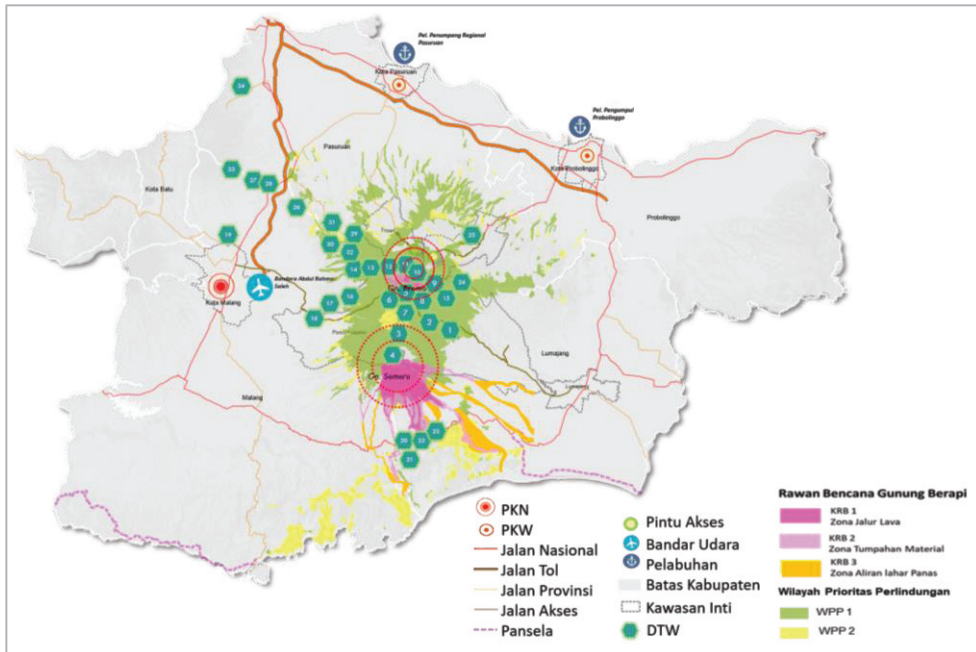


Sumber: RIPPARNAS dan RIPPADA, 2022

Gambar 7.19 Sebaran Destinasi Wisata DPP BTS

Berkaitan dengan daerah rawan bencana, terdapat 3 daerah Kawasan Rawan Bencana yaitu:

1. KRB - I. berupa Awan Panas, Lontaran material Vulkanik dan Abu Vulkanik radius 3 5 Km meliputi kawasan hutan Taman Nasional (tidak ada permukiman).
2. KRB - II. radius 310Km : a. Di DAS Glidik, dengan ancaman kawasan permukiman Desa Pronojiwo dan Desa Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo. b. Di DAS Rejali dengan ancaman kawasan permukiman Desa Supit Urang Kec. Pronojiwo dan Desa Sumber Wuluh Kec. Candipuro
3. KRB - III. radius 3 15 Km : a. Di DAS Rejali dengan ancaman permukiman Desa Sumber Wuluh. Jugosari Kec. Candipuro dan Desa Gondoruso Kec. Pasirian. b. Di DAS Besuk Semut dengan ancaman permukiman Desa Penanggal, Sumber Mujur, Sumber Wuluh dan Desa Sumber Rejo Kec. Candipuro serta Desa Nguter Kec. Pasirian. c. Di DAS Besuk Sat dengan ancaman permukiman Desa Pasrujambe dan Kertosari Kec. Pasrujambe, Desa Klopasawit, Sumber Mujur dan Tambahrejo Kec. Candipuro, Desa Sememu Kec. Pasirian serta Desa Gesang dan Desa Sumberjati Kec. Tempeh.

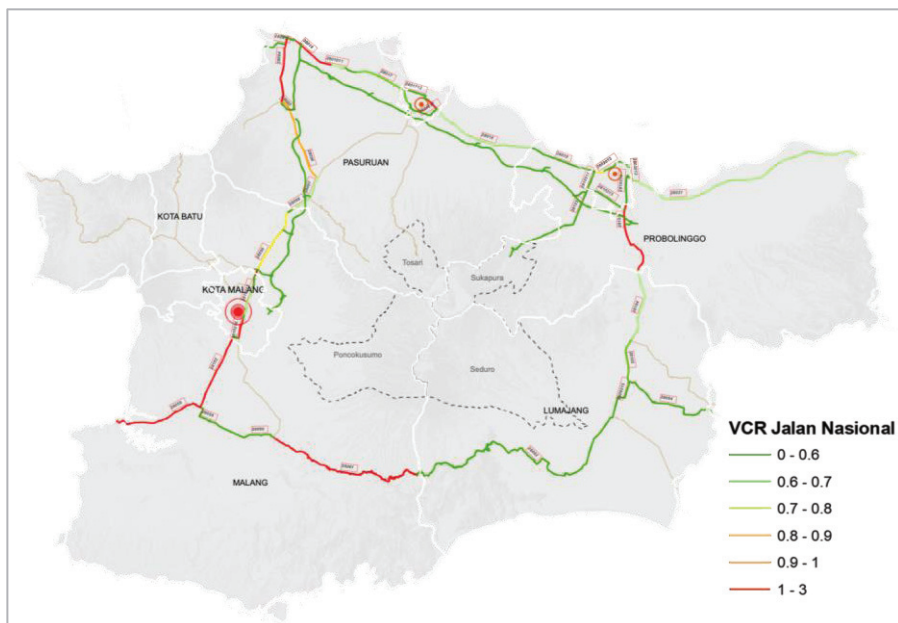


Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.20 Rawan Bencana di Kawasan Wisata DPP BTS

b) Profil Infrastruktur

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung fokus pertanian dan pariwisata, *relevant road* Kawasan Bromo-Tengger-Semeru didukung oleh Jalan Nasional dan Jalan Kewenangan Pemerintah Daerah yang mempunyai isu sebagai berikut: Terdapat 10,86% atau 60,66 km yang memiliki $VCR > 0,8$; Kemantapan jalan di BTS 99,92% merupakan jalan mantap sebesar 557,89 km; Sebagian besar ruas jalan nasional memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam), kecuali jalan tol yang memiliki kecepatan rata-rata di atas Renstra PUPR; Terdapat jalan akses yang merupakan jalan daerah belum berkeselamatan (lebar belum standar dan gradient curam): Kecamatan Lumajang-Ranupane, Exit Tol Pasuruan - Kec. Tosari, dan Kec. Tosari-Kec. Tumpang; Terdapat jalan daerah akses utama KSPN Bromo-Tengger-Semeru yang memiliki kondisi jalan kurang mantap, seperti ruas Kec Lumajang-Ranupani, Exit Tol Pasuruan-Tosari, dan Ruas Tosari-Kec. Tumpang; dan Merupakan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, sehingga dapat mengancam keberlangsungan infrastruktur jalan dan jembatan.



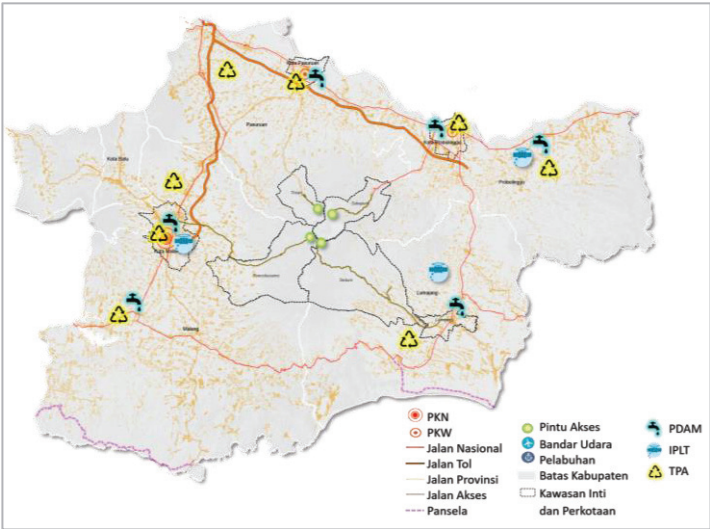
Sumber. Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.21 VCR di Kawasan DPP BTS

Berkaitan dengan infrastruktur permukiman yang mendukung fokus pertanian dan pariwisata, akses air minum perpipaan 40,75% (terendah Kab Pasuruan 11,19%), *idle* PDAM 1.2421 l/s (2020), Paling rendah di Kab Pasuruan dan *idle* PDAM yang terbatas. Terdapat SPAM Regional Umbulan yang melayani 5 Kab/Kota, termasuk sekitar Kawasan BTS: Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik. Adanya gap penyediaan air di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan.

Akses sanitasi aman 5,47% (di bawah Jawa Timur 9,96%, terendah di Kab. Probolinggo 1,47%) dan sanitasi layak 73,24% (di atas Jawa Timur 55,16%, kecuali Kab. Probolinggo 46%). Terdapat 3 kabupaten yang belum memiliki IPLT, yaitu Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. 3 IPLT eksisting di Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kota Malang perlu optimalisasi mengingat bertambahnya timbulan lumpur tinja setiap tahunnya. TPA Kab. Lumajang telah penuh dan melebihi kapasitas timbulan sampah.

TPA Kab. Lumajang telah penuh dan melebihi kapasitas timbulan sampah. TPA Kab. Malang, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan perlu dilakukan penanganan karena kapasitas hanya tersisa kurang dari $\frac{1}{4}$ kapasitasnya. Pada 2021, belum ada kabupaten/kota yang mencapai 30% pada pengurangan sampah. Persentase penanganan sampah 45,08% (di atas Jawa Timur 44,71%), terendah di Kab. Pasuruan (12,2%). Untuk penanganan sampah, capaian penanganan Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan sudah melebihi 70% pada 2021. Sebaran lokasi PDAM, IPLT, dan TPA sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.22 Sebaran Infrastruktur Permukiman di DPP BTS

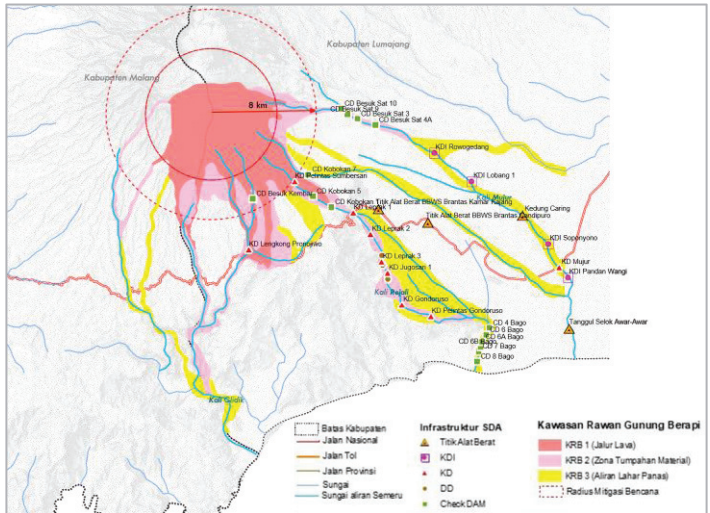
2) Analisis Kebutuhan

a) Infrastruktur Sumber Daya Air

Analisis kesenjangan infrastruktur sumber daya air mencakup analisis penanganan bencana, infrastruktur irigasi dan air baku.

1. Penanganan Bencana

Kab. Lumajang merupakan kawasan rawan bencana yang dilewati aliran lahar dan material vulkanik Gunung Semeru.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.23 Kawasan Rawan Bencana Lahar Dingin DPP BTS

Di DPP BTS terdapat 34 Sabo Dam. Keseluruhan Sabo Dam tersebut berada dalam WS Bondoyudo- Bedadung. Beberapa sabo dam sudah tidak bisa beroperasi. Sebaran lokasi Sabo Dam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.42 Sebaran Sabo Dam DPP BTS

No	Kode	Nama DAS	Sungai	Wilayah Kerja
1	CD 4 Bago, CD 6 Bago, CD 6A Bago, CD 6B Bago, CD 7 Bago, CD 8 Bago, CD Kobokan 1, CD Kobokan 5, CD Kobokan 7, DD Jugosari 1, DD Leprak 2, DD Leprak 3, KD Gondoruso, KD Jugosari 1, KD Leprak 1, KD Leprak 2, KD Leprak 3, KD Pelintas Gondoruso, KD Pelintas Summersari, Titik Alat Berat BBWS Brantas Candipuro, Titik Alat Berat BBWS Brantas Kamar Kajang	Rejali	Kali Rejali	BPDAS Sampean
2	CD Besuk Kembar, KD Lengkong Pronojiwo	Glidik	Kali Glidik	BPDAS Brantas
3	CD Besuk Sat 10, CD Besuk Sat 3, CD Besuk Sat 4A, CD Besuk Sat 9, KD Mujur, KDI Lobang 1, KDI Pandan Wangi, KDI Rowogedang, KDI Soponyono, Kedung Caring, Tanggul Selok Awar-Awar, CD Kobokan 7	Mujur	Kali Mujur	BPDAS Sampean

Sumber: SIGI PUPR, 2022

b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dalam menganalisis kebutuhan infrastruktur Bina Marga terdapat 3 proses yaitu Analisis Kondisi VCR, Waktu Tempuh, dan Pergerakan Arus Lalu Lintas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

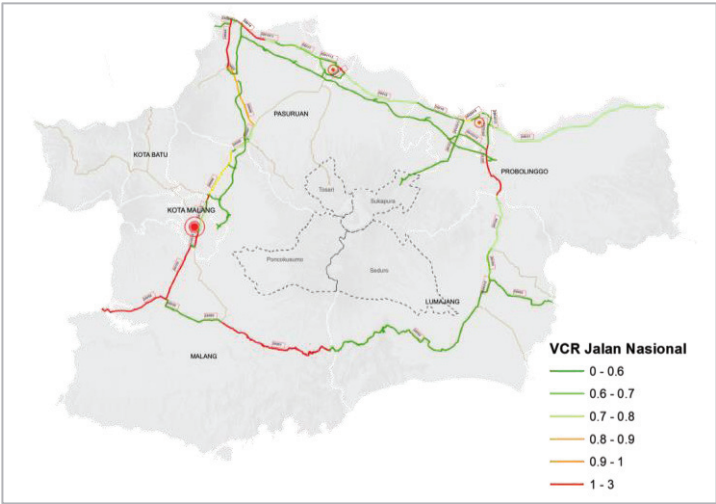
1. Kinerja Jaringan Jalan (VCR)

Total panjang jalan nasional 558,35 Km, dengan lebar rata-rata 10,85 m, IRI rata-rata 4,63, kemantaban jalan 99,2% atau 557,89 Km. Masih terdapat jalan tidak mantab 0,08% atau 0,46 Km, VCR rata-rata 0,54, VCR > 0,8 atau arus tidak stabil sepanjang 60,66 KM (10,86% dari total panjang jalan nasional di DPP BTS). Berdasarkan hasil survey VCR yang dilakukan oleh BBPJJN Jawa Timur dan Bali tahun 2021, terdapat beberapa ruas jalan nasional yang mempunyai VCR > 1 yaitu:

Tabel 7.43 Kondisi Jalan Nasional di DPP BTS yang mempunyai VCR > 1

Kode Ruas	Nama Ruas	VCR
28058	Bts. Kab. Blitar - Kepanjen	1.067
28102	Bts. Kota Malang - Kepanjen	1.098
28103	Bts. Kota Probolinggo - Bts. Kab. Lumajang	1.23
28016	Gempol - Bts. Kota Bangil	1.388
28094	Gempol - Pandaan	1.032
2801716	Jln. Ir. Juanda (Pasuruan)	1.18
2810218	Jln. Kol. Sugiyono (Malang)	1.12
28100	Karanglo - Bts. Kota Malang	1.546
28061	Turen - Bts. Kab. Lumajang	1.539

Sumber: BBPJJN Jawa Timur, 2022

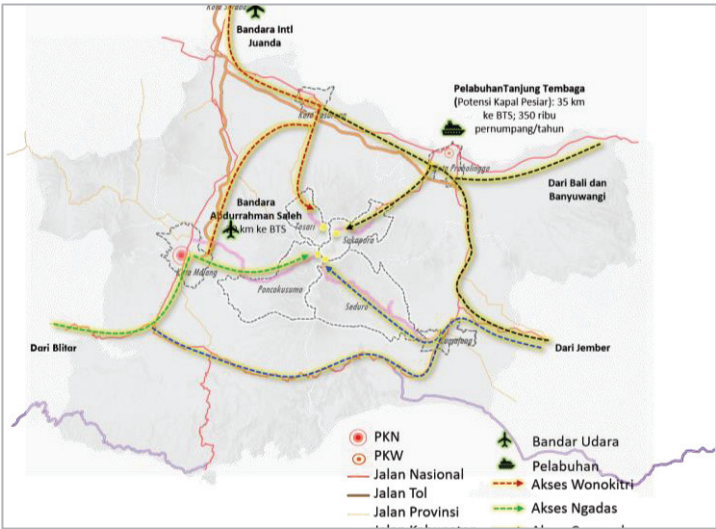


Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.24 VCR di Kawasan DPP BTS

2. Pergerakan Arus Lalu Lintas

DPP BTS dapat diakses melalui 4 pintu yaitu: Sukapura (Probolinggo), Tosari (Pasuruan), Poncokusumo (Malang), dan Senduro (Lumajang).



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.25 Relevan Road DPP BTS

Untuk menuju Pintu Wonokitri (Kec. Tosari, Kab Pasuruan):

- Dari Surabaya/Bandara Juanda ke Kota Pasuruan melalui Jalan Tol Surabaya-Pasuruan (Exit Tol Pasuruan); ke Kec. Tosari melalui Jalan Prov. Kota Pasuruan-Tosari (Ds. Tosari); Jalan Kab. Ds. Tosari-Ds. Wonokitri

- Dari Malang ke Kota Pasuruan melalui Jalan Tol Malang-Pandaan (Exit Tol Purwodadi), Jalan Provinsi Martopuro-Warungdowo-Tosari; Jalan Kabupaten Desa Tosari-Desa Wonokitri

Untuk menuju Pintu Ngadas (Kec. Poncokusumo, Kab Malang):

- Dari arah Kota Malang : jalan kabupaten ke Desa Ngadas
- Dari arah Bandara Abdurrahman Saleh: ruas jalan kabupaten Komud Abd Saleh-Jalan Kabupaten Raya Asri Katon; Jalan kabupaten Pakis-Ngadas.
- Dari arah Blitar: Jalan Nasional Bts. Kota Wlingi-Bts. Kab. Malang; Jalan Nasional BTS. Kab. Malang-Kota Malang; Jalan Kabupaten ke Ds. Ngadas

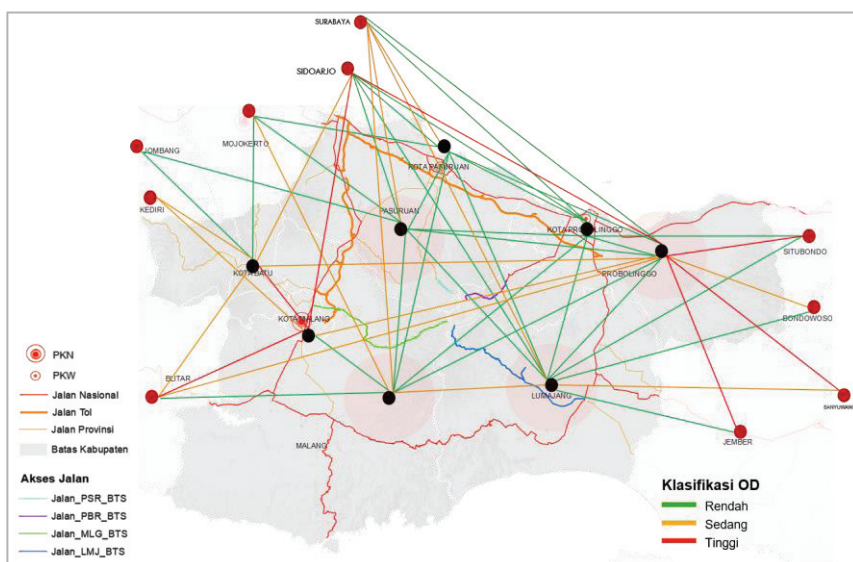
Untuk menuju Pintu Cemorolawang (Kec. Sukapura, Kab Probolinggo):

- Dari arah Surabaya: Jalan Tol Surabaya-Probolinggo (Exit Tol Leces); Jalan Nasional Lawean-Sukapura (Desa Sukapura) dan Jalan Kabupaten Kec. Sukapura (Desa Ngadisari)
- Dari arah Bali & Banyuwangi: Jalan Nasional BTS. Kota Probolinggo-Paiton (BTS. Kab Situbondo/Binor); Jalan Nasional Lawean-Sukapura (Ds. Sukapura) & jalan kabupaten Kec. Sukapura (Ds. Ngadisari)
- Dari arah Jember: Jalan Nasional Wonorejo-BTS. Kab. Jember; Jalan Nasional Wonorejo (Kab. Lumajang)-Jorongan (Kab. Probolinggo); Jalan Nasional Jorongan (Kab. Probolinggo)-Lawean; Jalan Nasional Lawean-Sukapura (Ds. Sukapura) & jalan kabupaten Kec. Sukapura (Ds. Ngadisari)

Untuk menuju Pintu Ranupani (Kec. Senduro, Kab Lumajang):

- Dari arah Malang: Jalan Nasional Kepanjen-Lumajang; Jalan Kabupaten Citrodiwangsan-Ranupani
- Dari arah Jember: Jalan Nasional Wonorejo-BTS. Kab. Jember; Jalan Kabupaten Citrodiwangsan-Ranupani

Penentuan ruas prioritas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis matriks asal tujuan maka dapat digambarkan ke dalam peta berikut:



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.26 Matriks Asal dan Tujuan di Kawasan DPP BTS

Pergerakan antar kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.44 Pergerakan antar Kabupaten di DPP BTS

Asal	Tujuan	Pergerakan	Ket	Asal	Tujuan	Pergerakan	Ket
Jember	Probolinggo	4,000,682	Tinggi	Surabaya	Kota Pasuruan	311,848	Sedang
Sidoarjo	Kota Malang	2,055,287	Tinggi	Surabaya	Malang	299,070	Sedang
Kota Malang	Kota Batu	1,993,707	Tinggi	Kediri	Probolinggo	292,741	Sedang
Sidoarjo	Probolinggo	1,745,707	Tinggi	Sidoarjo	Kota Batu	203,988	Sedang
Situbondo	Probolinggo	1,618,032	Tinggi	Kediri	Kota Batu	180,813	Sedang
Banyuwangi	Probolinggo	1,144,092	Tinggi	Surabaya	Lumajang	173,486	Sedang
Jember	Kota Malang	834,350	Sedang	Situbondo	Kota Malang	164,360	Sedang
Probolinggo	Kota Malang	752,232	Sedang	Banyuwangi	Lumajang	140,727	Sedang
Banyuwangi	Kota Malang	653,209	Sedang	Surabaya	Pasuruan	137,117	Sedang
Kediri	Kota Malang	605,319	Sedang	Malang	Lumajang	128,800	Sedang
Bondowoso	Probolinggo	611,576	Sedang	Mojokerto	Malang	127,763	Sedang
Jombang	Kota Malang	402,276	Sedang	Probolinggo	Kota Batu	107,847	Sedang

Sumber: BBPJN Jatim-Bali, 2021

Berdasarkan matriks asal tujuan, pergerakan internal antar kawasan di BTS memiliki pergerakan rendah kurang dari 100.000 pergerakan. Pergerakan tertinggi merupakan pergerakan menuju Kab. Probolinggo (pintu masuk Cemorolawang yang menjadi akses utama 43% wisatawan menuju BTS).

3. Proyeksi Arus Lalu Lintas

Berdasarkan proyeksi lalu lintas regional dan wisatawan dihasilkan analisis proyeksi kebutuhan lalu lintas di setiap Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.45 Proyeksi LHRT di Ruas Jalan Nasional

Nama Ruas	Konektivitas	LHRT		Proyeksi		LHRT (smp/jam)		2027	2028	2029
		(smp/jam)	2023	2024	2025	2026	2027			
Gempol - Bts. Kota Bangil	Lintas Utara	142,103,500	145,721,277	147,314,839	148,931,114	150,632,539	152,361,21	153,727,79	155,119,14	156,511,14
Jin. Pattimura (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. A. Yani (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Untung Suropati (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Jaka Agung Suprpto (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Dr. Sutomo (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Kartini (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Gajah Mada (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Jin. Diponegoro (Bangil)	Lintas Utara	35,696,00	36,603,36	37,003,65	37,414,66	37,836,97	38,271,23	38,614,49	38,963,99	39,319,14
Bts. Kota Bangil - Bts. Kota Pasuruan	Lintas Utara	12,002,00	12,307,08	12,441,67	12,579,86	12,718,5	12,867,86	12,983,28	13,100,79	13,219,14
Jin. Soekarno-hatta (Pasuruan)	Non-Lintas	9,240,00	9,474,87	9,578,49	9,684,88	9,794,20	9,906,60	9,995,46	10,085,93	10,176,46
Jin. D.I. Panjaitan (Pasuruan)	Non-Lintas	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Letjen Suprpto (Pasuruan)	Non-Lintas	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Veteran (Pasuruan)	Non-Lintas	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Ir. Juanda (Pasuruan)	Non-Lintas	19,820,00	20,323,80	20,546,07	20,774,28	21,008,76	21,249,88	21,440,48	21,634,53	21,828,58
Bts. Kota Pasuruan - Bts. Kab. Probolinggo	Lintas Utara	139,540,00	143,086,97	144,651,78	146,258,45	147,909,31	149,606,87	150,948,75	152,314,95	153,727,79
Jin. Gatot Subroto (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Urip Sumoharjo (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Untung Suropati (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Dr. Setiabudi (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. K.H. Hasyim Ashari (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Jin. Hos. Cokroaminoto (Pasuruan)	Lintas Utara	23,782,00	24,386,52	24,653,21	24,927,03	25,208,39	25,497,71	25,726,41	25,959,25	26,192,09
Bts. Kab. Pasuruan - Pilang (Bts. Kota Probolinggo)	Lintas Utara	30,471,00	31,245,54	31,587,25	31,938,09	32,298,58	32,669,28	32,962,30	33,260,63	33,558,96
Jin. Soekarno-hatta (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo)	Lintas Utara	17,937,00	18,392,94	18,594,09	18,800,61	19,012,82	19,231,03	19,403,52	19,579,14	19,754,76
Jin. P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo)	Lintas Utara	22,117,00	22,679,19	22,927,21	23,181,87	23,443,53	23,712,59	23,925,28	24,141,82	24,358,36
Bts. Kab. Blitar - Kepanjen	Lintas Selatan	20,560,00	21,082,61	21,313,18	21,549,90	21,793,14	22,043,27	22,240,98	22,442,28	22,643,58
Kepanjen - Gondanglegi	Lintas Selatan	3,701,00	3,795,08	3,836,58	3,879,19	3,922,98	3,968,00	4,003,59	4,039,83	4,076,07
Gondanglegi - Turen	Lintas Selatan	3,139,00	3,218,79	3,253,99	3,290,13	3,327,27	3,365,46	3,395,64	3,426,38	3,457,12
Turen - Bts. Kab. Lumajang	Lintas Selatan	19,356,00	19,848,01	20,065,07	20,287,94	20,516,93	20,752,41	20,938,54	21,128,05	21,318,56
Bts. Kab. Malang - Bts. Kota Lumajang	Lintas Selatan	8,256,00	8,465,86	8,558,44	8,653,50	8,751,18	8,851,61	8,931,01	9,011,84	9,092,67
Jin. Teratai (Lumajang)	Lintas Selatan	3,649,00	3,741,75	3,782,67	3,824,69	3,867,86	3,912,25	3,947,34	3,983,07	4,018,80
Jin. Imam Bonjol (Lumajang)	Lintas Selatan	3,649,00	3,741,75	3,782,67	3,824,69	3,867,86	3,912,25	3,947,34	3,983,07	4,018,80
Jin. Brigjen Slamet Riadi (Lumajang)	Lintas Selatan	3,649,00	3,741,75	3,782,67	3,824,69	3,867,86	3,912,25	3,947,34	3,983,07	4,018,80
Jin. Jend. Gatot Subroto (Lumajang)	Lintas Selatan	3,649,00	3,741,75	3,782,67	3,824,69	3,867,86	3,912,25	3,947,34	3,983,07	4,018,80
Jin. Sunandar P. Sudarmo (Lumajang)	Lintas Selatan	3,649,00	3,741,75	3,782,67	3,824,69	3,867,86	3,912,25	3,947,34	3,983,07	4,018,80
Jin. Soekarno-hatta (Lumajang-wonorejo) (Lumajang)	Lintas Selatan	10,301,00	10,562,84	10,678,36	10,796,96	10,918,83	11,044,15	11,143,21	11,244,06	11,344,91
Wonorejo - Bts. Kab. Jember	Lintas Selatan	14,286,00	14,649,14	14,809,34	14,973,83	15,142,84	15,316,64	15,454,02	15,593,89	15,733,76
Bts. Kab. Lumajang - Pondok Dalem	Lintas Selatan	4,635,00	4,752,82	4,804,79	4,858,16	4,913,00	4,969,38	5,013,96	5,059,34	5,104,72
Gempol - Pandaan	Penghubung Lintas	180,998,00	185,598,79	187,628,51	189,712,53	191,853,87	194,055,79	195,796,34	197,568,45	199,340,56

Nama Ruas	Konektivitas	LHRT (smp/jam)	2023	2024	Proyeksi LHRT (smp/jam)	2026	2027	2028	2029
Jln. Lingkar Pandaan - By Pass	Penghubung Lintas	12.214,00	12.524,47	12.661,44	12.802,07	12.946,57	13.095,16	13.242,61	13.392,20
Pandaan - Purwosari	Penghubung Lintas	52.167,00	53.493,03	54.078,04	54.678,69	55.295,86	55.930,50	56.432,16	56.942,91
Purwosari - Purwodadi	Penghubung Lintas	22.868,00	23.449,28	23.705,73	23.969,03	24.239,57	24.517,77	24.797,68	24.961,58
Purwodadi - Bts. Kab. Malang	Penghubung Lintas	23.687,00	24.289,10	24.554,73	24.827,46	25.107,69	25.395,86	25.623,64	25.855,56
Bts. Kab. Pasuruan - Karanglo	Penghubung Lintas	53.102,00	54.451,80	55.047,29	55.658,71	56.286,94	56.932,95	57.443,60	57.963,51
Karanglo - Bts. Kota Malang	Penghubung Lintas	108.963,00	111.732,73	112.954,65	114.209,25	115.498,36	116.823,95	117.871,78	118.938,61
Jln. A. Yani (Malang)	Penghubung Lintas	37.317,00	38.265,56	38.684,04	39.113,71	39.555,19	40.009,17	40.368,03	40.733,39
Jln. Layang Lawang	Penghubung Lintas	37.317,00	38.265,56	38.684,04	39.113,71	39.555,19	40.009,17	40.368,03	40.733,39
Bts. Kota Malang - Kepanjen	Penghubung Lintas	19.291,00	19.781,36	19.997,69	20.219,81	20.448,03	20.682,72	20.868,23	21.057,10
Jln. Raden Intan (Malang)	Penghubung Lintas	25.157,00	25.796,47	26.078,58	26.368,24	26.665,86	26.971,91	27.213,83	27.460,13
Jln. Panji Suroso (Malang)	Penghubung Lintas	25.157,00	25.796,47	26.078,58	26.368,24	26.665,86	26.971,91	27.213,83	27.460,13
Jln. Sunandar P. Sudarmo (Malang)	Penghubung Lintas	25.157,00	25.796,47	26.078,58	26.368,24	26.665,86	26.971,91	27.213,83	27.460,13
Jln. Tumenggung Survo (Malang)	Penghubung Lintas	25.157,00	25.796,47	26.078,58	26.368,24	26.665,86	26.971,91	27.213,83	27.460,13
Jln. Jend. Sudirman (Malang)	Penghubung Lintas	21.707,00	22.258,77	22.502,19	22.752,13	23.008,94	23.273,01	23.481,76	23.694,29
Jln. Gatot Subroto (Malang)	Penghubung Lintas	21.707,00	22.258,77	22.502,19	22.752,13	23.008,94	23.273,01	23.481,76	23.694,29
Jln. Martadinata (Malang)	Penghubung Lintas	10.223,00	10.482,86	10.597,50	10.715,21	10.836,15	10.960,52	11.058,83	11.158,92
Jln. Kol. Sugiyono (Malang)	Penghubung Lintas	13.807,00	14.157,96	14.312,79	14.471,77	14.635,11	14.803,08	14.935,86	15.071,04
Jln. Ks. Tubun (Malang)	Penghubung Lh	10.533,00	10.800,74	10.918,86	11.040,13	11.164,75	11.292,89	11.394,17	11.497,30
Jln. Sudanco Supriadi (Malang)	Penghubung Lintas	4.936,00	5.061,47	5.116,82	5.173,65	5.232,05	5.292,10	5.339,57	5.387,89
Bts. Kota Probolinggo - Bts. Kab. Lumajang	Penghubung Lintas	69.197,00	70.955,92	71.731,90	72.528,64	73.347,29	74.189,10	74.854,53	75.532,02
Jln. Bromo (Probolinggo)	Penghubung Lintas	5.834,00	5.982,29	6.047,72	6.114,89	6.183,91	6.254,88	6.310,99	6.368,11
Jln. Ir. Sutarni (Probolinggo)	Penghubung Lintas	5.834,00	5.982,29	6.047,72	6.114,89	6.183,91	6.254,88	6.310,99	6.368,11
Jln. Hamka (Probolinggo)	Penghubung Lintas	4.286,00	4.394,95	4.443,01	4.492,36	4.543,06	4.595,21	4.636,42	4.678,39
Jln. Hasan Genggong (Probolinggo)	Penghubung Lintas	5.834,00	5.982,29	6.047,72	6.114,89	6.183,91	6.254,88	6.310,99	6.368,11
Bts. Kab. Probolinggo - Grobogan	Penghubung Lintas	19.044,00	19.528,08	19.741,64	19.960,91	20.186,22	20.417,90	20.601,03	20.787,49

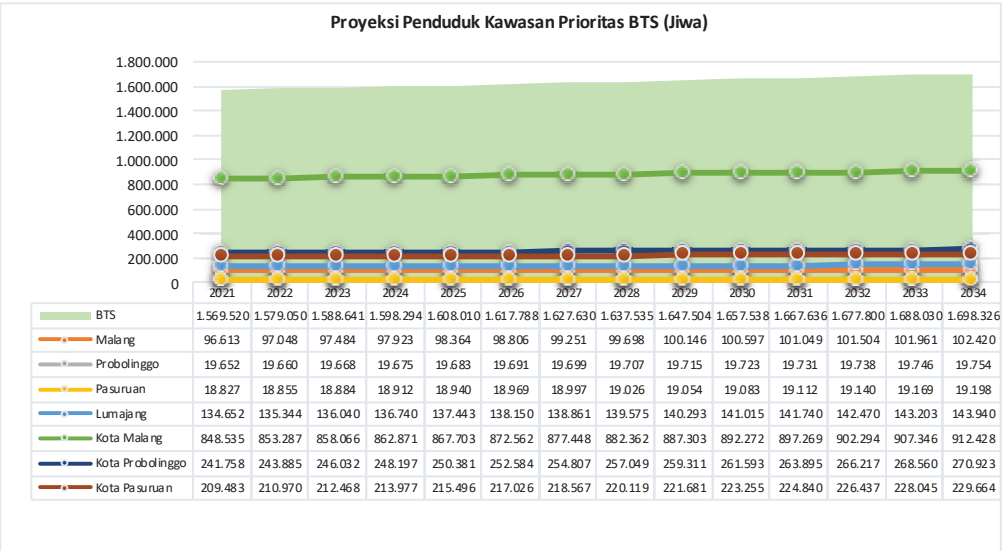
Sumber: Hasil Analisis, 2022

c) **Infrastruktur Permukiman**

Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur permukiman diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk dan proyeksi pertumbuhan wisatawan sesuai tematik pengembangan DPP BTS sebagai kawasan pariwisata unggulan.

1. **Proyeksi Penduduk Alami dan Wisatawan**

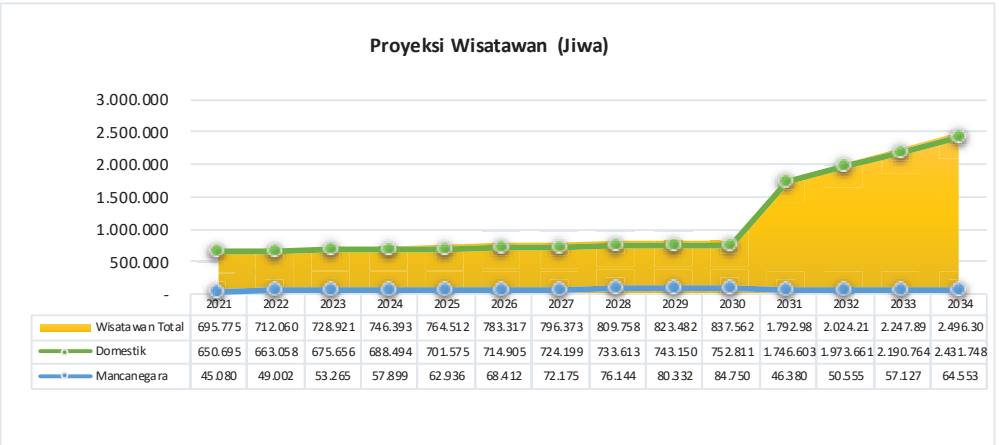
Perhitungan proyeksi penduduk alami dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk pada tahun 2021 dengan CAGR selama 1 tahun terakhir. Proyeksi penduduk alami dihitung menggunakan persentase laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan *Key Tourism Area* (KTA) dan pusat perkotaan di BTS. KTA antara lain Kec Poncokusumo (Kab. Malang), Kec. Sukapura (Kab Probolinggo), Kec. Tosari (Kab Pasuruan), dan Kec. Senduro (Kab Lumajang). Sedangkan pusat layanan perkotaan berada di Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kec. Lumajang di Kab Lumajang.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Gambar 7.27 Proyeksi Penduduk Alami di Kawasan DPP BTS

Jumlah penduduk alami BTS tahun 2029 diperkirakan mencapai 1,6 juta jiwa atau bertambah ± 100 ribu penduduk dari baseline tahun 2020. Pada 2034 jumlah penduduk BTS bertambah 138.275 jiwa dari tahun 2020. Pertambahan penduduk ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur permukiman. Proyeksi wisatawan BTS dihitung berdasarkan jumlah wisatawan eksisting pada tahun 2019-2021 dan laju pertumbuhan wisatawan berdasarkan hasil kajian MADA BTS dan ITMP BTS. Hasil perhitungan proyeksi ini kemudian dikonversikan ke 4 KTA berdasarkan proporsi jumlah wisatawan pada setiap pintu masuk di 4 kabupaten



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Gambar 7.28 Proyeksi Wisatawan di Kawasan DPP BTS

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperkirakan pada tahun 2029 jumlah wisatawan BTS sebesar 823 ribu jiwa atau meningkat sebesar 200 ribuan dari baseline tahun 2020. Proporsi jumlah wisatawan tersebut terdiri dari 743 ribu jiwa (91%) wisnus dan 80 ribu jiwa (9%) wisman. Diperkirakan banyak wisatawan yang masuk menuju Pintu Gerbang Sukapura Kab.Probolinggo sebesar 354 ribu jiwa. Sebaliknya hanya terdapat 33 ribu jiwa yang masuk pintu gerbang Senduro Kab. Lumajang. Serta, pada 2034 dengan mengikuti proyeksi pada ITMP BTS maka diperkirakan terdapat 2.496.301 wisatawan dengan 2.431.748 wisatawan domestik dan 64.553 wisatawan mancanegara. Dengan 1.073.410 wisatawan masuk melalui pintu Probolinggo.

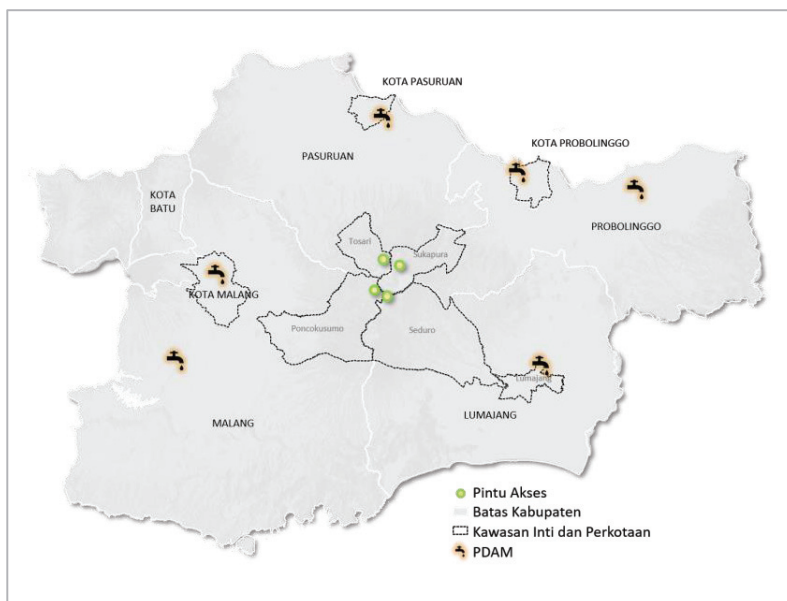
2. Pelayanan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru telah terdapat SPAM dan PDAM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Profil PDAM DPP BTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.46 Layanan Perpipaan DPP BTS

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Volume Produksi Riil (L/det)
PERUMDAM Tirta Kanjuruhan Kab Malang	1.658	1.500
PDAM Kab Probolinggo	483	165
PDAM Kab Pasuruan	578	226
PERUMDAM Tirta Mahameru Kab Lumajang	410	325
PERUMDAM Tugu Tirta Kota Malang	2.269	1.528
PERUMDAM Bayuangga Kota Probolinggo	390	267
PDAM Tirta Dharma Kota Pasuruan	249	202
BTS	6.037	4.213

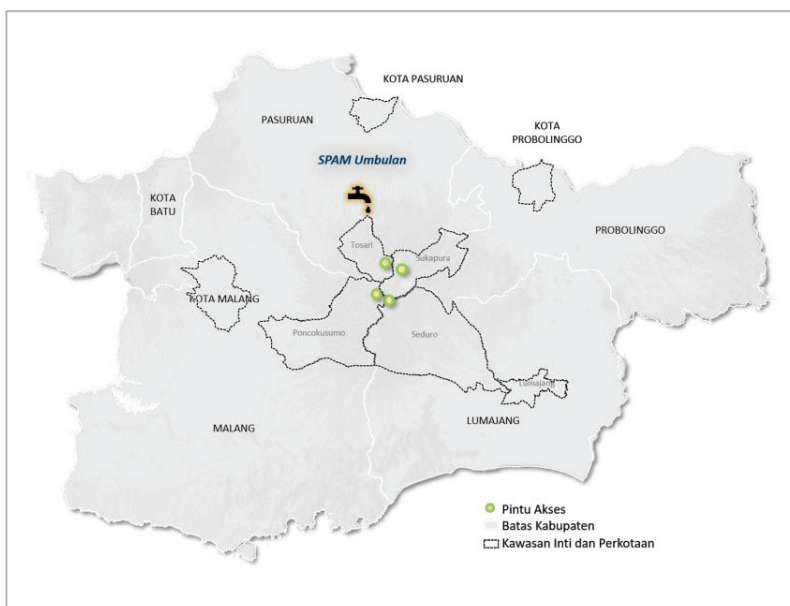
Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.29 Sebaran PDAM di Kawasan DPP BTS

Terdapat SPAM Regional Umbulan yang memiliki debit terpasang 4.000 L/detik, dengan potensi sumber air sebesar 3.100 L/detik yang berasal dari 3 mata air utama. SPAM Umbulan melayani 5 kabupaten/kota: Kab. Sidoarjo (1200 lps), Kab. Gresik (1000 lps), Kab. Pasuruan (410 lps), Kota Surabaya (1000 lps), Kota Pasuruan (110 lps), dan PDAB Jawa Timur (280 lps).



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.30 Layanan SPAM Umbulan

Perhitungan proyeksi kebutuhan infrastruktur air minum di Kawasan BTS menggunakan pendekatan komparatif terhadap nilai kapasitas produksi dan cakupan pelayanan eksisting dalam skenario pengembangan tingkat pelayanan dan kebutuhan air minum di setiap wilayah pelayanan Kabupaten/Kota. Analisis kebutuhan air minum ditunjukkan untuk pelayanan perpipaian oleh perusahaan daerah air minum di setiap wilayah tersebut. Perhitungan proyeksi mengacu terhadap data – data yang telah terhimpun seperti capaian akses air minum perpipaian dan kapasitas volume produksi PDAM. Pada tabel dibawah ini dapat kita amati hasil perhitungan proyeksi cakupan pelayanan perpipaian dan proyeksi kebutuhan air minum Kawasan BTS.

Tabel 7.47 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kawasan BTS

Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (L/detik)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	36,94	38,74	40,56	42,40	44,26	46,13	48,03	49,94	62,14
Probolinggo	3,91	4,29	4,67	5,06	5,46	5,84	6,23	6,63	12,63
Pasuruan	4,38	4,74	5,10	5,47	5,85	6,22	6,59	6,98	11,53
Lumajang	32,43	34,68	36,94	39,22	41,51	43,81	46,12	48,45	60,65
Kota Malang	1.088	1.111	1.135	1.158	1.182,53	1.206	1.230	1.255	1.381,48
Kota Probolinggo	180,17	185,65	191,21	196,86	202,59	208,40	214,31	220,30	251,61
Kota Pasuruan	149,29	153,72	158,21	162,75	167,35	172,00	176,71	181,48	206,23
BTS	1.495	1.533	1.572	1.610	1.650	1.688	1.728	1.769	1.986

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.48 Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaian BTS

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaian (%)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	23,21	24,21	25,21	26,21	27,21	28,21	29,21	30,21	35,21
Probolinggo	6,59	7,59	8,59	9,59	10,59	11,59	12,59	13,59	18,59
Pasuruan	10,54	11,54	12,54	13,54	14,54	15,54	16,54	17,54	22,54
Lumajang	15,03	16,03	17,03	18,03	19,03	20,03	21,03	22,03	27,03
Kota Malang	64,26	65,26	66,26	67,26	68,26	69,26	70,26	71,26	76,26
Kota Probolinggo	46,66	47,66	48,66	49,66	50,66	51,66	52,66	53,66	58,66
Kota Pasuruan	44,62	45,62	46,62	47,62	48,62	49,62	50,62	51,62	56,62
BTS	30,13	31,13	32,13	33,13	34,13	35,13	36,13	37,13	42,13

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berikut adalah kesimpulan analisis kebutuhan air minum di Kawasan BTS:

1. Kabupaten Malang (Kec. Poncokusumo): Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 158 L/detik PDAM Malang direncanakan untuk Kecamatan Poncokusumo. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum di Malang pada tahun 2029 dilanjutkan 2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih dan memungkinkan peningkatan capaian akses air.
2. Kabupaten Probolinggo (Kec. Sukapura): Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 318 L/detik dari PDAM Probolinggo direncanakan untuk Kecamatan Sukapura. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum di Probolinggo pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih dan memungkinkan peningkatan capaian akses air perpipaian hingga 13% di Kecamatan Sukapura. Dilanjutkan dengan capaian akses air perpipaian sampai 18,5% pada 2034.
3. Kabupaten Pasuruan (Kec. Tosari): Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 352 L/detik dari PDAM Pasuruan direncanakan untuk Kecamatan Tosari. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum di

- Pasuruan pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih dan memungkinkan peningkatan capaian akses air perpipaan hingga 17,5%. Dilanjutkan capaian akses air perpipaan sampai 22,54% pada 2034.
4. Kabupaten Lumajang (Kec. Senduro dan Lumajang): Kabupaten Lumajang. Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 85 L/detik dari Perumdam Lumajang direncanakan untuk Kecamatan Senduro dan Lumajang. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum di Lumajang pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih dan memungkinkan peningkatan capaian akses air perpipaan hingga 22% di Kecamatan Senduro dan Lumajang. Dilanjutkan dengan target capaian akses air perpipaan 27% pada 2034.
 5. Kota Malang: Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 741 L/detik dari Perumdam Kota Malang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air minum Kota Malang. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum Kota Malang pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Selain itu, masih ada potensi peningkatan capaian akses air perpipaan hingga mencapai 71,26%. Dilanjutkan dengan target capaian akses air perpipaan sampai 76,2% pada 2034.
 6. Kota Probolinggo: Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 123 L/detik dari Perumdam Kota Probolinggo direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air minum. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum Kota Probolinggo pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Selain itu, masih ada potensi peningkatan capaian akses air perpipaan hingga mencapai 53,6% pada 2029. Dilanjutkan target capaian akses air perpipaan sampai 58,6% pada 2034.
 7. Kota Pasuruan: Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 47 L/detik dari PDAM Kota Pasuruan direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air minum Kota Pasuruan. Dengan pemanfaatan idle tersebut, kebutuhan air minum Kota Pasuruan pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Terdapat potensi peningkatan capaian akses air perpipaan hingga mencapai 51,6% pada 2029. Dilanjutkan target capaian akses air perpipaan sampai 56,6% pada 2034.

3. Pelayanan Sanitasi

Kebutuhan sanitasi untuk permukiman penduduk dipenuhi dengan infrastruktur IPAL dan IPLT. Berikut data capaian akses Sanitasi dan juga sebaran infrastruktur IPAL dan IPLT sebagai berikut:

Tabel 7.49 Capaian Akses Sanitasi

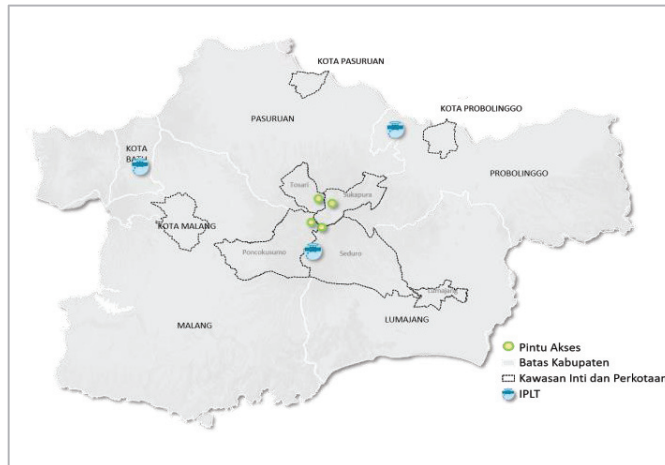
Kota/Kabupaten	Akses Aman (Rutin Disedot Septic Tanknya)		Akses Layak (Tidak disedot septic tanknya)	
	Jumlah RT	%	Jumlah RT	%
Malang	29,246	4.07%	529,033	73.69%
Probolinggo	4,761	1.47%	149,881	46.14%
Pasuruan	13,631	3.04%	305,184	68.11%
Lumajang	19,128	6.62%	211,810	73.25%
Kota Malang	27,522	10.40%	224,689	84.86%
Kota Probolinggo	4,390	6.94%	52,842	83.56%
Kota Pasuruan	3,113	5.73%	45,145	83.04%
Total		5.47%		73.24%

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2021

Tabel 7.50 Sebaran IPLT di DPP BTS

Kab/Kota	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)	Terpakai (m3/hari)
Malang	<i>tidak ada data</i>		
Probolinggo	IPLT Kab. Probolinggo	20	12
Pasuruan	<i>tidak ada data</i>		
Lumajang	IPLT Kab. Lumajang	25	9
Kota Malang	IPLT Supit Urang	25	25
Kota Probolinggo	<i>tidak ada data</i>		
Kota Pasuruan	<i>tidak ada data</i>		
BTS		70	46

Sumber: BPPW Jatim, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.31 Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT di DPP BTS

Berdasarkan kriteria dalam pembangunan infrastruktur sanitasi sesuai Permen PUPR 4/2017, SPALD-T dibangun untuk daerah untuk kepadatan penduduk >150 jiwa/ha, dan/atau kawasan strategis sedangkan SPALD-S dibangun untuk daerah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha. Berikut data kepadatan pada masing-masing Kecamatan Prioritas:

Tabel 7.51 Kepadatan Penduduk di masing-masing Kecamatan

Kab/Kota	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Malang	Poncokusumo	10
Probolinggo	Sukapura	2
Pasuruan	Tosari	2
Lumajang	Senduro	1
	Lumajang	1
Kota Malang	*	77
Kota Probolinggo	*	42
Kota Pasuruan	*	59

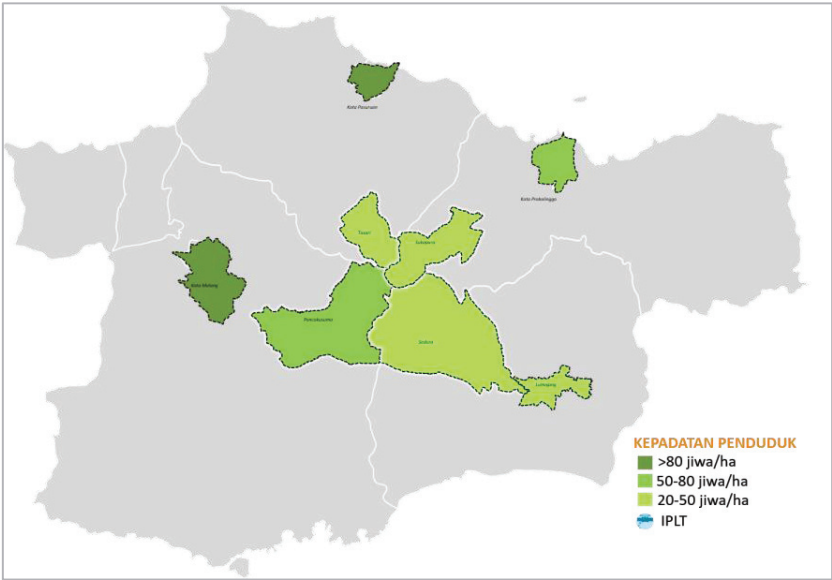
Sumber: BPPW Jatim, 2021

Sebagai kawasan pariwisata, perhitungan timbulan lumpur tinja menggunakan standar timbulan 0,5 L/orang/hari dengan target tingkat pelayanan 60% untuk penduduk alami dan 100% wisatawan. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi timbulan tinja di masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.52 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan

Kab/Kota	Timbulan Lumpur Tinja Penduduk dan Wisatawan (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	118,12	120,36	122,68	125,07	127,56	129,32	131,13	132,98	342,76
Probolinggo	158,99	162,62	166,38	170,27	174,32	177,13	180,01	182,96	542,63
Pasuruan	105,35	107,71	110,17	112,71	115,36	117,19	119,07	121,00	355,24
Lumajang	54,84	55,39	55,95	56,52	57,11	57,59	58,07	58,56	93,11
Kota Malang	255,99	257,42	258,86	260,31	261,77	263,23	264,71	266,19	273,73
Kota Probolinggo	73,17	73,81	74,46	75,11	75,78	76,44	77,11	77,79	81,28
Kota Pasuruan	63,29	63,74	64,19	64,65	65,11	65,57	66,04	66,50	68,90
BTS	830	841	853	865	877	886	896	906	1.758

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.32 Sebaran IPLT dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: untuk kawasan BTS perlu infrastruktur untuk mengelola 906 m³/hari timbulan lumpur tinja pada 2009 dan 1.758 m³/hari timbulan lumpur tinja pada 2034. Proporsi paling besar berada di Kota Malang (266 m³/hari) dan Kab. Probolinggo (183 m³/hari) pada 2009. Pada 2034, proporsi timbulan lumpur tinja terbanyak di Kab. Probolinggo (542,63 m³/hari) dan Kab. Pasuruan (355,24 m³/hari), hal ini diperkirakan karena adanya kenaikan jumlah wisatawan yang melalui pintu gerbang menuju BTS di Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan yang merupakan 2 pintu gerbang dengan proporsi wisatawan masuk terbanyak.

Berdasarkan kepadatan penduduk, kawasan BTS memerlukan SPALD-S berupa infrastruktur IPLT. Namun, dapat dipilih SPALD-T karena BTS merupakan kawasan strategis. Pada infrastruktur SPALD eksisting, khususnya IPLT, dapat dilakukan peningkatan kapasitas IPLT sehingga kapasitas

pengolahan IPLT dapat bertambah hingga tahun 2009 dilanjutkan sampai 2034.

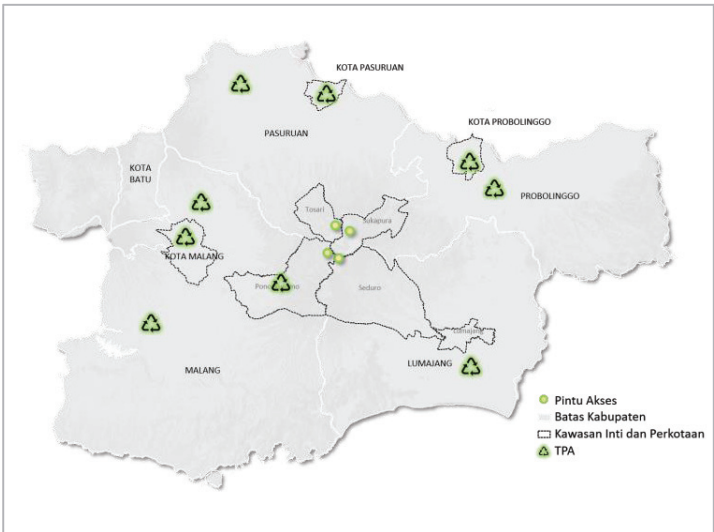
4. Pelayanan Persampahan

Sebagai kawasan pariwisata, timbulan persampahan dari permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur persampahan yaitu TPA dan TPS3R. Berikut data capaian akses persampahan dan juga sebaran infrastruktur TPA dan TPS3R sebagai berikut:

Tabel 7.53 Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Unit TPA	Kapasitas Total (m³/tahun)	Sampah Masuk TPA (m³/Tahun)	Status
Malang	TPA Paras Poncokusumo	277.800	32.381	Kapasitas sisa 207.000 m³
	TPA Randuagung	789.120	30.474	Kapasitas sisa 294.000 m³
	TPA Talangagung Kepanjen	738.432	661.116	Kapasitas sisa 339.000 m³
Probolinggo	TPA Seboroh Krejengan	294.000	21.900	Diperkirakan sisa 2 tahun
Pasuruan	TPA Wonokerto	273.000	50.005	Beroperasi Februari 2020 menggantikan TPA Kenep Beji
Lumajang	TPA Lempeni	1.460.000	63.620	Overload
Kota Malang	TPA Supiturang	210.000	177.317	Beroperasi dari 2020
Kota Probolinggo	TPA Bestari	158.207	25.550	Diperkirakan akhir 2022 penuh
Kota Pasuruan	TPA Blandongan	336.000	35.719	Diperkirakan sisa 5 tahun

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.33 Sebaran TPA Eksisting

Timbulan sampah di kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS) memperhitungkan kegiatan penduduk alami dan wisatawan. Penanganan timbulan sampah penduduk dan tenaga kerja diproyeksikan sesuai dengan skenario peningkatan pelayanan persampahan. Skenario peningkatan pelayanan persampahan perlu mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melakukan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah, serta membandingkannya dengan target pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Tidak ada target intervensi pada pengurangan sampah. Pengelolaan sampah kabupaten ditargetkan meningkat 20% dari 2020, sedangkan pengelolaan sampah kota ditargetkan 100% pada 2029 dilanjutkan sampai 2034. Berikut Capaian Pengelolaan Sampah masing-masing Kab/Kota pada tahun 2020:

Tabel 7.54 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Pengelolaan Sampah 2020 (%)
Malang	45,28
Probolinggo	16,65
Pasuruan	30,10
Lumajang	54,27
Kota Malang	98,06
Kota Probolinggo	84,71
Kota Pasuruan	98,70

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022

Berdasarkan informasi yang didapat dari BPPW Jawa Timur terdapat beberapa rencana pengembangan TPA sebagai berikut:

- Kab Malang:** TPA Kalipare luas 10,7 Ha, TPA Gedangan luas 6,52 Ha, TPST Dampit luas 2,4 Ha (sumber: DLH Kab Malang, 2022).
- Kab. Probolinggo & Kota Probolinggo:** TPA regional di Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kab Probolinggo seluas 50,67 Ha yang melayani Kab Probolinggo dan Kota Probolinggo, tetapi belum ada kesepakatan bersama dan dokumen lingkungan untuk pembebasan lahan oleh provinsi.
- Kab. Pasuruan:** Membutuhkan TPA di Barat dan Timur Pasuruan agar tidak terlalu jauh.
- Kab Lumajang:** Perluasan TPA Lempeni seluas 2 Ha dengan sistem *sanitary landfill*, kapasitas 100.000 m³ dengan umur layanan 5 tahun.
- Kota Pasuruan:** Rencana perluasan TPA Blandongan, sekarang sedang proses pembebasan lahan.

Berdasarkan capaian kinerja persampahan dan mempertimbangkan rencana pengembangan TPA dapat diproyeksikan timbulan sampah sesuai proyeksi penduduk dan tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 7.55 Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah BTS

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah (%)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	47,78	50,28	52,78	55,28	57,78	60,28	62,78	65,28	70,28
Probolinggo	19,15	21,65	24,15	26,65	29,15	31,65	34,15	36,65	41,65
Pasuruan	32,60	35,10	37,60	40,10	42,60	45,10	47,60	50,10	55,10
Lumajang	56,77	59,27	61,77	64,27	66,77	69,27	71,77	74,27	79,27
Kota Malang	98,30	98,55	98,79	99,03	99,27	99,52	99,76	100,00	100,00
Kota Probolinggo	86,62	88,53	90,44	92,36	94,27	96,18	98,09	100,00	100,00
Kota Pasuruan	98,86	99,03	99,19	99,35	99,51	99,68	99,84	100,00	100,00
BTS	62,9	64,6	66,4	68,1	69,9	71,7	73,4	75,2	

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.56 Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani BTS

Kab/Kota	Peningkatan Timbulan Sampah Tertangani (ton/tahun)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Malang	29.014	31.378	33.769	36.188	38.635	41.108	43.609	46.140	59.606
Probolinggo	4.668	6.336	8.025	9.735	11.465	13.213	14.983	16.773	26.700
Pasuruan	6.003	8.357	10.743	13.164	15.619	18.106	20.627	23.184	36.926
Lumajang	11.504	12.502	13.506	14.516	15.531	16.552	17.578	18.611	23.922
Kota Malang	18.423	18.444	18.464	18.485	18.504	18.524	18.543	18.562	18.650
Kota Probolinggo	5.168	5.198	5.228	5.259	5.289	5.320	5.351	5.381	5.538
Kota Pasuruan	4.459	4.478	4.498	4.517	4.537	4.556	4.576	4.595	4.694
BTS	79.239	86.693	94.234	101.863	109.580	117.378	125.267	133.246	176.036

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis skenario pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah penduduk dan wisatawan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Timbulan sampah **Kab Malang, Kab Pasuruan, dan Kota Malang** masih **dapat ditampung** di TPA eksisting hingga 2029, sehingga tidak dibutuhkan peningkatan kapasitas TPA hingga 2034.
2. Pada **Kab Probolinggo**, TPA Seboroh Krejengan diproyeksikan hanya dapat menampung sampah **hingga 2026**, sehingga rencana TPA regional Probolinggo yang rencananya melayani Kab Probolinggo dan Kota Probolinggo harus segera disiapkan. Pada **Kota Probolinggo** sendiri, TPA Bestari hanya dapat menampung timbulan sampah **hingga 2024**.
3. Pada **Kab Lumajang**, TPA eksisting Lempeni sudah **overload**, sehingga dibutuhkan penanganan, baik berupa peningkatan kapasitas TPA eksisting, maupun pembangunan TPA baru.
4. Pada **Kota Pasuruan**, TPA Blandongan diproyeksikan dapat menampung sampah **hingga 2025**. Sudah terdapat rencana perluasan TPA namun belum mendapat informasi kapasitas.

B. Selingkar Ijen

1) Kondisi Eksisting

a) Profil Wilayah

Wilayah Selingkar Ijen terdiri dari Kawasan Inti dan pusat layanan perkotaan. Kawasan inti terdiri dari Kec. Licin (Kab. Banyuwangi) dan Kec. Ijen (Kab. Bondowoso). Pintu masuk KSPN Ijen dapat ditempuh melalui Pintu Paltuding melalui Kec. Licin Banyuwangi atau Kec. Ijen Bondowoso. Sedangkan kawasan pelayanan perkotaan terdiri dari Kec Banyuwangi, Giri, Glagah, Kalipuro (Kab. Banyuwangi); Kec. Situbondo (Kab. Situbondo); Kec. Bondowoso (Kab. Bondowoso); Kec. Patrang, Kec. Summersari, Kec. Kaliwates (Kab. Jember).

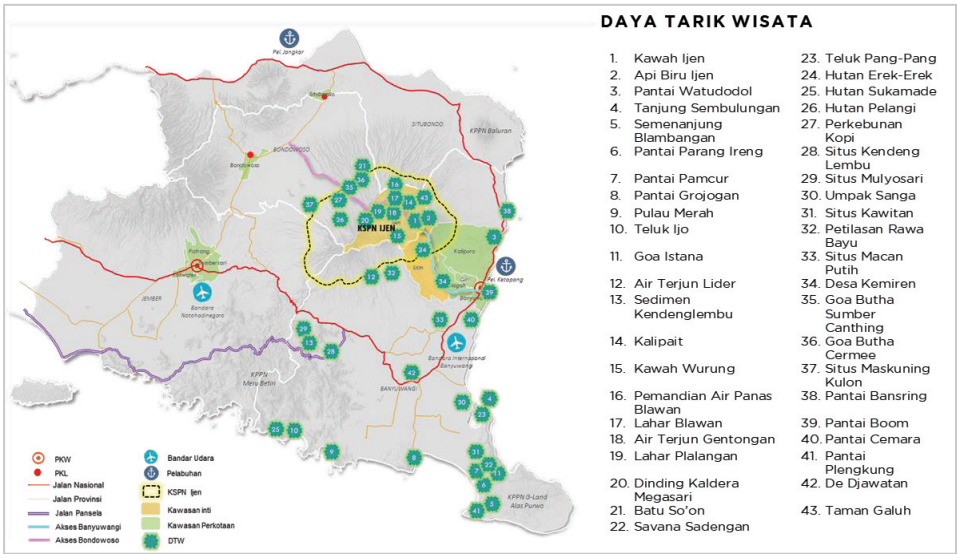
Luas Wilayah Selingkar Ijen 12.070,58 km² meliputi Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, dengan jumlah penduduk mencapai 5.706.961 jiwa, kepadatan penduduk netto 798 jiwa/km² penduduk miskin 11,14% (Jawa Timur 11,09%), IPM 67,80 (Jawa Timur 71,71).

Kontribusi PDRB Selingkar Ijen Rp. 132.615,9 M (8,2% Jawa Timur dan 1,3% terhadap Nasional), dengan sektor unggulan berupa: pertanian, perikanan dan kehutanan (21,23% Jawa Timur). Produksi padi Kawasan Selingkar Ijen sebesar 1 jt/tahun atau 14,92% Jatim. Jember merupakan lumbung pangan dengan produksi padi sebesar 602 ribu ton/tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang 4,78% Jawa Timur dan perdagangan besar dan eceran menyumbang 6,76% Jawa Timur.

Jumlah wisatawan Selingkar Ijen 10,10 % dari wisatawan yang menuju Jawa Timur pada tahun 2018. Daya tarik wisata berupa: wisata Kawah Ijen, Gunung Ijen, Agrowisata, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Meru Betiri, Pantai Plengkung, Pantai Pulau Merah, dll.

Dari segi akses, satu satunya pintu menuju Kawah Ijen adalah Pintu Paltuding yang bisa dilewati dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Wisatawan lebih banyak memilih ke kawah Ijen melalui Banyuwangi karena lebih dekat. Sedangkan jalur Bondowoso-Paltuding merupakan jalur terdekat dari arah Surabaya dan Bandara Juanda, namun harus melalui ruas jalan provinsi di

Kabupaten Bondowoso. Di sepanjang rute Bondowoso ini banyak terdapat pemandangan yang indah dan destinasi wisata bagian dari Global Geopark yang belum terekspos oleh wisatawan. Sehingga rute ini sangat cocok dilewati pada saat pagi-siang hari. Obyek wisata Kawah Ijen merupakan daya tarik bagi wisatawan minat khusus seperti pendakian kawah Ijen untuk melihat *blue fire* dan *sunrise*, karena kegiatan tersebut harus dilakukan pada dini hari sehingga wisatawan harus menginap terlebih dahulu. Dari segi akomodasi, penginapan di Banyuwangi lebih banyak dan beragam. Secara spasial, sebaran destinasi wisata Selingkar Ijen dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber: RIPPARNAS dan RIPPARDA, 2022

Gambar 7.34 Sebaran Destinasi Wisata Selingkar Ijen

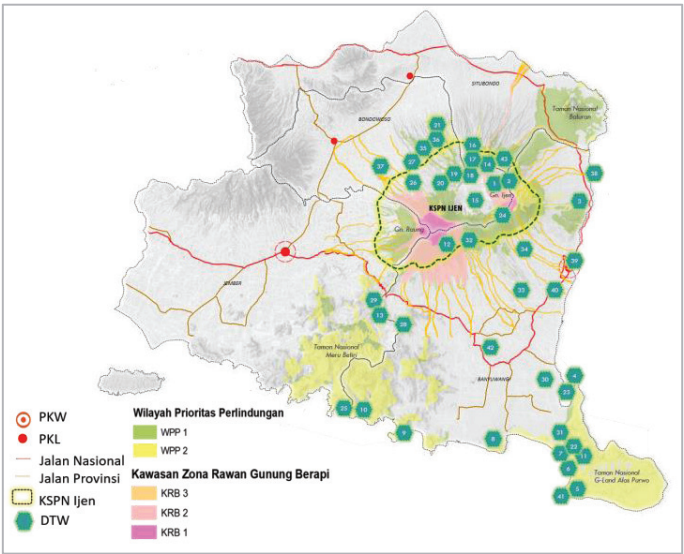
Hasil analisis terhadap daya dukung dan daya tampung di KSPN Ijen adalah Ijen mempunyai daya dukung pangan kategori sangat tinggi dan tinggi, sedangkan daya dukung terhadap pasokan air bersih kategori tinggi. Pada Kawasan Selingkar Ijen terdapat Wilayah Prioritas Perlindungan atau WPP 1 dan WPP 2, dimana WPP 1 merupakan ketentuan pola ruang yang diperuntukkan untuk kawasan lindung dan tidak boleh dibangun seluas 287.293,38 Ha (24%). Sedangkan WPP 2 merupakan ketentuan pola ruang yang dapat dibangun tetapi bersyarat seluas 325.412,25 Ha (27%).

Terdapat 3 taman nasional di sekitar KSPN Ijen yaitu: Taman Nasional Baluran, Taman Nasional G-Land Alas Purwo dan Taman Nasional Meru Betiri. Ketiga taman nasional masuk dalam Cagar Biosfer Dunia dan Taman Nasional Alas Purwo masuk dalam usulan Global Geopark. Kawasan Ijen termasuk dalam Cagar Biosfer Dunia (UNESCO 2016) yaitu Cagar Biosfer Blambangan. Kawasan Ijen diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark TA 2022 dengan luas 4.723 km2 yang terdiri dari 21 geosite, 6 biosite, dan 10 culturesite. Kawasan Ijen dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketentuan Pemanfaatan Taman Nasional diantaranya dibolehkan wisata alam dengan syarat: tidak mengubah bentang alam, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh

mengganggu fungsi alam, dan dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Terdapat **zona kerawanan Letusan Gunung Berapi** yaitu Gunung Ijen dan Gunung Raung. Gunung Ijen mempunyai potensi bahaya berupa ancaman aliran gas racun, awan panas, lumpur panas, lava, abu, lahar (1,5-8 km dari pusat erupsi) dan tahun 1999 erupsi terakhir dan tahun 2018 hembusan gas beracun. Sedangkan Gunung Raung merupakan gunung berapi aktif, erupsi 1-3 tahun sekali dan terakhir erupsi pada tahun Juli 2022 (abu vulkanik setinggi 1,5 km).



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

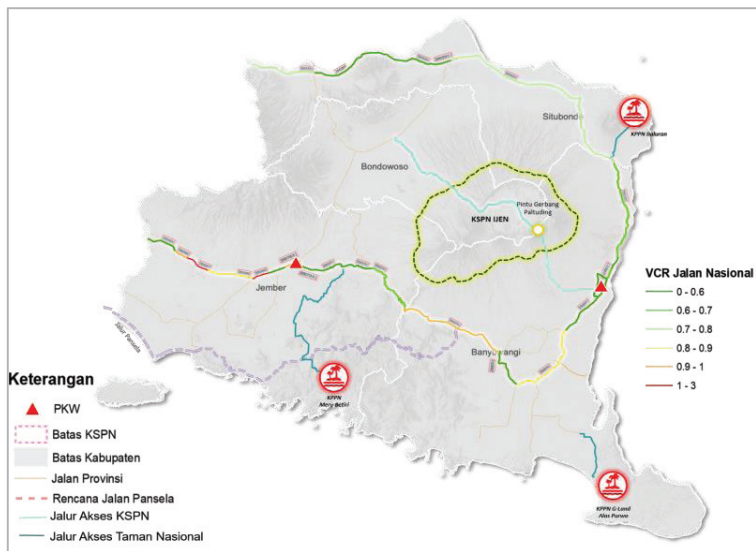
Gambar 7.35 Rawan Bencana di Kawasan Wisata Selingkar Ijen

b) Profil Infrastruktur

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, kondisi jalan nasional sepanjang 343,46 km di Selingkar Ijen pada umumnya masih baik dengan lebar jalan rata-rata 9,37 m; IRI 3,91; VCR rata-rata 0,44. Namun, karena kondisi topografi dan percampuran lalu lintas logistik dan wisata, serta pembangunan tol masih sampai Besuki (Situbondo), pada umumnya jalan nasional memiliki kecepatan yang lebih rendah dari standar Renstra PUPR (53 km/jam).

Terdapat ruas jalan dengan VCR>1 yaitu ruas Tanggul-Gembirano (Kode jalan 28067 dan VCR 1,33) dan ruas Rambipuji-Mangli (kode jalan 28069 dan VCR 1,16). Hal ini dikarenakan padatnya arus lalu lintas perkotaan di Jember.

Akses Paltuding (Pintu Akses Ijen) merupakan jalan kabupaten yang dapat diakses dari Banyuwangi dan Bondowoso. Banyuwangi-Paltuding kondisi jalan baik, perkerasan aspal, lebar jalan 3-6 m, terdapat 1 titik lokasi rawan longsor di daerah Ere-ere, jarak dari perkotaan terdekat 31 km, kecepatan 30-40 km/jam, waktu tempuh 1 jam. Bondowoso-Paltuding kondisi jalan baik, perkerasan aspal, lebar jalan 3-4 m, jarak dari perkotaan terdekat 54 km, kecepatan 30-40 km/jam, waktu 1 jam 30 menit. Merupakan jalur terdekat dari arah Surabaya dan Bandara Juanda, namun harus melalui ruas jalan provinsi di Kabupaten Bondowoso.

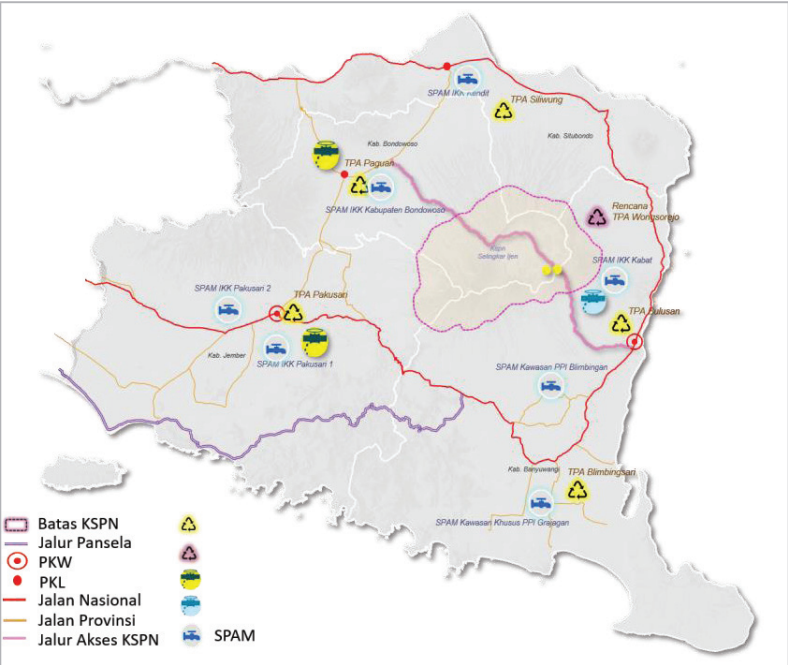


Sumber: BBPJN Jawa Timur-Bali, 2022

Gambar 7.36 VCR di Kawasan Selingkar Ijen

Berkaitan dengan infrastruktur permukiman, capaian akses air perpipaan Ijen sebesar 36,53% dengan 1,5 juta penduduk yang sudah terlayani, tertinggi di Bondowoso (67,20%) dan terendah di Jember (5,48%.) Kapasitas terpasang di Ijen sebesar 1.614 l/det dengan volume produksi riil 1.250 l/det dan *idle* 364 l/det. Kapasitas *idle* tertinggi berada di Banyuwangi sebesar 115 l/det dan terendah di Jember sebesar 26 l/det.

Capaian akses sanitasi aman Ijen sebesar 5.47%, tertinggi di Banyuwangi (3,85%) dan terendah di Bondowoso (1,02%). Di Ijen terdapat 1 IPLT yaitu di Banyuwangi; rencana 1 IPLT di Jember dan rencana 1 IPLT di Bondowoso. Selain itu, terdapat IPAL komunal yang tersebar di Banyuwangi dan Bondowoso.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.37 Sebaran Infrastruktur Permukiman di Kawasan Selingkar Ijen

Persentase penanganan sampah di Ijen sebesar 40,91% dengan penanganan sampah tertinggi di Situbondo (71,71%) dan terendah di Bondowoso (20,35%). TPA Bulusan Banyuwangi sudah non aktif dan saat ini menggunakan TPA Blimbingsari menunggu dibangunnya TPA Wongsorejo. TPA Paguan Bondowoso dan TPA Pakusari Jember telah penuh, sehingga akan mempengaruhi tingkat layanan pengelolaan sampah. TPA Siliwang Situbondo masih terdapat *idle capacity*.

2) Analisis Kebutuhan

a) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Analisis kebutuhan infrastruktur Bina Marga terdiri dari Analisis Kondisi VCR, Waktu Tempuh, dan Pergerakan Arus Lalu Lintas.

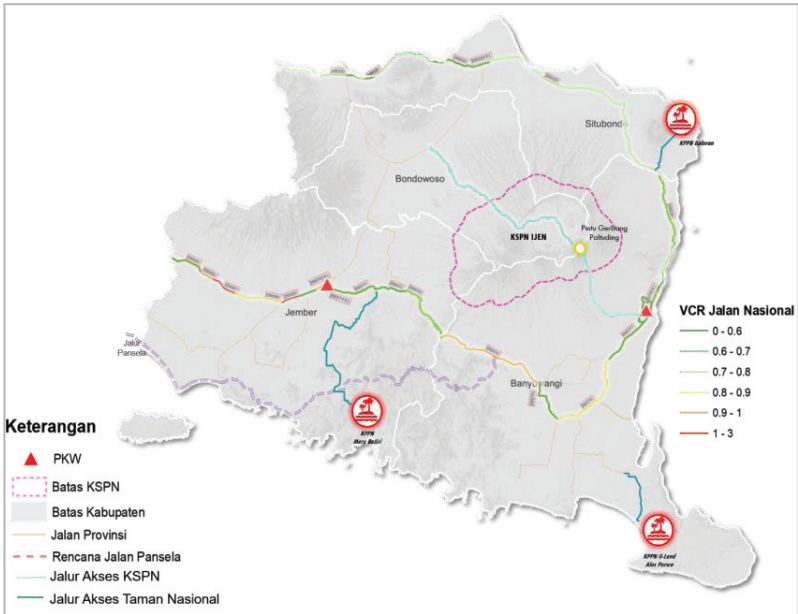
1. Kinerja Jaringan Jalan (VCR)

Total panjang jalan nasional 342,46 km (140,84 km arteri & 201,62 km kolektor) dengan lebar jalan: 6,4 m, IRI: 2,6, dan VCR: 0,35. Terdapat beberapa ruas jalan dengan VCR > 1. Berikut data kondisi VCR Jalan Nasional Selingkar Ijen.

Tabel 7.57 Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 1 Selingkar Ijen

Nama Ruas Jalan	Kode Jalan	IRI	Lebar	VCR
Gembirono - Rambipuji	28068	3.59	7	0.81
Benculuk - Rogojampi	28076	3.23	6	0.85
Pondok Dalem - Tanggul	28066	4.08	7	0.92
Jln. Gajah Mada (Jember)	2807013	3.89	18	0.95
Bts. Kab. Jember - Genteng Kulon	28074	3.75	6	0.97
Rambipuji - Mangli	28069	3.43	9	1.16
Tanggul - Gembirono	28067	3.76	7	1.33

Sumber: BBPJJN Jawa Timur-Bali, 2021



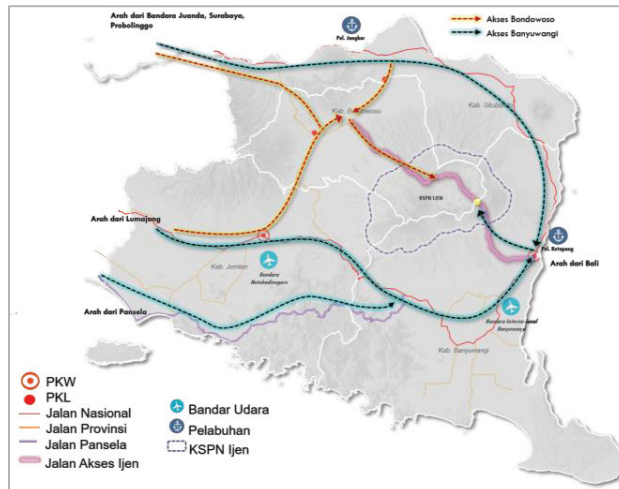
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.38 VCR di Kawasan Selingkar Ijen

2. Pergerakan Arus Lalu Lintas Menuju Kawasan Kawah Ijen

Menuju Pintu Paltuding (arah Banyuwangi):

- Dari arah Surabaya/Bandara Juanda melalui Tol Surabaya-Probolinggo (Exit Tol Probolinggo Timur); Jalan Kabupaten Leces-Dringu; Jalan Nasional BTS. Kota Probolinggo-Paiton; Paiton-Buduan; Buduan-Panarukan; Panarukan-BTS. Situbondo; BTS. Situbondo-Jalan Bajulmati; Bajulmati-Ketapang; Gatot Subroto-Sudirman; Jalan Kabupaten Banyuwangi-Licin.
- Dari arah Bali/Pelabuhan Ketapang melalui jalan Pelabuhan Ketapang; Jalan Nasional Sudirman dan Jalan Kabupaten Banyuwangi-Licin.
- Dari arah Bandara Banyuwangi melalui Jalan akses bandara (Kec. Blimbingsari); Jalan Nasional Rogojampi-BTS. Kota Banyuwangi; Jalan Nasional S. Parman-Ahmad Yani; Jalan Kabupaten Banyuwangi-Licin.
- Dari arah Jember ke Banyuwangi melalui Jalan Nasional Sultan Agung-Mayang Sumberjati; Jalan Nasional Sumberjati/Sempolan - BTS Banyuwangi; Jalan Nasional BTS. Jember-Genteng Kulon; Jalan Nasional Genteng Kulon-Jajag-Benculuk; Jalan Nasional Benculuk-Rogojampi; Jalan Nasional Rogojampi- BTS. Kota Banyuwangi; Jalan Nasional S. Parman-Ahmad Yani; Jalan Kabupaten Banyuwangi-Licin.
- Dari arah Jawa Tengah melalui Ponsel melalui Jalan Nasional Genteng Kulon-Jajag-Benculuk (Simpang Glenmore); Jalan Nasional Benculuk-Rogojampi; Jalan Nasional Rogojampi-BTS. Kota Banyuwangi; Jalan Nasional S. Parman-Ahmad Yani; Jalan Kabupaten Banyuwangi-Licin



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.39 Relevan Road Selingkar Ijen

Menuju Pintu Paltuding (arah Bondowoso)

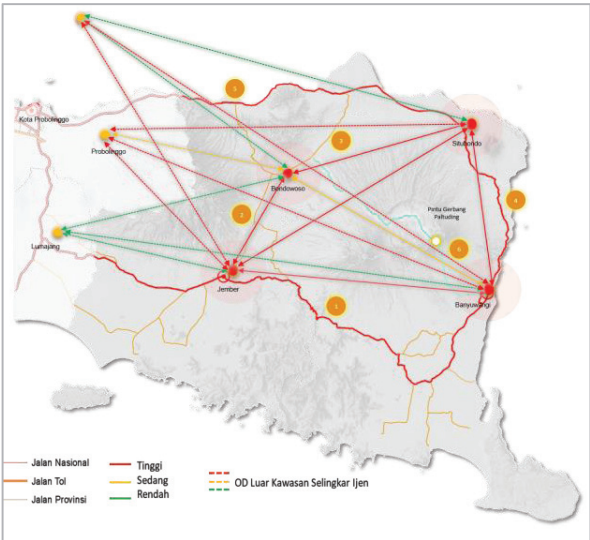
- Dari arah Surabaya/Bandara Juanda melalui Tol Surabaya-Probolinggo (Exit Tol Probolinggo Timur); Jalan Kabupaten Leces-Dringu; Jalan Nasional BTS. Kota Probolinggo-Paiton; Paiton-Buduan; Jalan Provinsi Buduan-Bondowoso; BTS. Situbondo-BTS. Bondowoso; Jalan Simpang Bondowoso-Simpang Tapan; Jalan Kabupaten Tapan-Ijen.
- Dari Situbondo/Pel. Jangkar ke Bondowoso melalui Jalan Nasional Buduan-Panarukan; Panarukan-BTS. Situbondo-Simpang Kec. Situbondo; Jalan Provinsi Simpang Situbondo-Tapan; Jalan Kabupaten Tapan-Ijen.

Dari Jember ke Bondowoso melalui Jalan Nasional Sultan Agung; Jalan Provinsi Simpang Jember-Simpang Bondowoso; Jalan Provinsi Simpang Bondowoso-Simpang Tapan; Jalan Kabupaten Tapan-Ijen.

Berdasarkan matriks asal tujuan, terdapat Pergerakan lalu lintas tertinggi yaitu dari Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso, Situbondo-Bondowoso, Probolinggo-Jember, Sidoarjo-Banyuwangi, dan Situbondo-Banyuwangi. Untuk itu, diperlukan penanganan jaringan jalan sebagai berikut:

1. **Peningkatan kapasitas jalan nasional Jember-Banyuwangi:** Pansela Jawa Timur Ruas Jember-Banyuwangi dan Jl. Rogojampi-Jember
2. **Peningkatan kapasitas jalan provinsi Jember-Bondowoso:** Ruas Jl. Bondowoso-Jember, Jl. Raya Wringin-Jl. Diponegoro Bondowoso.
3. Peningkatan kapasitas jalan provinsi Situbondo-Bondowoso: Ruas Jl. Raya Situbondo
4. Peningkatan kapasitas jalan nasional Situbondo-Banyuwangi: Jl. BTS. Kota Situbondo-Ketapang,
5. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
6. **Penanganan jalan akses Paltuding:** Jalan Kabupaten Kawah Ijen (Garduatak Bondowoso-Paltuding-Banyuwangi), penanganan longsor akses utama Kawah Ijen (Daerah Ereke-Ereke, Kec. Licin dan Cawan perbatasan Kec. Glagah dan Licin).

Penentuan ruas prioritas dilakukan berdasarkan analisis matriks asal tujuan sebagaimana digambarkan berikut:



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.40 Matriks Asal dan Tujuan di Kawasan Selingkar Ijen

3. Proyeksi Arus Lalu Lintas

Berdasarkan proyeksi lalu lintas regional dan wisatawan dihasilkan analisis proyeksi kebutuhan lalu lintas di setiap Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 7.58 Proyeksi LHRT di Ruas Jalan Nasional Selingkar Ijen

Nama Ruas	Konektivitas	LHRT (smp/jam)	Proyeksi LHRT (smp/jam)							
			2022	2025	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Panarukan - Bts. Kota Situbondo	Lintas Utara	9.095	9.176,86	9.398,87	9.703,26	9.779,29	9.855,33	9.931,36	10.007,39	10.083,42
Jln. P.B. Sudirman (Situbondo)	Lintas Utara	8.160	8.233,44	8.432,63	8.705,73	8.773,95	8.842,16	8.910,38	8.978,60	9.046,81
Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi)	Lintas Utara	17.049	17.185,39	17.601,15	18.171,18	18.311,45	18.451,73	18.592,00	18.732,27	18.872,54
Jln. A. Yani (Situbondo)	Lintas Utara	12.862	12.964,90	13.278,55	13.708,59	13.814,41	13.920,24	14.026,06	14.131,89	14.237,71
Jln. Basuki Rachmat (Situbondo)	Lintas Utara	12862	12.964,90	13.278,55	13.708,59	13.814,41	13.920,24	14.026,06	14.131,89	14.237,71
Bajulmati (Bts. Kab. Situbondo) - Ketapang	Lintas Utara	38.658	38.967,26	39.909,98	41.202,51	41.520,57	41.838,64	42.156,70	42.474,77	42.792,83
Jln. Brawijaya (Jember)	Lintas Selatan	7.520	7.580,16	7.763,54	8.014,97	8.076,84	8.138,71	8.200,58	8.262,46	8.324,33
Jln. Hayam Wuruk (Jember)	Lintas Selatan	7.520	7.580,16	7.763,54	8.014,97	8.076,84	8.138,71	8.200,58	8.262,46	8.324,33
Jln. Gajah Mada (Jember)	Lintas Selatan	18.520	18.668,16	19.119,79	19.739,00	19.891,38	20.043,75	20.196,13	20.348,50	20.500,88
Jln. Sultan Agung (Jember)	Lintas Selatan	7.520	7.580,16	7.763,54	8.014,97	8.076,84	8.138,71	8.200,58	8.262,46	8.324,33
Bts. Kota Jember - Mayang	Lintas Selatan	5.498	5.541,98	5.676,06	5.859,88	5.905,12	5.950,35	5.995,59	6.040,82	6.086,06
Jln. A. Yani (Jember)	Lintas Selatan	11.198	11.287,58	11.560,66	11.935,06	12.027,19	12.119,33	12.211,46	12.303,59	12.395,72
Jln. Panjaitan (Jember)	Lintas Selatan	11.198	11.287,58	11.560,66	11.935,06	12.027,19	12.119,33	12.211,46	12.303,59	12.395,72
Jln. S. Parman (Jember)	Lintas Selatan	11.198	11.287,58	11.560,66	11.935,06	12.027,19	12.119,33	12.211,46	12.303,59	12.395,72
Jln. Mt. Haryono (Jember)	Lintas Selatan	11.198	11.287,58	11.560,66	11.935,06	12.027,19	12.119,33	12.211,46	12.303,59	12.395,72
Jln. Brigjen Katamso (Jember)	Lintas Selatan	11.198	11.287,58	11.560,66	11.935,06	12.027,19	12.119,33	12.211,46	12.303,59	12.395,72
Mayang - Sumber Jati / Sempolan	Lintas Selatan	5.314	5.356,51	5.486,10	5.663,77	5.707,49	5.751,21	5.794,93	5.838,66	5.882,38
Sumberjati/Sempolan - Bts. Kab. Banyuwangi	Lintas Selatan	11.865	11.959,92	12.249,26	12.645,97	12.743,59	12.841,21	12.938,83	13.036,46	13.134,08
Bts. Kab. Jember - Genteng Kulon	Lintas Selatan	55.110	55.550,88	56.894,80	58.737,39	59.190,81	59.644,24	60.097,66	60.551,09	61.004,51
Genteng Kulon - Jajag - Benculuk	Lintas Selatan	3.641	3.670,13	3.758,92	3.880,65	3.910,61	3.940,56	3.970,52	4.000,48	4.030,43
Benculuk - Rogojampi	Lintas Selatan	8.661	8.730,29	8.941,50	9.231,08	9.302,34	9.373,60	9.444,86	9.516,12	9.587,38
Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi	Lintas Selatan	11.998	12.093,98	12.386,57	12.787,72	12.886,44	12.985,15	13.083,87	13.182,58	13.281,30
Jln. S. Parman (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Jln. Adi Sucipto (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Jln. A. Yani (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Jln. P.b. Sudirman (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Jln. Basuki Rakhmat (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Jln. Yos Sudarso (Banyuwangi)	Lintas Selatan	7.228	7.285,82	7.462,09	7.703,75	7.763,22	7.822,69	7.882,16	7.941,63	8.001,09

Nama Ruas	Konektivitas	LHRT (smp/ jam)	Proyeksi LHRT (smp/jam)							
			2022	2025	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jln. Gatot Subroto (Banyuwangi)	Lintas Selatan	6.272	6.322,18	6.475,13	6.684,83	6.736,43	6.788,04	6.839,64	6.891,25	6.942,85
Bts. Kota Probolinggo - Paiton (Bts. Kab. Situbondo/Binor)	Lintas Utara	23.899	24.090,19	24.672,99	25.472,06	25.668,69	25.865,33	26.061,96	26.258,59	26.455,22

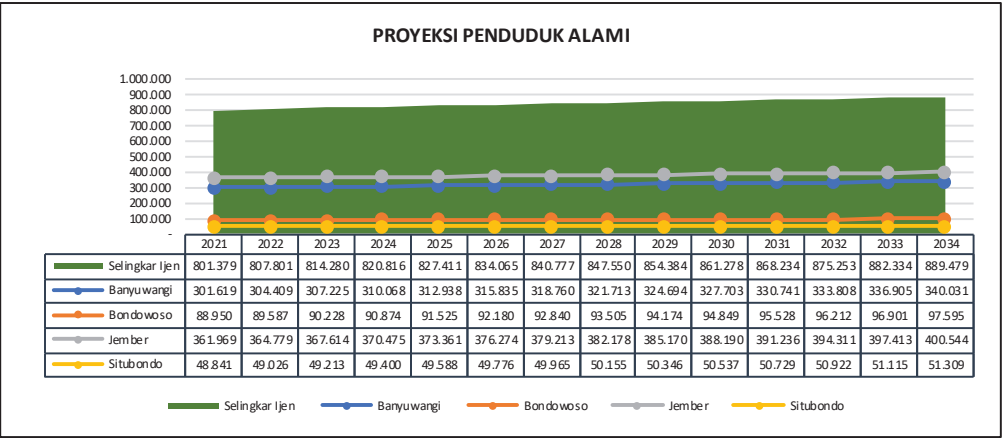
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

b) **Infrastruktur Permukiman**

Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur permukiman, diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk dan proyeksi pertumbuhan wisatawan sesuai tematik pengembangan kawasan Selingkar Ijen sebagai kawasan pariwisata unggulan.

1. **Proyeksi Penduduk Alami dan Wisatawan**

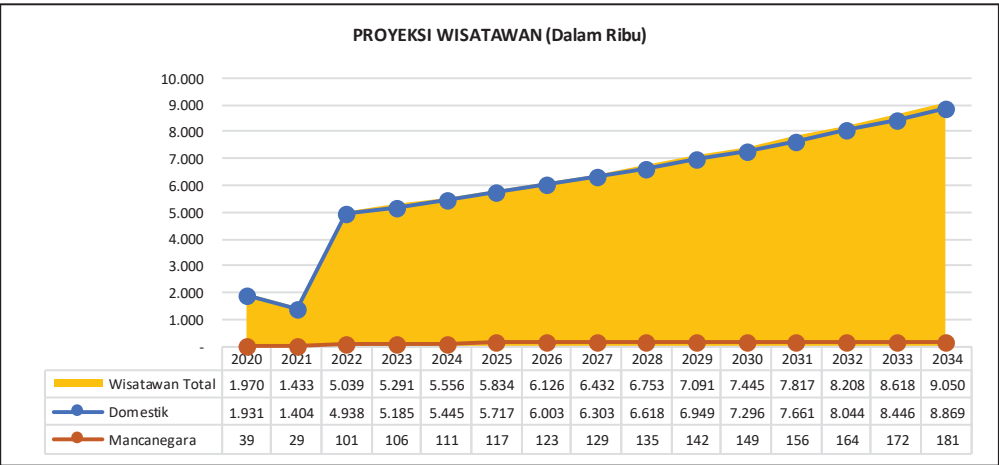
Proyeksi penduduk alami dihitung menggunakan persentase laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan *key tourism area* (KTA) dan pusat perkotaan di Selingkar Ijen sebagai berikut: 1) Banyuwangi (Licin, Banyuwangi, Kalipuro, Glagah, Giri); 2) Bondowoso (Ijen, Bondowoso); 3) Jember (Patrang, Kaliwates, Summersari); 4) Situbondo (Situbondo).



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Gambar 7.41 Proyeksi Penduduk Alami di Kawasan Selingkar Ijen

Jumlah penduduk alami Selingkar Ijen tahun 2029 diperkirakan mencapai 854 ribu jiwa atau bertambah sekitar 59 ribu penduduk dari baseline tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk alami Selingkar Ijen tahun 2034 diperkirakan mencapai 889 ribu jiwa atau bertambah sekitar 35 ribu penduduk dari tahun 2029. Pertambahan penduduk ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur permukiman.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

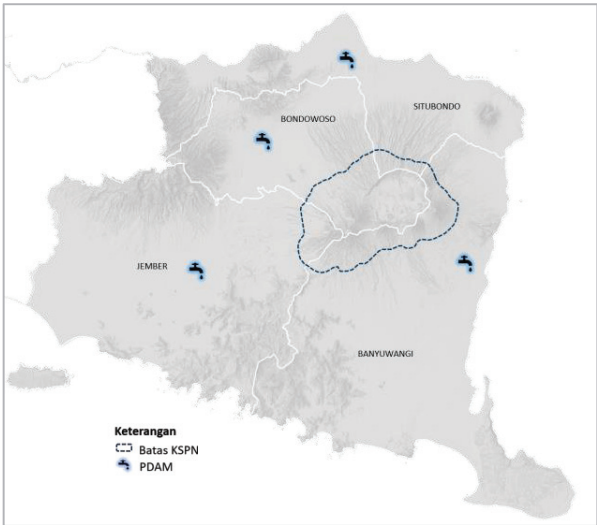
Gambar 7.42 Proyeksi Wisatawan di Kawasan Selingkar Ijen

Perhitungan proyeksi wisatawan didasarkan pada data 5 tahun terakhir mulai dari 2016. Peningkatan laju pertumbuhan wisatawan di kawasan Selingkar Ijen berkisar antara **2-7%** sebelum pandemi Covid-19, sehingga ditargetkan pada tahun 2022 sudah kembali ke normal dan jumlah wisatawan akan kembali seperti sebelum pandemi dengan laju pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 5%.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperkirakan pada tahun 2029 wisatawan Ijen sebesar 7 juta jiwa (meningkat sebesar 5 juta jiwa dari 2020), yang terdiri dari 98% wisatawan domestik (7.296.191 jiwa) dan 2% wisatawan mancanegara (148.902 jiwa). Sedangkan pada tahun 2034, wisatawan Kawasan Selingkar Ijen mencapai 9 juta jiwa (meningkat sebesar 2 juta jiwa dari 2029), yang terdiri dari 8.868.566 jiwa wisatawan domestik dan 180.991 jiwa wisatawan mancanegara.

2. Pelayanan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kawasan Selingkar Ijen telah terdapat SPAM dan PDAM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Berikut sebaran layanan PDAM di Kawasan Selingkar Ijen adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.43 Sebaran PDAM di Kawasan Selingkar Ijen

Tabel 7.59 Layanan Perpipaian di Kawasan Selingkar Ijen

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Volume Produksi Riil (L/det)
PERUMDAM Kab Banyuwangi	711	617
PDAM Kab Bondowoso	171	120
PERUMDAM Tirta Pandalungan Kab Jember	407	353
PDAM Tirta Baluran Kab Situbondo	440	314
Selingkar Ijen	1.729	1.404

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021

Tabel 7.60 Capaian Akses Air Minum Selingkar Ijen

Kab/Kota	Akses Air Layak (%)	Akses Air Perpipaian (%)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
Banyuwangi	91,62	16,80	286.902
Bondowoso	91,75	7,02	54.456
Jember	90,49	6,72	170.357
Situbondo	96,18	12,88	88.345
Selingkar Ijen	92,51	10,85	600.060
Jawa Timur	95,56	20,45	8.319.476

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021

Tabel 7.61 Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaian Ijen

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaian (%)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Banyuwangi	16,69	18,69	19,69	23,69	24,69	28,69
Bondowoso	6,95	8,95	9,95	13,95	14,95	18,95
Jember	6,66	8,66	9,66	13,66	14,66	18,66
Situbondo	12,75	14,75	15,75	19,75	20,75	24,75
Selingkar Ijen	10,76	12,76	13,76	17,76	18,76	22,76

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.62 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Ijen

Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (L/detik)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Banyuwangi	133,94	150,10	158,37	192,81	201,79	229,70
Bondowoso	24,35	28,80	31,10	40,86	43,46	51,63
Jember	48,16	63,20	70,81	101,97	109,92	134,22
Situbondo	10,01	11,69	12,55	16,04	16,94	19,67
Selingkar Ijen	216,5	253,8	272,8	351,7	372,11	435,22

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

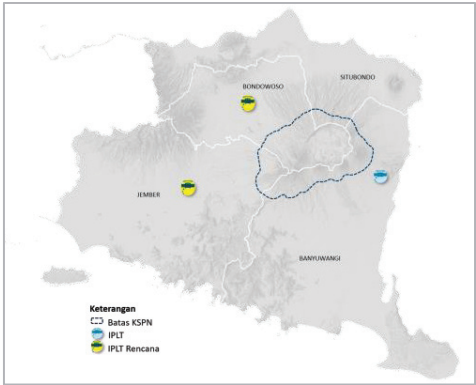
Berikut adalah kesimpulan analisis kebutuhan air minum di beberapa daerah di Kawasan Ijen:

1. Kecamatan Licin, Banyuwangi, Kalipuro, Glagah, dan Giri dilayani oleh PERUMDAM Banyuwangi. Meskipun pemanfaatan kapasitas idle Perumdam sebesar 94 L/detik direncanakan pada 2024 untuk mengalir ke kecamatan ini, namun kebutuhan air minum pada 2029 tidak dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi.
2. Kecamatan Ijen dan Bondowoso dilayani oleh PDAM Kabupaten Bondowoso. Pemanfaatan kapasitas idle PDAM sebesar 51 L/detik direncanakan pada 2024 untuk kecamatan ini. Dengan memanfaatkan idle tersebut, kebutuhan air minum pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Selain itu, masih terdapat potensi peningkatan akses air perpipaan hingga 29% di Kecamatan Ijen dan Bondowoso.
3. Kabupaten Jember, terutama Kecamatan Patrang, Kaliwates, dan Sumpersari, dilayani oleh PERUMDAM Tirta Pandalungan Kabupaten Jember. Meskipun pemanfaatan kapasitas idle Perumdam sebesar 54 L/detik direncanakan pada 2024 untuk kecamatan ini, namun kebutuhan air minum di Jember pada tahun 2029 tidak dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi dengan memperoleh sumber air baku baru.
4. Kecamatan Situbondo dilayani oleh PDAM Tirta Baluran Kabupaten Situbondo. Pemanfaatan kapasitas idle sebesar 126 L/detik dari PDAM direncanakan pada 2024 untuk kecamatan ini. Dengan memanfaatkan idle tersebut, kebutuhan air minum di Situbondo pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Selain itu, masih terdapat potensi peningkatan akses air perpipaan hingga 100% di Kecamatan Situbondo.

Tabel 7.63 Capaian Akses Sanitasi Selingkar Ijen

Kabupaten	Akses Aman		Akses Layak	
	Jumlah RT	%	Jumlah RT	%
Banyuwangi	19.170	3,85%	346.284	69,61%
Bondowoso	2.558	1,02%	89.035	35,67%
Jember	18.520	2,60%	400.363	56,15%
Situbondo	4.607	2,03%	109.043	48,15%
Selingkar Ijen		5,47%		73,24%

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.44 Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT di Selingkar Ijen

Berikut profil IPLT di Kawasan Selingkar Ijen:

Tabel 7.64 Sebaran IPLT di Selingkar Ijen

Kabupaten	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)
Banyuwangi	IPLT Kab. Banyuwangi	20
Bondowoso	Rencana IPLT Tahun 2024	20
Jember	Rencana IPLT Tahun 2024	20
Situbondo	Tidak ada data	-
Selingkar Ijen		60

Sumber: BPPW Jatim, 2021

Berdasarkan kriteria dalam pembangunan infrastruktur sanitasi sesuai Permen PUPR 4/2017, SPALD-T dibangun untuk daerah untuk kepadatan penduduk >150 jiwa/ha, dan/atau kawasan strategis sedangkan SPALD-S dibangun untuk daerah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha. Berikut data kepadatan pada masing-masing Kecamatan Prioritas:

Tabel 7.65 Kepadatan Penduduk di masing-masing Kecamatan

Kab/Kota	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Banyuwangi	Licin	1,74
	Banyuwangi	39,02
	Kalipuro	2,70
	Glagah	4,76
	Giri	14,84
Bondowoso	Ijen	0,57
	Bondowoso	33,01
Jember	Patrang	26,89
	Kaliwates	49,14
	Sumbersari	36,53
Situbondo	Situbondo	17,50

Sumber: BPPW Jatim, 2021

Sebagai kawasan pariwisata, perhitungan timbulan lumpur tinja menggunakan standar timbulan **0,5 L/orang/hari** dengan target **tingkat pelayanan 60%** untuk penduduk alami dan 100% wisatawan.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi timbulan tinja di masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.66 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan di Selingkar Ijen

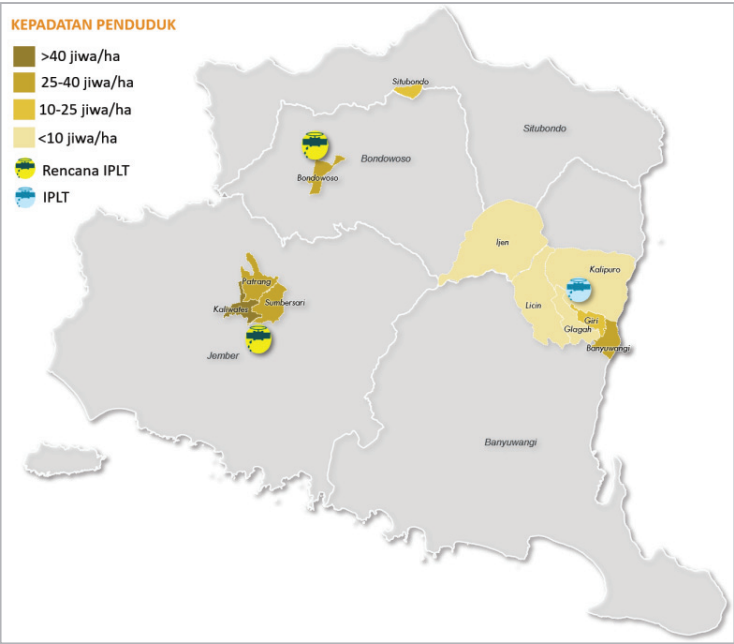
Kab/Kota	Timbulan Lumpur Tinja Penduduk dan Wisatawan (m3/hari)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Banyuwangi	1.855,02	2.037,50	2.135,58	2.579,11	2.579,11	3.269,35
Penduduk	91,32	93,02	93,88	97,41	97,41	102,01
Wisatawan	1.763,7	1.944,5	2.041,7	2.481,7	2.481,7	3.167,3
Bondowoso	782,75	860,61	902,47	1.091,84	1.145,22	1.386,71
Penduduk	26,88	27,26	27,46	28,25	28,45	29,28
Wisatawan	755,9	833,3	875	1.063,6	1.116,8	1.357,4
Jember	109,43	111,14	112,01	115,55	116,46	120,16
Situbondo	14,71	14,82	14,88	15,10	15,16	15,39
Selingkar Ijen	2.761,91	3.024,07	3.164,94	3.801,60	3.980,93	4.7921,62

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada 2029 diperlukan infrastruktur untuk mengelola timbulan lumpur tinja sebanyak 3.801 m³/hari. Terbanyak di Banyuwangi (3.642 m³/hari).
2. Berdasarkan kepadatan penduduk, diperlukan SPALD-S. Namun, dapat dipilih SPALD-T karena Selingkar Ijen merupakan kawasan strategis.
3. Pada wilayah yang belum terdapat SPALD, khususnya IPLT, dapat dilakukan pembangunan IPLT atau mempergunakan IPLT terdekat yang

- memiliki kapasitas pengolahan yang mencukupi untuk melayani wilayah secara regional.
4. Pada infrastruktur SPALD eksisting, khususnya IPLT di Banyuwangi, dapat dilakukan peningkatan kapasitas sehingga kapasitas pengolahan IPLT dapat melayani timbulan lumpur tinja penduduk dan wisatawan.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.45 Sebaran IPLT dan Kawasan Permukiman

3. Pelayanan Persampahan

Sebagai kawasan pariwisata, timbulan persampahan dari permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur persampahan yaitu TPA dan TPS3R. Berikut data capaian akses persampahan dan juga sebaran infrastruktur TPA dan TPS3R sebagai berikut:

Tabel 7.67 Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Sampah masuk (ton/thn)	Kapasitas Desain (m3)	Perkiraan Sisa (m3)	Keterangan
Banyuwangi	TPA Bulusan	5.515,15	85.500	0	Non aktif
	TPA Blimbingsari	-	310.000	46.500	TPA sementara di lahan bekas galian C (<i>open dumping</i>)
Bondowoso	TPA Paguan	22.283,25	157.500	0	<i>Overload</i> (luasan 1,4 ha)
Jember	TPA Pakusari	65.700	430.000	0	<i>Overload</i> . Ketinggian sampah di TPA 14 m, <i>landfill</i> 3,8 ha
Situbondo	TPA Siliwung	49.275	685.000	183.000	Timbunan sampah saat ini 3.600 ton seluas luas 3,8 ha dengan ketinggian 7 m

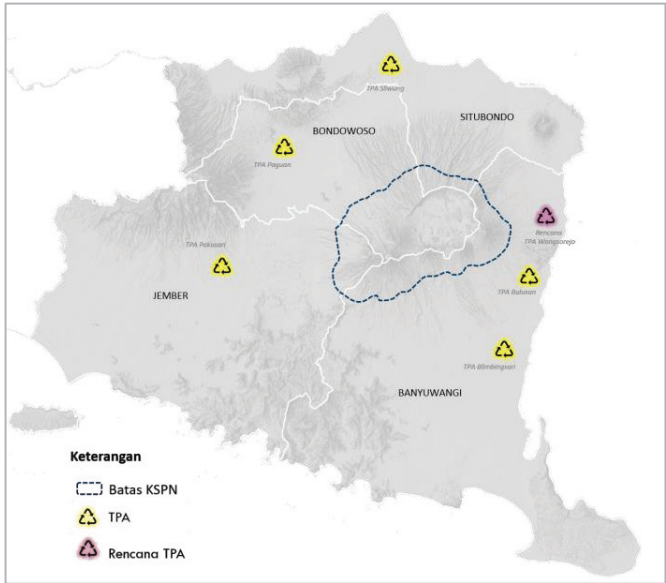
Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022

Timbulan sampah di kawasan Selingkar Ijen memperhitungkan kegiatan **penduduk alami** dan **wisatawan**. Pengelolaan sampah kabupaten ditargetkan meningkat 20% dari 2020, sedangkan pengelolaan sampah kota ditargetkan 100% pada 2029. Berikut Capaian Pengelolaan Sampah masing-masing Kab/Kota pada tahun 2020:

Tabel 7.68 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Pengelolaan Sampah 2020 (%)
Banyuwangi	53,68
Bondowoso	21,40
Jember	34,50
Situbondo	90,32

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.46 Sebaran TPA Eksisting

Berdasarkan informasi yang didapat dari BPPW Jawa Timur terdapat beberapa rencana pengembangan TPA sebagai berikut:

- Kab. Banyuwangi:** Pembangunan TPA Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo dengan kapasitas 1.213.031 m³ dengan luas 10,2 Ha untuk landfill seluas 5,8 Ha, rencana usia TPA 7 tahun yang diproyeksikan konstruksi TA 2024 dan operasional TA 2025.
- Kab. Bondowoso:** Perluasan TPA luas rencana 4,2 Ha dengan usia TPA 5 tahun, kapasitas 2.135.250 m³ yang diproyeksikan konstruksi TA 2024 dan operasional 2025.
- Kab. Situbondo:** Sudah ada usulan ke BPPW Jatim tetapi RC belum siap.

Berdasarkan capaian kinerja persampahan dan mempertimbangkan rencana pengembangan TPA, diproyeksikan timbulan sampah di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 7.69 Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah Kawasan Selingkar Ijen

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah (%)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Banyuwangi	56,18	61,18	63,68	73,68	76,32%	87,85%
Bondowoso	23,90	28,90	31,40	41,40	44,55%	59,73%
Jember	37,00	42,00	44,50	54,50	57,34%	70,26%
Situbondo	91,53	93,95	95,16	100,00	100,00%	100,00%
Selingkar Ijen	52,15	56,51	58,69	67,40	69,55%	79,46%

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.70 Peningkatan Timbunan Sampah Tertangani Kawasan Selingkar Ijen

Kab/Kota	Peningkatan Timbunan Sampah Tertangani (ton/tahun)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Banyuwangi	25.567	28.848	30.523	37.468	39.093	46.331
Bondowoso	5.229	6.435	7.046	9.548	10.209	13.341
Jember	27.654	31.674	33.711	42.034	44.036	53.043
Situbondo	14.768	15.444	15.786	17.185	17.477	18.695
Selingkar Ijen	73.217	82.401	87.066	106.236	110.815	131.409

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Hasil analisis timbunan persampahan diatas menunjukkan bahwa timbunan sampah **Kab. Banyuwangi**, **Kab. Bondowoso**, dan **Kab. Situbondo** masih **dapat ditampung** di TPA eksisting hingga 2029 dengan rincian sebagai berikut:

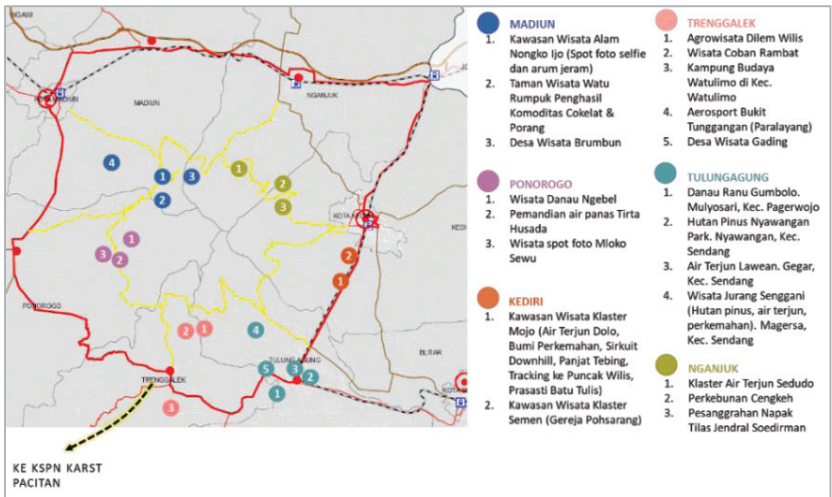
1. TPA Blimbingsari Kab Banyuwangi hanya dapat menampung hingga 2025, sehingga rencana TPA baru Wongsorejo, yang diproyeksikan dapat beroperasi 2025, harus segera disiapkan agar dapat menampung sampah hingga 2029.
2. TPA Kab Bondowoso saat ini sudah overload, namun terdapat TPA baru Kokab yang diharapkan dapat beroperasi pada 2025 sehingga dapat menampung timbunan sampah pada 2029-3034.
3. TPA Kab Situbondo tidak perlu peningkatan kapasitas hingga tahun 2029.
4. TPA **Kab Jember sudah overload** dan segera dibutuhkan peningkatan kapasitas/pembangunan TPA baru.

C. Selingkar Willis

1) Kondisi Eksisting

Luas wilayah Selingkar Willis adalah 7.253,77 Km2 yang terdiri dari kawasan inti dan kawasan pendukung. Kawasan inti yaitu kawasan yang berada di Jalan Selingkar Willis meliputi (6 kab): Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Madiun. Sedangkan kawasan pendukungnya meliputi (7 kab/kota): Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Blitar, Kab. Pacitan, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Jumlah penduduk sebesar 6.735.735 jiwa, kepadatan penduduk 935 jiwa/km2 (gross), 1.981.75 jiwa/km2 (netto) dengan jumlah penduduk miskin 9,51% (Jawa Timur 11,09%). PDRB Rp 206.945 Miliar (12,80% PDRB Jawa Timur), dengan sektor unggulan Selingkar Willis berupa pertanian sebesar 15,20% PDRB Sektor Pertanian di Jawa Timur. IPM Selingkar Willis 73,52 (Jatim 71,71).

Kontribusi PDRB Tertinggi ada di Kabupaten Kediri (28,49 T) dengan sektor unggulan terbesar dari sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Kab. Tulungagung (26,45T) dengan sektor unggulan terbesar dari dari sektor Industri Pengolahan; dan Kab. Nganjuk (17,99 T) dengan sektor unggulan terbesar dari dari sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Kawasan Selingkar Willis memiliki potensi pariwisata namun belum berkembang. Pengembangan pariwisata Selingkar Willis dapat terpadukan dengan KSPN Karst Pacitan di Kabupaten Pacitan dan pariwisata di Kab. Blitar (Gunung Kelud dan Makam Bung Karno).



Sumber: Dinas Pariwisata Kab/Kota diolah BPIW, 2022

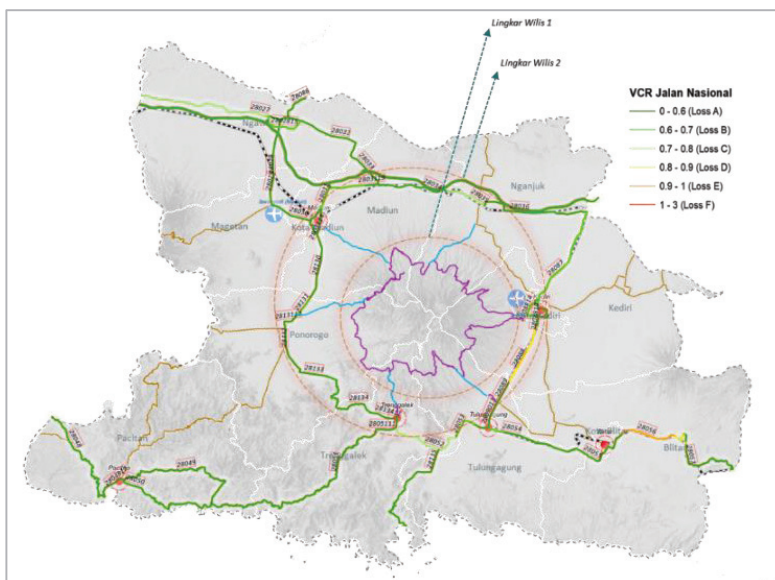
Gambar 7.47 Pariwisata Selingkar Wilis

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung fokus pariwisata dan pertanian, jalan ring 1 Lingkar Wilis, sepanjang 266.53 km merupakan jalan kabupaten dengan lebar jalan 4 – 5 m dengan beberapa ruas yang memiliki geometri tidak baik. Beberapa titik masih berupa makadam dan terputus diakibatkan longsor. Jalan ring 2 Lingkar Wilis sepanjang 325.38 km merupakan jalan nasional. Beberapa ruas jalan memiliki VCR > 0,8 yaitu sepanjang 584,64 km, diantaranya: Jalan Kertosono –Bts Kota Kediri; Jalan Bts Kota Madiun-Bts Kota Caruban; Bts Kota Kediri-Bts Kab. Tulungagung; Jarakan Trenggalek-BTS. Kab. Tulungagung. Kecepatan rata-rata jalan nasional adalah 23,4 km/jam; masih di bawah target Renstra Kementerian PUPR (53 km/jam). Jalan radial Lingkar Wilis yang menghubungkan Ring 1 dan Ring 2 merupakan jalan kabupaten dengan lebar jalan bervariasi 5-7 m.

Tabel 7.71 Ruas Jalan dengan VCR>0,8

Kode Ruas	Nama Ruas	Panjang (km)	VCR
28056	Bts. Kota Blitar - Bts. Kota Wlingi	13,96	0,925
28088	Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung	14,63	0,831
2805713	Jln. Duku (Wlingi)	0,60	0,82
2805718	Jln. Flamboyan (Wlingi)	0,48	0,82
2805715	Jln. Gajah Mada (Wlingi)	0,77	0,82
2805714	Jln. Langsep (Wlingi)	0,77	0,82
2805711	Jln. P. Sudirman (Wlingi)	1,10	0,82

Sumber: Ditjen Bina Marga, 2022



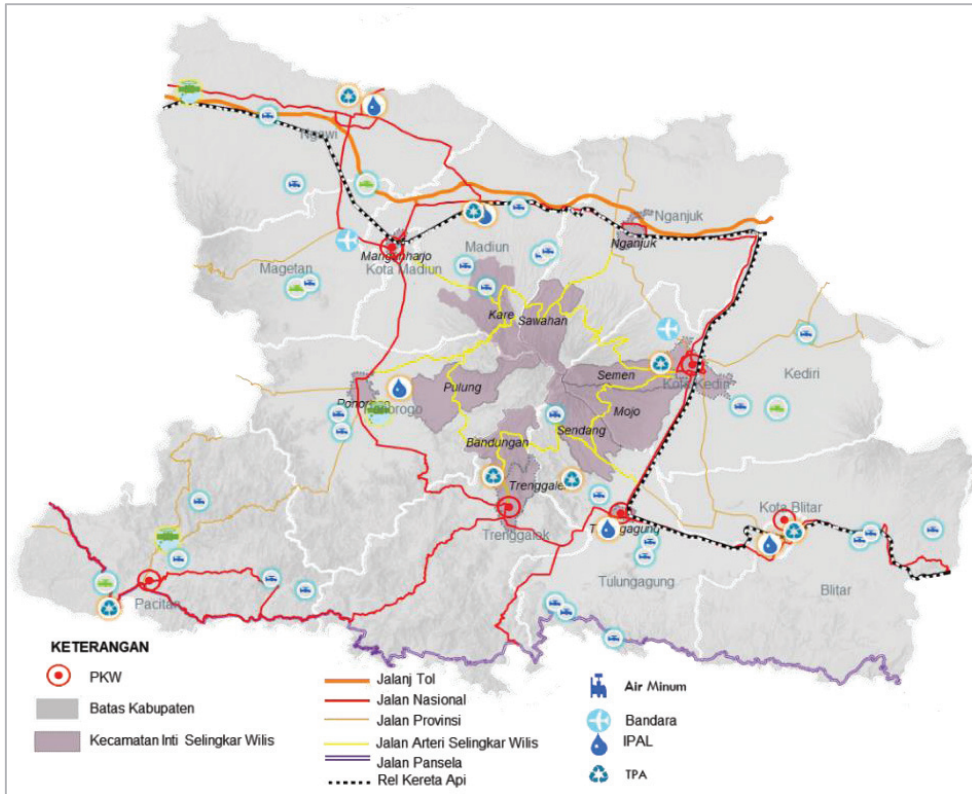
Sumber: Ditjen Bina Marga diolah BPIW, 2022

Gambar 7.48 Kinerja Jalan Selingkar Wilis

Berkaitan dengan infrastruktur permukiman untuk mendukung fokus pariwisata dan pertanian, isu Persampahan Selingkar Wilis mencakup persentase penanganan sampah sebesar 44,80% (Jatim 44,71%), tertinggi Kota Kediri (83,03%), terendah Kab. Madiun (9,66%). Persentase pengelolaan sampah 61,4% (Jatim 62,2%), paling tinggi Kota Madiun (98,03%), paling rendah Kab. Kediri (25,4%). TPA eksisting sudah *overload*, kecuali TPA di Kab. Kediri. Pada 2021, belum ada kabupaten/kota yang mencapai 30% pada pengurangan sampah.

Isu Sanitasi mencakup akses Sanitasi Aman 7,01% (Jatim 6,96%), tertinggi Kota Madiun (15,03%), terendah Kab. Nganjuk 4,16%. Akses sanitasi layak 83,34% (Jatim 55,16%), tertinggi Kota Madiun (94,51%), terendah Kab. Trenggalek 71,43%. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum ada IPLT yaitu Kabupaten Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Kota Kediri, dan Kota Madiun. 3 IPLT eksisting di Ponorogo, Tulungagung, dan Kab. Madiun perlu optimalisasi mengingat penambahan timbulan lumpur tinja.

Isu Air Minum mencakup tingkat layanan air minum perpipaan 33,99% (di atas Jatim 21,33%), paling tinggi di Kota Madiun 100%, paling rendah Kab. Kediri 3,6%. Akses layanan air minum layak 95,53% (dibawah Jatim 95,8%), paling tinggi Kota Madiun 100%, paling rendah Trenggalek 80,64%.



Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2022

Gambar 7.49 Infrastruktur Permukiman Selingkar Wilis

2) Analisis Kebutuhan

a) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Analisis kebutuhan infrastruktur Bina Marga terdiri dari Analisis Kondisi VCR, Waktu Tempuh, dan Pergerakan Arus Lalu Lintas.

a) Kinerja Jaringan Jalan (VCR)

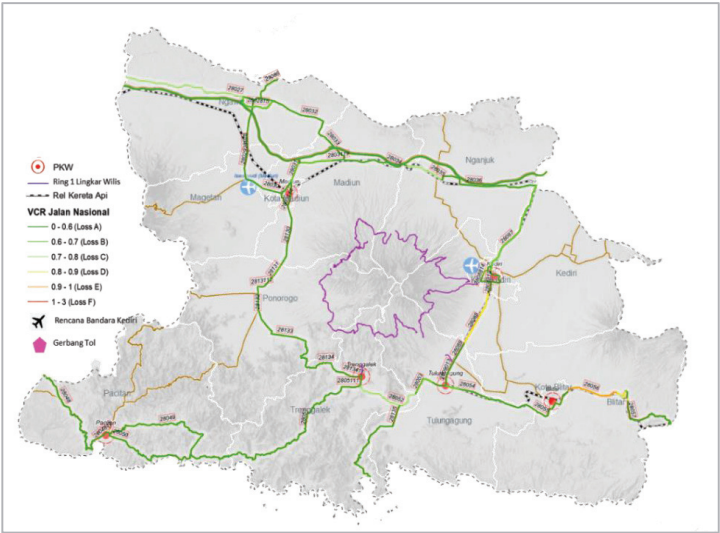
Total panjang jalan nasional 688,62 km (135,54 km arteri dan 553,08 km kolektor), lebar rata-rata 9,29 m, IRI rata-rata 4,74, kemantapan jalan 100%. VCR rata-rata 0,56, VCR < 0,8 84,9%, VCR > 0,8 15,1% dari total panjang jalan nasional di Selingkar Wilis.

Berdasarkan hasil survey VCR yang dilakukan oleh BBPJN Jawa Timur dan Bali tahun 2021, terdapat beberapa ruas jalan nasional yang mempunyai VCR > 1 yaitu:

Tabel 7.72 Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 1 di Selingkar Willis

Nama Ruas	IRI	Kemantapan	Lebar Bahu Jalan	LHRT	VCR	Panjang (km)
Bts. Kota Ngawi - Bts. Kab. Magetan	5.479	mantap	7.171	19494	1.072	12,17
Maospati - Bts. Kota Madiun	4.102	mantap	10.418	24620	1.143	8.670
Bts. Kota Madiun - Bts. Kota Caruban	4.847	mantap	8.875	29282	1.068	14.064
Jln. S. Parman (Madiun)	3.827	mantap	7.000	26815	1.060	0.649
Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung	5.156	mantap	7.319	31179	2.566	14.630
Jln. Urip Sumoharjo (Kediri)	4.777	mantap	7.000	28744	1.060	1.797
Bts. Kab. Madiun/Ponorogo - Bts. Kota Ponorogo	3.491	mantap	8.493	27057	1.702	5.214

Sumber: Ditjen Bina Marga, 2022



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

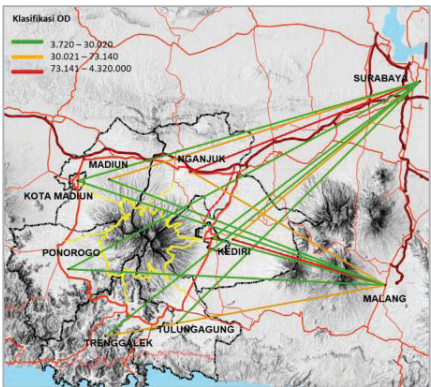
Gambar 7.50 Kinerja Jalan Berdasarkan VCR

Selain jalan nasional, di Selingkar Wilis juga terdapat jalan ring 1 lingkar Willis dan jalan radial yang menghubungkan jalan ring 1 dengan jalan ring 2. Jalan ring 1 dan jalan ring 2 berstatus sebagai jalan daerah. Jalan ring 1 memiliki panjang 235 Km, lebar jalan bervariasi 4 – 5 m. Kondisi jalan naik turun mengikuti kontur gunung. Beberapa titik jalan masih berupa makadam dan beberapa titik jalan terputus diakibatkan longsor.

Sedangkan jalan radial berstatus jalan kabupaten yang menghubungkan Jalan Lingkar Wilis 1 dan Lingkar Wilis 2. Lebar jalan bervariasi 4 – 6m (dekat Lingkar Wilis 2 lebar, menyempit menuju Lingkar Wilis). Permukaan jalan adalah aspal dengan geometri jalan yang cukup baik.

c) Pergerakan Lalu Lintas (Matriks Asal dan Tujuan)

Proyeksi ruas prioritas untuk ditangani dapat dilihat dari Pergerakan Lalu Lintas (Matriks Asal dan Tujuan). Berdasarkan Matriks Asal Tujuan didapatkan hasil sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.51 Proyeksi Pergerakan Lalu Lintas

Berdasarkan matriks asal tujuan disimpulkan: Pergerakan paling besar pada OD Surabaya – Nganjuk sebesar 4.320.000 smp dikarenakan Nganjuk berada di koridor tol Trans Jawa (Semarang-Surabaya). Pergerakan terbesar kedua pada OD Malang – Kediri sebesar 614.020 dikarenakan di Malang terdapat Bandara Abdurrahman Saleh, sementara Bandara Kediri masih dalam pembangunan. Pergerakan OD terbesar ketiga pada OD Malang – Tulungagung sebesar 342.127. Pergerakan OD terbesar keempat pada OD Malang – Trenggalek sebesar 282.442.

b) Infrastruktur Permukiman

Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur permukiman diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk di kawasan Selingkar Wilis.

1. Proyeksi Penduduk Alami

Perhitungan proyeksi penduduk alami dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk pada tahun 2021 dengan CAGR selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2029, diproyeksikan terdapat **2.471.692 jiwa penduduk** di kawasan prioritas Selingkar Wllis dan akan mengalami peningkatan menjadi **2.551.171 jiwa** pada tahun 2034. Proyeksi jumlah penduduk ini menjadi acuan dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur permukiman dasar. Proyeksi penduduk alami pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.73 Proyeksi Penduduk Kawasan Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Alami (Jiwa)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	375.833	379.839	381.842	389.854	391.856	399.868
Trenggalek	194.010	195.615	196.418	199.629	200.432	203.643
Tulungagung	275.447	280.020	282.306	291.453	293.739	302.886
Kediri	347.169	352.226	354.754	364.869	367.398	377.512
Nganjuk	392.945	398.094	400.669	410.968	413.542	423.841
Madiun	286.335	290.124	292.019	299.598	301.493	309.072
Kota Kediri	289.318	292.029	293.385	298.808	300.164	305.587
Kota Madiun	199.367	204.266	206.716	216.515	218.964	228.763
Selingkar Wilis	2.360.422	2.392.213	2.408.109	2.471.692	2.487.588	2.551.171

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

2. Pelayanan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum perkotaan Selingkar Wilis telah terdapat SPAM dan PDAM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Berikut sebaran layanan SPAM non PDAM di Kawasan Selingkar Wilis:

Tabel 7.74 Layanan SPAM Non PDAM

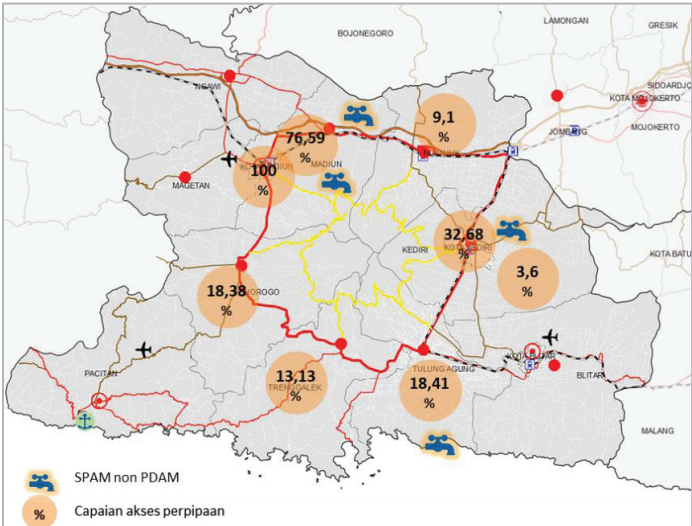
No	Kab/Kota	Kecamatan	Unit SPAM Non PDAM	Kapasitas (L/detik)
1	Ponorogo	-	-	-
2	Trenggalek	-	-	-
3	Tulungagung	Kalidawir	SPAM PPI Sina	5
4	Kediri		SPAM Pedesaan Kediri	5
5	Nganjuk	-	-	-
6	Madiun	Pilangkenceng	SPAM Desa Krebet	10
		Gemarang	SPAM Desa Batok Durenan	10
7	Kota Kediri	-	-	-
8	Kota Madiun	-	-	-
	Selingkar Wilis			30

Sumber: sigi.pu.go.id, 2021

Tabel 7.75 Layanan PDAM

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Volume Produksi Riil (L/det)
PERUMDAM Kab. Ponorogo	313	170
PERUMDAM Tirta Wening Kab. Trenggalek	720	150
Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung	305	203
PDAM Kab. Kediri	238	122
PDAM Kab. Nganjuk	409	200
PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun	640	399
PERUMDAM Tirta Dhaha Kota Kediri	213	149
PERUMDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun	980	394
Selingkar Wilis	3.818	1.787

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021



Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2022

Gambar 7.52 Sebaran SPAM

Berikut skenario peningkatan air minum Kabupaten/Kota di Kawasan Lingkar Wilis:

Tabel 7.76 Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan (%)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	9,24	11,24	12,24	16,24	17,24	21,24
Trenggalek	5,58	7,58	8,58	12,58	13,58	17,58
Tulungagung	11,28	13,28	14,28	18,28	19,28	23,28
Kediri	3	5	6	10	11,00	15,00
Nganjuk	9,59	11,59	12,59	16,59	17,59	21,59
Madiun	20,70	22,70	23,70	27,70	28,70	32,70
Kota Kediri	21,28	23,28	24,28	28,28	29,28	33,28
Kota Madiun	70,95	72,95	100	100	100,00	100,00
Selingkar Wilis	18,95	20,95	25,21	28,71	29,58	33,08

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Setelah dihitung skenario peningkatan air minum perpipaan maka dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk terlayani air minum perpipaan dalam satu kabupaten/kota di Selingkar Wilis dan kecamatan yang berada di Kawasan Selingkar Wilis sebagai berikut.

Tabel 7.77 Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani Kab/Kota Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani 1 Kota Kab (Jiwa)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	89.229	110.709	121.739	167.789	179.784	229.200
Trenggalek	41.219	56.560	64.343	96.224	104.381	137.537
Tulungagung	124.848	149.692	162.420	215.373	229.121	285.540
Kediri	49.619	83.966	101.505	174.093	192.848	269.765
Nganjuk	107.191	131.341	143.649	194.435	207.520	260.904
Madiun	156.190	173.256	181.919	217.442	226.540	263.338
Kota Kediri	61.836	68.854	72.441	87.306	91.151	106.826
Kota Madiun	141.380	148.784	206.290	215.663	218.007	226.895
Selingkar Wilis	771.511	923.161	1.054.305	1.368.323	1.449.352	1.780.005

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.78 Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani di Kawasan Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk Terlayani di Kawasan Selingkar Wilis (Jiwa)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	35.290	43.785	48.147	66.360	71.104	90.647
Trenggalek	10.897	14.953	17.010	25.438	27.595	36.360
Tulungagung	31.386	37.632	40.832	54.144	57.600	71.783
Kediri	10.477	17.729	21.433	36.760	40.720	56.961
Nganjuk	37.944	46.493	50.850	68.827	73.459	92.356
Madiun	59.533	66.038	69.340	82.880	86.348	100.373
Kota Kediri	61.836	68.854	72.441	87.306	91.151	106.826
Kota Madiun	141.380	148.784	206.290	215.663	218.007	226.895
Selingkar Wilis	388.743	444.267	526.342	637.377	665.983	782.203

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan penghitungan diatas maka dapat dihitung kebutuhan air minum di Selingkar Wilis yang terdiri dari kebutuhan air domestik dan non domestik sebagai berikut.

Tabel 7.79 Kebutuhan Air Minum Kawasan Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	56,37	69,93	76,90	105,99	113,57	144,78
Trenggalek	17,40	23,88	27,17	40,63	44,08	58,08
Tulungagung	50,13	60,11	65,22	86,48	92,00	114,65
Kediri	16,73	28,32	34,23	58,71	65,04	90,98
Nganjuk	60,60	74,26	81,22	109,93	117,33	147,51
Madiun	95,09	105,48	110,75	132,38	137,92	160,32
Kota Kediri	98,77	109,97	115,70	139,45	145,59	170,62
Kota Madiun	225,82	237,64	329,49	344,46	348,21	362,40
Selingkar Wilis	620,91	709,59	840,68	1.018,03	1.063,72	1.249,35

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan analisis pelayanan air minum di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Ponorogo, termasuk kecamatan Ponorogo, Pulung, Sukorejo, Ngebel, Sooko, Pudak, Sawoo, dan Babadan, dilayani oleh PERUMDAM Kab. Ponorogo. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 143 L/detik dari Perumdam, kebutuhan air minum Ponorogo pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Namun pada tahun 2034, kapasitas idle yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Ponorogo.
2. Kecamatan Trenggalek, Karangan, Durenan, dan Bandungan di Kab. Trenggalek dilayani oleh PERUMDAM Tirta Wening Kab. Trenggalek. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 570 L/detik dari Perumdam, kebutuhan air minum Trenggalek pada tahun 2029-2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.
3. Kabupaten Tulungagung, termasuk kecamatan Tulungagung, Kalidawir, Pakel, Sendang, dan Pagerwojo, dilayani oleh Perumdam Tirta Cahya Agung Kab. Tulungagung dan SPAM PPI Sina (Kalidawir). Dengan memanfaatkan kapasitas idle 102 L/detik dari Perumdam, kebutuhan air minum Tulungagung pada tahun 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Namun pada tahun 2034, kapasitas idle yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Tulungagung.
4. Kabupaten Kediri, termasuk kecamatan Pare, Kandat, Pagu, Mojo, dan Semen, dilayani oleh PDAM Kab. Kediri dan SPAM Pedesaan Kediri. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 116 L/detik dari PDAM Kediri, kebutuhan air minum Kediri pada tahun 2029-2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.
5. Kecamatan Nganjuk, Tangjunganom, Rejoso, Gondang, Sawahan, dan Ngetos di Kab. Nganjuk dilayani oleh PDAM Kab. Nganjuk. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 209 L/detik dari Perumdam Mojokerto, kebutuhan air minum Nganjuk pada tahun 2029-2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.
6. Kabupaten Madiun, termasuk kecamatan Mejayan, Saradan, Pilangkenceng, Balerejo, Kare, dan Gemarang, dilayani oleh PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun, SPAM Desa Kretet (Pilangkenceng), dan SPAM Desa Batok Durenan (Gemarang). Dengan memanfaatkan

- kapasitas idle 241 L/detik dari Perumdam Madiun, kebutuhan air minum Madiun pada tahun 2029-2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.
- Kecamatan Mojoaroto, Kota, dan Pesantren di Kota Kediri dilayani oleh PERUMDAM Tirta Dhaha Kota Kediri. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 64 L/detik dari Perumdam, kebutuhan air minum Kota Kediri pada tahun 2029-2034 tidak dapat terpenuhi.
 - Kecamatan Mangunharjo, Taman, dan Kartoharjo di Kota Madiun dilayani oleh PERUMDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Dengan memanfaatkan kapasitas idle 586 L/detik dari Perumdam Kota Madiun pada tahun 2024, kebutuhan air minum Kota Madiun pada tahun 2029-2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.

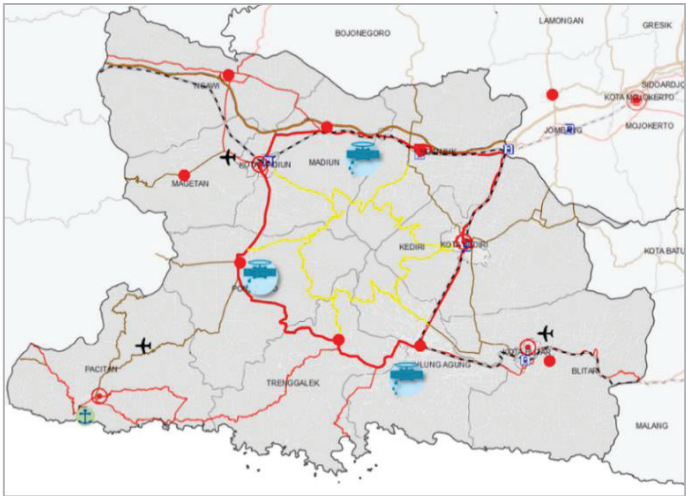
3. Pelayanan Sanitasi

Sebagai salah satu kawasan prioritas, kebutuhan sanitasi untuk permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur sanitasi yaitu IPAL dan IPLT. Berikut data capaian akses Sanitasi dan juga sebaran infrastruktur IPAL dan IPLT sebagai berikut:

Tabel 7.80 Capaian Akses Sanitasi Selingkar Willis

No.	Kota/ Kabupaten	Akses Aman		Akses Layak	
		Jumlah RT	%	Jumlah RT	%
1	Ponorogo	15,738	6.20	211,371	83.27%
2	Trenggalek	10,313	4.94	149,006	71.43%
3	Tulungagung	16,943	5.89	226,372	78.72%
4	Kediri	19,422	4.33	352,769	78.59%
5	Nganjuk	12,563	4.16	248,201	82.16%
6	Madiun	20,949	10.25	171,824	84.11%
7	Kota Kediri	4,237	5.30	75,080	93.96%
8	Kota Madiun	8,198	15.03	51,560	94.51%
Rata-rata			7.01		83.34

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2022



Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2022

Gambar 7.53 Sebaran IPLT Selingkar Willis

Tabel 7.81 Sebaran Infrastruktur Sanitasi Selingkar Willis

Kab/Kota	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)
Ponorogo	IPAL Ponorogo (Kec Siman)	25
Trenggalek	-	0
Tulungagung	IPLT Tulungagung	25
Kediri	-	0

Kab/Kota	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)
Nganjuk	-	0
Madiun	IPLT Madiun (Kec. Mejayan)	25
Kota Kediri	-	0
Kota Madiun	-	0
Wilis		75

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2022

Berdasarkan kriteria dalam pembangunan infrastruktur sanitasi sesuai Permen PUPR 4/2017, SPALD-T dibangun untuk daerah untuk kepadatan penduduk >150 jiwa/ha, dan/atau kawasan strategis sedangkan SPALD-S dibangun untuk daerah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha. Berikut data kepadatan pada masing-masing Kecamatan Prioritas:

Tabel 7.82 Kepadatan Penduduk Selingkar Wilis

Kab/Kota	Kepadatan Penduduk	
	Jiwa/km2	Jiwa/Ha
Ponorogo	7,927	79
Trenggalek	3,238	32
Tulungagung	7,915	79
Kediri	1,166	12
Nganjuk	6,734	67
Madiun	3,000	30
Kota Kediri	14,051	141
Kota Madiun	17,633	176
TOTAL	61,662	617

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Proyeksi timbulan lumpur tinja di Selingkar Wilis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.83 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Selingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Timbulan Lumpur Tinja (m3/hari)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	112.76	113.95	114.55	116.96	117,56	119,81
Trenggalek	58.2	58.67	58.92	59.88	60,13	61,03
Tulungagung	82.63	84.01	84.69	87.43	88,12	90,77
Kediri	104.16	105.67	106.41	109.46	110,22	113,08
Nganjuk	117.88	119.43	120.2	123.28	124,06	126,97
Madiun	85.89	87.02	87.61	89.88	90,45	92,59
Kota Kediri	86.8	87.61	88.02	89.64	90,05	91,59
Kota Madiun	59.81	61.28	62.02	64.95	65,69	68,55
Selingkar Wilis	708.13	717.66	722.43	741.51	746,28	764,37

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Dari hasil analisis didapatkan hasil bahwa: Kawasan Selingkar Wilis pada tahun 2029 memerlukan infrastruktur yang dapat mengelola timbulan lumpur tinja sebanyak 741,51 m³/hari dan sebanyak 764,37 m³/hari. Pada tahun 2034 Wilayah yang paling banyak menghasilkan limbah adalah Kabupaten Nganjuk (126,97 m³/hari). Berdasarkan kepadatan penduduk, kawasan Selingkar Wilis memerlukan SPALD-S. Namun, dapat dipilih SPALD-T karena Selingkar Wilis merupakan kawasan strategis. Pada infrastruktur SPALD eksisting, khususnya IPLT di Kab Ponorogo, Madiun, dan Tulungagung, dapat dilakukan optimalisasi sehingga kapasitas pengolahan IPLT terpakai seluruhnya.

4. Pelayanan Persampahan

Sebagai kawasan prioritas, timbulan persampahan dari permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur persampahan yaitu TPA dan TPS3R. Berikut data capaian akses persampahan dan juga sebaran infrastruktur TPA dan TPS3R sebagai berikut:

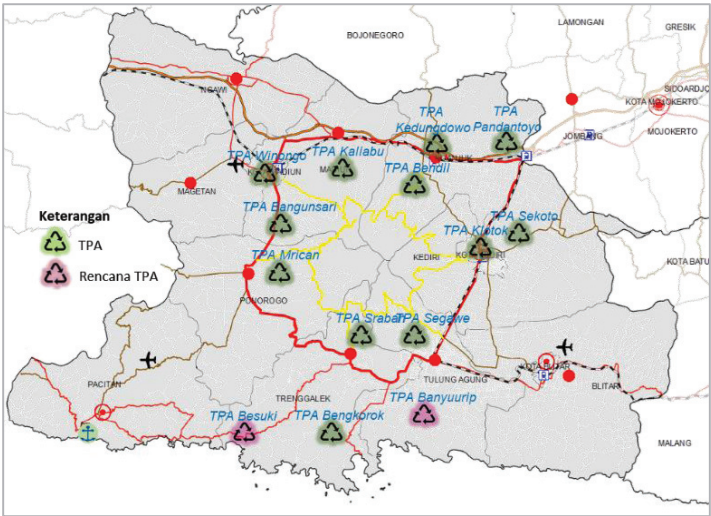
Tabel 7.84 Kapasitas TPA di Kabupaten/Kota Selingkar Wilis

Kab/Kota	Unit TPA	Kapasitas Total (m ³ /tahun)	Sampah Masuk TPA (m ³ /tahun)	Status
Ponorogo	TPA Mrican	131.400	325.580	<i>Overload</i>
Trenggalek	TPA Srabah	225.000	205.860	Diperkirakan penuh pada 2030
	TPA Bengkorok	25.000	43.800	-
Tulungagung	TPA Segawe	99.232	257.325	<i>Overload</i>
Kediri	TPAS Sekoto	525.000	142.204	Diresmikan Oktober 2021, belum <i>overload</i>
Nganjuk	TPA Pandantoyo	21.900	13.476	-
	TPA Bendil	14.600	7.592	-
	TPA Kedungdowo	73.000	56.940	<i>Overload</i>
	TPA Tanjunganom	-	-	Belum <i>overload</i>
Madiun	TPST Bangunsari	9.308	3.446	Tidak beroperasi sejak 2014
	TPA Kaliabu	55.000	84.782	Desember 2021 sudah terpakai 70%
Kota Kediri	TPA Klotok	168.01	180.456	Diperkirakan <i>overload</i> akhir 2022
Kota Madiun	TPA Winango	122.640	122.640	<i>Overload</i>

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya, 2021; SIPSN, 2022

Terdapat rencana infrastruktur persampahan diantaranya:

1. Kab. Trenggalek: Terdapat rencana perluasan TPA Bengkorok seluas 3 Ha dengan kapasitas 100.000 m³ dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*. Selain itu ada rencana pembangunan TPA Besuki Kecamatan Panggul seluas 5,23 Ha dengan kapasitas 100.000 m³.
2. Kab. Kediri dan Kota Kediri: Terdapat rencana TPA Regional Kediri yang berada di Kab. Kediri dengan luas 50,57 Ha.
3. Kab. Tulungagung: Rencana pembangunan TPA Banyuurip. Saat ini masih dalam proses pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Direncanakan TPA ini menggunakan sistem *Sanitary Landfill* seluas 49,35 Ha dan dengan kapasitas 2.033.332 m³.
4. Kab. Nganjuk: Terdapat rencana perluasan TPA Kedungdowo menggunakan lahan Pemda Nganjuk seluas 0,8 Ha dengan kapasitas 191.867 m³.
5. Kab Madiun: Terdapat rencana *controlled landfill* seluas 5 Ha dengan luas *landfill* 2,3 Ha dan kapasitas rencana 75.000 m³.



Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2022

Gambar 7.54 Sebaran TPA Eksisting dan Rencana Selingkar Wilis

Berdasarkan capaian kinerja persampahan dan mempertimbangkan rencana pengembangan TPA dapat diproyeksikan timbulan sampah sesuai proyeksi penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut

Tabel 7.85 Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah (%)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	62,52	67,91	70,60	81,33	81,50	82,13
Trenggalek	53,98	59,19	61,79	72,20	74,75	80,17
Tulungagung	37,26	42,30	44,83	54,92	57,61	69,66
Kediri	21,62	26,71	29,25	39,43	42,32	55,76
Nganjuk	30,53	35,83	38,48	49,06	51,76	63,48
Madiun	12,28	17,52	20,14	30,59	33,46	46,47
Kota Kediri	83,80	85,35	86,11	89,17	89,26	89,59
Kota Madiun	73,35	74,42	74,94	76,97	77,22	78,13
Selingkar Wilis	46,92	51,15	53,27	61,71	63,49	70,67

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.86 Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani Lingkar Wilis

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani (ton/tahun)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Ponorogo	16.525	18.309	19.221	23.000	23.970	28.279
Trenggalek	10.914	12.089	12.685	15.117	15.745	18.531
Tulungagung	12.040	13.924	14.888	18.894	19.989	25.040
Kediri	10.456	13.109	14.462	20.052	21.752	30.123
Nganjuk	9.961	11.854	12.818	16.788	17.920	23.264
Madiun	2.537	3.660	4.231	6.573	7.404	11.917
Kota Kediri	5.777	5.988	6.095	6.531	6.632	7.051

Kabupaten/ Kota	Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani (ton/tahun)					
	2022	2024	2025	2029	2030	2034
Kota Madiun	3.468	3.601	3.668	3.938	4.001	4.264
Selingkar Wilis	71.677	82.535	88.068	110.893	117.413	148.469

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Dari hasil analisis, didapat hasil sebagai berikut:

1. Timbulan sampah Kab. Trenggalek dan Kab. Kediri masih dapat ditampung di TPA eksisting hingga 2029. Di Kab. Trenggalek, terdapat rencana perluasan TPA Bengkorok seluas 3 Ha dengan kapasitas 100.000 m³ dan rencana pembangunan TPA Besuki seluas 5,23 Ha (100.000 m³).
2. Terdapat beberapa TPA yang sudah *overload*: Kab Ponorogo, Kab Tulungagung, dan Kota Madiun. Belum terdapat rencana TPA di Kab Ponorogo dan Kota Madiun, sehingga segera dibutuhkan peningkatan kapasitas/pembangunan TPA baru. Terdapat rencana perluasan TPA Banyuwangi Kab Tulungagung seluas 49,35 Ha dengan kapasitas 2.033.332 m³.
3. TPA Kab Madiun dan Kota Kediri diproyeksikan akan *overload* pada 2023. Terdapat rencana pembangunan TPA dari DLH Kab Madiun dengan luas landfill 2,3 Ha. Terdapat rencana TPA Regional Kediri (50,57 Ha) yang melayani Kabupaten dan Kota Kediri

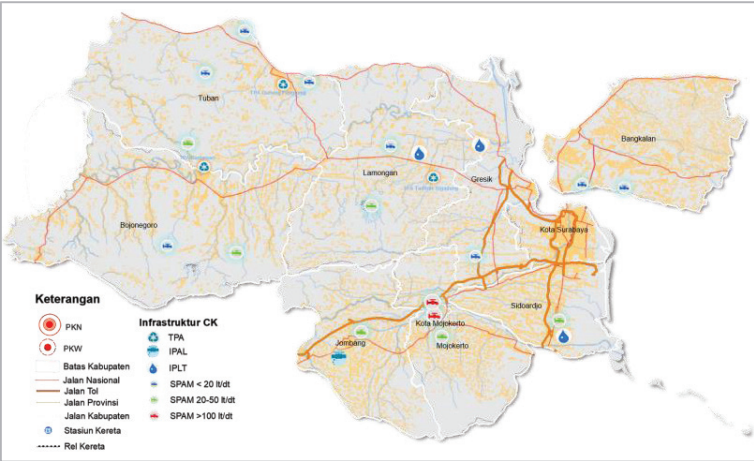
7.1.5 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan

A. Gerbangkertosusila Plus

1) Kondisi Eksisting

Capaian akses air perpipaan GKS Plus sebesar 28,10% dengan 5 juta penduduk yang sudah terlayani. Capaian akses air tertinggi di Kota Surabaya (100%) dan terendah berada di Kab Mojokerto (7,67%). Di GKS Plus terdapat 2 SPAM Regional yaitu SPAM Mojolamong (melayani Kota Mojokerto, Kab Mojokerto dan Kab Lamongan) yang rencananya akan menambah daerah layanan hingga Kab Gresik (menjadi SPAM Mojolagres) dan SPAM Umbulan (melayani Sidoarjo, Gresik dan Kota Surabaya). Persentase penanganan sampah di GKS Plus sebesar 43,57% dengan penanganan sampah tertinggi di Kota Surabaya (88%) dan terendah di Bangkalan (10%). TPA Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan telah penuh, sehingga mempengaruhi pengelolaan sampah.

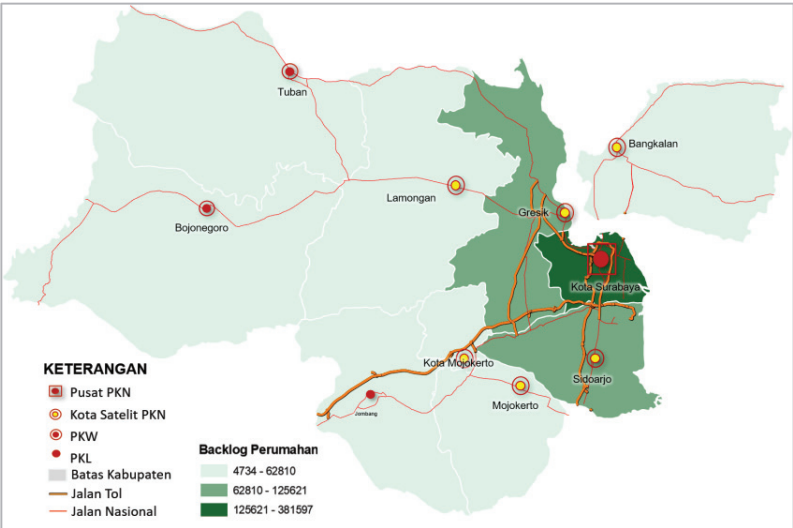
Capaian akses sanitasi aman GKS Plus sebesar 10,4% dengan capaian akses tertinggi berada di Kota Surabaya (24,63%) dan terendah berada di Kab Bangkalan (2,57%). Di GKS Plus terdapat 5 IPLT yaitu di Kab Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik dan Kota Surabaya; 1 IPLT yang sudah tidak beroperasi di Kab. Mojokerto; serta rencana 1 IPLT di Kota Mojokerto.



Sumber: Hasil Analisis BPIW,2022

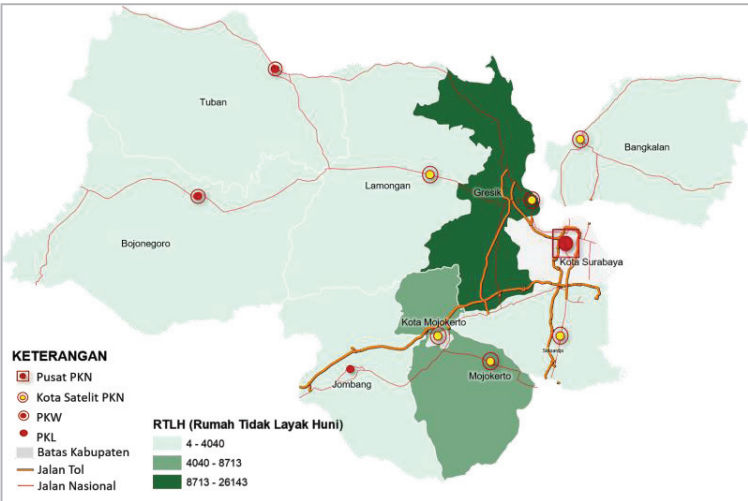
Gambar 7.55 Sebaran Infrastruktur Permukiman Gerbangkertosusila Plus

Berkaitan dengan infrastruktur perumahan, jumlah KK yang tidak memiliki rumah mencapai 657.721 (22,58%). Jumlah *backlog* tertinggi yaitu Kota Surabaya (381.598 unit), sedangkan yang terendah yaitu Kab. Bangkalan (4.768 unit). GKS Plus memiliki sebesar 43-unit rusunawa. Peta *backlog* Gerbangkertosusila Plus dapat dilihat pada Gambar 7.8. Jumlah RTLH di GKS Plus sebesar 21.935-unit dengan RTLH terbesar di Kab. Mojokerto (8.183 unit) dan terendah di Kab Sidoarjo (4 unit). Peta jumlah RTLH Gerbangkertosusila Plus dapat dilihat pada Gambar 7.9.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, ,2022

Gambar 7.56 Backlog Kepemilikan Rumah Gerbangkertosusila Plus



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

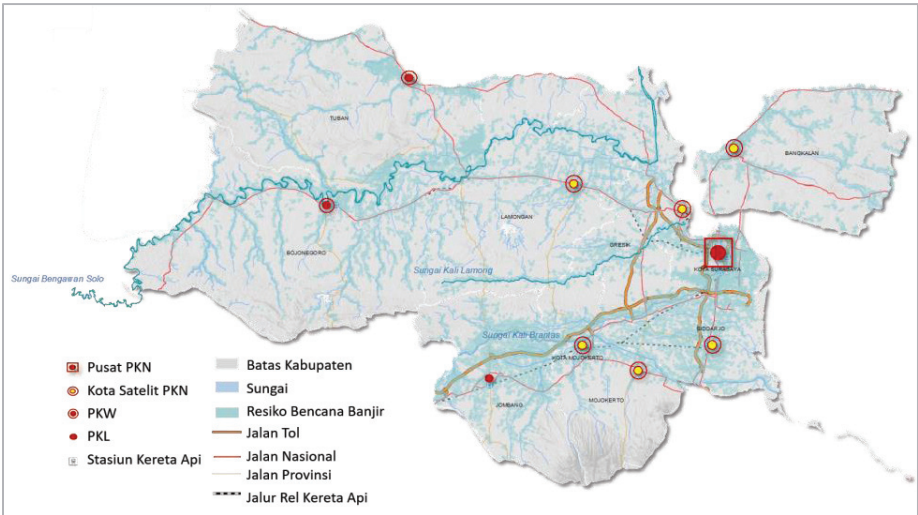
Gambar 7.57 Jumlah RTLH Gerbangkertosusila Plus

2) Analisis Kebutuhan

Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur permukiman diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk dan proyeksi pertumbuhan tenaga kerja industri sesuai tematik pengembangan kawasan GKS Plus.

a) Infrastruktur Sumber Daya Air

Sedangkan isu kawasan rawan banjir GKS Plus berada di sekitar DAS Bengawan Solo, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Konto. Selain itu, banjir juga diakibatkan oleh saluran drainase yang tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.58 Rawan Banjir Gerbangkertosusila Plus

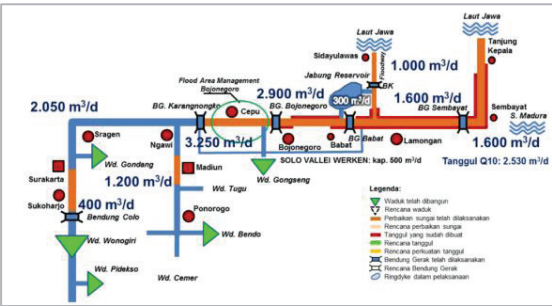
Profil banjir GKS Plus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.87 Luas Resiko Banjir Gerbangkertokusila Plus

Desa	Luas Resiko Banjir	Isu
Bangkalan	104,81	Sedimentasi sungai
Bojonegoro	176,31	Luapan S. Bengawan Solo
Gresik	86,16	Luapan Kali Lamong
Jombang	183,37	Luapan Kali Brantas
Kota Mojokerto	9,47	Sedimentasi Sungai
Kota Surabaya	152,16	Kinerja sistem drainase perkotaan
Lamongan	91,77	Luapan Kali Lamong
Mojokerto	66,31	Luapan Kali Lamong
Sidoarjo	141,25	Sedimentasi Kali Porong
Tuban	198,14	Luapan S. Bengawan Solo dan banjir rob
Total	1.209,76	

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2021

Untuk menangani banjir, perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya melalui perumusan skema penanganan banjir jangka panjang. Untuk Bengawan Solo, skema penanganan banjirnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



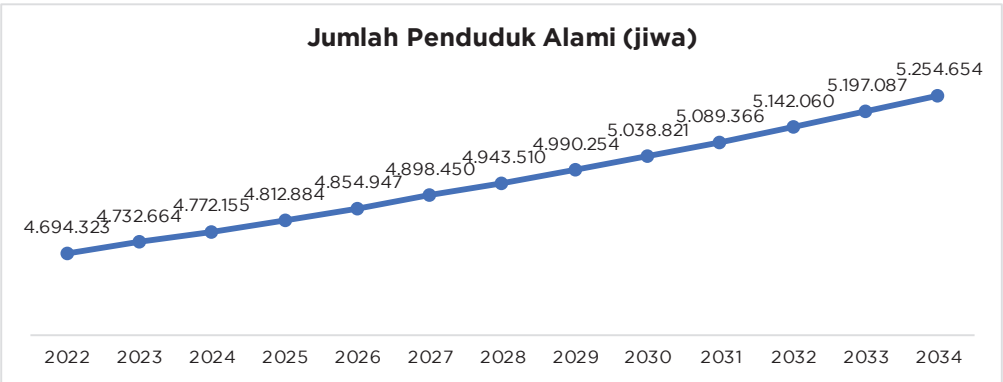
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.59 Skema Penanganan Banjir Bengawan Solo Jangka Panjang (2022-2030)

b) Infrastruktur Permukiman

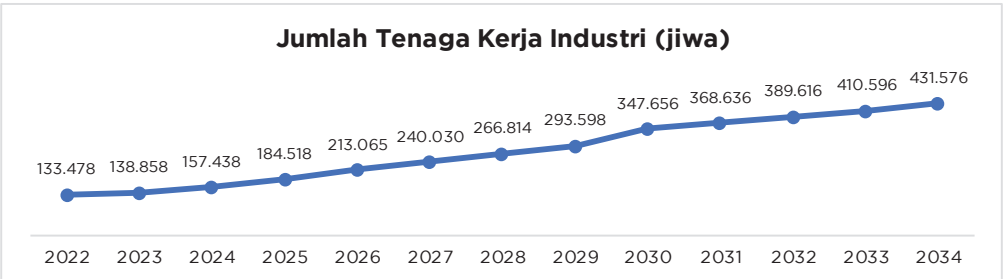
1. Proyeksi Penduduk Alami dan Tenaga Kerja

Perhitungan proyeksi penduduk alami dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan CAGR selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2029, diproyeksikan terdapat **5.283.852 jiwa penduduk alami dan tenaga kerja** kawasan prioritas di GKS Plus, dan pada tahun 2034 sebesar **5.686.230 jiwa penduduk alami dan tenaga kerja**, dengan penduduk terbesar di Kota Surabaya (± 3 juta jiwa). Proyeksi jumlah penduduk alami dan proyeksi tenaga kerja industri dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Gambar 7.60 Proyeksi Jumlah Penduduk



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Gambar 7.61 Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja Industri

Tabel 7.88 Proyeksi Penduduk dan Tenaga Kerja

Kab/Kota	Proyeksi Penduduk+Tenaga Kerja GKS Plus (Jiwa)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Sidoarjo	426.547	430.927	436.745	442.606	466.522	501.985
Mojokerto	221.001	223.411	226.843	228.797	236.836	247.405
Jombang	278.537	292.263	308.939	326.653	411.504	563.866
Bojonegoro	89.347	90.241	91.143	92.055	95.793	100.679
Tuban	143.897	144.918	146.528	148.143	155.133	166.457
Lamongan	167.184	167.634	169.084	170.534	177.135	189.585
Gresik	309.173	314.456	326.377	338.328	383.804	460.824
Bangkalan	154.099	156.365	158.665	171.001	220.708	243.705
Kota Mojokerto	134.161	135.033	135.911	136.794	140.386	145.008
Kota Surabaya	2.903.855	2.916.274	2.929.356	2.942.490	2.996.032	3.066.714
GKS Plus	4.827.801	4.871.522	4.929.593	4.997.402	5.283.851	5.686.230

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

2. Pelayanan Air Minum

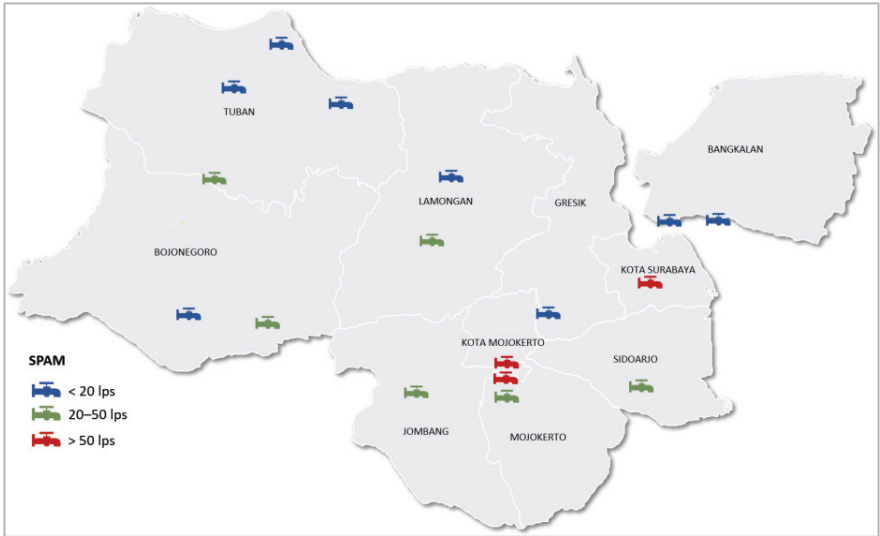
Capaian akses air perpipaan di GKS Plus mencapai 23,19%, dimana akses air perpipaan tertinggi berada di Kota Surabaya (96,81%) dan terendah berada di Kab. Lamongan (6,64%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.89 Capaian Akses Air Minum Perpipaan

Kab/Kota	Air Layak (%)	Air Perpipaan (%)	Penduduk Terlayani (Jiwa)
Sidoarjo	99,06	23,38	490.892
Mojokerto	99,20	8,78	102.385
Jombang	99,37	6,55	86.311

Kab/Kota	Air Layak (%)	Air Perpipaan (%)	Penduduk Terlayani (Jiwa)
Bojonegoro	96,94	10,75	139.919
Tuban	97,58	23,63	283.647
Lamongan	92,18	6,64	89.218
Gresik	94,63	26,42	361.454
Bangkalan	93,92	14,16	150.104
Kota Mojokerto	100	14,80	19.605
Kota Surabaya	98,74	96,81	2.787.664
GKS+	97,16	23,19	4.511.201
Jawa Timur	95,56	20,45	8.319.476

Sumber: Laporan Kinerja PDAM diolah BPIW, 2021



Sumber: PDAM Provinsi Jawa Timur diolah BPIW, 2022

Gambar 7.62 Sebaran SPAM

Terdapat 2 SPAM Regional yaitu SPAM Regional Umbulan dan SPAM Regional Mojolamong. Cakupan SPAM Umbulan melayani 5 kabupaten/kota (Kab. Sidoarjo (1200 lps), Kab. Gresik (1000 lps), Kab. Pasuruan (410 lps), Kota Surabaya (1000 lps), Kota Pasuruan (110 lps), dan PDAB Jawa Timur (280 lps).

SPAM Regional Umbulan dengan luas instalasi 6 Ha memiliki debit terpasang 4.000 L/detik, dengan potensi sumber air baku sebesar 3.100 L/detik yang berasal dari 3 mata air utama. Terdapat kendala peningkatan kapasitas karena tidak adanya sumber air baku lagi.

SPAM Regional Mojolamong melayani Kab. Mojokerto dan Kab. Lamongan, yang bersumber dari Sungai Brantas. SPAM Regional Mojolamong memiliki 2 IPA, yaitu IPA 1 dengan debit 50 L/detik (2012) dan IPA 2 dengan debit 150 L/detik (2020). Kedua IPA ini melayani Mojokerto dan Lamongan masing-masing 100 L/detik. Intake Mojolamong memiliki 3 pipa inlet dan 2 mesin pompa (1 pompa aktif dan 1 pompa optimasi). Terdapat rencana pengembangan pengolahan air sebesar 100 L/detik yang rencananya akan melayani Kab. Lamongan pada TA 2022, dimana lahan dan pompa sudah siap pada TA 2021. Update pada TA 2025, diusulkan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mojolagres yang merupakan pembangunan SPAM Mojolagres Tahap 3 berupa peningkatan kapasitas IPA karena proyeksi penyerapan air oleh oftaker mencapai 90-95% pada 2024.

Kapasitas dan volume produksi PDAM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.90 Kapasitas dan Volume Produksi PDAM

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Volume Produksi Riil (L/det)
PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo	1.732	1.625
PERUMDAM Mojopahit Kab. Mojokerto	281	202
PERUMDAM Tirta Kencana Kab. Jombang	391	255
PDAM Kab. Bojonegoro	555	385
PERUMDAM Tirta Lestari Kab. Tuban	474	395
PERUMDAM Kab. Lamongan	428	250
PERUMDAM Giri Tirta Kab. Gresik	1.552	1.321
PERUMDAM Sumber Sejahtera Kab. Bangkalan	435	305
Perumdam Maja Tirta Kota Mojokerto	110	73
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya	10.743	11.139
GKS Plus	16.701	15.950

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021

Perhitungan proyeksi kebutuhan infrastruktur air minum di Kawasan GKS plus menggunakan pendekatan komparatif terhadap nilai kapasitas produksi dan cakupan pelayanan eksisting dalam skenario pengembangan tingkat pelayanan dan kebutuhan air minum di setiap wilayah Kabupaten/ Kota. Analisis kebutuhan air minum ditujukan untuk pelayanan perpipaan oleh perusahaan daerah air minum di setiap wilayah tersebut. Perhitungan proyeksi mengacu terhadap data – data yang telah terhimpun seperti capaian akses air minum perpipaan dan kapasitas volume produksi PDAM. Pada tabel dibawah ini dapat kita amati hasil perhitungan proyeksi cakupan pelayanan perpipaan dan proyeksi kebutuhan air minum Kawasan GKS plus.

Tabel 7.91 Proyeksi Kebutuhan Air Minum GKS plus

Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Sidoarjo	187,61	198,90	210,63	222,68	274,22	347,28
Mojokerto	29,65	33,37	37,18	41,01	56,94	78,27
Jombang	33,26	38,59	44,04	49,56	72,43	103,29
Bojonegoro	18,80	20,61	22,43	24,26	31,67	41,15
Tuban	66,01	69,14	72,33	75,54	88,74	106,14
Lamongan	22,09	25,43	28,81	32,19	45,82	63,29
Gresik	129,06	138,40	148,82	159,75	208,65	286,11
Bangkalan	42,30	45,72	49,19	53,20	70,35	91,46
Kota Mojokerto	39,14	42,09	45,08	48,10	60,58	77,05
Kota Surabaya	5.565,6	5.565,6	5.565,6	5.565,6	5.565,6	6.003,09
GKS plus	6.134	6.178	6.224	6.272	6.475	7.197,14

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.92 Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaan GKS plus

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pelayanan Air Minum Perpipaan (%)					
	2022	2023	2024	2025	2029	2034
Sidoarjo	22,68	23,68	24,68	25,68	29,68	34,68%
Mojokerto	8,63	9,63	10,63	11,63	15,63	20,63%
Jombang	6,48	7,48	8,48	9,48	13,48	18,48%
Bojonegoro	10,69	11,69	12,69	13,69	17,69	22,69%
Tuban	23,43	24,43	25,43	26,43	30,43	35,43%
Lamongan	6,63	7,63	8,63	9,63	13,63	18,63%
Gresik	24,90	25,90	26,90	27,90	31,90	36,90%
Bangkalan	13,92	14,92	15,92	16,92	20,92	25,92%
Kota Mojokerto	14,61	15,61	16,61	17,61	21,61	26,61%
Kota Surabaya	96,00	95,59	95,16	94,74	93,05	98,05%
GKS plus	22,80	23,66	24,51	25,37	28,80	33,80%

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berikut adalah kesimpulan analisis kebutuhan air minum di beberapa daerah di Kawasan GKS plus:

1. Kec. Mojosari dan Ngoro dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam Mojokerto sebesar 79 L/detik pada tahun 2024 dan peningkatan distribusi air dari SPAM Mojolagres sebesar 100 L/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
2. Kec. Jombang, Ploso, Kudu, dan Kabuh dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam Jombang sebesar 136 L/detik pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
3. Kec. Bojonegoro dapat memanfaatkan kapasitas idle dari PDAM sebesar 170 L/detik pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
4. Kec. Tuban dan Jenu dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam Tuban sebesar 79 L/detik pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
5. Kec. Lamongan dan Paciran dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam Lamongan sebesar 178 L/detik pada tahun 2024 dan peningkatan distribusi air dari SPAM Mojolagres sebesar 100 L/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
6. Kec. Gresik, Manyar, dan Ujung Pangkah akan mengalami peningkatan distribusi air minum dari SPAM Regional Umbulan, dengan penambahan debit hingga 200 L/detik pada tahun 2024-2026 dan peningkatan distribusi air dari SPAM Mojolagres sebesar 100 L/detik untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
7. Kec. Bangkalan & Socah dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam sebesar 130 L/detik pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
8. Kota Mojokerto dapat memanfaatkan kapasitas idle dari Perumdam Kota Mojokerto sebesar 37 L/detik pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.
9. Kota Surabaya akan mengalami peningkatan distribusi air minum dari SPAM Regional Umbulan, dengan penambahan debit hingga 250 L/detik pada tahun 2023, untuk memenuhi kebutuhan air minum hingga tahun 2029 dilanjutkan sampai 2034.

Dengan mengimplementasikan skenario terpilih, diharapkan kebutuhan air minum di setiap daerah dapat terpenuhi secara optimal.

3. Pelayanan Sanitasi

Sebagai megapolitan, kebutuhan sanitasi untuk permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur sanitasi yaitu IPAL dan IPLT. Berikut data capaian akses Sanitasi dan juga sebaran infrastruktur IPAL dan IPLT sebagai berikut:

Tabel 7.93 Capaian Akses Sanitasi

Kabupaten/ Kota	Akses Aman		Akses Layak	
	Jumlah RT	%	Jumlah RT	%
Kab. Sidoarjo	79.657	13,24	545.284	90,64
Kab. Mojokerto	16.131	5,47	250.704	84,96
Kab. Jombang	30.880	8,85	295.725	84,72
Kab. Bojonegoro	27.758	7,76	288.134	80,58
Kab. Tuban	19.293	5,91	246.473	75,49
Kab. Lamongan	16.661	5,16	302.133	93,66
Kab. Gresik	37.892	11,13	321.433	94,41
Kab. Bangkalan	5.975	2,57	119.995	51,66
Kota Mojokerto	6.872	19,28	33.284	93,36
Kota Surabaya	197.149	24,63	697.938	87,18
GKS Plus		10,4		83,6

Sumber: Ditjen Cipta Karya diolah BPIW, 2022

Tabel 7.94 Sebaran Sanitasi

Kab/Kota	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)	Terpakai (m3/hari)
Sidoarjo	IPLT Griyomulyo Jabon	50	NA
Mojokerto	<i>Tidak beroperasi</i>	NA	NA
Jombang	IPLT Bandardowo	21	NA
Bojonegoro	<i>tidak ada data</i>	NA	NA
Tuban	<i>tidak ada data</i>	NA	NA
Lamongan	IPLT Sidokumpul	20	2
Gresik	IPLT Betoयोगuci	45	NA
Bangkalan	<i>tidak ada IPLT</i>	NA	NA
Kota Mojokerto	baru dibangun 2022	0	NA
Kota Surabaya	IPLT Keputih	400	137
GKS Plus		536	

Sumber: BPPW Jawa Timur, 2022

Berdasarkan Permen PUPR 4/2017, SPALD-T dibangun untuk daerah untuk kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha, dan/atau kawasan strategis sedangkan SPALD-S dibangun untuk daerah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha. Kepadatan penduduk kecamatan prioritas dapat dilihat pada tabel di bawah.

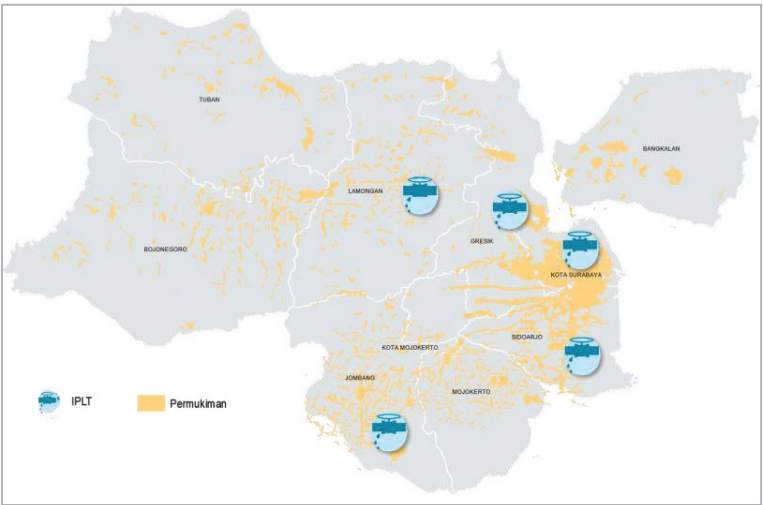
Tabel 7.95 Kepadatan Penduduk di Masing-Masing Kecamatan

Kab/Kota	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Sidoarjo	Sidoarjo	32,15
	Waru	66,21
Mojokerto	Mojosari	30,98
	Ngoro	15,08
Jombang	Jombang	38,42
	Ploso	16,09
	Kudu	4,05
	Kabuh	4,24
Bojonegoro	Bojonegoro	34,07
Tuban	Tuban	39,71
	Jenu	6,78
Lamongan	Lamongan	17,37
	Paciran	20,16
Gresik	Gresik	137,81
	Manyar	12,21

Kab/Kota	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Bangkalan	Ujung Pangkah	5,16
	Bangkalan	24,63
	Socah	11,78
Kota Mojokerto		65,53
Kota Surabaya		87,95

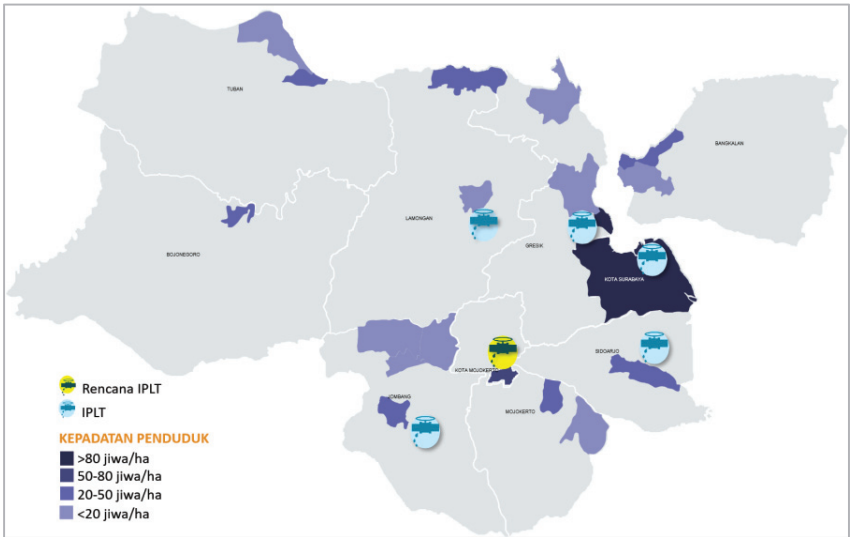
Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Sebaran IPAL dan IPLT Gerbangkertosusila Plus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.63 Sebaran IPAL



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.64 Sebaran IPLT dan Rencana IPLT

Berikut hasil proyeksi kebutuhan IPLT di masing-masing Kab/Kota di GKS Plus sebagai berikut.

Tabel 7.96 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di Kabupaten/Kota

Kab/ Kota	Timbulan Lumpur Tinja (m ³ /hari)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sidoarjo	127,96	129,28	131,02	132,78	134,63	136,39	138,17	139,96	150,60
Mojokerto	66,30	67,02	68,05	68,64	69,23	69,83	70,44	71,05	74,22
Jombang	83,56	87,68	92,68	98,00	103,77	109,91	116,46	123,45	169,16
Bojonegoro	26,80	27,07	27,34	27,62	27,89	28,17	28,45	28,74	30,20
Tuban	43,17	43,48	43,96	44,44	44,96	45,49	46,01	46,54	49,94
Lamongan	50,16	50,29	50,73	51,16	51,66	52,15	52,65	53,14	56,88
Gresik	92,75	94,34	97,91	101,50	105,21	108,55	111,84	115,14	138,25
Bangkalan	46,23	46,91	47,60	51,30	55,01	58,73	62,47	66,21	73,11
Kota Mojokerto	40,25	40,51	40,77	41,04	41,31	41,57	41,84	42,12	43,50
Kota Surabaya	871,16	874,88	878,81	882,75	886,74	890,75	894,77	898,81	920,01
GKS Plus	1.448	1.461	1.479	1.499	1.520	1.542	1.563	1.585	1.706

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun 2029 dan 2034 diperlukan infrastruktur yang dapat mengelola timbulan lumpur tinja sebanyak 1.585 m³/hari dan 1.706 m³/hari. Wilayah yang paling banyak menghasilkan limbah adalah Kota Surabaya (898,81 m³/hari pada 2009 dan 920,01 m³/hari pada 2034). Berdasarkan kepadatan penduduk, kawasan GKS Plus memerlukan SPALD-S. Namun, dapat dipilih SPALD-T karena GKS Plus merupakan kawasan strategis. Pada infrastruktur SPALD eksisting, khususnya IPLT, dapat dilakukan peningkatan kapasitas IPLT sehingga kapasitas pengolahan IPLT dapat bertambah hingga tahun 2009 dilanjutkan sampai 2034.

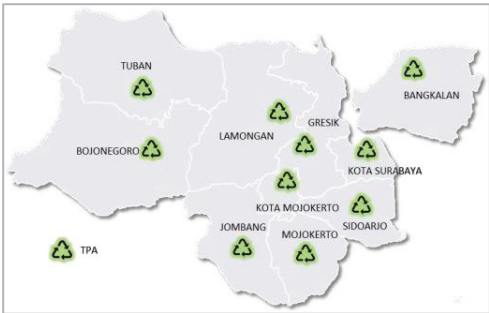
4. Pelayanan Persampahan

Timbulan persampahan dari permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur persampahan yaitu TPA dan TPS3R. Data capaian akses persampahan dan sebaran infrastruktur TPA dan TPS3R sebagai berikut.

Tabel 7.97 Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Unit TPA	Kapasitas Total (m ³ /tahun)	Sampah Masuk TPA (m ³ /Tahun)	Status
Sidoarjo	TPA Griyo Mulyo	671.600	921.728	Overload
Mojokerto	TPA Belahan Tengah	147.000	291.464	Overload
Jombang	TPA Banjardowo	871.500	308.380	Overload
Bojonegoro	TPA Banjarsari	120.000	119.034	Diperkirakan sisa 2 tahun
Tuban	TPA Gunung Panggung	399.000	135.089	Overload
Lamongan	TPA Tambak Rigadung	9.344	4.672	Diperkirakan sisa 2 tahun
Gresik	TPA Ngipik	420.000	481.999	Overload
Bangkalan	TPA Buluh	210.000	32.312	Overload
Kota Mojokerto	TPA Randegan	157.500	975	Overload
Kota Surabaya	TPA Benowo	1.373.400	1.854.200	Belum overload

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya, 2021; SIPSN, 2022



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.65 Sebaran TPA

Timbulan sampah di kawasan GKS Plus memperhitungkan kegiatan penduduk alami dan tenaga kerja. Skenario peningkatan pelayanan persampahan perlu mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melakukan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah, serta membandingkannya dengan target pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Pengelolaan sampah kabupaten ditargetkan meningkat 20% dari 2022 dan pengelolaan sampah kota ditargetkan 100% pada 2029, serta dilanjutkan sampai 2034.

Tahap analisis kebutuhan infrastruktur persampahan dilakukan melalui pendekatan skenario peningkatan pengelolaan sampah yang tertangani. Proyeksi nilai timbulan sampah tertangani mengacu terhadap skenario peningkatan tersebut, sehingga identifikasi kebutuhan infrastruktur persampahan terutama terhadap kapasitas TPA. Perhitungan proyeksi peningkatan pengelolaan sampah dan timbulan sampah tertangani dapat diamati pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.98 Skenario Peningkatan Pengelolaan Persampahan GKS plus

Kab/Kota	Persentase Pelayanan Pengelolaan Sampah (%)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sidoarjo	63,03	65,53	68,03	70,53	73,03	75,53	78,03	80,53	100,00
Mojokerto	33,48	35,98	38,48	40,98	43,48	45,98	48,48	50,98	70,98
Jombang	39,03	41,53	44,03	46,53	49,03	51,53	54,03	56,53	76,53
Bojonegoro	33,02	35,52	38,02	40,52	43,02	45,52	48,02	50,52	70,52
Tuban	55,50	58,00	60,50	63,00	65,50	68,00	70,50	73,00	93,00
Lamongan	64,05	66,55	69,05	71,55	74,05	76,55	79,05	81,55	100,00
Gresik	79,35	81,85	84,35	86,85	89,35	91,85	94,35	96,85	100,00
Bangkalan	27,04	29,54	32,04	34,54	37,04	39,54	42,04	44,54	64,54
Kota Mojokerto	93,66	94,56	95,47	96,38	97,28	98,19	99,09	100,00	100,00
Kota Surabaya	96,91	97,35	97,79	98,24	98,68	99,12	99,56	100,00	100,00
GKS plus	58,51	60,64	62,78	64,91	67,05	69,18	71,32	73,45	87,56

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.99 Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani GKS plus

Kab/Kota	Proyeksi Timbulan Sampah Tertangani (ton/tahun)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Sidoarjo	365.142	387.333	410.390	434.067	458.430	483.374	508.976	535.251	578.351
Mojokerto	115.118	124.847	134.846	144.840	154.989	165.293	175.756	186.379	381.664
Jombang	100.733	111.288	122.206	133.257	144.501	155.887	167.415	179.086	372.420
Bojonegoro	77.150	87.054	97.009	107.015	117.072	127.180	137.339	147.550	345.143
Tuban	106.008	115.766	125.711	135.747	145.898	156.145	166.487	176.924	270.306
Lamongan	185.503	195.481	205.671	215.888	226.175	236.491	246.836	257.211	334.514
Gresik	290.520	311.862	335.805	360.856	387.154	414.307	442.627	472.208	510.725
Bangkalan	39.988	48.640	57.432	67.374	77.604	88.126	98.939	110.047	320.470

Kab/Kota	Proyeksi Timbunan Sampah Tertangani (ton/tahun)								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2034
Kota Mojokerto	28.921	29.517	30.119	30.727	31.342	31.963	32.590	33.224	30.666
Kota Surabaya	751.151	758.422	765.916	773.457	781.083	788.758	796.482	804.257	824.896
GKS plus	2.060.234	2.170.212	2.285.105	2.403.230	2.524.249	2.647.522	2.773.448	2.902.137	3.969.156

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Hasil perhitungan proyeksi tersebut dielaborasi dengan beberapa program pembangunan TPA berdasarkan informasi yang didapat dari BPPW Jawa Timur. Sehingga hasil analisis kebutuhan infrastruktur persampahan di Kawasan GKS plus dapat diamati pada tabel dibawah ini

Tabel 7.100 Rencana Pembangunan TPA di Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Penanganan
Sidoarjo	Perluasan landfill 5,89 Ha dengan sistem <i>sanitary landfill</i> dengan kapasitas 1.650.000 m ³ dan perkiraan umur layanan 5 tahun mulai awal 2022
Mojokerto	Telah ada TPA baru yang sudah beroperasi yaitu TPA Karangdiyeng tahun 2021 seluas 4,2 Ha dengan perkiraan umur layanan 3,14 tahun
Jombang	Perluasan landfill seluas 11 Ha dengan sistem <i>sanitary landfill</i> dan perkiraan umur layanan 7 tahun, beroperasi sejak awal 2022
Bojonegoro	Telah ada TPA baru Bandungrejo yang beroperasi mulai 2021 dengan kapasitas 210.000 m ³ . Ada rencana TPA baru Temayang dengan umur layanan 8 tahun yang diperkirakan akan beroperasi 2025
Tuban	Sudah direncanakan instalasi RDF (<i>refused-derived fuel</i>) dengan kapasitas 120-200 ton/hari. DED sudah jadi per 2020.
Lamongan	Terdapat TPST Samtaku yang saat ini dapat mengolah 35-45 ton/hari dari kapasitas pengolahan 100 ton/hari, sehingga bisa dioptimalisasi. Terdapat rencana RDF di TPST Samtaku dan pembangunan TPST baru di Babat pada 2022 yang akan melayani 5-6 kecamatan
Gresik	Hanya dilakukan optimalisasi TPST karena tidak bisa perluasan/membangun TPA karena terkendala ketersediaan lahan
Bangkalan	Ada rencana pembangunan TPA baru di Desa Bringen, Kecamatan Labang seluas 5 Ha
Kota Mojokerto	Butuh perluasan lahan tapi terkendala ketersediaan lahan
Kota Surabaya	Terdapat instalasi gasifikasi dengan kapasitas 1000 ton/hari

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

c) Infrastruktur Perumahan

Total Rumah Tidak Layak Huni di GKS Plus sebanyak 42.881 unit (2020). Sebagai wilayah penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik memiliki jumlah RTLH yang terbesar yaitu 8.183 Unit di Kab. Mojokerto (2020) dan 8.805 Unit di Kab. Gresik (2020).

Jumlah RTLH pada masing-masing kabupaten/kota di GKS Plus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.101 RTLH di GKS Plus

No	Kab/Kota	Unit
1	Bangkalan	113
2	Gresik	8.805
3	Sidoarjo	4
4	Jombang	2.975
5	Tuban	21.869
6	Lamongan	758
7	Bojonegoro	51
8	Mojokerto	8.183
9	Kota Mojokerto	123
10	Kota Surabaya	-
Jumlah RTLH GKS Plus: 42.881 Unit		

Sumber: <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/> diakses 2020

B. Madura Kepulauan

a) Kondisi Eksisting

Berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, Kondisi jalan nasional sepanjang 342,71 km di Madura Kepulauan pada umumnya sedang dengan lebar jalan bervariasi antara 6-10 m. Masih terdapat ruas yang mempunyai VCR > 0.8 yaitu Bangkalan-Sampang dan Pamekasan-Sumenep, pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pasar tradisional. Kecepatan rata-rata jalan nasional adalah 30-50 km/jam (di bawah target Renstra PUPR, 53 km/jam), kecuali jalan akses dan jembatan Suramadu.



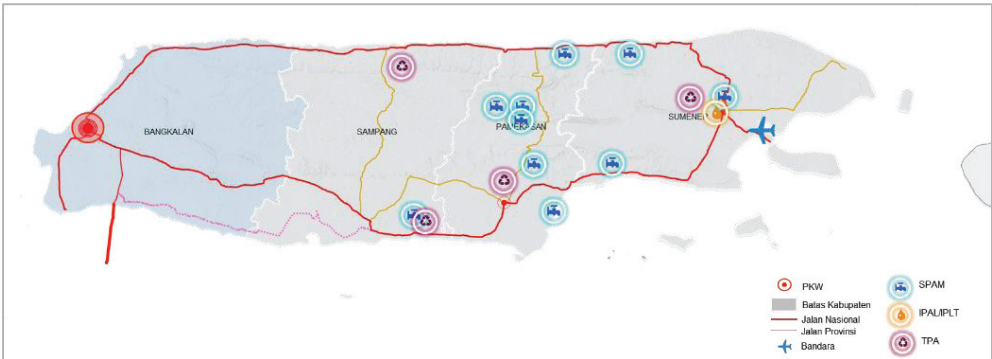
Sumber: BBPJN Jawa Timur-Bali, 2022

Gambar 7.66 VCR di Madura Kepulauan

Berkaitan dengan infrastruktur permukiman, Sumber air baku berasal dari sungai & embung yang sebagian besar adalah embung tadah hujan. Capaian akses layanan air minum mencapai 93,03% (dibawah Jatim 95,8%), capaian paling rendah Kab. Sampang (89,89%). Untuk capaian akses air perpipaan yang dilayani oleh PDAM masing-masing kabupaten masih 7,17% (di bawah Jatim 21,33%), paling rendah Kab. Sampang (4,51%). Di Kab. Bangkalan terdapat 15 Pamsimas (melayani 707 KK), di Kab. Sampang 16 Pamsimas (melayani 561 KK), di Kab. Pamekasan 12 Pamsimas (melayani 287 KK), dan di Kab. Sumenep 17 Pamsimas (melayani 3.751 KK).

Capaian akses sanitasi layak Madura Kepulauan sebesar 59,68% (di atas Jawa Timur 55,16%), terendah di Kab. Bangkalan (51,66%), sedangkan Akses Sanitasi Aman sebesar 2,13 % (di bawah Jawa Timur 6,96%) terendah di Kab. Sumenep (1,43%). IPLT hanya ada di Kab. Sumenep, namun perlu optimalisasi mengingat bertambahnya timbulan lumpur tinja setiap tahunnya. Di Kab. Bangkalan terdapat 12.878 KK yang sudah terlayani sanimas/sandes, di Kab. Sampang 8.571 KK, di Kab. Pamekasan 15.599 KK, dan di Kab. Sumenep 9.357 KK.

Persentase penanganan sampah di Madura pada tahun 2021 masih 10,15% (di bawah Jawa Timur 44,71%), terendah di Kabupaten Sumenep (7,45%). Persentase pengelolaan sampah 25,05% (dibawah Jawa Timur 62,2%), paling rendah Kabupaten Sampang (11,8%). Pada 2021, hanya Kabupaten Pamekasan yang mencapai 30% pada pengurangan sampah. Sebagian besar TPA eksisting sudah *overload*, diantaranya Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep.



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.67 Sebaran Infrastruktur Permukiman di Madura dan Kepulauan

2) Analisis Kebutuhan

a) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Analisis kebutuhan infrastruktur Bina Marga terdiri dari Analisis Kondisi VCR, Waktu Tempuh, dan Pergerakan Arus Lalu Lintas.

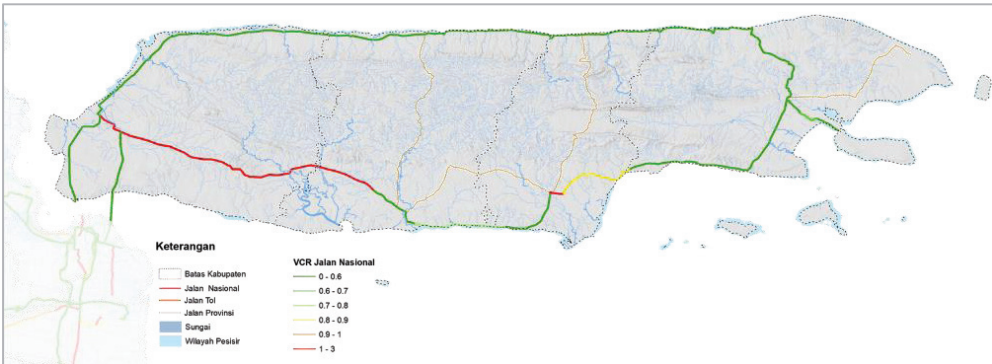
1. Kinerja Jaringan Jalan (VCR)

Total panjang jalan nasional 342,71 dengan lebar jalan rata-rata 8 m, VCR rata-rata : 0,3. Terdapat beberapa ruas jalan nasional yang mempunyai VCR > 0,8 sebagai berikut:

Tabel 7.102 Kondisi Jalan Nasional yang mempunyai VCR > 0,8

Nama Ruas	Kode Ruas	Lebar Bahu	VCR
Bts. Kab. Bangkalan - Torjun	28109	6.33	1.21
Jln. Jokotole (Pamekasan)	2811312	7.79	1.16
Bts. Kota Bangkalan - Bts. Kab. Sampang	28108	6.91	1.31

Sumber: BBPJJN Jawa Timur-Bali, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

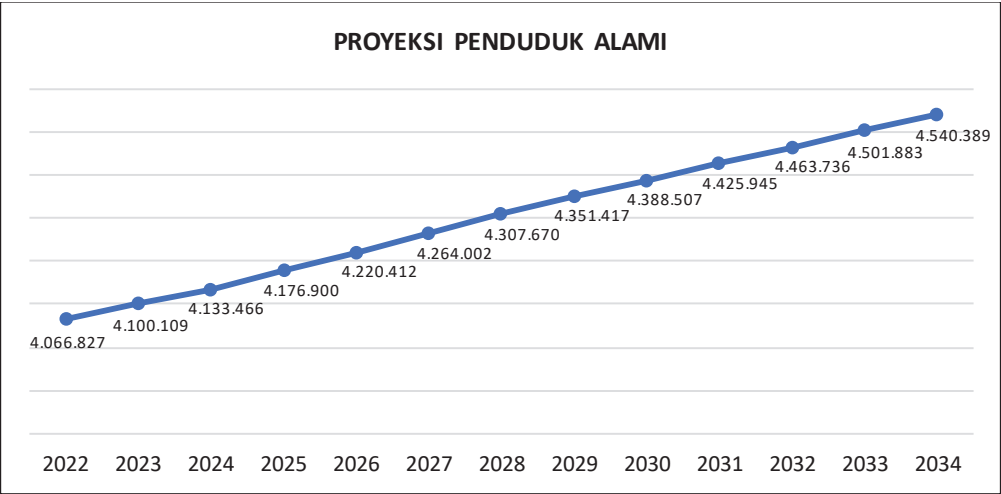
Gambar 7.68 VCR di Kawasan Madura dan Kepulauan

b) Infrastruktur Permukiman

Dalam menghitung kebutuhan infrastruktur permukiman diperlukan proyeksi pertumbuhan penduduk.

1. Proyeksi Penduduk Alami

Proyeksi penduduk alami dihitung menggunakan persentase laju pertumbuhan penduduk di masing-masing ibu kota Kecamatan di masing-masing Kabupaten.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 7.69 Proyeksi Penduduk Alami di Madura Kepulauan

Proyeksi penduduk alami dihitung menggunakan % laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kabupaten. Jumlah penduduk alami tahun 2029 diperkirakan sebesar 4,3 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2034 diperkirakan mencapai 4,5 juta jiwa. Kab. Sumenep merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di Madura dan Kepulauan, yakni sebesar 1.206.135 jiwa pada tahun 2029 dan sebesar 1.246.858 jiwa pada tahun 2034. Sebaliknya, Kab. Pamekasan merupakan wilayah dengan penduduk terendah sebesar 899.724 jiwa (2029) dan sebesar 925.959 jiwa (2034). Pertambahan penduduk ini menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur permukiman. Berikut proyeksi penduduk di masing-masing Ibukota Kecamatan di 4 Kabupaten:

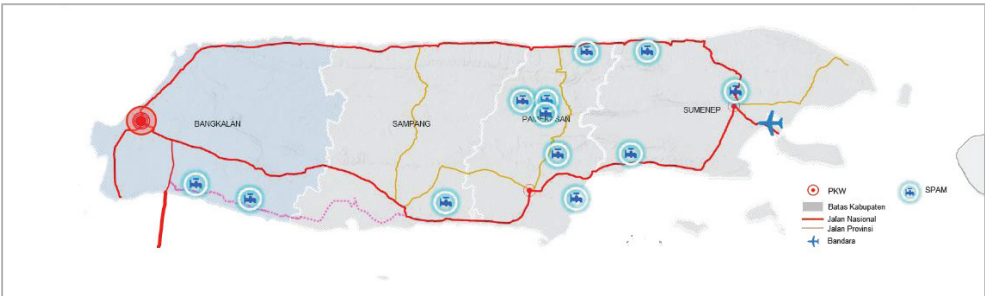
Tabel 7.103 Proyeksi Jumlah Penduduk

Kab/Kota	Proyeksi Penduduk Alami (Jiwa)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	1.078.266	1.087.324	1.096.457	1.115.667	1.193.288	1.208.503	1.271.327
Sampang	985.551	995.083	1.004.614	1.014.145	1.052.270	1.060.921	1.096.244
Pamekasan	859.284	865.061	870.838	876.615	899.724	904.911	925.959
Sumenep	1.143.726	1.152.641	1.161.557	1.170.472	1.206.135	1.214.172	1.246.858
Madura & Kepulauan	4.066.827	4.100.109	4.133.466	4.176.899	4.351.417	4.388.507	4.540.389

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

2. Pelayanan Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kawasan Madura dan Kepulauan telah terdapat SPAM dan PDAM yang tersebar di seluruh kabupaten. Berikut sebaran layanan PDAM di Kawasan Madura Kepulauan adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.70 Sebaran SPAM di Madura dan Kepulauan

Tabel 7.104 Layanan Perpipaan di Kawasan Madura dan Kepulauan

Nama PDAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Volume Produksi Riil (L/det)
PERUMDAM Sumber Sejahtera Kab. Bangkalan	435	305
PERUMDAM Trunojoyo Kab. Sampang	275	170
PDAM Kab. Pamekasan	352	122
PDAM Kab. Sumenep	354	144
Madura dan Kepulauan	1.416	741

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021

Tabel 7.105 Capaian Akses Air Minum

Kab/Kota	Akses Air Layak (%)	Akses Air Perpipaan (%)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)
Bangkalan	93,92	14,16	150.104
Sampang	89,89	6,46	63.050
Pamekasan	90,49	5,76	49.121
Sumenep	97,82	3,59	40.703
Madura dan Kepulauan	93,03	7,49	302.978
Jawa Timur	95,56	20,45	8.319.476

Sumber: Laporan Kinerja PDAM, 2021

Ketersediaan air minum di pulau-pulau kecil di Madura dan Kepulauan dipenuhi oleh tampungan air hujan dan distribusi air minum dari Madura daratan (tanki/jerigen air minum). SPAM pulau-pulau kecil hanya ada di Pulau Sapudi, yaitu SPAM PPI Gayam. Berikut perhitungan kebutuhan air minum Kabupaten/Kota di Kawasan Madura dan kepulauan:

Tabel 7.106 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Madura & Kepulauan

Kab/Kota	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/det)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	239,75	259,13	278,82	298,82	382,03	404,94	511,16
Sampang	100,70	117,57	134,74	152,22	225,17	249,00	372,34
Pamekasan	78,46	92,80	107,33	122,04	182,74	203,11	309,97
Sumenep	65,01	83,93	103,13	122,62	203,41	234,58	414,95
Madura & Kepulauan	483,92	553,43	624,02	695,70	993,35	1.091,63	1.608,42

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.107 Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Air Minum Perpipaan (%)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	13,92	14,92	15,92	16,92	20,92	22,01	26,99
Sampang	6,40	7,40	8,40	9,40	13,40	14,70	21,27
Pamekasan	5,72	6,72	7,72	8,72	12,72	14,06	20,96
Sumenep	3,56	4,56	5,56	6,56	10,56	12,10	20,84
Madura & Kepulauan	7,40	8,40	9,40	10,40	14,40	15,72	22,51

Sumber: Hasil Analisis BPW, 2024

1. Kabupaten Bangkalan dilayani oleh PERUMDAM Sumber Sejahtera Kab. Bangkalan dan SPAM Desa Duwek Butar & Bringin Bunajih. Namun, pemanfaatan kapasitas idle Perumdam pada 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum Kabupaten Bangkalan pada 2029 dilanjutkan sampai tahun 2034 sesuai skenario terpilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi dengan sumber air baku baru.
2. Kabupaten Sampang dilayani oleh PERUMDAM Trunojoyo Kab. Sampang dan SPAM Kws PPI Camplong. Namun, pemanfaatan kapasitas idle Perumdam pada 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum Kabupaten Sampang pada 2029 dilanjutkan sampai tahun 2034 sesuai skenario terpilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi dengan sumber air baku baru.
3. Kabupaten Pamekasan dilayani oleh PDAM Kab. Pamekasan dan SPAM Pedesaan. Dengan memanfaatkan kapasitas idle PDAM pada 2024, kebutuhan air minum Kabupaten Pamekasan pada 2029 dan dilanjutkan sampai tahun 2034 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih.
4. Kabupaten Sumenep dilayani oleh PDAM Kab. Sumenep, SPAM Kawasan PPI Pasosongan, dan SPAM Kawasan PPI Pragaan. Dengan memanfaatkan kapasitas idle PDAM pada 2024, kebutuhan air minum Kabupaten Sumenep pada 2029 dapat terpenuhi sesuai skenario terpilih. Namun, pemanfaatan kapasitas idle Perumdam pada 2024 tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum Kabupaten Sumenep pada 2034. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi dengan sumber air baku baru.

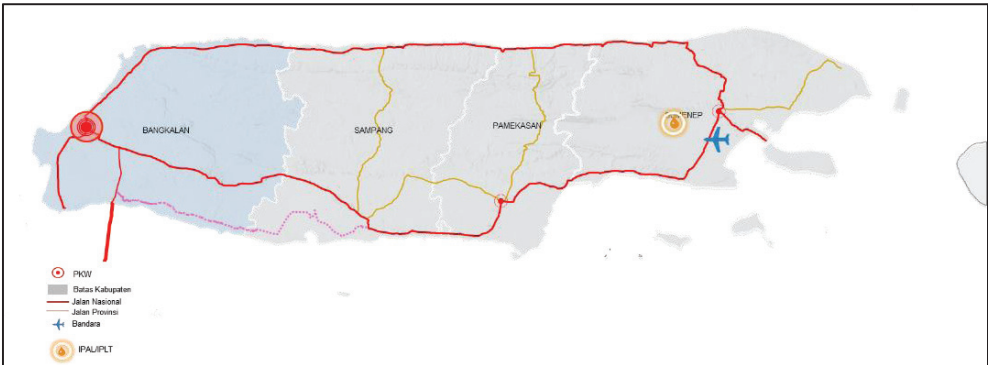
3. Pelayanan Sanitasi

Untuk kebutuhan sanitasi untuk permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur sanitasi yaitu IPAL dan IPLT. Berikut data capaian akses Sanitasi dan juga sebaran infrastruktur IPAL dan IPLT sebagai berikut:

Tabel 7.108 Capaian Akses Sanitasi Madura dan Kepulauan

Kabupaten/ kota	Akses Aman		Akses Layak	
	Jumlah RT	%	Jumlah RT	%
Bangkalan	5.975	2,57%	119.995	51,66%
Sampang	4.807	2,13%	157.376	69,83%
Pamekasan	5.178	2,41%	132.993	61,84%
Sumenep	4.506	1,43%	174.958	55,38%
Madura		2,13%		59,68%

Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2021



Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Gambar 7.71 Sebaran Infrastruktur IPAL/IPLT Madura dan Kepulauan

Tabel 7.109 Sebaran IPLT di Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Unit IPLT	Kapasitas (m3/hari)
Bangkalan	-	0
Sampang	n/a	0
Pamekasan	n/a	0
Sumenep	IPLT Sumenep	10
Madura		10

Sumber: BPPW Jatim, 2021

Berdasarkan kriteria dalam pembangunan infrastruktur sanitasi sesuai Permen PUPR 4/2017, SPALD-T dibangun untuk daerah untuk kepadatan penduduk >150 jiwa/ha, dan/atau kawasan strategis sedangkan SPALD-S dibangun untuk daerah dengan kepadatan penduduk <150 jiwa/ha. Untuk perhitungan timbulan lumpur tinja menggunakan standar timbulan **0,5 L/orang/hari** dengan target **tingkat pelayanan 60%** untuk penduduk alami dan 100% wisatawan. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi timbulan tinja di masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.110 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja di masing-masing Kecamatan Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Kepadatan penduduk (Jiwa/Ha)	Timbulan Lumpur Tinja (m3/hari)						
		2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	8,41	323,48	326.20	328.94	331.70	342.99	345,51	355,78
Sampang	8,13	295,67	298.52	301.38	304.24	315.68	318,27	328,87
Pamekasan	12,17	257,79	259.52	261.25	262.98	269.92	271,48	277,79
Sumenep	7,10	343,12	345.79	348.47	351.14	361.84	364,25	374,06
MADURA		1220,06	1230.03	1240.04	1250.06	1290.43	1.299,51	1.336,49

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2029, diperlukan infrastruktur yang dapat mengelola timbulan lumpur tinja sebanyak 1.290,43 m³/hari. Sedangkan pada tahun 2034, diperlukan infrastruktur yang dapat mengelola timbulan lumpur tinja sebanyak 1.336,49 m³/hari. Wilayah yang paling banyak menghasilkan limbah adalah Kab. Sumenep, yaitu 361,84 m³/hari (2029) dan 374,06 m³/hari (2034).

- 2. Berdasarkan kepadatan penduduk, Kawasan Madura memerlukan SPALD-S.
- 3. Pada wilayah yang belum terdapat SPALD, khususnya IPLT, dapat dilakukan pembangunan IPLT atau mempergunakan IPLT terdekat yang memiliki kapasitas pengolahan yang mencukupi untuk melayani wilayah secara regional.
- 4. Pada infrastruktur SPALD eksisting, khususnya IPLT, dapat dilakukan peningkatan kapasitas sehingga kapasitas pengolahan IPLT dapat melayani peningkatan lumpur tinja di Kawasan Madura sampai 2029 dilanjutkan hingga tahun 2034.

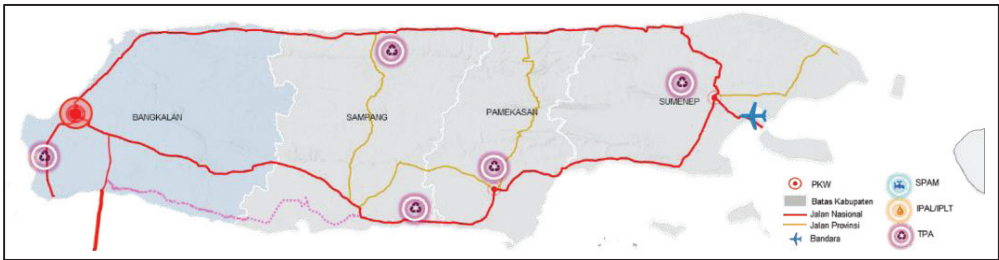
4. Pelayanan Persampahan

Sebagai kawasan pariwisata, timbulan persampahan dari permukiman penduduk dipenuhi oleh infrastruktur persampahan yaitu TPA dan TPS3R. Berikut data capaian akses persampahan dan juga sebaran infrastruktur TPA dan TPS3R sebagai berikut:

Tabel 7.111 Kapasitas dan Kondisi TPA di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Lokasi TPA	Kab/Kota	Kapasitas TPA (m3/tahun)	Sampah yang masuk TPA (m3/tahun)
TPA Gunung Maddah	Kab. Sampang	9.400	28.251
TPA Ketapang	Kab. Sampang	1.825	6.862
TPA Angsanah	Kab. Pamekasan	17.799	44.715
TPA Batuan	Kab. Sumenep	21.443	32.625
TPA Buluh	Kab. Bangkalan	210.000	32.312

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 7.72 Sebaran TPA Eksisting Madura dan Kepulauan

Timbulan sampah di kawasan Selingkar Ijen memperhitungkan kegiatan penduduk alami. Penanganan timbulan sampah penduduk dan tenaga kerja diproyeksikan sesuai dengan skenario peningkatan pelayanan persampahan. Skenario peningkatan pelayanan persampahan perlu mempertimbangkan kemampuan daerah untuk melakukan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah, serta membandingkannya dengan target pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Tidak ada target intervensi pada pengurangan sampah. Pengelolaan sampah kabupaten ditargetkan meningkat 20% dari 2020, sedangkan pengelolaan sampah kota ditargetkan 100% pada 2029. Berikut capaian pengelolaan sampah masing-masing Kab/Kota pada tahun 2020:

Tabel 7.112 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Pengelolaan Sampah 2020 (%)
Bangkalan	24,54
Sampang	11,80
Pamekasan	50,17
Sumenep	14,70

Sumber: Portal Persampahan Cipta Karya (SIPSN), 2022

Berdasarkan capaian kinerja persampahan dan mempertimbangkan rencana pengembangan TPA dapat diproyeksikan timbulan sampah sesuai proyeksi penduduk dan tenaga kerja di masing-masing Kabupaten/Kota dan berdasarkan informasi yang didapat dari BPPW Jawa Timur terdapat beberapa rencana pengembangan TPA sebagai berikut:

Tabel 7.113 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Lokasi TPA	Luas TPA (Ha)	Luas sel landfill (Ha)	Kapasitas awal (m3)	Umur Layanan TPA (tahun)	Kapasitas Terpakai (m3)	Kapasitas Sisa (m3)	Keterangan	Rencana	Luas Rencana (Ha)	Umur Rencana (Ha)	Kapasitas Rencana (Ha)
Kab. Sampang	TPA Gunung Maddah	4	1	35.040	Kapasitas m3/tahun. 10 th	175.200	175.200	Masih aman sampai 2024	Perluasan TPA <i>Sanitary Landfill</i> dan Insinerator	4	5	Masih buat kajian butuh atau tidak
Kab. Sampang	TPA Ketapang		1	115.000	10-30 tahun, 10 tahun jika tdk ada pengurangan sampah		34.500	Masih sisa 1-4 tahun (DLH, 2020). Butuh alat berat	Ada keinginan untuk perluasan hingga 4 Ha tapi belum terlalu butuh (DLH, 2020). Ada usulan ke BPPW Jatim	-	-	-
Kab. Pamekasan	TPA Angsanah	1.8		223.000	Rencananya 4 tahun (DLH Pamekasan, 2019), tapi hanya akan tercapai kalau Jakstrada juga tercapai		18.785,25	Dibangun 2017, kalau 4 tahun seharusnya seharusnya 2021 penuh. Blm ada keterangan skrg <i>overflow</i> atau tdk.	Ada rencana tapi 2023 baru penganggaran DED. Sudah ada usulan ke BPPW Jatim	-	-	-
Kab. Sumenep	TPA Batuan	8	1				0	<i>Overflow</i> = DLH Sumenep memperkirakan TPA itu hanya mampu menampung sampah hingga tahun 2019	Ada usulan ke BPPW Jatim. Belum tahu siap tahun berapa	1	-	285.575.98
Kab. Bangkalan	TPA Buluh	2	2		Operasi tahun 2005							

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

Tabel 7.114 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Skenario Peningkatan Pengelolaan Sampah (%)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	10,08	18,64	27,20	35,76	70,00	89,19	100,00
Sampang	10,33	18,85	27,38	35,90	70,00	88,91	100,00
Pamekasan	12,89	20,01	27,13	34,25	62,72	76,44	100,00
Sumenep	7,45	16,39	25,32	34,26	70,00	92,62	100,00
Madura & Kepulauan	10,19	18,47	26,76	35,04	68,18	86,79	100,00

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Tabel 7.115 Proyeksi Kebutuhan Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota Madura dan Kepulauan

Kab/Kota	Proyeksi Timbunan Sampah Tertangani (ton/tahun)						
	2022	2023	2024	2025	2029	2030	2034
Bangkalan	3.174	5.918	8.709	11.650	24.391	31.473	87.246
Sampang	2.787	5.136	7.529	9.967	20.164	25.823	69.459
Pamekasan	3.032	4.738	6.467	8.218	15.448	18.935	42.740
Sumenep	2.488	5.515	8.588	11.708	24.653	32.838	103.367
Madura & Kepulauan	11.481	21.307	31.293	41.544	84.656	109.068	302.812

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2024

Berdasarkan hasil analisis timbunan persampahan masing-masing Kabupaten/Kota dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa TPA yang sudah *overload* yaitu di Kab. Bangkalan dan Kab Sumenep.
- b. TPA Kab Pamekasan diproyeksikan akan *overload* pada 2024 dilanjutkan hingga tahun 2034.
- c. TPA Kab Sampang diproyeksikan akan *overload* pada 2029 dilanjutkan hingga tahun 2034.

Diperlukan pembangunan TPS3R sebagai upaya pengurangan sampah, serta pembangunan atau perluasan/optimalisasi TPA sebagai upaya penanganan sampah

7.2 Analisis Keterpaduan Infrastruktur

A. Analisis Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila Plus

Tabel 7.116 Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Gerbangkertosusila Plus

Kawasan	Fokus	Fungsi	Infrastruktur PUPR						Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
			SDA	BM		CK		PnP		
			Penanganan	Thn	Penanganan	Thn	Penanganan	Thn		
Gerbang-kertosusila Plus	Infrastruktur Dasar Kawasan perkotaan	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di pusat layanan	• Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng • Penuntasan Banjir Kali Lamong • Pengendalian banjir Sungai Sidokare dan Pucang • Pembangunan pengamanan pantai • Pengendalian banjir Kali Brantas	2029 2023-2025 2027-2029 2026-2029 2025-2029			• Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten Bangkalan	2025-2026	Keterpaduan infrastruktur SDA dan infrastruktur dasar	Penanganan banjir di hulu oleh Pemda, KLHK
					Pelebaran Jalan Menambah Lajur di Ruas Krian - Taman - Waru	2024-2025	• Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan Kab Tuban • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional Gresik	2023-2025 2026-2028	Keterpaduan infrastruktur jalan dan infrastruktur dasar	Pengelolaan oleh Pemda (setelah serah terima asset)
		Penguatan daya saing sektor pariwisata dan industri			Pembangunan Jalan Modung - Sresih - Pangarengan	2026-2027	• Sistem Pengolahan Persampahan Skala Kab Sumenep	2025-2026	Keterpaduan infrastruktur jalan dan infrastruktur dasar	Pembangunan kawasan industri oleh Kemenperin/swasta

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

C. Analisis Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Kawasan Prioritas Selingkar Ijen
Tabel 7.118 Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Selingkar Ijen

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR					Padu antar PUPR	Padu Non PUPR					
			SDA Penanganan	Thn	BM Penanganan	Thn	CK Penanganan			Thn	PnP Penanganan	Thn		
Kawasan Selingkar Ijen	Pariwisata	Peningkatan aksesibilitas, amenities, dan atraksi			- Pembangunan Pansela Jember-Banyuwangi - Jember (Puger-Sumberejo 14 km; Sidodadi-Sanenrejo 9,61 km; Sanenrejo-Bts. Banyuwangi 23,94) - Peningkatan Kapasitas ruas jalan Benculuk-Rogojampi - Pelebaran jalan menuju standar ruas Jln. Bts. Kab. Jember - Genteng Kulon - Penanganan ruas Jln Pondok dalam-Tanggul-Gembirono-Rambipuji-Mangli - Penanganan akses utama Kawah Ijen	2025-2029	2025-2029			Keterpaduan infrastruktur air baku, konektivitas, dan infrastruktur dasar	Penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, pengelolaan pariwisata, dan pengendalian pemanfaatan ruang			
		Pemenuhan pelayanan dasar di Kawasan Perkotaan Banyuwangi, Jember, Situbondo dan Bondowoso sebagai pendukung pariwisata Ijen dan peningkatan produktivitas pertanian	Jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun/ditingkatkan Di Bajulmati	2029-2029	- Pembangunan Jalan Lingkar Jember - Pembangunan Jembatan Tambong (kec. Jabat)	2027-2029	2027-2029	- Sistem pengolahan persampahan skala Kabupaten Bondowoso - Sistem pengolahan persampahan skala Kabupaten Banyuwangi - Sistem pengolahan persampahan skala Kab.Jember	2027-2028	2026-2027	2026-2027	Keterpaduan infrastruktur air baku, konektivitas, dan infrastruktur dasar	Pengoptimalan layanan angkut TPA oleh Pemda	

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

D. Analisis Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Kawasan Prioritas Madura dan Kepulauan

Tabel 7.119 Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Madura dan Kepulauan

Kawasan	Tematik	Fungsi	Infrastruktur PUPR						Padu antar PUPR	Padu Non PUPR
			SDA	BM		CK		PnP		
			Penanganan	Thn	Penanganan	Thn	Penanganan	Thn		
Madura dan Kepulauan	Kawasan Pertanian	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pertanian	• Jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun/ditingkatkan Nipah	2028-2029			• Pembangunan SPAM Kawasan Pedesaan Rawan Kekeringan	2025-2026	Keterpaduan infrastruktur SDA dan infrastruktur dasar	Rencana cetak sawah oleh Kementerian Pertanian
			• Bendung irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ditingkatkan Waduk Klampis	2026-2027			• Pembangunan SPAM Kawasan Desa Kepulauan Sumenep	2026-2028		
			• Jaringan irigasi permukaan dan rawa yang dibangun/ditingkatkan jaringan irigasi Klampis	2026-2027			• Sistem Pengolahan Persampahan skala Kabupaten Sumenep	2025-2026		
			• Bangunan pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Kemuning	2025-2026						
			• Bangunan Pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Blega	2026-2027						
		Penguatan daya saing sektor pariwisata dan industri sebagai sektor pendukung			Pembangunan Jalan Modung - Sreseh - Pangarengan	2026-2027			Keterpaduan infrastruktur jalan dan infrastruktur dasar	Pembangunan kawasan industri oleh Kemenperin/ Swasta

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

rastruktur PUPR di Kawasan Prioritas Selingkar Willis
Tabel 7.120 Keterpaduan Infrastruktur PUPR di Selingkar Willis

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022

F. Analisis Keterpaduan Infrastruktur Prioritas PUPR

Tabel 7.121 Keterpaduan Infrastruktur Prioritas PUPR

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
1	Bendungan Nipah	Konstruksi	Penyempurnaan Bendungan nipah di Kab. Sampang (SYC) (Pelaksanaan Konstruksi)	2023			Pembangunan SPAM Kawasan Pedesaan Rawan Kekeringan (SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	2025-2027			Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung oleh Pemda dalam melanjutkan pembangunan pendukung dan pengoperasian infrastruktur sesuai dengan kewenangan.
			Pembebasan Tanah Jaringan Irigasi Di Nipah	2019-2023								
		Pemenuhan Kebutuhan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi nipah Kab. Sampang sepanjang 1,9 km untuk 75,95 ha	2020								
			Pembangunan Jaringan Irigasi Di nipah sepanjang 1 km untuk 200 ha	2022								
			Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan Nipah	2025-2029								
2	Bendungan Tukul	Konstruksi	Pembangunan Bendungan Tukul di Kab. Pacitan (Lanjutan)	2019-2021			Pengembangan SPAM Kabupaten Pacitan	2027-2029			Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung dengan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
			LARAP Pembangunan Di tukul	2022								
		Pemenuhan Kebutuhan Irigasi	SID/DD Pembangunan Di tukul	2022								
			DED Cetak Sawah Di tukul	2024								
		Penyediaan Air Baku	SID Intake dan Pipa Transmisi Waduk Tukul di Kab. Pacitan	2019								
			Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan tukul sepanjang 8 km	2022								

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
3	Bendungan Bajulmati	Konstruksi	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan tukul sepanjang 12 km	2023							Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung dengan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
			Penyempurnaan Bendungan bajulmati	2020								
			AMDAL Pembangunan Jaringan Irigasi Di. Bajulmati	2019								
			LARAP Pembangunan Jaringan Irigasi Di. Bajulmati	2019								
			Pembebasan Tanah Jaringan Irigasi Di. bajulmati	2020- 2022								
			Peningkatan Jaringan Irigasi Di bajulmati sepanjang 3 km untuk area 250 Ha	2021								
			Rehabilitasi Bendung Sodung (100 Ha) dan Jaringan Irigasi (1,5 km) Di Bajulmati	2024								
			Penyusunan Desain Jaringan Irigasi tersier Di Bajulmati	2024								
			Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan Di Bajulmati	2025- 2029								
		Penyediaan Air Baku	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Bajulmati	2019								
			Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku bajulmati (lanjutan) sepanjang 4,4 km untuk area 44 Ha	2020								
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Penyediaan Air Baku bajulmati	2021								

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
4	Bendungan Tugu	Konstruksi	Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku bajulmati (lanjutan) sepanjang 2 km dan debit 0,12 m ³ /detik	2021								
			Peningkatan Jaringan Irigasi Di bajulmati Kab. Banyuwangi sepanjang 5 km untuk area 50 Ha	2022								
			Pembangunan Bendungan tugu di Kab. Trenggalek (MYC) (Tahap II)	2020-2021			Pengembangan SPAM Kab. Trenggalek dsk	2026-2028			Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung dengan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
			Pengadaan Tanah Bendungan Tugu	2020-2021								
			Pengadaan Tanah Bendungan dan Jaringan Perpipaan Bendungan tugu	2022-2023								
		Pemenuhan Kebutuhan Irigasi	Dokumen Lingkungan Pembangunan Jaringan Irigasi Di tugu	2022								
			DED Bangunan Utama Jaringan Irigasi Di tugu	2022								
			Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku tugu sepanjang 4 km dan debit 0,01 m ³ /detik	2022								
			Penyusunan Larap Jaringan Irigasi Di tugu Kab. Trenggalek	2024								
			Penyusunan Desain Jaringan Irigasi Tersier Di tugu Kab. Trenggalek	2024								
			Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan Tugu	2025-2029								

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
5	Bendungan Bendo	Penyediaan Air Baku	Pembangunan Penyediaan Air Baku dari Bendungan Tugu	2023								
		Konstruksi	SID Intake dan Pipa Transmisi Waduk Bendo di Kab. Ponorogo	2019			Pengembangan SPAM Kab. Ponorogo dsk	2026- 2028			Keterpaduan Infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung dengan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
			Pembangunan Bendungan Bendo di Kab. Ponorogo (Lanjutan) (MYC)	2019- 2021								
			Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bendo di Kabupaten Ponorogo sepanjang 50 km	2019								
			Peningkatan Jaringan Irigasi D.I bendo di Kabupaten Ponorogo (Tahap II) sepanjang 0,824 km untuk area 526,66 Ha	2021								
6	Bendungan Gongseng	Penyediaan Air Baku	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Bendo	2025- 2027			Pembangunan SPAM Regional Pantura (Bojonegoro, Tuban, Lamongan)	2027- 2029			Keterpaduan Infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung dengan pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian
			Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan Bendo (MYC) dengan panjang 4,2 km, debit 0,37 m ³ /detik	2023								
		Konstruksi	Pembangunan Waduk Gongseng	2019- 2021								
			SID Intake dan Pipa Transmisi Waduk Gongseng	2019								
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Pemanfaatan Air Baku Bendungan gongseng dan Bendungan Bendo	2022								
		Penyediaan Air Baku	Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan	2023								

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
7	Bendungan Semantok	Konstruksi	gongseng sepanjang 13 km								Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir) dan infrastruktur dasar air minum	Perlu didukung oleh Pemda dalam melanjutkan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur sesuai dengan kewenangan.
			Pembangunan Bendungan Semantok Paket I dan II Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur (MYC)	2017-2021								
			Pembangunan Bendungan Semantok Paket III Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur (MYC)	2022								
			SID Pengendalian Rembesan dan Evaluasi Sedimentasi Bendungan semantok	2020								
			Pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Semantok dan pengadaan tanah jaringan irigasi Bendungan Semantok	2023								
8	Bendungan Bagong	Pemenuhan Kebutuhan Irigasi	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan Di Semantok (2025-2029)	2025-2029							Keterpaduan infrastruktur SDA (irigasi, air baku, dan reduksi banjir)	Perlu didukung oleh Pemda dalam melanjutkan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur sesuai dengan kewenangan.
			DED Penyediaan Air Baku Bendungan semantok	2024								
			Pembangunan Bendungan Bagong Paket I dan II di Kab. Trenggalek (MYC)	2018-2023								
			Review Studi Amdal Bendungan bagong	2020								
			Pembangunan Bendungan bagong Paket I, II, dan III di Kab. Trenggalek (MYC)	2024							Pembangunan SPAM Kab. Trenggalek dsk	2026-2028

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
			Penyediaan SPAB Bendungan Bagong	2025-2029								
9	Pansela Provinsi Jawa Timur (Ruas Gonggong - Ketapang)	Peningkatkan Akses Pesisir Pantai Selatan dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Preservasi Jalan Situbondo - Ketapang - Banyuwangi	2020					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan pariwisata
					Pembangunan Pansela Jawa Timur (Ruas yang termasuk TRSS Phase II dan RC Preparation)	2025-2029						
10	Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Perak	Peningkatkan Akses Menuju Simpul Transportasi dan Kawasan Industri			Preservasi akses Jalan Tanjung Perak (Peningkatan Struktur Jalan Sidorame Dan Tanjung Perak (Surabaya)	2012					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas dan optimalisasi fungsi pelabuhan sebagai gerbang ekspor dan impor logistik
11	Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah pada Kawasan Relokasi Bencana Semeru	Pasca Bencana Semeru	Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah pada Kawasan Relokasi Bencana Semeru	2022							Perlu didukung anggaran pemilihan untuk mengantisipasi dampak potensi bencana susulan serta melakukan pemantauan berkala terhadap keberfungsian dan kebermanfaatn infrastruktur yang telah terbangun	Penda dapat membentuk forum komunikasi warga yang bertujuan sebagai sarana interaksi untuk saling menjaga, merawat, dan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara bertanggung jawab
			Penggantian Jembatan Kali Gidlik II dan Penanganann Longsor Lumajang-Turen	2023								
			Tanggul Bendung yang dibangun / ditingkatkan di Kali Rejadi, Gidlik, dan Muju	2025-2029								
12	Jalan Tol Pandaan - Malang	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono - Mojokerto dan	2020-2022					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
					Surabaya - Mojokerto, Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan							pengembangan kawasan pariwisata
13	Jalan Tol Solo - Ngawi	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono - Mojokerto dan Surabaya - Mojokerto, Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan	2020 - 2022					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan industri
14	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono - Mojokerto dan Surabaya - Mojokerto, Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan	2020 - 2022					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar
15	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pandaan-Malang, Kertosono - Mojokerto dan Surabaya - Mojokerto, Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan	2020 - 2022					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar
16	Jalan Tol Gempol - Pandaan	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono -	2020 - 2023					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
					Mojokerto dan Surabaya - Mojokerto; Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan							lancar dan pengembangan kawasan pariwisata
17	Jalan Tol Gempol - Pasuruan	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Kertosono - Mojokerto dan Surabaya - Mojokerto; Gempol - Pandaan dan Gempol - Pasuruan	2020-2023					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan industri
18	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo dan Probolinggo - Banyuwangi I	2020-2023					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan industri
					Penyelesaian Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Seksi 4B	2025-2029						
19	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi I, II, III	2020-2023					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan pariwisata
					Penyelesaian Jalan Tol Probolinggo- Banyuwangi Seksi II (Bts. Kab Probolinggo/Situ bondo-Bts.Kab Situbondo/Banyuwangi) dan	2025-2029						

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
					Seksi III (Bts.Kab Situbondo/Banyuwangi-Ketapang)							
20	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Peningkatkan Akses dan Mengurangi Beban Lalu Lintas			Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	2020-2023					Keterpaduan infrastruktur dalam konektivitas	Perlu didukung dengan rekayasa lalu lintas agar arus pergerakan lancar dan pengembangan kawasan industri
21	SPAM Regional Umbulan	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan			Penyelesaian Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Seksi IV	2025-2029	Pembangunan Jaringan Perpipaan spam Kab. Gresik (NUWSP)	2021			Keterpaduan infrastruktur air baku dengan penyediaan air minum	Perlu didukung dengan pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan
22	SPAM Regional Mojolagres (Tahap I dan II)	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan					Pembangunan Jaringan Perpipaan untuk Percepatan spam Regional Umbulan Provinsi Jawa Timur	2022-2023			Keterpaduan infrastruktur air baku dengan penyediaan air minum	Perlu didukung dengan pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis BPIW, 2022



Bukit Teletubbies, KSPN Bromo-Tengger-Semeru



Pura Luhur Amertha Jati Pantal Balekambang, Kabupaten Malang



Kawasan Pertanian, Kabupaten Probolinggo

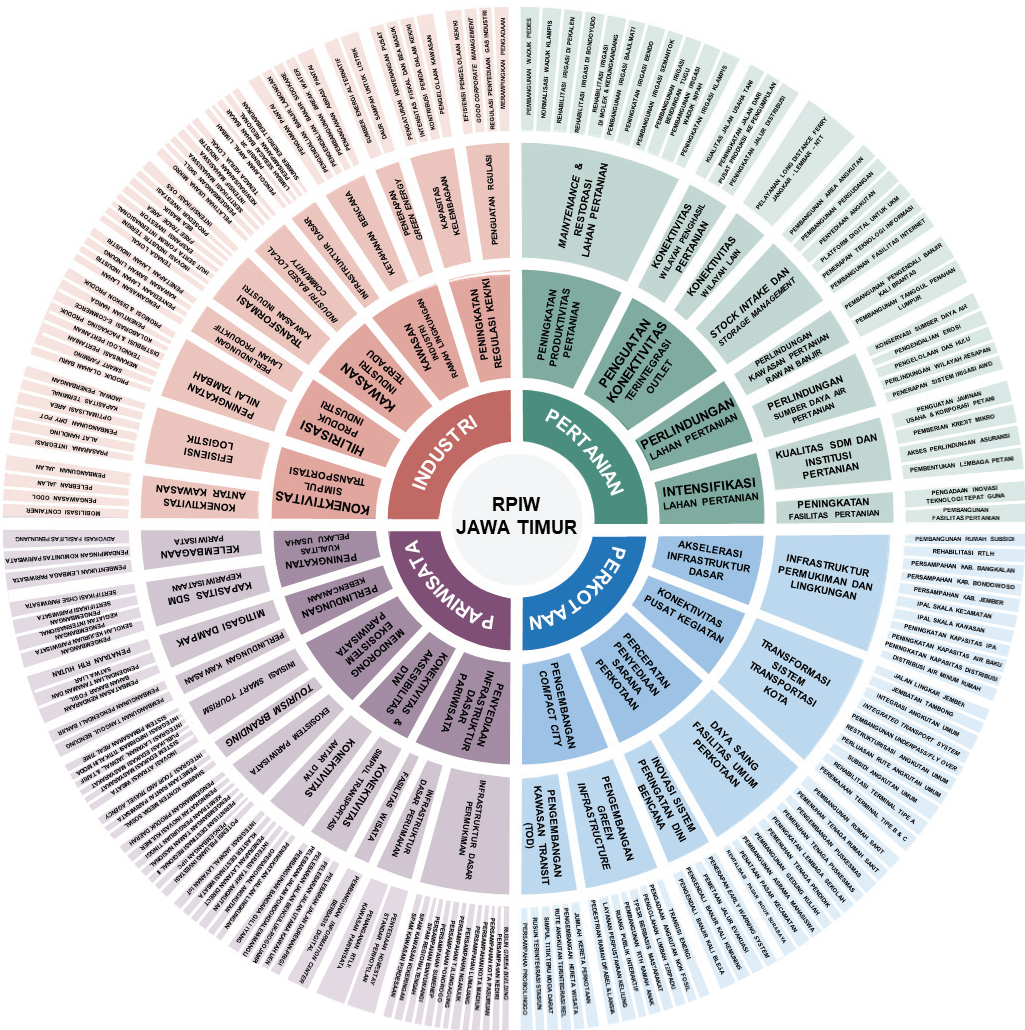
BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Rencana aksi pembangunan infrastruktur yang diturunkan dari *grand strategy* kedalam program pembangunan infrastruktur. Rencana aksi tersebut merupakan pendetailan dari program yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai *stakeholder*, serta dilaksanakan dalam kurun waktu hingga 2029. Rencana aksi pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR akan dijelaskan pada sub bab 8.1 dalam rangka mempermudah koordinasi internal dan integrasi penanganan kawasan prioritas. Rencana aksi terpadu infrastruktur PUPR dan Non-PUPR akan diuraikan pada sub bab 8.1.

Dalam rencana aksi yang telah dirumuskan, terdapat 4 fokus pengembangan yaitu industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan, yang dijabarkan dalam 18 *grand strategy* (fokus industri 5 *grand strategy*, fokus pertanian 4 *grand strategy*, fokus pariwisata 5 *grand strategy*, dan fokus kawasan perkotaan 4 *grand strategy*). Dari 18 *grand strategy* tersebut dirinci menjadi 37 program dan 247 rencana aksi (99 sektor PUPR dan 148 sektor Non PUPR). Ringkasan mengenai strategi, program, dan rencana aksi masing-masing fokus adalah sebagai berikut:

1. Fokus industri pengolahan, terdiri dari 5 *grand strategy*, 11 program, dan 53 rencana aksi (4 kegiatan sektor PUPR dan 49 non PUPR).
2. Fokus pertanian tanaman pangan terdiri dari 4 *grand strategy*, 8 program, dan 41 rencana aksi (19 kegiatan sektor PUPR dan 22 non PUPR).
3. Fokus pariwisata alam dan budaya unggulan, terdiri dari 5 *grand strategy*, 12 program, dan 68 rencana aksi (32 kegiatan sektor PUPR dan 36 non PUPR).
4. Fokus infrastruktur kawasan perkotaan, terdiri dari 4 *grand strategy*, 6 program, dan 85 rencana aksi (44 kegiatan sektor PUPR dan 41 non PUPR).



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 8.1 Rangkuman Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

Matriks rencana aksi pembangunan infrastruktur dibawah ini telah mencakup seluruh UNOR lingkup PUPR, yaitu SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan serta Perumahan dalam masing-masing kawasan prioritas berdasarkan fokus perencanaan

8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur SDA ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur SDA dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.1 Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06-BJSDA												
Sektor Sumber Daya Air (Industri Pengolahan)												
1	SDA	Bangunan pengaman pantai yang dibangun/ ditingkatkan Tuban - Jenu	GKS Plus	Kab. Tuban	Sepanjang pantai utara Tuban merupakan area rawan abrasi pantai. Empat kecamatan terparah banjir rob adalah Kecamatan Jenu, Kec. Tuban, Kec Tambakboyo, dan Kec Bancar, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter (Mei, 2022). Pada tahun 2021 telah disusun DED pembangunan tembok penahan gelombang di Kec. Jenu oleh BBWS Bengawan Solo. Pada Perpres 80/2019, program pembangunan tembok penahan gelombang laut di Tuban dikhuskan pada Kec. Jenu.	DED (2021)	Diprogramkan bertahap	26 km	1 Triliun	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sektor Sumber Daya Air (Pertanian Tanaman Pangan)												
2	SDA	Bendung irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Waduk Pedes	GKS Plus	Kab. Lamongan	Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong Lamongan merupakan kabupaten dengan LP2B terbesar di Jawa Timur mencapai 86 ribu Ha, namun terdapat 52 ribu Ha belum teririgasi teknis, salah satunya di Kecamatan Sambeng. Di kecamatan Sambeng terdapat total 4257 Ha LP2B yang belum teririgasi semua. Tercantum di Perpres 80/2019 berupa kegiatan Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong. Sumber kebutuhan volume SINFRA (Sistem Informasi Infrastruktur Provinsi Jawa Timur, 2021). Diperlukan reviu DED karena sudah dari 2012.	DED (2012)	Perlu adanya reviu desain pada DED	53.300.000 m3	847 Miliar	APBN	2028	2029
3	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang ditingkatkan Di Pekalen	KSPN B1S	Kab. Probolinggo	Peningkatan Jaringan Irigasi Di Pekalen. Terdapat LP2B yang belum teririgasi sebesar 37.256 Ha (50% dari total LP2B). Wilayah sungai Kab Probolinggo masuk dalam layanan WS provinsi yaitu WS Welang-Rejoso dan WS Pekalen-Sampean. Sumber air irigasi berasal dari embung dan air tanah. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kab Probolinggo adalah 7.820	DED (2017)	Diprogramkan bertahap Jaringan tersier belum tersambung Rehab jaringan irigasi dilakukan pada tahun 2025	23.378 Ha	55 Miliar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Milyar, 22% dari kontribusi BTS. • Kontribusi BTS sendiri mencapai Rp. 32.523,8 Milyar (19% Pertanian Jawa Timur). Produksi Padi di Probolinggo 196.516,11 Ton/Tahun, dan produktivitas 5,24 ton/Ha. D.I. Pekalen merupakan Kewenangan Pusat dengan luas Bakur: 5.186 Ha, Luas Potensial: 5.186 Ha, dan Luas Fungsional : 5.186 Ha. • Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Bondoyudo. Terdapat LP2B yang belum teririgasi sebesar 15.511 Ha (47% dari total LP2B). • Wilayah sungai Kab Lumajang masuk dalam layanan WS provinsi yaitu WS Bondoyudo-Bedadung • Sumber air irigasi berasal dari air tanah. • Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kab Lumajang adalah 7.250 Milyar, 22% dari kontribusi BTS. Produksi Padi di Lumajang 294.865 Ton/Tahun, dengan produktivitas padi 5,29 ton/ha. • Luas Di Bondoyudo IGT: 11.725 Ha.							
4	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Di Bondoyudo	KSPN BTS	Kab. Lumajang	• Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Bondoyudo. Terdapat LP2B yang belum teririgasi sebesar 15.511 Ha (47% dari total LP2B). • Wilayah sungai Kab Lumajang masuk dalam layanan WS provinsi yaitu WS Bondoyudo-Bedadung • Sumber air irigasi berasal dari air tanah. • Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kab Lumajang adalah 7.250 Milyar, 22% dari kontribusi BTS. Produksi Padi di Lumajang 294.865 Ton/Tahun, dengan produktivitas padi 5,29 ton/ha. • Luas Di Bondoyudo IGT: 11.725 Ha.	DED 2018; Dokling 2021	• Diprogramkan bertahap Jaringan tersambung	14.624 Ha	55 Milliar	APBN	2025	2028
5	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Di Molek	KSPN BTS	Kab. Malang	• Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Molek. Terdapat LP2B yang belum teririgasi sebesar 20.906 Ha (47% dari total LP2B). • Wilayah sungai Kab Malang masuk dalam	DED 2020 (Di Molek)		20.907 Ha	27,5 Milliar	APBN	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					layanan WS nasional yaitu WS Brantas, • Sumber air irigasi berasal dari Bendungan Sengguruh, Bendungan Karangates/Sutami, dan Bendungan Lahor. • Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kab Malang adalah 7.250 Milyar, 22% dari kontribusi BTS. • Produksi Padi di Lumajang 294.865 Ton/Tahun, dengan produktivitas padi 5,29 ton/ha • Luas Di Molek 2.384 Ha. • Rehabilitasi Di molek Kab. Malang.Kab. Malang.Jawa Timur:0,05 km:100 Hektar.F:SiSYC (Emon TA 2020).							
6	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Di Kedungkandang	KSPN BTS	Kab. Malang	Renabilitasidan Peningkatan Jaringan Irigasi Di Kedungkandang, Terdapat LP2B yang belum teririgasi sebesar 20.906 Ha (47% dari total LP2B). Wilayah sungai Kab Malang masuk dalam layanan WS nasional yaitu WS Brantas. • Sumber air irigasi berasal dari Bendungan Sengguruh, Bendungan Karangates/Sutami, dan Bendungan Lahor. • Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Kab Malang adalah 7.250 Milyar, 22% dari kontribusi BTS. • Produksi Padi di Lumajang 294.865 Ton/Tahun, dengan produktivitas padi 5,29 ton/ha.	Agar Dipersiapkan		20.907 Ha	27,5 Miliar	APBN	2026	2029
7	SDA	Pembangunan Bendungan Lesti III	Non-Kawasan	Kab. Malang	Kapasitas tampungan Bendungan Lesti III sebesar 7,55 juta m3.	DED Tersedia	Perlu diadakan kajian dan sinkronisasi	4270.000 m3	5 Triliun	Swasta/ KPBU	2028	2035

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Pembangunan Bendungan Lesti III mengurangi daerah banjir. Bendungan Lesti III menjadi bendungan multiguna karena berfungsi untuk supply air irigasi, PLTA, pengontrol sedimen. Luas lahan dengan kategori Sangat Kritis di Malang seluas 12.363 Ha. Kejadian banjir di Kab. Malang di tahun 2017 sebanyak 2 kali dengan total area terendam sebesar 13.698 m2. Banjir bandang, tanah longsor, beberapa rumah hanyut, genangan 1-1,5 m merendam 70 rumah penduduk Tahun 2015. Banjir, genangan 50 cm merendam 231 rumah penduduk, jalan rusak Tahun 2015.		dengan DJSDA untuk potensi SDA					
8	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan DI Bajulmati	KSPN Ijen	Kab Banyuwangi	Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi Bajulmati Bendungan Bajulmati berada di WS provinsi Baru-Bajulmati, sudah terbangun tahun 2016 dengan kapasitas total sebesar 10 juta m3 yang diperuntukkan untuk air baku domestik 746 L/detik; air baku industri 495 L/detik; irigasi 1800 ha; dan mini hydro power 340 kw. Saat ini belum terpakai untuk industri dan irigasi. Disekitar bendungan bajulmati belum terdapat daerah irigasi pusat, hanya daerah irigasi provinsi dan kabupaten. LP2B Banyuwangi 49.404 ha, LP2B yang belum	DED 2017 Dokling 2019, Larap 2019, Tanah 2019-2022	Diperlukan pengadaan tanah untuk jaringan tersier	12.906 Ha	14,45 Miliar	APBN/ APBD	2025	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					teririgasi 12.906 ha (26%). Pada tahun 2021, produksi padi Banyuwangi sebesar 462.126 ton (4,6% Jatim- tertinggi ke 6). produktivitas padi sebesar 5,43 Ton/ha (Nasional 5,11 ton/ha). LP2B disekitar Bendungan Bajulmati sebesar 32 ribu Ha, dengan LP2B yang belum teririgasi 12.500 Ha.							
9	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Di Bendo	Selingkar Willis	Kab. Ponorogo	Peningkatan sistem jaringan irigasi Bendo. Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo yang telah diresmikan dan saat ini masih dalam tahap uji sertifikasi layak fungsi dan inpounding yang diharapkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2023. Bendungan berfungsi sebagai penyedia air baku untuk air minum sebesar 370 lt/dt, pengendali banjir 117,4 m3/dt, dan mengairi lahan pertanian seluas 7.800 Ha. Produksi padi Kab. Ponorogo mencapai 416.103,97 ton (4,62% Jatim-tertinggi ke 9). Produktivitas pertanian Kab Ponorogo tinggi yaitu 5,84 Ton/Ha, dibandingkan produktivitas nasional 5,2 Ton/Ha. LP2B Kabupaten Ponorogo seluas 33.156,06 Ha (24,17% luas wilayah), dengan hanya 49,29% yang terlayani irigasi teknis. Daerah irigasi merupakan Kewenangan Kabupaten Ponorogo. Di Bendo sudah dibangun 50%	DED 2017, Dokling 2018, Tidak perlu LARAP dan pembebasan lahan	Diprogramkan bertahap	16.814 Ha	49,11 Miliar	APBN	2025	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					menggunakan SBSN 2024.							
10	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan DI Waduk Bening	Selingkar Willis	Kab. Nganjuk	- Pembangunan jaringan irigasi Semantok (DI Waduk Bening). - Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk saat ini sedang dalam tahap impounding. Kapasitas Semantok mencapai 32,67 juta m³, diharapkan dapat mengairi kawasan pertanian di Kab. Nganjuk seluas 1.900 ha, menyediakan air baku 312 lt/dt, dan mereduksi banjir 30%. - LP2B di Nganjuk, mencapai 40.476,34 Ha (33,05% luas wilayah), dan masih terdapat 26% sawah belum beririgasi teknis. - Produksi padi Nganjuk sebesar 437.621,33 ton (4,42% Jatim tertinggi ke 8). - Produktivitas pertanian di Kab Nganjuk 6,2 Ton/Ha, dibandingkan produktivitas nasional 5,2 Ton/Ha.	DED 2022	Rehab tersier dapat diprogramkan di 2027	10.512 Ha	8 Miliar	APBN	2025	2028
11	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Tugu	Selingkar Willis	Kab. Trenggalek	- Pembangunan jaringan irigasi Tugu. - Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek sudah selesai dibangun pada tahun 2021. - Kapasitas tampungan Bendungan Tugu mencapai 12 juta m³, diharapkan dapat mengairi kawasan pertanian di Kab. Trenggalek seluas 1.250 ha, menyediakan air baku 400 lt/dt, dan mereduksi banjir 76.210 lt/dt. - LP2B di Trenggalek mencapai 9.425,6 Ha (7,47% luas wilayah), dan	SID 2018, DED 2022	Diprogramkan bertahap	3.461 Ha	8 Miliar	APBN/APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					masin terdapat 36,7% sawah belum beririgasi teknis. • Produksi padi Trenggalek sebesar 119.110,07 ton (tinggi ke 26). • Produktivitas pertanian di Kab Trenggalek adalah 5,51 Ton/Ha, dibandingkan produktivitas nasional 5,2 Ton/Ha.							
12	SDA	Pembangunan Bendungan Kampak	Non-Kawasan	Kab. Trenggalek	• Pada Kecamatan mengalami banjir akibat luapan dari Kali Tawing, Bagong dan Ngasinan • Genangan 0,6 m -1,5 m • merendam rumah penduduk, 3 jembatan jebol, 1 SD roboh. • Wilayah Trenggalek mengalami kekeringan saat kemarau. • Adanya genangan tersebar di Kab. Trenggalek karena meluapnya anak Sungai Brantas. • Luas lahan dengan kategori Sangat Kritis di Trenggalek seluas 12.349 Ha. • Kejadian banjir di Kab. Trenggalek terbanyak di tahun 2016 sebanyak 10 kali dengan total area terendam 5.736 m2. • Trenggalek mengalami degradasi lingkungan akibat kerusakan DAS penggunaan lahan yang curam, kebakaran hutan, dan penebangan pohon secara liar.	DED Tersedia	Perlu dilakukan sinkronisasi dengan DUSDA untuk identifikasi potensi SDA	5.670.000 m3	5 Triliun	Swasta/ KPBU	2028	2033
13	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Nipah	Madura dan Kepulauan	Kec Banyuwates, Kec Ketapang (Kab Sampang)	• Pembangunan jaringan irigasi Nipah • Kapasitas tampungan efektif Waduk Nipah sebesar 165 juta m3 dengan rencana luas	DED 2007, Dokling 2014	Masih memerlukan pengadaaan lahan	6.601 Ha	8 Miliar	APBN	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					layanan 1150 Ha. Diharapkan dapat mengairi lahan pertanian di Kec. Banyuates dan Kec. Ketapang. Luas LP2B di dua kecamatan tersebut mencapai 6.867 ha. LP2B yang beririgasi baru mencapai 286 ha.							
14	SDA	Bendung irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Waduk Klampis	Madura dan Kepulauan	Kec. Klampis, Kabupaten Sampang	Normalisasi Waduk Klampis. Untuk sumber air baku SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Waduk Klampis telah dibangun sejak 1965 dan telah mengalami sedimentasi, sehingga terjadi penurunan fungsi sebesar 40% dari rencana awal kapasitas daya tampung 10,25 juta m ³ . Akibat sedimentasi tersebut, saat ini luas layannya hanya 2.603 Ha (semula mengaliri 4 kecamatan (Kec. Torjun, Kec. Jrengik, Kec. Sampang, Kec. Pangarengan) menjadi 2 kecamatan. Terdapat di Perpres 80/2019 nama kegiatan Normalisasi Waduk Klampis. Studi Amdal dan larap Normalisasi Waduk Klampis di Kabupaten Sampang oleh LPSE Prov. Jatim (2021). Volume tampungan normal Waduk Klampis sebesar 10,25 juta m ³ namun saat ini sudah mengalami penumpukan sedimentasi sehingga volume tampungan Waduk Klampis saat ini	Agar Dipersiapkan	Dikelola Pemprov Jawa Timur	4.040.000 m ³	35 Miliar	APBD	2025	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					hanya 6,21 juta m ³ maka dari itu untuk mengembalikan volume Waduk Klampis maka perlu pengerukan sebesar 4,04 juta m ³ . Unor SDA: Bendungan Klampis dikelola Pemprov Jawa Timur.							
15	SDA	Jaringan irigasi permukaan/ rawa yang dibangun/ ditingkatkan Jaringan Irigasi Klampis	Madura dan Kepulauan	Kec Sampang, Kec Pangarengan (Kab. Sampang)	Peningkatan irigasi LP2B Kab. Sampang merupakan terbesar di Madura (45.093 Ha), namun daerah layanan irigasi teknis hanya sebesar 8,3%. Waduk Klampis diharapkan dapat mengairi LP2B di Kec. Jrengik, Torjun, Sampang, Pangarengan, namun hanya Kec. Jrengik dan Torjun yang sudah memiliki irigasi teknis dengan luasan 7.908 Ha, sedangkan di Kec. Sampang dan Pangarengan belum terdapat irigasi teknis.	Agar Dipersiapkan	Kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	30.318 Ha	50 Miliar	DAK/APBD	2027	2029
16	SDA	Pembangunan SPAB Bendungan Bagong	Selinkar Willis	Kab. Trenggalek	Menyediakan kebutuhan air irigasi untuk kawasan Selinkar Willis dan sekitarnya dimana padi dan palawija yang membutuhkan sumber air irigasi. Berdasarkan analisis spasial, LP2B yang belum teririgasi sebesar 46% atau 132.618 Ha di tahun 2020. Design teknis dapat menyediakan air baku : 153 liter/dt. Mendukung Bendungan Bagong dalam penyediaan air minum.	Agar Dipersiapkan	Dalam proses pengadaan tanah dan mempersiapkan RC	1 Unit	4 Miliar	Swasta/ KPBU	2025	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sektor Sumber Daya Air (Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan)												
17	SDA	tanggul bendung yang dibangun/ ditingkatkan Kali Rejati, Gidlik, dan Muju	KSPN BTS	Kali Rejati, Gidlik, Muju (Kab. Lumajang)	Tanggul Bendung yang dibangun / ditingkatkan sebanyak 3 unit di Kali Rejati, Gidlik, dan Muju. Kab. Lumajang merupakan kawasan rawan bencana yang memiliki jalur aliran lahar dan material vulkanik dari Gunung Semeru. Beberapa sabo dam di Lumajang sudah rusak dan tidak bisa beroperasi. Berdasarkan data BNPB, Kali Rejati, Gidlik, dan Muju terdampak bencana lahar Gn. Semeru. Berdasarkan surat dari Balai Teknik Sabo Dirjen SDA No PA.0103- Bt030/43 tanggal 17 Maret 2021, diperlukan penanganan kerusakan bangunan, yaitu: Cerdam 5 Kobokan, Pelintas Dam Sumbersari, Konsolidasi Dam 2 Leprak (hilir gladak perak), Tanggul di Hulu Diversion Dam 2 Leprak, dan Diversion Dam Jugosari. Erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 akibat kerusakan sabdodam menyebabkan banjir lahar dingin di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronolowo yang memakan korban meninggal dunia 14 orang, luka-luka 57 orang, dan 2 Jembatan putus. Jembatan Kali Gidlik li yang menghubungkan dengan Kabupaten Malang. Berdasarkan e-monitoring TA 2023, terdapat	DED (2023 JICA), Dokling (2024-2025)		3 Unit	219 Miliar	Loan JICA	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					kegiatan penggantian Jembatan Kali Gidlik II dan Penanganan Longsor Lumajang-Turen. Berdasarkan RPSDA akan membangun sabodam di masing-masing kali sehingga diperlukan 3 unit sabodam.							
18	SDA	Bangunan pendendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Kedunglarangan	KSPN BTS	Kab. Pasuruan	Pada tahun 2020, banjir di Pasuruan menyebabkan delapan kecamatan terdampak. Ada empat sungai besar yang menyebabkan banjir di Kabupaten Pasuruan, yakni: Kali Wraati, Kali Kedunglarangan, Kali Welang, Kali Rejoso, dan Laweyan. Kali Kedunglarangan yang merupakan anak sungai Brantas menjadi penyebab terbesar banjir di Kab. Pasuruan. Resiko banjir Kali Kedunglarangan mencapai 399 Ha terdiri dari 3 kecamatan yaitu Bangli, Beji, dan Rembang. Kejadian banjir akibat luapan Kedunglarangan pada tahun 2020 berdampak pada 597 ribu jiwa penduduk yang tersebar di 21 kecamatan terpapar bencana banjir. Pada Februari 2021 luapan Sungai Kedunglarangan menyebabkan tergenangnya 6 kelurahan. Sudah dibangun tanggul kanan kiri sepanjang 8 km namun akibat banjir 2021 mengalami jebol Normalisasi Sungai dari lebar 30 m menjadi 60 m.	DED 2013, Dokling 2017, LARAP 2020, dan Pembebasan Lahan dalam Proses PKS antara Pemda Sidoarjo, Pemda Pasuruan, Pemda Provinsi Jatim., dan Pemerintah Pusat (Dibutuhkan Review DED)		8 km	565,52 Miliar	APBN/ APBD	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sektor Sumber Daya Air (Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan)												
19	SDA	Bangunan pengendalian banjir yang dibangun/ ditingkatkan Kali Kemuning	Madura dan Kepulauan	Kab. Sampang	Hulu Kali Kemuning merupakan pertanian lahan kering. Hal ini menyebabkan Kali Kemuning terus mengalami sedimentasi. BBWS Brantas sudah melakukan penanganan pada TA. 2015-2018 melalui MYC dan TA. 2021 sepanjang 3 km, namun masih perlu penanganan di hulu sungai. Jika tidak ada penanganan di hulu sungai Kali Kemuning maka akan terus terjadi sedimentasi dan penyempitan Kali Kemuning. Debit banjir Kali Kemuning mencapai 423 m ³ /detik, sementara daya tampung sungai hanya 120-130 m ³ /detik. Untuk itu diperlukan penanganan sedimentasi Kali Kemuning. Dibutuhkan pembangunan 3 unit pompa untuk melakukan pengendalian banjir di Kali Kemuning.	Agar Dipersiapkan	MYC telah dilakukan pada tahun 2015-2018. Program akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	3 Unit	1,3 Miliar	DAK/APBD	2026	2027
20	SDA	Bangunan banjir yang dibangun/ ditingkatkan Kali Blega	Madura dan Kepulauan	Kab. Bangkalan	Hulu Kali Blega merupakan pertanian lahan kering. Hal ini menyebabkan Kali Blega terus mengalami sedimentasi. Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur telah melakukan normalisasi Kali Blega sepanjang 300 m pada TA. 2021 (Panjang sungai 18 km). Jika tidak ada penanganan di hulu sungai Kali Blega maka	Agar Dipersiapkan	Perlu dilakukan pembahasan dengan PHD terkait sumber pendanaan DAK	300 m	2 Miliar	DAK/APBD	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					akan terus terjadi. DAK/ APBD untuk menangani sedimentasi dan penyempitan Kali Blega. Banjir juga menggenangi Pasar Blega dan jalan yang menyebabkan kemacetan berkilo-kilo meter (tahun 2021). Genangan Banjir Blega mencapai ketinggian 20-30 cm (Januari 2022) lama genangan 5 jam.							
21	SDA	Bangunan pendendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Lamong	GKS Plus	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya	- Penuntasan Banjir Kali Lamong - Anak Sungai Bengawan Solo (Kali Lamong) sering menyebabkan banjir di Kab Gresik (luas terdampak 882 Ha) dan Kota Surabaya (luas terdampak 397 Ha). Banjir tersebut melanda Kawasan Industri di Surabaya (Kl Surabaya Industrial Estate Rungkut: 51 Ha, 5.100 tenaga kerja) dan akses jalan menuju kawasan tersebut yang tergenang hingga 50 cm (Maret, 2022). Banjir juga menggenangi Maspion Industrial Estate (okupansi 407 Ha, 40.700 tenaga kerja) dan Kl Gresik (okupansi 120 Ha, 12.000 tenaga kerja), serta akses KKK Jilpe setinggi 15-20 cm selama 3 hari (Juni, 2022). - Program pendendalian banjir Kali Lamong telah dilaksanakan sejak TA 2015 sampai 2023. Lahan telah disiapkan Pemda. TA 2024 telah diajukan melalui skema SBSN, sepanjang 500 meter (150M) di Kab Gresik. - Berdasarkan e-monitoring, terdapat	• Persiapan Lahan: Studi Larap Kali Lamong (TA. 2020) oleh Dinas Pertanahan Kab. Gresik; DED: Review DD Kali Lamong (TA. 2012); Dokling: (UKL - UPL) Normalisasi Kali Lamong (TA. 2019) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Gresik.	Kegiatan lanjutan	16 Km	72 Miliar	APBN	2025	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					pekerjaan pengendalian banjir Kali Lamong 0,2 km (2023) dan 0,05 km (2024) di Kab. Gresik.							
22	SDA	Bangunan pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan Sungai Pucang	GKS Plus	Kab. Sidoarjo	- Sidoarjo merupakan kota delta yang merupakan hilir dari ratusan sungai dengan komoditas unggulannya merupakan sektor perikanan. Kontribusi perikanan Sidoarjo mencapai 69% PDRB Pertanian Sidoarjo dan 5,53% PDRB perikanan Jatim. Banjir rob di pesisir Sidoarjo berdampak pada ribuan hektar tambak ikan. Perpres 80/2019 mencantumkan kegiatan Pembangunan Dam (muara laut) Sungai Sidokare dan Pucang, tetapi berdasarkan hasil studi BBWS Brantas kegiatan yang tepat adalah pengendalian banjir. - Penanganan TA 2021: SID Dam Muara Kali Peketingan, Kali pucang dan Kali sidokare. - Berdasarkan jurnal teknik alternatif pengendalian banjir di Sungai Sidokare dan Pucang meliputi kombinasi saluran drainase eksisting dan kolam tampungan. - Berdasarkan BBWS Brantas (Jan 2024), rencana penanganan meliputi (1) Peningkatan kapasitas tampung Kali Pucang dan Sidokare, (2) Proteksi tebing Kali Pucang dan Sidokare, (3) Rencana Bozem dan retensi pompa Pucang dan Sidokare.	DED (2023) Penyiapan Lahan (2024)	Diprogramkan bertahap	20 m	85 Miliar	APBN	2025	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Rencana kolam retensi luas 3 Ha dengan tampungan 114.000 m3 dan kapasitas pompa yang dibutuhkan 36 m3/detik. • Direncanakan Pucang (2025)							
23	SDA	Bangunan pengendalian banjir yang dibangun/ ditingkatkan Sungai Sidokare	GKS Plus	Kab. Sidoarjo	• Sidoarjo merupakan kota delta yang merupakan hilir dari ratusan sungai dengan komoditas unggulannya merupakan sektor perikanan. Kontribusi perikanan Sidoarjo mencapai 69% PDRB Pertanian Sidoarjo dan 5,53% PDRB perikanan Jatim. Banjir rob di pesisir Sidoarjo berdampak pada ribuan hektar tambak ikan. Perpres 80/2019 mencantumkan kegiatan Pembangunan Dam (muara laut) Sungai Sidokare dan Pucang, tetapi berdasarkan hasil studi BBWS Brantas kegiatan yang tepat adalah pengendalian banjir. • Rencana pekerjaan adalah pelebaran sungai di Sidokare yang membutuhkan lahan 6 Ha. • Penanganan TA 2021: SID Dam Muara Kali Peketingan, Kali pucang dan Kali sidokare. • Berdasarkan Jurnal tenik, Daerah Tangkapan Air (DTA) Rumah Pompa Sidokare menggunakan kombinasi saluran drainase eksisting, kolam tampungan dan pompa banjir eksisting, sedangkan DTA, Pintu Air Jl. Diponegoro dilakukan	• DED (2023) Penyiplan Lahan (2024)	Diprogramkan bertahap	20 m	85 Miliar	APBN	2025	2026

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dengan kombinasi saluran drainase eksisting, saluran tersier baru dan pompa banjir baru. Sungai Sidokare perlu dinormalisasi sedalam 3 km dan pelebaran 15-20 m. Berdasarkan BBWS Brantas (Jan 2024), rencana penanganan meliputi (1) Peningkatan kapasitas tampung Kali Pucang dan Sidokare. (2) Proteksi tebing Kali Pucang dan Sidokare. (3) Rencana Bozem dan retensi pompa Pucang dan Sidokare. Rencana kolam retensi luas 3 Ha dengan tampungan 180.000 m3 dan kapasitas pompa yang dibutuhkan 48 m3/detik. Direncanakan Sidokare (2026)							
24	SDA	Bangunan pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Brantas	GKS Plus	Kab. Jombang	Resiko banjir Kali Brantas di Jombang adalah yang terluas di wilayah GKS+, yaitu mencapai 183 Ha. Luapan Kali Brantas di Jombang membentangi 13 desa di 5 kecamatan (tahun 2019). Kali Guntung yang merupakan bagian dari DAS Brantas Hilir yang sering menyebabkan banjir. Pada Maret 2022, luapan Kali Guntung menyebabkan sedikinya 3.444 rumah dan 702 ha sawah terendam, dengan jumlah warga terdampak mencapai 12.677 jiwa Penanganan TA 2022: Rehabilitasi Tanggul Kali Brantas Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.	• DED: Tersedia (TA, < 2020); • Dokling: Tersedia (TA, < 2020).	Diprogramkan bertahap	10 Km	72 Miliar	APBN	2025	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jawa Timur, Kabupaten Jombang; 0,2 km; 100 hektar; F; K; SYC • Prioritas penanganan di bagian hilir Kali Brantas yaitu Kali Guntung, Kali Pancir, dan Kali Catak dengan pembangunan proteksi tebing sepanjang 10 km dan pembuatan cekdam. • Fokus 2025 penanganan di Sistem Kali Guntung yang disebabkan oleh sedimentasi yang disebabkan aliran deras di daerah hulu. Bentuk penanganan penguatan tebing (lanjutan) dan Bozem.							

8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur jalan dan jembatan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing - masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.2 Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DJBM												
Sektor Bina Marga (Pariwisata Alam dan Budaya Unggulan)												
25	BM	Perebaran jalan menambah lajur ruas Jalan Durenan – Prigi	Selingskar Wilis	Kab. Trenggalek	• Lebar eksisting 5,55 m. • Kecepatan jam puncak 28,10 km/jam, VCR 0,41.	Agar Dipersiapkan	Program dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah	3,5 km	365,4 Miliar	DAK / APBD / PHJD / APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Akses pansela Irenggalek dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. - Pelabuhan Prigi merupakan penghasil ikan dengan nilai ekonomi tinggi seperti ikan tongkol lisong, lemuru, dan layang deles. - Dengan dibangunnya Pansela dan keberadaan PPN Prigi, diprediksi akan terjadi bangkitan kegiatan di sekitar jalan nasional. - Tercantum pada Perpres 80/2019. - Akses Kawah Ijen merupakan jalur utama wisatawan dari arah Banyuwangi menuju Pintu Paltuding tepatnya di geosite EreK-Erek Geoforest Kecamatan Licin yang merupakan wilayah rawan longsor sepanjang 1 Km. - Jalur ini merupakan kewenangan kabupaten yang terhubung dengan jalan Nasional Banyuwangi-Nasional Banyuwangi-Situbondo di Kecamatan Banyuwangi. - Lebar jalan 5 m, kecepatan < 35 km/jam, kondisi berupa tikungan dengan lereng agak curam sekitar 15-20°. - Pergerakan tertinggi biasanya terjadi pada dini hari. - Tahun 2029 diperkirakan volume kendaraan meningkat dengan bertambahnya wisatawan Selingkar Ijen sebesar kurang lebih 5 juta wisatawan dari arah Banyuwangi.	Agar Dipersiapkan	Pada rencana umum jaringan jalan nasional, terdapat rencana upgrade untuk Jalan Akses Ijen-Baluran dengan timeline 2035-2039.	28 km	1,3 Miliar	Swasta/ KPBU	2029	2030
26	BM	Pelebaran jalan menambah lajur akses utama Kawah Ijen	Selingkar Ijen	Kab. Banyuwangi								
27	BM	Pelebaran jalan menambah lajur ruas Jalan Benculuk – Rogojampi	Selingkar Ijen	Kab. Banyuwangi	Jalan merupakan jalan kolektor kelas I. Lebar jalan eksisting 6 meter (dari standar jalan 7 m berdasarkan Lamplan Peraturan Menteri PU No 19/PRT/M/2011.	Agar Dipersiapkan	Diprogramkan pelebaran menuju standar secara bertahap	18 km	194 Miliar	APBN	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Terjadi percampuran arus lalu lintas di ruas ini yaitu: - Jalur regional menghubungkan PKW Jember dan PKW Banyuwangi; - Jalur logistik utama dari arah Jember menuju Bandara Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang; dan - Relevant road jalur selatan kawasan Ijen - Lebar jalan masih 6 m (dari standar 9 m berdasarkan PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan), panjang jalan 17 km, kecepatan 30 km/jam, VCR>0,8. - Pada tahun 2029, diperkirakan akan terjadi peningkatan LHRT sebesar 9.305 smp/hari. - Terdapat di Perpres 80/2019 kegiatan Pelebaran dan pembangunan jalan nasional dari Rogojampi sampai Jember.							
28	BM	Pelebaran Jalan jalan menambah lajur ruas Jalan Pondokdalem – Tanggul – Gambirono – Rambipuji – Mangli	Selingkar Ijen	Jember	- Ruas jalan merupakan ruas jalan kolektor kelas I. Terjadi percampuran arus lalu lintas di ruas ini yaitu: - Jalur regional menghubungkan PKL Lumajang dan PKW Jember; - Jalur logistik utama dari arah Lumajang menuju Bandara Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang; dan - Relevant road jalur selatan kawasan Ijen. - Kemacetan di ruas ini terjadi karena banyaknya hambatan samping memasuki perkotaan Jember. - Perpres 80/2019 (Pelebaran dan pembangunan jalan	Agar Dipersiapkan	- Penanganan preservasi jalan dan jembatan menyesuaikan dengan kondisi eksisting yang akan di <i>exercise</i> melalui IRMS v.3 - Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kemacetan Pelebaran jalan di kawasan perkotaan harus mempertimbangkan ketersediaan lahan	33 Km	355,88 Miliar	APBN	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Blaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	BM	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Lumajang	Bromo Tengger Semeru	Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang	nasional dari Rogolampi sampai Jember). - Meningkatkan konektivitas menuju kawasan prioritas BTS terutama akses menuju Kab. Lumajang. - Dengan demikian dari Bandara Juanda Sidoarjo hingga ke Lumajang terhubung dengan tol. - Meningkatkan perekonomian di Lumajang terutama sektor pariwisata dan pertanian. - Mengurangi kemacetan panjang dan rawan kecelakaan terutama di Jalan Nasional Rute 25.	Agar Dipersiapkan	Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH dengan range pengerjaan tahun 2025 - 2029	32 km	4,7 Triliun	Swasta/ KPBU	2026	2028
30	BM	Pembangunan Jalan Tol Malang- Kebanjen	Bromo Tengger Semeru	Kab. Malang	- Meningkat perekonomian dan mempermudah akses Malang-Kebanjen. - Mempercepat pemerataan ekonomi dari Kota Malang menuju Kab. Malang. - Mempermudah akses menuju destinasi-destinasi wisata di Pantai Selatan. - Pelaksanaan pembebasan lahan akan dilakukan pada tahun 2025 hingga 2026.	Agar Dipersiapkan	Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH dengan range pengerjaan tahun 2025 - 2029	27,35 km	5,6 Triliun	Swasta/ KPBU	2025	2028
31	BM	Pembangunan jalan akses Pansela Trenggalek- Banyuwangi	Selingkar Willis, BTS, dan Selingkar Ijen	Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi	- Panjang total Pansela Jatim 628,24 km - Konstruksi selesai s/d Desember 2024 sepanjang 389,49 km, sehingga sisa penanganan untuk 2025 sepanjang 238,75 km. - Memperlancar arus perekonomian barang jasa dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata khususnya di sepanjang Pantai Selatan - Mengurangi kesenjangan perekonomian antara wilayah Pantura dan Pansela - Akses alternatif saat lebaran - Jalan akses pansela yaitu (1) Pacitan-Blitar; (2) Malang-	Tersedia	Diten Bina Marga akan melaksanakan penanaman jaringan jalan di Pansela Jawa secara bertahap sesuai dengan timeline Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 (Kepmen PUPR 367/KPTS/M/2023)	238,75 km	8,4 Triliun	Swasta/ KPBU	2025	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Blaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Lumajang; (3) Jember- Banyuwangi Kegiatan TA 2025 berupa jalan yang termasuk dalam TRSS Phase II dan RC Preparation							
Sektor Bina Marga (Perkotaan)												
32	BIM	Pembangunan Jalan Lingkar Jember	Selingkar Ijen	Kab. Jember	- Terdapat percampuran arus lalu lintas di jalan nasional yang melewati perkotaan Jember yang menyebabkan kemacetan. - Pada tahun 2029 diperkirakan akan terjadi peningkatan LHRT sebesar 13.897 smp/hari - Diarahkan pembangunan jalan lingkar, sehingga sebagian arus (regional dan logistik) dapat melalui jalan lingkar ini. - Masuk dalam Rencum 2035. Telah didorong penyusunan FS TA 2023. - Bertujuan untuk konektivitas lingkar kota di Kab. Jember. - Telah terdapat Jalan Lingkar Jember eksisting sepanjang 13,78 km (jalan daerah) - Sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 (Kepmen PUJR 367/KPTS/M/2023). - Peningkatan Jalan Lingkar Kota Jember dilakukan pada periode 2030-2034 - Lingkar Jember dibangun karena jalan dalam kota sudah tidak dapat dikembangkan (VCR tinggi 0,95) karena hambatan sampling (on site parking)	Agar Dipersiapkan		13,78 km	600 Miliar	Swasta/KPBU	2029	2030

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
33	BM	Pembangunan Jembatan Tambong	4 Selingkar Ijen	5 Kab. Banyuwangi	6 - Jembatan Tambong berada di ruas jalan nasional Rogolampi-BTS, Kota Banyuwangi. - Terjadi bottleneck di jembatan ini dikarenakan jalan utamanya sudah 9 meter (4/2 UD) sementara lebar jembatan 7 meter (2/2 UD), sehingga menyebabkan kemacetan. - Terletak di Jalan nasional Rogolampi - Bts. Kota Banyuwangi, yang memiliki VCR: 0,426 (2023).	7 Agar Dipersiapkan	8 Jembatan terletak di Jalan Nasional Rogolampi - Bts. Kota Banyuwangi, yang memiliki VCR: 0,426 (2023).	9 20 m	10 8 Miliar	11 APBN	12 2029	13 2030
34	BM	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo- Banyuwangi	4 Selingkar Ijen	5 Kab. Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi	6 - Membantu pengembangan aktivitas pariwisata. - Melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. - Pembebasan Lahan - Pengadaan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi I dan II (e-monitoring TA 2023 dan 2024). - Konstruksi dilakukan dalam 2 Tahap. Tahap 1 Gending - Besuki sepanjang 49,7 Km (Selesai 2024). Tahap II Besuki - Banyuwangi sepanjang 126,72 Km. - Kegiatan ini untuk Tahap II. - Total nilai investasi 21,07 Triliun.	7 Agar Dipersiapkan	8 - Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH dengan range pengerjaan tahun 2020 - 2029 - Progres lahan hanya seksi 1.1 yang sudah 100%. Seksi 4-7 masih 0% (target >2024) - Seksi 1.1 Gending - Suko, seksi 1.2 Suko - Kraksaan, seksi 2 Kraksaan - Paiton ditargetkan selesai Q3 2024. - Seksi 3.1 Paiton - Banyuwangi dan seksi 3.2 Banyuwangi - Besuki ditargetkan selesai Q4 2024.	9 126,72 Km km	10 15,34 Triliun	11 Swasta/ KPBU	12 2025	13 2027
35	BM	Pembangunan jalan akses exit Tol Probawangi ke pintu gerbang Pelabuhan Jangkar	4 Selingkar Ijen	5 Kab. Situbondo	6 - Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan simpul-simpul transportasi (bandara dan pelabuhan dengan pusat-pusat perkotaan). - Membuka akses dari tol Probawangi ke perkotaan Situbondo. - Berdasarkan Kepmenhub 432/2017, Pelabuhan Jangkar memiliki fungsi sebagai pelabuhan pengumpan lokal.	7 Agar Dipersiapkan	8 Saat ini DJP sedang menyusun kajian/stud pendahuluan untuk penangan jalan akses exit tol.	9 11,1 km	10 40 Miliar	11 Swasta/KPBU	12 2028	13 2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Sedangkan, berdasarkan RTRWN, Jalan nasional (dengan fungsi JAP/ JKP-1) menghubungkan PKN/ PKW/ Kws. Prioritas dengan pelabuhan utama/pengumpul/penyeberangan kelas I. Sehingga, pelaksanaannya melalui swasta karena tidak sesuai dengan kriteria.							
36	BM	Pembangunan Jalan dari exit Tol Probowangi ke Bandara Banyuwangi	Selengkap lengkap	Kab. Banyuwangi	• Meningkatkan konektivitas yang menghubungkan simpul-simpul transportasi (bandara dan pelabuhan dengan pusat-pusat perkotaan). • Membuka akses dari tol Probowangi ke perkotaan Banyuwangi. • Sebagai jalur logistik, industri, dan pertanian. • Berdasarkan Kepmenhub 432/2017, Pelabuhan Jangkar memiliki fungsi sebagai pelabuhan pengumpan lokal. Sedangkan, berdasarkan RTRWN, Jalan nasional (dengan fungsi JAP/ JKP-1) menghubungkan PKN/ PKW/ Kws. Prioritas dengan pelabuhan utama/pengumpul/penyeberangan kelas I. Sehingga, pelaksanaannya melalui swasta karena tidak sesuai dengan kriteria.	Agar Dipersiapkan	• Saat ini DIPA sedang menyusun kajian/stud pendahuluan untuk penanganan jalan akses exit tol	7 km	3 Miliar	Swasta/KPBU	2028	2029
37	BM	Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Kediri - Tulungagung	Selengkap Wilis	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Tulungagung	• Meningkatkan konektivitas jalur Tengah Jawa Timur menuju PKW Kediri yang juga merupakan kawasan industri hasil pertanian. • Menghubungkan antara Bandara Kediri dengan pusat-pusat pertumbuhan lain di Jawa Timur.	Agar Dipersiapkan	Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH, yaitu Kertosono - Kediri (20,30 km) dengan range pengerjaan tahun 2020 - 2024 dan Kediri - Tulungagung (45 km) dengan range pengerjaan 2020-2029	21 km	7,4 Triliun	Swasta/ KPBU	2027	2029
38	BM	Pengembangan n Jalan Tol Bandara	Gerbang Kertosusila Plus	Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	• Sesuai Rencum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 dan PERPRES 80/2019.	Agar Dipersiapkan	Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH	23 km	6,74 Triliun	Swasta/KPBU	2026	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	Juanda – Tanjung Perak (SERR)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Peningkatan mobilitas barang dan penumpang dan memecah beban lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda. - Meningkatkan akses dari dan menuju Jembatan Suramadu - Merupakan Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya yang akan terhubung dengan Trans Jawa.		dengan panjang total sepanjang 23 Km dan range pengerjaan tahun 2025 - 2029					
39	BM	Pengembangan n Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak	Gerbang Kertosusila Plus	Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	- Sesuai Rencum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040 dan PERPRES 80/2019. - Peningkatan akses barang dan memecah beban lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Perak. - Merupakan Jalan Tol Lingkar Tengah Kota Surabaya.”	Agar Dipersiapkan	Terdapat rencana Pembangunan Jalan Tol dalam Rencum JBH dengan panjang total sepanjang 18,2 Km dan range pengerjaan tahun <2020 - 2024	18,2 km	6,49 Triliun	Swasta/ KPBU	2026	2029
40	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Imam Bonjol (Blitar)	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Blitar	Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		254 m	77,88 Miliar	APBN	2027	2029
41	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Madiun – Bts. Kota Nganjuk I	Kawasan Selingkar Willis	Kota Nganjuk	Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		350 m	72 Miliar	APBN	2027	2029
42	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kota Wlingi - Bts. Kab. Malang I	KSPN BTS (Bromo- Tengger- Semeru)	Kabupaten Malang	Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		254 m	77,88 Miliar	APBN	2027	2029
43	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Madiun – Bts. Kota Nganjuk II	Selingkar Willis	Kabupaten Madiun, Kota Nganjuk,	Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		350 m	72 Miliar	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kota Nganjuk - Kertosono	Gerbang Kertosusila Plus	Kota Nganjuk, Kab. Nganjuk	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		4/6 m	99,09 Miliar	APBN	2027	2029
45	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Kenjeran (Surabaya)	Gerbang Kertosusila Plus	Kota Surabaya	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		300 m	183,75 Miliar	APBN	2027	2029
46	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Ngawi - Maospati	Selingkar Willis	Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		400 m	82,75 Miliar	APBN	2027	2029
47	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Jampirogo-Milirip	Gerbang Kertosusila Plus	Kabupaten Mojokerto	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		350 m	72 Miliar	APBN	2027	2029
48	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Babat - Bts. Kota Bojonegoro II	Gerbang Kertosusila Plus	Kabupaten Bojonegoro, Kota Bojonegoro	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		300 m	61,25 Miliar	APBN	2027	2029
49	BM	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. K.S. Tubun (Malang)	KSPN BTS (Bromo-Tengger-Semeru)	Kota Malang	• Keamanan lalu lintas dan memperlancar operasional perkeretaapian	Agar Dipersiapkan		300 m	93,75 Miliar	APBN	2027	2029

8.1.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor industri, pariwisata, dan kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur permukiman dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.3 Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DJKK												
Sektor Cipta Karya (Industri Pengolahan)												
50	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan Kab Tuban	GKS Plus	Kab. Tuban	• Peningkatan/Pembangunan TPST (Usulan CK untuk perbaikan nomenklatur TPA kegiatan menjadi TPST (Tidak ada TPA 2045)) • Tuban memiliki 3 TPA yang totalnya memiliki daya tampung 100 ton/hari. Daya tampung TPA Rengel 5-10 ton (open dumping), TPA Jatirogo 10-20 ton (open dumping), dan TPA Gunung Panggung, di Kec Semanding 60-70 ton (sanitary landfill). Pada tahun 2021, sampah yang masuk TPA Gunung Panggung mencapai 46 ribu ton/hari. • Feasibility Study dan Rancangan Awal (Basic Design) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kabupaten Tuban (2023).	FS dan Rancangan Awal		334.128 KK	90 Milliar	Loan ISWMP	2025	2026
51	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Regional Gresik	GKS Plus	Kab. Gresik	• Peningkatan/Pembangunan TPST (Usulan CK untuk perbaikan nomenklatur TPA kegiatan menjadi TPST (Tidak ada TPA 2045)). • TPA Ngipik di Kab. Gresik sudah overload. • Pengelolaan sampah saat ini sudah mencapai 76%, namun jika tidak dilakukan peningkatan kapasitas TPA maka diproyeksikan pada tahun 2024 akan terdapat timbunan sampah mencapai 131,45 m3/hari atau 32 Ton/hari yang tidak	Agar Dipersiapkan		368.139 KK	46,2 Milliar	APBN	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					terkelola/tidak dapat diampung di TPA Ngipik, • Tahun 2022,7 Pemda (Kab Gresik, Kab Sidoarjo, Kab Kediri, Kota Kediri, Kab Mojokero, Kota Mojokerto, Kab Lamongan) dan Provinsi Jawa Timur telah sudah menandatangani MoU pembangunan TPA Regional, Kab Gresik merupakan salah satu dari kab/kota yang menjadi cakupan pelayanan TPA Regional tersebut.							
52	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Bangkalan	GKS Plus	Kab. Bangkalan	• Peningkatan/Pembangunan TPST (Usulan CK untuk perbaikan nomenklatur TPA kegiatan menjadi TPST (Tidak ada TPA 2045)) • TPA Buluh sudah overload, sementara timbulan sampah di Kab. Bangkalan mencapai 8,7 ton/hari di tahun 2022 dan 66,82 ton/hari di tahun 2029. • Ada rencana pembangunan TPA baru di Desa Bringen, Kecamatan Labang seluas 5 Ha • Timbulan sampah tahun 2029 diperkirakan mencapai 24.391 ton/thn	Agar Dipersiapkan	Disarankan diundur 2027- 2028	300.171 KK	24,9 Miliar	APBN/APBD	2027	2028
Sektor Cipta Karya (Pariwisata Alam Dan Budaya Unggulan)												
53	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Lumajang	KSPN BTS	Kab. Lumajang	• Pembangunan TPST (Usulan CK untuk perbaikan nomenklatur TPA kegiatan menjadi TPST (Tidak ada TPA 2045)). • Optimalisasi TPA Lumajang (Sesuai ITMP BTS). • Kab Lumajang merupakan bagian dari kawasan inti KSPN BTS	Agar Dipersiapkan	Disarankan diundur 2027- 2028	314.151 KK	25,1 Miliar	APBN/APBD	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					• Tingkat layanan pengolahan sampah baru mencapai 18,32%, sementara TPA Lempeni, Kec. Tempeh, Lumajang hanya memiliki 1 sel sudah overload. • Timbulan sampah tahun 2029 diperkirakan mencapai 18 ribu ton/th dari kegiatan domestik dan wisatawan. • Perluasan TPA Lempeni seluas 2 Ha dengan sistem sanitary landfill, kapasitas 100.000 m3 dengan umur layanan 5 tahun.							
54	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Regional Probolinggo	KSPN BTS	Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo	• Kab Probolinggo merupakan kawasan inti KSPN BTS, dan Kota Probolinggo merupakan kawasan pendukung. • Tingkat layanan pengolahan sampah di Kota Probolinggo mencapai 84,7%, sementara TPA Bestari diperkirakan penuh akhir tahun 2022. • Tingkat layanan pengolahan sampah di kabupaten Probolinggo masih mencapai 16,65% • Timbulan sampah di Kabupaten dan Kota Probolinggo tahun 2029 diperkirakan mencapai 19 ribu ton/th dari kegiatan domestik dan wisata. • Terdapat rencana pembangunan TPA regional Kab Probolinggo dan Kota Probolinggo di Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo, namun RC belum siap dan MOU belum final	Agar Dipersiapkan	Perlu dibawa ke Forum Rakorgub	387,615 kK	13,2 Miliar	APBN/KPBU	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					DJPI: Masuk pipeline KPBU infrastruktur permukiman dalam Renstra DJPI TA 2025-2029; Tahap SP/Pra FS TA 2025, studi kelayakan TA 2026 dan transaksi TA 2027.							
55	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kota Pasuruan	KSPN BTS	Kota Pasuruan	- Kota Pasuruan merupakan kawasan pendukung KSPN BTS - Tingkat layanan pengolahan sampah mencapai 98%, sementara TPA Sebaroh Blandongan akan overload di tahun 2025 - Timbulan sampah tahun 2029 diperkirakan mencapai 4 ribu ton/th dari kegiatan domestik dan wisatawan - Rencana perluasan TPA Blandongan, saat ini sedang proses pembebasan lahan	Agar Dipersiapkan		58.425 KK	9,7 Miliar	APBN/APBD	2026	2027
56	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Regional Kediri	Selingkar Wilis	Kab Kediri, Kota Kediri	- Kota Kediri merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dari total 5 PKW di Selingkar Wilis dengan penduduk paling besar (286.796 jiwa) dan paling padat (45 jiwa/ha), dimana kota Kediri merupakan simpul ataupun kota terdekat ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Malang dan Surabaya. - Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan Kota Kediri terbesar ke-2 di Jawa Timur (Pabrik rokok terbesar nasional). - Timbulan sampah di Kota Kediri saat ini 187 ton/hari dan tahun 2024 diproyeksikan menjadi 192	Agar Dipersiapkan	Diusulkan melalui PHLN	537.414 KK	13,2 Miliar	APBN/PHLN	2026	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ton/hari. Kondisi saat ini TPA Klotok Kota Kediri dalam keadaan penuh sehingga tidak dapat lagi menampung sampah. • Terdapat rencana pembangunan TPA Regional Kediri yang berada di Kab. Kediri dengan luas 50,57 Ha. • Layanan persampahan di Kab. Nganjuk masih 50%, sementara TPA Kedungdowo sudah overload. • Total sampah masuk TPA 175.787 m3/tahun, sedangkan kapasitas TPA di Kab. Nganjuk hanya 16.493 m3/tahun, sehingga tersebut sudah <i>over capacity</i>. • Ada rencana TPA Joho, dengan kapasitas 191.867 m3 dan usia 6 tahun. Sudah ada usulan ke BPPW Jawa Timur, DED 2020, lahan siap.	Agar Dipersiapkan		308.573 KK	7,4 Miliar	APBN/APBD	2026	2029
58	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kota Madiun	Selingkar Wilis	Kota Madiun	• Layanan persampahan sudah mencapai 72%, namun TPA Winongo sudah akan penuh. • Volume sampah yang masuk ke TPA Winongo per hari sekitar 100 ton/hari. • Terdapat rencana controlled landfill seluas 5 Ha dengan luas landfill 2,3 Ha dan kapasitas rencana 75.000 m3, tas rencana 75.000 m3. • Layanan persampahan di Kab. Tulungagung masih 37%, sementara TPA	Agar Dipersiapkan		55.025 KK	1,6 Miliar	APBN/APBD	2026	2029
59	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala	Selingkar Wilis	Kab. Tulungagung		Agar Dipersiapkan		305.342 KK	25,36 Miliar	APBN	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kabupaten Tulungagung			Segawe Tulungagung dalam keadaan penuh. • Terdapat rencana pembangunan TPA Banyuwirip. Saat ini masih dalam proses pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. • Direncanakan TPA ini menggunakan sistem Sanitary Landfill seluas 49,35 Ha dan dengan kapasitas 2.033.332 m ³ .							
60	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Ponorogo	Selingkar Willis	Kab. Ponorogo	• Layanan persampahan di Kab. Ponorogo 60%, sementara TPA Mrican mengalami overload 194.180 m³/tahun. • Ada rencana pembangunan TPA di Kel. Singosaren, Jenangan dengan luas 4 Ha (sudah diakomodir Raperda RTRW). Saat ini lahan yang tersedia baru 1 Ha. DED direncanakan dilaksanakan pada 2024	DED (2024)		266.368 KK	22,16 Milliar	APBN/APBD	2026	2027
61	CK	Pembangunan SPAM Regional Lintas Tengah Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang	Selingkar Willis	Kab Kediri, Kab Nganjuk	• Terdapat Bendungan Semantok di Kab. Nganjuk. Melayani air baku 312 lt/dt yang dapat melayani 3 kabupaten tersebut • Perpres 80/2019: Pembangunan SPAM Regional Lintas Tengah Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang • Idle capacity PDAM: Kediri 100 lt/dt, Nganjuk 151 lt/dt • Akses perpipaan Kediri hanya 3,5%, dan Nganjuk 9,10%. • Kebutuhan air minum tahun 2029: Kediri 3.462 lt/dt, Nganjuk sebesar 2.333 lt/dt, Kab. Jombang 2.718 lt/dt.	Agar Diperiapkan	Perlu dibawa ke Forum Rakorgub PKS, NK dan Kelembagaan SPAM dapat dipersiapkan	389 liter/detik	750 Milliar	APBN/KPBU	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 388,81 liter/detik - Sumber air baku dari Bendungan Semantok mengalami defisit, sehingga tidak mencukupi untuk dibangunkan SPAM Regional							
62	CK	Peningkatan SPAM Kab. Trenggalek	Selingkar Willis	Kab. Trenggalek	- Akses air minum layak di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 95,56%. Kab/Kota dengan akses air minum layak terendah adalah Kab. Trenggalek (80,64%) dan layanan perpipaan yang masih 5% pada tahun 2021. - Kab. Trenggalek memiliki Bendungan Bagong dengan kapasitas tampungan 17,1 juta m3 serta Bendungan Tugu dengan kapasitas 12,1 juta m3. - Kab. Trenggalek menjadi daerah yang terdampak kekeringan pada tahun 2018, 2019, dan 2021. - Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 242 liter/detik.	Agar Dipersiapkan		1.319 liter/detik	390 Miliar	APBN/APBD	2026	2028
63	CK	Peningkatan SPAM Kab. Ponorogo	Selingkar Willis	Kab. Ponorogo	- Kapupaten Ponorogo memiliki akses air minum layak sebesar 91,15% namun layanan perpipaan baru mencapai 9,44% pada tahun 2021. - Kab. Ponorogo memiliki Bendungan Bendo dengan kapasitas tampungan 43 juta m3. - Kab. Ponorogo menjadi daerah yang terdampak	Agar Dipersiapkan		1720 liter/detik	500 Miliar	APBN/APBD	2026	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Regional Kabupaten Banyuwangi	KSPN Ijen Baluran	Kab. Banyuwangi	• Kekerjangan pada tahun 2018-2021. • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 105,2 liter/detik. • Banyuwangi merupakan bagian dari kawasan inti Selingkar Ijen • Tingkat layanan pengolahan sampah baru 54% sementara TPA Bulusan Banyuwangi sudah overload dan non aktif (2019), sehingga saat ini menggunakan TPA Blimbingsari dengan sistem open dumping seluas 2.87 Ha di lahan bekas tambang galian C. • Timbulan sampah tahun 2029 diperkirakan mencapai 520 ribu ton/th dari kegiatan domestik dan wisatawan. • Saat ini terdapat rencana pembangunan TPA Wongsorejo dengan kapasitas 1.213.031 juta m3 di lahan 10 ha, luas landfill 5,8 ha dan usia TPA 7 tahun. Jika TPA ini terbangun, timbulan sampah Kab. Banyuwangi tahun 2029 masih dapat terlayani. • Terdapat rencana pembangunan TPA regional Banyuwangi.	Agar Dipersiapkan		478.379 KK	39,7 Miliar	APBN/APBD	2026	2027
65	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Malang	KSPN BTS	Kota Malang	• Kota Malang sebagai PKN dan wilayah terpadat di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru mulai perlu mengolah air limbah secara perpipaan terpusat / IPAL. • Kota Malang ditujukan sebagai kawasan wisata	Agar Dipersiapkan		241 m3/hari	120 Miliar	APBN	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Keselapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					yang menitikberatkan pada penciptaan suasana yang konduktif bagi pariwisata BTS. • Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) eksisting milik Pemkot Malang memiliki kapasitas 25 m ³ • Sedangkan, diperlukan infrastruktur untuk mengelola 906 m ³ /hari timbunan lumpur tinja di kawasan BTS, yang mana proporsi paling besar berada di Kota Malang 266 m ³ /hari (2029). • Peningkatan kapasitas IPLT di Kabupaten Probolinggo • Kab. Probolinggo merupakan wilayah yang masuk ke dalam Kawasan Inti Bromo-Tenger- Semeru. Terdapat Pintu Gerbang Sukapura dan Jembatan Kaca Seruni Point. • Kab. Probolinggo memiliki IPLT eksisting (IPLT Seboro) yang beroperasi dari tahun 2017 dan memiliki kapasitas maksimum 20 m ³ /hari, idle capacity 12 m ³ /hari. • Diperlukan infrastruktur untuk mengelola 906 m ³ /hari timbunan lumpur tinja di Kawasan BTS, yang mana di Kabupaten Probolinggo sendiri sebesar 183 m ³ /hari (2029). • Dibutuhkan peningkatan kapasitas IPLT di Kabupaten Banyuwangi • Diperlukan infrastruktur untuk mengelola timbunan lumpur tinja di Kab.							
66	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Probolinggo	KSPN BTS	Kabupaten Probolinggo		Agar Dipersiapkan	Disarankan peningkatan kapasitas IPLT Usulan pelaksanaan 2027-2028	163 m ³ /hari	4,5 Miliar	APBN/APBD	2027	2028
67	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di	KSPN Ijen Baluran	Kabupaten Banyuwangi		Agar Dipersiapkan		59,6 liter/detik	4 Miliar	APBN/APBD	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kabupaten Banyuwangi			Banyuwangi sebanyak 2.780,91 l/detik (2029). • Timbunan lumpur tinja berasal dari penduduk alami dan wisatawan. • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan limbah air tinja tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 59,60 liter/detik • Terdapat IPLT Kab. Banyuwangi eksisting dengan kapasitas 0,23 l/detik (20 m3/hari), yang mana saat ini sudah overload.							
68	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Bondowoso	KSPN Ijen Baluran	Kabupaten Bondowoso	• Dibutuhkan pembangunan IPLT di Kabupaten Bondowoso • Diperlukan infrastruktur untuk mengelola timbunan lumpur tinja di Kab. Bondowoso sebanyak 1.025,50 l/detik (2029). • Timbunan lumpur tinja berasal dari penduduk alami dan wisatawan. • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan limbah air tinja tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 33,11 liter/detik	Agar Dipersiapkan		33,11 liter/detik	5 Miliar	APBN/APBD	2027	2028
69	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Ponorogo	Selingkar Wilis	Kabupaten Ponorogo	• Dibutuhkan peningkatan kapasitas IPLT di Kab. Ponorogo • Timbunan lumpur tinja di Kab. Probolinggo sebanyak 1.479,72 l/detik (2029) di Selingkar Wilis. • Terdapat IPLT eksisting di Kab. Ponorogo dengan kapasitas 25 m3/hari, yang mana saat ini sudah overload. • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan	Agar Dipersiapkan		103,47 liter/detik	4 Miliar	APBN/APBD	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Madiun	Selingkar Wilis	Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk	limbah air tinja tahun 2022- 2029 yang harus ditangani sebesar 103,47 liter/detik • Peningkatan kapasitas IPLT untuk melayani Kab. Nganjuk. • Total timbulan lumpur tinja sebanyak di Kab. Madiun dan Kab. Nganjuk adalah 3.037,83 l/detik (2029) • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan limbah air tinja tahun 2022- 2029 yang harus ditangani sebesar 186,27 liter/detik • Terdapat IPLT eksisting di Kab. Madiun yaitu IPLT Madiun Mejayan dengan kapasitas 25 m3/hari yang mana saat ini sudah overload dan dapat ditingkatkan sehingga dapat melayani Kab. Nganjuk dsk.	Agar Dipersiapkan		186,27 liter/detik	4 Miliar	APBN/APBD	2027	2028
Sektor Cipta Karya (Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan)												
71	CK	Pembangunan SPAM Pantura (Kab. Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan)	GKS Plus	Kab. Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan	• Air baku akan bersumber dari Bendungan Karangondko (Kab. Blora- Jateng dan Bojonegoro- Jatim) yang berasal dari Sungai Bengawan Solo dan Bendungan Gongseng • Peningkatan SR sebanyak 166.000 Sambungan Rumah (SR) • Tercantum dalam Perpres 80/2019 • Kota Surabaya sebagai PKN dan wilayah terpadat di Gerbangkertosusila mulai perlu mengolah air limbah secara terpusat / IPAL.	Pra FS/OBC (2027)		166.000 SR	1,5 Triliun	Swasta/ KPBU	2028	2029
72	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Surabaya	GKS Plus	Kota Surabaya		Agar Dipersiapkan		49881 m3/hari	124,7 Miliar	APBN	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Kota Surabaya memiliki beberapa IPAL Komunal eksisting yang tersebar. - Dibutuhkan peningkatan kapasitas IPLT di Kota Surabaya - Salah satu wilayah yang paling banyak menghasilkan lumpur tinja adalah Kota Surabaya 898,81 m³/hari (2029). - Terdapat IPLT eksisting yaitu IPLT Keputih dengan kapasitas pengolahan 400 m³/hari dan masih terdapat idle 270 m³/hari, yang mana diperkirakan akan overload (2029).							
73	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sidoarjo	GKS Plus	Kabupaten Sidoarjo	- Dibutuhkan peningkatan kapasitas IPLT di Kabupaten Sidoarjo - Salah satu wilayah yang paling banyak menghasilkan lumpur tinja adalah Kab. Sidoarjo 139,96 m³/hari (2029). - Terdapat IPLT eksisting yaitu IPLT Griyomulyo Jabon dengan kapasitas pengolahan 50 m³/hari, yang mana saat ini sudah overload (2022)	Agar Dipersiapkan		89,96 m ³ /hari	45 Miliar	APBN	2027	2028
74	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Bondowoso	KSPN Jlen Baluran	Kab. Bondowoso	- Bondowoso merupakan bagian dari kawasan inti Selingkar Jlen - Tingkat layanan pengolahan sampah baru mencapai 21%, sementara TPA Paguan Bondowoso sudah overload dengan luas lahan 1,4 ha. - Timbulan sampah tahun 2029 diperkirakan 239 ribu ton/th dari domestik dan wisatawan.	Agar Dipersiapkan		215.861 KK	7,8 Miliar	APBN/APBD	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Terdapat rencana perluasan TPA Paguan dengan luas rencana 4,2 Ha., kapasitas 2.135.250 m³ dan usia TPA 5 tahun, DED, pembebasan lahan, akses jalan sudah siap. TPA ini diproyeksikan konstruksi TA 2024 dan operasional 2025. Jika terbangun, timbunan sampah Kab. Bondowoso tahun 2029 masih dapat terlayani							
75	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Jember	KSPN Jlen Baluran	Kab. Jember	- Jember merupakan bagian dari kawasan inti Selingkar Jlen - Tingkat layanan pengolahan sampah baru mencapai 35%, sementara TPA Pakusari Jember sudah overload dengan ketinggian timbunan 14 m dan luas lahan 3,8 Ha. - Timbunan sampah tahun 2029 diperkirakan mencapai 771 ribu ton/th dari kegiatan domestik dan wisatawan. - TPA Kab Jember sudah overload dan segera dibutuhkan pembangunan TPA baru.	Agar Dipersiapkan		709.314 KK	58,9 Miliar	APBN/APBD	2026	2027
76	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Sumenep	Madura dan Kepulauan	Kab. Sumenep	- Diperlukan pembangunan TPS3R/TPST sebagai upaya pengurangan sampah, serta pembangunan atau perluasan/optimalisasi TPA sebagai upaya penanganan sampah (Usulan CK untuk perbaikan nomenklatur TPA kegiatan menjadi TPST (Tidak ada TPA 2045)) - TPA Batuan sudah overload, sementara timbunan sampah di Kab. Sumenep mencapai 6,82 ton/hari di tahun 2022	Agar Dipersiapkan	Diusulkan dilaksanakan 2028-2030	313.987 KK	1,2 Miliar	APBN	2028	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan 67,54 ton/hari di tahun 2029. - Kec. Ariasa dan Kec. Kangean merupakan salah satu kecamatan penghasil padi dan jagung terbesar di Sumenep. - Pulau Kangean merupakan pulau terbesar di Sumenep dengan luas 430 km2 yang memiliki potensi pertanian, gas alam, perikanan, dan wisata. Desa Jukung di Kec. Kangean merupakan desa prioritas 1 penanganan kemiskinan ekstrim. - Kab. Sumenep terdiri dari puluhan gugusan pulau berpenduduk, diantaranya Pulau Kangean dan Pulau Sapeken. Kedua pulau ini menjadi kawasan pariwisata pantai yang saat ini belum ada tempat pembuangan sampah. Ketidadaan TPST di kedua pulau tersebut menyebabkan masyarakat membuang sampah di pinggir pantai, seperti tumpukan sampah di pantai dekat Pel. Sapudi Ds. Gayam, Ds. Sapeken di Pulau Sapeken, kawasan hutan RPH Ariasa Kangean. - Kepulauan Sapeken merupakan kecamatan terluas dan paling timur (terluar) dari Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi perikanan dan pariwisata. Desa Tanjung Kiaok di P. Sapeken merupakan desa prioritas 1 penanganan kemiskinan ekstrim.							

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					• Ada usulan ke BPPW Jatim. Belum diketahui kesiapan dan tahun pelaksanaannya. • Pembangunan SPAM Regional kawasan pedesaan rawan kekeringan di Kab. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep • Rata-rata akses perpindahan Madura sebesar 7% dimana akses terendah ada di Sampang dan Sumenep (rata-rata 4%). Namun, idle capacity masih tinggi yaitu 54,75 lt/dt di Sampang dan 162,5 lt/dt di Sumenep. Meskipun ada idle capacity, kondisi permukiman di Madura secara umum tersebar mengelompok maka layanan air minum tidak sampai kepada permukiman tersebut. Akibatnya pada musim kemarau banyak kecamatan di Madura yang mengalami krisis air. • Desa yang termasuk rawan kekeringan tinggi: - Kab Bangkalan: Bilaporah (Kec. Socah), Telang (Kec. Kamal) - Kab Pamekasan: Larangan Sempar (Kec. Tlanakan), Bujur Barat (Kec. Batumarmar), Sana Sokalelah (Kec. Kador), Bulangan Timur (Kec. Pegantenan), Sumber Waru (Kec. Waru) - Kab. Sampang: Pajeruan (Kec. Kedungdung), Rong Dalam (Kec. Sampang)	Agar Dipersiapkan	PKS, NK dan Kelembagaan SPAM dapat dipersiapkan	397,17 liter/detik	750 Milliar	APBN	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Kab. Sumenep: Batu Ampar (Kec. Guluks-Guluks) • Desa kekeringan yang masuk miskin ekstrim: Sokolelah, Bulangan Timur, Sumber Waru, Pajuruan, Rong Dalam • Kawasan Madura dan Kepulauan harus memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air sebesar 7.265,15 liter/detik pada tahun 2029, sedangkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kawasan Madura dan Kepulauan hanya terlayani sebesar 6.865,96 liter/detik. Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 397,17 liter/detik • Berdasarkan Perpres 80/2019 • Sumber air baku dari : Mata Air Klebetan, Sungai Budur, Waduk Nipah, Waduk Klampis, Waduk Blegga, Sungai Pasean, Sungai Pasongsongan, Sungai Semajid dan Sungai Pragaan • Penghantasi padi dan jagung : Kec. Arjasa dan Kec. Kangayan (P. Kangean). • Kab. Sumenep terdiri dari puluhan gugusan pulau berpenduduk dengan 6 pulau utama yang memiliki potensi pariwisata pantai, namun sering mengalami krisis air terutama saat musim kemarau karena							
78	UK	Peningkatan SPAM Kawasan Desa Kepulauan Sumenep	Madura dan Kepulauan	Kab. Sumenep		Agar Dipersiapkan		98,81 liter/detik	750 Milliar	APBN	2026	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					belum dilayani SPAM. Total jumlah penduduk di keenam pulau tersebut mencapai 158.890 jiwa. • Miskin Ekstrim: Desa Jukong Jukong di Kec. Kangayan (P. Kangean), Desa Tanjung Kiaok (P. Sapeken). • Terluar: Kepulauan Sapeken merupakan kecamatan terluah dan paling timur (terluar) yang memiliki potensi perikanan dan pariwisata. • Kab. Sumenep harus memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air sebesar 7.263,13 liter/detik pada tahun 2029, sedangkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kawasan Madura dan Kepulauan hanya terlayani sebesar 6.865,96 liter/detik. • Terdapat idle capacity sebesar 109,1 liter/detik.							
79	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sumenep	Madura dan Kepulauan	Kabupaten Sumenep	• Dibutuhkan peningkatan Kapasitas IPLT di Kabupaten Sumenep • Timbulan lumpur tinja Madura dan Kepulauan sebanyak 5.810,50 l/detik (2029) dan pada Kab. Sumenep sebanyak 1.527,77 l/detik (2029). • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan limbah air tinja tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 79,05 liter/detik • Terdapat IPLT Sumenep eksisting dengan kapasitas pengolahan 0,115 l/detik (10 m³/hari), yang mana saat ini sudah overload.	Agar Diperiapkan		78,9 liter/detik	5 Miliar	APBN/APBD	2027	2028

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Keselapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	80	CK	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Bangkalan	Madura dan Kepulauan	Kabupaten Bangkalan	• Rehabilitasi/Optimalisasi IPLT di Kabupaten Bangkalan • Timbulan lumpur tinja Madura dan Kepulauan sebanyak 5.810.50 l/detik (2029) dan pada Kab. Bangkalan sebanyak 1.810.21 l/detik (2029). • Sebagian masyarakat Kab. Bangkalan memanfaatkan mobil truk tinja yang kemudian dibuang ke IPLT keputih di Surabaya sehingga biaya yang keluar untuk jasa sedot tinja cukup besar. • Terdapat GAP antara kebutuhan pengelolaan limbah air tinja tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 102.95 liter/detik • Terdapat IPLT Kab. Bangkalan sebesar 6 m3/hari yang tidak berfungsi, dibangun pada 2004. IPLT eksisting sudah diserahterimakan ke Pemda.	Agar Dipersiapkan	102,95 liter/detik	50 Miliar	11	2026	2027
	81	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten Pacitan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 296,89 l/detik. • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 181,7 lpd • Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus	Agar Dipersiapkan	296,89 Liter/ detik	89,06 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029
	82	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten Blitar	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Blitar	• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus	Agar Dipersiapkan	1.039,32 Liter/ detik	311,79 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten Magetan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Magetan	ditangani sebesar 1039,32 l/detik. • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 24,06 lpd	Agar Dipersiapkan		170,68 Liter/ detik	51,204 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029
					• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 170,68 l/detik • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 67,47 lpd							
84	CK	Peningkatan SPAM Kabupaten Ngawi	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 541,88 l/detik • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 184,5 lpd	Agar Dipersiapkan		541,88 Liter/ detik	162,56 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029
					• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 52,73 l/detik • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 21,7 lpd							
85	CK	Peningkatan SPAM Kota Blitar	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 52,73 l/detik • Unor CK: Terdapat idle capacity sebesar 21,7 lpd	Agar Dipersiapkan		52,73 Liter/ detik	15,8 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029
					• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 87,60 l/detik							
86	CK	Peningkatan SPAM Kota Batu	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 87,60 l/detik	Agar Dipersiapkan		87,6 Liter/ detik	26,28 Miliar	APBN/ APBD	2027	2029
					• Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). • Terdapat GAP antara kebutuhan dan ketersediaan air tahun 2022-2029 yang harus ditangani sebesar 87,60 l/detik							

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Pacitan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	- Unor CK: ierdapat idle capacity sebesar 139,6 lpd - Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 230.071/detik - KK yang harus terlayani 54.786 KK	Agar Dipersiapkan		54.786 KK	1,09 Triliun	APBN/APBD/ KPBU	2027	2029
88	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Blitar	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Blitar	- Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 546,80 l/detik - KK yang harus terlayani 115.315 KK	Agar Dipersiapkan		115.315 KK	2,3 Triliun	APBN/APBD/ KPBU	2027	2029
89	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Magetan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Magetan	- Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 270,76 l/detik - KK yang harus terlayani 62.718 KK	Agar Dipersiapkan		62.718 KK	1,25 Triliun	APBN/APBD/ KPBU	2027	2029
90	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Ngawi	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	- Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 310,73 l/detik - KK yang harus terlayani 80.167 KK	Agar Dipersiapkan		80.167 KK	1,6 Triliun	APBN/APBD/ KPBU	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
91	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Blitar	Provinsi Jawa Timur	5 Kota Blitar	6 - Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Saat ini terdapat IPAL Eksisting di Kota Blitar. - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 37,62 l/detik. - KK yang harus terlayani 14.366 KK.	7 Agar Dipersiapkan	8	9 14.366 KK	10 287,32 Miliar	11 APBN/ APBD	12 2027	13 2029
92	CK	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Batu	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	6 - Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Saat ini terdapat IPAL komunal domestik eksisting di Kota Batu, yang diperlukan IPAL tambahan untuk menangani air limbah. - Timbulan air limbah yang harus ditangani untuk mencapai pelayanan minimum 35% pada tahun 2029 adalah sebesar 57,91 l/detik. - KK yang harus terlayani 20.630 KK.	Agar Dipersiapkan		20.630 KK	412,6 Miliar	APBN/APBD/ KPBU	2027	2029
93	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Pacitan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	6 - Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Terdapat timbulan sampah yang perlu ditangani sampai tahun 2029 sebesar 91,73 ton/hari, untuk mencapai target pelayanan persampahan sebesar 40%	Agar Dipersiapkan		163,789 KK	1,8 Miliar	APBN/APBD	2027	2029
94	CK	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten Magetan	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Magetan	6 - Memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum (SPM). - Terdapat timbulan sampah yang perlu ditangani sampai tahun 2029 sebesar 58,69 ton/hari, untuk	Agar Dipersiapkan		187,388 KK	1,8 Miliar	APBN/APBD	2027	2029

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					mencapai target pelayanan persampahan sebesar 40% • Kapasitas produksi 300 L/dtk (Full Capacity, Eksisting 200 L/dtk). Sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas produksi 100 L/dtk. • Lahan untuk 100 L/dtk (tahap III) sudah tersedia. • Dibutuhkan pembangunan IPA kapasitas 100 L/dtk dan bangunan pelengkapanya. • Lingkup Wilayah pelayanan Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Gedek, Jetis, Kemlagi, Dawar Blandong; Kabupaten Lamongan di Kecamatan Mantup, Tikung, Kembangbahu; Kabupaten Gresik Kecamatan Balonggandang, Benjeng, Dudusampeyan. • Penerima manfaat saat ini sebanyak 18.000 • Sambungan Rumah (SR). RC: Sudah ada lahan HGB a.n BUMD Kota Surabaya; Rencana Induk RISPAM Prov. Jatim Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim; DED IPA Kapasitas 100 lt/dtk (2020); Pra-FS; AMDAL (2017).	AMDAL, Pra-FS, DED		100 liter/detik	75 Miliar	APBN	2025	2027

8.1.4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur perumahan ditujukan untuk mendukung fokus perencanaan sektor kawasan perkotaan. Matriks rencana aksi infrastruktur perumahan dilengkapi dengan justifikasi/deskripsi kegiatan, kesiapan RC, sumber dana dan rencana tahun pelaksanaan masing-masing program di kawasan prioritas.

Tabel 8.4 Daftar Program Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
1	DJP	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sektor Cipta Karya (Infrastruktur Dasar Kawasan Perkotaan)												
96	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik	GKS Plus	Kab. Gresik	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kab. Gresik - Kab. Gresik merupakan kawasan penyangga dari Kota Surabaya yang memiliki RTLH sebanyak 8.805 Unit (2020). - Penanganan RTLH perlu diintegrasikan dengan penanganan kawasan kumuh dan penataan kawasan. Luas kawasan kumuh di Kab. Gresik 770,18 Ha (2022).	Agar Dipersiapkan		8.800 Unit	150 Miliar	APBN/APBD/ CSR	2025	2029
97	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mojokerto	GKS Plus	Kab. Mojokerto	- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kab. Mojokerto - Kab. Mojokerto merupakan kawasan penyangga dari Kota Surabaya yang memiliki RTLH sebanyak 8.183 Unit (2020). - Penanganan RTLH perlu diintegrasikan dengan penanganan kawasan kumuh dan penataan kawasan. Luas kawasan kumuh di Kab. Mojokerto 221 Ha (2022).	Agar Dipersiapkan		8.200 Unit	120 Miliar	APBN/APBD/ CSR	2025	2029
98	Perumahan	Rusun Kota Surabaya - Medokan Ayu	Gerbang Kertasusilo Plus	Kota Surabaya	- Untuk mengurangi backlog kawasan Metropolitan - Merupakan proyek usulan baru. - PS direncanakan 2025	Agar Dipersiapkan	Program Baru	2 Tower/ 672 Unit	189 Miliar	Swasta/KPBU	2026	2027

No	UNOR	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/ Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Masukan Dit. SS	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Vol / Satuan	Biaya (Rp)		Mulai	Selesai
199	Perumahan	Rusun Kota Surabaya - Tambak Wedi	Gerbang Kertasusilo Plus	Kota Surabaya	• Untuk mengurangi backlog kawasan Metropolitan • Merupakan proyek lanjutan. • Telah dilaksanakan sejak 2023	FS	Program Lanjutan	3 Tower/ 1.080 Unit	161 Miliar	Swasta/KPBU	2025	2026

8.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan Non PUPR menunjukkan bahwa dalam **pengembangan sektor ekonomi unggulan wilayah (industri pengolahan, pertanian tanaman pangan, pariwisata alam dan budaya unggulan, dan infrastruktur dasar kawasan perkotaan) diperlukan sinkronisasi antar sektor.**

Sektor industri yang merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap PDB Nasional dan ekspor ke pasar global, sehingga upaya untuk mempertahankan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri pengolahan Indonesia membutuhkan penanganan melalui penyediaan dan pembangunan infrastruktur pendukung KEK/KI/KPI. Untuk itu, dibutuhkan peran K/L serta pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana aksi program.

Berdasarkan data produktivitas pertanian tanaman pangan dan luasan lahan sawah, Provinsi Jawa Timur diarahkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, rencana aksi keterpaduan program melibatkan beberapa unit teknis pelaksana, salah satunya yaitu Kementerian Pertanian sebagai *leading sector*-nya. Adapun K/L lain seperti Kementerian PUPR merupakan *supporting agency* dalam upaya mewujudkan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.

Keunggulan lainnya di Provinsi Jawa Timur yaitu sektor pariwisata dengan potensi kekayaan alam dan budaya, menjadi salah satu sektor prioritas untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Sehingga, penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata harus memenuhi syarat 6A (Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities, dan Available Package) yang dapat dipenuhi melalui kolaborasi lintas K/L hingga pemerintah daerah.

Selain ketiga sektor diatas, infrastruktur dasar kawasan perkotaan menjadi salah satu kriteria dalam percepatan pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan 3 sektor diatas.

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur ini diharapkan menjadi referensi bagi K/L terkait. Rencana aksi ini sangat dinamis mengikuti perkembangan pembangunan nasional kedepannya sehingga akan fleksibel mengikuti catatan *programming* berdasarkan K/L terkait. Untuk rujukan infrastruktur PUPR diharapkan dapat mengacu pada sub bab 8.1.

8.2.1 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

Tabel 8.5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Industri

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I				
						2023	2024	2025	2026	2027
S2 - S3 - T4 Pengintegrasian konektivitas kawasan peruntukkan industri dengan simpul-simpul transportasi (pelabuhan, bandara, jalan tol, rel kereta) untuk meningkatkan daya saing	Konektivitas antar kawasan	Transportasi	Pengaturan waktu mobilisasi container	KEK / KI di Surabaya, Mojokerto, Lamongan dan Gresik	PELINDO / PENGELOLA					
			Pengawasan angkutan ODOL	KEK / KI di Surabaya, Mojokerto, Lamongan dan Gresik	PELINDO / PENGELOLA					
	Peningkatan Efisiensi Logistik	Pelabuhan	Pembangunan Prasarana Integrasi di Hub Pelabuhan	Kota Surabaya dan Gresik	KEMENHUB					
	Peningkatan Efisiensi Logistik	Pelabuhan Bandara	Pengadaan Peralatan Handling Tepat Guna	Kota Surabaya dan Gresik	KEMENHUB					
	Peningkatan nilai tambah	Gudang	Pembangunan Area Konsolidasi / Dry Port	Kota Surabaya, Gresik, Lamongan	KEMENHUB					
S5 - S2 - T4 - T5 Penganekaragaman produk unggulan industri pengolahan melalui hilirisasi dan peningkatan kualitas pertanian		Kargo	Optimalisasi Area Handling Pelabuhan	Kota Surabaya, Gresik, Lamongan	KEMENHUB					
			peningkatan kapasitas terminal kargo	Sidoarjo	ANGKASA PURA / KEMENHUB					
		Bandara Inovasi Produk	Penambahan jadwal penerbangan angkutan barang	Sidoarjo	ANGKASA PURA / KEMENHUB					
			pengembangan produk olahan baru	Lamongan, Blitar, Ngawi, Jember	PEMDA / KEMANTAN					
		Inovasi Produk Branding dan Pemasaran	Penerapan Smart Farming	Lamongan, Blitar, Ngawi, Jember	PEMDA / KEMANTAN					
Perindungan Lahan Produktif			Mekanisasi pertanian	Lamongan, Blitar, Ngawi, Jember	PEMDA / KEMANTAN					
			Transfer teknologi pengelolaan pertanian	Lamongan, Blitar, Ngawi, Jember	PEMDA / KEMANTAN					
			inovasi distribusi dan packaging produk	KEK JIPE dan KI Gresik	KEMANTAN / KEMENPERIN					
		Branding dan Pemasaran	Kolaborasi dan Kerjasama dengan E-Commerce	KEK JIPE dan KI Gresik	KEMANTAN / KEMENPERIN					
		Optimalisasi lahan	Penentuan harga berdasarkan daya saing produk	KEK JIPE dan KI Gresik	PEMDA					
Perlindungan Lahan Produktif Transformasi Kawasan Industri			Promosi dan diskon produk tertentu	KEK JIPE dan KI Gresik	PEMDA					
			Pengawasan penggunaan lahan	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	PELINDO					
			Penyediaan lahan alternatif untuk industri	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	PEMDA / ATR					
			Sosialisasi kawasan lahan sawah dilindungi	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	ATR / BPN					
			penetapan lahan potensial untuk kawasan industri	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	PEMDA					
Transformasi kawasan industri terpadu yang berskala internasional			Peningkatan Keahlian Tenaga Lokal	Surabaya, Gresik	KEMENPERIN					
			inovasi penggunaan teknologi industri terkini	Surabaya, Gresik	KEMENPERIN					
			keikutsertaan dalam Forum Industri Internasional	Surabaya, Gresik	BKPM					
			Eksposansi laringan investor melalui perwakilan RI di LN	Surabaya, Gresik, Mojokerto	BKPM					

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SS - T2 - T3 Pengembangan kawasan industri ramah lingkungan dan ketahanan terhadap bencana	Industri based local community Infrastruktur Dasar		Area perdagangan bebas (<i>free trade area</i>)	Surabaya, Gresik, Mojokerto	BEA CUKAI KEMENKEU							
		Peningkatan Daya Saing Partisipasi masyarakat	Pengurangan Bea Masuk	Surabaya, Gresik, Mojokerto	BEA CUKAI KEMENKEU							
		Partisipasi masyarakat	Penyederhanaan prosedur investasi	Surabaya, Gresik, Mojokerto	BKPM							
		Tenaga Kerja Lokal	Intensifikasi pelaksanaan sistem perizinan OSS	Surabaya, Gresik, Mojokerto	BKPM							
			Pelatihan Usaha Mikro pada Kelompok Masyarakat	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	KOMINFO							
			Pelatihan Magang	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	KOMINFO							
				Sertifikasi mahasiswa praktik lapangan di kawasan industri	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	PEMDA						
			Magang Inkubator	Insentif mahasiswa berprestasi	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	PEMDA						
				Pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi teknologi industri	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	SWASTA						
			Tenaga Kerja Lokal, Limbah	Pendampingan tenaga kerja lokal	Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Lamongan	SWASTA						
	Infrastruktur Dasar Ketahanan bencana		Inkubator Pemisahan	Pengelompokkan dan pengolahan awal limbah	Gresik, Lamongan dan Mojokerto	PEMDA / PENGLOLA						
			Limbah Penanganan Sampah	Prinsip 3 R	Surabaya, Gresik, Mojokerto	PEMDA / PUPR						
				Penggunaan limbah sebagai bahan bakar alternatif	Surabaya, Gresik, Mojokerto	PEMDA / PENGLOLA						
				Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional Gresik	Kab. Gresik	KEMEN PUPR						
				Pengelolaan Air Limbah Sampah	Kab. Tuban	KEMEN PUPR						
Ketahanan bencana Penerapan <i>Green Energy</i>	Ketahanan bencana Penerapan <i>Green Energy</i>	Penanganan Sampah Kawasan Industri	Pembangunan Pengaman Pantai Kab. Tuban - Jenu									
		Penanganan Banjir dan Abrasi Pantai	Pembangunan Break Water	Kota Surabaya, Gresik, Lamongan	PEMDA / PUPR							
			Penanganan abrasi pantai	Kab. Gresik dan Mojokerto	PEMDA / PUPR							
				Penggunaan sumber energi alternatif (non fosil)	Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo	PENGLOLA KAWASAN						
		Penerapan <i>Green Energy</i> Kapasitas Kelembagaan		Daur sampah dan limbah untuk energi listrik	Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo	PENGLOLA KAWASAN						
			Pengaturan kewenangan dan intervensi pemerintah pusat	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	BKPM							
			Peningkatan intensitas fasilitas fiskal dan bea masuk	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	BKPM							
			Kontribusi pemerintah daerah pengembangan KEK/KI	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	PEMDA							
			Kemudahan pengelolaan kawasan	KI Gresik, KEK JIPE dan Sekitarnya	PEMDA							

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
S1 - S2 - S3 - T3 Penguatan konektivitas yang terintegrasi antar outlet produksi-pengolahan-pemasaran (IoT)	Konektivitas dengan Wilayah lain Penghasil Pertanian	Infrastruktur Jalan Tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/PUPR								
		Jalan Desa	Peningkatan jalan dari pusat produksi menuju tempat pengumpulan	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/PUPR								
		Jalan Regional	Peningkatan jalur distribusi hasil pertanian dari tempat pengumpulan menuju pasar	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/PUPR								
	Konektivitas dengan Wilayah Lain	Transportasi Barang dan Jasa Lain	Pelabuhan Ferry	Pelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar - NTT di Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	KEMENHUB							
		Logistik Pertanian	Hub and Spoke Pertanian	Pembangunan Area Kumpul Angkutan Barang	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/ KEMANTAN							
S4 - T2 - T5 Perlindungan lahan pertanian melalui pengembangan infrastruktur berkelatlahan bencana dan pengelolaan sumber daya air	Perlindungan terhadap Kawasan pertanian Rawan Banjir	Sistem Informasi pertanian	Pembangunan Pergudangan Hasil pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/ KEMANTAN								
			Penyediaan angkutan hasil pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/ KEMANTAN								
			Pemanfaatan Platform Digital untuk UKM dan Desa di Kawasan pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMANTAN/ KOMINFO/ BADAN USAHA								
		Penerapan teknologi informasi dalam pengaturan distribusi hasil pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/ KEMANTAN									
		Pembangunan Fasilitas Internet di Kawasan Pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA/ KEMANTAN									
	Perlindungan Sumber Daya Air Pertanian	Infrastruktur Kebencanaan	Pengendali Banjir	Pembangunan/peningkatan bangunan pengendalian banjir di Kali Brantas	Kabupaten Lamongan	KEMEN PUPR							
			Tanggul	Pembangunan dan peningkatan tanggul penahan lumpur di wilayah terdampak bencana	Kabupaten Sidoarjo	BADAN USAHA/ PUPR							
		Sumber Daya Air	Konservasi	Konservasi Sumber Daya Air	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMEN LHK/PEMDA							
				Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMEN LHK/PEMDA							
				Pengelolaan DAS Hulu	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMEN LHK/PEMDA							
			Perlindungan wilayah resapan air (sungai,danau/waduk/telega, dan mata air)	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMEN LHK/PEMDA								
		Sistem Irigasi	Penerapan sistem irigasi intermitten dan alternate wetting and drying (AWD).	Kawasan Pertanian Selingkar Wilis, BTS, Selingkar Ijen, Madura dan Kepulauan, GKS	TKPSDA								

Grand Strategy	Program	Kebutuhan Infrastruktur	Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	K/L	Tahap I					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
SS - T4 Intensifikasi sektor pertanian melalui penggunaan varietas unggul dan teknologi, insentif bagi pelaku usaha tani, dan dukungan kelembagaan	Kualitas SDM dan Institusi Pertanian	Advokasi Institusi Usaha Pertanian	Penguatan jaminan usaha dan korporasi petani dan nelayan	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMANTAN						
		Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian	Pemberian kredit mikro	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	BADAN USAHA (PERBANKAN)						
			Peningkatan akses perlindungan usaha pertanian melalui asuransi	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	BADAN USAHA (PERBANKAN)						
			Pembentukan lembaga berbasis masyarakat petani	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	BADAN USAHA (PERBANKAN)						
Peningkatan fasilitas dan pengolahan hasil pertanian	Fasilitas Pengolahan	Alat Mesin	Pengadaan inovasi teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan hasil pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	KEMANTAN/BRIN/PEMDA						
		Bangunan	Pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Kawasan Pertanian Selingkar Willis, BTS, Selingkar Jen, Madura dan Kepulauan, GKS	PEMDA						

8.2.3 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Tabel 8.7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pariwisata

Grand Strategy	Program	Kebutuhan Infrastruktur	Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	K/L	Tahap I					
ST - S6 - O1 - O2 - O5 Penyediaan layanan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di kawasan pariwisata	Percepatan penyediaan infrastruktur permukiman Dasar	Pengelolaan Sampahan	Skala Regional	Sistem Pengolahan Sampahan Skala Regional Probolinggo	Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengolahan Sampahan Skala Regional Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri	KEMEN PUPR					
		Skala Kota	Skala Kota	Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kota Pasuruan	Kota Pasuruan	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kota Madiun	Kota Madiun	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengelolaan Sampahan Skala Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang	KEMEN PUPR					
		Skala Kabupaten	Skala Kabupaten	Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	KEMEN PUPR					
				Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep	KEMEN PUPR					
	Pengelolaan Limbah	Skala Kota	Skala Kota	Sistem Pengolahan Sampahan Skala Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	KEMEN PUPR					
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Malang				Kota Malang	KEMEN PUPR						

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
S2 - S4 - O3 - O4 Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar Daya Tarik Wisata (DTW) dengan hub transportasi dan antar Jawa-Bali untuk meningkatkan daya saing internasional (IoT)	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar perumahan	Air Minum	Skala Kabupaten	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kabupaten di Kabupaten Probolinggo	KEMEN PUPR							
			Skala Perumahan/ Komunal	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kota Blitar	KEMEN PUPR							
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kota Batu	KEMEN PUPR							
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kab. Pacitan	KEMEN PUPR							
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kab. Blitar	KEMEN PUPR							
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kab. Magetan	KEMEN PUPR							
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perumahan/ Komunal Kab. Ngawi	KEMEN PUPR							
				Pembangunan SP3M Regional Lintas Tengah Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang	KEMEN PUPR							
				Penyediaan Homestay yang Memenuhi Standar Perhotelan	KEMEN PUPR							
				Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di kawasan pariwisata	PEMDA							
	Fasilitas Wisata	Konektivitas dan pemerataan Wilayah melalui Jaringan Jalan	Akomodasi dan perumahan	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pacitan, KSPN Trowulan, KSPN Ijen-Baluran	PEMDA /PUPR							
			Teknologi Informasi	Pembangunan Information Center (DTW, Transportasi, Penginapan, Rumah Makan) berbasis Digital	PEMDA							
				Pelebaran Jalan Menambah Lajur Ruas Durenan - Prigi	KEMEN PUPR							
			Jalan Tol	Pelebaran Jalan Menambah Lajur akses utama Kawah Ijen	KEMEN PUPR							
				Pelebaran Jalan Menambah Lajur Ruas Jalan Benculuk - Rogolampi	KEMEN PUPR							
				Pelebaran Jalan Menambah Lajur Ruas Jln Pondokdalem-Tanggul-Gambirono-Rambiujati-Mangli	KEMEN PUPR							
				Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Lumajang	KEMEN PUPR							
				Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen	KEMEN PUPR							
				Pembangun jalan akses Pansela Trenggalek-Banyuwangi	KEMEN PUPR							
				Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	KEMEN PUPR							
				Jalan akses exit tol Probowangi ke Pintu Gerbang Kabupaten Jangkar	KEMEN PUPR							
				Pembangunan Jalan dari exit Tol Probowangi ke Bandara Banyuwangi	KEMEN PUPR							
				Pembangunan Jalan Tolertosono-Kediri-Tulungagung	KEMEN PUPR							
					KEMEN PUPR							
					KEMEN PUPR							
					KEMEN PUPR							
					KEMEN PUPR							

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
SS - O6 Mendorong ekosistem pariwisata melalui inovasi kuliner, pendanaan, teknologi, dan branding pariwisata	Konektivitas antar DTW	Konektivitas dan Pemerataan Wilayah melalui Jaringan Udara	Pembangunan Bandara Perairan Gili yang untuk mendukung pariwisata Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	KEMENHUB								
		Transportasi Darat DTW	Konektivitas Lokal	Peningkatan Jalan Lingkungan	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA							
				Penentuan Mekanisme Operasional Angkutan Berbasis Zona	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA							
				Integrasi Tarif Angkutan Umum dan Angkutan Berbasis Zona	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA							
			Angkutan	Penerapan trayek dan Kendaraan Custom Untuk Layanan Direct	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA							
				Penentuan Kluster Destinasi Wisata Yang Dilayani Angkutan	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA							
		Integrasi Angkutan	Konektivitas Regional	Integrasi Jadwal Layanan Angkutan Darat dengan Jadwal Kereta Api dan pesawat dengan <i>real time</i> informasi (IoT)	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENHUB							
	Ekosistem Pariwisata	Akses Sustainable Financing	Investasi	Perkuat peta potensi dan peluang investasi daerah untuk Pariwisata penyelenggaraan dan pengembangan <i>IPC (Indonesian Investment Promotion Center)</i> di Luar Negeri	KSPN Bromo-Tengger-Semeru	BKPM							
		Stakeholder Management	Stakeholder Management	Permitasi Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskl. Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru)	KSPN Bromo-Tengger-Semeru	KEMENPAREKRAF							
			Kolaborasi	Kemitraan perguruan tinggi dan sektor pariwisata	KSPN Bromo-Tengger-Semeru	KEMEN LHK							
	Tourism Branding dan Marketing	Inovasi Atraksi Pariwisata	Produk Kuliner	Peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENPAREKRAF							
			Kerajinan Daerah	Pengembangan produk kerajinan asli daerah yang berkualitas	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF							
			Publikasi	Sharing konten media sosial yang relevan dengan Brand	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF							
		Strategi Brand dan Pemasaran	Value Chain	Penetaan rantai nilai pariwisata	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KOMINFO							
			Data Sharing	Integrasi Informasi Tour Operator dan Travel Agency	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENPERIN							
			Aplikasi Teknologi IoT	Inovasi Atraksi Wisata berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Pactian, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENHUB							
		Inisiasi <i>Smart Tourism</i>				KOMINFO							

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I								
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
S2 - O5 Peningkatan fisik lingkungan dan penanganan bencana alam pariwisata alam yang berkelanjutan	Perlindungan Kawasan Pariwisata terhadap Kebencanaan	Infrastruktur Kebencanaan	Peluncuran sistem pemasaran berbasis data real time Sistem informasi edukasi masyarakat cerdas - zero accident publikasi berkala edukasi berbasis budaya masyarakat cerdas Integrasi Layanan, Jadwal, dan Tarif Angkutan Umum Integrasi Informasi Titik Alih Moda dan Kapasitas Moda	Peluncuran sistem pemasaran berbasis data real time	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KOMINFO								
				Pengguna Cerdas	Sistem informasi edukasi masyarakat cerdas - zero accident	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENDIKBUD-RISTEK							
				Angkutan Cerdas	publikasi berkala edukasi berbasis budaya masyarakat cerdas	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENDIKBUD-RISTEK							
					Integrasi Layanan, Jadwal, dan Tarif Angkutan Umum	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENHUB							
					Integrasi Informasi Titik Alih Moda dan Kapasitas Moda	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENHUB							
	Mitigasi Dampak terhadap Keanekaragaman Hayati	Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati		Tanggul Bendung	Pembangunan/Peningkatan Tanggul Bendung di Kali Rejati, Gidlik, dan Mulu	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMEN PUPR							
				Kualitas Udara	Pembangunan/Peningkatan bangunan pengendalian banjir Kali Kedunglarangan	Kabupaten Lumajang	KEMEN PUPR							
					Pembatasan Penggunaan Kendaraan Bahan Bakar Fosil	Kabupaten Pasuruan	KEMEN PUPR							
					Operasi Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENLHK							
					Penataan RTH Hutan	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENLHK							
S3 - S5 - O6 Peningkatan kualitas pelaku usaha pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan dan penguatan kelembagaan pariwisata	Kapasitas SDM Kepariwisata	Pendidikan dan pelatihan SDM pariwisata	Lembaga Pendidikan	Pengembangan sekolah kejuruan pariwisata	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF								
				Pengembangan kegiatan internasional untuk menarik wisatawan	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF								
				Pengembangan diklat dan lembaga sertifikasi keahlian pariwisata	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENPAREKRAF								
				Penguatan sertifikasi CHSE Pariwisata	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	KEMENPAREKRAF								
					Pembentukan lembaga/komunitas pariwisata	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF							
Kelembagaan Pariwisata yang Kokoh	Kelembagaan Pariwisata	Dukungan Manajemen Finansial	Pemberian pendampingan bagi komunitas yang mendukung pariwisata dan membutuhkan pendanaan dan support lainnya, contoh dengan CSR, kredit usaha rakyat, dll	Pemberian advokasi untuk penyediaan fasilitas penunjang ekonomi kreatif	DPP Baru Banyuwangi, KSPN BTS, KSPN Karst Paction, KSPN Trowulan, KSPN Jen-Baluran	PEMDA/ KEMENPAREKRAF								

8.2.4 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan

Tabel 8.8 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur Fokus Pelayanan Dasar Kawasan Perkotaan

Grand Strategy	Program	Kebutuhan Infrastruktur	Rencana Aksi	Lokasi Spesifik	K/L	Tahap I								
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
S2 - O3 Akselerasi penyediaan infrastruktur dasar untuk mencapai target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal perkotaan	Infrastruktur permukiman dan lingkungan yang unggul	Livelihood	RTLH	Pembangunan Rumah Subsidi	WM GKS Plus, Malang Dsk, Jlen Dsk									
				Renabilitas Rumah Tidak Layak Huni	WM GKS Plus, Malang Dsk, Jlen Dsk									
		Persampahan		Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso									
				Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Jember	Kabupaten Jember									
				Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Perkotaan Kab. Pacitan	Kabupaten Magetan									
		Sanitasi		Sistem Pengelolaan Persampahan TPST Skala Perkotaan Kab. Magetan	WM GKS Plus, Malang Dsk, Jlen Dsk & BTS									
				Pembangunan IPAL Skala Kecamatan	WM GKS Plus, Malang Dsk, Jlen Dsk & BTS									
				Pembangunan IPLT Skala Kawasan	WM GKS Plus, Malang Dsk, Jlen Dsk & BTS									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sumenep	Kabupaten Sumenep									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Ponorogo									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun									
				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kota Surabaya	Surabaya									
		Akses Air	Air Minum	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kabupaten Sidoarjo	Kab. Sidoarjo									
				Peningkatan Kapasitas Intake Air Baku	WM GKS Plus									
				Pembangunan SPAM Pantura (Kab. Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan)	Perkotaan Malang Dsk, Selingkar Wilis, Madura									
				Pembangunan SPAM Regional Kawasan Rawan Kekeringan	Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan									
					Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang,									
					KEMEN PUPR									

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I							
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
SI - 01 - 02 Penguatan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan di koridor utara, tengah, dan selatan guna mendorong pemerataan pembangunan	Transformasi Sistem Infrastruktur Transportasi Kota	Jaringan Jalan	Peningkatan SPAM Kawasan Desa Kepulauan Sumenep	Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep									
			Peningkatan SPAM Kota Blitar	Kabupaten Sumenep	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kota Batu	Kota Batu	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kabupaten Blitar	Kabupaten Blitar	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kabupaten Magetan	Kabupaten Magetan	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kabupaten Ngawi	Kabupaten Ngawi	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kab. Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Kab.Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	KEMEN PUPR								
			Peningkatan SPAM Mojolagres	WM GKS Plus	KEMEN PUPR								
SI - 01 - 02 Penguatan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan di koridor utara, tengah, dan selatan guna mendorong pemerataan pembangunan	Transformasi Sistem Infrastruktur Transportasi Kota	Sambungan Rumah	Peningkatan Kapasitas Distribusi (SR)	Perkotaan Malang Dsk, Selingkar Wilis, Madura	PEMDA / PUPR								
			Penataan dan Pengaturan Distribusi Air Minum Rumah	Perkotaan Malang Dsk, Selingkar Wilis, Madura	PEMDA								
			Pembangunan Jalan Lingkar Jember	Kabupaten Jember	KEMEN PUPR								
			Pembangunan Jembatan Tambong	Kabupaten Banyuwangi	KEMEN PUPR								
			Integrasi angkutan umum perkotaan	WM GKS Plus & Perkotaan Malang	KEMENHUB								
			Penerapan <i>Integrated Transport System</i> pada Perempatan Jalan Umum	WM GKS Plus & Perkotaan Malang	KEMENHUB								
			Pembangunan Underpass/Flyover	WM GKS Plus & Perkotaan Malang	PEMDA / PUPR								
			Restrukturisasi Jaringan Angkutan Umum Perkotaan	WM GKS Plus & Perkotaan Malang	PEMDA								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Imam Bonjol (Blitar)	Kabupaten Blitar	KEMEN PUPR								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Madiun - Bts. Kota Nganjuk I	Kota Nganjuk	KEMEN PUPR								
SI - 01 - 02 Penguatan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan di koridor utara, tengah, dan selatan guna mendorong pemerataan pembangunan	Transformasi Sistem Infrastruktur Transportasi Kota	Mobilitas	Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kota Wlingi - Bts. Kab. Malang I	Kabupaten Malang	KEMEN PUPR								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Madiun - Bts. Kota Nganjuk II	Kabupaten Madiun, Kota Nganjuk,	KEMEN PUPR								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kota Nganjuk - Kertosono	Kota Nganjuk, Kab. Nganjuk	KEMEN PUPR								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jl. Kenjeran (Surabaya)	Kota Surabaya	KEMEN PUPR								
			Pembangunan perlintasan tidak sebidang (KA) Jalan Bts. Kab Ngawi - Maospati	Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan	KEMEN PUPR								

362

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	TAHAP I					
						2023	2024	2025	2026	2027	2028
S5 - 01 - 03 - 05 Pengembangan Compact City pada kawasan perkotaan prioritas		Infrastruktur	Pembangunan Pengendalian banjir Kali Kemuning	Kabupaten Sampang	KEMEN PUPR						
			Pembangunan Pengendalian banjir Kali Blega	Kabupaten Bangkalan	KEMEN PUPR						
			Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Sidokare dan Sungai Pucang Lamong	Kab. Sidoarjo	KEMEN PUPR						
			Pembangunan Pengendalian Banjir Kali Lamong	Kab. Lamongan	KEMEN PUPR						
			Transisi Energi pada Angkutan Umum	Surabaya, Malang, Lumajang	KEMENHUB						
		Green Transportation	Pengadaan Angkutan Umum	Surabaya, Malang, Lumajang	KEMENHUB						
			Perbaikan Bakar Non Fosil	Surabaya, Malang, Lumajang	PEMDA / PUPR						
			Pembangunan Pengolahan Limbah Terpadu	Surabaya, Malang, Lumajang	PEMDA / PUPR						
			Pembangunan TPS-3R Berbasis Masyarakat	Surabaya, Malang, Lumajang	PEMDA / PUPR						
			Pembangunan RTH Ramah Anak	Surabaya, Malang, Lumajang	PEMDA / PUPR						
	Pengembangan Kawasan Transit (TOD)	Integrasi Multi Moda	Pengembangan Ruang Publik Interaktif	Surabaya, Malang, Lumajang	PEMDA / PUPR						
			Penyediaan Layanan Perpustakaan Keliling	Surabaya, Malang Dsk, BTS, Ijen Dsk	KEMENDIKBUD						
			Pembangunan Pedestrian Ramah Difabel dan Lansia	Surabaya, Malang Dsk, BTS, Ijen Dsk	PEMDA / PUPR						
			Penambahan Jumlah Kereta Antar Perkotaan	WM GKS Plus, Malang Dsk, Ijen Dsk	KEMENHUB						
			Pengembangan Kereta Wisata	Perkotaan Malang	KEMENHUB						
		Angkutan Jalan	Pengembangan Rute Angkutan Terintegrasi Angkutan Rel	Kawasan Ijen dan BTW Dsk	KEMENHUB						
			Pengembangan simpul titik temu antar moda darat	WM GKS Plus, Malang Dsk	KEMENHUB						
			Pembangunan Rusun terintegrasi stasiun	WM GKS Plus, Malang Dsk	KEMENHUB / PUPR						
			Pengembangan Rusun dengan prinsip <i>green building</i>	WM GKS Plus, Malang Dsk	KEMENHUB / PUPR						



Gunung Bromo – KSPN Bromo Tengger Semeru



Taman Nasional Alas Purwo – Kabupaten Banyuwangi



Kampung Jodipan – Kota Malang

BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pada bab ini terkait evaluasi pelaksanaan yaitu terkait kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. RPIW. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen Rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan RPIW merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2 Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan *output* (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
 - Pemantauan 5 (Lima) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - Evaluasi Tahunan (*output* dan *outcome*) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

Evaluasi 5 (Lima) Tahunan (*benefit*, *impact*, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.



www.pu.go.id